LAMPIRAN VII

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL

KEGIATAN TERPADU

PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Fakfak,

Provinsi Papua Barat

Juli 2014

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

DAFTAR ISI

No.	Tanggal	Judul Notulensi
I	28 November 2013	Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau, Ltd.
II	5 Desember 2012	Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd.
III	14 Februari 2014	Notulensi Pembahasan Rencana Kegiatan AMDAL Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau, Ltd.
IV	17 Februari 2014	Berita Acara Musyawarah Sosial Ekonomi Pra-AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
V	18 Februari 2014	Kompilasi Masukan Tertulis Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Dokumen ANDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, oleh BP Berau, Ltd.
VI	14 Maret 2014	Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Rapat Evaluasi Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, oleh BP Berau, Ltd.
VII	21 Maret 2014	Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Rapat Evaluasi Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, oleh BP Berau, Ltd.
VIII	4 Juli 2014	Masukan Tertulis dari Bapedalda Provinsi Papua Barat untuk Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG Di Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh Bp Berau Ltd

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal: 28 November 2013)

RAPAT TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 28 November 2013

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
PAKAR				
A	**Ir. Andojo Wurjanto, M.Sc., Ph.D (Pakar Pelabuhan)**			
1.	Informasi Lokasi, Penyajian Peta untuk Bagian Terminal Khusus. Memadai. Penjelasan mengenai informasi lokasi dan penyajian peta untuk bagian Terminal Khusus disajikan di halaman I-133 s.d. I-177. Tidak ada permintaan perbaikan untuk informasi lokasi dan penyajian peta untuk bagian Terminal Khusus.		Terimakasih untuk masukan yang diberikan.	
2.	Rencana Kegiatan untuk Bagian Terminal Khusus Prosedur pengerukan banyak disebut dalam RKL sebagai bentuk pengelolaan untuk menjamin pengendalian dampak, tapi mekanisme pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan kurang diuraikan dalam rencana kegiatan. Penjelasan yang lebih baik tentang mekanisme pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan dalam rencana kegiatan.	I-144	Metode pekerjaan pengerukan akan ditentukan dan diajukan secara lebih rinci oleh Kontraktor untuk pekerjaan pengerukan berdasarkan persyaratan keselamatan dan dampak lingkungan sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja dan mempertimbangkan peralatan yang mereka miliki. Tangguh LNG akan menetapkan persyaratan yang ketat dan tegas dalam perjanjian kontrak kerja dengan Kontraktor terkait aspek-aspek keselamatan pekerjaan yang dapat meminimalkan dampak lingkungan dari operasi pekerjaan pengerukan termasuk pembuangan material kerukan ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan sesuai dengan AMDAL. Lokasi pembuangan yang direncanakan dalam AMDAL ini adalah sama dengan lokasi sebelumnya yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan RI. Lokasi tersebut ditunjukkan pada dokumen ANDAL Gambar I-49 Potensial Area Pembuangan Material Pengerukan.	**ANDAL I-146**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Untuk memperkirakan dampak dari kegiatan pengerukan terkait dengan rencana kegiatan pengerukan dasar laut (*seabed*) yang nantinya akan dilakukan pada: (i) jalur masuk dan kolam pelabuhan fasilitas BOF, (ii) area pengembangan dermaga combo (*combo dock*) dan (iii) dermaga LNG-kondensat 2, pada tahap perencanaan telah dilakukan studi hidrografi (pemodelan matematis) sehingga dampak (misalnya pengendapan dan erosi) yang mungkin terjadi dapat diperkirakan dan diminimalisir.	
3.	Rona Lingkungan Hidup Terkait dengan aspek kepelabuhanan dan kelautan, data iklim dan kualitas air memadai, namun penyajian kurang cermat. Misalnya, kualitas air nearshore tidak menyebut nomor tabel dan gambar secara tepat. Narasi untuk offshore malah diawali dengan kata nearshore dengan penyeburan nomor tabel dan gambar yang tidak tepat pula. Penempatan gambar tidak cermat dimana keterangan (*caption*) gambar terpisah dari bagian gambar yang diterangkannya. Perbaikan narasi, penyebutan nomor tabel dan gambar yang tepat, dan penyajian gambar yang lebih cermat. Ada data yang tidak memadai, yaitu ▪ Data gelombang sangat terbatas padahal komponen gelombang penting untuk kepelabuhanan dan kelautan. Hanya disebutkan data gelombang umum dan terbatas untuk seluruh Teluk Bintuni. Diketahui ada kala gelombang besar yang menimbulkan masalah di Combo Dock; hal ini tidak tercermin dalam data yang disajikan di butir 2.1.10.2 di halaman II-158. ▪ Lokasi Ocean Tower yang disebut sebagai lokasi acuan data pang surut dan arus, harus dicari dimana?	II-109, II – 120, II - 127 II-158 (butir 2.1.10.2)	Terima kasih atas masukannya. Dokumen ANDAL akan diperbaiki sesuai arahan ini. Narasi penulisan bagian *offshore* telah diperbaiki di dalam dokumen ANDAL (Hal II-124) Penulisan nomor tabel dan gambar juga sudah diperbaiki didalam dokumen ANDAL (Hal II-108 s/d II-132) Penempatan gambar dan keterangan (*caption*) gambar telah diperbaiki untuk keseluruhan dokumen ini. Pengaruh gelombang terhadap *Combo Dock* merupakan aspek teknis konstruksi dan tidak terkait dengan dampak gelombang terhadap lingkungan. Data yang disajikan dari sisi dokumen ANDAL sudah memadai. Lokasi *ocean tower* dapat dilihat pada ANDAL Bab 2 Rona Lingkungan Sub-bab 2.1.10.3 Pasang Surut Halaman II-163. Ocean Tower berlokasi di LNG Jetty pada kedalaman -8,4 m LAT. Gambar lokasi ocean tower telah ditambahkan pada dokumen ANDAL Peta II-15.	**ANDAL II-124** **ANDAL II-108 s / d II-132** **ANDAL II-161** **Peta II-15 Lokasi *Ocean Tower* ANDAL II-163**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	▪ Data pasang surut (di butir 2.1.10.3 di halaman II-158 s.d. II-159) kurang komprehensif mengingat bahwa Teluk Bintuni sangat luas dan karakter pasutnya bisa berbeda di tempat yang berbeda. Dari pemodelan mestinya bisa diberikan karakter yang lebih komprehensif. Lihat contohnya, karakter salinitas bisa ditunjukkan bervariasi dalam ruang. Penambahan data gelombang dan pasang surut yang lebih komprehensif sesuai tanggapan di kolom sebelah kiri.	II-158 sd II – 159 (butir 2.1.10.3)	Pasang surut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Sesuai dengan Wyrtki (1961), tipe pasang surut campuran condong harian ganda tersebar luas di Pantai Selatan Jawa dan Indonesia Bagian Timur (termasuk Teluk Bintuni). Data pasang surut yang telah disajikan pada Hal II-161 sampai dengan II-162 telah memadai untuk dokumen AMDAL karena tidak ada kegiatan yang direncanakan dan berpengaruh terhadap pasang surut air laut.	**ANDAL II-161 s / d II-162**
4.	Evaluasi Dampak Penting Terkait aspek kepelabuhanan dan kelautan, diases item sebagai berikut dalam draf ANDAL:			
	▪ Dampak terhadap pola arus: Dinyatakan diabaikan (halaman III-361). Narasi kurang mendukung padahal dengan hasil simulasi before-after dampak terhadap pola arus dengan mudah ditunjukkan secara kuantitatif. Dukung pernyataan dengan hasil simulasi pola arus before-after.	III-361	Mengingat tipe *jetty* berupa *open pile* sehingga arus tetap dapat lewat di antara celah-celah pile tersebut. Berbeda dengan tipe *jetty* yang masif yang dapat menyebabkan perubahan pola arus mikro	**ANDAL III-362 s / d III-363**
	▪ Dampak terhadap perubahan garis pantai: Dinyatatakan minor (halaman III-364) dengan metoda studi pengamatan visual. Hal ini kurang mendukung karena hasil pengamatan visualnya tidak dinyatakan dalam rona. Informasi lain menunjukkan bahwa bahkan pantai berbakau pun tergerus di kawasan ini. Ini kesempatan bagi Pemrakarsa untuk menunjukkan proses alami dan menyatakan disclaimer. Perlu dokumentasi yang kuat untuk sampai ke pernyataan dampak minor dengan metoda pengataman visual. Diminta sesuai tanggapan di kolom sebelah kiri.	III-364	Dengan kondisi tinggi gelombang yang kecil dan tipe *jetty open pile*, hal ini tidak banyak mempengaruhi pola arus (*long shore current*) di sepanjang pantai di sekitar *jetty* sehingga sedimen masih dapat terus bergerak secara alami. Disamping itu pada saat surut daerah sekitar *jetty* berupa *mudflat* dapat mencapai sekitar 600 – 1000 m dari garis pantai dengan formasi mangrove. Selain pengamatan visual untuk studi AMDAL ini, Tangguh LNG juga telah mendapatkan peta satelit untuk daerah sekitar lokasi Tangguh LNG selama beberapa tahun sebelumnya. Peta satelit ini menunjukkan proses alami erosi sepanjang garis pantai perairan teluk Bintuni termasuk pada daerah yang jauh dari lokasi Tangguh LNG.	**ANDAL III-365 s / d III-366**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	▪ Dampak terhadap TSS Dinyatakan minor (halaman III-370) dengan hasil simulasi yang notasinya tidak terbaca. Penyajian data pendukung kurang komprehensif. Diminta untuk menyajikan hasil simulasi TSS akibat kegiatan pengerukan dan hasil pengerukan sebagai berkut: a. Sebaran terjauh disajikan lebih legible (dapat dibaca). b. Seri waktu kenaikan dan penurunan kembali TSS di transek yang representatif dalam skala waktu kegiatan (berulang dalam skala waktu hari). Diminta sesuai tanggapan di kolom sebelah kiri. ▪ Penurunan kualitas air laut akibat kemungkinan limbah kegiatan kepelabuhanan dibahas di bagian lain, terpadu sebagai penanganan limbah kawasan, diacu ke butir 2.1.3.3 - Kegiatan Kilang yang tidak ada dalam dokumen. a. Penyebutan acuan ke bagian lain dokumen agar akurat. b. Agar dipastikan materi yang diacu itu benar-benar ada dalam dokumen.	III-370	a. Notasi pada gambar III-61 s/d III-64 telah diperbesar pada sudut kiri atas gambar. b. TSS yang disimulasikan adalah pembuangan hasil pengerukan dan sudah mempertimbangkan skala waktu dan lokasi. Hasil selengkapnya dari simulasi pembuangan hasil pengerukan disampaikan pada lampiran IV point 4.2. Penulisan butir 2.1.3.3 - Kegiatan Kilang telah diperbaiki menjadi butir 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG.	**ANDAL III-368 s / d III-371**
5.	RKL dan RPL Untuk bagian Terminal Khusus, akibat asesmen dampak yang menyatakan "diabaikan" dan "minor", maka nyaris tidak ada item terkait di RKL dan RPL. Hal ini menimbulkan masalah: ada potensi dampak yang diklaim dalam dokumen ANDAL sebagai "diabaikan" dan "minor" berbasis hasil simulasi komputer, lalu tidak dilakukan pemantauan dan pengelolaan. Hasil simulasi komputer belum dapat ditempakan sedemikian menentukan, namun kegiatan pemantauan dan pengelolaan nya juga tidak seberat jika asesmen dampaknya mayor atau kritis. Perlu keseimbangan.		RKL-RPL mengacu pada Peraturan MenLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dampak yang masuk dalam kategori "minor" dan "diabaikan" merupakan Dampak Tidak Penting namun tetap dapat dikelola dan dipantau seperti tercantum dalam dokumen RKL-RPL (Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola) serta pendekatan Pengelolan Lingkungan maupun Sosial (RKL-RPL Lampiran I dan Lampiran III). Masukan diterima. Sesuai dengan table IV.2 di dokumen ANDAL, dampak lingkungan yang termasuk dalam kategori diabaikan dan minor setelah melalui kajian adalah dampak perubahan pola arus, abrasi garis pantai, TSS dari pengerukan	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Diusulkan untuk tetap ada item di dokumen RPL dan RKL terkait asesmen "diabaikan" dan "minor". Lihat per item di bawah.		dan pembuangan material keruk, planton dari pengerukan, dan benthos dari pengerukan. Dampak tersebut dibahas di dokumen RKL-RPL dalam sub bab 2.4 dan 3.4. Dampak yang tidak dibahas di dokumen RKL RPL adalah dampak perubahan pola arus. Hal ini selaras dengan masukkan di no A.6	**RKL-RPL II-58 s / d II-64** **RKL-RPL III-48 s / d III-59**
6.	Dampak terhadap pola arus: Oke pola arus tidak usah dipantau. Model yang baik dapat dipercaya akurat mensimulasi karakter hidrodinamika kawasan. Tidak diusulkan item RPL RKL untuk pola arus.		Setuju untuk tidak dikelola dan dipantau	
7.	Dampak terhadap perubahan garis pantai: ▪ Diusulkan dalam RPL: dua (2) kali dalam lima tahun saja saja dilakukan pengukuran garis pantai. ▪ Diusulkan dalam RKL: akan diambil tindakan korektif jika didapati abrasi yang tidak sesuai perkiraan dalam dokumen ANDAL (asesmen minor). Diusulkan sesuai tanggapan di kolom sebelah kiri.		• Masukkan diterima. Revisi di dalam dokumen RPL telah dilakukan di Bab 3.4 • Masukan diterima. Revisi di dalam dokumen RKL telah dilakukan di Bab 2.4	**RKL-RPL III-54** **RKL-RPL II-64**
8.	Dampak terhadap TSS dari kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan: ▪ Pemantauan TSS dilakukan hanya pada masa pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan. Pada masa yang lain tidak perlu dilakukan pemantauan TSS (yang terkait pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan). ▪ Tapi Pemantauan TSS dalam masa pengerukan tidak bisa dilakukan hanya sekali (seperti sekarang draf RPL) karena peristiwa fisik kenaikan TSS akibat pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan berskala waktu pendek. ▪ Diusulkan pemantauan TSS dalam masa pengerukan tiga kali dalam skala waktu yang diindikasikan dalam simulasi penyebaran TSS (jam, hari?) di lokasi pengerukan dan pembuangan dengan frekuensi 7 hari sekali selama masa pengerukan.		• Dokumen di RPL Terminal Khusus telah direvisi sesuai dengan masukan yang diberikan pada Bab 3.4 • Masukan diterima. Dokumen RPL Terminal Khusus telah direvisi pada Bab 3.4 • Masukkan diterima. Dokumen RPL Terminal Khusus telah direvisi pada Bab 3.4	**RKL-RPL III-48** **RKL-RPL III-48** **RKL-RPL III-48**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	▪ Tidak dipahami apa artinya pemeriksaan catatan 1 kali 3 bulan (dalam draf RPL, halaman III-49 butir 2). ▪ Diusulkan untuk dokumen RKL: a. Memastikan bahwa prosedur keruk dan buang dilaksanakan sesuai dengan skenario yang ditelaah dalam dokumen ANDAL. b. Melakukan tindakan korektif jika didapati dari hasil pemantauan bahwa sebaran TSS tidak sesuai dengan simulasi "aman" yang didimpulkan dalam dokumen ANDAL. Diusulkan sesuai tanggapan di kolom sebelah kiri.		• Pemeriksaan catatan yang dimaksud adalah pemeriksaan catatan dari kegiatan pengerukan yang berisi informasi tentang lokasi dan volume kegiatan pengerukan dan pembuangan material keruk. Telah dilakukan penambahan kalimat di Bab 3.4 untuk memperjelas arti dari pemeriksaan catatan • Masukan diterima. Prosedur keruk dan pembuangan material hasil pengerukan akan disesuaikan dengan skenario di ANDAL. Revisi dilakukan di Bab 2.4 • Masukan diterima. Revisi dilakukan di Bab 2.4	**RKL-RPL III-49** **RKL-RPL II-54** **RKL-RPL II-54 dan II-64**
B	**Prof. Dr. Ir. Kardono (Pakar Kualitas Udara dan Kebisingan)**			
1.	UMUM Dokumen ini memuat 4 kegiatan, yaitu: eksploitasi gas, transmisi gas, kilang LNG dan fasilitas terminal khusus. Dalam KA seingat saya ada kegiataan lapangan terbang tetapi di dokumen Andal ini tidak ada? Apa termasuk "Kegiatan Fasilitas Terminal Khusus"?		Berdasarkan berbagai pertimbangan, rencana pembangunan Bandar Udara Khusus tidak jadi dimasukkan dalam lingkup studi AMDAL (KA ANDAL, ANDAL, RK-RPL) untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG saat ini. Dalam dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH berdasarkan Surat Keputusan Deputi MenLH No 30 Tahun 2013, kegiatan Bandar Udara Khusus tidak dikaji dan hanya ada empat kegiatan yang dikaji dalam AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, yaitu Eksploitasi Gas, Transmisi Gas, Kilang LNG dan Terminal Khusus.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Apa maksudnya pernyataan bahwa upaya-upaya pengelolaan emisi CO_2 untuk mengurangi gas rumah kaca terhadap lingkungn akan dikaji lebih lanjut? Apakah berarti tidak dikaji dalam Amdal ini? Bukankah CO_2 yang akan dilepas mencapai hampir 15%? CO_2 yang dikeluarkan dari proses kilang ini selama 1 tahun cukup besar, yaitu mencapai 6 Juta Ton (lihat halaman I-93).	I-87	Emisi CO_2 dari kegiatan operasi Tangguh LNG berasal dari 1. Kegiatan operasi yaitu konsumsi bahan bakar gas bertekanan rendah dan tinggi, pembakaran gas suar bakar, serta konsumsi bahan bakar solar, bensin dan bahan bakar pesawat (avtur), walaupun kontribusinya sangat kecil (kurang dari 1%). 2. CO_2 yang berasal dari feedgas. CO_2 yang dihasilkan di kegiatan operasi Tangguh LNG berasal dari feed gas dari reservoir yang mengandung antara 10 – 15% CO_2. Semakin tinggi tingkat produksi LNG, semakin besar tingkat CO_2 yang dihasilkan. Upaya pengelolaan emisi CO_2 telah dikaji dalam AMDAL ini. Untuk CO_2 yang dihasilkan dari kegiatan operasi Kilang LNG, Tangguh LNG telah melakukan studi untuk mengevaluasi beberapa alternatif untuk mengurangi secara signifikan emisi GHG yang dihasilkan melalui perbaikan efisiensi energi, pemanfaatan panas buang, dan pemanfaatan kembali hidrokarbon yang biasanya dibuang ke udara untuk diproses kembali di kilang. Untuk emisi CO_2 yang berasal dari feedgas, pendekatan yang sama dengan AMDAL 2002 akan diterapkan dan Tangguh LNG akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terkait mengenai pengelolaan emisi CO_2 di Indonesia (Lampiran 1 RKL-RPL 3.3. Emisi Gas Rumah Kaca)	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 10**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
3.	▪ Pengalaman *flaring* sebaiknya pula diberikan data-data emisi dan limbah lain yang dikeluarkan, bukan hanya gas yang digunakan tetapi juga emisi, misalnya SO_2, total reduced sulfur (TRS), NOx, H-C,dan lain-lain. ▪ Demikian juga untuk turbine gas dan bolier.	I-110	Pemantauan emisi untuk flaring/suar bakar mengacu pada PerMen LH no 13 tahun 2009 terkait parameter opasitas. Evaluasi dampak parameter opasitas sudah mempertimbangkan pengalaman flaring dari operasi Kilang 1 dan 2 saat ini yang dapat dilihat pada Bab 3.3.1.2 tentang Peningkatan Opasitas, termasuk hasil pemantauan opasitas dari kegiatan operasi saat ini yang selama ini selalu memenuhi baku mutu yang berlaku. Emisi suar bakar, gas turbin dan boiler akan dipantau secara rutin (Lampiran 2 RKL-RPL, Tabel 1 Baku Mutu Emisi Dari Cerobong Suar Bakar, Turbin Gas, Boiler, RGH, Insinerator Gas Kecut Dan Generator). Parameter yang dipantau antara lain opasitas untuk suar bakar; NOx, SO_2, opasitas, total partikulat dan H_2S untuk boiler dan NOx, SO_2, total partikulat dan H_2S untuk turbin gas	**ANDAL III-121 s / d III-124** **Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 1**
4.	1.3.3 Kegiatan Kilang a. Mengapa dalam Tabel I-31 halaman I-188, peningkatan konsentrasi H_2S tidak berdampak penting hipotetik dalam proses flaring, pembangkit listrik, boiler dan terutama incinerator gas kecut? Jika alasannya H_2S (sebenarnya semua gas sulfur tereduksi) setelah dibakar akan menjadi SO_2, mengapa tidak ada dampak SO_2 nya? b. Untuk kualitas udara terutama SO_2, NOx, H-C serta polutan sekunder O_3 menurut saya akan berdampak penting hipotetik. Demikian pula, untuk dampak peningkatan suhu akan mempengaruhi iklim mikro di sana karena akan meningkat. c. Bagaimana dengan kemungkinan emisi (bisa saja lepas tak sengaja, bocor, dan sebagainya) dari proses stripping sulfur?	I-186	Feed gas Tangguh LNG hanya mengandung 10 ppm H_2S (Tabel I-12 Kandungan Senyawa Ikutan dalam Pasokan Gas) sehingga H_2S tidak termasuk dampak penting hipotetik. Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan operasi saat ini selama tiga tahun terakhir (2010-2013), kadar SO_2 maksimum dari unit AGI adalah sebesar 34 mg/m^3 jauh di bawah baku mutu berdasarkan PerMen LH no 19 tahun 2009 sebesar 2600 mg/m^3. Rona lingkungan SO_2, NOx, HC dan O_3 termasuk dalam parameter kualitas udara ambien dalam Tabel II-4 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Musim Kemarau dan Tabel II-5 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Musim Hujan di mana nilainya umumnya berada jauh di bawah baku mutu yang berlaku (PP 41 tahun 1999). Parameter tersebut juga akan dipantau secara rutin (Lampiran 2 RKL-RPL, Tabel 5 Baku Mutu Udara Ambien)	**ANDAL I-85** **ANDAL II-19 s / d II-20** **Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 4**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
5.	▪ Batas ekologis nampaknya terlalu kualitatif dasarnya dan hampir mengikuti batas proyek. Transportasi emisi melalui udara dan limbah cair melalui air permukaan (run off, sungai, laut) dapat diestimasi akan lebih meluas.	I-196	▪ Batas Ekologis secara rinci dikemukakan pada dokumen ANDAL Halaman I-203 dan dituangkan pada Peta I-6 untuk Batas Ekologi (Kualitas Udara), Peta I-7 untuk Batas Ekologi (Kebisingan), Peta I-8 untuk Batas Ekologi (Biota Perairan dan Kualitas Air Laut), serta Peta I-9 untuk Batas Ekologi (Flora dan Fauna Terestrial). Jadi tidak benar bahwa batas ekologi sepenuhnya mengikuti batas proyek. Batas ekologi dibuat sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan eksploitasi gas, transmisi gas, Kilang LNG dan fasilitas terminal khusus. Batas wilayah studi AMDAL ini termasuk batas ekologinya sudah sesuai dengan KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH pada 24 Juli 2013.	**ANDAL I-203 s / d I-207**
	▪ Emisi ditentukan arah dan kecepatan angin. Disebutkan arahnya adalah barat laut dan tenggara, tetapi berapa kecepatan anginnya dan juga ketidakstabilan atmosfernya sehingga berapa jauh mengarah ke barat laut dan berapa jauh mengarah ke tenggara. Untuk batas wilayah ekologis harus diambil kecepatan maksimum dan ketidaksatabilan atmosfer yang tertinggi. Melihat Peta I-8 nampaknya arah angin yang disebutkan terebut tidak nampak.		▪ Peta I-6 terkait dengan batas ekologi kualitas udara telah diperbaiki dengan mempertimbangkan arah dan kecepatan angin dominan tahunan. Penjelasan mengenai arah dan kecepatan angin dominan tahunan serta stabilitas atmosfer dikemukakan pada Halaman II-10 sampai dengan II-12.	**ANDAL I-204** **ANDAL II-10 s / d II-12**
6.	Tabel II-4 ▪ Mengapa data CO, ada nilai yang 573, 687, 1.150 tetapi nilai /angka yang lebih besar ada tanda "<", misalnya <1.140? Apakah dibara "satu koma satu empat nol"? ▪ Demikian pula NO_2, nilai 4 dan <5! Apakah operator dan alat yang berbeda? ▪ Terlihat juga di Tabel II-5	II-19	Penulisan angka dan desimal pada tabel telah diperbaiki, seharusnya "< 1.140" (seribu seratus empat puluh). Limit deteksi alat yang digunakan adalah 1.140 (sebagai batas bawah angka yang dapat dipercaya) oleh karena itu nilai-nilai yang diperoleh apabila lebih kecil dari 1.140 telah diubah menjadi <1.140. Demikian pula dengan NO_2, limit deteksi alat adalah 5 (sebagai batas bawah angka yang dapat dipercaya) oleh karena itu nilai-nilai yang diperoleh apabila lebih kecil dari 5 telah diubah menjadi <5. Penulisan angka dan desimal telah diperbaiki pada tabel II-4 dan II-5.	**ANDAL II-19 s / d II-20**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
7.	▪ Data kebisingan menunjukkan hampir semua di atas baku mutu untuk permukiman (56 dB) dan beberpa diatas baku mutu daerah industry (70 dB). ▪ Kebisingan bisa dipastikan menjadi dampak penting hipotetik karena kenaikan penyebarannya adalah eksponensial sehingga harus dikelola dengan baik.	II-25	Angka 56 dB masih memenuhi baku mutu sesuai Kepmen LH No 48 tahun 1996 (55 dB dengan toleransi + 3 dB). Kebisingan telah ditetapkan menjadi Dampak Penting Hipotetik berupa "Kenaikan Tingkat Kebisingan" dan telah dilakukan evaluasi dampak penting pada tahap kegiatan Eksploitasi Gas dan kegiatan Kilang LNG. Rencana pengelolaan dampak Kenaikan Tingkat Kebisingan telah dikemukakan didalam dokumen RKL dan RPL Untuk Kegiatan Transmisi Gas dapat dilihat dalam RKL hal.II-17, RPL hal. III-18, Kegiatan Kilang LNG dalam RKL hal II-24, RPL hal III-26 dan III-36, Kegiatan Terminal Khusus RKL hal. II-55, RPL Hal III-48.	**ANDAL II-23 s / d II-25** **RKL-RPL II-17, II-24, II-55, III-18, III-26, III-36, III-48**
8.	Dampak kualitas udara dari kegiatan kilang LNG a. Perlu dimasukkan juga dampak kenaikan suhu udara dan perlu dievaluasi. Potensi dampak ini akan sangat massive di kemudian hari setelah operasi full capacity. Hal ini akan mempengaruhi iklim mikro dan berdampak pada kesehatan. b. Saya meyakini dampak polusi udara primer misal SO_2, mungkin NOx dan HC akan penting dari kegiatan ini khususnya kilangnya. Polutan sekundernya adalah terbentuknya ozone akibat reaksi NOx, HC, dan logam berat sebagai katalis di udara ambien dalam kondisi suhu tinggi akibat kenaikan suhu ambien dari proses ini terutama pada panjang gelombang sinar matahari pendek siang hari. Ini harus diwaspadai untuk kegiatan sebesat gas Tangguh ini.	III-121 dan seterusnya	a. Operasi kilang LNG tidak menimbulkan kenaikan suhu. Berdasarkan hasil pelingkupan di dalam dokumen Kerangka Acuan Andal yang telah disepakati sebelumnya, bahwa kenaikan suhu tidak menjadi DPH. Sehingga dampak kenaikan suhu tidak dikaji dalam ANDAL. b. Hasil pemantauan emisi secara berkala menunjukkan SOx, NOx dan HC selalu terdeteksi dibawah NAB baku mutu emisi yang berlaku. Sehingga dengan demikian berdasarkan hasil pelingkupan pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH SOx, NOx dan HC tidak menjadi DPH oleh karenanya tidak dikaji lebih lanjut dalam ANDAL. Di samping itu hasil pemodelan emisi udara (seperti tercantum pada Lampiran IV.3 Pemodelan Dispersi Pencemar Udara dari Kegiatan Operasional Tangguh LNG) menunjukkan bahwa peningkatan SOx dan NOx pada udara ambien tergolong sangat rendah.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	c. Dampak akibat CO_2 bukanlah dampak kesehatan karena CO_2 bukanlah polutan. Evaluasi dengan menggunakan Tabel III-50 kurang tepat karena cara itu didedikasikan untuk polutan. Analisisnya mengacu pada komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi CO_2 dari kontribusinya oleh sector tambang atau energi.		c. Format untuk evaluasi dampak digunakan secara konsisten dan seragam terhadap semua dampak yang diidentifikasi sebagai DPH, baik terhadap lingkungan, sosial-ekonomi, budaya maupun kesehatan masyarakat. Memang benar CO_2 bukan merupakan polutan, dalam prakiraan dan evaluasi dampak telah dikemukakan kontribusi emisi CO_2 ke atmosfer oleh kegiatan Tangguh LNG saat ini dan kelak setelah Kilang 3 dan 4 beroperasi. Kontribusi emisi CO_2 oleh kegiatan Tangguh LNG adalah 0,05% terhadap total emisi CO_2 secara global.	
9.	▪ Dampak holistic memang melihat semua sumber dampak tetapi harus dimatriks kan dengan waktu dan tempat yang sama. Kegiatan yang terjadi pada waktu atau tempat yang berbeda akan berdampak tidak holistic pada lokasi yang tidak merupakan intersection dari kegiatan-kegiatan tersebut. ▪ Untuk kualitas udara perlu dilakukan analisis dampak holistic ini pada cahaya, suhu dan polutan serta kebisingan. Untuk CO_2 karena nilai yang penting adalah total per tahun misalnya, maka penambahan dari berbagai kegiatan cukup memberikan gambaran dan referensinya buan baku mutu tetapi komitmen pengurangan GRK pemerintah Indonesia.	IV-4	Dampak holistik adalah dampak yang berasal dari lebih dari satu kegiatan atau berasal dari berbagai dampak turunan terhadap reseptor (manusia atau satwa) atau sumberdaya (komponen lingkungan geofisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya) pada ruang yang sama dan waktu berbeda; atau pada ruang yang berbeda dan waktu yang sama; atau pada ruang dan waktu yang berbeda. Bagan alir dampak **Gambar IV-1, Gambar IV-2, Gambar IV-3 dan Gambar IV-4** serta **Tabel IV-3**, menunjukkan keterkaitan antara satu dampak penting dengan dampak penting lainnya secara holistik. Penjelasan mengenai dampak holistik telah dikemukakan pada Halaman IV-17 sampai dengan Halaman IV-22.	**ANDAL Hal IV-17 sampai dengan hal IV-22**
10.	**Penurunan kualitas udara tahap operasi** ▪ Pengelolaan CO_2 memang perlu tetapi sebaiknya bukan dalam kategori penurunan kualitas udara. ▪ Cara pengelolaan CO_2 seperti yang tertulis itu tidak tepat dan tidak akan mengurangi CO_2 yang keluar dari proses ini. ▪ Seharusnya apa yang dilakukan dalam pengurangan CO_2 yang lepas ke atmosfer, misalnya menangkap CO_2 dan menginjeksikan ke formasi geologi di sumur bekas, atau menyerapnya secara biologi antara lain menanam pohon atau mengunakan reactor mikroalga, dan sebagainya.	RKL II-31	CO_2 yang dihasilkan di kegiatan operasi Tangguh LNG berasal dari feed gas dari reservoir yang mengandung antara 10 – 15% CO_2. Semakin tinggi tingkat produksi LNG, semakin besar tingkat CO_2 yang dihasilkan. Tangguh LNG telah melakukan studi untuk mengevaluasi beberapa alternatif untuk mengurangi secara signifikan emisi GHG yang dihasilkan dari pengoperasian kilang LNG, melalui perbaikan efisiensi energi, pemanfaatan panas buang, dan pemanfaatan kembali hidrokarbon yang biasanya dibuang ke udara untuk diproses kembali di kilang.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 10**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			(Lampiran 1 RKL-RPL 3.3. Emisi Gas Rumah Kaca)	
11.	▪ Pemantuan kualitas udara untuk semua kegiatan, sebaiknya ditambahkan parameter O_3. ▪ Untuk emisi di incinerator limbah B3 harap disebutkan paremeter emisi yang harus dipantau secara rutin sesuai dengan Kep Ka Bapedal No 3/1995	RPL III-36	• Parameter O_3 termasuk dalam parameter yang dipantau pada kualitas udara ambien (Lampiran 2 RKL-RPL, Tabel 5 Baku Mutu Udara Ambien) • Emisi insinerator Limbah B3 telah memasukan parameter emisi yang harus dipantau secara rutin sesuai dengan Kep Ka Bapedal No 3/1995 (Lampiran 2 RKL-RPL, Tabel 3 Baku Mutu Emisi dari Insinerator Limbah B3)	**Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 4** **Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 3**
C	**Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto (Pakar Migas)**			
1.	Karena tanggapan saya pada rapat ANDAL sebelumnya tidak ditanggapi (lihat tanggap pada 25 Februari 2013) dimana permasalahan utamanya adalah kejelasan Kilang LNG		Kilang LNG 4 dan fasilitas pendukungnya rencananya akan dibangun pada tahap pengembangan selanjutnya. Namun demikian perkiraan dampak telah dapat dilakukan karena desainnya akan menggunakan standar yang sama dengan pembangunan kilang LNG 3 pada tahap awal. Selain itu, rencana lokasi Kilang LNG 4 adalah di dalam area Tangguh LNG saat ini.	
2.	Deskripsi kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi serta pasca operasi terutama prakiraan tenaga kerja, dan potensi limbah cair, gas, dan padat, dan lain-lain menjadi tidak jelas jika lingkupnya tidak jelas juga.		Lingkup studi pada AMDAL ini sudah dijelaskan, secara rinci pada Bab 1, sub bagian : - 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas - 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas - 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG - 1.2.4 Fasilitas Terminal Khusus Kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi termasuk tenaga kerja dan potensi limbah sudah memperhitungkan keseluruhan lingkup studi AMDAL ini, yaitu tahap pengembangan awal dan pengembangan selanjutnya. Demikian juga dengan analisa dampak dan rencana pengelolaannya.	**ANDALI-9** **ANDAL I-46** **ANDAL I-84** **ANDAL I-134**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
3.	Gambar 2-11 akan bisa ditentukan besarannya dengan pasti jika lingkup sudah pasti.		Gambar 2-11 yang dimaksud sepertinya mengacu pada dokumen Kerangka Acuan, yaitu gambar profil produksi gas 2 kilang LNG dan pengembangan 3 kilang LNG. Profil produksi dengan pengembangan kilang 4 akan proporsional karena kapasitas produksinya sama (3,8 MTPA).	
4.	Identifikasi dampak potensial belum berdasarkan analisis kuantitatif, sebaiknya berdasarkan analisis neraca bahan (gas, cair dan padat) yang terlibat dalam kegiatan pengeboran sumur gas, pemipaan gas, dan kilang LNG serta logistik dengan lingkup yang jelas pula.		Identifikasi dampak potensial dilakukan menggunakan matriks interaksi antara rencana kegiatan dan komponen lingkungan, selanjutnya dilakukan evaluasi dampak potensial yang sedapat mungkin dilakukan berdasarkan analisis secara kuantitatif untuk menentukan dampak penting hipotetik (DPH). Ini merupakan bagian dari proses pelingkupan yang telah dituangkan dalam KA-ANDAL yang telah disepakati dari KLH.	
5.	Identifikasi dampak potensial belum memperlihatkan dampak spesifik terkait dengan penanganan LNG yang bersuhu kriogenetik (-160^{o}C) terutama yang terkait emisi termal terutama di kilang LNG, *storage* dan LNG tangker, terutama terkait dengan biota laut dan *safety*.		Pelepasan emisi thermal ke atmosfir dari tanki penyimpanan sangat dihindari karena itu akan mengakibatkan kehilangan produk LNG melaui LNG yang menguap, tempat penyimpanan pada LNG tanker didesain dengan insulasi thermal yang cukup memadai untuk mengurangi penguapan LNG.	
6.	Perlu dibahas analisis resiko yang terkait dengan kemungkinan *spills* atau *leak* LNG yang berasal dari kilang LNG, LNG *storage* dan LNG tanker dikarenakan terkait dengan resiko yang mungkin terjadi seperti ledakan dan kebakaran, sehingga perlu dievaluasi LNG *vapor dispersion* dan *thermal radiation* yang terkait dengan *safe distance* atau *exclusion zones*.		Sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU 32/2009 Pasal 1 Ayat 11) terkait AMDAL, studi AMDAL dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kegiatan operasi pada kondisi normal. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP – *Emergency Response Plan*) untuk kegiatan saat ini telah tersedia sebagai dokumen yang terpisah dari AMDAL. ERP ini akan diperbaharui untuk kegiatan pengembangan Tangguh LNG	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
7.	Perlu penjelasan yang memadahi tentang aspek LNG properties dan aspek potential hazard (*explotion, vapor clouds, rollover*, dan lain-lain). Disamping itu adanya penjelasan tentang sistem operasi untuk mencegah dan mitigasi *hazards* tersebut.		Sifat LNG: Berat Jenis : 435,5 kg/m^3 Titik nyala : 650 – 750 degC Jenis: HHV: 24.000 btu/lb LHV: 21.520 btu/lb *Design Hazard Management Implementation Plan* (DHMIP) akan diterapkan dalam mendesain fasilitas Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Tujuan dari DHMIP ini adalah untuk menjelaskan rencana pelaksanaan *Design Hazard Management* (DHM) atau Pengelolaan Bahaya Desain untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG. DHM merupakan proses identifikasi, evaluasi dan pengelolaan efektif dari bahaya yang mungkin muncul selama pengoperasian fasilitas LNG yang didesain, melalui eliminasi sistematis atau pengelolaan bahaya tersebut selama perencanaan dan pelaksanaan proyek. Rencana rinci ini menunjukkan bagaimana tim proyek mengidentifikasi konsep pengembangan yang terbaik untuk mengkombinasikan *Inherently Safer Design* (ISD) untuk mengeliminasi risiko dan menambahkan perlindungan untuk memitigasi risiko *process safety*. Dasar dari proses pengelolaan bahaya desain yang diadopsi untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut : • Pemenuhan terhadap peraturan Indonesia yang terkait, • Sesuai dengan standard dan praktek-praktek yang di tetapkan oleh BP (*BP Group Practices*) Proyek akan mencapai hal tersebut melalui aplikasi proses pengelolaan bahaya desain secara menyeluruh.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
D	**Dr. Ir. Subandono, M.Eng (Pakar Kelautan)**			
1.	Mohon model matemata hidrodinamika pola arus dikalibrasi dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan.	II-162 sd II-167	Model hidrodinamika pola arus telah dikalibrasi (verifikasi) dengan data hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar dibawah (belah ketupat/biru: arus pengukuran; bujur sangkar/red: arus model). 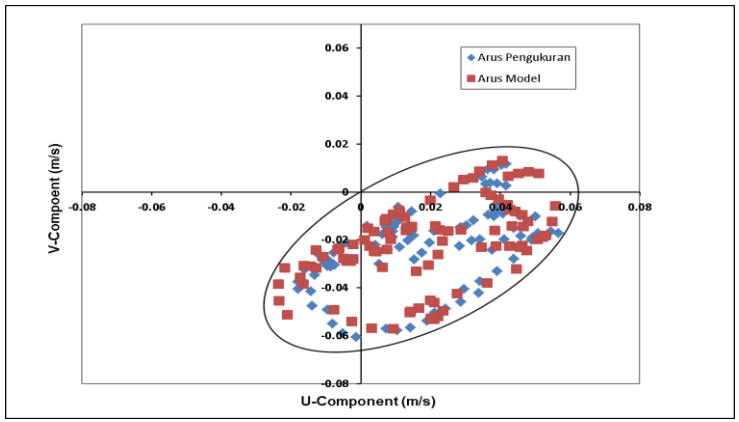 Bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dalam waktu yang lama (Gambar II-74, halaman II-164) hasilnya memiliki kemiripan yang tinggi.	**Lampiran IV.2 – Pemodelan Hidrodinamik**
2.	• Mohon model simulasi sebaran padatan tersuspensi menggunakan pola arus hasil model yang telah dilakukan pada halaman II-162 sd II-167. Menurut pengamatan kami model yang digunakan untuk simulasi arus (menggunakan Mike2) berbeda dengan model untuk simulasi sebaran padatan tersuspensi. Harusnya model simulasi sebaran padatan tersuspensi jga menggunakan Mike21. • Demikian juga untuk simulasi penurunan kandungan oksigen (Halaman III-84 sd III-90) dan simulasi dampak pembuangan air limbah (Halaman III-209 sd III-111) serta simulasi dampak tingkat sedimentasi (Halaman III-390).	III-12 sd III-17	• Model simulasi sebaran padatan tersuspensi, simulasi penurunan kandungan oksigen, simulasi pembuangan air limbah dan simulasi tingkat sedimentasi menggunakan data primer dan sekunder yang terdapat pada dokumen ANDALSub Bab 2.1.10.4 Arus. • Dalam KA ANDAL (Sub Bab 3.2.1.6), yang telah memperoleh persetujuan dari KLH dengan Surat Keputusan No. 30 Tahun 2013, dikemukakan secara rinci model-model yang digunakan untuk prakiraan dampak terhadap kualitas air laut sebagai berikut: ➢ Modeling air buangan dari proses desalinasi, limbah	**ANDAL: Sub-bab 2.1.10.4 Halaman II-164 s/d II-171** **KA: Sub-bab 3.2.1.6 Halaman 3-46 s/d 3-51**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	(Mohon konsisten dalam penggunaan model antara model simulasi pola arus dan model simulasi sebaran padatan tersuspensi		domestik dan air terproduksi menggunakan Modul CORMIX untuk dekat lokasi dan Modul GEMSS untuk transport dan fate kumulatif air terproduksi. ➢ Modeling untuk transport dan fate kumulatif lumpur dan serbuk bor menggunakan Modul GEMSS GIFT ➢ Modeling untuk pengerukan dan pembuangan material pengerukan menggunkan Modul ADDAMS untuk dekat lokasi dan Modul GEMSS GIFT untuk transport dan fate kumulatif dari pengerukan. ➢ Modeling air buangan hidrotes menggunakan Modul CORMIX untuk dekat lokasi dan Modul GEMSS untuk transport dan fate kumulatif air hidrotes Penggunaan modul untuk memprakirakan dampak dari berbagai sumber dampak (air limbah gabungan, pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan, pembuangan lumpur bor dan serbuk bor serta pembuangan air hidrotes) telah mempertimbangkan karakteristik limbah, sumber limbah, dan titik pembuangan limbah. Pemodelan terhadap kualitas air (TSS, DO, salinitas, COD, amonia dan lain-lainnya) dari berbagai sumber dampak tersebut telah juga memasukkan berbagai skenario yaitu musim (kemarau dan hujan), *near field* dan *far field*, serta kondisi pasang-surut (*high, low, high slack* dan *low slack*). Berdasarkan hal ini pemilihan dan penerapan modul pada setiap modeling yang dilakukan telah sesuai dengan *output* (keluaran) yang diinginkan. Keluaran dari pemodelan telah disarikan dan dikemukakan dalam dokumen ANDAL Bab III sesuai jenis dampak untuk setiap Kegiatan (Eksploitasi Gas, Transmisi Gas, Kilang LNG dan Terminal Khusus).	**Hasil Pemodelan secara lengkap tercantum pada Lampiran IV.2**
E	**Dr. Ir. Andang Bachtiar, Msc (Pakar Geologi)**		Tidak hadir dan memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan pada Rapat Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat pada Tanggal 28 Nov 2014	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
F	**Dr. Ir. Arie Herlambang, MS (Pakar Hidrologi)**			
1.	1. Laporan lengkap datanya, bagus peta-petanya dan tabelnya; 2. Analisis perlu dipertegas, terutama pada penggunaan data yang terpakai untuk analisis hidrologi; 3. Data pengukuran debit sungai2 selama beberapa tahun terakhir akhir monitoring mohon disampaikan; 4. Data hasil monitoring dari pengolahan limbah; kualitas air yang dilakukan selama ini mohon disampaikan; 5. Data kualitas air pada lampiran, lokasinya kurang jelas, walaupun kode sampelnya jelas, kalau perlu cantunkan koordinat sampelnya. 6. TSS air laut relatif tinggi, karena kondisi alamnya. Demikian disampaikan dalam pemaparan, tampilkan data TSS laut hasil monitoring, pada bagian mana TSS tinggi dan pada bagian mana yang masih bagus.	Umum	1. Terima kasih 2. Analisis hidrologi menggunakan model persamaan rasional. Data yang digunakan adalah data tutupan lahan dari peta rencana kerja. Untuk kondisi topografinya, digunakan data dari pengukuran topografi dan DEM dari ASTER. 3. Mengingat bahwa sungai-sungai yang ada di Teluk Bintuni dekat tapak proyek seperti antara lain Sungai Saengga, Sungai Senindara, Sungai Manggosa dan lainnya adalah sungai-sungai yang sangat dominan dipengaruhi pasang surut air laut, sedangkan sungai yang ada di kawasan proyek umumnya sungai musiman (ephemeral) sehingga pihak Tangguh LNG tidak melakukan pengukuran debit dan analisis kualitas air secara rutin pada sungai-sungai yang ada di kawasan proyek tersebut. 4. Data hasil monitoring pengelolaan limbah disampaikan pada Bab I sub bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG point C.8 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Koordinat telah dicantumkan di dalam tabel di dalam Lampiran (*Sample Information*) dan ringkasan lokasi pengambilan sampel disajikan dalam Bab II sesuai komponen lingkungan. 6. Secara berkala setiap minggu sekali konsentrasi TSS dipantau oleh Tangguh LNG pada intake water untuk air desalinasi pada lokasi Jetty LNG 1. Hasil pemantauan selama tahun 2011 (47 data pemantauan) ditunjukkan pada Tabel II-34 dan Gambar II-48.	**ANDAL I-128 s / d I-131** **ANDAL II-113 s / d II-114**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Berdasarkan hasil pemantauan ini, pada musim kemarau konsentrasi TSS berkisar antara 32 mg/L sampai 267 mg/L dengan nilai rata-rata 102 mg/L, sedangkan pada musim hujan berkisar antara 28 mg/L sampai 369 mg/L dengan nilai rata-rata 139 mg/L. Dari 47 data pemantaun TSS ini, sebanyak 27 data atau 57% hasil pemantauan TSS melampaui baku mutu untuk mangrove yaitu TSS dipersyaratkan ≤80 mg/L. Hal ini menunjukkan secara alamiah konsentrasi TSS di lokasi kegiatan (*nearshore*), cukup tinggi. Di samping itu hasil pemantauan musim kemarau dan musim hujan pada daerah nearshore dan offshore selama penyusunan dokumen ANDAL menunjukan TSS relatif lebih tinggi di perairan *nearshore* dibandingkan dengan *offshore*. Hal ini sudah dikemukakan di dalam dokumen ANDAL Bab 2 Rona Lingkungan Sub Bab 2.1.8.3 Kualitas Air Laut.	**ANDAL II-108 s / d II-132**
	7. Keterkaitan simulasi TSS dengan banyaknya volume pengurukan yang boleh dilakukan per satuan waktu, agar TSS-nya tidak melebihi baku mutu. Penggunaan model dapat membantu untuk menentukan titik samplingnya		7. Saran diperhatikan, terima kasih.	
2.	1. Data curah hujan ada dua sumber : satu dari stasiun meteorologi dan satu lagi dari data radar TRMM;	II-2 s.d II-5	1. Data TRMM merupakan data satelit yang harus divalidasidan dikalibrasi menggunakan data observasi. Data tersebut menghasilkan data curah hujan wilayah yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis hidrologi, kualitas udara dan sebagainya.	
	2. Data mana yang lebih dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih jauh ?		2. Data yang dapat dipercaya adalah data curah hujan dari satelit TRMM yang sudah divalidasi dan dikalibrasi.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	3. Dalam perhitungan air larian (run off), diperlukan data curah hujan harian (mm/jam) dan durasinya (jam), untuk menghitung potensi run off-nya.		3. Data curah hujan harian untuk Tangguh LNG tidak dapat digunakan karena memiliki galat yang besar dan data durasi hujan tidak diperoleh. Oleh karena itu perhitungan air larian (run off) menggunakan IDF dari stasiun meteorologi di Denpasar (Bali) yang merupakan wilayah terdekat dan memiliki data yang sangat lengkap untuk digunakan didalam perhitungan air limpasan permukaan.	
3.	1. Beri kondisi debit dan kualitas air sungai dalam beberapa tahun terkakhir, sebagai gambaran perubahan lingkungan yang terjadi disekitar kegiatan;		1. Mengingat bahwa sungai-sungai yang ada di Teluk Bintuni dekat dengan tapak proyek seperti antara lain Sungai Saengga, Sungai Senindara, Sungai Manggosa dan lainnya adalah sungai-sungai yang sangat dominan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga pihak Tangguh LNG tidak melakukan pengukuran debit dan analisis kualitas air secara rutin pada sungai-sungai tersebut.	
	2. Pada wilayah kegiatan darat, kondisi air larian permukaan terjadi perubahan dari kondisi awal ke kondisi terakhir. Gambaran rencana ke depan perlu dihitung kembali apakah mempunyai potensi terhadap peningkatan air larian, sehingga menyebabkan saluran drainase meluap, atau terjadi genangan atau bahkan banjir.		2. Berdasarkan hasil pelingkungan, peningkatan air larian permukaan merupakan Dampak Penting Hipotetik. Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap peningkatan air larian permukaan telah dikemukakan pada Bab 3 Sub Bab 3.3.1.5 Hidrologi butir c (Kenaikan Air Limpasan Permukaan)	**ANDAL III-149 s / d III-153**
	3. Dalam perhitungan debit air larian gunakan data curah harian maksimum dengan durasi rata-rata, Penambahan debit air larian dialanalis apakah saluran lama atau kolam lama masih mampu menampung atau tidak, atau kalau perlu usulkan penyelesaian lain yang dituangkan dalam dokumen RKL RPL-nya.		3. Perhitungan air larian permukaan (*run off*) menggunakan IDF dari stasiun di Bali yang merupakan wilayah terdekat dan memiliki data yang sangat lengkap untuk digunakan di dalam perhitungan air limpasan permukaan. Hasil perhitungan debit puncak dapat dilihat pada Tabel III-59 Debit Puncak Sungai di Daerah Studi yang Diperkirakan akan Terkena Dampak.	**ANDAL III-150**
	4. Peta DAS terlampau kecil dan karakterisasinya perlu disampaikan dalam petanya, lakukan plotting lokasi pembangunan dalam posisi DAS-nya, apakah ada aliran dari wilayah pembangunan yang masuk kedalam anak2 sungainya, kaitkan dengan lokasi pemantauan kualitas airnya.		4. Saran diperhatikan dan peta DAS telah diperbaiki.	
4.	1. Gambar II-18 sampaikan karaterisasi sungai2-nya	II-28	1. Sungai-sungai yang tercantum pada Gambar II-18 karakteristiknya telah dikemukakan pada Tabel II-6	**ANDAL II-28**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	2. Tabel 1-6 : Tanda koma dan titik sering tertukar, demikian juga ada pada teks-nya, coba periksa kembali untuk seluruh dokumen. 3. Peta kontur perlu diperjelas terutama disekitar lokasi pembangunan, dan kontur akhir setelah pembangunan, untuk melihat pemotongan bukit kaitannya dengan peningkatan kekeruhan di wilayah pantai.		2. Penulisan titik koma dan titik telah diperbaiki kembali untuk keseluruhan dokumen. 3. Peta kontur telah disajikan pada Gambar II-19 Peta Kontur.	**ANDAL II-29**
5.	1. Pada teks terdapat estimasi debit air tanah 11.267 liter/detik, coba periksa kembali, koma atau titik ? 2. Dengan adanya data pemboran dan pengujian sumur, sebaiknya gunakan informasi terkini yang lebih akurat, tebal formasi dan penurunan, dan nilai transmisivitasnya.	II-30	1. Penulisan debit air tanah adalah benar menggunakan titik (11.267 liter/detik) untuk Cekungan Air Tanah Kanoka-Babo 2. Data yang digunakan dalam AMDAL ini adalah data yang ada saat ini berdasarkan hasil pembuatan pilot hole dan studi resistivitas yang telah dilakukan. Data ini digunakan untuk membuat modeling air tanah dan pembuatan peta zonasi air tanah dalam areal Tangguh LNG. Hasil modeling dan peta zonasi air tanah telah dimasukkan dalam AMDAL. Tangguh LNG saat ini sedang melakukan studi air tanah lanjutan termasuk rencana untuk membuat satu sumur uji coba dan melakukan pumping test. Berdasarkan data yang ada saat ini diperkirakan asumsi laju pemompaan yang digunakan untuk pemodelan diharapkan kurang lebih sama dengan hasil pumping test.	**ANDAL II-30**
6.	1. Legenda peta tidak jelas; 2. Skala peta terlampau regional dan tidak akurat; 3. Gunakan dan sampaikan hasil kajian langsung, dan dalam bentuk peta yang informatif;	II-31	1. Legenda dan skala peta telah diperbaiki didalam dokumen 2,3 Peta pada halaman II-31 hanya menggambarkan kedudukan lokasi Tangguh LNG terhadap Cekungan Air Tanah yang telah didefinisikan dalam Lampiran 1 Kepres No. 26 Tahun 2011 mengenai Daftar Cekungan Air Tanah di Indonesia, sehingga memang bersifat regional.	**ANDAL II-31**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	4. Data uji sumur sampaikan debit pengambilan air tanah amannya (safe yield), karena tidak semua potensi bisa dimanfaatkan, karena pertimbangan kelestarian lingkungan.		4. *Safe yield* air tanah akan ditentukan berdasarkan hasil pemodelan dan melalui uji pompa yang akan dilakukan sebagai bagian dari studi air tanah lanjutan yang sedang dilakukan oleh Tangguh LNG saat ini. Hasil uji pompa akan ditambahkan kedalam dokumen ANDAL.	
7.	Peta geologi judulnya peta geologi lingkungan, tetapi pembagian klasifikasinya geomorfologi; kalau memang mau menampilkan geologi lingkungan, sampaikan masalah amblesan, longsoran, gempa, banjir, dll kegeologi teknikan.	II-33	Peta II-4 Halaman II-33 telah dikoreksi judulnya menjadi: GEOLOGI KAWASAN TELUK BINTUNI.	**ANDAL II-33**
8.	Peta geologi regional hapus saja, banyak duplikasi.	II-34	Gambar II-20 Halaman II-34 Peta Geologi Sederhana telah dihapus	**ANDAL II-34**
9.	Water salinity distribution : Kenapa air laut menembus sampai kedalaman 300 meter ? Hati-hati ada resiko intrusi air laut, ketika ekploitasi dilakukan. Mohon ditinjau kembali peta water salinity distributionnya.	II-39	Judul gambar yang menjadi acuan dalam Draft ANDAL tidak tepat, yaitu mengacu salinitas pada formasi Steenkol paling dalam (300m) yang diperkirakan berada pada kedalaman sekitar 1700-2000m. Formasi Steenkol terdalam ini berada jauh di bawah dasar sumur air tanah yang direncanakan akan dibuat dengan kedalaman maksimun 400m. Nilai yang tertera dalam map menunjukkan bahwa salinitas air tanah dapat diperkirakan untuk formasi Steenkol berdasarkan hasil review data sumur eksporasi yang pernah ada menggunakan downhole electrical logs (SP dan Resistivity) dan karakteristik lumpur. Harapannya perkiraan yang sama dapat juga dilakukan untuk bagian Formasi Steenkol yang lebih dangkal yang menjadi objek dari studi ini terutama pada sumur-sumur yang menembus formasi Steenkol lepas pantai. Gambar yang ditunjukkan dalam dokumen ANDAL menunjukkan adanya sumber air tawar yang kapasitasnya makin meningkat ke arah Barat Daya yang memastikan adanya aliran air masuk (recharge) yang cukup besar dari arah ini di mana kita ketahui adanya singkapan sandstone dari formasi Steenkol pada elevasi yang lebih tinggi dari Tangguh LNG area.	**ANDAL II-38**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Sumur uji coba (*pilot slim hole*) yang dibuat pada kedalaman 300m pada area Tangguh LNG dan dekat pantai mengkonfirmasikan adanya sumber air tanah pada kedalaman ini. Sumur uji ini juga memberikan konfirmasi bahwa interface air tawar/air laut akuifer di formasi steenkol pada pada kedalaman sekitar 300m (dan mungkin kedalaman 600m) berada di daerah di lepas pantai tetapi posisinya tidak pasti. Dengan kata lain, berdasarkan data yang ada saat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada interface air tawar/air asin pada formasi Steenkol di darat sampai dengan kedalaman 300m atau mungkin 600m. Sehingga sumur air tanah yang direncanakan dengan kedalaman antara 300 m sampai dengan 400 m diperkirakan aman dari potensi intrusi air laut. Hal ini sudah dijelaskan dalam analisa dampak air tanah pada Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting sub bab 3.3.1.6 Hidrogeologi.	
10.	1. Bedakan penulisan muka air tanah dangkal dan pizometeriknya; 2. Istilah penurunan (drawdown ?) perlu penjelasan dalam tulisan; 3. Istilah log geofisika, tulis saja apa lognya, spontaneous potensial(sp) atau log resistivity (R).	II-40 s.d II-42	1. Telah dikoreksi menjadi muka air tanah piezometrik di halaman II-40 dan II-42. 2. Penulisan kata *drawdown* telah dihapus. 3. Log geofisika dikoreksi menjadi *downhole geophysical log* (electrical dan radiometric) (halaman II-42). Sesuai standard electrical log terdiri atas Short+long resistivity and spontaneous potensial (sp), sedangkan radiometric log terdiri atas natural gamma.	**ANDAL II-39**
11.	Gambar II-25 : Dasar korelasi akuifer apakah ada key bed –nya ? karena nilai TDS-nya berbeda-beda, jadi kemungkinan ada perbedaan akuifer kecuali mengarah ke laut.	II-43	Istilah key-bad mungkin kesalahan pada penterjemahan. Tanggapan dibawah ini diberikan berdasarkan atas Gambar II-25 yang disebutkan dalam pertanyaan dengan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai korelasi akuifer yang dimaksudkan ditunjukkan pada Gambar tersebut.	**ANDAL II-43**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
12.	Gambar II-26 : Antara korelasi dengan data geolistrik dan data pemboran plus log pemboran mana yang lebih dipercaya atau diyakini ? dibuat kesimpulan airnya berdasarkan data yang paling dipercaya.	II-45	Judul Gambar II-26 mestinya adalah Korelasi Akuifer. Gambar ini menunjukkan bahwa korelasi akuifer dapat dilakukan berdasarkan downhole geophysical logs dan juga lithology pada sepanjang daerah dari Saengga menuju Tanah Merah dan TW1/TW2 sampai dengan lokasi sumur uji coba (*pilot slim hole)* pada kedalaman 300m. Hal ini menunjukkan bahwa akuifer Steenkool terdapat pada hampir seluruh area Tangguh LNG dan daerah sekitarnya. Sedikit perbedaan nilai salinitas menunjukkan jarak dari recharge area di darat dan beberapa infiltrasi langsung dari permukaan. Kemungkinan adanya beberapa pergeseran daerah patahan (faults) juga akan mempengaruhi salinitas air tanah. Data yang ada berdasarkan hasil pemantauan salinitas sampai saat ini diyakini tidak menunjukkan keterkaitan dengan pengaruh air laut dari Teluk Bintuni.	**ANDAL II-44**
13.	Berapa jumlah pengambilan yang aman ?, pada kedalaman berapa ? dan berapa jarak antar pemboran agar tidak terjadi interaksi.	II-47	Berdasarkan studi air tanah yang telah dilakukan di Tangguh LNG selama ini, aquifer potential terdapat pada kedalaman ± 300 M dengan debit pengambilan potensial adalah 12 l/detik. Debit pengambilan akan ditentukan berdasarkan hasil pemodelan dan uji pemompaan. Untuk menghindari interaksi atau potensi dampak terhadap air tanah dangkal yang digunakan penduduk, akan dipasang casing sampai kedalaman 150 meter. Studi lanjutan air tanah termasuk uji sumur (pumping test) saat ini sedang dilakukan oleh Tangguh LNG untuk memastikan jumlah (debit optimum) pengambilan air tanah yang aman, kedalaman aquifer dan jarak antar pemboran agar tidak terjadi interaksi. Hasil studi air tanah ini akan ditambahkan dalam dokumen ANDAL.	**ANDAL II-47**
14.	Dalam acuan penentuan kualitas untuk air bersih yang bersumber dari air tanah biasanya digunakan permenkes 416 tahun 1990, sedangkan untuk air minum digunakan permenkes No 492 tahun 2010, sebagai pengganti permenkes 907 tahun 2002.	II-49	Sumber air tanah digunakan sebagai air baku air minum, sehingga digunakan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu acuan kualitas mutu air Kelas I.	**ANDAL II-53**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			▪ Data tersebut masih bersifat pemantauan kualitas air tanah sebagai sumber air baku air minum (bukan ditujukan langsung untuk air minum) jadi dapat mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pemantauan tentang Pemantauan Kualitas Air Tanah klasifikasi kelas 1.	
15.	Jelaskan apa arti tabel ini dalam tulisan, mana akuifer yang produktif dan berapa jumlah pengambilan amannya ?	II-50	Tabel II-9 Halaman II-54 menunjukkan parameter hidraulik dari aquifer, akuifer yang produktif dapat dilihat dari posisi (kedalaman) saringan (filter) karena penentuannya terutama berdasarkan hasil electrical log yang menunjukkan aquifer produktif. Safe yield (debit pengambilan yang aman) dapat diketahui melalui pumping test dengan step drawdown, akan dilakukan pada studi air tanah lanjutan yang saat ini sedang dilakukan oleh Tangguh LNG. Hasil studi ini akan dijadikan dasar dalam penentuan design rinci sumur termasuk safe yield yang akan digunakan.	**ANDAL II-54**
16.	Bentuk sumur kotak besar seperti kolam, apa ada kaitannya dengan nilai T (transmisivitas) kecil ?	II-53	Bentuk sumur kotak tidak ada kaitannya dengan nilai T. Pembuatan sumur kotak besar seperti kolam merupakan kebiasaan setempat.	
17.	TSS versus baku mutu, apakah ada wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti manggrove, padang lamun atau koral yang sensitif terhadap peningkatan nilai TSS ?	II-110	Di daerah wilayah studi tidak ditemukan adanya terumbu karang dan padang lamun. Baku mutu TSS dibandingkan dengan KepMenLH No. 51 Tahun 2004 sebagaimana tertera dalam Lampiran 3 terkait Peruntukan Mangrove.	**ANDAL II-114**
G	**Dr. Dody Prayogo, MPS.t (Pakar Sosial)**			
1.	**Umum**: a. Penyajian dokumen sangat detail dan terstruktur, menunjukan keseriusan pengerjaan dan jauh lebih baik dari dokumen KA lalu, mungkin dokumen ini menjadi yang paling tebal dalam pembahasan Amdal di KLH. b. Sifat kegiatan berupa pengembangan sehingga memudahkan dalam pelingkupan. c. Sangat baik tidak ada akuisisi lahan baru, dan sebagian pengembangan terletak di offshore sehingga persinggungan dengan kegiatan masyarakat terbatas pada kegiatan di laut.		Terima kasih. Kami bekerja sebaik mungkin demi perbaikan dalam dokumen AMDAL.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	**Uraian kegiatan**: Uraian kegiatan cukup lengkap dan komprehensif. Namun ada saran perbaikan: a. Sebutan "sosialisasi" (pada semua uraian tahap pra-konstruksi) kiranya sudah tidak digunakan lagi melainkan lebih tepat disebut "konsultasi publik", karena tujuannya adalah untuk menangkap dan mengakomodasi apa dan bagaimana *concern* para stakeholder terhadap rencana pengembangan. b. Halaman I-98, perlu kalimat untuk memastikan dan menegaskan dalam dokumen bahwa pembukaan lahan baru 500 ha untuk kilang "sama sekali tidak membebaskan lahan penduduk" melainkan lahan sudah menjadi milik BP Tangguh. Penegasan ini penting guna agar tidak ada pertanyaan pembaca tentang penggunaan lahan 500 ha tersebut. c. Khusus kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk keempat kegiatan pengembangan baik tahap konstruksi dan terutama operasi, perlu direncanakan dan dikelola secara seksama agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial baik antar suku (marga), antar desa, distrik serta kabupaten. Dalam struktur pengelompokan suku, persaingan antar suku, kampung dan marga kerap sangat kuat sehingga rektrutmen justru bisa kontraproduktif menimbulkan konflik antar kelompok sosial. Untuk itu jika ada perlu disinggung secara singkat saja bagaimana prinsip-prinsip antar kelompok dalam rekrutmen tersebut. d. Perlu dipastikan, apakah akan lepasan H_2S pada saat pemrosesan dan flare baru di onshore, jika tidak ada tegaskan dalam uraian bagian terkait, karena ada potensi dampaknya jika ada pemukiman di dekatnya.		a. Konsep sosialisasi pada dokumen diperbaiki di tabel matrik RKL/RPL dengan disesuaikan dengan kegiatan b. Diperbaiki sesuai dengan masukan ditambahkan kalimat 'tidak ada pembebasan lahan penduduk' c. Strategi penerimaan tenaga kerja akan dibangun baik pada tahap konstruksi dan operasi, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat - Tahap Konstruksi: Kontraktor akan membangun strategi penerimaan tenaga kerja untuk: masyarakat asli, Bintuni-Fakfak, Papua Barat, dan Papua, serta - Tahap Operasi : Membangun strategi penerimaan tenaga kerjauntuk: masyarakat asli, Bintuni-Fakfak, Papua Barat, dan Papua, serta Nasional. d. Feed gas Tangguh LNG hanya mengandung 10 ppm H_2S (Tabel I-12 Kandungan Senyawa Ikutan dalam Pasokan Gas) sehingga H_2S tidak termasuk dampak penting hipotetik. Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan operasi saat ini selama tiga tahun terakhir (2010-2013), kadar SO_2 maksimum dari unit AGI adalah sebesar 34 mg/m^3 jauh di bawah baku mutu berdasarkan PerMen LH no 19 tahun 2009 sebesar 2600 mg/m^3.	a. – b. Bab I- B3. Pembebasan Lahan c. Tabel RKL tahap konstruksi dan operasi

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			e. Rona lingkungan SO_2, NOx, HC dan O_3 termasuk dalam parameter kualitas udara ambien dalam Tabel II-4 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Musim Kemarau dan Tabel II-5 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Musim Hujan di mana nilainya umumnya berada jauh di bawah baku mutu yang berlaku (PP 41 tahun 1999). Parameter tersebut juga akan dipantau secara rutin (Lampiran 2 RKL-RPL, Tabel 5 Baku Mutu Udara Ambien)	
3.	**Pelingkupan Dampak Hipotetik**: secara keseluruhan sudah baik, komponen dampak detail dan lengkap. Hanya perlu beberapa hal:. a. Sebagaimana telah disinggung dalam masukan KA lalu, "tekanan" dari hasil konsultasi publik dan permintaan kalangan pemda setempat adalah pada peningkatan besaran dan sebaran/pemerataan dampak positif, bukan dampak negatifnya. Maka dampak potensial terbesar dampak pengembangan ini adalah meningkatnya "harapan" terhadap peningkatan dan sebaran/pemerataan dampak positif, yakni dari kegiatan "penerimaan tenaga kerja" (khusunya kalangan grassroot/pemuda desa) dan, "peningkatan DBH" (Dana Bagi Hasil, khususnya di kalangan elite) dan pembangunan prasarana wilayah (khususnya kalangan birokrat), dan implementasi program CSR/CD. Ketiga hal ini berbeda substansi dan implikasinya terhadap pemantauan dan pengelolaanya nanti		a. Secara khusus diluar RKL, Tangguh menyusun suatu program dengan tujuan untuk memperkuat dampak positif dari operasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, yang disebut dengan Pengelolaan Sosial Tangguh (Lampiran 3). Pengelolaan tenaga kerja merupakan bagian dari program penguatan masyarakat Papua yang ada dalam dokumen tersebut. Tangguh juga memberikan dukungan pemahaman terhadap DBH melalui program tata kelola pemerintahan, serta turut memfasilitasi pertemuan antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan pusat berkaitan dengan DBH.	a. Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	b. Dampak jangka pendek dan langsung adalah bidang ekonomi dan demografi, dampak ini akan mendorong perubahan lainnya baik sebagai dampak turunan maupun ikutan. Oleh sebab itu, jika ada ilustrasikan (analisis) singkat saja berapa prakiraan (saja) perubahan demografi dan ekonomi potensial terjadi.		b. Proyeksi demografi penduduk telah dicantumkan di dalam dokumen ANDAL Bab 2 Rona Lingkungan sosial. Proyeksi ekonomi akan dilakukan pada kajian tersendiri.	b. Tabel Proyeksi demografi penduduk ada pada Bab 2 dokumen ANDAL hal II-411 dan Bab Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3, Subab 1.1. Definisi Masyarakat Asli dan Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG
	c. Pada banyak kasus, dampak ikutan dan turunan dari peningkatan demografi dan perubahan ekonomi adalah perubahan pemilikan lahan, lahan menjadi "komoditas" perdagangan antar pendatang, sementara penduduk lokal akan tergeser dari wilayah kota/perdagangan. Dampak ini memang tidak bisa dikelola oleh pemrakarsa, namun perlu dilihat dan diantisipasi.		c. Dampak kumulatif dari perkembangan kawasan Teluk Bintuni telah dipertimbangkan dalam "Pengelolaan Sosial Tangguh".	c. Bab Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3, Subab 1.1. Definisi Masyarakat Asli dan Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	d. Untuk melihat bagaimana magnitude dan signifikansi dampak perlu diidentifikasi sel mana (dalam matriks silang antara kegiatan dan komonen dampak) yang potensial menimbulkan resistensi/konflik, baik antar kelompok masyarakat dan utamanya antara masyarakat-pemrakarsa, cukup diidentifikasi saja. Identifikasi ini sangat diperlukan agar pemrakarsa dapat memberi perhatian khusus dan bersiap dengan pemantauan dan pengelolaan dengan tim khusus pula.		d. Kegiatan-kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak turunan konflik atau ketegangan telah didentifikasikan di dalam bagan alir dampak penting.	d. Bab 4 Dampak Holistik, hal IV-17
	e. Dampak terhadap kegiatan nelayan sudah dilingkup secara memadai dan proporsional.		e. Terima kasih atas masukannya.	e. -
4.	**Batas Sosial**: jelas dan baik, namun penting dipertimbangkan kembali: a. Salah satu permasalahan dari pengelolaan dampak sosekbud yang ada adalah "kecemburuan" warga dari kampung yang tidak tercakup dalam batas sosial Amdal 2002 (non-DAV dan non-RAV) sehingga tidak atau kurang mendapat program CSR/CD. Jika mungkin bisa dilakukan perluasan dan pemerataan pengelolaan lingkungan (berupa program CSR/ISP) yang ada kepada kelompok-kelompok yang berada dalam kawasan terdekat dengan lokasi sumur dan fasilitas di offshore, sehingga mungkin batas sosial untuk RKL-RPL bisa lebih luas dan dampak positif lebih merata.		a. Batas kajian studi sosial sudah diperluas hingga distrik Kamundan dan Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak.	a. Peta telah tercantum di dokumen ANDAL Bab I, hal 1-212
	b. List kampung dan distrik sudah baik, jika mungkin bisa dibedakan mana yang dapat dikategorikan kedalam Ring 1, 2 dan 3 sehingga dapat di-overlap dengan perbedaan magnitude dampak (negatif dan positif).		b. Pendekatan AMDAL kali ini tidak lagi mendasarkan pada pendekatan wilayah (DAV), namun lebih mendasarkan pada pendekatan kepada pengembangan manusia (masyarakat asli)	b. Lampiran 3, Pengelolaan Sosial

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
5.	**Rona awal**: sangat baik, lengkap dan komprehensif. Data ini penting dan sebaiknya ditampilkan secara selektif pada analisis. Satu hal perlu disinggung secara singkat saja dalam rona ini adalah, meningkatnya "harapan" atas DBH oleh sebagian elite di wilayah tertentu serta rekrutmen tenaga lokal dalam jumlah dan untuk jabatan yang lebih baik di kalangan pemuda setempat. Tentunya pandangan mempengaruhi image tentang rencaa pengembangan secara keseluruhan.		Secara khusus diluar RKL, Tangguh menyusun suatu program dengan tujuan untuk memperkuat dampak positif dari operasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, yang disebut dengan Pengelolaan Sosial Tangguh (Lampiran 3). Pengelolaan tenaga kerja merupakan bagian dari program penguatan masyarakat Papua yang ada dalam dokumen tersebut. Tangguh juga memberikan dukungan pemahaman terhadap DBH melalui program tata kelola pemerintahan, serta turut memfasilitasi pertemuan antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan pusat berkaitan dengan DBH.	Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh
6.	**Evaluasi Dampak**: baik dan jelas. Dampak yang disebabkan secara langsung oleh kegiatan LNG Tangguh sudah tercakup dan memadai analisisnya. Namun dampak yang belum tercakup adalah: a. Dampak positif, yakni meningkatnya harapan akan DBH di kalangan elit, peningkatan jumlah dan jabatan lebih baik bagi pekerja lokal, dan perluasan dan pemerataan program CSR/CD.		a. Secara khusus diluar RKL, Tangguh menyusun suatu program dengan tujuan untuk memperkuat dampak positif dari operasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, yang disebut dengan Pengelolaan Sosial Tangguh (Lampiran 3). Pengelolaan tenaga kerja merupakan bagian dari program penguatan masyarakat Papua yang ada dalam dokumen tersebut. Tangguh juga memberikan dukungan pemahaman terhadap DBH melalui program tata kelola pemerintahan, serta turut memfasilitasi pertemuan antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan pusat berkaitan dengan DBH.	a. Pengelolaan Sosial Tangguh

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	b. Dampak ikutan atau turunan akibat perubahan demografi dari bangkitan pendatang (pekerja dan non-pekerja) berupa perubahan pemilikan dan tata-guna lahan (lahan menjadi "komoditas") sebagaimana sudah terjadi di Bintuni.		b. Dampak kumulatif dari perkembangan kawasan Teluk Bintuni telah dipertimbangkan dalam "Pengelolaan Sosial Tangguh".	b. Tabel Proyeksi demografi penduduk ada pada Bab 2 dokumen ANDAL hal II-411 dan Bab Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3, Subab 1.1. Definisi Masyarakat Asli dan Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG
7.	**RKL-RPL**: Melihat pelaksanaan RKL-RPL kegiatan sebelumnya (2002-2012), untuk bidang Sosekbud pengelolaan dan pemantauan sudah sangat komprehensif, bahkan secara substansial "melampaui" kewajiban lingkungan. Keadaan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk Kegiatan Terpadu ini. Khusus untuk pengembangan ini, terdapat beberapa substansi yang perlu dikelola:			

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	a. Terhadap dampak "harapan" atas DBH pemrakarsa bisa memfasilitasi secara terbatas pembahasan masalah ini dengan kementerian terkait, misalnya dengan SKK Migas dan Kemenkeu.		a. Secara khusus diluar RKL, Tangguh menyusun suatu program dengan tujuan untuk memperkuat dampak positif dari operasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, yang disebut dengan Pengelolaan Sosial Tangguh (Lampiran 3). Pengelolaan tenaga kerja merupakan bagian dari program penguatan masyarakat Papua yang ada dalam dokumen tersebut. Tangguh juga memberikan dukungan pemahaman terhadap DBH melalui program tata kelola pemerintahan, serta turut memfasilitasi pertemuan antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan pusat berkaitan dengan DBH.	a. Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
	b. Terhadap dampak rekrutmen tenaga kerja, pemrakarsa bisa membuat perencanaan rekrutmen yang lebih merata (antar suku/kampung/distrik) dan untuk posisi/jabatan yang lebih proporsional agar tidak timbul kecemburuan antar suku dan kampung/distrik.		b. Strategi penerimaan tenaga kerja akan dibangun baik pada tahap konstruksi dan operasi, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat - Tahap Konstruksi: Kontraktor akan membangun strategi penerimaan tenaga kerja untuk: masyarakat asli, Bintuni-Fakfak, Papua Barat, dan Papua, serta - Tahap Operasi : Membangun strategi penerimaan tenaga kerjauntuk: masyarakat asli, Bintuni-Fakfak, Papua Barat, dan Papua, serta Nasional.	b. Tabel RKL
	c. Terhadap dampak perubahan demografi dan ekonomi terhadap pemilikan lahan lokal, pemrakarsa dapat mendorong Pemda setempat mengatur sistem jual-beli lahan agar "warga asli" tetap menjadi pemilik lahan di wilayah mereka.		c. Tangguh menghormati kepemilikan hak ulayat oleh masyarakat adat melalui program penguatan masyarakat madani.	c. Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
	d. Terhadap dampak meningkatnya harapan perluasan dan pemerataan program CSR/CD, pemrakarsa bisa memperluas (tentunya jika disetujui SKK Migas) program yang sudah berjalan.		d. Pendekatan AMDAL kali ini tidak lagi mendasarkan pada pendekatan wilayah (DAV), namun lebih mendasarkan pada pendekatan kepada pengembangan manusia (masyarakat asli), oleh karena itu secara tidak langsung area pengelolaan menjadi lebih luas	d. Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
	e. Khusus untuk rencana pemantauan, sudah ada organisasi dan mekanisme komunikasi antara pemrakarsa dengan masyarakat, yang perlu dilakukan adalah pemrakarsa lebih mengaktifkan forum ini sebagai media pantau "persepsi" masyarakat.		e. Tangguh LNG akan mendorong pembentukan forum kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan Teluk Bintuni dan sekitarnya.	e. Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
8.	Secara keseluruhan identifikasi, analisis, evaluasi dan RKL-RPL sudah cukup lengkap dan komprehensif. Sedikit tambahan masalah adalah adanya "harapan" lebih besar terhadap dampak positif serta adanya "dampak ikutan/turunan" dari perubahan demografi dan ekonomi. Semoga masukan ini bermanfaat.		Harapan-harapan masyarakat dikelola melalui Pengelolaan Sosial Tangguh. Namun demikian, Tangguh menyadari tidak semua aspirasi dapat dipenuhi karena sebagian aspirasi bukan merupakan kewenangan Tangguh.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
H	**Dr. Linawati Hardjito, Msc (Pakar Kualitas Air)**			
1.	Mohon dibuatkan skematik diagram pengelolaan limbah (padat, cair, B3, non B3) secara menyeluruh LNG-1 & 2 eksisiting dan LNG 3-4 pengembangan, apakah yang ada sudah memadai dan apa yang perlu diperbaiki. Sudah ada di hal 1-95 sd 1-127. Tapi belum ada info bagaimana kinerja fasilitas pengolahan limbah (IPAL) nya yang ditunjukkan oleh data hasil monitoring. Air permukaan, air laut, air tanah sudah tercemar. Apakah pencemaran yang ada sekarang terkait dengan kegiatan eksisting ? Diagram sistemik mencakup, volume, karakter limbah, pengelolaan yang ada, badan air penerima ? Di dokumen sudah disampaikan tapi terpisah-pisah sehingga tidak mudah untuk melihat secara keseluruhan dan belum dapat ditelusuri asal polutan yang sekarang ada di rona lingkungan. Dalam evaluasi dampak penting hanya fokus pada TSS dan kadar minyak dan lemak. Justru parameter yang melebihi baku mutu tidak dibahas. Nitrit yang tinggi menunjukkan adanya bahan beracun yang menganggu kinerja mikroba alami di air, benang merah yang terputus. Kalau ada bahan pencemar, harus bisa ditelusuri asalnya, apakah terkait dengan kegiatan. Jadi effluent yang masuk ke air laut tolong disajikan datanya. Kan ada beberapa buangan ke laut. Kualitas air sumur penduduk belum ada ya? mohon ditambahkan	Umum	Diagram alir pengelolaan limbah cair dapat dilihat pada dokumen RKL RPL lampiran 1 halaman 2. Air limbah diolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara umum, kinerja pengolahan air limbah di tahap operasi Tangguh LNG saat ini telah bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya Diagram alir pengelolaan limbah padat non-B3 dan B3 juga dapat dilihat pada RKL RPL lampiran I halaman 12. Pengelolaan limbah padat non B3 maupun B3 pada tahap operasi Tangguh LNG saat ini telah berjalan dengan baik. Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan limbah cair dan limbah padat telah dikirimkan secara rutin kepada institusi terkait. Air limbah di lokasi Tangguh LNG diolah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti KepMenLH no. 19/2010 dan KepMenLH no. 112/2003. Baku mutu air limbah dapat dilihat pada dokumen RKL RPL lampiran II. Pemodelan pembuangan air limbah terolah dapat dilihat pada dokumen ANDAL Lampiran IV.2. Hasil pemodelan pembuangan air limbah yang telah diolah ke lokasi pembuangan pada -6m LAT menunjukkan konsentrasi air laut ambien di sekitar zona terbatas terlarang memenuhi baku mutu yang berlaku. ▪ Air permukaan, air laut dan air tanah tidak tercemar oleh aktivitas anthropogenic (kegiatan manusia), beberapa parameter yang melampaui nilai ambang batas baku mutu disebabkan oleh faktor alami seperti antara lain TSS pada air laut, besi dan pH pada air tanah.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 2** **Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 12** **Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 5 s / d 7**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			▪ Dalam evaluasi dampak hanya dibahas TSS dan kadar minyak dan lemak, karena kedua parameter ini diidentfikasi sebagai dampak penting hipotetik (DPH) yang terkait dengan kegiatan Tangguh LNG dalam proses pelingkupan pada KA yang sudah telah disepakati. ▪ Nitrit pada air laut tidak dipersyaratkan dalam baku mutu air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 ▪ Tingginya Nitrit yang terdeteksi pada air tanah dalam (DGW 01) pada lokasi ini tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG karena berjarak lebih dari 4 km dari pusat kegiatan. Penjelasan mengenai mengapa nitrit terdeteksi agak tinggi telah dikemukakan pada dokumen ANDAL Halaman II-98. Kualitas air sumur penduduk sudah ada dapat dilihat pada dokumen ANDAL Sub-Bab 2.1.8.2 Halaman II-99- II-100	**ANDAL II-116** **ANDAL II-102** **ANDAL II-99 s / d II-100**
2.	Kapasitas produksi maksimal 7.6 mtpa (metric tons per annum). Kecil sekali mohon klarifikasi	I-1	Kapasitas produksi Kilang LNG 1 dan 2 saat ini sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui pada 2002 adalah 7.6 million ton per annum, bukan 7.6 metric tons per annum	
3.	Pembangunan fasilitas produksi dan jaringan perpipaan bawah laut. Berapa km ? rona lingkungan penggelaran pipa ? ada terumbu karangkah ?	I-9	• Panjang pipa sudah dikemukakan secara rinci pada ANDAL Tabel I-9 • Rona lingkungan kualitas air, biota laut dan sedimen yang sudah dikemukakan dalam dokumen ANDAL mewakili seluruh Teluk Bintuni dalam batas wilayah studi pada Bab II Rona Lingkungan • Tidak ditemukan adanya terumbu karang di dalam batas wilayah studi.	**ANDAL I-49**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
4.	Pengelolaan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan cenderung sangat kecil (NUI). Berapa ton ? tidak boleh menggunakan kata/kalimat kualitatif, harus ada angkanya (kuantitatif) mohon direvisi. Lumpur dan serbok bor akan diinjeksi atau dibuang kelaut bila injeksi tidak mungkin. Mohon jumlah, karakter serbok dan lumpur bor, titik dumping, rona lingkungan sekitar/titik daumping. Data rona lingkungan menunjukkan kadar logam di sedimen telah melebihi referensi dan air laut sudah tercemar. Selama operasi limbah padat yang dihasilkan sangat kecil dan akan dikirim ke LNG tangguh. Jangan menggunakan kalimat kuantittatif harus ada angka. Di Tangguh bagaimana pengelolaan yang ada ?	I-11	Tidak ada limbah yang dihasilkan dari anjungan pada kondisi normal karena anjungan didesain sebagai NUI (*Normally Unmanned Installation*). Limbah hanya dihasilkan apabila ada kunjungan pemeliharaan dengan jumlah limbah padat domestik kurang lebih 5 kg per kunjungan, tergantung program pemeliharaan yang dilakukan, adapula limbah B3 kurang lebih 20 kg per kunjungan. Limbah tersebut dibawa ke Tangguh LNG untuk dikelola lebih lanjut bersama dengan limbah yang lain. • Penjelasan mengenai karakteristik bahan dasar lumpur bor dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas B4 Pengeboran Sumur Gas – *Drilling Fluid*. Jika opsi pembuangan ke laut dipilih, maka pembuangan akan dilakukan disekitar lokasi anjungan, dimana kondisi rona lingkungannya sudah dipaparkan pada Sub Bab 2.1.8.3 Rona Lingkungan – Kualitas Air Laut. Data rona lingkungan sejak tahun 1996 menunjukkan beberapa parameter logam pada sedimen dasar laut perairan Teluk Bintuni melebihi baku mutu. Hal ini menunjukkan gejala alami untuk daerah dasar laut Teluk Bintuni. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada ANDAL Bab 2 halaman II-155 sampai II-158	**ANDAL I-26 s / d I-31** **ANDAL II-108 s / d II-132** **ANDAL II-155 s / d II-158**
5.	Limbah cair (air terkontaminasi hidrokarbon) sangat kecil. Harus ada angka perkiraan berapa ? di tangguh dikelola seperti apa ? ini kondisi eksisting yang perlu dijelaskan. Ada TPS B3, sebelum dikelola pihak ke tiga. Kapasitas TPS, sistim terbuka atau tertutup, bagiamana menghindari leaching/overflow, kalau ditimbun di kolam ada sumur pantau ? mohon lebih rinci Ingat data rona kualitas air permukaan, air laut, air tanah telah tercemar	I-12	Estimasi volume limbah cair dapat dilihat pada dokumen ANDAL Bab I halaman I-121, Tabel I-22 Perkiraan Volume Air Limbah dari Operasi Empat Kilang LNG. Air limbah terkontaminasi hidrokarbon akan dilalui ke unit pegolahan CPI untuk memisahkan air dan minyak. Air limbah terolah akan dialirkan langsung ke lokasi pembuangan -6m LAT. Minyak akan dikumpulkan di dalam slop oil tank dan akan diproses kembali. Secara berkala, lumpur yang terakumulasi di dalam slop oil tank akan dibersihkan dan dikumpulkan sebagai limbah B3 untuk diolah lebih lanjut di fasilitas pihak ke-3 yang memiliki izin dari KLH.	**ANDAL I-121**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			TPS limbah B3 akan dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki izin dari KLH.	
6.	Kurang lebih 1900 m^3 lumpur dan 960 m^3 serbok bor dihasilkan dan akan dibuang dari masing-masing sumur. Lumpur akan digunakan kembali. Jika layak lumpur bor, serbuk bor dan kotoran tangki akan diinjeksikan kembali. Kalau tidak layak dikemanakan ? mohon informasi ? apakah dibuang ke laut ? titik dumping ? rona lingkungan lokasi dumping mohon diinfokan ? Ingat data rona kualitas air laut sudah tercemar. Logam berat di sedimen melebihi referensi	I-31	• Penjelasan mengenai opsi pengelolaan lumpur dan serbuk bor dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas B5 Pengelolaan Lumpur dan Serbuk Bor. Jika opsi pembuangan ke laut dipilih, maka pembuangan akan dilakukan disekitar lokasi anjungan, dimana kondisi rona lingkungannya sudah dipaparkan pada Sub Bab 2.1.8.3 Rona Lingkungan – Kualitas Air Laut. • Rona Lingkungan: Lokasi sampling untuk kualitas air, biota air, sedimen pada masing-masing platform yang diambil dan dianalisis untuk menggambarkan rona lingkungan seperti dikemukakan pada Bab II adalah mewakili rona lingkungan sekitar lokasi pengeboran sumur gas. Pengeboran sumur-sumur akan dilakukan pada masing-masing platform serta dumping lumpur dan sebuk bor di sekitar setiap lokasi pengeboran, jika opsi pembuangan ke laut yang dipilih.	**ANDAL I-32 s / d I-37** **ANDAL II-108 s / d II-132**
7.	Sampai saat ini (dok andal) belum pasti apakah direinjeksi atau dibuang ke laut ? kalau dibuang mohon informasi rinci (volume, karakter, titik dumping, rona lingkungan dumping) Dinyatakan akan dibuat pemodelan sebaran dampak. Dan akan mengacu pada Permen ESDM. Rona lingkungan perkiraan titik dumping mohon dicakup di ANDAL. Yang dimodelkan hanya TSS dan minyak/lemak, justru parameter yang melebihi baku mutu tidak dimodelkan. Mohon klarifikasi, effluent yang masuk ke laut karakternya seperti apa ?	I-33	• Dalam AMDAL ini Tangguh LNG memasukkan 2 opsi pengelolaan lumpur dan serbuk bor, opsi pertama adalah reinjeksi lumpur dan serbuk bor ke formasi bawah permukaan dan opsi kedua adalah pembuangan ke laut. Masing-masing dari kedua opsi telah dianalisa dampaknya dalam AMDAL ini. Volume dan karakteristik lumpur dan serbuk bor, lokasi dumping dan rona Lingkungan pada lokasi dumping telah dijelaskan dalam ANDAL Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas B4 Pengeboran Sumur Gas – *Drilling Fluid*, B5 Pengelolaan Lumpur dan Serbuk Bor dan Sub Bab 2.1.8.3 Rona Lingkungan – Kualitas Air Laut.	**ANDAL I-26 s / d I-37** **ANDAL II-108 s / d II-132**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Rona Lingkungan: Lokasi pengambilan sampel untuk kualitas air, biota air, sedimen pada masing-masing platform yang diambil dan dianalisis untuk menggambarkan rona lingkungan seperti yang dikemukakan pada Bab II mewakili rona lingkungan sekitar lokasi pengeboran sumur gas. Pengeboran sumur-sumur akan dilakukan pada masing-masing platform serta dumping lumpur dan sebuk bor di sekitar setiap lokasi pengeboran, jika opsi pembuangan ke laut yang dipilih. Parameter yang dimodelkan adalah parameter yang relevant dengan potensi dampak dari limbah yang dibuang dan telah ditetapkan sebagai DPH pada KA-ANDAL yang telah disepakati. Parameter yang melebihi baku mutu tidak selalu penyebabnya adalah karena kegiatan Tangguh LNG, namun juga dapat disebabkan oleh faktor alami.	
8.	Tabel 1.7 Limbah cair tahap kontruksi kegiatan pengeboran yang dibuang kelaut (IPAL, fresh water generator, well test, sistim pendingin, air limpasan dek). Limbah ini dikumpulkan dan diolah jadi satu sebelum dibuang ke laut, atau masing-masing langsung dibuang ke laut. Mohon disajikan karakter limbah cair yang dibuang ke laut. Belum ada di dokumen. Karena kegiatan sudah berlangsung mohon data monitoring analisa effluent disajikan. Ini penting, karena air laut, air tanah, air permukaan sudah tercemar dan juga sedimen.	I-39	• Limbah cair dari tahap konstruksi kegiatan pengeboran akan dikelola masing-masing di atas anjungan pengeboran sebelum dibuang ke laut. Anjungan pengeboran akan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah cair antara lain IPAL untuk limbah saniter serta system pemisahan air dan minyak untuk mengelola air dari drainase yang berpotensi terkontaminasi minyak. • Semua aliran limbah yang dibuang ke laut akan memenuhi baku mutu yang berlaku. Pemantauan akan dilakukan sesuai dengan RKL-RPL dan perizinan yang berlaku dan hasilnya akan dilaporkan secara rutin.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Air permukaan, air laut dan air tanah, sedimen tidak tercemar oleh aktivitas *anthropogenic* (kegiatan manusia) namun beberapa parameter yang melampaui nilai ambang batas baku mutu disebabkan oleh faktor alami seperti antara lain nitrat, fosfat, TSS pada air laut, besi dan pH pada air tanah, nikel dan arsen pada sedimen. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tangguh selama ini dari beberapa lokasi termasuk daerah yang tidak terpengaruh oleh kegiatan Tangguh dan hasil pemantauan sebelum kegiatan Tangguh dimulai. Semua hal ini sudah dikemukakan pada Bab II Rona Lingkungan Sub Bab 2.1.8 dan 2.1.9.	
9.	Jalur pipa (135 km kilang 4) dan 12 km kilang-3. Apakah menggunakan jalur yang sama ? atau jalur baru. Mohon rona lingkungan jalur pipa secara spesifik disajikan	I-47	• Jalur perpipaan dari fasilitas produksi gas dianjungan lepas pantai ke fasilitas penerima (ORF) di darat tidak menggunakan jalur yang sama. Panjang maksimum jalur pipa gas adalah 30 km. Rencana jaringan perpipaan transmisi gas untuk Kilang LNG 3 pada tahap pengembangan awal dan Kilang LNG 4 pada tahap selanjutnya dari Proyek Pengembangan Tangguh LNG dapat dilihat dalam ANDAL halaman I-4 pada Gambar I-2. Rona lingkungan kualitas air laut, biota air laut sedimen perairan Teluk Bintuni dalam Batas Wilayah Studi telah dikemukakan secara rinci pada Bab II Rona Lingkungan. Penempatan lokasi pengambilan contoh didalam wilayah studi sudah mempertimbangkan perwakilan dari seluruh rencana kegiatan pengembangan Tangguh LNG yaitu termasuk platform, pengeboran sumur, jalur pipa, kilang LNG dan kegiatan terminal khusus, pembuangan hasil pengerukan, hidrotes, dan lainnya.	**ANDAL I-4**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
10.	Untuk penarikan pipa ke darat perlu dibuka area bakau 40 m (sekitar 3 sampai 5 hektar). Bagaimana pengelolaan (kompensasinya) ditanam lagi ? lokasi tanam ? dampak terhadap abrasi, sedimentasi, biota laut ?	I-53	Daerah mangrove yang diperkirakan terkena dampak dari kegiatan penarikan pipa ke darat adalah seluas maksimal ±10 ha, yaitu sekitar 9% dari total luasan mangrove di dalam area Tangguh LNG. Pembukaan daerah mangrove akan diminimalkan misalnya dengan mempertimbangkan opsi HDD untuk penarikan pipa ke darat. Jika pembukaan mangrove harus dilakukan, pengelolaannya adalah dengan menanam kembali daerah yang dibuka dan tidak digunakan untuk jalur permanen pipa di darat . Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama ini abrasi alami ditemukan di beberapa daerah di sepanjang pesisir Teluk Bintuni termasuk daerah sekitar Tangguh. Hasil pengamatan yang dilakukan juga menunjukkan selama ini tidak ada indikasi dampak abrasi yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi Tangguh Kilang LNG 1 dan 2. Pembukaan lahan bakau (mangrove) untuk Kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG tidak berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap abrasi, sedimentasi maupun biota laut. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam dokumen ANDAL sub bab 3.3.2.1 halaman III-235 serta Tabel III-97 (Evaluasi Dampak terhadap Perubahan Struktur dan Komposisi Spesies Flora) dan Tabel III-99(Evaluasi Dampak terhadap Perubahan Keanekaragaman Spesies Flora).	**ANDAL III-235**
11.	Volume material keruk 90.000 m^3, didumping dimana ? mohon info termasuk rona dumpingnya. Apakah di dormitory ?	I-66	• Lokasi pembuangan material kerukan adalah sama dengan lokasi pembuangan yang telah disetujui dalam AMDAL 2002 dan izin pengerukan sebelumnya dan dikemukakan pada ANDAL sub bab 1.2.4 Kegiatan Terminal Khusus B5 Pengerukan dan Pembuangan Material Hasil Pengerukan dan Gambar 1-45 Potensial Area Pembuangan Material Hasil Pengerukan.	**ANDAL I-145 s / d I-147**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Rona lingkungan kualitas air laut, biota air laut sedimen perairan Teluk Bintuni dalam Batas Wilayah Studi telah dikemukakan secara rinci pada Bab II Rona Lingkungan. Penempatan lokasi pengambilan contoh/sampel di dalam wilayah studi sudah mempertimbangkan perwakilan dari seluruh rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG termasuk kegiatan pemasangan anjungan, pengeboran sumur, jalur pipa, pembuangan hasil pengerukan, hidrotes, dan lainnya.	
12.	Air keluaran pre comissioing dan commissioning akan dibuang ke laut. Berapa volumenya ? Air dengan kandungan ozygen scavenger, biocide akan dibuang ke laut. Mohon data LC-50 di infokan, titik buangnya ? rona lingkungan lingkungan lokasi buang ? kemungkinan sebaran polutan. Mohon dicermati, air laut sudah tercemar tapi yang dibahas hanya TSS dan minyak/lemak, bagaimana polutan lainnya ?	I-67	• Jumlah air limbah dan bahan kimia yang digunakan dari kegiatan pre-commissioning dan *commissioning* (*hydrotest*) dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas sub bab B8 Pembuangan Air Hydrotest (Dewatering), termasuk alternatif pembuangan air limbah tersebut. Evaluasi dampak pembuangan dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 3..2.1.1 Kualitas Air Laut dari Kegiatan Transmisi Gas. Air *hydrotest* tidak termasuk dalam daftar limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku, sehingga LC-50 tidak diperlukan. • Rona lingkungan kualitas air laut, biota air laut sedimen perairan Teluk Bintuni dalam Batas Wilayah Studi telah dikemukakan secara rinci pada Bab II Rona Lingkungan. Penempatan lokasi pengambilan contoh/sampel didalam wilayah studi sudah mempertimbangkan perwakilan dari seluruh rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG termasuk kegiatan pemasangan anjungan, pengeboran sumur, jalur pipa, pembuangan hasil pengerukan, hidrotes, Kilang LNG dan kegiatan terminal khusus. • Identifikasi dampak potensial dan dampak penting hipotetik (DPH) dilakukan terhadap setiap parameter (variabel) lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat rencana usaha/kegiatan.	**ANDAL I-74 s / d I-78** **ANDAL III-77 s / d III-93**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Parameter yang melampaui baku mutu dapat disebabkan oleh faktor alami (seperti nitrat, fosfat, TSS untuk air laut serta arsen dan nikel untuk sedimen) yang tidak selalu terkait dengan rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG kecuali untuk parameter TSS yang merupakan DPH terkait dengan kegiatan pengerukan dan pembuangan lumpur dan serbuk bor. Penjelasan rinci mengenai dampak TSS ini telah diberikan pada Bab 3 Perkiraan dan Evaluasi Dampak Penting Sub Bab 3.1.1.2 Kualitas Air Laut • Berdasarkan hal tersebut diatas maka hanya TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Salinitas, DO, dan COD yang diidentifikasi sebagai DPH dari seluruh usaha/kegiatan rencana Proyek Pengembangan Tangguh LNG yang telah dikemukakan dalam KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH pad a tanggal 24 Juli 2013.	**ANDAL III-9 s / d III-20**
13.	Air tawar untuk hidrotest berasal dari air tanah akan disimpan dikolam ? kapasitasnya berapa ? terbuka/tertutup ? dari kolam dikemanakan ? selamanya dikolam atau dibuang ke lingkungan? Mohon info rinci ? karakter air bekasnya apakah ada biocide, corrotion inhibitor dll. Ingat air tanah dan air permukaan, air laut sudah tercemar	I-72	Perkiraan volume kolam berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah berkisar 15.000-22.500 m^3. Penjelasan ini, alternatif pembuangan bekas air hydrotest dan juga karakteristik air hydrotest dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas sub bab B8 Pembuangan Air Hydrotest (Dewatering). Air permukaan, air laut dan air tanah tidak tercemar oleh aktivitas anthropogenic (kegiatan manusia) namun adanya indikasi beberapa parameter yang melampaui nilai ambang batas baku mutu dapat disebabkan oleh faktor alami seperti antara lain nitrat, fosfat, TSS pada air laut, serta besi dan pH pada air tanah.	**ANDAL I-74 s /d I-78**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
14.	Alternatif pembuangan yang sekarang dipertimbangkan dan nantinya akan dikaji dalam ANDAL. Bukankah ini dokumen ANDAL ? Pembuangan ke lepas pantai. 500 m^3/jam Air yang mengandung sedikit bahan kimia. Harus ada konsentrasi pastinya. Ingat air laut sudah tercemar, indikasi dari nitrit yang melebihi baku mutu Penyimpanan di darat dan pembuangan ke laut. Kolam dirancang dengan kapasitas yang sesuai. Harusnya sudah ada kapasitasnya ? berapa ? limbah berapa ? curah hujan ? Belum ada tunggu FEED ? Mungkin akan dilkukan pengolahan kimiawi. Harusnya dari kegiatan eksisiting sudah ada gambaran. Tolong disampaikan bagaimana pengelolaan dari kegiatan yang sekarang berjalan, kinerjanya. Apakah perlu perbaikan untuk pengembangan. Belum jelas di dokumen. Air laut dan air tanah sudah tercemar. APakah ada kitannya dengan kegiatan ? Mohon disajaikan data untuk justifikasi.	I-76	• Redaksi kalimat diubah menjadi: "Alternatif pembuangan yang dipertimbangkan dan dikaji dalam dokumen ANDAL ini adalah sebagai berikut:" • Bahan kimia yang terkandung dalam air hidrotes yaitu oxygen scavanger 100 ppm, biocide 550 ppm, fluorrescein dye 30 ppm – hal ini sudah dikemukakan pada ANDAL Halaman I-78 • Nitrit pada kualitas air laut tidak dipersyaratkan dalam baku mutu air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004. Oleh karena itu parameter ini tidak dianalisis dan tidak dibahas. Yang dipersyaratkan adalah nitrat. • Perkiraan volume kolam berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah berkisar 15.000-22.500 m^3. Perkiraan volume air hydrotes akan dikonfirmasi setelah proses FEED dan volume kolam akan disesuaikan. Penjelasan ini, alternatif pembuangan air bekas hydrotest dan juga karakteristik air hydrotest dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas sub bab B8 Pembuangan Air Hydrotest (Dewatering). • Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan alternatif yang dipilih adalah alternatif penyimpanan sementara air *hydrotset* di darat baru kemudian dibuang ke laut, dan tidak diperlukan pengolahan kimiawi karena karakteristik air hydrotes masih memenuhi baku mutu izin pembuangan air limbah pada saat itu. Pada kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG ini, karakteristik aktual akan dipantau dulu di kolam penampungan sementara (jika opsi ini dipilih) sebelum dibuang.	**ANDAL I-78** **ANDAL I-78** **ANDAL II-116** **ANDAL I-74 s / d I-78**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Air permukaan, air laut dan air tanah, sedimen tidak tercemar oleh aktivitas *anthropogenic* (kegiatan manusia) namun beberapa parameter yang melampaui nilai ambang batas baku mutu disebabkan oleh faktor alami seperti antara lain nitrat, fosfat, TSS pada air laut, besi dan pH pada air tanah, nikel dan arsen pada sedimen. Semua hal ini sudah dikemukakan pada ANDAL Bab II Rona Lingkungan.	
15.	Tolong pengelolaan limbah yang ada dan untuk pengembangan di buatkan skematik, untuk evaluasi apa yang kurang dan apa yang sudah baik. Kinerja unti pengolah limbahnya. Kan sudah beroperasi tentunya punya data monitoring. Tolong disajikan.	I-77, I-78	Kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkan selama kegiatan konstruksi kegiatan jaringan perpipaan termasuk limbah B3, non B3 (organik), limbah non B3 (non-organik), limbah HDD dan limbah pemasangan pipa di pantai dapat dilihat pada ANDAL 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas sub bab B9 Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3 dan B10 Pengelolaan Limbah Cair. Skematik untuk pengelolaan limbah padat dapat dilihat pada Lampiran I dokumen RKL-RPL.	**ANDAL I-79 s / d I-80** **ANDAL I-79 s / d I-80**
16.	Ada mercury removal. Mohon dipastikan mercury tidak lepas ke badan air	I-88	Tidak ada pembuangan mercury ke badan air. Limbah yang mengandung mercury hanya akan dihasilkan dari kegiatan penggantian katalis terkontaminasi merkuri yang akan dilakukan secara regular (3-6 tahun sekali). Pada saat penggantian, semua katalis bekas akan dikumpulkan ke dalam drum dan disimpan sementara di TPS limbah B3 di lokasi. Konsentrasi merkuri dalam katalis akan dianalisa sebelum dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memiliki izin di luar lokasi Tangguh LNG.	
17.	Ada landfill. Mohon dibuatkan sumur pantau. Data sumur pantau belum ada. Apakah air tanah yang tercemar ada kaitannya dengan kegiatan. Mohon justifikasi.	I-95	Sumur pantau akan disediakan di area landfill. Penjelasan mengenai pembuatan sumur pantau terkait dengan landfill dapat dilihat pada RKL RPL Bab 2.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Kilang LNG sebagai berikut: "Membuat minimal 1 sumur pantau di bagian hulu dan 3 sumur pantau di bagian hilir pada landfill limbah non-B3."Beberapa parameter air tanah yang tidak memenuhi baku mutu, tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG saat ini, hal ini sudah dijelaskan pada ANDAL Sub-Bab 2.1.8.2 Halaman II-99- II-107	**RKL-RPL II-44 dan II-52** **ANDAL II-99 s / d II-107**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Data sumur pantau dari kegiatan operasi saat ini dapat dilihat pada dokumen ANDAL Bab 2.1.5 Hidrogeologi dan Kualitas Air Tanah sub bagian Pemantauan di Area Tangguh LNG.	**ANDAL II-59 s / d II-62**
18.	Area dormitory akan digunakan untuk dumping materi urug ? apakah termasuk material keruk 90.000 m^3 di halaman I-66 ?	1-100	Area untuk dormitory/camp dan kilang di masa mendatang saat ini diusulkan sebagai area pembuangan material gali-urug yang tridak dapat digunakan. Penjelasan ini dapat dilihat dalam dokumen ANDAL Hal I-100 Material keruk yang dimaksud dalam ANDAL halaman I-68 dari opsi penggalian dan penarikan pipa ke darat. Material ini akan ditempatkan sementara di sisi parit tersebut dan diikuti dengan penimbunan pipa kembali dengan tanah tersebut.	**ANDAL I-68**
19.	TPS B3, kapasitas berapa ? sistim terbuka atau tertutup ? volume limbah B3 ? ada sumur pantau ? Ingat air tanah sudah tercemar	I-107	• TPS Limbah B3 akan dirancang sesuai estimasi timbulan limbah B3 pada tahap operasi telah dipaparkan dalam ANDAL Tabel I-19 halaman I-108 dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan laporan pemantauan air tanah selama ini, ada beberapa parameter air tanah yang tidak memenuhi baku mutu. Namun hal ini tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG saat ini, hal ini sudah dijelaskan pada ANDAL Sub-Bab 2.1.8.2 Halaman II-99- II-107	**ANDAL I-108** **ANDAL II-99 s / d II-107**
20.	Limbah bacting plant. Sangat kecil dan dibuang ke lingkungan. Dimana ? apakah air tanah yang tercemar dan air laut yang tercemar ada kaitannya dengan buangan ini ? mohon justifikasi. Jangan pakai kalimat subjektif. Mohon diberi angka ? kecilnya berapa. Dibuang ke lingkungan mana ? laut ? karakter limbahnya mohon disajikan ?	I-108	• Berdasarkan laporan pemantauan air tanah selama ini, ada beberapa parameter air tanah yang tidak memenuhi baku mutu. Namun hal ini tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG saat ini, hal ini sudah dijelaskan pada ANDAL Sub-Bab 2.1.8.2 Halaman II-99- II-107 • Air limbah dari *batching plant* diperkirakan sangat kecil karena tidak lebih dari 10 m^3/hari, bersifat intermiten (hanya pada saat operasi *batching plant*), serta air limbah tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatan yang sama. Air limbah yang tidak dapat digunakan kembali akan diolah dulu di kolam netralisasi untuk memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lokasi pembuangan di laut yang ditentukan. Penjelasan termasuk karakteristik air limbah dapat dilihat pada ANDAL halaman I-109 – 1-110	**ANDAL II-99 s / d II-107** **ANDAL I-109 s / d I-110**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
21.	Limbah brine water reject. 3000 m^3/hari. Dibuang ke laut ke lokasi yang eksisting yang sudah berijin ? berarti limbah yang lainnya lokasi belum jelas ? mohon dibuatkan skema mana yang masuk ke lokasi buang berijin, mana yang akan dibuang ke lokasi baru. Dari yang sudah berijin, mohon disajikan hasil monitoring kualitas lingkungannya untuk membantu evaluasi apakah sudah bagus ? atau perlu diperbaiki ?	I-109	• Lokasi pembuangan air limbah yang dihasilkan pada tahap konstruksi (serta operasi) dapat dilihat pada RKL-RPL Lampiran 1 Gambar 1 Bagan Alir Pengelolaan Kualitas Air • Secara umum, kinerja pengolahan air limbah di tahap operasi Tangguh LNG saat ini telah bekerja dengan baik sesuai dengan izin pembuangan limbah cair saat ini dan hasil pemantauan dilaporkan secara teratur pada institusi terkait.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 2**
22.	Gambar 1.35. mohon disajikan kualitas effluent yang masuk ke laut. Hasil monitoring ? Ada PWT , dll. Ini penting karena air laut sudah tercemar.	I-119	Hasil monitoring dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL 6 bulanan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah.	
23.	Pengelolaan limbah cair. Ada discharge pond. Mohon data kualitas air discharged pond disajikan. Karena air laut dan air tanah sudah tercemar, supaya dapat ditelusuri sumebrnya. DAF sludge, Bio sludge. Dari sini kemana ? didumping di lokasi. Tentu ada sumur pantau. Mohon disajikan data hasil monitoring. Ada DAF (pengolahan primer), Biologis (sekunder), effluentnya kemana ? karena sudah berlangsung mohon data monitoring disajikan. Data sumur pantau belum ada. Air dari PWT berpotensi diolah lanjut hingga menenuhi kriteria baku mutu utilitas. Selama ini dibuang kemana ? mohon data kualitas airnya disajikan. Apakah air laut yang tercemar ada kaitannya dengan kegiatan eksisiting. Mohon justifikasi.	I-120, I-121	Uraian rinci mengenai pengelolaan limbah cair dapat dilihat dalam dokumen ANDAL hal 120-121. Tidak ada discharge pond. Pengelolaan lumpur dari proses pengolahan air limbah terproduksi adalah sebagai berikut: • Lumpur DAF: dibakar di insinerator limbah B3 dan/atau dikirim ke perusahaan pengelolaan limbah B3 berizin. • Lumpur biologis: akan dikelola sebagai bahan baku pembuatan kompos dan/atau penggunaan sejenis sesuai dengan hasil studi yang sedang dilakukan saat ini. Apabila hasil studi menunjukkan bahwa opsi ini tidak layak maka opsi lain yang dipertimbangkan adalah membakar lumpur biologis di insinerator dan/atau dapat juga dikirim ke perusahaan pengelolaan limbah yang memiliki izin. Lumpur tersebut tidak dibuang di lokasi Tangguh LNG. Air terproduksi setelah diolah di PWT selama ini dibuang ke lokasi pembuangan di laut yang ditentukan sesuai dengan AMDAL dan izin. Pemantauan dilakukan secara rutin sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaporkan secara rutin ke institusi terkait.	**ANDAL II-108 s / d II-132**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Hasil pemantauan kualitas air laut seperti dikemukakan pada ANDAL Bab II Rona Lingkungan Sub Bab 2.1.8. hanya parameter TSS, nitrat dan fosfat yang tidak memenuhi baku mutu pada beberapa lokasi pemantauan terutama disebabkan faktor alami dan tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG saat ini. Fenomena TSS, nitrat dan fosfat sudah dikemukakan secara rinci pada sub-bab ini.	
24.	Pengelolaan air terkontaminasi minyak. Discharged point. Mohon kualitas air hasil hasil monitoring pengolahan disajikan. Pertimbangan design CPI akan diperbaiki. Mohon data kualitas air yang ada sekarang hasil monitoring disajikan. ! Di dokumen tidak jelas apa sudah sesuai dengan regulasi. Dan apakah air laut yang tercemar ada kaitannya dengan kegiatan ?	I-122	Hasil pemantauan dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Hasil pemantauan kualitas air laut seperti dikemukakan pada ANDAL Bab II Rona Lingkungan Sub Bab 2.1.8. menunjukkan hanya parameter TSS, nitrat dan fosfat yang tidak memenuhi baku mutu pada beberapa lokasi pemantauan, dimana hal ini disebabkan faktor alami dan tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG saat ini. Fenomena TSS, nitrat dan fosfat sudah dikemukakan secara rinci pada sub-bab ini.	**ANDAL II-108 s / d II-132**
25.	Air limbah terkontaminasi bahan kimia. Mohon disajikan karakter effluent di discharged point. Hasil monitoring kegiatan eksisting. Ada landfill. Mohon disajikan data monitoring kualitas air sumur pantau. Karena air tanah sudaha tercemar.	I-123	• Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu yang berlaku dan sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG. • Data sumur pantau dari kegiatan operasi saat ini dapat dilihat pada dokumen ANDAL Bab 2.1.5 Hidrogeologi dan Kualitas Air Tanah sub bagian Pemantauan di Area Tangguh LNG. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tangguh LNG sampai saat ini, beberapa parameter air tanah yang tidak memenuhi baku mutu, tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional Tangguh LNG, hal ini sudah dijelaskan pada ANDAL Sub-Bab 2.1.8.2 Halaman II-99- II-107	**ANDAL II-59 s / d II-62** **ANDAL II-99 s / d II-107**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
26.	Dari nearest drainage kemana ? ke laut ? Mohon data monitoring effluent drainase yang masuk ke badan air disajikan	I-124	Berdasarkan gambar I-39 hanya air limbah desalinasi dengan kadar salinitas rendah (antara lain air pendingin pompa salinasi dan air cucian pembersihan dari Plate Heat Exchanger) akan dialirkan ke dalam kolam penampung sementara sebelum dibuang ke drainase terdekat ke laut. Lebih detai dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL Sub Bab 2.3. Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah.	
27.	Limbah B3 per bulan 310 m^3, ada limbah terkontaminasi mercury 20 m^3. Mohon dipastikan tidak masuk ke lingkungan,	I-127	Kegiatan penggantian katalis terkontaminasi merkuri akan dilakukan secara regular. Pada saat penggantian, semua katalis bekas akan dikumpulkan ke dalam drum dan disimpan sementara di TPS limbah B3 di lokasi Tangguh LNG. Kandungan mercury dalam katalis akan dianalisa sebelum dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memiliki izin di luar lokasi Tangguh LNG.	
28.	Tabel 1-27 Matriks dampak penting hipotetik. Tidak ada dampak terhadap kualitas air permukaan. Padahal ada discharged ke nearest drainase (hal I-124). Air permukaan di rona lingkungan sudah tercemar (Mohon dipastikan bahwa tidak ada dampak terhadap air permukaan dengan data hasil monitoring kegiatan eksisting, kususnya effluent yang masuk ke badan air. Tidak ada dampak terhadap air tanah. Padahal ada kolam penimbunan air bekas hidro test yang mengandung bahan kimia, ada TPS B-3 (hal 107), limbah bacthing di buang ke lingkungan (hal I-108), Ada DAF dan Biosludge (hal 1-120 dan I-121) dibuang kemana ? banyak hal yang belum jelas tapi sudah diputuskan tidak penting. Mohon disajikan data-data monitoring kalau memang dikatakan tidak penting . Air laut sudah tercemar. Jangan sampai menambah beban ke lingkungan	I-179	• Identifikasi dampak potensial dan dampak penting hipotetik (DPH) dilakukan terhadap setiap parameter (variabel) lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat rencana usaha/kegiatan dan telah dikemukakan pada KA-ANDAL yang telah disepakati. • Berdasarkan hal tersebut diatas maka hanya TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Salinitas, DO, dan COD yang diidentifikasi sebagai DPH dari seluruh usaha/kegiatan rencana pengembangan Tangguh LNG yang telah dikemukakan dalam KA-ANDAL dan telah memperoleh persetujuan. • Oleh karena itu hanya parameter-parameter tersebut yang dimasukkan sebagai DPH yang dikaji lebih mendalam dan dikemukakan dalam dokumen ANDAL.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Kulalitas air laut. Hanya TSS dan minyak dan lemak. Tidak representative. Harus ada COD, fenol, logam berat. Ingat ada potensi polusi mercury, corrotion inhibitor, biocide, dll yang biasanya non-biodegradable. Data monitoring yang da tolong disajikan. Biologi. Tidak ada dampak terhadap mangrove. Padahal adakan menebang 3-5 ha kawasan mangrove. Mohon justifikasi		Proses pelingkupan untuk menentukan Dampak Penting Hipotetik telah dilakukan pada saat proses penyusunun dokumen KA ANDAL. Dokumen ANDAL ini disusun berdasarkan KA ANDAL yang telah dibahas dalam rapat tim teknis dan disepakati KLH pada Bulan Juli 2013. Kandungan merkuri dalam feed gas Tangguh LNG sangat kecil (100 µg/Nm3, sesuai dengan ANDAL Tabel I-12 Kandungan Senyawa Ikutan dalam Pasokan Gas). Mercury ini akan ditangkap dalam Mercury Removal Unit dan tidak akan masuk ke dalam aliran air limbah, jadi tidak ada potensi polusi mercury. Bahan kimia yang akan digunakan sebagai corrosion inhibitor dan biocide adalah yang ramah lingkungan yang termasuk dalam daftar bahan kimia yang disetujui Dirjen Migas. Selain itu konsentrasi yang digunakan juga sedikit sehingga tidak akan menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Hal ini telah dipaparkan dalam ANDAL halaman I-78. • Pembukaan hutan mangrove 3-5 ha tidak diidentifikasi menimbulkan dampak penting hipotetik (DPH) terhadap abrasi, sedimentasi dan biota laut (KA-ANDAL yang telah disepakati). Secara menyeluruh dampak pembukaan lahan terhadap biologi terrestrial (flora dan fauna) telah dikemukakan pada sub-bab 3.3.2 Halaman III-226 sampai dengan Halaman III-252.	**ANDAL I-85** **ANDAL I-78** **ANDAL III-226 s / d III-252**
29.	Mohon dievaluasi ulang bagan alir dampak dengan mempertimbangkan komentar/pertanyaan saya diatas (no 26)	I-180 sd I-185	Bagan alir dibuat berdasarkan dampak-dampak yang telah ditetapkan sebagai DPH. Keterkaitan antara satu DPH dengan DPH lainnya yang diturunkan dari setiap kegiatan penyebab DPH dituangkan dalam bagan alir tersebut. DPH sudah ditetapkan pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH.	
30.	Dampak penting hipotetik. Mohon dievaluasi ulang. Kualitas air	I-186	• Identifikasi dampak potensial dan dampak penting	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	permukaan bukan hanya TSS, ada drainase yang belum jelas keluarnya ke mana ? ada TPS B-3 yang mungkin mengkotaminasi air permukaan dan air tanah. Kulaitas air laut : kok TSS hilang ? bagaimana dengan fenol, logam berat dll. Mohon didukung data monitoring supaya pasti. Mohon ditambahkan data kualitas tanah (terkait dengan kandungan pulutan logam berat)		hipotetik (DPH) dilakukan terhadap setiap parameter (variabel) lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat rencana usaha/kegiatan dan telah dikemukakan pada KA-ANDAL yang telah disepakati. • Berdasarkan hal tersebut diatas maka hanya TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Salinitas, DO, dan COD yang diidentifikasi sebagai DPH dari seluruh usaha/kegiatan rencana Proyek Pengembangan Tangguh LNG yang telah dikemukakan dalam KA-ANDAL dan telah disepakati KLH. • Oleh karena itu hanya parameter-parameter tersebut sebagai DPH yang dikaji lebih mendalam dan dikemukakan dalam dokumen ANDAL. • Proses pelingkupan untuk menentukan Dampak Penting Hipotetik telah dilakukan pada saat proses penyusunun dokumen KA ANDAL. Dokumen ANDAL ini disusun berdasarkan KA ANDAL yang telah dibahas dalam rapat tim teknis dan disepakati KLH pada Bulan Juli 2013. Rona lingkungan tanah termasuk kandungan logam berat dalam tanah sudah dikemukakan pada Sub Bab 2.1.6.3 (Sifat Kimia Tanah) Tabel II-18 dan Tabel II-19.	**ANDAL II-74 s / d II-75**
31.	Mohon kualitas air permukaan, air tanah, air laut, biota. Di kaji ulang. Kalau tidak penting harus didukung data yang sahih.	I-188 sd I-190	• Penentuan DPH terhadap air permukaan, air tanah, air laut dan biota sudah melalui proses pelingkupan dimana didahului dengan penentuan dampak potensial terhadap setiap parameter lingkungan yang berpotensi terkena dampak yang selanjutnya dilakukan evaluasi dampak potensial tersebut untuk menentukan apakah akan menjadi DPH atau tidak dengan menggunakan data yang sahih sesuai hasil survei, hasil studi terkait maupun pengalaman pengoperasian Kilang LNG 1 dan 2. • DPH yang dikemukakan dalam dokumen ANDAL adalah berdasarkan hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
32.	Mohon dievaluasi ulang Dampak penting hipotetiknya. Bagi yang tidak penting harus didukung data hasil monitoring/kinerja fasilitas eksisting	I-191 sd I-194	• Penentuan DPH sudah melalui proses pelingkupan didahului dengan penentuan dampak potensial terhadap setiap parameter lingkungan yang berpotensi terkena dampak yang selanjutnya dilakukan evaluasi dampak potensial tersebut untuk menentukan apakah akan menjadi DPH atau tidak menggunakan data yang sahih sesuai hasil survei, hasil studi terkait maupun pengalaman pengoperasian Kilang LNG 1 dan 2. • DPH yang dikemukakan dalam dokumen ANDAL adalah berdasarkan hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH tanggal 24 Juli 2013.	
33.	Kenapa tidak ada mangrove ?	I-201	Proyek Pengembangan Tangguh LNG yang menimbulkan dampak terhadap mangrove adalah pembukaan daerah mangrove sebesar maksimum seluas ±10 ha, yaitu sekitar 9% dari total luasan mangrove di dalam area Tangguh LNG. Kegiatan revegetasi akan dilakukan dalam area tapak proyek yang dibuka untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG tetapi tidak digunakan untuk fasilitas permanen. Pembukaan lahan tersebut diperkirakan tidak merubah struktur dan komposisi vegetasi ekosistem mangrove yang ada di wilayah studi AMDAL. Dampak ini diperkirakan akan berkurang setelah kegiatan revegetasi lahan terbuka yang tidak digunakan untuk fasilitas permanen selesai dilakukan. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam dokumen ANDAL sub bab 3.3.2.1 halaman III-226.	**ANDAL III-226**
34.	Kualitas air laut : bagimana dengan COD ? kan banyak polutan lainnya selain minyak dan lemak ? ada corrotion inhibitor, biocide, dll Mohon evaluasi ulangn sesuai komentar saja diatas.	I-123	• COD sudah ditetapkan sebagai DPH dari pembuangan limbah cair kegiatan Tangguh LNG berdasarkan hasil pelingkupan dalam KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH. Corrotion inhibitor, biocide dan lainnya tidak diidentifikasi menimbulkan DPH oleh karena:	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			(1) bahan-bahan yang digunakan bersifat ramah lingkungan, (2) bahan-bahan kimia yang digunakan sesuai rekomendasi DESDM, (3) hasil pemodelan menunjukkan hasil yang baik di mana faktor dispersi mencapai 700 kali pada jarak 500 m dari lokasi pembuangan. Hasil pemodelan tercantum pada lampiran IV.2 dokumen ANDAL	
35.	Kualitas air tanah. Sumur penduduk acuannya adalah permenkes. Di evaluasi lagi apakah memenuhi baku mutu sumber air bersih.	II-48	• Tidak ada ketentuan yang menetapkan kualitas air sumur/air tanah harus mengacu kepada Permenkes. Acuan yang digunakan adalah baku mutu kualitas air Kelas I menurut PP No 82 Tahun 2001 dimana air sumur tersebut sesuai dengan peruntukan air baku air minum. Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan hierarki hukum lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri.	
36.	Baku mutunya apa ? harus permenkes kalau sumur penduduk. Tolong dicantumkan dicatatan kaki Tabel. Kasumur penduduk tidak memenuhi baku mutu air bersih, mohon program, CSR untuk batuan sarana penyedian sumber air bersih	II-54	Acuan yang digunakan adalah baku mutu kualitas air Kelas I menurut PP No 82 Tahun 2001 dimana air sumur tersebut sesuai dengan peruntukan air baku air minum. Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan hierarki hukum lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri.Tabel sudah diperbaiki dan diberi catatan kaki. Sebagai salah satu program ISP, Tangguh LNG telah membantu masyarakat di kampung-kampung terdekat yaitu di kampung Tanah Merah Baru dan Saengga dengan membangun 3 sumur air tanah dan ke tiga sumur ini masih digunakan sampai saat ini.	
37.	Tabel II-13. Air tanah sudah tercemar (pH,Fe, Pb, Mn). Mohon dipastikan kegiatan pengembangan tidak menambah beban lingkungan. Karakter effluent yang masuk ke badan penerima tolong disajikan untuk tracibility. Dari mana asal polutan ? supaya ada solusi pencegahan. Mohon ditambahkan logam lain seperti mercuri, Cd, Cr+6, dll.	II-58	• Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu yang berlaku dan ketentuan dalam Izin Pembuangan Air Limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Data hasil pemantauan kualitas air tanah tahun 2012 dan 2013 selengkapnya tercantum pada Tabel II-11, Halaman II-59 telah dilengkapi dengan beberapa parameter logam seperti Cd dan Cr^{+6}. Merkuri, Mangan dan Seng akan ditambahkan pada revisi berikut.	**ANDAL II-100**
38.	Mohon ditambahkan acuan baku mutu. Kalau di Indonesia belum ada mengacu pada aturan internasional.	II-70	• Kriteria penilaian sifat kimia tanah untuk Indonesia tercantum pada Tabel II-17, Halaman II-71. • Selanjutnya hasil analisis sifat kimia tanah yang tercantum pada Tabel II-18 dan tabel II-19 dievaluasi menggunakan kriteria pada Tabel II-17 maka diperoleh hasil evaluasi seperti tercantum pada Tabel II-20 dan tabel II-21. • Dalam IFC tidak ada peraturan mengenai Standard Kesuburan Tanah.	**ANDAL II-71** **ANDAL II-74, II-75, II-77, dan II-78**
39.	Bagaimana dengan Hg ? tidak dibahas ? padahal ada Hg removal ?	II-74	Kegiatan penggantian katalis terkontaminasi merkuri akan dilakukan secara regular. Pada saat penggantian, semua katalis bekas akan dikumpulkan ke dalam drum dan disimpan sementara di TPS limbah B3 di lokasi dan kadar mercury dalam katalis bekas tersebut akan dianalisa sebelum dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memiliki izin di luar lokasi Tangguh LNG. Hasil analisis contoh tanah menunjukkan Hg pada hampir seluruh lokasi tidak terdeteksi, seperti tercantum pada Tabel II-18 dan tabel II-19	**ANDAL II-74 s / d II-75**
40.	Tabel II-28 Parameter COD dan BOD melebihi baku mutu air sungai sudah tercemar. Dari mana asal polutan ? apakah ada kaitanya dengan kegiatan eksisiting. Mohon disajikan data effluent yang mungkin terkait dengan kualitas air di Tabel II-28 untuk justifikasi.	II-90	• Penyebab BOD dan COD melebihi baku mutu karena sifat alami sudah dikemukakan secara rinci pada Halaman II-97 dan tidak terkait dengan kegiatan operasi Tangguh LNG Kilang LNG 1 dan 2 • Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu.	**ANDAL II-97**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
41.	Kualitas air sungai (sebagai air laut). Harus ada baku mutu, kalau lebih terpengaruh laut, diambil air laut. Kalau salinitas rendah diambil air tawar. Sulfat tinggi ? Dari mana sumbernya ?	II-91 dan II-92	• Sesuai peraturan perundang-undangan baku mutu air yang berlaku di Indonesia adalah baku mutu air tawar dan baku mutu air laut. Tidak terdapat baku mutu air untuk zona peralihan, oleh karena pada zona ini kualitas air dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dinamika pasang-surut air laut dan musim (hujan atau kemarau). Penjelasan ini sudah dicantumkan sebagai catatan kaki pada Tabel II-29 Penjelasan mengenai sulfat sudah tercantum pada ANDAL Halaman II-97. Kandungan sulfat dalam air laut rata-rata 2.700 mg/L. Jadi sulfat bersumber dari air laut.	**ANDAL II-97**
42.	Tabel II-32. Kualitas air tanah. Apakah ini air yang digunakan sebagai sumber air bersih ? kalau iya pake baku mutu permenkes. Beberapa parameter tidak memenuhi baku mutu : Cu, pH, Nitrit, dari mana sumbernya ?	II-96	• Ya, air tanah digunakan sebagai sumber air bersih oleh penduduk di Saengga dan tanah Merah Baru • Tidak ada ketentuan yang menetapkan kualitas air sumur/air tanah harus mengacu kepada Permenkes. Acuan yang digunakan adalah baku mutu kualitas air Kelas I menurut PP No 82 Tahun 2001 dimana air sumur tersebut sesuai dengan peruntukan air baku air minum. Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan hierarki hukum lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri. • Cu (Tembaga) masih memenuhi baku mutu seperti dipaparkan dalam ANDAL tabel II-32 halaman II-100 • Penyebab rendahnya pH pada air tanah dangkal sudah dikemukakan pada Halaman II-103. • Penyebab tingginya nitrit pada air tanah dalam sudah dikemukakan pada Halaman II-102.	**ANDAL II-100** **ANDAL II-103** **ANDAL II-102**
43.	Nitrat , Pospat, melebihi baku mutu. Apakah ada buangan organic masuk ke pantai ? Harus dipastikan pengembangan kegiatan tidak menambah beban lingkungan. Dan tolong disajikan data monitoring effluent yang masuk ke badan air.	II-115	• Rona lingkungan Nitrat dan Fosfat serta fenomena melampaui baku mutu telah dibahas secara rinci pada Sub Bab 2.1.8.3 Kualitas Air Laut di Halaman II-115 sampai dengan II-116 (Nearshore) dan Halaman II-124 sampai dengan II-125 (Offshore).	**ANDAL II-115, II-116, II-124, dan II-125**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Pembuangan limbah cair dari kegiatan Tangguh LNG dikelola sesuai dengan baku mutu dan izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG sebelum dibuang ke lokasi pembuangan di laut. • DPH akan dikelola dan dipantau untuk meminimalkan dampak negatif serta mempertahankan dan mengembangkan dampak positif dengan adanya Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Dapat dilihat dalam dokumen RKL-RPL. • Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG	
44.	Cd pernah melebihi baku mutu ? kenapa ? apakah IPAL bermasalah ? Tolong disajikan data monitoring effluent IPAL	II-118	• Untuk kadmium pada perairan laut dekat pantai hanya satu lokasi (NS08, Musim Kemarau) yang terdeteksi dengan konsentrasi 0,0012 mg/L (kalau dibulatkan akan menjadi 0,001 mg/L), dimana hal ini sudah sesuai dengan baku mutu 0,001 mg/L. Lokasi NS 08 terletak di pantai sebelah utara Teluk Bintuni (Weriagar) dimana tidak ada kegiatan Tangguh LNG didaerah ini. • Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL 6 bulanan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
45.	Tabel 2-36, 2-37 Kualitas air laut offshore. Nitrit dan pospat melebihi baku mutu. Sumber polutan apa ? Ini menunjukkan konversi ammonia ke nitrat terganggu. Ada bahan toksik yang mungkin mengganggu kerja mikroba. Kalau ada data COD akan membantu penelurusannya . Untuk selanjutnya monitoring mohon ditambahkan COD. Harus dipastikan pengembangan kegiatan tidak menambah beban lingkungan.	II-122, II-123	• COD dan Nitrit pada air laut tidak dipersyaratkan dalam baku mutu air laut untuk Biota Laut (Lampiran III) berdasarkan KepMen LH No 51 Tahun 2004. Oleh karena itu parameter ini tidak dianalisis dan tidak dibahas • Rona lingkungan Nitrat dan Fosfat serta fenomena melampaui baku mutu telah dibahas secara rinci pada Sub Bab 2.1.8.3 Kualitas Air Laut di Halaman II-115 sampai dengan II-116 (Nearshore) dan Halaman II-124 sampai dengan II-125 (Offshore). • Yang lebih tepat digunakan untuk melihat peranan mikroorganisme dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dalam air adalah nilai BOD dan DO bukan kandungan COD. BOD akan menunjukkan kemampuan mikroorganisme dalam peroses oksidasi bahan organik secara biologis sedangkan COD lebih menggambarkan oksidasi secara kimiawi. • Hasil analisis BOD dan DO seperti ditunjukkan pada Tabel II-35 (nearshore) dan Tabel II-36 serta Tabel II-37 (offshore) kedua parameter ini masih memenuhi baku mutu. BOD terdeteksi sangat rendah dan DO tergolong cukup baik secara umum >5 mg/L.	**ANDAL II-115, II-116, II-124, dan II-125** **ANDAL II-117, II-126 dan II-127**
46.	Hasil analisa sedimen. Beberapa parameter di lokasi tertentu melebihi baku mutu. As, Ni. Mohon info kemungkinan dari mana ? harus dipastikan kegiatan pengembangan tidak menambah beban polutan di air laut yang akan berujung disedimen. Semua effluent ke badan air harus dikelola dengan optimal. Data monitoring effluent kegiatan eksisting mohon disajikan.	II-133	• Penjelasan mengenai sumber Nikel dan Arsen sudah dikemukakan secara rinci pada Halaman II-155 dan Halaman II-158 • Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu dan izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG	**ANDAL II-155 dan II-158**
47.	TPH melebihi batas atas referensi. Mohon dipastikan kegiatan pegembangan tidak menambah beban lingkungan.	II-139	Saran diperhatikan	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
48.	Tabel II-43 Hg dan Ni di beberapa titik melebihi referensi. Mohon dipastikan pengembangan tidak menambah beban lingkungan khususnya Hg .	II-153	Saran diperhatikan	
49.	Kualitas air sebagai sumber air bersih belum ada ?. Apakah sama dengan air tanah di bahasan sebelumnya yang tercemar ? Kalau berbeda mohon disajikan hasil analisanya. Baku mutu yang digunakan harus permenkes,	II-465, II-476	• Sampel air untuk analisis kualitas air sebagai sumber air bersih hanya diambil dari Kampung Saengga dan Tanah Merah Baru, hasil analisis sudah dikemukakan pada Sub Bab 2.1.8.2, Halaman II-99 sampai dengan Halaman II-107. • Sumber air bersih yang dikemukakan pada Halaman II-475 sampai dengan II-485 adalah sumber air bersih penduduk di dalam seluruh wilayah studi. • Tidak ada ketentuan yang menetapkan kualitas air sumur/air tanah harus mengacu kepada Permenkes. Acuan yang digunakan adalah baku mutu kualitas air Kelas I menurut PP No 82 Tahun 2001 dimana air sumur tersebut sesuai dengan peruntukan air baku air minum. Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan hierarki hukum lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri.	**ANDAL II-99 s / d II-107** **ANDAL II-475 s / d II-485**
50.	Pembuangan serbuk dan lumpur bor kelaut bukan hanya mempengaruhi TSS, dan kadar minyak dan lemak tapi juga kadar polutan di sedimen, dan di badar air. rona lingkungan menunjukkan beberapa logam berat melebihi kadar referensi disedimen. Keberadaan Nitrit dan pospat yang melebihi baku mutu di air laut, menunjukkan adanya gangguan bahan beracun terhadap mikroba perairan, sehingga terjadi akumulasi nitrit yang seharusnya secara alami diubah menjadi nitrat kemudian nitrogen bebas. Perlu data COD untuk konfirmasi. Dan data monitoring effluent kegiatan eksisiting.	III-19 dan III-20, III-21	• Hasil pelingkungan pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH mengidentifikasi parameter TSS dan Minyak & Lemak sebagai DPH untuk kegiatan pengeboran. • Nitrit pada air laut tidak dipersyaratkan dalam baku mutu air laut untuk Biota Laut sesuaiKepMen LH No 51 Tahun 2004 (Lampiran III). Oleh karena itu parameter ini tidak dianalisis dan tidak dibahas • Rona lingkungan Nitrat dan Fosfat serta fenomena melampaui baku mutu telah dibahas secara rinci pada Sub Bab 2.1.8.3 Kualitas Air Laut di Halaman II-115 sampai dengan II-116 (Nearshore) dan Halaman II-124 sampai dengan II-125 (Offshore).	**ANDAL II-115, II-116, II-124, dan II-125**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Yang lebih tepat digunakan untuk melihat peranan mikroorganisme dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dalam air adalah nilai BOD dan DO bukan kandungan COD. BOD akan menunjukkan kemampuan mikroorganisme dalam peroses oksidasi bahan organik secara biologis sedangkan COD lebih menggambarkan oksidasi secara kimiawi. • Hasil analisis BOD dan DO seperti ditunjukkan pada Tabel Hasil analisis BOD dan DO seperti ditunjukkan pada Tabel II-35 (nearshore) dan Tabel II-36 serta Tabel II-37 (offshore) kedua parameter ini masih memenuhi baku mutu. BOD terdeteksi sangat rendah dan DO tergolong cukup baik secara umum >5 mg/L. • Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu dan izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG	**ANDAL II-117, II-126 dan II-127**
51	dampak pentingnya bukan terhadap kandungan minyak dan lemak tapi terhadap kualitas air laut secara menyeluruh, yang diindikasikan dengan beberapa parameter yang sudah melebihi baku mutu. Dan ini akan berdampak penting terhadap biota perairan. Nitrit lebih beracun dari ammonia.	III-21	• Dampak terhadap kualitas air laut untuk biota laut yang dikaji dalam ANDAL ini hanya parameter yang relevant dengan parameter yang dikandung oleh limbah yang dibuang dari kegiatan Tangguh LNG. • Identifikasi dampak potensial dan dampak penting hipotetik (DPH) dilakukan terhadap setiap parameter (variabel) lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat rencana usaha/kegiatan.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Parameter yang melampaui baku mutu dapat disebabkan oleh faktor alami (seperti nitrat, fosfat, TSS untuk air laut dan arsen dan nikel untuk sedimen) yang tidak selalu terkait dengan rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Parameter Lingkungan yang diperkirakan terkena dampak adalah sesuai dengan parameter yang terkandung dalam limbah yang dibuang. Misalnya DPH parameter TSS terkait dengan kegiatan pengerukan dan pembuangan lumpur dan serbuk bor. • Berdasarkan hal tersebut diatas maka hanya TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, Salinitas, DO, dan COD yang diidentifikasi sebagai DPH dari seluruh usaha/kegiatan rencana pengembangan Tangguh LNG yang telah dikemukakan dalam KA-ANDAL dan telah memperoleh persetujuan. Nitrit tidak dipersyaratkan pada baku mutu air laut berdasarkan KepMen LH No 51 Tahun 2004 Lampiran III (Biota Laut), namun ammonia dipersyaratkan dalam baku mutu ini	
52	Kenapa Nitrit dan pospat tidak dibahas, padahal 2 parameter ini telah melebihi baku mutu. Tolong disajikan karakter effluent yang terkait langsung dengan badan air. Buangan dari kegiatan. Data belum ada, padahal didokumen ada IPAL, drainase, dll yang langsung mengalir ke laut ?	IV-1 sd IV-15	• Nitrit pada air laut tidak dipersyaratkan dalam baku mutu air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004. Oleh karena itu parameter ini tidak dianalisis dan tidak dibahas. • Rona lingkungan parameter Nitrat dan Fosfat serta fenomena melampaui baku mutu telah dibahas secara rinci pada Sub Bab 2.1.8.3 Kualitas Air Laut di Halaman II-115 sampai dengan II-116 (Nearshore) dan Halaman II-124 sampai dengan II-125 (Offshore). • Berdasarkan hasil pelingkupan pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh KLH, Nitrat dan Fosfat tidak merupakan DPH, sehingga tidak dibahas pada Bab III (Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting) serta Bab IV (Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan)	**ANDAL II-115, II-116, II-124, dan II-125**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu dan izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG.	
53	Mohon kinerja pengelolaan yang sudah berjalan disajikan ? dan perbaikan apa yang perlu agar tidak menambah beban lingkungan. Justru di dokumen ANDAL tidak disinggung sama sekali, kinerja IPAL ?	RKL-RPL	• Hasil pemantauan air limbah dipaparkan pada laporan pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Secara umum, kualitasnya memenuhi baku mutu dan izin pembuangan air limbah yang diberikan kepada Tangguh LNG.	
	DAERAH			
A	**Viradis Yumte (Ketua Majelis Rakyat Papua)**			
1.	Perlu dilakukan pemetaan wilayah adat menurut marga dan rumpun suku serta pencatatan jumlah penduduk asli Papua yang ada di Teluk Bintuni.		Pendataan masyarakat asli berdasarkan marga dan suku telah dilakukan secara rutin dalam survey sosial ekonomi setiap duatahunan. Sedangkan kajian tentang pemetaan wilayah bukan merupakan kewenangan Tangguh. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masalah pemetaan wilayah termasuk penetapan batas-batas tanah ulayat sepenuhnya merupakan wewenang dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya tentunya akan melibatkan masyarakat adat.. Apabila diperlukan, Tangguh dapat menyampaikan hasil Studi Antropologi dan data-data masyarakat asli yang ada di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Perlu ada data yang terpisah tentang kebijakan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis yang berfokus orang asli Papua.		Pada umumnya, keseluruhan program akan berfokus pada pengembangan manusia, dan mengutamakan masyarakat asli. Namun demikian, akan ada program-program khusus yang hanya berfokus pada pengembangan masyarakat asli, sehingga implikasinya akan ada pendataan yang dipisahkan secara khusus mengenai perkembangan masyarakat asli yang menerima manfaat program. Lebih lanjut detail argumentasi ini dimuat dalam dokumen, pada lampiran 3, Perencanaan Sosial Tangguh	
B	**Supriyadi Djalimun (Bappeda Provinsi Papua Barat)**			
1.	Proyek LNG Tangguh merupakan kegiatan strategis yang ada di Provinsi Papua Barat dan termasuk sebagai salah satu kegiatan penting yang termuat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor 6. Dengan demikian diharapkan dengan adanya proyek ini di kawasan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat di daerah ini. Manfaat kegiatan pengembangan LNG Tangguh sebagaimana yang disampaikan dalam paparan tentunya menjadi harapan kita semua untuk terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan antara lain: a. Pemenuhan energi domestik sebesar 40% dari *output* kilang LNG 3 itu diperuntukan untuk domestik yang mana, berapa kira-kira yang dialokasikan untuk Papua Barat khususnya. b. Sejauhmana komitmen LNG Tangguh untuk memasok gas guna membangkitkan listrik di Papua Barat.		a) Sebagaimana yang disepakati dalam Plan of Development Train 3, 40% hasil kilang 3 diperuntukan bagi pasar domestik melalui PLN. b) Pada tahap awal, sejak Februari 2014 Tangguh LNG telah menyalurkan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site sebagai hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	c. Komitmen LNG Tangguh untuk memberikan perhatian lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen untuk itu diharapkan komitmen tersebut dicantumkan (tertulis) dalam dokumen ANDAL RKL-RPL.		c) Komitmen pemasokan gas untuk listrik Papua Barat tercantum dalam Plan of Development yang telah disetujui pemerintah. Tangguh LNG sepakat untuk memasok hingga 15 mmscfd gas saat kilang 3 beroperasi yang dapat menghasilkan hingga sekitar 50 MW listrik bagi Provinsi Papua Barat.	
C	**John A. Tulus, SH, MH (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat)**			
1.	Memperhatikan butir (3) dari **Tujuan Kegiatan Pengembangan Tangguh LNG** yaitu memperkuat kemitraan dalam pembangunan wilayah di Papua maka secara tegas dimohon agar pada bagian **Manfaat Kegiatan Pengembangan Tangguh LNG** dapat point tentang **Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah. Artinya bahwa dari 40 persen untuk pemenuhan energi domestik itu, berapa persen untuk Papua Barat perlu dipertegas**. Dengan demikian tidak hanya tergambar **Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional**. (halaman 3 → resume)		a) Sebagaimana yang disepakati dalam Plan of Development Train 3, 40% hasil kilang 3 diperuntukan bagi pasar domestik melalui PLN. b) Komitmen pemasokan gas untuk listrik Papua Barat tercantum dalam Plan of Development yang telah disetujui pemerintah. Tangguh LNG sepakat untuk memasok hingga 15 mmscfd gas saat kilang 3 beroperasi yang dapat menghasilkan hingga sekitar 50 MW listrik bagi Provinsi Papua Barat.	
2.	Memperhatikan butir 2 dari **Peningkatan Ekonomi Lokal dan Nasional** yaitu: Kontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal melalui listrik yang dihasilkan dari operasi LNG serta **kemungkinan** ke depan adanya pasokan gas untuk membangkitkan listrik di Papua Barat. Hal ini bermakna sesuatu yang belum/tidak pasti. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat di Papua Barat bahkan Tanah Papua sangat mengharapkan **kepastian** terkait pasokan gas ini. Oleh karena itu secara tegas kami memohon agar bagian ini harus lebih dipertegas kepastian pasokan gas bagi kepentingan pembangkit listrik di Provinsi Papua Barat. (halaman 8 → resume)		Komitmen pemasokan gas untuk listrik Papua Barat tercantum dalam Plan of Development yang telah disetujui pemerintah. Tangguh LNG sepakat untuk memasok hingga 15 mmscfd gas saat kilang 3 beroperasi yang dapat menghasilkan hingga sekitar 50 MW listrik bagi Provinsi Papua Barat.	
3.	Memperhatikan halaman 6 tentang **Rencana Pengembangan Lepas Pantai (Peta)**, dimohon agar lebih dipertegas batas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak dalam rangka mengantisipasi hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari antar sesame pemilik hak ulayat.		Terima kasih atas masukannya. Namun demikian, batas wilayah antar kabupaten menjadi wewenang pemerintah	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
D	**Selfiana Isir (Bapedalda Provinsi Papua Barat)**			
1.	Manfaat dari suatu kegiatan yaitu untuk pemerintah, pemrakarsa/perusahaan dan masyarakat. a. Dari hasil konsultasi publik didapatkan lebih dari setengah, 2/3% masyarakat menolak pengembangan LNG (masyarakat tidak puas atas kehadiran LNG). b. Untuk itu bagaimana usaha kita sehingga masyarakat dapat menerima/puas dengan kehadiran LNG Tangguh ini? Saran: Dalam penyusunan RKL-RPL untuk tren 3 dan 4 sebaiknya pemrakarsa melihat kembali RKL-RPL Tren 1 dan 2 yang dianggap tidak berhasil sehingga perlu ada perbaikan untuk RKL-RPL Tren 3 dan 4. c. RKL-RPL yang disusun sekarang ini masih bersifat kualitatif belum secara kuantitatif atau dapat terukut terutama indikator keberhasilannya pengelolaan dampak d. Ketenagakerjaan → berapa persen orang Papua yang diterima (minimalnya).		a. Di dalam berita acara maupun secara verbal dalam Konsultasi Publik masyarakat tidak menyatakan keberatan dan penolakan dengan adanya projek pengembangan Tangguh. Bahkan secara verbal, masyarakat mendukung pelaksana proyek pengembangan Tangguh train 3 dan juga memberikan aspirasi terkait dengan pengembangan train 3 tersebut. Demikian hasil Konsultasi Publik menunjukan aspirasi masyarakat terkait dengan pengembangan Tangguh adalah, AMDAL (12%), Infrastuktur (10%), Pendidikan (9%), Tenaga Kerja (8%), kompensasi adat (7%), pengembangan ekonomi lokal (7%), akses masyarakat, program sosial Tangguh, rekognisi adat, dan kecemburuan sosiak (6%) dan lainnya (23%). b. Laporan pelaksanaan RKL/RPL telah dikirimkan secara rutin setiap 6 bulan kepada instansi terkait termasuk, kemetrian lingkungan hidup, bapedalda papua barat, BLH Fakfak dan KLH Teluk Bintuni. c. Indikator-indikator keberhasilan secara lengkap dapat dibaca di lampiran 3 pengelolaan sosial Tangguh. d. Terima kasih pertanyaannya. Tangguh tetap pada komitmen untuk menargetkan 85% pegawai Tangguh berasal dari Papua pada tahun 2029. Oleh karena itu, Tangguh akan memberikan prioritas utama penerimaan tenaga kerja kepada orang Papua	a. Data Konsultasi Publik, Lampiran KA-ANDAL b. - c.d.e. f. g. Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	e. Peluang berusaha → usaha-usaha apa saja yang mereka dapat kerjakan (kios, warung makan, pertanian sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya).		e. Terima kasih atas pertanyaannya. AMDAL kali ini memuat perencanaan program sosial Tangguh ke depan untuk meningkatkan akses dan kapasitas masyarakat dalam menjalankan usaha (bisnis) pada berbagai bidang, yaitu: pertanian, perikanan, peternakan, manufaktur, jasa, dan bisnis lainnya	
	f. Diversifikasi mata pencaharian → mata pencaharian masyarakat lebih dari satu yaitu petani dan jasa (warung/bengkel dan lain-lain)		f. Terima kasih atas masukannya. ke depan Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangkan diversifikasi usaha (bisnis) masyarakat, tidak hanya sebatas usaha pangan, namun juga merambah usaha di bidang jasa dan manufaktur, serta usaha potensial lainnya	
	g. RKL → menyusun prosedur → berarti belum ada SOP yang dipakai sebagai acuan. Bukankah kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan, berarti sudah ada SOP yang lalu tinggal disempurnakan untuk diperbaiki saja.		g. Terima kasih atas pertanyaannya. AMDAL (termasuk RKL-RPL) kali ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atas dokumen AMDAL sebelumnya, yang didasarkan pada data evaluasi lapangan mengenai program yang telah berjalan; dan respon atas konsultasi publik yang telah dilakukan pada tahun 2012. Penulisan dokumen RKL-RPL akan diperbaiki, dengan "Melakukan pembaharuan SOP untuk memasukkan lingkup rencana pengembangan proyek.	
2.	a. Isi kolom-kolom dalam RKL-RPL belum sesuai misalnya. - Persepsi masyarakat bukan sumber dampak tetapi dampak yang dikelola. - Kesempatan kerja bukan sumber dampak tetapi dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampanya penerimaan tenaga kerja dan seterusnya. - Begitupun dengan bentuk pengelolaan dan indikator keberhasilan pengelolaan.		a. Sumber dampak diperbaiki dalam tabel RKL/RPL	a.
	b. Institusi pengelolaan (pengawas) juga harus sebagai penerima pelaporan.		b. Diperbaiki dalam dokumen RKL/RPL	b. –
	c. Lokasi kelola → sebutkan nama kampung-kampung yang ada disekitar lokasi LNG!		c. Daftar nama-nama kampung telah dicantumkan dalam dokumen ANDAL pada Bab I Pendahuluan	**c. ANDAL I-208 s / d I-210**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
E	**Bambang Heriawan. S (Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat)**			
1.	Eksisting 2 anjungan lepas pantai Jaringan pipa bawah laut. Tambahkan perizinan dari Kemenhub?	5	Fasilitas anjungan lepas pantai dan jaringan pipa bawah laut yang ada saat ini telah dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti : • Izin fasilitas penggunaan radio di perairan (*Marine Radio Facility Permit*) untuk anjungan - (DEPKOMINFO/ HUBLA). • Izin Lokasi Anjungan (HUBLA). • Izin pemasangan jaringan pipa/persetujuan pemasangan pipa untuk jaringan pipa bawah laut (HUBLA). • Surat rekomendasi dari pejabat pelabuhan yang berwenang untuk izin pemasangan jaringan pipa (HUBLA). • Spesifikasi teknis untuk SNBP (HUBLA) • Izin alat bantu navigasi permanen (HUBLA) • Mendapatkan nomor SBNP dan Pengumuman kepada Komunitas Maritim (HUBLA) • Zona terbatas terlarang untuk keselamatan di sekitar anjungan dan jaringan pipa (HUBLA) • Izin *Marine Clearance* termasuk *Customs Immigration* dan Karantina (HUBLA/ IMMIGRATION/ CUSTOM & EXCISE/QURANTINE)	
2.	Rencana: Pembangunan 9 ALP Jaringan bawah laut. Tambahkan rekomendasi teknisnya?	5	Rekomendasi teknis dan semua perizinan yang diperlukan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan rekomendasi teknis dan aplikasi izin yang diperlukan akan diajukan setelah didapatkan persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan dan sesuai dengan jadwal pengembangan fasilitas tersebut	
3.	Terhadap fasilitas ALP dan jaringan PBL bagaimana pengaturan implementasi keselamatan pelayarannya.	5, 7	Untuk melindungi instalasi dan kapal-kapal yang lewat di sekitar anjungan, pada anjungan akan dipasang alat bantu navigasi (*navigation aid*) serta dilengkapi dengan radar. Selain itu, di batas daerah terlarang di sekitar anjungan, akan dipasang sarana bantu navigasi pelayaran berupa *marine buoy*.	
4.	Sumber daya alam rencana jaringan listrik bawah laut.	8		

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Setelah pipa terpasang, jalur pipa dan lokasi anjungan akan dimasukkan ke dalam *Marine Chart*. Sesuai UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2011, maka zona terbatas terlarang untuk fasilitas lepas pantai adalah sebagai berikut : - Area terlarang, yaitu 500 m diukur dari titik terluar fasilitas lepas pantai/instalasi migas dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh; - Area terbatas, yaitu 1250 m diukur dari titik terluar area terlarang atau fasilitas lepas pantai/instalasi migas dimana kapal pihak ketiga boleh melewatinya tetapi dilarang membuang sauh..	
F	**Widji Slamet (Dis DWK Nakertrans Papua Barat)**			
1.	Masukkan agar dimasukkan dalam dokumen tentang jumlah kebutuhan tenaga kerja saat kegiatan konstruksi, operasi, pasca operasi.		Kebutuhan tenaga kerja pada saat kegiatan konstruksi , dan operasi telah termuat dalam dokumen, pada lampiran 3: pengelolaan sosial Tangguh	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
2.	Koordinasi dengan dinas yang menangani ketenagakerjaan dalam rangka penerimaan tenaga kerja.		Terima kasih atas masukannya. Tangguh selalu melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai kegiatan penerimaan tenaga kerja dan sudah tercantum di dalam tabel RKL/RPL.	Tabel RKL/RPL Tangguh LNG
3.	Penerimaan tenaga kerja dapat memprioritaskan putra/putrid yang akan terkena dampak kegiatan proyek.		Terima kasih atas masukannya. Khusus untuk penerimaan tenaga kerja, Tangguh memprioritaskan kepada masyarakat asli yang tinggal di sekitar proyek	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
4.	Perusahaan berkewajiban meningkatkan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat.		Terima kasih atas masukannya. Peningkatan SDM masyarakat menjadi salah satu perencanaan sosial utama Tangguh ke depan. Detail program dapat dilihat pada dokumen, lampiran 3: perencanaan sosial Tangguh	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
G	**Makalius Taribaba (Dinker Papua Barat)**			
1.	Kalau bisa data (jumlah) kasus HIV, AIDS, IMS, TB dan Kusta juga dimasukkan. Untuk bisa menjadi dasar (acuan) sebagai tolok ukur untuk, melihat indikator keberhasilan bagi masyarakat yang terkena dampak dan bisa dievaluasi.	I-8	Di dalam menilai keberhasilan program masyarakat dapat digunakan beberapa indikator dan Tangguh LNG telah menggunakan beberapa indikator yang berhubungan dengan program Ibu dan Anak, Malaria (Incident and prevalensi), termasuk untuk program HIV/AIDS dan TB, tetapi memang untuk program HIV/AIDS dan TB, Tangguh LNG belum menggunakan jumlah kasus sebagai indikator, tetapi lebih pada jumlah atau frekuensi pendekatan dan edukasi yang dilakukan pada kelompok resiko tinggi. Sedangkan untuk IMS, Tangguh LNG telah dan akan mendukung akses bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemerikasaan yang memadai untuk melakukan diagnosis. Untuk saat ini kusta belum termasuk dalam program yang secara khusus didukung oleh Tangguh LNG, sehingga tolok ukur yang berhubungan dengan kusta belum masuk dalam indikator. Tetapi secara umum, karena Tangguh LNG telah dan akan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas; maka pencegahan dan penanganan kusta juga akan meningkat.	
2.	Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah masyarakat yang terkena dampak.	Tenaga kesehatan	Tangguh LNG telah dan akan mendukung Dinas Kesehatan dalam menjalankan program-program untuk meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di masyarakat.	
3.	Bersama Pemda (Dinkes) Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak untuk menyediakan logistik (obat-obatan) bagi pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak.	Penyediaan logistik dan obat-obatan	Tangguh LNG mendukung Dinas Kesehatan didalam menyediakan obat-obatan di kampung-kampung sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat, terutama penyakit-penyakit yang masih menjadi perhatian utama di masyarakat, seperti diare dan malaria.	
4.	Perlu adanya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat terkena dampak.	Fasilitas pelayanan kesehatan	Tangguh LNG telah dan akan mendukung Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit didalam pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti fasilitas yang ada di Rumah Sakit dan beberapa Puskesmas.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
H	**Chesty Sahetapy (BLH Kabupaten Fakfak)**			
1.	Klarifikasi: dalam proses pemilihan wakil masyarakat di Kabupaten Fakfak, selain Bappeda masuk dalam anggota komite, BLH Fakfak juga masuk, Asisten II Setda, Pertambangan.	9 (buku kecil)	Terimakasih atas klarifikasi yang diberikan, masukkan akan diperbaiki dalam dokumen	
2.	Terkait dengan RKL-RPL parameter kesempatan kerja. Perlu ada pembicaraan dan keterbukaan terkait penyerapan tenaga kerja, dimana ada presentasi/porsi dari masing-masing suku sekitar lokasi kegiatan termasuk Fakfak sehingga prosentasi 85% yang diharapkan pada tahun 2029 adalah pekerja Papua tetap menjadi komitmen LNG dan kita semua. Serta spesifikasi dan kualifikasinya perlu disampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Prioritas pada lokasi-lokasi terkena dampak.	33 (buku kecil)	Tangguh LNG berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat asli dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Untuk lebih lanjut komitmen Tangguh LNG spesifikasi dan kualifikasi mengenai tenaga kerja dapat dilihat di lampiran Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Pengembangan Kapasitas Masyarakat Papua.	Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh, subab Pengembangan Kapasitas Masyarakat Papua
3.	Di Papua telah ada politeknik Negeri di Fakfak, kiranya ada perhatian dari LNG terhadap hal ini.		Salah satu komitmen Tangguh LNG adalahh untuk mengembangkan Politeknik di Papua Barat, dimana politeknik yang ada di Fakfak menjadi pertimbangan utama.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
4.	Perlu ada SMA terpadu di kawasan teluk (khusus di Fakfak).		Terima kasih, masukan ini akan kami catat dan menjadi pertimbangan kami untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kami berkomitmen ke depan untuk membangun beberapa sekolah unggulan, yang dapat melayani pendidikan masyarakat, termasuk Fakfak.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
I	**Aroby H (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Fakfak)**			
1.	Masyarakat Patuanan Arguni menyampaikan kalau rig itu dibangun, dan usaha kerja, mata pencaharian berkurang dalam arti usaha nelayan		Terima kasih atas masukannya. Tangguh sudah mempertimbangkan aspek dampak pengembangan terhadap penurunan pendapatan nelayan. Oleh karena itu, Tangguh akan mengimplementasikan program pemulihan pendapatan nelayan yang terkena dampak; dan akan mengembangkan berbagai program peningkatan pendapatan serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 dan Dokumen RKL
2.	Wilayah pemekaran baru di wilayah Patuanan Arguni, Goras, dipecah menjadi Goras Selatan, Arguni menjadi KAmpung Taver		Terima kasih atas masukannya. Pendekatan AMDAL kali ini tidak lagi mendasarkan pada pendekatan wilayah (DAV), namun lebih mendasarkan pada pendekatan kepada pengembangan manusia (masyarakat asli), oleh karena itu secara tidak langsung area pengelolaan menjadi lebih luas	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
J	**Hans Sahupala (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupten Fakfak)**			
1.	Perlu ditambahkan penjelasan tentang pengelolaan penanganan *blowout* sumur produksi.		Reservoir-reservoir gas untuk Proyek Tangguh LNG secara keseluruhan telah dievaluasi melalui program seismik 2-Dimensi dan 3-Dimensi, pengeboran eksplorasi dan delineasi, pengukuran logging (well logs), program pengukuran karakteristik batuan (coring) yang ekstensif, dan kegiatan pengujian sumur. Data-data tersebut secara keseluruhan akan dimasukkan ke dalam rancangan sumur. Komponen utama rancangan sumur meliputi rancangan casing, program logging, program lumpur bor, program cementing dan kriteria-kriteria MODU. Rancangan sumur ini telah memperhitungkan kondisi masuknya aliran fluida reservoir ke dalam sumur dan cara penanggulangannya, sehingga resiko terjadinya ledakan (blowout) dapat diminimalisir. Pengontrol primer sebuah sumur yang sedang dibor akan menggunakan lumpur bor sedemikian rupa sehingga tekanan hidrostatik dari formasi di sekitar lubang sumur tidak lebih besar dari tekanan hidrostatik dari lumpur bor itu sendiri. Pengontrol sekunder sebuah sumur adalah dengan pemasangan shallow gas diverter sebelum pemboran dimulai pada bagian permukaan dan pemasangan Blow Out Preventer (BOP) sebelum pemboran dimulai pada bagian yang lebih dalam. Pemasangan alat-alat ini sebagai pengontrol sekunder sebuah sumur yang memungkinkan pembuangan fluida dan penyesuaian tekanan hidrostatik yg dihasilkan lumpur bor. Jika terjadi kick pada sumur, maka metode kontrol sumur akan diaktivasi. Sumur akan ditutup (shut-in) dan dilanjutkan dengan mensirkulasikan kick keluar menggunakan kill mud dan kemudian sumur tersebut akan dipantau. Jika semua parameter telah kembali ke posisi normal, maka operasi pengeboran akan dilanjutkan.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Kemungkinan terburuk, jika kick tidak dapat dikendalikan atau terjadi ledakan (*blow out*), tindakan tanggap darudat diperlukan untuk mengevakuasi personel dari rig dan operasi kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rig/MODU yang berbeda untuk menutup sumur tersebut dengan cara mengebor sumur relief. Rancangan sumur relief dan seluruh peralatan akan disiapkan sebelum program kerja sumur pengembangan dilaksanakan. Penjelasan ini telah ditambahkan pada Deskripsi Rencana Kegiatan Proyek di dokumen ANDAL Bab 1 Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas.	**ANDAL Bab 1 Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas Halaman 1-30**
2.	Apakah BP Tangguh mempunyai peralatan mengatasi terjadi *force major* pada kilang maupun anjugan.		Tangguh LNG telah menyediakan peralatan terkait kondisi darurat seperti terjadinya tumpahan dan lainnya untuk mendukung kegiatan operasinya sesuai dengan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP – Emergency Response Plan). ERP untuk kegiatan saat ini telah tersedia dan merupakan dokumen terpisah dari AMDAL	
3.	Mengingat kondisi geologi wilayah pengembangan trend 3 dan 4 berada pada wilayah yang sangat aktif gerakan tektoniknya sehingga ini menjadi perhatian serius untuk penanggulangannya dan penanganannya.		Basis disain rancang fasilitas Kilang LNG di darat mengacu kepada beberapa referensi/kode seperti SNI 1726-2012 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung), ASCE 7-10 (*Minimum Design Load for Buildings and Other Structures*). Sedangkan untuk instalasi lepas pantai menggunakan referensi ISO 19901-2: Petroleum and natural gas industries – Specific requirement for offshore structures. Part 2: *Seismic design procedures and criteria*; dan ISO 19902: *Petroleum and natural gas industries – Fixed offshore structures*	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Desain dan rancang bangun fasilitas kilang LNG (*Onshore Facilities*) termasuk juga anjungan lepas pantainya (*Offshore Platforms*) telah mempertimbangkan skenario terburuk jika terjadi gempa dan telah memenuhi standard internasional dan nasional yang berlaku. Sebagai contoh misalnya untuk konstruksi anjungan lepas pantai (*offshore platforms*) telah memenuhi keriteria agar tidak terjadi keruntuhan struktur akibat gempa dengan periode ulang 10.000 tahun. Penanggulangan dan penanganan kondisi darurat seperti terjadinya tumpahan dan lainnya sesuai dengan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP – *Emergency Response Plan).* ERP untuk kegiatan saat ini telah tersedia dan akan diperbaharui untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	
K	**TH. Sihombing (KLH Kabupaten Bintuni)**			
1.	Hubungan eksternal. a. Bagaimana penyelesaian antara masyarakat dengan pihak Tangguh LNG atas ketidakpuasan masyarakat terhadap AMDAL Tahun 2002. b. Tentang adanya tuntutan masyarakat setempat terhadap uang kompensasi ketuk pintu bagi masyarakat yang memasuki wilayah ada tertentu.	40	a. Tangguh telah melakukan kajian melalui konsultan independen terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2002. Adapun ketidakpuasan masyarakat kemungkinan lebih disebabkan adanya komunikasi terkait dengan pelaksanaan AMDAL Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh akan melakukan sosialisasi pelaksanaan AMDAL pertama setelah persetujuan AMDAL diterima. b. Tangguh LNG sangat menghargai keberadaan adat, termasuk diantara hak-hak masyarakat. Namun, Tangguh LNG juga tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasri tersebut. Hal ini dikarenakan Tangguh LNG hanya merupakan kontraktor bukan sebagai pemilik sumber daya.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
L	**Robert Kemon (KLH Kabupaten Bintuni)**			
1.	Agar dicantumkan peraturannya.	15	Peraturan sudah dicantumkan dalam KA sesuai PerMenLH no. 16/2012 Peraturan spesifik terkait parameter sampling dan baku mutu dalam dokumen RKL RPL sudah dicantumkan dalam tabel untuk setiap komponen lingkungan tersebut, seperti tercantum pada dokumen RKL dan RPL lampiran II tabel 1 - 11.	**Lampiran 2 RKL-RPL Tabel 1 sampai dengan Tabel 11**
2.	Agar menyebut nama lokasi sampling dan titik sampling.	13	Lokasi sampling tercantum pada dokumen RKL dan RPL Lampiran IV Peta Pemantauan Lingkungan dan Sosial	**Lampiran 4 RKL-RPL**
M	**M. Saiful Adha (Setda Kabupaten Teluk Bintuni)**			
1.	Dari pembukaan lahan yang akan dilakukan, agar dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi.	82	Pembukaan lahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Uraian tentang rencana pembukaan lahan dapat dilihat pada dokumen ANDAL Bab 1 Sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG, Sub bab B3 dan rencana pengelolaannya pada dokumen RKL-RPL halaman II-20 sampai dengan II- 41.	**ANDAL halaman I-99 dan I-100;** **RKL-RPL halaman II-20 s/d II-41**
2.	Agar dipikirkan pemanfaatan kayu ex tebangan IPK dalam rangka pembukaan lahan yang akan dilakukan mengingat kayu ex tebangan IPK terdahulu hingga saat ini belum/tidak dimanfaatkan.	82	Saran diperhatikan. Pemanfaatan kayu ex tebangan IPK akan dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan Dinas terkait.	
N	**Kabupaten Teluk Bintuni**			
1.	Soal mata pencaharian dan pendapatan sub pelatihan pertanian, perikanan dan peternakan dengan melihat/evaluasi tren 1 dan 2 maka pragraf yang sama perlu dilakukan kajian yang dalam, karena tren 1 dadn 2 tidak berhasil baik.	32	Tangguh telah melakukan kajian melalui konsultan independen terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2002. Adapun ketidakpuasan masyarakat kemungkinan lebih disebabkan adanya komunikasi terkait dengan pelaksanaan AMDAL Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh akan melakukan sosialisasi pelaksanaan AMDAL pertama setelah persetujuan AMDAL diterima.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Parameter persepsi masyarakat dan ketegangan sosial. Bahwa trauma tren 1 dan 2 mempengaruhi pola pikir/persepsi masyarakat tentang tren 3 dan 4 nanti, sehubungan maka untuk tren 3, maka komunikasi dan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat bersama pemerintah.	33	Tim *Community relation* Tangguh secara rutin melakukan kunjungan ke kampung-kampung untuk berkonsultasi secara langsung dengan masyarakat terkait isu-isu sosial dan isu yang terkait dengan kegiatan operasi Tangguh LNG.	
	PUSAT			
A	**Aldi Radyanto (Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum)**			
1.	**PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN**. Yang perlu untuk menjadi perhatian adalah keberadaan Cagar Alam Teluk Bintuni (lampiran I) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, dan sekaligus akan ditetapkan dalam Perpres tentang RTR Hayati Teluk Bintuni (Lampiran 2-3) di sebelah timur dari lokasi lapangan Tangguh. Penetapan ini didasarkan pada amanat PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN tersebut.		Terimakasih atas informasi yang diberikan. Cagar Alam Teluk Bintuni terletak kurang lebih 80 km di sebelah timur dari lokasi kegiatan Tangguh LNG. Berdasarkan hasil evaluasi dampak dan juga semua modelling yang telah dilakukan, menunjukkan kegiatan Tangguh LNG tidak akan menimbulkan dampak terhadap Cagar Alam Teluk Bintuni	
2.	Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Teluk Bintuni yang telah ditetapkan sejak Desember 2012, dan untuk Kabupaten Fakfak juga telah memiliki Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Fakfak. Untuk itu dianjurkan agar pihak pemrakarsa dapat memiliki izin lokasi kesesuaian ruang kepada pemerintah kabupaten dengan rekomendasi dari pemerintah provinsi (karena mencakup 2 kabupaten), dan dimohon untuk melampirkan surat izin lokasi tersebut dalam dokumen ANDAL selanjutnya (perbaikan setelah rapat Tim Teknis).		Fasilitas Tangguh LNG saat ini, telah dilengkapi dengan Izin Lokasi sesuai Keputusan No. 83 Tahun 1999 tentang Pemberian Izin Lokasi bagi Proyek Tangguh LNG. Izin lokasi telah dilampirkan dalam dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH berdasarkan Surat Keputusan Deputi MenLH No 30 Tahun 2013. Lokasi Tangguh LNG sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak	
3.	Dalam Perda RTRW Kabupaten Teluk Bintuni, Pasal 37 dijelaskan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten, dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, untuk itu kepada pihak BP diminta untuk memantau perkembangan penyusunan RTRW Kawasan Strategis tersebut untuk memperkuat status wilayah pengembangan lapangan Tangguh (lampiran 4-5).		Saran diperhatikan.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
4.	Melihat dari peta yang ditampilkan, terdapat lokasi pengembangan lapangan yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (disebelah utara dari teluk), untuk itu perlu untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengatur tentang pemakaian lokasi tambang di kawasan hutan lindung.	Gambar 1.2	Lokasi Tangguh LNG termasuk Kilang LNG dan fasilitas pendukungnya yang ada di darat berada di pantai Selatan Teluk Bintuni. Tidak ada kegiatan atau fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari rencana kegiatan pengembangan Tangguh LNG yang tercakup dalam AMDAL ini yang lokasinya ada di dalam kawasan hutan lindung di pantai utara teluk Bintuni.	
5.	Dimohon untuk menampilkan peta pola ruang RTRW Kabupaten Teluk Bintuni dan RTRW Kabupaten Fakfak yang telah di *overlay*-kan dengan lokasi kegiatna eksisting dan pengembangan.		Peta RTRW sudah dicantumkan dalam dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH berdasarkan Surat Keputusan Deputi MenLH No 30 Tahun 2013 (Buku I Kerangka Acuan ANDAL Gambar 2-1, 2-2 dan 2-3 Hal. 2-3 sd 2-5). Lokasi kegiatan Tangguh LNG sudah tercantum dalam peta RTRW Teluk Bintuni.	
6.	Menambahkan daftar istilah/akronim dalam dokumen.		Telah ditambahkan pada dokumen perbaikan	
7.	Flaring (suar bakar) diolah kembali untuk dapat dijadikan bahan bakar gas untuk nelayan setempat sehingga mengurangi buangan gas yang sia-sia.		Untuk saat ini, desain Tangguh LNG tidak memungkinkan opsi ini untuk dilaksanakan. Namun demikian, untuk pengembangan Kilang LNG 3, Tangguh akan menyediakan dan menjual 4 MW listrik ke PLN untuk dijual dan didistribusikan ke penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, dan menyediakan peluang untuk menyediakan tambahan 4 MW pada tahun-tahun setelahnya hingga Train 3 mulai beroperasi. Saat Kilang LNG 3 beroperasi, gas sebesar maksimum 15 mmscfd yang cukup untuk menghasilkan hingga 50 MW listrik akan dialokasikan untuk dijual dari Kilang LNG 3 kilang Tangguh. Listrik yang dihasilkan akan mendukung dibangunnya infrastruktur lokal, selain juga kegiatan komersil dan menstimulasi pengembangan industri ringan, khususnya di desa-desa di Utara Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 9** **ANDAL I-2**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Pengelolaan Kualitas Udara terkait suar bakar dapat dilihat pada Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sub Bab 3.1 Suar Bakar antara lain dengan melanjutkan upaya meminimalkan jumlah emisi gas suar bakar.	
8.	Terdapat aktivitas yang berada di sekitar aliran sungai, mohon diperhatikan jarak sempadan sungai yang ditetapkan oleh peraturan terkait.		Sungai terdekat dengan kegiatan Tangguh LNG adalah sungai Saengga 1,5-2 km yang terletak di sebelah Barat dan sungai Manggosa 5,7 km yang terletak di sebelah Timur (Sub Bab 2.1.4 Hidrologi, Gambar II-15 Sungai dan Anak Sungai di Area Tangguh LNG) Rencana pengelolaan untuk aliran sungai juga sudah dimasukkan ke dalam RKL-RPL Bab 2.3, yaitu mempertahankan daerah sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter pada sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 meter pada sungai kecil sesuai dengan peraturan PP 38 Tahun 2011.	**ANDAL II-26** **RKL-RPL Bab 2.3**
9.	Penambahan jadwal pengajuan dan penyelesaian izin-izin yang diperlukan.		Izin-izin lingkungan yang diperlukan dapat dilihat pada RKL-RPL Bab IV - Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan. Proses pengajuaan dan penyelesaian izin akan dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan dengan mengacu pada aturan yang berlaku.	**RKL-RPL IV-1**
B	**Sugiarto (Dit. Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM)**			
1.	Kualifikasi tenaga kerja akan ditentukan dari hasil studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan akan dijelaskan dalam RKL-RPL. Tetapi di dalam RKL-RPL tidak menjelaskan hal tersebut.	I-19	Kebutuhan tenaga kerja pada saat kegiatan konstruksi , dan operasi telah termuat dalam dokumen, pada lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh subab Pengembangan Kapasitas Masyarakat Papua	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3
2.	Agar dilengkapi ketentuan tentang area terbatas terlarang pada keberadaan anjungan di lepas pantai sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1973 dan Permenhub No. 68 tahun 2011.	I-41	Ketentuan area terbatas-terlarang telah disampaikan dalam dokumen ANDAL halaman I-138 sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.	**ANDAL I-138**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
3.	Pada kegiatan pembersihaan sumur (*flaring*) yang berlangsung selama ± 72 jam, agar disiapkan fasilitas/perangkat OSCP, mengingat pernah ada kejadian *oil spill* (*liquid* yang terikut tidak tertampung dalam tanki/separator) di Laut Jawa beberapa waktu lalu pada saat uji sumur (*well test*).	I-37	Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP – *Emergency Response Plan*) untuk kegiatan saat ini telah tersedia dan akan diperbaharui untuk kegiatan pengembangan Tangguh LNG.	
4.	Pada tahap pasca operasi kegiatan eksploitasi gas, agar dijelaskan/diuraikan metode yang akan digunakan untuk well P dan A dan *Decommissioning Facilities*. a. Well P dan A: rig/rig less b. Decomm platform: rigs to reef/removing	I-45	Rencana penutupan proyek (*decomissioning*) dipersiapkan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku saat itu. Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan untuk penutupan proyek adalah sbb: Anjungan lepas pantai dan fasilitasnya akan di-decommissioning dan dibongkar sesuai dengan Peraturan Indonesia dan kewajiban KKKS. a. Prosedur penutupan sumur juga akan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia (Standar Nasional Indonesia No. 13-6910-2002) dan prosedur baku yang berlaku di KKKS.. b. Fasilitas anjungan lepas pantai kemungkinan akan dipotong dan dibawa ke darat, atau sebagai alternatif dapat ditinggal untuk pengembangan terumbu karang. c. Pipa bawah laut akan dibersihkan (*flush*), dan ditinggalkan di tempat. Penjelasan mengenai rencana penutupan proyek dapat dilihat pada dokumen ANDAL Sub Bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas D2. *Decommissioning* Fasilitas Anjungan Lepas Pantai	**ANDAL I-45 s / d I-46**
5.	Jalur yang akan digunakan untuk jaringan pipa gas agar dipastikan di masa yang akan datang jalur tersebut tidak termasuk lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan/pengembangan dari kegiatan sektor lainnya. Misalnnya sebagai alur pelayaran menuju pelabuhan yang akan dibangun.	I-59	Dalam perencanaan jaringan pipa akan dikoordinasikan dengan pihak maupun instansi terkait untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan rencana pengembangan dari kegiatan lainnya. Sehubungan dengan alur ke pelabuhan Tangguh LNG, jalur pipa di daerah pantai menuju ke darat akan berada di sebelah timur di luar alur masuk pelabuhan Tangguh LNG.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
6.	Pada saat kegiatan *hydrotest* pipa penyalur maupun tanki dan boiler, agar dipastikan bahwa bahan kimia yang digunakan dan dilarutkan dalam air *hydrotest* adalah bahan kimia yang ramah lingkungan/tidak toxic.	I-76	Hanya kegiatan *hydrotest* jalur perpipaan dari anjungan ke fasilitas darat yang menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan merupakan bahan kimia yang termasuk dalam daftar bahan kimia yang telah disetujui oleh Migas.	
7.	Terdapat sumber dampak dari kegiatan eksplorasi (pemboran dan seismik) yang harus dikelola. Apakah kegiatan pengembangan Tangguh LNG ada kegiatan eksplorasi?	RKL-RPL II-8	Terdapat kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan sebagai bagian dari rencana pengembangan tahap awal dan pengembangan tahap selanjutnya yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini. Rencana kegiatan dan dampaknya telah dibahas dalam ANDAL dan rencana pengelolaannya dalam RKL-RPL.	
8.	Dampak terhadap peningkatan kebisingan dibawah laut dari sumber dampak pengeboran sumur gas apakah tidak perlu dilakukan pengelolaan? Karena berdasarkan hasil evaluasi dampak penting hipotetik, sifat penting dampak adalah moderat penting, yang artinya sejauh mungkin dampak harus dikelola.	RKL-RPL II-10	Pengelolaan dampak terhadap peningkatan kebisingan bawah laut terkait dengan mamalia laut dilakukan antara lain dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan serta menerapkan Panduan JNCC, misalnya dengan menerapkan prosedur Soft Start pada saat survei seismik untuk memberikan kesempatan mamalia laut untuk menghindar.	**RKL-RPL II-4**
C	**Erikson A.S (Dit. Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM)**			
1.	Mengacu pada Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 pelaksanaan flaring pada saat pembersihan sumur (*well clean-up*) sebelum tahap produksi (selama 48-72 jam) agar diberitahukan/dilaporkan kepada Ditjen Migas (kepala inspeksi).	I-36 s.d I-37	Kegiatan flaring pada saat pembersihan sumur akan dilaporkan sesuai dengan PerMen ESDM no 31 tahun 2012.	
2.	Sebaiknya mencantumkan peraturan, standar/code untuk pemasangan/pembangunan pipa transmisi gas antara izin penggunaan SNI wajib No. 3474.	I-44	Desain dan konstruksi jaringan perpipaan akan mengacu pada peraturan ataupun standard/*code* yang terkait dengan sistem penyaluran/distribusi gas. Baik itu aturan/standard Indonesia seperti SNI 3474 maupun aturan/standard internasional seperti antara lain DnV.	
3.	Pelaksanaan *hydrotest* untuk tangki LNG dan tangki kondensat belum dipaparkan karena *hydrotest* akan dilakukan pada tangki dan membutuhkan volume yang besar (± 170.000 m^3 untuk tangki LNG dan ± 31.800 m^3 untuk tangki kondensat) serta juga *hydrotest* untuk boiler.	I-102	Estimasi volume hydrotest untuk : - Tangki LNG = 0,5 x 170.000 = 85.000 ton air - Tangki kondensat = 0,8 x 31.800 = 25.440 ton air - Tangki utilitas lainnya ± 25.500 ton air	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Hydrotest untuk tangki LNG dan kondensat tidak menggunakan bahan kimia. Penjelasan rinci mengenai hydrotest untuk tangki dapat dilihat pada Deskripsi Kegiatan Bab 1 ANDAL Sub Bab 1.2.3. Kegiatan Kilang LNG. Pengelolaan kegiatan hydrotest untuk Tangki LNG dan tangki kondensat dipaparkan pada RKL RPL Lampiran I halaman 6.	**Lampiran I RKL-RPL Hal. 6-7**
4.	Untuk pelaksanaan pembuangan gas suar bakar (*flaring*) agar mencantumkan ketentuan yang berlaku yaitu Permen ESDM No. 31 tahun 2012.	I-110	PerMen ESDM No. 31/2012 sudah dicantumkan pada dokumen RKL RPL Lampiran I Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan butir 3 .1 Suar Bakar	**Lampiran I RKL-RPL Hal. 9**
D	**Aris Budiarto (Dit. SDI, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan)**			
1.	Dampak perubahan kelimpahan benthos a. Sebelum pengerukan dan setelah pengerukan dibandingkan. b. Benthos mempunyai fungsi ekologis dalam perairan, hilangnya jenis benthos tertentu dapat menjadi indikator kualitas lingkungan yang tercemar (bio indikator). c. Perhatikan juga peran benthos dalam rantai makanan.	64	Pemantauan kualitas benthos sebelum kegiatan telah dilakukan dan hasilnya dijadikan rona lingkungan (Bab 2 – Rona Lingkungan, Sub Bab 2.2.2.2 Biota Perairan Laut, Benthos). Pemantauan kualitas benthos akan dilakukan pada saat kegiatan dan setelah kegiatan pengerukan, dan hasilnya akan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.	**ANDAL II-274** **RKL-RPL Hal. III-56**
2.	Rona lingkungan mamalia dan reftilia laut Selain lumba-lumba, paus dan penyu, tim perlu melakukan inventarisasi terhadap sumber daya ikan lainnya di lokasi tersebut terhadap ikan-ikan endemik/asli perairan dan sumber daya ikan lainnya, baik yang bernilai ekonomis penting maupun bernilai ekologis penting → buat rencana pengelolaan terhadap perikanan di lokasi khususnya perikanan tangkap.	65	Inventarisasi terhadap sumber daya ikan lainnya dapat dilihat pada rona Lingkungan (Bab 2 – Rona Lingkungan, Sub Bab 2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan). Rencana pengelolaan dampak dari kegiatan operasional Tangguh LNG terhadap kegiatan perikanan dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL, antara lain pada pada Sub Bab 2.1 Matriks Ringkasan Kegiatan Eksploitasi Gas - 1.3 Tahap Operasi - Dampak Sosial - 1. Kegiatan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi	**ANDAL II-282** **RKL-RPL II-6**
3.	Dampak penting lingkungan kegiatan kilang LNG dan terminal khusus → perubahan keanekaragaman nekton → modem. Jadi perlu dikaji lebih mendalam, terutama difokuskan pada ikan-ikan ekonomis penting, bandingkan hasil tangkapan ikan sebelum eksplotasi dan sesudah eksploitasi → kelimpahan dan keragaman.	71 s.d 72	Tangguh LNG telah melakukan survey perikanan pada tahun 2004, 2007, 2009 dan 2013. Hasil survei yang telah dilakukan selama ini digunakan sebagai data rona lingkungan untuk studi AMDAL ini.	**ANDAL II-282**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Inventarisasi terhadap sumber daya ikan, termasuk ikan ekonomis penting, dapat dilihat pada rona Lingkungan (Bab 2 – Rona Lingkungan, Sub Bab 2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan). Survei perikanan akan dilakukan pada tahap konstruksi dan tahap operasi secara rutin setiap 3 tahun sekali dan hasilnya akan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan.	**RKL-RPL III-13**
4.	Rencana pembuangan limbah ke laut → perlu dikaji dampak terhadap pencemaran ekosistem di laut pada lokasi pembuangan. Bandingkan sebelum dan sesudah pembuangan limbah di lokasi. Lihat komposisi ikan, dan fauna lainnya.	74	Evaluasi dampak pembuangan limbah ke laut dapat dilihat pada Sub Bab 3.3.1.9 Kualitas Air Laut. Survei perikanan akan dilakukan pada tahap konstruksi dan tahap operasi, dan hasilnya akan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan	**ANDAL III-215** **RKL-RPL III-13**
5.	Rencana pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna a. Buat data *baseline* kelimpahan dan keragaman untuk mamalia laut dan hasil tangkapan ikan oleh nelayan dalam data series (minimal 5 tahun). b. Survei perikanan bisa dilakukan dengan memonitor besarnya jumlah tangkapan ikan sebelum dan sesudah ada eksploitasi.	82	Tangguh LNG telah melakukan survey perikanan pada tahun 2004, 2007, 2009 dan 2013. Hasil survei yang telah dilakukan selama ini digunakan sebagai data rona lingkungan untuk studi AMDAL ini. Baseline hasil tangkapan ikan dapat dilihat pada rona Lingkungan (Bab 2 – Rona Lingkungan, Sub Bab 2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan) Survei mamalia laut telah dilakukan pada tahun 2006, 2007 dan 2013, deskripsi rona lingkungan mamalia laut dapat dilihat pada Sub Bab 2.2.2.6 . Mamalia dan Reptilia Laut. Survei perikanan dan mamalia laut akan dilakukan pada tahap konstruksi dan tahap operasi secara rutin setiap 3 tahun sekali dan hasilnya akan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan, termasuk besarnya jumlah tangkapan ikan	**ANDAL II-282** **ANDAL II-305** **RKL-RPL III-13**
6.	Dampak penting sosial kegiatan eksploitasi gas Gangguan kegiatan perikanan, perlu diperhatikan (dampak mayor) a. Berkurangnya pendapatan nelayan. b. Alternatif mata pencaharian untuk nelayan. c. Kompensasi. d. Program rehabilitasi habitat: penanaman mangrove, pembuatan rumah ikan, re-stocking, dan sebagainya.	14 s.d 17	Sudah dibahas di dalam Bab Evaluasi Dampak di bab 3. Tangguh sudah mempertimbangkan aspek dampak pengembangan terhadap penurunan pendapatan nelayan. Oleh karena itu, Tangguh akan mengimplementasikan program pemulihan pendapatan nelayan yang terkena dampak; dan akan mengembangkan berbagai program peningkatan pendapatan serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak	Bab 3 Evaluasi Dampak Penting subab Gangguan Perikanan dan Pendapatan Nelayan

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
G	**Andi Raspial dan Wahyudin (Dit KPLP, Kementrian Perhubungan)**			
1.	Pada saat pelaksanaan kegiatan, kegiatan *offshore* maka harus berkoordinasi dengan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) setempat, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.		Koordinasi akan dilakukan seperti pelaksanaan yang telah berjalan selama ini.	
2.	Kapal-kapal yang keluar masuk ke lokasi kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan *offshore* harus mendapat *clearance in* (izin masuk) dan keluar (surat izin berlayar) dari KUPP setempat.		*Clearance* akan dilakukan seperti yang telah dilaksanakan selama ini.	
3.	Ditambahkan data rencana intensitas kapal pada saat proses mobilisasi alat dan bahan.		Perkiraan intensitas kapal selama periode konstruksi adalah sebagai berikut : - 2014 : 550 pergerakan - 2015 : 600 pergerakan - 2016 : 750 pergerakan - 2017 : 600 pergerakan - 2018 : 400 pergerakan Hal ini juga telah dijelaskan pada dokumen ANDAL Bab 1 ANDAL Sub Bab 1.2.3. Kegiatan Kilang LNG.	
4.	Ditambahkan peta alut pelayaran di sekitar lokasi pekerjaan/project.		Peta alur pelayaran dapat dilihat pada dokumen ANDAL Peta 1-2, Halaman 1-143	**ANDAL Peta 1-2, Halaman I-143**
5.	Prosedur pemasangan/pemendaman pipa dan anjungan lepas pantai untuk dicantumkan pada dokumen.		Penjelasan mengenai pemasangan/pemendaman pipa bawah laut dapat dilihat pada bagian 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas sub-bagian B4. Peletakkan Pipa, Pembuatan Parit (Trenching) di Dasar Laut dan Penimbunan Batuan (Rock Dumping). Sedangkan pemasangan anjungan lepas pantai dapat dillihat pada bagian 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas sub-bagian B3. Transportasi & Pemasangan Anjungan Lepas Pantai.	**ANDAL I-58** **ANDAL I-23**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
6.	Air hasil uji hidrostatik baik pada saat pemasangan pipa untuk dapat dilakukan pengetasan terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan.		Untuk Opsi pembuangan air hidrotest di darat, air hydrotest akan ditampung pada kolam penampung sementara untuk diolah dan dilakukan pengambilan sampel sebelum dibuang ke lokasi pembuangan -6m LAT. Untuk opsi pembuangan di lokasi anjungan lepas pantai akan dilakukan pengambilan sampel air laut pada 500 meter dari hulu dan hilir termasuk 1 stasiun kontrol. Studi pemodelan air hidrostatik untuk perpipaan telah dilakukan dan hasil pemodelan mengindikasikan konsentrasi bahan kimia sangat kecil dengan faktor dispersi sekurang-kurangnya mencapai 700:1 pada 500m radius dari pembuangan.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 6 dan 7**
7.	Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.		Pelaksanaan dan perizinan kegiatan pekerjaan di bawah air dalam kegiatan proyek akan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.	
8.	Pemasangan/pemendaman pipa yang melintasi alur pelayaran mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Kepmentamben No. K300.		Pemasangan pipa nantinya akan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desain pipa dan peraturan Indonesia yang berlaku. Pertimbangan ini juga mencakup kondisi lokal yang spesifik di daerah Tangguh LNG, seperti rute kapal/alur pelayaran, aspek teknis, kondisi geoteknikal, aspek keselamatan dan kajian resiko.	
9.	Apabila pipa dan anjungan lepas pantai sudah tidak digunakan wajib dibongkat sesuai PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian pasal 96 dan Permenhub Nomor PM 68 tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut Pasal 43 bahwa bangunan atau instalasi yang tidak digunakan maka wajib dibongkar.		Kegiatan paska operasi (*decommissioning* fasilitas) akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat kegiatan pasca operasi akan dilaksanakan. Prosedur *decommissioning* akan disusun paling lambat lima tahun sebelum *decommissioning* dilakukan, berkoordinasi dengan institusi pemerintah terkait dan Pemangku Kepentingan Lainnya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
10.	Perlu ditambahkan penjelasan prosedur *emergency* atau pipa mengalami kebocoran, apakah *auto shutdown* dan penanggulangan apabila terjadi pencemaran (ketersediaan peralatan penanggulangan pencemaran), PM No. 58 Tahun 2013.		Desain pipa akan memperhatikan aspek keselamatan selama pengoperasian. Dalam desain sistem perpipaan akan dipasang alat deteksi kebocoran (*Pipeline Leak Detection System* - PLDS) yang berfungsi untuk melakukan deteksi dini bila terjadi kebocoran. Alat ini terpasang di ruang kendali utama (main control room) di darat yang dimonitor secara terus menerus 24 jam sehari. Apabila terdeteksi terjadi kebocoran pipa, maka akan dilakukan aksi untuk mencegah dampak kebocoran. Apabila penurunan tekanan pipa mencapai level tertentu, maka kerangan-kerangan di pipa akan menutup secara otomatis dan operasi di platform terhenti (shutdown) secara otomatis untuk mencegah dampak lebih lanjut. Selain itu prosedure tanggap darurat penanggulangan dampak kebocoran telah disiapkan, termasuk juga ketersediaan peralatan penanggulangan pencemaran, tim penanggulangan dan prasarana pendukungnya. Sebagai gambaran dalam operasi yang sekarang, sistem tanggap darurat penanggulangan dampak pencemaran telah disiapkan, termasuk di dalamnya: - prosedur dan strategi penanggulangan pencemaran - tim penanggulangan insiden (*Incident Management Team*) - peralatan penanggulangan pencemaran - prasarana pendukung (pemodelan *oil spill*, *deployment boats*, dll) Prosedur tersebut akan diperbaharui sejalan dengan pengembangan fasilitas di laut sebagai bagian dari Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	
11.	Ditambahkan frekuensi pelayaran yang berkaitan dengan data jumlah kapal yang berlayar, besar kapal, dan intensitas kapal berlayar di sekitar lokasi kegiatan.		Jenis, jumlah dan frekuensi pergerakan kapal pada tahap operasi dapat dilihat pada dokumen ANDAL Tabel I-29.	**ANDAL Halaman 1-176**
12.	Berkoordinasi dengan kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut setempat pada saat konstruksi, mobilisasi, penggelaran pipa.		Koordinasi akan dilakukan dengan Dinas terkait sesuai peraturan yang berlaku	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
H	**Nur Ikhwan Khusalni, S.Hut (Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan)**			
1.	Poin 3. Batas proyek adalah kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan Tangguh LNG (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 287/Menhut-II/2004 tanggal 5 Agustus 2004). Saran: Untuk memperjelas dan mempertegas batas tersebut perlu disajikan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tersebut (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.287/Menhut-II/2004, tanggal 5 Agustus 2004).	I-199	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 287/Menhut-II/2004 tanggal 5 Agustus 2004 telah dilampirkan dalam dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH berdasarkan Surat Keputusan Deputi MenLH No 30 Tahun 2013 (Lampiran X.5 - Izin Pelepasan Kawasan Hutan). SK dan Peta tersebut akan kami lampirkan kembali dalam dokumen ANDAL.	
I	**Ade Mukadi (Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan)**			
1.	Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan pengembangan kegiatan, maka perlu ada "hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan" dalam pembangunan yang baru. Sehingga penetapan dampak penting dapat lebih realitis dan pelaksanaan RKL-RPL lebih fokus.		Dampak dari rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG atau pembangunan yang baru telah diuraikan secara rinci dalam AMDAL ini dapat dilihat dalam dokumen ANDAL sub bab 3.1 sampai dengan 3.4 pada halaman III-9 sampai dengan III-423. Penyusunan RKL-RPL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG dibuat berdasarkan hasil evaluasi dampak dan dengan mempertimbangkan pembelajaran dari operasi Kilang LNG 1 dan Kilang 2 termasuk evaluasi terhadap hasil pengelolaan yang telah dilakukan.	
2.	Berdasarkan rona lingkungan evaluasi dampak-dampak dinyatakan bahwa laju erosi tutupan lahan dikategorikan rendah, namun demikian karena total luas hutan (tutupan lahan) yang terdiri dari hutan kering, hutan rawa seluas 2.653 ha, maka perlu ada kegiatan dalam RKL-RPL seharusnya revegetasi yang mencakup luasan yang kira-kira akan berdampak. Menurut hemat kami, rencana revegetasi seluas 100 ha dirasakan kurang (perlu pemetaan lokasi yang kira-kira berdampak).		Luas kawasan hutan yang telah dibebaskan untuk lokasi Tangguh LNG secara keseluruhan adalah 3.266 ha, dimana seluas ± 365 ha (11,18%) adalah area yang telah dibuka untuk pembangunan tapak Tangguh LNG saat ini dan ± 39 ha merupakan pagar keliling sebagai pembatas Tangguh LNG. Dari area yang telah dibuka tersebut, kurang lebih 100 ha telah direvegetasi. Selanjutnya untuk pembangunan fasilitas kilang LNG dan fasilitas pendukung yang diperlukan sebagai bagian dari rencana pengembangan Tangguh LNG akan memerlukan pembukaan lahan seluas maksimum 500 ha.	**ANDAL Hal. III-228 (Gambar III-57)**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Kegiatan revegetasi akan dilakukan pada area yang dibuka untuk keperluan Proyek Pengembangan Tangguh LNG namun tidak digunakan sebagai fasilitas permanen. Peta area lahan yang akan dibuka dapat dilihat dalam dokumen ANDAL. Setelah adanya pengembangan Tangguh LNG, masih terdapart area hutan seluas kurang lebih 2.462 ha dalam batas area property Tangguh LNG yang akan dipertahankan sebagai area penyangga.	
3.	Rencana revegetasi perlu diperhatikan jenis tanamannya agar benar-benar jelas tanaman hutan (untuk mengidentifikasi dampak banjir yang terjadinya tidak diperkirakan) dan lokasi-lokasi penanaman.		Revegetasi akan dilakukan di area-area yang dibuka untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG namun tidak digunakan untuk fasilitas permanen dengan menggunakan tanaman hutan lokal Papua. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RKL dan RPL lampiran 1 halaman 20.	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 20**
4.	Pada prinsipnya areal yang di ANDAL bukan merupakan kawasan hutan tapi karena ada tutupan lahan dan hutan mangrove, maka perlu betul-betul dikaji dampak bukaan terhadap kelestarian hutan mangrove. Hal ini kami kuatirkan adanya tekanan masyarakat sekitar hutan terhadap lahan.		Dampak terhadap hutan mangrove telah dibahas dalam dokumen ANDAL sub bab 3.3.2.1 pada halaman III-226 sampai dengan III-242 dimana kegiatan yang berpotensi berdampak pada hutan mangrove adalah pemasangan pipa dekat pantai. Daerah mangrove yang berpotensi terkena dampak adalah maksimum 10 ha atau sekitar 9% dari total luasan mangrove di dalam area Tangguh LNG. Upaya untuk meminimalisir dampak terhadap hutan mangrove sudah direncanakan dalam RKL-RPL misalnya meminimalkan area pembukaan lahan baik untuk opsi HDD maupun Trenching .	**ANDAL sub bab 3.3.2.1 pada hal. III-226 s / d III-242** **RKL-RPL II-22**
J	**Febrianto D. Iskandar (Dit. Pelabuhan dan Pengerukan, Kementerian Perhubungan)**			
1.	Mengacu pada dokumen AMDAL dan RPL RKL tersebut bahwa sudah terdapat rencana induk terminal khusus BP Tangguh yang telah disahkan oleh Menhub melalui KM No.22 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006. Namun di dalam rencana pengembangan perlu dilakukan *review* terhadap dokumen rencana induk tersebut (*review* dilakukan paling tidak 5 tahun sekali)		Review rencana induk (master plan) 5 tahunan yang terbaru, terutama untuk Terminal Khusus Tangguh LNG telah disusun oleh Tangguh LNG, dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI pada bulan Juli 2013. Saat ini sedang dalam proses persetujuan dan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan RI.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Untuk rencana pengerukan perlu ditambahkan kajian atau penyesuaian terhadap Peraturan Menhub No. 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Lokasi *dumping area* perlu digambarkan dalam peta. (dengan ketentuan 712 mil dari pantai atau pada kedalaman 20 meter)		Peta lokasi pembuangan material keruk dapat dilihat pada Gambar I-49 Potensial Area Pembuangan Material Pengerukan, dengan kedalaman 50-60 m. Lokasi ini adalah sama dengan lokasi pembuangan material keruk pada AMDAL sebelumnya	**ANDAL I-147**
3.	Belum terlihat kajian pengembangan terminal khusus pada rencana *anchourage area* (area labuh jangkar) pada perairan teluk dan dampaknya terhadap alur pelayaran eksisting dan rencana pengembangan alur.		Anchorage area sementara dan Barge Mooring dapat dilihat dalam dokumen ANDAL Gambar I-48. Dampak terhadap alur pelayaran (transportasi laut) telah dikaji dalam ANDAL Bab III.	**ANDAL I-144**
4.	Terkait dengan rencana pipa/penggelaran pipa harusnya tidak ada area alur/labuh (zonasi perairan).		Dalam peta hidrographi telah dimasukkan *access channel*/jalur masuk kapal-kapal menuju dermaga Tangguh LNG. Jalur pipa yang akan dipasang akan menghindari alur labuh pelabuhan Tangguh LNG. Dalam pengembangan selanjutnya apabila diperlukan pemasangan jalur pipa pada/melintas alur pelayaran, maka akan dilakukan kajian risiko untuk perlindungan pipa (*mechanical protection*) untuk memastikan keselamatan dan integritas jaringan pipa terhadap kegiatan pelayaran, seperti pelepasan jangkar, penarikan jangkar misalnya dengan cara pemendaman. Selain itu setelah terpasang jalur pipa akan dimasukkan ke dalam *Marine Chart.*	
5.	Terkait dengan pengembangan terminal khusus Bintuni memerlukan izin pengembangan dari Kemenhub.		Perizinan yang diperlukan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal pembangunan proyek	
K	**Didi Purnama (Ditjen. PP dan PL, Kementerian Kesehatan)**			
1.	Perubahan prevalensi/insidensi penyakit dapat terjadi akibat adanya intraksi dengan migrasi (pendatang), oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan: a. Adanya unit karantina kesehatan yang disepakati bersama dengan pemda dan masyarakat, selain adanya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang berfungsi sebagai cegah tangkap masalah kesehatan. b. Pemrakarsa memperkuat dan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh umum terutama masyarakat lokal		Tangguh LNG telah dan akan mendukung Dinas Kesehatan untuk pengembangan kemampuan tenaga dan fasilitas kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan beberapa Puskesmas, sehingga untuk kasus-kasus penyakit menular dapat dilakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan puskesmas tersebut, sehingga memungkinkan bagi masyarakat lokal untuk mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Pengelolaan terhadap kesehatan lingkungan, pemrakarsa berpartisipasi bersama-sama dengan masyarakat dan pemda untuk melakukan. a. Mensukseskan STBM dengan turut memicu dan memberdayakan masyarakat untuk berpola PHBS. b. Dalam hal penyakit malaria perlu dilakukan: ▪ Memberdayakan dan mendukung usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), misalnya pos malaria desa. ▪ Secara periodic melakukan mass survey malaria untuk mengetahui kejadian malaria dan dapat menentukan tindakan pengelolaan yang tepat. ▪ Melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan malaria. c. Dalam hal mencegah penyakit diare, melalui ▪ Penyediaan air bersih layak minum yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. ▪ Memberdayakan masyarakat, dan/atau menjamin ketersediaan fasilitas sanitasi dasar: jamban (septiktank), saluran pembuangan limbah, dan lain-lain. ▪ Turut serta dalam kampanye "cuci tangan pakai sabun" d. Melakukan studi kesehatan masyarakat detail untuk mengetahui populasi berisiko (*population at risk*) terhadap masalah kesehatan tertentu. e. Dalam hal mencegah peningkatan insidensi HIV/AIDS, dibutuhkan partisipasi dan tanggung jawab pemrakarsa untuk turut dalam pengelolaan: ▪ Mengkampanyekan bahaya HIV/AIDS. ▪ Meningkatkan jangkauan (*outreach*) dengan menggandeng LSM atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap populasi/kelompok berisiko tinggi. ▪ Turut mendorong VCT (*Voluntary Conseling and Test*) HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi.		Terima kasih atas usulan-usulan yang sangat baik, a. Program tersebut telah dan akan menjadi salah satu program Kesehatan Lingkungan yang Tangguh LNG dukung pelaksanaannya dan menjadi bagian dari program utama dengan tujuan tercapainya masyarakat yang berpola PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) b. Program malaria adalah salah satu program utama yang telah dan akan Tangguh LNG dukung. Sesuai yang diusulkan, program tersebut adalah program yang berbasis UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) di mana dalam hal ini, masyarakat yang terlibat setelah di berikan pelatihan, kita sebut sebagai Juru Malaria Kampung (JMK) dan Juru Malaria Perusahaan (JMP) untuk wilayah-wilayah yang tidak ada fasilitas kesehatan. Tangguh LNG juga telah dan akan mendukung pelaksanaan malaria survei yang dilakukan secara rutin. c. Tangguh LNG setuju dengan usulan tersebut dan Tangguh LNG telah mendukung ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di beberapa desa/kampung. Sejalan dengan dukungan terhadap fasilitas tersebut, Tangguh LNG juga mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat, termasuk "cuci tangan pakai sabun". d. Tangguh LNG setuju tentang usulan tersebut dan Tangguh LNG telah mendukung Dinas Kesehatan didalam mengetahui populasi beresiko di masyarakat seperti: ibu hamil beresiko, anak balita dengan gizi kurang dan buruk, dan masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap HIV/AIDS.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	▪ Mendorong pendekatan keagamaan dan normatif guna mencegah, mengurangi atau melokalisasi potensi prostitusi.		e. Tangguh LNG telah dan akan mendukung Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait (NGO, LSM, dan kelompok lain yang turut serta dalam memerangi HIV/AIDS) didalam program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di masyarakat, termasuk turut mendorong VCT pada kelompok resiko tinggi dan pendekatan keagamaan.	
3.	Dampak kesehatan masyarakat seharusnya menjadi dampak penting harap dikaji lagi di dokumen ANDAL.		Dampak kesehatan masyarakat dalam dokumen ANDAL dikaji sebagai dampak penting sesuai hasil kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL tabel IV-2 halaman 6-8 dan hal 12-14. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak penting dapat dilihat dalam dokumen RKL hal. II-31 dan RPL hal.II-36.	
L	**Eko Gudhi W, S.Sos (Kepala Dishidros TNI AL)**			
1.	Bab II Rona Lingkungan Hidup tidak dibahas mengenai aksesibilitas transportasi air dan tingkat kepadatan. Bahasan pada halaman III-402 belum terwadahi mengenai awal dari gangguan aksesibilitas transportasi, mengingat Teluk Bintuni merupakan perairan sempit dengan kepadatan transportasi air cukup tinggi, masyarakat setempat mengandalkan akses perairan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.	II-1	Aksesibilitas transportasi air dan tingkat kepadatannya telah disampaikan di setiap Sub bab 2.3.1 Sosial Ekonomi pada bagian Infrastruktur dan Sarana Transportasi, contoh Halaman II-333 Transportasi Laut, Tabel II-102 Jumlah Kunjungan Kapal menurut Jenis Pelayaran di Pelabuhan Teluk Bintuni. Gangguan terhadap aksesibilitas transportasi laut telah dikemukakan secara komprehensif pada Bab III yang terutama disebabkan oleh transportasi untuk tenaga kerja, perlatan dan bahan serta pemuatan dan pengangkutan LNG dan kondensat (seperti tercantum pada Tabel I-33, Dampak Penting Hipotetik Kegiatan Terminal Khusus). Alat transportasi laut yang dimiliki oleh masyarakat di Saengga dan Tanah Merah Baru terdiri atas sampan, perahu dayung/layar, motor tempel/ketinting dan *longboat* (Tabel III-173).	**ANDAL II-333** **ANDAL I-183** **ANDAL III-405**
2.	Penyebutan Selat Halmahera Timur yang berbatasan dengan Samudera Pasifik. Tidak relevan karena Teluk Bintuni tidak terhubung langsung dengan Samudera Pasifik dan tidak ada Selat Halmahera Timur.	II-156	Telah diperbaiki menjadi: Teluk Berau dan Teluk Bintuni memanjang dari arah timur ke barat sepanjang ±160 km dengan mulut teluk terbuka di bagian barat yang terhubung langsung dengan perairan laut Halmahera (Selat Halmahera Timur dan Samudera Pasifik telah dihapus)	**ANDAL II-159**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
3.	Kondisi batrimetri Teluk Bintuni agar ditambahkan referensi peta laut seperti yang tertera pada halaman I-140 untuk Saran Bantu Navigasi dan Pelayaran (SBNP).	II-157	Referensi Peta Laut telah diperbaiki pada dokumen ANDAL.	
4.	a. Data pasang surut (pasut) bulan Oktober 1999 sampai dengan Maret 2000 agar diperbarui kembali mengingat adanya gelombang-gelombang pasut periode panjang. b. Konstanta yang disajikan terindikasi invalid, karena tidak ditemukan hasil hitung amplitude dan fase K2.	II-158	a. Data pasut yang disajikan dalam dokumen ANDAL adalah semua data yang tersedia pada saat itu b. Konstanta pasang surut telah dihitung kembali untuk memastikan nilai K2 dalam komponen pasang surut	
5.	a. Gambar II-75 Data pasang surut yang digunakan dalam simulasi arus, bulan Agustus mewakili musim tenggara. Tidak konsisten dengan II-158 no. 2.1.10.3 Pasang Surut, pengukuran pasut dilakukan pada periode 21 Oktober 1999 – 3 Maret 2000. b. Gambar II-76 data angin yang digunakan dalam simulasi arus tidak konsisten dengan halaman II-159 no. 2.1.10.4 Arus (arah pergerakan arus yang terjadi bolak-balik dengan arah timur laut dan barat laut atau mengindikasikan bahwa pergerakan arus didominasi oleh pasang surut).	II-161	a. Penggunaan kedua data pasang surut tersebut memang berbeda. Data pasut pada Sub Bab 2.1.10.3 digunakan untuk mengetahui kondisi dan tipe pasang surut di lokasi kegiatan, sedangkan data pasang surut pada Gambar II-75 merupakan input untuk melakukan simulasi model arus pada musim tenggara yang memang terjadi pada bulan tersebut. b. Data angin tetap dimasukkan sebagai input data untuk simulasi arus, selain data pasang surut dan batimetri. Hasil simulasi arus yang cenderung bolak-balik menunjukkan bahwa pengaruh pasang surut sangat dominan sehingga tidak terlihat adanya pengaruh angin.	**ANDAL II-165**
6.	Alenia 1 Data angin yang digunakan sebagai input simulasi aurs. Hal tersebut tidak relevan untuk pembahasan pada halaman II-162 sampai dengan II-167 karena pasang surut dominan di Teluk Bintuni adalah pasang surut menurut astronomis, bukan pasang surut meteorogis.	II-162	Data angin tetap dimasukkan sebagai input data untuk simulasi arus, selain data pasang surut dan batimetri. Hasil simulasi arus yang cenderung bolak-balik mempertegas bahwa pengaruh pasang surut sangat dominan sehingga tidak terlihat adanya pengaruh angin.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
7.	Mengapa arus yang hanya diukur selama 1x24 jam dipaskan pada 3-4 April 2013, pada hari tersebut bulan ada pada kwadran III, pengaruh gravitasinya kecil, pasang surut mati, arus lemah.	3-16	Dalam dokumen, tidak ada kalimat yang menyebutkan ada pengukuran arus selam 1 x 24 jam pada tanggal 3-4 April 2013. Informasi yang berkaitan dengan arus, pasang surut dan kualitas air ada pada Sub Bab 2.1.8.3. Kualitas Air Laut. Pada Gambar II-47. Grafik Kondisi Pasang Surut Saat Pengambilan Sampel pada Musim Hujan yang dilakukan pada tanggal 15-24 Maret dan 23 sampai 26 April 2013, sedangkan untuk musim kemarau dapat dilihat pada Gambar II-46 Grafik Kondisi Pasang Surut Saat Pengambilan Sampel pada Musim Kemarau yang dilakukan pada Bulan Jul-Agustus 2012.	**ANDAL II-108** **ANDAL II-109 s / d II-111**
8.	Rencana pengelolana lingkungan (RKL) agar dilakukan pengelolaan terhadap lalu lintas air beserta Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran (SNBP) sebagai kelengkapan dari pengelolaan lalu lintas air tersebut.		Terkait dengan lalu lintas air beserta Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran (SNBP) akan dikordinasikan dengan dinas terkait.	
9.	Agar keseluruhan obyek yang beraada di perairan diberitahukan kepada Dishidros mengenai jenis obyek, posisi (geografis) dan Sarana Bantu Navigasi dan Pelayaran (SBNP) pendukung, untuk diberitakan pada Berita Pelaut Indonesia (BPI).		Saran diperhatikan. Kegiatan ekspoitasi gas dan transmisi gas di perairan Teluk Bintuni akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai peraturan yang berlaku.	
M	**Jansen O Silalahi (Staf Asdep PEM, KLH)**			
1.	Agar BP Tangguh memaparkan: a. Status ketaatan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan lama. b. Perkiraan air limbah dan rencana fasilitas IPAL yang akan dibangun.		a. Status ketaatan pengelolaan Lingkungan dalam kegiatan saat ini dilaporkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan RKL-RPL setiap 6 bulan kepada lembaga pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Hasil PROPER Audit selama kegiatan operasi Tangguh LNG saat ini menunjukkan hasil Biru yang mengindikasikan bahwa kegiatan Tangguh LNG telah memenuhi aturan yang berlaku. Kegiatan operasi Tangguh LNG juga diaudit oleh pihak Tangguh LNG Lenders setiap tahun dengan hasil baik (tidak ada temuan penting).	**ANDAL 1-108 s / d I-110**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			b. Perkiraan air limbah beserta rencana fasilitas IPAL yang akan dibangun dapat dilihat pada Sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG, B9. Pengelolaan Limbah Cair (untuk Tahap Konstruksi) dan C7. Pengelolaan Limbah Cair (untuk Tahap Operasi). Pengelolaan kualitas air juga dapat dilihat pada Lampiran RKL-RPL – Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Bab 2. Pengelolaan Kualitas Air	**ANDAL 1-121 s / d I-127 Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 1 s / 8**
N	**Yusuf Riski (Staf Asdep Kehati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, KLH)**			
1.	Mohon dilengkapi peta penggunaan lahan dan kawasan hutan.		Peta penggunaan lahan dan kawasan hutan sudah tercantum dalam dokumen ANDAL.	**ANDAL III-230 (Gambar III-58)**
2.	TBE disebutkan untuk tebal solum 30-60 cm, sedangkan data di rona tidak ada data ketebalan solum setiap titik sampel.	II-79	Pada Bab II, halaman II-69 dikemukakan bahwa kedalaman efektif tanah pada hampir seluruh SPT pada umumnya lebih dari 100 cm. Tabel II-26 berikut penjelasan mengenai TBE pada halaman II-83 telah diperbaiki.	**ANDAL II-69** **ANDAL II-82 s / d II-83**
3.	*Range Shannon-index* 1,5 – 3,5 pada ekosistem asli, sangat jarang mencapai 4,00. Mohon penjelasan.	II-208	Tabel II-69 ; Besaran H' < 1.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong rendah, H' = 1.5 – 3.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong sedang dan H' > 3.5 menunjukkan keanekaragaman tergolong tinggi. --> range shannon index 1,5 - 3,5 menunjukan keanekaragaman yang tergolong sedang. Hal ini mungkin terjadi pada daerah tersebut dimana daerah tersebut bukan daerah yang terisolasi dari manusia, sehingga gangguan terhadap keanekaragaman mungkin saja terjadi. Kemungkinan lain adalah jenis yang ada didominasi hanya oleh beberapa jenis spesies saja, sehingga tingkat keanekaragamannya menjadi rendah.	**ANDAL II-212**
4.	Ada flora dilindungi → dampak penting. Mohon dilengkapi dengna indeks kelimpahannya!	II-212	Flora dilindungi dapat dilihat pada Tabel II-74. Indeks kelimpahan telah disajikan pada hasil survey lapangan pada setiap tipe ekosistem pada Sub Bab Rona Lingkungan Hidup 2.2.1.1 Flora Terrestrial (mengacu pada data lampiran dari laporan SFF 2011.)	**ANDAL II-216** **ANDAL II-198**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
5.	Data +/- maksudnya apakah ada/tida? Bagaimana data kualitatifnya?	II-216	(+) menandakan spesies tersebut ditemukan pada tahun pengamatan tersebut. sementara tanda (-) menunjukan bahwa spesies tersebut tidak ditemukan pada tahun pengamatan.	
6.	Pada tabel sebelumnya ada satwa dilindungi seperti elang/raja udang, tetapi di Tabel II-82 tidak muncul!	II-232	Satwa dilindungi elang/raja udang telah dimasukan dalam Tabel II-82	**ANDAL II-235 s /d II-237**
7.	a. Disebutkan untuk menilai kerapatan menggunakan analisis NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*). Mohon dicantumkan angka indeks untuk setiap tipe! b. Disebutkan citra yang digunakan 2008-keatas sedangkan data (citra) pada tahun tersebut banyak *stripping* (*blank zone*) sehingga data NDVI yang dihasilkan kurang bisa dipertanggung jawabkan!.	III-222	a. Bagian ini diambil dari laporan SFF 2011. Dalam laporan tersebut tidak dijelaskan index untuk setiap tipe vegetasinya. b. Hasil ini bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dilengkapi dengan data dari lapangan melalui Ground Truthing (verifikasi lapangan).	
8.	a. Dalam dampak penting ada penambahan biota perairan → apakah bisa diukur tanpa adanya *diversity index* dan *Riohness index*. b. Apakah tanker pengangkut melewati laut lepas atau tidak? Apabila iya seharusnya ada kajian IAS (*Invassive Allien Species*).		a. Untuk biota perairan dampak penting hipotetik yang telah diidentifikasi adalah perubahan keanekaragaman nekton serta perubahan kelimpahan benthos dan plankton. Data mengenai nekton, plankton dan benthos telah disampaikan secara rinci pada Bab II Rona Lingkungan. Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap ketiga DPH ini dilakukan secara kualitatif. b. Tanker pengangkut melewati laut lepas. Sesuai aturan MARPOL, kapal tanker melakukan pertukaran air *ballast* (*ballast water*) di tengah laut sebelum masuk ke Perairan Teluk Bintuni. Pengelolaan air *ballast* telah diatur dalam RKL-RPL Bab 2.4 RKL Kegiatan Fasilitas Terminal Khusus.	**ANDAL Halaman I-179** **RKL-RPL Bab 2.4**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
O	**Aep Purnama (Staf Asdep Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, KLH)**			
1.	Dari peta indikatif sebaran ekosistem gambut nasional di Kabupaten Bintuni terdapat ekosistem gambut. Ekosistem gambut adalah tatanan unsure gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitasnya. Berakitan dengan RPP Gambut yang diharapkan akan keluar pada akhir tahun ini, maka perlu dicermati, apakah lokasi kegiatan berada di ekosistem gambut? Kalau berada di ekosistem gambut, agar dipastikan bahwa kegiatan berada di ekosistem gambut yangberfungsi budidaya. Pendekatan dalam RPP gambut mengenai wilayah/cakupan ekosistem gambut berdasarkan pada kesatuan hidrologis gambut (KHG) Kesatuan hidrologis gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut, dan tatan pada rawa. Dalam RPP Gambut terdapat kriteria lindung yaitu: a. 30% dari luas KHG b. Ketebalan 3 meter atau lebih. c. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemic. d. Species yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan e. Kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam RTRW. BP Tangguh agar melihat kembali, apakah lokasi kegiatan berada di KHG? Jika berada di KHG, maka agar berhati-hati di dalam suatu kegiatna yang akan mengakibatkan terganggunya ekosistem gambut, contoh kegiatan yang menyebabkan terganggunya ekosistem gambut yaitu pembuatan saluran drainase yang dalam yang menyebabkan mengeringnya gambut, hal ini akan berpotensi terbakarnya gambut, atau terjadinya insiden (penurunan muka gambut).		Lokasi kegiatan tidak berada pada ekosistem gambut. Tipe ekosistem dominan yang ada pada tapak proyek adalah hutan dataran rendah bukan gambut. Hutan dataran rendah ini terdiri dari hutan dataran rendah kering, hutan rawa dan mangrove.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
P	**Nanda Putra (Staf Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, KLH)**			
1.	Pengelolaan lumpur dan serbuk bor Alternatif yang digunakan adalah injeksi dan *dumping* limbah ke laut. a. Dalam dokumen dijelaskan bahwa BP telah melakukan injeksi pada pengeboran sebelumnya. Mohon dapat dijelaskan kegiatan injeksi tersebut (teknikal aspect) dari kegiatna sebelumnya. Mohon juga dapat dijelaskan bagaimana kegiatan injeksi tersebut dinyatakan berhasil. Apakah ada pemantauan terhadap sumur injeksi tersebut, jika ada kemungkinan kebocoran. b. Untuk alternatif *dumping* limbah kelaut (serbuk dan lumpur bor) telah melengkapi kajian dengan modeling. Mohon dapat dijelaskan bahwa input model yang digunakan di dapat dalam kondisi eksisting dan model tersebut telah divalidasi, karena BP telah memiliki izin *dumping* dari pengeboran sebelumnya. Dengan kewajiban di dalam izin dumping akurasi model dapat diperhitungkan. Peraturan yang sedang dikembangkan oleh KLH untuk dumping limbah kelaut bahwa *mixing zone* 500 meter dari titik *dumping* (radius 500 m), setelah radius 500 m tersebut TSS = 20 mg/l. c. Rencana pengelolaan limbah B3 seperti pengolahan, pemanfaatan, penimbunan dan lain-lain agar dapat dibahas di dalam dokumen ini, karena terkait jika pemrakarsa mengajukan izin pengelolaan limbah B3. d. Dalam rencana pengelolaan limbah B3 menggunakan incinerator agar dapat dibahas di dalam dokumen, dengan menjelaskan: jenis limbah yang akan dibakar, lokasi incinerator dan kajian teknis lain yang diperlukan saat pengoperasian dan pasca pengoperasian.	I-31	a. Kegiatan injeksi lumpur dan serbuk bor berhasil dilakukan pada pengeboran 15 sumur (2007-2009) sebagai bagian dari pengembangan Kilang LNG 1 dan 2. Lumpur dan serbuk bor diinjeksikan melalui annulus dari masing-masing sumur ke dalam formasi Faumai. Pemantauan pelaksanaan reinjeksi dilakukan sesuai dengan izin reinjeksi yang dikeluarkan oleh KLH. Hasil pemantauan dilaporkan secara rutin kepada KLH. b. Untuk pemodelan lumpur & serbuk bor digunakan skenario dengan volume pembuangan maksimum yaitu 15000 bbls lumpur dan 6000 bbls serbuk bor. Berdasarkan pengalaman saat ini dari pengeboran sumur eksplorasi, pembuangan sebenarnya lebih kecil dari volume tersebut. Kewajiban dalam izin yang ada saat ini telah dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan lumpur dan serbuk bor yang dijelaskan di dalam RKL-RPL. Berdasarkan dari hasil pemodelan, pembuangan lumpur dan serbuk bor dari satu sumur bisa menyebabkan peningkatan konsentrasi TSS sementara sebesar maksimum 21,1 mg/L pada musim hujan dan 7,2 mg/L pada musim kemarau yang terjadi pada lokasi pembuangan, namun umumnya berkurang secara cepat menjadi 5 mg/L pada jarak 500m. dengan demikian diharapkan pada radius 500m sudah kembali memenuhi baku mutu TSS yang berlaku di daerah tersebut. c. Rencana pengelolaan limbah B3 telah dipaparkan pada dokumen RKL-RPL, Lampiran I butir 4 (Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3).	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 11 - 15**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			d. Rencana pengelolaan limbah B3 menggunakan incinerator dibahas pada dokumen RKL-RPL lampiran I. Lokasi incinerator direncanakan untuk ditempatkan di IWMF (*Integrated Waste Management Facility*). Jenis limbah dan kajian teknis akan disesuaikan menurut aturan KepBapedal no. 03/1995. Operasi insinerator limbah B3 ini akan dilengkapi dengan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 11 – 15** **ANDAL Halaman I-105 dan I-108**
Q	**Widhi H (Kasubid Pemeriksaan Dokumen Lingkungan, Asdep KDL, KLH)**			
1.	Bab Prakiraan Dampak Agar dibuat *summary* DPH dan hasil kajian/prakiraan yang telah dilakukan. Terlepas dari pemrakarsa/penyusun membuat format prakiraan dampak sesuai standar IFC, dalam prakiraan dampaknya agar dibuatkan *summary* DPH dan hasil kajiannya yang dapat menggambarkan besaran dampak untuk tiap-tiap DPH yang dikaji dan bagaimana pula dengna sifat penting dari dampak tersebut. *Summary* tersebut dapat dibuat dalam bentuk format tabel yang isinya harus dapat menggambar: a. Kondisi lingkungan/rona sebelum rencana kegiatan dilakukan (kondisi eksisting). b. Perubahan kondisi lingkungan (sesuai DPH) sebagai hasil prakiraan dampak yang dilakukan. Perubahan inilah yang dikatakan sebagai besaran dampak dan sebisa mungkin ditampilkan dalam kuantifikasi (tidak dalam kualitatif/klasifikasi). c. Sifat penting dampaknya.		• Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap semua DPH telah dikemukakan secara rinci pada Bab III. • Prakiraan dampak terhadap DPH dilakukan, baik melalui pemodelan maupun secara deskriptif kualitatif terhadap dampak-dampak yang tidak dikuantifikasi • Template evaluasi dampak telah mencakup semua hal yang diatur dalam pada pedoman penyusunan dokumen ANDAL sesuai Permen LH No. 16 tahun 2012, termasuk perubahan kondisi lingkungan dan sifat penting dampak. • Pada template telah dikemukakan besaran dampak (pada intinya adalah prakiraan dampak), di mana secara rinci telah dikemukakan perubahan terhadap rona lingkungan akibat dari kegiatan proyek. • Kesimpulan dari keseluruhan evaluasi dampak dengan menggunakan template yang digunakan adalah sifat penting dampak, yaitu “Diabaikan”, “Minor”, “Moderat”, “Mayor” dan “Kritis”. • Dampak yang masuk dalam kategori “Diabaikan” dan “Minor” tergolong sebagai “Dampak Tidak Penting”, sedangkan dampak dengan kategori “Moderat” dan “Mayor” tergolong sebagai “Dampak Penting”. • Rangkuman hasil prakiran dan evaluasi DPH telah disampaikan pada Tabel IV-2	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
2.	Mohon dampak ditinjau kembali "Evaluasi Holistik" dalam bab evaluasi tidak terlihat evaluasi holistik yang dimaksud. Seharusnya evaluasi holistik dapat menjawab: a. Adakah keterkaitan antara 1 DP dengan DP yang lain. b. Bagaimana dengan kumulatif dampaknya. c. Bagaimana dengan prioritas pengelolaan dampaknya. d. Hasil evaluasi holistik ini kemudian "menjustifikasi" kelayakan lingkungan dari sudut pandang pemrakarsa/penyusun.		• Dampak holistik adalah dampak berasal dari lebih dari satu kegiatan atau berasal dari berbagai dampak turunan terhadap reseptor (manusia atau satwa) atau sumberdaya (komponen lingkungan geofisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya) pada ruang yang sama dan waktu berbeda; atau pada ruang yang berbeda dan waktu yang sama; atau pada ruang dan waktu yang berbeda. Bagan alir dampak **Gambar IV 1, Gambar IV 2, Gambar IV 3 dan Gambar IV 4 serta Tabel IV 3**, menunjukkan keterkaitan antara satu dampak penting dengan dampak penting lainnya secara holistik. • Penjelasan mengenai dampak kumulatif dan holistik telah dikemukakan pada Halaman IV-17 sampai dengan Halaman IV-22. Disamping itu pada Bab IV telah dikemukakan mengenai kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak penting sebagai dasar menentukan prioritas pengelolaan dampaknya yang arahan pengelolaan lingkungannya telah dikemukakan pada Bab V. • Hasil evaluasi dampak telah digunakan sebagai justifikasi kelayakan lingkungan, seperti dikemukakan pada Bab VI.	
R	**Heri Wibowo (Staf Asdep Kajian Dampak Lingkungan, KLH)**			
1.	Memastikan kembali lingkup kegiatan yang akan dilakukan, pengembangan tahap awal; pengembangan selanjutnya (Tabel 1-11 lengkapi produksi saat ini, produksi setelah pengembangan). Terkait dengan dampak, besar dampak, lokasi dan pengelolaan yang akan dilakukan.		Lingkup Kegiatan yang termasuk dalam studi AMDAL ini adalah: Pengembangan Tahap Awal: - Kilang LNG 3 dan fasilitas pendukungnya - 2 anjungan lepas pantai (ROA & WDA) dan jaringan pipa bawah laut - 13 sumur produksi + 3 sumur DCRI + 4 infill well (VRA&VRB) - Fasilitas terminal khusus (a.l. BOF, Dermaga LNG – Kondensat 2) - Rencana survei seismik & pengeboran sumur eksplorasi	**ANDAL** **Tabel I-2 Hal. I-10,** **Tabel I-9 Hal. I-49** **Tabel I-15 Hal. I-95** **Tabel I-25 Hal. I-137**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Pengembangan Tahap Selanjutnya : - Kilang LNG 4 dan fasilitas pendukungnya - Sampai dengan 9 anjungan lepas pantai (termasuk lanjutan pasokan gas untuk Kilang LNG 3) dan jaringan pipa bawah laut - Tambahan sumur produksi dan DCRI untuk pasokan gas Kilang LNG - Rencana survei seismik & pengeboran sumur eksplorasi Lingkup kegiatan saat ini, pengembangan tahap awal & pengembangan tahap selanjutnya untuk tiap kegiatan, termasuk rencana pengelolaan untuk limbah yang dihasilkan dari tiap kegiatan dapat dilihat di : - Kegiatan eksploitasi gas : Tabel 1-2 - Kegiatan transmisi gas : Tabel 1-9 - Kegiatan kilang LNG : Tabel 1-15 (termasuk produksi saat ini & produksi setelah pengembangan) - Kegiatan fasilitas terminal khusus : Tabel 1-25	
2.	Pengelolaan limbah padat dan limbah cair Terutama untuk limbah B3 yang dihasilka dari kegiatan operasional eksisting, kemudian tahap awal dan selanjutnya, seperti apa.		Rencana pengelolaan limbah padat dan limbah cair dari setiap kegiatan, termasuk limbah B3 dapat dilihat pada : a. Deskripsi Kegiatan ANDAL Bab 1: - Kegiatan eksploitasi gas : Tabel I-2, serta sub bagian B7 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Konstruksi, B8 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Konstruksi, C5 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Operasi dan C6 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Operasi. - Kegiatan transmisi gas : Tabel 1-9, serta sub bagian B9 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Konstruksi, B10 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Konstruksi	**ANDAL Tabel I-2 Hal. I-10, I-38, I-39, I-44** **ANDAL Tabel I-9 Hal. I-49, 1-79, 1-80**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			- Kegiatan kilang LNG : Tabel 1-15, serta sub bagian B8 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Konstruksi, B9 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Konstruksi, C8 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Operasi dan C7 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Operasi. - Kegiatan fasilitas terminal khusus : Tabel 1-25, serta sub bagian B9 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Konstruksi, B10 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Konstruksi, C5 Pengelolaan Limbah Padat Non B3 & Limbah B3 pada Tahap Operasi dan C6 Pengelolaan Limbah Cair pada Tahap Operasi. b. RKL-RPL Bab 2 Rencana Pengelolaan Lingkungan, Sub Bab: - 2.1. Kegiatan Eksploitasi Gas - 2.2. Kegiatan Transmisi Gas - 2.3. Kegiatan Kilang LNG - 2.4. Kegiatan Fasilitas Terminal Khusus c. RKL-RPL Lampiran 1 Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.	**ANDAL Tabel I-15 Hal. I-95, I-105, I-108, 1-121, 1-128** **ANDAL Tabel I-25 Hal. I-137, 1-170, 1-176** **RKL-RPL Hal. II-1 s / d II-64** **Lampiran 1 RKL-RPL**
3.	Tahap pra konstruksi. Program penilaian dan eksplorasi lapangan gas (diluar kajian ANDAL ini) bukan menjadi tahapan, justru data dari hasil studi, eksplorasi menjadi data dan informasi awal dalam deskripsi kegiatan maupun data awal.		Program penilaian dan eksplorasi lapangan gas yang dimaksudkan dan merupakan lingkup dalam studi AMDAL ini adalah rencana survei seismic dan pengeboran sumur eksplorasi di dalam wilayah studi AMDAL ini yang akan dilakukan di masa mendatang sebagai bagian dari Rencana Pengembangan Tahap Awal dan Tahap Pengembangan selanjutnya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
4.	Jadwal kegiatan proyek halaman I-8 a. Eksploitasi gas (anjungan) b. Eksploitasi gas (pengeboran) c. Transmisi gas d. Kilang LNG e. Fasilitas Tersus Sebaiknya diuraikan juga mana tahap awal mana tahap selanjutnya.		Jadwal kegiatan proyek pada halaman 1-8 menunjukkan jadwal kegiatan pengembangan tahap awal, terkait dengan pengembangan Kilang LNG 3, 2 anjungan lepas pantai dan sumur-sumur terkait, serta fasilitas pendukungnya. Jadwal pengembangan tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.	**ANDAL I-8**
5.	Tenaga kerja Kualifikasi tenaga kerja akan ditentukan dari hasil studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam RKL-RPL, seharusnya sudah dijelaskan dan menjadi DPH termasuk komitmen di dalam RKL-RPL-nya.	I-20	Penerimaan tenaga kerja sudah menjadi DPH dan berdasarkan hasil kajian dampak dalam ANDAL hal tersebut juga menjadi dampak penting mayor yang wajib dikelola. Pengelolaan dampak tenaga kerja tersebut sudah dimasukkan dalam RKL-RPL, termasuk jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap tahapan proyek, serta asal lokasi (point of hire) tenaga kerja tersebut. Tabel kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada RKL-RPL Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub Bagian Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja halaman 28.	RKL-RPL Lampiran 3 Halaman 28
6.	Pengelolaan lumpur dan serbuk bor DCRI dan OBM Lp hanya 3 DCRi di tahap awal untuk selanjutnya tidak ada DCRi? 15.000 bbls (1.900 m^3) lumpur bor dan 6000 bbls (960 m^3) serbuk bor dihasilkan dan dibuang dari masing-masing sumur. (1 sumur injeksi khusus peranjungan)	I-3	Benar pada tahap awal akan ada 3 sumur DCRI untuk menangani 15.000 bbls lumpur bor dan 6.000 bbls serbuk bor yang akan diinjeksikan dari setiap sumur pada anjungan tersebut. Jika opsi DCRI dianggap layak secara teknis, rencananya akan disediakan satu sumur reinjeksi pada tiap anjungan. Rencana ini sudah dipertegas lagi di halaman 1-3.	**ANDAL Hal. 1-3 dan Tabel 1-2 Hal. 1-10**
7.	RKL-RPL disempurnakan Misal tenaga kerja Pengelolaan: kontraktor akan memprioritaskan tenaga kerja lokal… Seharusnya menjadi tanggung jawab BP yang mensyaratkan kepada kontraktor.		Tangguh LNG memiliki komitmen untuk memberikan prioritas pertama dalam kesempatan tenaga kerja kepada masyarakat asli dan Papua. Oleh karena itu Tangguh LNG mewajibkan penerimaan tenaga kerja oleh kontraktor selama tahap konstruksi akan memberikan prioritas kepada masyarakat asli, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, serta papua lainnya.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
S	**Sarifah, ST,MT (KP3K – Direktorat Pesisir & Lautan)**			
1.	Perlu menampilkan peta sensitive area		Peta sensitive area telah ditambahkan dalam dokumen ANDAL sebagai Peta II-18 Daerah Sensitif Perairan Teluk Bintuni	**ANDAL Hal, II-324**
2.	Perlu menambahkan peta RTRW sebagai pembanding pada wilayah batas konservasi di Teluk Bintuni		Sesuai PermenLH No 16 Tahun 2012, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dibahas pada dokumen Kerangka Acuan ANDAL. Peta RTRW sudah dicantumkan dalam dokumen Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH berdasarkan Surat Keputusan Deputi MenLH No 30 Tahun 2013 (Buku I Kerangka Acuan ANDAL Gambar 2-1, 2-2 dan 2-3 Hal. 2-3 sd 2-5).	
3.	Perlu menambahkan peta ekosistem SDA untuk melihat kondisi eksisting, khususnya terumbu karang, padang lamun, lahan basah (wetland) dan pemantauan jalur hijau mangrove sebagai kawasan lindung.		Peta yang menunjukkan kondisi eksisting SDA termasuk wetland dan mangrove telah ditambahkan dalam dokumen ANDAL. Lebih lanjut dapat dilihat pada ANDAL Sub Bab 2.2.1 Biologi Terestrial	**ANDAL Hal II-194**
4.	Perlu menampilkan peta migrasi ikan		Dari data sekunder berupa studi yang telah dilakukan dapat diperoleh informasi mengenai pola migrasi ikan tertentu, yaitu ikan-ikan pelagis ekonomis penting (tenggiri, kembung dll). Dari data sekunder yang diperoleh, informasi mengenai pola migrasi ikan tertentu, yaitu ikan-ikan pelagis ekonomis penting (seperti Cakalang, tenggiri, dll) dapat diketahui, namun data tersebut sangat generic yang hanya melingkupi wilayah Maluku dan Papua secara umum dan diperkirakan kurang relevan untuk menjelaskan kondisi di Teluk Berau/Bintuni secara spesifik. Di Teluk Bintuni sendiri belum tersedia peta migrasi ikan yang detail. Pengumpulan data *time series* dengan waktu yang cukup lama, dan metode yang kompleks (*tagging, capture and recapture*) di perlukan untuk membuat informasi migrasi ikan yang akurat. Data jenis ini juga tidak ditemukan dari badan-badan pemerintahan terkait di wilayah teluk Berau/Bintuni	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Adapun contoh dari data migrasi ikan (Maluku – Papua) dapat dilihat melalui peta PDPI (Peta Daerah Penangkapan dan Potensi Ikan) yang disediakan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sbb: Contoh pergerakan ikan di musim tenggara: 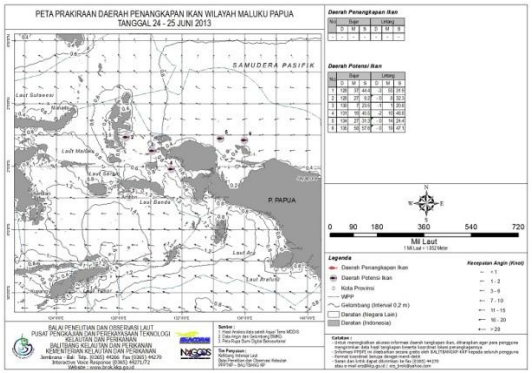 Juli – Agustus (pertengahan Musim Tenggara) 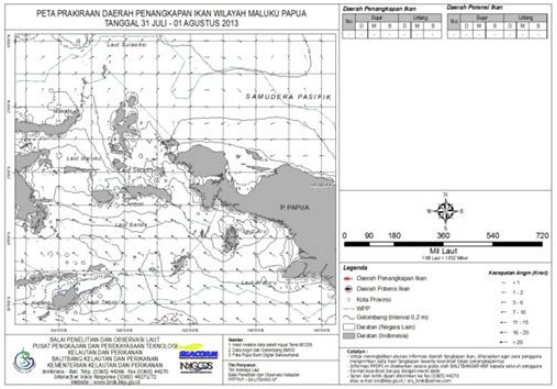 	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Oktober (Akhir musim Tenggara) 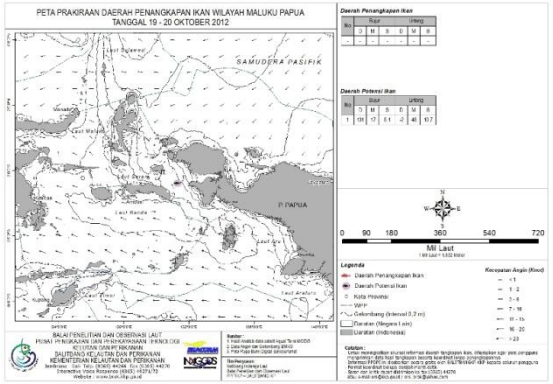 	
5.	Perlu menampilkan peta lokasi sebaran perikanan tangkap dan budidaya.		Sebaran perikanan tangkap dapat dilihat dari peta fishing ground berdasarkan hasil survey 2013 dalam dokumen ANDAL Halaman II-293. Kegiatan budidaya perikanan laut (marine ranching) di Teluk Bintuni sangat terbatas dan hampir tidak teridentifikasi	**ANDAL II-293**
6.	Dari hasil peraturan pemerintah, rencana tata ruang wilayah nasional, dimana kawasan Fakfak dan sekitarnya memiliki sektor unggulan "perikanan"		Terimakasih atas informasi yang diberikan.	
7.	Perlu menampilkan skema diagram pengelolaan limbah karena belum diperlihatkan secara detail pembangunan fasilitas pengolahan limbah terpadu		Skema Pengelolaan Limbah Cair tersedia di Dokumen RKL RPL Lampiran I, Bab 2. Skema Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3 dari Kegiatan di Darat dan di Laut tersedia di Dokumen RKL RPL Lampiran I, Bab 4.1 dan Bab 4.2. Informasi fasilitas–fasilitas pengelolaan sampah yang akan disentralisasikan di Fasilitas Pengelolaan Limbah terintegrasi terdapat di Dokumen RKL RPL Lampiran I, Bab 4.1	**Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 2** **Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 12 dan 14** **Lampiran 1 RKL-RPL Hal. 11**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
8.	Perlu memperhatikan habitat/ekosistem perairan pesisir seperti wilayah nursery ground dan daerah asuhan dan daerah pemisahan ikan di areal studi.		Penelitian terhadap habitat laut telah dilaksanakan sebagai bagian dari program pemantauan lingkungan dari kegiatan Tangguh LNG saat ini dan juga untuk studi rona lingkungan AMDAL ini. Contohnya Studi Perikanan telah dilakukan pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2013. Studi Mamalia Laut dan Reptil telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2013. Hasil studi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam studi AMDAL ini Peta *spawning ground* untuk beberapa jenis biota laut seperti udang, kepiting, rajungan, dan ikan telah ditambahkan dalam dokumen ANDAL.	
9.	Perlu memperhatikan aspek-aspek ekologi (flora dan fauna) yang meliputi : - Biota endemic seperti jenis lumba-lumba hidung botol (sensitive pada gelombang), spinner, ikan paus dan berbagai penyu (penyu sisik, penyu belimbing dan penyu lekang) kesemuanya merupakan biota endemic dan masuk dalam ranah perlindungan konservasi. - Perlu menampilkan peta alur pelayaran		Komponen lingkungan flora dan fauna termasuk biota endemic telah dikaji dalam AMDAL ini dan telah dilakukan analisa terhadap dampak yang mungkin terjadi. Untuk meminimalisasi dampak akan dilakukan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber dampak terkait yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL. Peta alur pelayaran dapat dilihat pada dokumen ANDAL Peta 1-2, Halaman 1-143	**ANDAL Bab II sub bab 2.2, ANDAL Bab III sub bab 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 dan 3.4.2** **ANDAL I-43**
10.	Lumpur dan serbuk bor (dumping) pada 4 lokasi anjungan : - Perlu memperjelas kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk bor yang akan berpengaruh pada masalah sedimentasi (TSS), pembuangan ke laut itu berapa mil? - Perlu mendetilkan jenis dan jumlah limbah B3 dari kegiatan serbuk bor yang akan dikelola pada 4 lokasi anjungan tersebut dan titik-titik lokasi anjungan tersebut. - Ada 3 jenis lumpur dan serbuk bor yang digunakan. Angka lumpur ≥30.000 ppm kategori toksik tapi hanya digambarkan ≥30.000 ppm. Bagaimana proses analisa lumpur dan serbuk bor	27	Evaluasi dampak kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk bor yang akan berpengaruh terhadap sedimentasi (TSS) dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.1.2 Kualitas Air Laut (a. Kenaikan Kandungan Padatan Tersuspensi Total), termasuk jenis dan jumlah lumpur dan serbuk bor. Pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut, ini akan dilakukan pada lokasi anjungan (dapat dilihat pada Gambar I-5 Rencana Awal Pengembangan Fasilitas Lepas Pantai dan Pengeboran Sumur Gas). Anjungan yang terdekat dengan garis pantai adalah WDA jaraknya sekitar 4km.	**ANDAL III-9** **ANDAL I-15**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Analisa lumpur dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi dan bersertifikat. Analisa yang dilakukan adalah LC-50 dan TCLP, berdasarkan pedoman Permen ESDM No.45 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan gas Bumi. Lumpur bor akan dianalisa sebelum digunakan. Serbuk bor dan sisa lumpur bor pada kedalaman akhir juga akan dianalisa. Angka >30,000 pm merupakan standards untuk penentuan kategori toksis sesuai peraturan yang berlaku saat ini	
11.	Perlu ditampilkan peta lokasi pengambilan contoh kualitas air : - Berapa status mutu air laut yang ada pada areal studi? (perbandingan harus mengacu pada KepMen LH No. 51 Tahun 2004 Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut)		Peta lokasi pengambilan contoh kualitas air terdapat di Dokumen RKL RPL Lampiran 4 Baku mutu kualitas air laut mengacu ke KepMen LH 51 Tahun 2004 sesuai dengan isi di Dokumen RKL RPL Lampiran 2, khususnya pada Tabel.10. Kegiatan Tangguh LNG di area laut mencakup kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan lainnya. Kategori baku mutu air laut akan mengeacu pada jenis dan lokasi kegiatan terkait	**Lampiran 4 RKL-RPL** **Lampiran 2 RKL-RPL Hal. 9**
12.	Perlu menampilkan modeling (hanya menampilkan software model) kadmium dan timbal.		Pemodelan Pembuangan Air Limbah dapat dilihat pada Lampiran IV.2. Kadmium dan timbal termasuk dalam parameter yang dimodelkan.	**Lampiran ANDAL** **Sub Bab IV.2** **Hal. 36**
13.	Pada rona lingkungan hidup social ada kegiatan ekonomi masyarakat		Kegiatan ekonomi masyarakat setempat telah dituliskan di dalam dokumen AMDAL pada bagian rona lingkungan awal (Bab 2).	**Dokumen ANDAL – Bab II Rona Lingkungan Awal**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
14.	Bagaimana dengan kegiatan pengembangan LNG yang dapat memberi dampak bagi aktifitas perikanan budidaya dan tangkap, bagaimana penanganan dan pengelolaannya? Apabila ada bagaimana kompensasi yang akan diperoleh?		Terima kasih atas masukannya. Tangguh sudah mempertimbangkan aspek dampak pengembangan terhadap penurunan pendapatan nelayan. Oleh karena itu, Tangguh akan mengimplementasikan program pemulihan pendapatan nelayan yang terkena dampak; dan akan mengembangkan berbagai program peningkatan pendapatan serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak	**Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3**
15	Perlu kajian lebih mendalam terhadap komponen lingkungan biologi dan sosekbud		Parameter komponen lingkungan biologi dan sosekbud sudah dikaji rinci dalam dokumen ANDAL ini Bab III sub bab 3.1 sampai dengan 3.4 pada halaman III-8 sampai dengan III-421.	**ANDAL III-8 s / d III-421**
16.	Jika terjadi pencemaran atau blow out terhadap masyarakat khususnya nelayan dan terhadap lingkungan, bagaimana sistem ganti ruginya?		Dokumen AMDAL mengatur pengelolaan lingkungan dan sosial dalam kondisi normal. Oleh karena itu disusun RKL yang juga mencakup rencana pengelolaan sosial. Untuk kondisi emergency atau darurat, contohnya blow up, diatur dalam prosedur tersendiri.	

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 5 Desember 2014)

RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG DI KABUPATEN TELUK BITUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 5 Desember 2013

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Yohanes Ateta (Distrik Sumuri)				
1.	Masalah peta zona sifat dan kerawanannya dalam wilayah zona dengan sendirinya BP Tangguh LNG menyusahkan mata pencarian masyarakat. Kalau musim ombak mereka mau keluar lewat mana? Harus BP Tangguh LNG mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat.		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
2.	Fasilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak merata karena ada perbedaan Antara masyarakat Papua. Kalau di terima menjadi karyawan pekerja di LNG Tangguh LNG gaji atau salary berbeda dengan pekerja yang diterima dari Jakarta sangat jauh atau perbedaan tidak seimbang dengan orang Papua.		Sebagai perusahaan pemberi kerja yang beroperasi di Indonesia, Tangguh LNG dan kontraktornya, harus menaati ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, system pengupahan tidak boleh bersifat diskriminatif (ras, agama, suku, jenis kelamin, dan golongan). Terjadinya perbedaan kompensasi dan manfaat yang diterima terjadi semata-mata disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kompetensi, keahlian, pengalaman, masa kerja, serta posisi dan tanggung jawab pekerja.	Detail Perihal Kesempatan Kerja bagi SDM Papua: Lampiran 3 Sub-bab Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
3.	Fasilitas air bersih baik sumur bor air dan tangki penampung di siap oleh BP Tangguh LNG. Ternyata bukan sumur bor tetapi BP Tangguh LNG siap untuk menadah air hujan dari surga turun itupun kalau musim hujan kenapa tidak bias memasang sumur bor. Apa alasan BP Tangguh LNG.		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Upaya penyediaan air bersih yang dilakukan oleh Tangguh LNG dilakukan dengan mempertimbangkan agar fasilitas dan sarana air bersih tersebut tidak membutuhkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Sumur bor termasuk mahal dan sulit untuk dipelihara dan dilanjutkan oleh masyarakat. Program air bersih tadah air hujan sekalipun hanya berfungsi pada musim hujan, tapi tidak membutuhkan biaya operasional dan dengan biaya pemeliharaan yang rendah.	
4.	Bp Tangguh LNG harus mempekerjakan masyarakat lokal kampung di dalam proyek LNG baik di BP. Kontraktor dan mitra BP lainnya tetapi ternyata dengan susah payah untuk mendapat kerja. Ternyata mereka mengambil dari Jakarta paling banyak dan orang lokal menjadi penonton diatas tanah sendiri.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional	18-29)
5.	BP Tangguh LNG harus memberikan beasiswa secara merata kepada semua pelajar. Ternyata bukan orang Sumuri yang diberikan beasiswa tetapi diberikan sama orang lain. Beasiswa tersebut dikemanakan untuk keseluruhan nilai tambah bias diberikan nominal sebesar Rp. 600.000.000.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 9 beasiswa bagi mahasiswa dan 10 beasiswa pendidikan bagi pelajar dari Sumuri. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
6.	BP Tangguh LNG harus mencapai angka 80% untuk masyarakat lokal untuk bekerja dalam proyek Tangguh LNG baik kontraktor dan BP.		Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG	Industrial (Halaman 18-29)
Sebastianus Nanafesi (Kampung Tomage)				
1.	Kami berharap bila ada ketetapan AMDAL tolong diperjelaskan dan dengan ketentuan tahap-tahap yang sering sesuai dengan ketentuan hak ulayat.		Sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh termasuk rencana pembangunan Kilang LNG 3 pada tahap awal dan rencana pembangunan Kilang LNG 4 pada tahap pengembangan selanjutnya telah dilakukan sebagai bagian dari proses AMDAL, yaitu pada Konsultasi Publik yang dilakukan di wilayah Bintuni dan Fakfak pada Mei-Juli 2012. Rencana pengembangan ini juga telah disampaikan pada saat Rapat Komisi AMDAL Tangguh LNG di Bintuni pada tanggal 5 Desember 2013 dan Rapat Lanjutannya pada 18 Februari 2014. Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	
2.	Pembentukan proses AMDAL merupakan salah satu ketetapan yang sudah ditetapkan dengan nilai-nilai yang sudah diperoleh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil maka hak harus diperoleh sesuai dengan ketetapan AMDAL.		Penyusunan dokumen AMDAL telah mempertimbangkan dan merujuk pada standar-standar yang berlaku serta aspirasi masyarakat dan Pemerintah. Standar-standar yang dijadikan acuan adalah: 1. Undang-undang dan Peraturan Republik Indonesia; 2. Standar Prinsip Equatorial (EP) 3 dan IFC Standar Kinerja (PS) tahun 2012;	Lampiran 3. Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab 1.4 Peraturan dan Standar (Halaman 5)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			3. Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP-HR, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) yang mengacu pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM (UDHR/Universal Declaration of Human Right), serta prinsip-prinsip kesukarelaan terhadap HAM (VPSR/Voluntary Principle on Human Right). 4. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO/International Labour Organization) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998	
3.	Kami berharap agar dengan adanya sidang komisi AMDAL Tangguh LNG tren 3 ini kesejahteraan rakyat harus dipenuhi sesuai dengan daerah dampak : a. infrastruktur		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG akan mendukung upaya pembangunan bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG yang melibatkan perencanaan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terfokus pada kegiatan yang berkelanjutan.	
	a. perumahan masyarakat		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Sepengetahuan kami, terdapat perusahaan migas lain yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kampung Tomage. Sehingga sebaiknya aspirasi ini juga disampaikan kepada perusahaan tersebut.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
4.	Peningkatan kapasitas pendidikan berupa : a. beasiswa dari SD s/d perguruan tinggi.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	b. Peralatan pendidikan berupa internet sekolah dan komputer sekolah dan solarsel.		Hingga saat ini, Tangguh LNG telah memberikan bantuan pendidikan, seperti penyediaan buku, komputer, dan peralatan sekolah lainnya. Di masa yang akan datang, Tangguh LNG berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap pengadaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangak meningkatkan kualiatas sekolah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Pembangunan gedung SD dan TK.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	c. Gaji honor/insentif guru honor		Tangguh LNG telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pendidikan di Distrik Bomberay, Kampung Tomage, yang mekanisme pelaksanaanya dikoordinasikan dengan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
5.	Pengembangan ekonomi masyarakat berupa : - pertanian - peternakan - perikanan		Tangguh LNG akan berupaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal serta mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung usaha masyarakat. Di samping itu, Tangguh LNG juga akan mendukung ketersediaan alat-alat pertanian untuk mendukung pertanian masyarakat Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar.	
	Sarana prasarana : perbaikan jalan raya/jalan stapak kampung		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan. Namun demikian, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut. Sehubungan dengan dukungan Tangguh LNG terhadap pengembangan infrastruktur lainnya, akan dibahas dalam mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang mana prioritas pelaksanaan pembangunan kampung menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	
6.	Alat penunjang transportasi berupa jonson dan viber		Tangguh LNG tidak akan mengadakan bantuan perahu dan motor tempel untuk kepentingan perseorangan. Ke depan, bantuan pengadaan perahu, motor tempel, dan peralatan nelayan akan diberikan untuk mendukung pengembangan usaha bagi keloampk usaha masyarakat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
7.	Proyek pengembangan air bersih di setiap kampung		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
8.	Proyek pengembangan air bersih berupa pemasangan pipa ledeng dari rumah ke rumah lewat penampung air bersih/bak penampung, pengembangan kapasitas penerangan listrik di kampung berupa solarsel atau generator melalui instalasi dari rumah ke rumah.		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat mengenai pemasangan pipa air bersih bagi masyarakat di Kampung Tomage.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)
	Sarana kesehatan berupa : - pengadaan alat-alat medis - penambahan tenaga medis - pembangunan Pustu di kampung		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di Kampung Tomage.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)
H. Syamsudin Bauw (Wakil Masyarakat Kampung Kecap Distrik Arandai				
1.	Kami masyarakat Sebyar kapan mendapat perumahan layak seperti di daerah selatan.		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Sepanjang pengetahuan kami, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki program perumahan, meskipun mungkin pada saat ini masih terbatas dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Diharapkan bahwa di masa yang akan datang apabila Tangguh Train 3 telah memasuki tahap operasi dan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Halaman 34-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			produksi sehingga Dana Bagi Hasil migas meningkat maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat memperluas program perumahan ini sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang memerlukannya secara lebih luas.	
2.	Kami masyarakat Sebyar kapan mendapat pembagian hasil antara pihak perusahaan dan masyarakat.		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
3.	Kami masyarakat suku Sebyar selama ini kami tidak di perhatikan baik oleh perusahaan BP Tangguh LNG.		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV). Sehingga diharapkan manfaat keberadaan Tangguh LNG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk bagi masyarakat Suku Sebyar.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendahuluan (Halaman 1-5)
4.	Pertama-tama sama kami dari Distrik Aranday tidak kena dampak langsung. Apa seSub-babnya dan untuk Tren 3 ini apakah kami dua distrik ini		Ke depan, wilayah studi sosial Tangguh LNG akan mencakup beberapa kampung di Distrik Aranday, yaitu Kampung Aranday, Kampung Kecap, Kampung Baru,	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	kami bisa kena dampak langsung atau tidak.		dan Kampung Manunggal Karya. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan beberapa Kampung di Distrik Aranday yang tidak termasuk ke dalam wilayah studi sosial, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	
5.	Kami orang Sebyar tidak mau dibujuk dengan barang yang tidak berharga seperti katenting dan jarring sebelum ada sekarang juga stop.		Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
6.	Kami dari Sebyar kedua distrik harus masuk agenda dampak langsung.	2	Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2012. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa wilayah yang dihuni Suku Sebyar termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari wilayah yang tidak terkena dampak langsung, maupun tidak termasuk dalam lingkup kajian, Tangguh LNG dapat	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan	
7.	Tolong perusahaan BP memperhatikan anak-anak kami yang berkuliah di luar Papua dan di Papua.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa, baik yang berkuliah di Papua maupun luar Papua, dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 mahasiswa dari Sebyar yang berhasil memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Beasiswa yang diberikan oleh Tangguh LNG melengkapi beasiswa yang juga telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Hal 13-18)
Hamzah Almochdar S.Sos (Kelurahan Kokas Kota)				
1.	Saya minta dengan hormat agar ada perjanjian atau pernyataan yang di buat oleh pihak BP. Dalam bentuk berita acara/rekomendasi yang di tandatangani oleh pihak BP, Pemda dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dari masing-masing kampung yang hadir pada sidang AMDAL. Tren 3 ini di atas materai 6000. Mengingat jangan sampai setelah sidang AMDAL dan penetapan program pada tren 3 ini dan terjadi perubahan aturan atau UU/Permen yang mengakibatkan semua program yang di usulkan oleh masyarakat gugur atau hangus dengan sendirinya.		Tangguh LNG akan memperhatikan hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat yang diajukan dalam rapat Komisi AMDAL di Bintuni. Kami berusaha untuk menanggapi semua saran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Berita acara dari semua pertemuan pembahasan AMDAL beserta tanggapan Tangguh LNG akan dijadikan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang akan diserahkan kepada KLH untuk proses persetujuan sesuai peraturan yang berlaku	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pelaksanaan AMDAL dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Bapedalda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Bintuni dan Fakfak.	
Yakub Manuama (Sekretaris Kampung Amutu Distrik Sub-babo)				
1.	BP Migas/Tangguh LNG harus mengedepankan pelayanan masyarakat adat.		Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Dokumen ANDAL Bab I – Pendahuluan
2.	5 tahun sekali BP Tangguh LNG/Migas harus evaluasi kinerja perusahaan lebih khusus tentang		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan	Dokumen RKL/RPL – Tabel Pengawas

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	pelayanan perusahaan pada masyarakat bersama agar wakil masyarakat yang menandatangani AMDAL agar masyarakat bisa tau usulan-usulan yang kami usul dan sepakat dalam AMDAL, mana yang sudah berjalan dan belum berjalan.		Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan.	dan Penerima Laporan
Kamal W. (Distrik Kokas)				
1.	Dampak yang kita temui di lapangan atau di masyarakat yaitu perusahaan yang beroperasi di hutan maupun di jalan raya. Maka dengan ini kami mengusulkan bahwa pemerintah harus memberi perhatian terhadap pihak pengusaha bahwa di harus melaksanakan tugas utama dari aturan UUD karena mengakibatkan dampak begitu besar di kalangan masyarakat. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada pemerintah untuk memberi perhatian kepada kontraktor.		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Repbulik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	Dokumen RKL/RPL – Tabel Pengawas dan Penerima Laporan
2.	Proyek di jalan raya adapun yang rusak maka kami masyarakat memberitahukan kepada pemerintah untuk memberi perhatian kepada kontraktor jalan bahwa jangan sampai dampaknya di masyarakat karena konsultan kurang mengawasi maka dampaknya lebih besar ke masyarakat maka kami memberitahukan kepada pemerintah harus memberi		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Repbulik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan.	Dokumen RKL/RPL – Tabel Pengawas dan Penerima Laporan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	pemahaman/teguran		Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
Miftah Fauzan Fimbay (Pemberdayaan Masyarakat Bintuni)				
1.	Program pemulihan pendapatan harus ditingkatkan, dari segi pemuda dan olahraga. Dimana sepakbola di Indonesia ini sudah merupakan suatu industri yang besar. Diharapkan BP Tangguh LNG bersama dengan pemerintah daerah dapat memperhatikan olahraga khususnya sepakbola, sebagai contoh: membuat ajang kompetisi lokal guna pencarian bibit yang akan diseleksi untuk masuk dalam tim PERSITEBIN yang nantinya akan di kontrak dan digaji serta berprestasi hingga masuk didalam kanca Indonesia Super Liga (ISL). Mendirikan Sekolah Diklat Olah Raga di Kab. Teluk Bintuni.	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Sosial 46-53	Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
Alexander Koupun (Lembaga Adat dan LSM Bin Madag Hom)				
1.	Saran saya buat seluruh instansi yang bertanggungjawab (BP & pemerintah) mengutamakan beberapa aspek. Diantaranya : a. kebutuhan sandang, pangan dan papan		Tangguh LNG telah membuat dan melaksanakan program-program sosial berupa program peningkatan pendapatan dan program kewirausahaan Papua untuk membantu memperkuat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Dalam hal ini sudah sejauh mana tindak lanjut BP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan-kebutuhan sandang pangan maupun papan.		masyarakat dapat ditingkatkan.	
	b. kebutuhan kesehatan & pendidikan		Tangguh LNG telah membuat dan melaksanakan, serta akan melanjutkan program-program sosial, termasuk program pendidikan dan kesehatan untuk membantu masyarakat memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12) Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	a. Apa yang sudah dilakukan BP dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang terkena dampak. Sekedar tambahan, bagaimana masyarakat bisa memiliki pendidikan yang baik jika tenaga pengajar tidak ada. Bagaimana masyarakat bisa terdidik sedangkan anak-anak sekolah mau belajar tidak ada listrik alias belajar dalam kegelapan.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18) Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 52-53)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Sehubungan dengan kebutuhan listrik, pada bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	
2.	Persoalan infrastruktur Yang kami tau selaku LSM sejauh ini LNG dan pemerintah belum dan bahkan tidak pernah memenuhi kebutuhan infrastruktur yang ada di teluk.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam	•

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG akan mendukung upaya pembangunan bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG yang melibatkan perencanaan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terfokus pada kegiatan yang berkelanjutan.	
3.	Persoalan dana-dana bantuan Yang ingin kami tanyakan, Apakah BP yakin dana-dana bantuan yang diberikan sudah tersentuh 100% ke masyarakat? Kami harap BP tinjau kembali kucuran dana-dana bantuan yang ada. Bila perlu BP membuat semacam policy control independent untuk memantau dana-dana tersebut.		Program-program sosial yang berjalan tidak diserahkan secara tunai, namun dalam bentuk program, dengan demikian Tanggh LNG dapat memantau dan meng-audit dana-dana pengembangan masyarakat yang telah dikeluarkan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
Abutalib (Kampung Fior)				
1.	Perusahaan LNG Tangguh LNG juga beroperasi di wilayah pesisir kami, tetapi tidak pernah memperhatikan kami. Dan sekarang ini kami juga mendapatkan dampak. Dengan ini saya perwakilan masyarakat Kampung Fior membawakan aspirasi yang terlampir di lembaran 2, 3, 4 untuk dipenuhi oleh LNG Tangguh LNG.		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab I Pendahuluan (Halaman 1-5)
Rachman Fimbay (Kampung Sido Makmur)				
1	Kami masyarakat Kampung Sido Makmur sebelum Tren I, Tren II kami masyarakat Kampung Sido Makmur Jaya dengan penghasilan penangkapan udang ikan dengan standar yang cukup besar di atas 50 kg 80 kg 120 kg sehari tetapi setelah anjungan masuk kami masyarakat jadi susah. Hasil nelayan jadi menurun di bawah		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada.	• Dokumen RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bentuk Pengelolaan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	standar yang terlalu sedikit di bawah 5 kg 10 kg sampai 20 kg dalam 1 hari.		Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	Lingkungan Hidup • Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
2.	Maka kami sarankan kepada bapak-bapak pemerintah perusahaan BP Migas agar bisa melihat kami masyarakat kecil sudah susah di bawah ini. Dengan adanya Tren 3 ini kalau kami kena dampak AMDAL lihat kami sesuai apa yang ada di buku materi hak kami dengan bantuan kompensasi masyarakat.			
Ansel Sanggemi (Tokoh Pemuda Distrik Sub-babo)				
1.	Persyaratan lamaran kerja jangan di persulitkan bagi anak-anak lokal dengan keterbatasan pendidikan karena BP punya komitmen untuk membina anak-anak negeri Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
2.	Posisi anak-anak lokal di BP harus di lihat. Dipermanenkan anak-anak lokal di BP. Jangan hanya saudara-saudara kita dari luar (Jakarta) saja yang baru bekerja di BP langsung di permanenkan.		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian maka, dalam proses penerimaan tenaga kerja, masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Dalam hal masa kerja	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pekerja sudah berakhir.	
3.	Di magangkan putra putri lokal Kab. Teluk Bintuni yang bekerja di BP dan yang bekerja di sub kontraktor BP. Sesuai dengan job desk (posisi/jabatan kerjanya masing-masing.		Tangguh LNG dapat memberikan kesempatan kepada sarjana yang baru menyelesaikan pendidikanya di tingkat perguruan tinggi dalam bidang yang berhubungan dengan usaha Tangguh LNG, memenuhi syarat tertentu, serta adanya supervisor di Tangguh LNG yang dapat memberikan bimbingan kepada peserta magang tersebut.	
4.	Kami pemuda Distrik Sub-babo, minta kepada PEMDA (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja) agar lebih mempertegas Tenaga Kerja yang masuk dari luar tanah Papua (menyangkut surat izin masuk ke daerah (yang di slot surat AKAL).		Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban dari Tangguh LNG.	
5.	Kami pemuda Distrik Sub-babo, meninjau AMDAL, pertama telah melahirkan persentasi masalah tenaga kerja. Dengan perbandingan 60% masyarakat pribumi Teluk Bintuni dan luar Papua 40%. Namun kami lihat di lapangan dari persentasi ini sudah tidak memacu ke AMDAL. Pertama maka kami minta kepada pihak BP tolong ditinjau kembali AMDAL pertama, tentang persentasi tersebut, masalah tenaga kerja.		Hingga saat ini, jumlah persentase tenaga kerja Papua di Tangguh LNG telah mencapai 54%. Untuk ke depannya, target ketenagakerjaan untuk masyarakat Papua hingga tahun 2029 adalah 85%. Pengembangan karir terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas para karyawan yang berasal dari Papua melalui berbagai pelatihan dan pendampingan.	
6.	Dengan adanya perhatian bapak pimpinan BP, kami mengharapkan perubahan, bila Tren 3 berjalan.		Sehubungan dengan proyek pengembangan, Tangguh LNG telah mempersiapkan berbagai program, sebagai lanjutan dan modifikasi dari program yang telah berjalan sebelumnya. Program sosial tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, tata kelola kepemerintahan, dan lain-lain. secara detail program-program tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
7.	Diharapkan pihak BP mendukung pemuda, dengan memfasilitasi di bidang olahraga.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
H. Abukasim Heremba A.Md (Distrik Kokas)				
1.	- Kita telah mengikuti pembekalan mengenai dampaknya AMDAL yang dapat berpengaruh terhadap dampak lingkungan. Karena kami di Distrik Kokas ada beberapa kampung yang tidak terdapat dalam daftar AMDAL. Karena kampung tersebut terdapat di pesisir arus sungai yaitu Kampung Batupatas, Mamdoni, Patimburak, Kabawbur dan Ubadari. Saya ingin tanyakan kenapa kampung-kampung ini tidak terdapat dalam dokumen AMDAL. - Masukan saya harap kepada konsultan dan BP dan pemerintah melihat kembali kampung-kampung yang akan dapat AMDAL tersebut. - Tanggapan saya pihak BP dan konsultan melihat kembali dalam dokumen AMDAL tersebut.		Ke depan, wilayah studi sosial Tangguh LNG akan mencakup beberapa kampung di Distrik Kokas. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan beberapa Kampung di Distrik Aranday yang tidak termasuk ke dalam wilayah studi sosial, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL
2.	- Memperhatikan dampak terhadap sekitar perikanan bagi para nelayan pesisir pantai saat kegiatan kontruksi dan operasi anjungan karena masyarakat kami yang ada di Petuanan Arguni, Petuana Sekar dan Petuana Wertuar masyarakatnya adalah kebanyakan bernelayan. - Masukan dan tanggapan akan digunakan didalam proses pelingkupan dalam penyusunan KA AMDAL agar BP harus betul-betul memperhatikan bagaimana untuk		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut	Dokumen RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	mensejahterakan masyarakat yang akan dapat dampak langsung nanti.		lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	
3.	- Saya mengharapkan kepada pihak BP supaya dapat memberikan peluang kepada kami putra putri daerah yang punya hasil supaya dapat pekerjaan yang baik untuk mereka. Jangan sampai saudara-saudara kita yang punya hasil tetapi mereka sebagai pemantau saja sedangkan yang mendapat hasil orang-orang dari luar daerah penghasil. - Saya harap kepada pihak BP dapat melihat itu dengan jelas. Jangan sampai saudara-saudara kami itu hanya sebagai penonton di daerah sendiri.		Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
Suharti K. (Tokoh Perempuan)				
1.	Masukan buat pemerintah Kab. Dan BP tolong perhatikan kami modal usaha karena kami sudah punya IBH bangunan cuma kurang biaya.		Sejak tahun 2008 Tangguh LNG telah memulai program *Stocking Point* yang mana katering Tangguh LNG membangun kontrak dengan koperasi-koperasi yang ada di Bintuni, Babo, Tofoi, Tanah Merah, dan Arguni. Ke depan, Tangguh LNG, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah akan tetap mendukung pengembangan koperasi dan lembaga keuangan sebagai sarana pendukung utama untuk kebutuhan modal masyarakat asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
2.	Kami punya anak yang sekolah cuma di kasi dari BP tapi SMA. Untuk potensi Sub-bab anak-anak		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua,	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	SMA yang kemarin lulus dengan nilai IPA 7,5, 7,3 dan anak itu tidak perhatikan sampai mereka kembali.		khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa, baik yang berkuliah di Papua maupun luar Papua, dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Beasiswa yang diberikan oleh Tangguh LNG melengkapi beasiswa yang juga telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
3.	Jadi bapak kami mohon, kalau boleh diperhatikan pemerintah dan BP.			
4.	Bapak kami minta dari BP dan pemerintah lihat kami ibu-ibunya muslim dan kristiani. Untuk studi banding dari kampung ke kampung dari distrik ke distrik dan juga diluar Papua dan kalau boleh keluar negeri yaitu ke Arab Saudi dan Palestina.		Tangguh LNG telah menyediakan dan akan terus menyediakan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat asli secara keseluruhan. Tangguh LNG tidak dapat memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat untuk melakukan studi banding bidang keagamaan, keluar Papua maupun ke luar negeri.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
5.	Khusus untuk BP tolong cari guru ngaji untuk TPA 3 orang.		Tangguh LNG memahami aspirasi ini dan akan ditambahkan dalam komitmen Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Penguatan masyarakat sipil.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
6.	Kami minta guru kontrak untuk SMP Sanawiya di Distrik Sub-babo.		Sejak tahun 2005, melalui program pendidikan, Tangguh LNG telah menghadirkan guru-guru untuk mendukung proses belajar mengajar di kampung-kampung di sekitar wilayah operasi Tangguh. Untuk ke depannya, program ini akan terus berjalan sebagai upaya peningkatan kualitas	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sekolah.	
7.	Kami dari pemberdayaan perempuan minta kalau boleh kami diikutsertakan dalam kegiatan ibu pelatihan keluar antara lain keluar kabupaten.		Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya pelatiihan yang dilakukan diluar kabupaten dalam rangka pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan sudah menjadi bagian dari komitmen AMDAL yang tertuang dalam Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35), Sub-bab Penguatan dan Pengembangan Ekonomi untuk Masyarakat Asli.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 29-34) • Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
8.	Usulan dari Distrik Sub-babo minta satu rumah sakit yang dilengkapi dengan dokternya. Dilihat dari BP dan pemerintah.		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12), Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Dokumen RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12), Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.
9.	Usulan kami minta bantuan masjid dan gereja di Distrik Sub-babo dari BP.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya, salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan tempat ibadah di kampung-kampung. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50) – Pengembangan Masyarakat
10.	Kami usul kalau boleh beasiswa untuk anak-anak di perguruan tinggi negeri dan swasta harus merata.		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Pada tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
11.	Kami usul bahwa kalau boleh kami minta peternakan ayam, kambing dan sapi. BP dan pemerintah harus melihat.		Sejak tahun 2007, Tangguh LNG telah memberikan program intervensi pertanian melalui program peningkatan pendapatan. Untuk ke depannya, Tangguh akan meneruskan program pertanian bagi masyarakat dengan menambahkan program peternakan sebagai bagian dari program peningkatan pendapatan masyarakat. Komitmen ini telah ditulis di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh dalam dokumen AMDAL, sub-bab Peningkatan Pendapatan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 13-18)
12.	Kami usul pertanian, tanaman jangka panjang (mangga, rambutan, durian, kelengkeng).			
13.	Kami usul untuk BP untuk guru-guru kontrak		Sejak tahun 2005, melalui program pendidikan, Tangguh	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	untuk SD, SMP kalau bisa lihat guru-guru kontrak dan honor.		LNG telah menghadirkan guru-guru untuk mendukung proses belajar mengajar di kampung-kampung di sekitar wilayah operasi Tangguh. Untuk ke depannya, program ini akan terus berjalan sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
14.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni perhubungan Papua Barat kami minta kapal putih Manokwari, Wasior, Sorong, Kokas, Sub-babo, Bintuni.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Samsudin Manuama (Kampung Nusei Distrik Sub-babo)				
1.	Menurut pandangan kami bahwa AMDAL adalah sesuatu hal yang paling penting bagi kami masyarakat. Karena lingkungan adalah suatu tempat yang kami tinggal. Dan disitu kami tinggal dan diantaranya sekitar lingkungan ada hutan di dalam hutan ada satwa dan tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya begitu pula ada air laut dan didalam air laut pun ada ikan, udang dan kepiting. Untuk itu lingkungan paling penting bagi kami. Dan harapan kami apabila proyek Tangguh LNG ini berjalan yang disebut Tren 3 berjalan. Maka kami pasti akan kena dampak, dampak positif dan dampak negatif.		Tangguh LNG telah melakukan kajian mengenai dampak-dampak yang timbul akibat kegiatan pengembangan Tangguh LNG. Dampak yang timbul tidak hanya mencakup dampak negatif, tapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung di sekitar wilayah operasi Tangguh. Dampak positif seperti kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta intervensi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat, tentunya juga dengan dukungan dan kerjasama Pemerintah Daerah. Dampak serta pengelolaan dampakakan kegiatan Tangguh telah tertulis di dalam dokumen ANDAL Bab 3, yaitu Evaluasi Dampak.	Dokumen ANDAL Bab 3 Evaluasi Dampak
2.	Yang dimaksud dampak langsung dan dampak tidak langsung. Yang kami berharap ketika kami kena dampak, pertanyaan kami ketika kena dampak langsung apa yang harus dilakukan oleh pihak BP dan dampak yang tidak langsung apa yang juga harus dilakukan oleh pihak BP.			
3.	Kami minta pendidikan berkualitas		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni,	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	
4.	Kesehatan (sarana dan prasarana) yang memadai		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)
5.	Ekonomi kerakyatan		Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 29-34)
6.	Sosial budaya		Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
7.	Tenaga kerja		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Kemampuan Pekerja Papua dan Hubungan Industrial (Halaman

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			- Nasional (Luar Papua)	18-29)
8.	Program pemuda		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
9.	Sosial keagamaan		Tangguh LNG telah menyediakan dan akan terus menyediakan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat asli secara keseluruhan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
10.	Penerangan		Pada bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	
11.	Memperhatikan hak-hak adat kami masyarakat enam kampung Distrik Sub-babo		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
Frans Kamisopa (Tokoh Pemuda Kampung Tanah Merah Baru)				
1.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus mengangkat ketertinggalan kami pemuda pemudi kampung tanah merah untuk bagian seni dan budaya yang selama ini tertinggal.		Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
2.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG agar merenofasikan longsoran di dua rumah masyarakat yang tinggal sedikit akan rubuh karena pengaruh longsoran.		Tangguh LNG telah memenuhi semua kewajiban yang sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Rumah dan Fasilitas Publik pada tahun 2002. Tangguh LNG sudah tidak memiliki kewajiban atau komitmen yang belum terselesaikan untuk membangun lebih dari apa yang telah disepakati di dalam Perjanjian.	
3.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG agar lebih memberdayakan kami pemuda pemudi kampung tanah merah baru dalam mengambil bagian dalam LNG Tangguh LNG.		Tangguh LNG berkomitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			- Nasional (Luar Papua)	
4.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG memberdayakan kami pemuda pemudi dalam mengikuti kursus komputer.		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
5.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG membuat pagar permanen di SMP dan SD agar semua fasilitas sekolah bisa di jaga dan dirawat dengan baik.		Perbaikan infrastruktrur sekolah merupakan bagian dari komitmen terhadap upaya peningkatan mutu Pendidikan, yang telah tertulis dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18), Sub-Sub-bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
6.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus mengaspal jalan di kampung tanah merah baru yang selama ini sudah hancur dan renovasi kembali jetty di kampun tanah merah baru.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut, salah satunya adalah dengan pembangunan jetty dan pembangunan jalan di kampung Tanah Merah Baru. Dan pada tahun 2009, fasilitas umum di kampung Tanah Merah Baru telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak Pemerintah Daerah. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	
7.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh		Tangguh LNG telah berkomitmen untuk tetap	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	LNG harus bangun saturumah sanggar guna untuk menampung semua kegiatan yang menyangkut dengan seni dan budaya.		menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat kampung di sekitar operasi Tangguh LNG. Salah satunya adalah dengan membangun rumah adat yang dapat digunakan untuk menampung kegiatan seni dan budaya masyarakat di kampung.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 37-48) – Penguatan Masyarakat Sipil
8.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus membiayai anak-anak sekolah baik dari SMP/SMA sampai ke tingkat tinggi. Jangan melihat dari prestasi.		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
9.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus mendorong ibu-ibu PKK di kampung tanah merah baru untuk memberdayakan mereka dalam program-program yang selama ini masih ketinggalan dalam pemberdayaan perempuan di bidang perempuan.		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk. .	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 29-34) – Penguatan dan Pengembangan Ekonomi
10.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh		Tangguh telah berkontribusi dalam meningkatkan	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	LNG harus menambahkan peralatan puskesmas di kampung Tanah Merah Baru.		kualitass pelayanan kesehatan di kampung-kampung, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan kepada Puskemas di kampung Tanah Merah Baru. Ke depannya, Tangguh berkomitmen untuk tetap berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kesehatan. Komitmen ini telah tertulis dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)
11.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus membangun rumah bagi kk baru penambahan (60 rumah).		Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum di Tanah Merah pada tahun 2002, yaitu membangun 101 rumah di tanah Merah Baru bagi masyarakat yang dipindahkan ke Tanah Merah Baru, dan membangun 26 rumah bagi masyarakat yang meminta untuk dipindahkan ke Onar. Tangguh LNG sudah tidak memiliki kewajiban kontraktual atau komitmen lebih lanjut untuk membangun lebih daripada yang telah diatur dalam perjanjian	
12.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus meninjau kembali limbah di belakang basecamp Tangguh LNG karena itu akan mempengaruhi air minum akhirnya membuat kami masyarakat kampung tanah merah kena penyakit gatal-gatal dan lain-lain seperti muntaber.		Seluruh limbah yang dihasilkan dari kegiatan Tangguh LNG telah ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal air limbah, seluruh air limbah telah diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat, sebelum air tersebut dibuang untuk memastikan bahwa air tersebut memenuhi baku mutu air yang dipersyaratkan oleh peraturan.	
13.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus menambah sumur air (sumur bor) karena sumur bor yang ada sudah tidak mampu untuk menyalurkan air ke rumah-rumah.		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Upaya penyediaan air bersih yang dilakukan oleh Tangguh LNG dilakukan dengan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mempertimbangkan agar fasilitas dan sarana air bersih tersebut tidak membutuhkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Sumur bor termasuk mahal dan sulit untuk dipelihara dan dilanjutkan oleh masyarakat. Program air bersih tadah air hujan sekalipun hanya berfungsi pada musim hujan, tapi tidak membutuhkan biaya operasional dan dengan biaya pemeliharaan yang rendah.	
14.	Kami pemuda pemudi kampung tanah merah baru yang kena dampak langsung yang mana selama ini kami melihat keberadaan BP Tangguh LNG di kampung kami tetapi tidak melibatkan kami untuk mengambil bagian di dalam proyek ini dan tidak mencapai 100% oleh seSub-bab itu kami berharap dan harus di dalam AMDAL ke dua ini BP lebih memperhatikan kami untuk terlibat agar kami tidak jadi penonton di tempat kami sendiri. Walaupun kami tidak di sebut sebagai tenaga skil dan kamipun bisa menjadi tenaga skil apabila kami di beri kesempatan dan kepercayaan.		Tangguh LNG berkomitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
15.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus memberdayakan kami pemuda pemudi kampung tanah merah baru lewat program-program yang betul-betul bisa menjadi pengalaman yang baik bagi kami.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
16.	Rekomendasi dokumen AMDAL BP Tangguh LNG harus melihat abrasi di kampung tanah merah baru yang selama ini sudah hancur oleh seSub-bab itu BP harus tinjau kembali dari bibir pantai sampai di sungai Saengga dan juga sampai		Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Tanah Merah, sejak tahun 2010-2012, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	di kampung onar baru.		hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musrenbang	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Syarifudin Kaltam (Wakil AMDAL, Komisi Penilai Kampung Otoweri Distrik Bomberay/Fakfak)				
	Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak BP Indonesia dengan dukungan pemerintah untuk dilaksanakan di kampung otoweri yaitu :		Semua hasil konsultasi publik telah dicatat serta dianalisis. Masukan masyarakat dari konsultasi publik telah dilampirkan dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL. Masukan-masukan tersebut juga menjadi dasar dalam menyusun program sosial Tangguh ke depannya yang telah tercantum dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh	Lampiran Dokumen KA-ANDAL
1.	Hasil konsultasi publik pada tanggal 12 Juli 2013 di kampong otoweri.			
2.	Pihak BP Indonesia dan pemerintah jangan memisahkan kita dengan saudara-saudara kami yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten lain (Kabupaten Teluk Bintuni).		Ke depan, wilayah studi sosial Tangguh LNG akan mencakup beberapa kampung dan distrik di Kabupaten Fakfak. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Fakfak yang tidak termasuk ke dalam wilayah studi sosial, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	
3.	Dengan dukungan pemerintah pihak BP Indonesia perlu memperhatikan dan membangun kampung dan masyarakat adat yang ada di Kampung Otoweri wilayah pemerintah Kabupaten Fakfak.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG akan mendukung upaya pembangunan bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG yang melibatkan perencanaan dari	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terfokus pada kegiatan yang berkelanjutan.	
4.	Suku Sebyar/Kembaran Kampung Otoweri adalah bagian dari Suku Sebyar/Kembaran yang ada di Kampung Kalitami, Weriagar Tomu, Taloy, wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.		Terima kasih atas informasinya.	Dokumen ANDAL Sub-bab II Rona Lingkungan
5.	Segala bentuk program pembangunan yang diberikan oleh pihak BP Indonesia kepada saudara-saudara kami di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni perlu diberikan kepada kami di Kampung Otoweri Distrik Bomberay/Kabupaten Fakfak.		Selama ini Kampung Otoweri merupakan bagian dari DAVs, sehingga Kampung Otoweri mendapatkan manfaat program sosial yang sama dengan yang diberikan kepada kampung-kampung DAVs lainnya di wilayah Teluk Bintuni. Namun demikian pelaksanaan program-program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan pada pengembangan Masyarakat Asli dan bukan difokuskan pada pengembangan wilayah/kampung. Kampung Otoweri saat ini sudah masuk ke dalam kajian batas wilayah sosial Tangguh yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL.	• Dokumen ANDAL Sub-bab II Rona Ligkungan • Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG – Pendahuluan
6.	Program kerja pembangunan kampung kena dampak langsung yang dilakukan oleh pihak BP Indonesia perlu di dukung oleh pihak pemerintah.		Dalam melaksanakan program sosialnya, Tangguh LNG selalu berkoordinasi dengan Pemerintah. Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51)
7.	Program kerja pembangunan kampung yang membawa kami ke arah yang lebih baik yaitu Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM).		Ke depan, proses pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51) – Pengembangan Masyarakat
8.	Pihak BP Indonesia dan pihak pemerintah perlu bekerjasama dengan Bapak Raja Arguni dan Lembaga Adat Mbahamatta.		Di dalam melaksanakan aktivitasnya, Tangguh LNG berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi, termasuk penghormatan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			terhadap tokoh-tokoh adat setempat.	
9.	Perlu ada sistem pengawasan di Kampung Otoweri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan BP Indonesia serta kegiatan perminyakan yang berlangsung di Kampung Otoweri dan sekitarnya (wilayah Hukum Adat Suku Kembar/Sebyar).		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51)
10.	Peluang dan kesempatan kerja yang tersedia melalui adanya proyek LNG Tangguh LNG perlu diberikan kepada masyarakat Kampung Otoweri.		Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Kedepannya Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak,	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			• Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua) Komitmen Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Papua telah ditulis di dalam dokumen AMDAL, pada lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh.	
11.	Pembangunan rumah layak bagi masyarakat Kampung Otoweri perlu dibangun sebagai bentuk dari Dana Bagi Hasil (DBH).		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan dalam hal penggunaan Dana Bagi Hasil. Hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
12.	Dana Bagi Hasil (DBH) perlu diberi kepada masyarakat Suku Sebyar/Kembaran Kampung Otoweri (wajib diberikan).		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan dalam hal penggunaan Dana Bagi Hasil. Hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
13.	BP Indonesia jangan bawa praktek kerja KKN sebagaimana yang ada/dilakukan selama ini di Kampung Otoweri.		Tangguh LNG mempunyai komitmen terkait dengan Kode Etik, Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi. Komitmen tersebut tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Tata kelola Pemerintahan, Sub-bab Perencanaan dan anggaran • Tangguh LNG akan mentaati ketentuan hukum	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			yang berlaku mengenai anti-suap dan anti-korupsi, serta menjunjung tinggi dan mendorong praktek bisnis yang beretika.	
14.	BP Indonesia jangan lakukan tekanan, intimidasi serta ancaman sebagaimana yang ada selama ini di Kampung Otoweri.		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial. Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
Hamis Naury (Pemerintah Kampung/Irarutu III Distrik Sub-babo Kab. Teluk Bintuni				
	Apabila sebelum memasuki Tren 3 akan berjalan maka pihak perusahaan BP harus memperhatikan beberapa aspirasi kami masyarakat Distrik Sub-babo sebagai berikut:		Dukungan terhadap infrastruktur pendidikan seni telah tercantum dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 39-49), Sub-bab Penguatan Masyarakat Sipil. *"Tangguh LNG menetapkan strategi pembangunan yang berpusat pada Masyarakat Asli, dimana Masyarakat Asli sebagai salah satu komponen masyarakat sipil terpenting di kawasan Teluk Bintuni harus mempunyai peran utama dalam menggerakkan pembangunan. Salah satu upaya penting dari strategi tersebut adalah melalui penguatan identitas sosial budaya dan peningkatan kapasitas Masyarakat Asli."*	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 39-49)
1.	Pembangun infrastruktur pendidikan seni dan budaya. Keagamaan yang harus menyentuh sasaran hingga dirasakan oleh seluruh masyarakat 7 suku yang berada di kawasan Kab. Teluk Bintuni ini.			
2.	Apabila pihak perusahaan setelah melakukan		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	kegiatan eksploitasi di sekitar wilayah masyarakat pemilik hak ulayat/suku atau marga tertentu maka pihak perusahaan dapat membayar santunan kepada masyarakat atau pemilik hak ulayat tersebut dari total hasil pengeksporan per tahunnya kepada masyarakat sebesar 10% seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap masyarakat di Timika.		Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49) – Pengelolaan Dana Bagi Hasil
3.	Sebelum pihak BP melakukan Tren 3 tolong jelaskan kepada kami masyarakat 7 suku tentang Dana Bagi Hasil (DBH) mulai dari pusat, propinsi, kabupaten penghasil sampai ke tingkat kampung, kira-kira masyarakat penghasil/kab. penghasil dapat berapa. Karena menurut informasi yang kami dengar		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49) – Pengelolaan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	yang sudah sampai ke masyarakat kecil dibawah untuk Kab. Teluk Bintuni hanya mendapat 90 milyar sedangkan propinsi mendapatkan 300 milyar per tahun. Untuk itu kami dapat mengusulkan kepada BP agar memasuki Tren 3 maka kami dari masyarakat 7 suku yang mendiami kawasan Kab. Teluk Bintuni sebagai pemilik saham terbesar berupa hasil kekayaan alam yang kami miliki. Kami meminta agar dinaikan dari 90 milyar pertahun menjadi 500 milyar per tahun.		memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk membahas hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Dana Bagi Hasil
4.	Menyangkut tenaga kerja kami menghimbau kepada pihak BP agar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah distrik sampai ke tingkat kampung.		Mekanisme pelibatan Pemerintah dalam penerimaan tenaga kerja telah disebutkan didalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Peningkatan Kapasitas Masyarakat Papua, Sub-bab Penerimaam Tenaga kerja. *"Adanya Nota kesepahaman dengan Dinas Tenaga kerja Sorong, Manokwari, Fakfak, Bintuni dan Biak, serta Propinsi Manokwari tentang proses penerimaan tenaga kerja"*	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Kemampuan Pekerja Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30)
5.	Untuk memasuki Tren 3 BP dapat memberikan santunan perbulan kepada pemerintah setempat dimana wilayah operasi BP berada. Seperti wilayah pemerintah distrik dan kampung maka BP dapat memberikan honorer kepada Uspika (Distrik Dan Ramil Kapolsek) dan kepala-kepala kampung serta pelayan-pelayan umat (imam dan pendeta).		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan honorarium. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
6.	Untuk memasuki Tren 3 maka BP dapat mempertahankan beberapa kesejahteraan masyarakat berupa : a. Memberikan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 7 suku di wilayah pesisir pantai sampai di gunung.		• Tangguh LNG memahami keinginan masyarakat untuk memperbaiki standard kehidupannya secara keseluruhan. Tangguh LNG menawarkan berbagai program keberlanjutan untuk mendukung masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai perbaikan yang diinginkan. Termasuk diantaranya, Program Pengembangan Kewirausahaan Papua (IEDP), program peningkatan pendapatan, dan Program Penguatan Bisnis di wilayah Kepala Burung (BHBEP). Dengan berpartisipasi dalam program-program ini, Tangguh berharap masyarakat, khususnya Masyarakat Asli, dapat meningkatkan standart hidup mereka.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17) (Halaman 12-17) • Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12) • Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49) • Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51) • Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Halaman 37-48)
	b. Memberikan penerangan kepada masyarakat.		• Pada bulan Febuari tahun 2014, Tangguh telah menyediakan 4 MW listrik kepada PLN untuk didistribusikan kepada para kostumernya di Teluk Bintuni, Papua Barat. Hal ini diharapkan dapat memberikan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Hubungan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mendapat fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Distribusi dilakukan oleh PLN dengan dimulai dari kota Bintuni. Namun, kami berharap untuk ke depannya akan lebih banyak masyarakat Bintuni yang dapat menerima manfaat ini. Lokasi pendistribusian listrik untuk selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Lokal dan PLN.	Eksternal (Halaman 49-50)
	c. Memberikan sarana air bersih kepada masyarakat.		• Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12), Sub-bab Air Bersih dan Lingkungan.	
	d. Memberikan bantuan pendidikan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Bahkan melanjutkan pendidikannya keluar negeri. Khususnya anak-anak putra daerah dari masyarakat 7 suku di tanggung oleh BP.		• Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17).	
	e. Memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat.		• Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	• Dan apabila masyarakat membutuhkan pertolongan dalam keadaan emergency dan masyarakat membutuhkan fasilitas perusahaan seperti pesawat, helikopter, kapal laut, *speedboat* atau kendaraan darat. Maka BP harus memfasilitasi ini dengan baik kepada masyarakat.		• Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di Pesisir Utara, Pesisir Selatan, dan Distrik Kokas. Diharapkan dengan terbangunnya fasilitas di atas, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan lebih baik.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
Bernard Nafurbenan (Adat Ketua Umat Subabo)				
1.	1. Terima kasih telah membantu masyarakat saya. 2. Materi bagus, menarik, hanya karena waktu yang sangat singkat sehingga sangat mengganggu upaya baik dari Tim Unipa maupun peserta untuk memahami dengan baik dan benar makna AMDAL untuk perusahaan sebesar BP Tangguh LNG. 3. Saya harus akui pertanyaan-pertanyaan kemarin (setelah presentase materi) oleh peserta menunjukkan dengan sangat jelas	Secara umum untuk materi 1,2,3	Terima kasih atas saran dan masukan yang baik.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Materi yang disajikan, karena waktu yang sangat singkat/padat. b. Peserta dari kampung-kampung belum memahami dan membedakan posisi Tim Unipa yang bertugas membantu masyarakat bukan penentu kebijakan dan sebagainya. Oleh sebab itu mungkin baik kalau dalam pembekalan berikut-berikutnya. Berdasarkan itm-item siding komisi AMDAL tahun ini menjadi acuan untuk pembekalan untuk trend 4, 5 dst dengan penekanan bukan lagi pada teori amdalnya tapi praktek lapangan sebagai latihan, menyusun, menilai, menghitung, kerusakan akibat perusahaan : Training AMDAL berdasarkan materi dari 3 pemateri tentang AMDAL. Jadi pembekalan terdiri dari dua tahap : Tahap pertama : Training laporan atas usulan proposal Tim Unipa tidak lari atau keluar dari materi AMDAL. Tahap kedua : Pemahaman (sekolah) AMDAL atau pembekalan AMDAL juga atas usul/proposal Tim AMDAL. Tentu hasil yang diharapkan bapak/ibu kampung mengerti memahami hasilnya karena sudah praktek dilengkapi diterangi lagi oleh teori.			
2.	a. Keamanan dan pengamanan harus ada komitmen tegas bahwa tentang keamanan berbasis masyarakat *Community Oriented Polycing* (COP). Komitmen ini belum masuk dalam rona-rona AMDAL.		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Tata Kelola

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial. Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49) – Pengamanan Berbasis Masyarakat • Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17) (Halaman 12-17)
	b. Pendidikan perlu ditingkatkan dengan pengadaan universitas bekerjasama dengan pemuda.		b. Tangguh LNG tidak berwenang untuk mendirikan universitas. Namun demikian, dukungan Tangguh LNG terhadap Infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Peningkatan Kualitas Sekolah	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17
	c. Listrik harus masuk wilayah Subabo dan sekitarnya.		c. Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak Januari 2013, Tangguh LNG telah siap untuk memasok listrik sebesar 4 Megawatt kepada PLN untuk selanjutnya listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
3.	Komitmen BP, pemerintah, pemerintah pusat bahwa : masyarakat tidak akan menderita, miskin di lingkungan perusahaan. Komitmen dianggap		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	sebagai jaminan dari bagian AMDAL.		membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	• Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 29-34) • Sub-bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36)
Abdulafad Sirindin (Kepala Kampung Goras Distrik Kokas Kab. Fakfak)				
1.	Saran kami bahwa dengan keberadaan proyek Tren 3 di wilayah Teluk Berau/Bintuni dan Fakfak sangat menentukan peluang bagi masyarakat di kedua kabupaten yaitu Kab. Bintuni dengan Fakfak. Kemudian meningkatkan PAD di setiap daerah khususnya keberadaan kampung Goras dan Kampung Goras Selatan.	Saran	Terima kasih atas masukan dan pendapatnya.	
2.	Masukan kami BP harus ikut jaga keselamatan masyarakat di kawasan Teluk Berau. Karena masyarakat adat di wilayah teluk itu penduduk tidak padat. Dan lindungi macam-macam habitat yang ada di wilayah operasinya BP Tangguh LNG. Dan hak-hak masyarakat harus BP menghargai dan hak-hak warga serta hak tentang pemekaran Kampung Goras Selatan sebagai kampung yang terkena AMDAL.	Masukan	Dalam melaksanakan kegiatannya Tangguh LNG menempatkan aspek keselamatan dan keamanan lingkungan sebagai hal yang utama. Peralatan yang dipergunakan telah memenuhi standard keselamatan yang berlaku di industri migas. Terima kasih atas masukannya. Sehubungan dengan pemeliharaan lingkungan alam, Tangguh LNG telah melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air yang dilakukan di wilayah sekitar Tangguh LNG untuk memastikan tidak ada dampak penting yang terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tidak ada pencemaran yang terjadi di sekitar wilayah Teluk Berau. Hasil pemantauan tersebut secara rutin dilaporkan kepada Instansi Lingkungan terkait. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku. Sehubungan dengan aspirasi tentang pemekaran Kampung Goras Selatan, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat tersebut. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.	
3.	Tanggapan, perusahaan bahwa perusahaan siap tangani kampung-kampung yang apabila jadi pemekaran rilibatkan dalam DAV apabila BP Tangguh LNG operasi di wilayah tersebut sehingga akan terjadi hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	
4.	Kami menghimbau kepada pemerintah bersama BP Tangguh LNG untuk segera melibatkan kampung tetangga yang baru di mekarkan yaitu Kampung Goras Selatan jadi kampung yang termasuk dalam DAV. SeSub-bab kami telah usul ke pemerintah Kab. Fakfak tapi belum ada tanggapan. Maka kami berharap kepada pemerintah pusat bersama BP Tangguh LNG agar mohon diperhatikan dengan segera.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	
Nafraris Gwasgwas (Tokoh Adat)				
1.	Kami masyarakat adat mau ingin tau tentang hak masyarakat yang ada dalam UU Dasar 1945 tentang hak ulayat itu bapak sudah lakukan dengan cara baikah belum?		Jawaban untuk pertanyaan angka 1, 5, dan 6: Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Halaman 39-49) – Penguatan Masyarakat Sipil
2.	Kami masyarakat ini belum faham dengan apa yang bapak bilang dengan AMDAL, RKL, RPL itu. Tetapi kami kira sesuatu yang kita bangun itu kami kira ada pengaruhnya terhadap lingkungan itu ada. Contoh kecil saja kita bangun rumah saja lokasi yang kita bangun itu berubah atau tidak.		Jawaban untuk pertanyaan angka 2, 3, dan 4: Tangguh LNG memahami bahwa setiap aktivitas manusia memiliki potensi dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua potensi dampak dari rencana kegiatan pengembangan proyek LNG Tangguh mulai dari tahap konstruksi sampai dengan tahap operasi dan paska operasi telah dikaji dalam proses	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Suatu kekhawatiran yang perlu kami sampaikan kepada bapak yang punya ilmu, tolong terjemahkan dengan baik. Dalam perut bumi ini sekarang lagi digali. Jadi kira-kira disitu ada rongga yang kosong adakah tidak. Takutnya jangan sampai terjadi konflik alam yang terjadi maka apakah ada kerusakan atau tidak. Mohon diperhatikan dengan cara baik, jangan-jangan sampai orang-orang di teluk ini jadi ada menjadi tidak ada. Dengan keadaan yang sebelum kita bangun. Tolong bapak lihat itu.		AMDAL ini. RKL-RPL telah disusun untuk mengelola dan memantau semua dampak yang ditimbulkan. Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Di samping itu, setelah dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, maka Tangguh LNG akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
3.	Apalagi dengan proyek yang begitu besar. Apakah merusak dan merubah lingkungan hidup kami atau tidak.		Lihat jawaban angka 2.	
4.	Jadi tolong bapak yang mengambil keputusan itu harap memperhatikannya dengan baik.		Lihat jawaban angka 2.	
5.	Kita bicara peraturan dan undang-undang, sedangkan peraturan dan undang-undang ini selalu berubah terus dari tahun ke tahun. Jadi kami masyarakat ini tidak mengerti dengan apa yang tertulis dan apa yang kami rasakan ini sangat beda sekali.		Jawaban untuk pertanyaan angka 1, 5, dan 6: Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik	
6.	Jadi bapak sudah tau itu tolong supaya atur dengan baik sehingga kita sama-sama rasa.			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	
Johanes Kwanto (Kampung Irarutu III Subabo Kab. Teluk)				
1.	Untuk penandatanganan berita acara pengesahan AMDAL yang akan dilaksanakan di Jakarta di mohon agar masyarakat dari 2 (dua) Kab. Bintuni dan Fakfak diwakilkan dari setiap distrik 2s/d 3 orang, mewakili distrik masing-masing untuk ikut menyaksikan penandatanganan di Jakarta. Dokumen AMDAL di mohon di perbanyak agar di bagikan di setiap kampung dan distrik. Untuk BP Tangguh LNG di mohon agar kesediaannya untuk membuat surat kesepakatan bersama antara BP dan masyarakat kawasan Teluk Berau. Untuk sama-sama komitmen tentang keputusan AMDAL.	Saran	Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni, point No 9, setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak.	
2.	Dengan pengembangan Tren 3 di kawasan Teluk Berau maka hal-hal prinsip yang menjadi perhatian perusahaan adalah : 1. Penerangan listrik (24 jam)	Masukan	Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Kami berharap bahwa di masa yang akan datang dengan alokasi gas ini PLN dan Pemerintah Daerah akan dapat mendistribusi kan listrik lebih lanjut sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang menikmati listrik tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
	2. Air bersih		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Namun demikian,	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mengingat adanya keterbatasan, Tangguh LNG mungkin tidak dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat ini.	bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	3. Infrastruktur jalan dan parit		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Babo, misalnya pembangunan pelabuhan umum Babo, pelabuhan masyarakat serta perluasan dan peningkatan pelabuhan udara di Babo. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah Babo berada di wilayah operasi perusahaan migas lain. Sebaiknya aspirasi ini juga disampaikan kepada perusahaan migas yang bersangkutan.	
	4. Infrastruktur perumahan layak huni untuk masyarakat Subabo dan sekitarnya		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk memperbaiki standart kehidupan mereka. Tangguh menawarkan program-program keberlanjutan untuk mendukung masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperoleh perbaikan yang dinginkan. Program ini termasuk diantaranya program peningkatan pendapatan, seperti Program Pengembangan Bisnis Masyarakat Asli, program peningkatan pendapatan, dan program penguatan bisnis di Kepala Burung. Dengan berpartisipasi di dalam program-program ini, kami berharap masyarakat, khususnya Masyarakat Asli, untuk dapat memperbaiki standart hidupnya secara swadaya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 28-34) Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36)
	5. Pemerataan pembagian dana abadi		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG tunduk kepada syarat dan ketentuan kontrak kerjasamma dengan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			menanggapi permintaan yang tidak tercakup di dalam kontrak kerjasama dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk permintaan dana abadi yang tidak tercakup di dalam kontrak kerjasama dan hukum yang berlaku. Kami percaya bahwa permintaan ini harus ditujukan kepada Pemerintah Daerah.	
	6. Sektor pendidikan (bea siswa) dan olahraga		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs (*Community Action Plan*) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. - Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18) Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Sehubungan dengan dukungan terhadap kegiatan olah raga dan kepemudaan, Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	
	7. Kesehatan		Sejak tahun 2004, melalui program ISP (*Integrated Social Program*), Tangguh LNG telah berkontribusi di dalam program kesehatan untuk masyarakat. Tangguh LNG meberikan program kesehatan, seperti program peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk di kampung Irarutu III. Untuk ke depannya, Tangguh LNG akan tetap melibatkan kampung Irarutu III ke dalam program kesehatan selanjutnya, termasuk meningkatkan kapasitas Puskesmas yang ada di Distrik Babo. Komitmen mengenai program kesehatan masyarakat sudah ditulis di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL AMDAL Pengembangan Tangguh.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	8. Pembangunan rumah-rumah ibadah		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam perbaikan rumah ibadah di Distrik Babo. Untuk ke depannya, program pembangunan infrastruktur kampung akan diintegrasikan dengan program Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pebangunan) yang akan dipustukan oleh Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
	9. Budaya (di mohon di inventariskan)		Tangguh LNG, dalam program Tata Kelola Pemerintahan yang tertulis di dalam lampiran 3 dokumen RKL/RPL "Pengelolaan Sosial Tangguh", untuk melindungi budaya masyarakat Asli dari perubahan sosial yang diakibatkan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			oleh industrialisasi. Komitmen tersebut adalah: *"Tangguh LNG menetapkan strategi pembangunan yang berpusat pada Masyarakat Asli, dimana Masyarakat Asli sebagai salah satu komponen masyarakat sipil terpenting di kawasan Teluk Bintuni harus mempunyai peran utama dalam menggerakkan pembangunan. Salah satu upaya penting dari strategi tersebut adalah melalui penguatan identitas sosial budaya dan peningkatan kapasitas Masyarakat Asli."*	Kepemerintahan yang Baik (Halaman 37-48)
3.	Untuk AMDAL pertama Train I, II tidak berhasil.	Tanggapan	Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	Laporan RKL/RPL Tangguh LNG
4.	Bidang sosial : 1. Rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	2. Tingginya pengangguran terbuka 3. Masyarakat asli Papua (dari Teluk Bintuni) terbatas menjadi pekerja kasar di BP Tangguh LNG. Harapan : 1. BP memberikan bea siswa untuk pendidikan tidak hanya kepada anak-anak miskin melainkan juga kepada anak-anak yang memiliki potensi akademik tinggi.		Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs (*Community Action Plan*) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. - Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Sehubungan dengan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, Tangguh LNG telah mempersiapkan program peningkatan pendapatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga Masyarakat Asli untuk menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk, serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat	• Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17) • Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 29-34) • Sub-bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36) • Sub-bab Pengembangan SDM Papua dan Hubungan Industrial (Hal 17-30)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Asli yang tinggal di kampung-kampung Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua)	
	2. Anak asli Papua yang bekerja di BP sebagai tenaga kerja kasar ditingkatkan ketrampilan teknisnya (agar tidak menjadi security seumur hidup)		Untuk dapat meningkatakan daya saing masyarakat asli, Tangguh LNG berkomitmen untuk memberikan program pelatihan dan pengembangan bagi pekerja Tangguh LNG yang berasal dari Masyarakat Asli. Komitmen ini telah ditulis di dalam dokumen RKL/RPL, lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh sub-bab Pengembangan Pekerja Asal Papua dan Hubungan Industrial, komitmen tersebut berbunyi: "*Tangguh LNG akan membuat Rencana Strategis Jangka Panjang untuk Mengembangkan Tenaga Kerja Papua, yang akan menjadi panduan bagi Tangguh sendiri serta kontraktor, pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam rangka mencapai target 85% pekerja Papua pada tahun 2029*"	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Pengembangan SDM asal Papua dan Hubungan Industrial (Hal 17-30)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
5.	Bidang ekonomi : A. Usaha informal Tidak adanya dampak keberadaan BP bagi usaha informal. Harapan: Perlu ditingkatkan pendampingan dan pembinaan kepada usaha informal (selama ini tidak ada).		A. Usaha Informal Sejak tahun 2004, Tangguh telah memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada masyakat DAV. Khusus di Babo, pendampingan telah dilakukan untuk usaha kepiting serta koperasi. Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bagi Masyarakat Asli. Untuk kedepannya, kegiatan peningkatan kapasitas akan tetap difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar. Selain itu, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Barang yang dihasilkan/produksi tidak memiliki kepastian pasar. Harapan : BP harus mewajibkan kontraktornya membeli barang yang dihasilkan oleh usaha-usaha informal di sekitar wilayah operasi BP (selama ini tidak ada).		Sejak tahun 2008 Tangguh LNG telah memulai program *Stocking Point* yang mana katering Tangguh LNG membangun kontrak dengan koperasi-koperasi yang ada di Bintuni, Babo, Tofoi, Tanah Merah, dan Arguni. Ke depan, diharapkan produk-produk dari masyarakat tersebut dapat terserap di pasar yang lebih luas Tangguh LNG mewajibkan kontraktor katering untuk memaksimalkan pengadaan produksi pertanian dan perikanan dari masyarakat.	
	B. Usaha formal : Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi 1. Kualitas SDM yang rendah (kemampuan teknis dan menejerial)		B. Usaha Formal 1. Dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh pada sub-bab Kewirausahaan Papua, dokumen AMDAL Tangguh LNG, Tangguh telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembagan bisnis masyakat asli. Pendampingan serta konsultasi bisnis akan diberikan kepada masyarakat asli agar supaya	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Masyarakat Asli ikut menikmati manfaat kehadiran Tangguh LNG. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh, sebagai berikut: *"Tangguh LNG mendukung upaya-upaya pengembangan sektor manufaktur, jasa dan bisnis penunjang yang terintegrasi dan bersinergi dengan operasi Tangguh LNG dalam jangka panjang."*	
	2. Kualifikasi perusahaan lokal umumnya kecil, sedangkan BP mensyaratkan perusahan menengah dan besar dalam proses tendernya		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Tangguh LNG harus mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang berlaku di industri hulu migas.	
	3. Regulasi pengadaan barang dan jasa industry minyak dan gas memiliki standar yang "sangat tinggi" menyebabkan keterlibatan pengusaha asli dalam bertransaksi menjadi sangat rendah, sampai saat ini nyaris tidak ada.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Tangguh LNG harus mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang berlaku di industri hulu migas.	
	Harapan : 1. Perlu ditingkatkan pendampingan dan konsultasi bisnis kepada pengusaha lokal khususnya asli Papua.		Sehubungan dengan pendampingan dan konsultasi usaha bagi masyarakat di sektor usaha kecil, sejak tahun 2004, Tangguh LNG telah memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada masyakat DAV. Khusus di Babo, pendampingan telah dilakukan untuk usaha kepiting serta koperasi. Sedangkan pendampingan dan konsultasi usaha bagi masyarakat di sektor usaha formal yang berskala lebih besar, Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial yang mana akan memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis kepada Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Diharapkan pendampingan dan konsultasi bisnis tersebut dapat	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mengembangkan bisnis di bidang manufaktur, jasa, dan bidang bisnis lainnya pada skala menengah dan besar, yang dapat berjalan dan berkembang dalam jangka panjang.	
	2. Perlu adanya regulasi/kebijakan dari BP dan atau pemegang otoritas dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha lokal khususnya asli Papua.		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pada industri migas. Kewenangan tersebut berada pada SKK Migas sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan industri hulu migas.	
	3. BP atau pemegang otoritas mewajibkan kontraktor utamanya untuk melakukan kemitraan dengan pengusaha lokal utamanya asli Papua.		Tangguh LNG telah mendorong kontraktor utama dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Tangguh LNG agar bekerjasama dengan perusahaan lokal yang berada di Papua. Hal tersebut telah dituangkan di dalam beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa antara Tangguh LNG dengan kontraktornya	
	4. Membantu supplier lokal dalam memasoki pengadaan barang dan jasa di industry tata migas. (selama ini tidak ada)		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pada industri migas. Kewenangan tersebut berada pada SKK Migas sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan industri hulu migas.	
	Bidang Kultural : 1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG mendukung penguatan masyarakat adat melalui pembangunan rumah adat bagi suku Sebyar, Simuri, Irarutu, Petuanan Arguni, Petuanan SekarPikpik, serta Petuanan Wertuwar.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	2. Masyarakat belum memahami anatomi perusahaan oil dan gas.		Ke depan, Tangguh LNG, sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh dalam Lampiran Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan, telah berkomitmen untuk melakukan pembaharuan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan Tangguh LNG, dan kegiatan migas pada umumnya, secara rutin kepada para pemangku kepentingan di Teluk Bintuni dan Papua Barat pada umumnya melalui forum kerjasama antar pemangku kepentingan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	Harapan: BP harus memfasilitasi terbentuknya organisasi masyarakat ling sebagai wadah/media komunikasi BP dengan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah (jika disetujui hubungi kami)		Ke depan, Tangguh LNG, sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh dalam Lampiran Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan, telah berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Forum Kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan masalah-masalah pembangunan di Kawasan Teluk. • Tangguh LNG akan mendorong pembentukan forum kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan Teluk Bintuni dan sekitarnya. • Sosialisasi Migas secara rutin dilaksanakan oleh Tangguh LNG kepada para pemangku kepentingan di Teluk Bintuni dan Papua Barat pada umumnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	BP harus terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perihal anatomi perusahaan oil dan gas, pola kerja dan regulasi yang mengatur (selama ini tidak ada alias tidur)		Ke depan, Tangguh LNG, sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh dalam Lampiran Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Pemerintahan, telah berkomitmen untuk melakukan pembaharuan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan Tangguh LNG, dan kegiatan migas pada umumnya, secara rutin kepada para pemangku kepentingan di Teluk Bintuni dan Papua Barat pada	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			umumnya melalui forum kerjasama antar pemangku kepentingan.	
Syahrudin Rumbagesan (Kepala Kampung Sekar)				
1.	Disini kami dari Kabupaten Fakfak kubu distrik Kokas apa yang sudah tertera didalam dokumen AMDAL itu tolong di akomodirkan kedalam dokumen yang Bupati Fakfak sudah menetapkan itu Usulan ini masalah dampak daerah Arguni kalau kena dampak berarti kami juga kena dampak, karena kita melihat arusnya masuk,,keluarnya Contoh : kapal yang ukuran ratusan meter yang masuk keluar di Teluk Berau termasuk speed boat Maka itu kami mengkhawatirkan jangan sampai Train 3-4 kami juga kena dampak seperti saudara-saudara di Kab Bintuni Apa yang kami sampaikan bahwa di bicarakan oleh Petuanan itu kalau BP tidak tanggapi maka masalah itu akan terjadi di Distrik Kokas Usulan BP/pihak perusahaan tolong tanggapi masyarakat sumura sampai Kokas, Bintuni, sekali tolong ditanggapi atau di selesaikan Pada BP jangan hanya melihat kepada Kampung Arguni tetapi ada beberapa kampung yang ada di pesisir pantai yaitu dari goras – ugan termasuk kampung sekar, tolong diperhatikan melihat dengan 2 mata dan jangan dengan sebelah mata Dan perusahaan tau bahwa pusat pelabuhan boat BP itu terletak di kampung Sekar ini tolong BP piker.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2012	Dokumen ANDAL Bab I, Peta Studi Wilayah Sosial
Benyamin H. Frabun (Kepala Kampung Weriagar)				
a.	BP Tangguh LNG tolong menyelesaikan pembayaran sisa tuntutan, hak hak masyarakat		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	adat suku sebyardan suku lainnya. Sisa 54 miliar rupiah pada pembayaran sekitar. Tahun 2004 sampai tanggal 16 februari 2006, pembayaran total 60 miliar hanya dibayar 6.000.000.000. Tolong menyelesaikan sisa pembayaran 54.000.000.000		kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
Dafar Niulain (Wakil Masyarakat Kampung Sekar)				

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. BP menyaimpaikan garis kegiatan Tangguh LNG terkait pengelolaan lingkungan dan sosial		Tangguh LNG telah mempersiapkan dokumen AMDAL dan RKL/RPL yang menjelaskan berbagai rencana pengelolaan lingkungan dan sosial terkait proyek pengembangan Tangguh LNG. Khusus untuk rencana pengelolaan sosial, Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, di bidang kesehatan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan usaha, pendidikan, hubungan eksternal, dan program sosial lainnya yang tertuang dalam dokumen RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh LNG.	• Dokumen AMDAL–Bab III; • Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG
	b. BP melakukan paparan informasi awal mengenai macam kegiatan pengembangan Tangguh LNG khususnya di daerah Fakfak/Kokas		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
	c. Memperhatikan tenaga kerja dari distrik Kokas dan sekitarnya		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: a. Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, b. Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, c. Papua Barat lainnya, d. Papua lainnya e. Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Dikembangkan diversifikasi mata pencaharian lain selain perikanan, untuk antisipasi pendapatan masyarakat		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	e. Memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada anak sekolah mulai dari sd, smp, sma maupun pendidikan tinggi		Tangguh LNG berkomitmen akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	f. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki skill maka BP Tangguh LNG dan pemerintah daerah membuka BLK di Kokas		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik yang dapat dinikmati oleh Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk masyarakat yang tinggal di Distrik Kokas. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
H. Asgar Rimosan (Pemerintah Kampung Arguni / Distik Kokas)				
	BP Tangguh LNG dan Pemerintah agar semua aspirasi masyarakat diterima kemudian menimbang mana yang paling dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat yang benar benar mendapat dampak langsung, seSub-bab apa yang selama ini dari ppihak BP Tangguh LNG beroprasi di Teluk Bituni masyarakat belum menikmati hasil, hasil hanya diambil oleh BP.		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	a. Lampiran Dokumen KA-ANDAL b. Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG
	BP dan Pemerintah melihat kemasyarakat, maksutnya bagaimana masyarakat menikmati hasil yang selama ini dikerjakan. Oleh seSub-bab itu, jangan sampai masyarakat teriak teriak kesana kemari. Berikan beberapa persen sehingga masyarakat bisa tenang.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi	c.

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
Oktavianus Siwana (Tokoh Adat Masyarakat Sumuri)				
	a. Tinjauan ulang terhadap dokumen AMDAL I, sehingga sasarannya menyentuh		Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Untuk tetap meningkatkan nilai tambah keberadaan Tangguh LNG bagi Masyarakat Asli, dalam melanjutkan program sosial di masa yang akan datang, Tangguh LNG tetap berkomitmen untuk menjalankan berbagai program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Detail program tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
	b. Pihak BP harus menjelaskan secara baik, tentang pembangunan fisik kampung tanah merah, saengga dan onar kepada masyarakat pantai utara (masyarakat sebyar), agar tidak		Selama ini Tangguh LNG telah menyampaikan klarifikasi langsung kepada masyarakat yang tinggal di Pesisir Utara Teluk Bintuni melalui tim ComRel (Community Relation) mengenai pembangunan perumahan bagi masyarakat	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	terjadi kecemburuan sosial		Kampung Tanah Merah Baru. Klarifikasi mengenai pembangunan perumahan bagi masyarakat Kampung Tanah Merah Baru tersebut juga telah disampaikan pada konsultasi publik pada tahun 2012.	
	c. Mohon ditinjau kembali jarak antara pusat kilang LNG Tangguh LNG dengan kampung. Tetapi materabu jaya, forada dan agoda yang tidak terkena DAV. Harapan kami ke-empat kampung tersebut diatas di distrik sumuri harus dapat memasukan dalam daerah terkena dampak		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya, Kampung Forada, dan Kampung Agoda tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL
	d. Khusus untuk pendidikan, segera harus direncanakan suatu seminar pendidikan yang kemudian akan dapat melahirkan master plan pendidikan		Selama ini, Tangguh LNG telah melakukan pendampingan kepada aparat Dinas Pendidikan Daerah untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan. Namun demikian, sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang pertambangan migas, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun master plan pendidikan atau kebijakan apapun di bidang pendidikan. Sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada Dinas Pendidikan Daerah	
	e. Khusus untuk Gubernur Papua Barat, dana bagi hasil dari kegiatan di teluk bintuni harus lebih besar dinikmati oleh daerah penghasilnya yaitu teluk bintuni		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
	f. Segera membentuk tim pengawas untuk mengawal dan mengawasi dokumen AMDAL, sehingga tidak lagi gagal seperti dokumen AMDAL I.		Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Untuk tetap meningkatkan nilai tambah keberadaan Tangguh LNG bagi Masyarakat Asli, dalam melanjutkan program sosial di masa yang akan datang, Tangguh LNG tetap berkomitmen untuk menjalankan berbagai program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Detail program tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan kategori PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
Udin Sasin (Wakil Masyarakat Kampung Daremban , Distrik Kokas)				
	a. Saran masyarakat kampung Darembang kepada pemerintah dan pihak perusahaan agar bisa perhatikan masyarakat yang hidup di pantai terkena dampak. Khususnya masyarakat kampung Darembang yang hidup dengan nelayan/melaut, kemungkinan dari hasil melaut akan berkurang. Contoh: dulu masyarakat kampung kalau melaut pendapatan dalam satu hari sangat memuaskan, tapi sekarang pendapatan sangat kurang/menurun. Jadi pihak pemerintah dan pihak perusahaan tolong perhatikan masyarakat kampung Darembang dan kampung lain.		Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut, termasuk program pengembangan ekonomi di bidang perikanan, pertanian, peternakan, dan usaha masyarakat.	
	b. Masyarakat kampung Darembang hidup serba kekurangan, jadi mohon diperhatikan		Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli, Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Asli tersebut. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program peningkatan pendapatan bagi masyarakat asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk masyarakat yang tinggal di Kampung Darembang. Program ini mencakup kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar.	
	c. Agar pemerintah dan perusahaan bisa memenuhi hal hal seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perikanan dll.		Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli, Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Darembang. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan peternakan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Komitmen Tangguh LNG ini tertuang dalam dokumen RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
	d. Setiap kampung harus mendapatkan persenan dari hasil operasi tiap tahun		Untuk d. dan e. (Dana Bagi Hasil) Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini.	
	e. Masyarakat Darembang yang terkena dampak meminta kepada pihak pemerintah dan perusahaan agar bisa memberikan hak masyarakat kampung dan juga perlu beberapa persen buat masyarakat kampung. Kalau bantuan berupa uang harus di berikan langsung kepada masyarakat agar masyarakat merasakan bantuan dari pihak perusahaan.		Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas penggunaan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Abutalib Patiran (Perwakilan Kampung Fior)				
	a. Perhatikan pendidikan		Ke depan, Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas yang dapat dinikmati oleh Masyarakat Asli yang tinggal di Kampung Fior.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	b. Perhatikan kesehatan		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	c. Perhatikan perumahan masyarakat		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian, dan program sosial lainnya. Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			untuk memperbaiki standard hidup mereka. Secara detail, program-program sosial ini telah tertuang dalam dokumen RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	
	d. Rehabilitasi rumah ibadah		Untuk ke depannya, untuk program pengembangan infrastruktur kampung, termasuk rumah ibadah, akan diintegrasikan dengan Musrembang kampung yang akan diputuskan bersama dengan Pemerintah Daerah.	
	e. Hasil pertanian dan perikanan diambil oleh perusahaan		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	f. Pemberantasan buta aksara		Program pemberantasan buta aksara dan huruf (literasi) adalah bagian dari upaya pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Untuk itu, Tangguh LNG akan mendukung setiap upaya pengembangan SDM termasuk di dalamnya program literasi. Melalui kerjasama dengan Universitas Cenderawasih, Tangguh LNG telah melaksanakan program pemberantasan buta huruf hingga di kampung Otoweri dan Tomage. Ke depan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, program tersebut akan diperluas hingga ke kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG lainnya.	
	g. Sesuai dengan kesepakatan musyawarah mengenai pembagian hasil kami masyarakat ingin mengetahui berapa persen untuk masing masing kampung. Tolong di jelaskan pihak		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	perusahaan		Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas penggunaan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten	
	h. Perhatikan tenaga kerja		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman18-29)
	i. Perhatikan perumahan guru		Untuk program ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di kampung-kampung sekitar wilayah operasi, salah satunya adalah dengan pembangunan fasilitas perumahan guru. Komitmen ini telah ditulis di dalam dokumen RKL/RPL, lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, sebagai berikut: " Ketersediaan rumah guru yang layak untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah sekolah yang memiliki proporsi tinggi murid Masyarakat Asli	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	j. Perhatikan pipa air bersih		Tangguh LNG memahami pentingnya ketersediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	k. Pembuatan jeti dikampung perlu di tingkatkan dari kayu permanen		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung, seperti perbaikan jetty, yang berada di beberapa kampung di Distirik Kokas, termasuk di Kampung Fior, akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.	
	l. Talok pantai untuk melindungi perumahan masyarakat dan perkebunan umum		Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan talud. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini.	
	m. Pembuatan MCk untuk setiap rumah warga		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat ini sangat penting. Oleh karena itu, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah dalam pembuatan sarana MCK bagi masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program air bersih dan sanitasi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	n. Pembuatan jalan umum dari kampung Fior ke jalan nasional Fakfak – bomberai		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
	o. Pembuatan sanggar PKK		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk sanggar PKK) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberai akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	p. Pembuatan balai kampung		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk pembuatan balai kampung) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberai akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	
	q. Bantuan dana untuk kegiatan perikanan nelayan		Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial bagi nelayan di beberapa kampung di Distrik Kokas, termasuk Kampung Fior. Program sosial ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang sama atau lebih baik dari sebelum adanya kegiatan Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	r. Pelatihan praktik budidaya ikan dan kepiting		Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Khusus pada program budidaya ikan dan kepiting, akan dilakukan berdasarkan pada hasil kajian kelayakan yang dilakukan sebelumnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	s. Pengadaan plat tangkap, motor jonsosn dengan kapasitas mesin 15 pk		Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial bagi nelayan di beberapa kampung di Distrik Kokas, termasuk Kampung Fior. Program sosial ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang sama atau lebih baik dari sebelum adanya kegiatan Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	t. Pembuatan green house untuk menunjang kegiatan perikanan		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program untuk sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Asli tersebut. Program tersebut akan diwujudkan dalam kegiatan pengembangan bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	u. Pelatihan hasil panen untuk hasil tanaman seperti cabe, sayuran dll		Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan pertanian dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang. Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana pertanian, perikanan, dan peternakan; serta menyediakan pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen di bidang-bidang tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	v. Bantuan untuk memasarkan hasil pertanian keluar kampung		Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemampuan untuk bersaing di pasar yang luas. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten).	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	w. Perhatikan penerangan kampung		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG. sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 52-53)
	x. Pertanian menyangkut perkebunan pala		Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli, Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Asli tersebut. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program peningkatan pendapatan bagi masyarakat asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian. Khusus pada pengembangan sektor perkebunan pala, program akan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan hasil kajian agro-ekosistem di wilayah yang bersangkutan.	
	y. Perhatikan peternakan		Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli, Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Asli tersebut. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program peningkatan pendapatan bagi masyarakat asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG di bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. Pengembangan sektor peternakan, akan dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan hasil kajian kelayakan dan agro-ekosistem di wilayah yang bersangkutan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	z. Perhatikan perumahan masyarakat		Tangguh LNG memahami keinginan masyarakat untuk memperbaiki standard kehidupannya secara keseluruhan. Tangguh LNG menawarkan berbagai program keberlanjutan untuk mendukung masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai perbaikan yang diinginkan. Termasuk diantaranya, Program Pengembangan Kewirausahaan Papua (IEDP), program peningkatan pendapatan, dan Program Penguatan Bisnis di wilayah Kepala Burung (BHBEP). Dengan berpartisipasi dalam program-program ini, Tangguh berharap masyarakat, khususnya Masyarakat Asli, dapat meningkatkan standart hidup mereka.	
Sebastian Nanafesi (Perwakilan Kampung Tomage)				

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Pengaspalan jalan tomage – Bomberay		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Bomberai, misalnya gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah tersebut berada di wilayah operasi perusahaan migas lain, Tangguh LNG akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada perusahaan tersebut melalui SKK Migas.	
	b. Penerangan listrik di kampung tomage		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG. sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 52-53)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur.	
	a. Membuat lapangan kerja bagi warga kampung Tomage dengan masyarakat menyuplai daging sapi ke proyek BP		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua) Sehubungan dengan penyerapan produk lokal, Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29) • Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Beasiswa pendidikan putra putri kampung Tomage dari SD – PT		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. a. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. b. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	c. Asrama untuk putra putri Tomage 2 buah yait untuk di Bomebray dan Fakfak		Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, Tangguh LNG berkomitmen akan mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk membangun sekolah unggulan di 5 distrik, termasuk di Distrik Kokas, yang dapat dinikmati oleh Masyarakat Asli yang tinggal di Distrik Bomberay.	
	d. Peralatan pendidikan berupa 2 unit komputer dan 2 buah unit solat cel/genset		Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, Tangguh LNG berkomitmen akan mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk membangun sekolah unggulan di 5 distrik, termasuk di Distrik Kokas, yang dapat dinikmati oleh Masyarakat Asli yang tinggal di Distrik Bomberay.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	e. Membangun perumahan masyarakat		Tangguh LNG memahami keinginan masyarakat untuk memperbaiki standard kehidupannya secara keseluruhan. Tangguh LNG menawarkan berbagai program keberlanjutan untuk mendukung masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai perbaikan yang diinginkan. Termasuk diantaranya, Program Pengembangan Kewirausahaan Papua (IEDP), program peningkatan pendapatan, dan Program Penguatan Bisnis di wilayah Kepala Burung (BHBEP). Dengan berpartisipasi dalam program-program ini, Tangguh berharap masyarakat, khususnya Masyarakat Asli, dapat meningkatkan standart hidup mereka .	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	f. Peralatan medis berupa 1 buah komputer dan 1 buah kamera digital		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas. Namun demikian, karena adanya keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	g. Penambahan tenaga medis		Tangguh LNG, sejak tahun 2004, telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehtana masyarakat kampung, salah satunya adalah dengan mengahdirkan tenaga medis di Puskesmas atau Pustu di kampung-kampung. Untuk ke depannya, Tangguh akan tetap berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasana kesehatan masyarakat, seperti yang telah tertulis dalam dokumen AMDAL, Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, sebagai berikut: "*Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas (kualitas, kuantitas, dan distribusi) tenaga medis, terutama yang berasal dari Masyarakat Asli."*	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	h. Membuat jalan setapak di kampung		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Bomberai, misalnya gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah tersebut berada di wilayah operasi perusahaan migas lain, Tangguh LNG	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada perusahaan tersebut melalui SKK Migas.	
	i. Dana CAPs disesuaikan dengan kampung lain yang tidak kena dampak langsung		Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung tidak akan melalui program CAPs (*Community Action Plan*). Ke depan, program pengembangan kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah	
	j. Pemasangan kebel listrik di kampung karena belum terpasang		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG. sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 52-53)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			infrastruktur.	
	k. Pembuatan bak penampingan air bersih dan pemasangan pipa dari rumah ke rumah		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Saat ini Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan, dan telah dipasang di masing-masing rumah di Kampung Tomage.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	l. Memohon kepada BP Tangguh LNG agar memperjelas dampak ini kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang dampak itu		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL, dan dokumen ANDAL Bab 3 mengenai evaluasi dampak. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
Arif Tharo B. (Wakil Kampung Forir)				
	a. Dalam penyusunan dokumen ANDAL RKL RPL tolong diskusikan dengan masyarakat agar masyarakat bisa memahami arti dari AMDAL tersebut		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Dalam dokumen tersebut terlalu banyak memamerkan hal hal dari pihak perusahaan saja, sedangkan dari masyarakat jarang ditemukan, atau mungkin tidak ada.		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
	c. BP tangguh tolong memperhatikan aspirasi dari masyarakat di kampung dan ada pun poin-poin yang di maksud		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
	d. Dengan adanya kegiatan perusahaan, hasil tangkapan masyarakat menurun. Sedangkan sebelum adanya perusahaan beroperasi hasil tangkapan masyarakat dalam sehari bisa mencapai 3 juta. Sedangkan nelayan yang ada Cuma berharap di laut saja. Jadi tolong perhatikan oleh BP.		Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	Dokumen RKL/RPL – Bagian Gangguan Perikanan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	e. Perusahaan harus memberikan beasiswa kepada masyarakat dari tingkat SD – PT, dan juga BP harus menyediakan asramanya		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat terkait peningkatan pendidikan. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat menaggapi seluruh aspirasi masyarakat ini. Namun demikian, di masa yang akan datang Tangguh LNG berkomitmen untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan, Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	f. Perusahaan harus menyediakan tenaga medis perkampung		Tangguh akan berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasana kesehatan masyarakat, seperti yang telah tertulis dalam dokumen AMDAL, Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, sebagai berikut: "*Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas (kualitas, kuantitas, dan distribusi) tenaga medis, terutama yang berasal dari Masyarakat Asli.*"	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	g. Perusahaan harus menghormati dan menjunjung tinggi norma adat istiadat setempat		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	
	h. Perhatikan infrasturuktur kampung		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberai akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	
	i. Perhatikan penerangan kampung denan mesin disel 15 KVA		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG. Sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut,	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 52-53)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur.	
	j. Tolong BP harus menghargai aspirasi masyarakat		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	
Abdulanfad Sirindin (Pemerintah Desa Kampung Goras)				
	a. Dengan keberadaan di wialayah Kab. Teluk Bintuni dan Fakfak maka harapan kami pemerintah Kab. Fakfak segera mengusulkan kepada penetapan SK kampung pemekaran kampung Goras selatan, agar kampung Goras selatan juga terlibat dalam DAV		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	
	b. BP menyelesaiakn tunggakan train 1 dan 2 kepada masyarakat sebyar dan sekitarnya. Sehingga tidak da persoalan lagi di train 3 dan		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	4 bagi masyarakat di teluk Bintuni		Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat. Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	c. BP harus mendatangkan guru pengajar SD dan guru TK, sekaligus dengan honor guru		Sejak tahun 2004, Tangguh LNG telah melakukan intervensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung melalui program-program pendidikan, sesuai dengan dokumen ISP. Intervensi pendidikan seperti pemberian beasiswa, pemberiaan fasilitas pendidikan, serta dukungan atas kehadiran tenaga pengajar. Untuk ke depannya, Tangguh LNG tetap berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan atas peningkatan kualitas pendidikan masyarakat asli di kampung-kampung. Untuk lebih jelasnya, komitmen ini telah tertulis di dalam dokumen AMDAL, lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh, sub-bab Pendidikan.	
	d. Apabila BP melakukan investasi di wilayah petuanan / distrik Kokas, BP harus siap menyekolahkan anak anak di tingkat SMA atau SMA Migas di Cepu		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua dan pada khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disediakan kurang lebih 11 Beasiswa bagi pelajar asal Fakfak, khususnya Kokas. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberkan dalam skenario CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Ke depan terdapat komitmen terkait dengan bantuan pendidikan dan beasiswa dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
	e. BP membuka balai pelatihan kerja bagi putra putri kampung, terutama putra putri kampung Goras dan Goras selatan		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik yang dapat dinikmati oleh Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk masyarakat yang tinggal di Distrik Kokas. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	f. BP Tangguh LNG harus siap membangun infrastruktur di kampung berupa: jalan, jembatan, air bersih, pipa irigasi, gedung sekolah TK – SMA, gedung balai kampung, sanggar PKK dan gedung puskesmas		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk sanggar PKK) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberai akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	g. BP harus memberdayakan kaum perempuan dalam hal pelatihan mnjahit dan memasak		Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melakukan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, seperti pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
Syarifudin Kaitam (Komisi Penilai AMDAL dari Masyarakat Otoweri)				
	a. Hasil konsultasi publik pada tanggal 12 Juli 2013 harap dilaksanakan		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
	b. Pihak BP Indonesia dan Pemerintah jangan memisahkan kita dengan saudara yang ada di wilayah lain		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV), sehingga tidak lagi perbedaan wilayah tidak lagi relevan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendahuluan (Halaman 1-5)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Dengan dukungan pemerintah dan BP, perlu memperhatikan dan membangun kampung dan masyarakat adat yang ada di kampung otowei, wilayah pemerintahan Kab. Fakfak		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	
	d. Suku sebyar/ kembaran kampung Otoweri adalah bagian dari suku sebyar / kembaran yang ada di kampung Kalitami, Weriagar, Tomu, Taroy, wilayah kab. Teluk Bintuni.		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV), sehingga tidak lagi perbedaan wilayah tidak lagi relevan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendahuluan (Halaman 1-5)
	e. Segala bentuk program pembangunan yang diberikan oleh pihak BP kepada saudara di wilayah kab. Teluk Bintuni perlu diberikan kepada masyarakat kampung Otoweri, distrik Bomberay dan Kab. Fakfak		Sebelumnya, kampung Otoweri telah masuk ke dalam cakupan wilayah DAVs, yang mana kampung tersebut telah menerima manfaat, berupa program-prgram sosial. Untuk ke depannya, kampung Otoweri tetap akan dilibatkan dan menerima manfaat program-program sosial Tangguh LNG, sehingga masyarakat kampung Otoweri dapat merasakan dampak positif akan kehadiran Tangguh. Namun demikian, atas pertimbangan beberapa	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			faktor seperti besaran dampak, lokasi, jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, program sosial Tangguh LNG yang diberikan untuk satu kampung dengan kampung yang lain tidak persis sama.	
	f. Program kerja pembangunan kampung terkena dampak langsung yang dilakukan oleh pihak BP perlu didukung oleh pihak pemerintah		Selama ini dalam setiap melaksanakan program sosialnya, Tangguh LNG berusaha semaksimal mungkin berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini salah satunya akan diwujudkan dalam dukungan Tangguh LNG terhadap pembangunan kampung, yang akan terintegrasi dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang mana hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.	
	g. Program kerja pembangunan kampung yang membawa masyarakat ke arah yang lebih baik yaitu dengan perencanaan bersama masyarakat (PBM)		Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung tidak akan melalui program CAPs (*Community Action Plan*). Ke depan, program pengembangan kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.	
	h. Pihak BP dan pemerintah perlu bekerja sama dengan bapak raja Arguni dan lembaga adat mbaham matta		Di dalam melaksanakan aktivitasnya, Tangguh LNG berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi, termasuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh adat setempat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	i. Perlu ada sistem pengawasan di kampung otoweri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan BP serta kegiatan perminyakan yang berlangsung di kampung Otoweri dan sekitarnya		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
	j. Peluang oleh kesempatan kerja yang tersedia melalui adanya proyek LNG tanguh perlu diberikan kepada masyarakat kampung otoweri		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	k. Pembangunan rumah layak bagi masyarakat kampung otoweri perlu dibangun sebagai bentuk dari dana bagi hasil (DBH)		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Hal yang berkaitan dengan masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan dalam hal penggunaan Dana Bagi Hasil. Hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	l. DBH perlu diberi kepada masyaralat asli sebyar / kembaran kampung oroweri		Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan dalam hal penggunaan Dana Bagi Hasil. Hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	m. BP jangan membawa praktik kerja nyata (KKN) sebagaimana yang dilakukan selama ini di Otoweri		Tangguh LNG mempunyai komitmen terkait dengan Kode Etik, Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi. Komitmen tersebut tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Tata kelola Pemerintahan, Sub-bab Perencanaan dan anggaran Tangguh LNG akan mentaati ketentuan hukum yang berlaku mengenai anti-suap dan anti-korupsi, serta menjunjung tinggi dan mendorong praktek bisnis yang beretika.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	n. BP jangan melakukan tekanan intimidasi serta ancaman sebagaimaa yang ada selama ini di kampung Otoweri		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial. Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48) – Pengamanan Berbasis Masyarakat
Abdullah Iha (Tokoh Adat dan Utusan Masayarakat Kokas)				
	a. BP dan pemerintah Kab. Fakfak dan Bintuni harus menjelaskansecaa terbuka kepada masyarakat tentang bagi hasil supaya masyarakat tau		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
	b. Kalau memang hanya train 3 saja, berarti selesai pengkajian ini bisa di tanda tangani amdal, tetapi kalau memang disambungkan dengan train 4 berarti train 4 harus masuk kedalam kajian amdal		Dokumen AMDAL ini telah mencakup dan mengkaji train 3 dan 4, termasuk berbagai potensi dampak dan mekanisme pengelolaannya.	
	c. Kokas juga termasuk dampak atau tidak tolong dijelaskan terutama dari pihak BP Tangguh LNG. Dan BP Tangguh LNG harus adakan sosialisasi kepada masyarakat Kokas mengenai train 4 ini		Keluharan Kokas teridentifikasi sebagai kampung yang terkena dampak sebagai daerah transit para pekerja sebelum masuk ke Tangguh LNG, sebagaimana Babo dan Bintuni. Konsultasi publik terkait dengan pengembangan Proyek Tangguh, termasuk train 3 dan 4, telah dilakukan di Kelurahan Kokas, Ubadari, dan Arguni dengan mengundang masyarakat dari kampung-kampung disekitarnya. Konsultasi publik ini telah dilakukan pada bulan Juli 2012. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Abubakar Mumuan (Sekertaris Kampung Taver)				
	a. Memasukan pemasangan rambu rambu navigasi di perairan Teluk Bintuni di mana terjadi jalur operasi kapal tangker yang beroperasi maupun berlabuh		Jalur pelayaran setiap kapal Tangguh LNG ini telah dimasukkan dalam peta navigasi pelayaran yang telah ditentukan dan disetujui oleh Pemerintah.	
	b. Dibuat suatu penelitian terhadap habitat laut termasuk terumbu karang yang ada di perairan distrik Kokas dan Bomberai sehingga apa yang di takuti oleh masyarakat bisa terjawab guna membangun kerja sama yang baik		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada.	
	c. Dengan hadirnya BP di perairan Teluk Bintuni saya berterimakasih karena sudah membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan langsung di masyarakat maupun di perusahaan walaupun masih kecil, dan kami masyarakat kampung Taver siap mendukung semua kegiatan BP		Terima kasih atas dukungannya.	
	d. Untuk menuju ke train 4 masyarakat menghimbau kepada BP agar lebih meningkatkan sosialisasi dan kalau bisa karena sesuai dengan dokumen AMDAL yang masyarakat pelajari titik pasang rig untuk train 4 ada dimana lokasinya maupun areal mata pencaharian masyarakat yang ada di petuanan arguni yang kehidupannya sebagai nelayan		Dokumen AMDAL ini telah mencakup dan mengkaji train 3 dan 4, termasuk berbagai potensi dampak dan mekanisme pengelolaannya. Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Apabila terbukti fasilitas dan kegiatan Tangguh LNG memberikan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat, maka Tangguh LNG telah mempersiapkan pengelolaan dampak dan program sosial.	
	e. Rekrutmen tenaga kerja utamakan kampung yang terkena dampak langsung dan orang papua		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Abdul Razzak Paus-Paus (Wakil Masyarakat Taver)				
	a. Masyarakat Taver memberikan tanggapan kepada pimpinan BP dikarenakan pengelolaan perekrutan pelajar yang sekolah di luar daerah seperti SMK migas tidak sesuai dengan permintaan masyarakat		Tangguh LNG memfasilitasi proses pendaftaran atas siswa-siswa yang dianggap memiliki potensi untuk mendapatkan pendidikan lanjutan di SMK Migas. Namun demikian, siswa-siswa yang sudah terpilih untuk mendaftarkan diri tetap harus mengikuti proses seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh SMK Migas. Sehingga penentuan kelulusan penerimaan siswa di sekolah-sekolah, misalnya SMK Migas bukan merupakan kewenangan Tangguh LNG, namun menjadi kewenangan sekolah itu sendiri.	
	b. Pembuatan gedung sekolah khususnya di Kokas dan Fakfak sehingga dapat menampung para pelajar yang ada di perairan teluk Bintuni dan sekitarnya		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	c. Mendatangkan guru atau pengajar yang handall sehingga dapat menambah gebrakan terhadap anak-anak		Tangguh LNG akan membantu Dinas Pendidikan dan lembaga terkait lainnya dalam menyusun rencana dan anggaran pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kapasitas pengajar.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	d. Permintaan masyarakat kampung Taver yang ditunjukan ke perusahaan BP adalah menghitung hasil pendapatan per keluarga, apabila terjadi dampak yang mana memicu pada penghasilan dan pembagian tersebut tidak di wakilkan oleh siapapun dan itu harus dari BP sendiri		Pengelolan terhadap dampak perikanan telah dituliskan di dalam RKL. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	e. Tuntutan masyarakat Taver sendiri adalah pembuatan kartu jaminan kesehatan yang ini akan menunjang kestabilan masyarakat dalam artian apabila terjadi dampak maka ini akan memicu pada pendapatan yang kurang sehingga timbulnya kekurangan khususnya di bidang finansial		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	f. Perusahaan harus menyediakan kuota tenaga kerja dalam rekrutmen dalam jabatan jabatan tertentu, di karenakan selama ini belum cukup dirasakan padahal masyarakat atau penduduk sekitarnya mempunyaai kemampuan tersebut		Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung sekitar Tangguh LNG, - Kab Teluk Bintuni dan Fakfak, - Wilayah Papua Barat lainnya, - Papua Lainnya	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Rajab Gwasgwas (Masyarakat Kampung Andamata)				
	a. Fokus terhadap isu pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, lingkungan hidup masyarakat, perikanan dan tenaga kerja		Sehubungan dengan proyek pengembangan Tangguh LNG, Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Program sosial tersebut mencakup pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, kesempatan kerja, tata kelola kepemerintahan, keamanan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Ke depan, Tangguh LNG akan tetap fokus pada bidang tersebut, dengan meningkatkan capaian-capaian yang bermanfaat bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG (Halaman 1-53)
	b. Tangguh LNG memberikan beasiswa kepada semua anak sekolah yang dimulai dari SD sampai PT		Tangguh LNG berkomitmen akan mendukung pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tertentu yang diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua yang terpilih dan berprestasi dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Komitmen ini tertuang di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. BP harus memperhatikan atas hak hak masyarakat adat		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati norma, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
	d. BP harus memfasilitasi kepada masyarakat nelayan berupa transportasi berupa mesin tempel sesuai jumlah kepala keluarga di kampung		Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi air secara terbatas yaitu menyangkut transportasi air yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	e. Selama ini BP Tangguh LNG turun kekampung memberikan sosialisasi publik kepada masyarakat, bahkan mnjanjikan kepada masyarakat, tapi selama BP berjanji tidak direalisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat		Masukan-masukan masyarakat yang disampaikan selama konsultasi publik telah dicatat dan menjadi bagian dalam dokumen KA ANDAL. Selanjutnya, masukan-masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Namun demikian, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki Tangguh LNG, tidak semua masukan dan aspirasi masyarakat dapat dipenuhi.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	f. BP tolong menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat Kokas juga mendapatkan dampak atau tidak. Kalau memang masyarakat juga mendapatkan dampak, tolong dijelaskan secara detail. Kalau memang tidak terkena damapak tolong dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat Kokas juga tau bahwa masyarakat tidak mendapatkan dampak.		Keluharan Kokas teridentifikasi sebagai kampung yang terkena dampak sebagai daerah transit para pekerja sebelum masuk ke Tangguh LNG, sebagaimana Babo dan Bintuni. Konsultasi publik terkait dengan pengembangan Proyek Tangguh, termasuk train 3 dan 4, telah dilakukan di Kelurahan Kokas, Ubadari, dan Arguni dengan mengundang masyarakat dari kampung-kampung disekitarnya. Konsultasi publik ini telah dilakukan pada bulan Juli 2012. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL
Sukariman Bauw (Perwakilan Distrik Arandai)				
	a. Distrik Arandai belum termuat didalam peta dampak lingkungan. Untuk itu masyarakat meminta agar distrik Arandai harus termuat dalam dampak langsung		Beberapa kampung di Distrik Aranday telah masuk dalam lingkup studi sosial dokumen RKL/RPL dan ANDAL.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL
	b. Distrik Arandai terdri dari 8 kampung, yaitu: Arandai, Kecap, Baru, Manunggal Karya, Kanderin, Botinik, Irira dan Yakora		Ke depan, wilayah studi sosial Tangguh LNG akan mencakup beberapa kampung di Distrik Aranday, yaitu Kampung Aranday, Kampung Kecap, Kampung Baru, dan Kampung Manunggal Karya. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan beberapa Kampung di Distrik Aranday yang tidak termasuk ke dalam wilayah	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			studi sosial, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	
A	**Ibrahim Iribarum, Perwakilan Distrik Kumundan** **(Perguruan Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Teluk Bintuni, Ketua LSM Lokal SPBPI)**			
1.	Dengan adanya proyek pembangunan kilang Tren 3, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan pemrakarsa BP Tangguh LNG harus memperhatikan dampak langsung secara negative yang paling penting terhadap lingkungan hidup yaitu : a) Pencemaran lewat pori-pori tanah titik sumbernya pada limbah gas dari Tren 3 BP Tangguh LNG maka terjadi kerusakan hutan sagu, hutan kayu, hutan rotan dan hutan nipah yang diatas permukaan tanah.	1,2,3,4 Pengertian lingkungan pentingnya lingkungan bagi kehidupan permasalahan lingkungan timbul kajian mengenai dampak penting suatu usaha	Fasilitas Kilang Tangguh LNG dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan untuk meminimalisir gangguan dan kerusakan lingkungan di daerah sekitar. Pembuangan air limbah dan pelepasan emisi udara dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Potensi dampak terhadap kualitas tanah, udara dan air telah dikaji dalam studi AMDAL ini dan akan dilakukan pengelolaan serta pemantauan seperti tercantum dalam dokumen RKL-RPL untuk meminimalkan dampak negatif.	Dokumen Tabel RKL/RPL – Pengelolaan Lingkungan
	b) Pencemaran lewat udara membuat udara kurang sehat bagi mahluk hidup yang menghirup udara itu		Fasilitas Kilang Tangguh LNG dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan untuk meminimalisir gangguan dan kerusakan lingkungan di daerah sekitar. Pembuangan air limbah dan pelepasan emisi udara dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Potensi dampak terhadap kualitas tanah, udara dan air telah dikaji dalam studi AMDAL ini dan akan dilakukan pengelolaan serta pemantauan seperti tercantum dalam dokumen RKL-RPL untuk meminimalkan dampak negatif.	Dokumen Tabel RKL/RPL – Pengelolaan Lingkungan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c) Pencemaran lewat air mengakibatkan habitat laut mati maka, mata pencaharian masyarakat nelayan di tepi pantai sudah tidak ada untuk menjamin ekonomi sehari-hari		Fasilitas Kilang Tangguh LNG dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan untuk meminimalisir gangguan dan kerusakan lingkungan di daerah sekitar. Pembuangan air limbah dan pelepasan emisi udara dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Potensi dampak terhadap kualitas tanah, udara dan air telah dikaji dalam studi AMDAL ini dan akan dilakukan pengelolaan serta pemantauan seperti tercantum dalam dokumen RKL-RPL untuk meminimalkan dampak negatif. Sehubungan dengan aspirasi mengenai berkurangnya hasil sumber daya laut, berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada.	Dokumen Tabel RKL/RPL – Pengelolaan Lingkungan
2	Dampak langsung secara positif terhadap lingkungan hidup yaitu : a) Hutan sagu, hutan kayu, hutan mangrove, hutan rotan dan hutan nipah kalau rusak harus direboisasi/penanaman kembali di batas-batas wilayah area operasi BP Tangguh LNG Tren 3		Rencana Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah dibuat untuk meminimalkan kebutuhan pembukaan lahan terutama areal hutan sagu dan mangrove. Pembukaan lahan untuk konstruksi Proyek Pengembangan Tangguh LNG dilakukan pada area hutan di dalam area Tangguh LNG, yaitu daerah hutan yang telah dibebaskan untuk keperluan pembangunan Tangguh LNG sesuai dengan SK Pelepasan Hutan dari Menteri Kehutanan No SK. 287/Menhut-II/2004) tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Daerah hutan yang dibuka untuk tujuan konstruksi tapi tidak digunakan untuk fasilitas fisik permanen proyek, akan di revegetasi	
	b) Bapedal, Dinas Lingkungan Hidup dan LSM-LSM yang bermitra dengan pemerintah agar memantau lingkungan dalam 6 bulan sekali dalam pertahun		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial	Dokumen RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bentuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, kolom Pengawas, dan Penerima Laporan
	c) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan BP Tangguh LNG sebagai pemrakarsa pembangunan proyek Tren 3 maka harus membuat waduk buatan/kolam buatan untuk menampung hasil-hasil masyarakat nelayan seperti ikan, udang, kepiting, cumi-cumi dan siput sebagai pengganti mata pencaharian masyarakat nelayan di tepi pantai dan mengekspor hasil penjualan yang ditampung di dalam kolam buatan kepada BP Tangguh LNG dan Pemerintah		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2008 Tangguh LNG telah memulai program *Stocking Point* yang mana katering Tangguh LNG membangun kontrak dengan koperasi-koperasi yang ada di Bintuni, Babo, Tofoi, Tanah Merah, dan Arguni. Ke depan, bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten).	
3	Pemerintah kabupaten teluk bintuni, masyarakat adat LSM-LSM lokal dan mahasiswa dari perguruan tinggi pasca sarjana harus masuk terlibat sebagai komisi penilaian persentasi Amdal dan pengawasan Amdal isi yang termuat dalam dokumen amdal sudah tepat sasaran/belum tepat sasaran.	1,2,3,4 Pengertian lingkungan pentingnya lingkungan bagi kehidupan permasalahan lingkungan timbul kajian mengenai dampak penting suatu usaha	Menurut UU No.32/2009 dan PP No. 27/2012, Pemerintah Daerah, Organisasi Lingkungan atau LSM Lokal maupun Para Ahli termasuk Perguruan Tinggi merupakan anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat dan telah dilibatkan dalam presentasi pada tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni. LSM Lokal yang diundang dalam Rapat Komisi AMDAL terdiri atas perwakilan LSM dari Kabupaten Teluk Bintuni (3 LSM) dan Kabupaten Fakfak (2 LSM). Pemilihan wakil masyarakat, termasuk masyarakat adat, dari kampung-kampung dalam wilayah studi AMDAL untuk rencana proyek Pengembangan Tangguh LNG telah dilakukan sesuai dengan Permen 17/2012. Ada sekitar 200 orang wakil masyarakat dari 52 kampung, 9 distrik dan 3 pertuanan di Kabupaten Bintuni dan Fakfak yang ikut duduk sebagai anggota Komisi AMDAL pada	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Rapat Komisi AMDAL tanggal 5 December 2013 di Bintuni	
4	Memberikan kompensasi Dana Bagi Hasil (DBH) gas alam cair hasil produksi bersih/royalty bagi daerah penghasil yaitu Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) pertahun dan dana kompensasi bagi hasil sisa limbah gas alam cair/kondensat bagi daerah penghasil Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) pertahun dari hasil produksi tren 1,2,3 dan mengingat membagi dana kompensasi kepada masyarakat adat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah per-KK dalam triwulan/ 3 bulan dalam pertahun, baik bukan daerah penghasil/suku penghasil sebesar rp 5.000.000 (lima juta rupiah)	Timbul kajian mengenai dampak penting suatu usaha rendahnya kualiatas dokumen AMDAL tujuan AMDAL	Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan aspirasi mengenai kompensasi adat, sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada	DBH: Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
5	Dalam 1 triwulan/3 bulan sekali tiap KK dalam Kabupaten Teluk Bintuni, rekrutmen tenaga kerja dalam masa kontruksi 60 % anak-anak lokal masyarakat adat dan masa produksi 30% anak-anak lokal masyarakat adat dan mempunyai job-job yang terpenting dalam BP LNG Tangguh LNG.	4,5 Beberapa prinsip dalam pengertian AMDAL dan tujuan AMDAL	Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
6	BP LNG Tangguh LNG, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus memberikan beasiswa S1, S2, S3 di perguruan tinggi didalam kabupaten Teluk Bintuni yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Teluk Bintuni/Sekolah Perguruan Tinggi yang ada didalam provinsi	8 Konsekuensi AMDAL	Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Papua Barat maupun diluar Papua dan menyekolahkan anak-anak suku penghasil ke SMK Migas		mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	
7	BP Tangguh LNG, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus berkerja sama/bermitra dengan LSM lokal serikat buruh untuk mengawasi hak dan kewajiban tenaga kerja/buruh yang sedang dipekerjakan di BP LNG Tangguh LNG	9 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tangguh LNG memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Peraturan perusahaan tersebut mengatur hak dan kewajiban antara Tangguh LNG sebagai perusahaan dengan pekerjanya. Tangguh LNG juga telah mewajibkan kontraktor yang bekerja untuk Tangguh LNG agar mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			termasuk peraturan ketenagakerjaan. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi.	
8	Lokasi pembangunan Tren 3 di wilayah masyarakat adat suku Besar Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni	4 Dampak penting	Proyek Pengembangan Tangguh LNG Train 3 akan berlokasi di dalam lokasi yang sama dengan lokasi kilang LNG Train 1 dan 2. Areal Lahan yang akan dipergunakan tersebut merupakan lahan yang sudah dibebaskan dan Pemerintah telah mengeluarkan sertipikat hak atas tanah diatas lahan tersebut.	
9	Yang terkena dampak langsung adalah daeerah/suku penghasil gas dalam cair dan lokasi tempat berkedudukan pembangunan tren 3 wilayah administrasi terkena dampak sosial budaya adat dan anjungan lepas pantai Distrik Kamundan : - Kampung Kalitami I - Kampung Kalitami II - Kampung Bibiram - Kampung Kenara - Kampung Maroro Distrik Weryagar : - Kampung Weryagar - Kampung Mogotira - Kampung Tunaikin - Kampung Weryagar Selatan - Kampung Weryagar Utara Distrik Tomu - Kampung Ayot - Kampung Totitra - Kampung Ekam		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL telah disimpulkan cakupan wilayah studi sosial Tangguh LNG sehubungan dengan Proyek Pengembangan LNG Tangguh. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari wilayah yang tidak temasuk dalam cakupan studi sosial, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi ANDAL Tangguh LNG

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Kampung Tomu - Kampung Sebyar rejosari - Kampung Wanagir - Kampung Adur - Kampung Taroy - Kampung Pera-Pera - Kampung Tambanewa - Kampung Soundauni Distrik Aranday - Kampung Kandarin - Kampung Kecap - Kampung Bontik - Kampung Manunggal Karya - Kampung Baru - Kampung Irira - Kampung Yakora Distrik Semuri - Kampung Onar Lama - Kampung Onar Baru - Kampung Tofoy - Kampung Saengga - Kampung Tanah Merah Baru Distrik Aroba - Kampung Sido Makmur - Kampung Wimbro Distrik Sub-babo - Kampung Irarutu III - Kampung Kanaisi - Kampung Nusey - Kampung Kasira Marafuar - Kampung Modan			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Kampung Amutu Ibukota Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Kokas dan distrik Arguni Kabupaten Fakfak			
10	BP LNG Tangguh LNG Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni harus membuka akses jalan darat dari Ibukota Kabupaten Teluk Bintuni tembus ke 3 distrik di Sebyar	BP LNG Tangguh LNG Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni	Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, misalnya perbaikan pelabuhan umum, pelabuhan masyarakat, gedung koperasi, rumah ibadah, infrastruktur pendidikan, dan berbagai fasilitas umum lain. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
11	BP LNG Tangguh LNG Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni harus membuat pembangunan dermaga kapal laut berskala nasional		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, misalnya perbaikan pelabuhan umum, pelabuhan masyarakat, gedung koperasi, rumah ibadah, infrastruktur pendidikan, dan berbagai fasilitas umum lain. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
12	BP Tangguh LNG harus membuka kantor perwakilan di Ibukota Teluk Bintuni		Tangguh LNG telah memiliki kantor perwakilan, yaitu *Tangguh Laison Office* (TLO) yang berdiri masing-masing di kota Bintuni, Manokwari, dan Fakfak.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
13	Seluruh kontraktor migas berskala nasional dan lokal yang sedang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus membuka kantor perwakilan di Ibukota Teluk Bintuni		Tangguh LNG telah memiliki kantor perwakilan, yaitu *Tangguh Laison Office* (TLO) yang berdiri masing-masing di kota Bintuni, Manokwari, dan Fakfak.	
14	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Teluk Bintuni menanam saham pengadaan barang bahan material pembangunan Tren 3 dalam tahap konstruki, seperti pasir, koral, besi, beton, semen, paku dan bahan-bahan bangunan yang lain dan pengadaan catering dalam tahap konstruki pembangunan Tren 3 sampai produksi selama BP Tangguh LNG masih beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pada industri migas. Kewenangan tersebut berada pada SKK Migas sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan industri hulu migas.	
15	Dana Bagi Hasil (DBH) gas alam cair kotor/kondensat sisa limbah dari gas alam cair yang diproduksi dari Tren 1,2 dan 3 untuk daerah penghasil Kabupaten Teluk Bintuni pertahun sebesar rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Milyar Rupiah0 dan untuk Kabupaten Fakfak daerah penghasil gas alam cair hasil produksi gas bersih/royalty dari Tren 3 sebesar Rp 100.000.000 (seratus milyar) pertahun dan untuk DBH Gas alam cair di produksi sebesar rp 150.000.000 (seratus lima puluh milyar) dalam pertahun karena mengingat di bagi dengan masyarakat yang mempunyai hak ulayat sebagai suku penghasil distrik Kokas dan distrik arguni kabupaten Fakfak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per KK dalam 1 Triwulan /3 bulan sekali		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan aspirasi mengenai kompensasi adat, sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan	DBH: Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
16	Rencana pembangunan kilang gas tren 3 di wilayah lokasi suku besar sebyar ada hubungannya dengan penataan Ruang Wilayah a) Luas wilayah pembangunan tren 3 sekitar 10 km x 10 km – 20 km x 20 km b) Jarak antara pemukimam masyarakat pembangunan tren 3 sekitar 3 km – 5 km c) Jarak antara pembangunan tren 3 tren 3 lokasi mata pencarian untuk menghidupkan masyarakat dalam ekonomi sehari-hari seperti hutan buruan, tepi pantai masyarakat nelayan kurang lebih jarak (+ 1km – 2 km) d) Geografis tanah daratan lumpur (rawa) dataran becek dan dataran kering maka pembangunan tren 3 dapat di bangun di tanah		Train 3 akan dibangun diatas lahan yang saat ini digunakan oleh Tangguh LNG diatas lahan yang telah pada saat ini, tidak jauh dari Kilang LNG 1 dan 2 yang telah ada, namun terdapat beberapa anjungan yang terletak di perairan Teluk Bintuni. Detail rencana pembangunan train 3 dan deskripsi teknis proyek pengembangan Tangguh LNG telah tertuang dalam dokumen ANDAL Bab I, mengenai deskripsi proyek pengembangan Tangguh LNG.	Dokumen ANDAL Bab I, Deskripsi Proyek Pengembangan Tangguh LNG

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	dataran lumpur (rawa), tanah dataran becek dan tanah dataran kering tetapi kita kembali lihat pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten teluk bintuni dan pihak pemrakarsa/BP Tangguh LNG siap mengambil resiko/tidak			
17	Bupati teluk bintuni, bupati fakfak dan gubernur papua barat harus menandatangani MOU Kontrak sharing produsen bagi hasil saham antara BP Tangguh LNG dan pemerintah pusat/ negara. Berdasarkan hasil produksi dari saham Inggris sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan Papua barat, dan konfrensi no 48 Deklarasi Hak-hak dasar masyarakat pribumi sedunia		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini.	
Yulius Sabandafa (Pemerintah Kampug Tanah Merah)				
	a. Tata cara pelibatan masyarakat dalam proses amdal dibedakan menjadi tiga golongan. Golongan pertama: masyarakat kampung tanah merah yang memperoleh manfaat dan masyarakat yag mengalami kerugian sesuai dengan peraturan menteri negara lingkungan hidup (permen LH) nomor 17 tahun 2003	Tambahan 1-77	Tata cara pelibatan masyarakat di dalam proses AMDAL telah diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2012 tentang pelibatan masyarakat dalam AMDAL dan izin lingkungan.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Masukan pengelolaan limbah non b3 (non organikl0 termasuk antara lain plastik dan botol aqua. Terjadi pencemaran lingkungan hidup karena nak sungai dari sungai saengga yang mengalir dari lokasi LNG apabila terjadi curah hujan yang deras dapat mengakibatkan banjir sehingga banyak sampah non-organik yang hanyut dibawah banjir yang hanyut dan bertebaran di sepanjang sungai yang mengalir ke muara permukaan kampung Tanah Merah dan disepanjang jalan setapak sebelah pagar LNG yang tidak jauh dari kampung sekitar 500 m.	1-77 111-306	Semua limbah padat non-B3 di lokasi Tangguh LNG dikelola sesuai AMDAL dan prosedur yang telah dibuat. Limbah botol plastik, kaca, dan kaleng yang dihasilkan akan dikumpulkan di fasilitas pengelolaan limbah sebelum dikirim ke pihak ke-3 untuk didaur-ulang. Tidak ada limbah yang dibuang ke sungai.	
	c. Jalan pagar yang melintas sungai yang tidak melintas sungai yang tidak memadai hanya memakai gorong gorong skala kecil sehingga air sungai yang bias mengalir lama lama menjadi tergenang di sekitar sungai sehingga warnai air menjadi berubah. Namun warna air berubah menjadi coklat dan berbau dan pohon pohon disekitar mengering karena tergenang air, sehingga meresap kedalam tanah dan masyarakat yang mengkonsumsi di sekitar pemukiman sudah tidak memadai. Saran : BP menambah satu buah sumur bor di kampung Tanah Merah yang selama ini masyarakat alami kekurangan air bersih karena sumur bor tidak mampu lagi menampung air bersih	11-67 111-306	Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan mempelajari masalah ini agar kami dapat menentukan sikap di dalam membantu masyarakat menemukan penyelesaian atas masalah ini.	
	d. Evaluasi dampak terhadap pelayanan publik termasuk pendidikan dengan adanya penurunan grafik pendidikan maka masyarakat kampung Tanah Merah merupakan kampung terkena dampak langsung maka masyarakat sangat	11-67	Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Pada tahun 2013, penerima beasiswa yang berasal	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan masa depan generasi muda kami yang selama ini menjadi pengalaman kami banyak anak anak masyarakat yang pada saat konstruksi tidak bisa bekerja menjadi tenaga skill, sehingga hanya menjadi tenaga buruh kasar. Sehingga lewat pengalaman kami, jangan sampai menjadi generasi yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang merata seperti yang selama ini kami rasakan di kampung Tanah Merah distrik Sumuri banyak peluang peluang pendidikan yang dialihkan		dari Distrik Sumuri berjumlah 9 orang mahasiswa dan 10 orang pelajar SMK. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Di samping itu, Tangguh LNG juga memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar SD, SMP, dan SMA, termasuk yang berasal dari Distrik Sumuri, melalui mekanisme CAPs. Di masa yang akan datang, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Tangguh LNG berkomitmen untuk meneruskan dukungan dan meningkatkan capaian-capaian di bidang pendidikan. Sehingga diharapkan, di masa yang akan datang, akan lebih banyak masyarakat Papua yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menduduki posisi penting di Tangguh LNG, maupun di perusahaan besar lainnya di Papua Barat. Komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa ini telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	
	e. Lahan yang diberikan kepada masyarakat untuk kelanjutan hidup bagi masyarakat dan generasi selanjutnya tidak memadai dan tidak layak untuk cocok tanam, tanahnya licin dan berbatu kerikil. Saran: karena tidak bisa menanam, maka pihak BP harus memperluas lahan pertanian masyarakat dan mencari lahan yang layak di manfaatkan oleh masyarakat kampung Tanah Merah untuk menjadi tempat harapan dan berkesinambungan hidup yang layak di masa yang akan datang menjadi hidup yang lebih baik dari semasa kami hiup di lokasi Tanah Merah lama yang walaupun sarana yang tidak memadai, namun mempunyai masa depan yang baik.		Tangguh LNG telah berupaya untuk membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kesuburan lahan yang bisa dipakai para petani setempat untuk menanam tanaman sayur mayor. Upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2005-2013 antara lain program pendampingan bagi para petani, termasuk budidaya pertanian dan pelatihan pembuatan pupuk kompos, serta pengelolaan usaha pertanian. Hasil pertanian tersebut kemudian diserap oleh Tangguh LNG. Namun demikian, keberhasilan usaha pertanian ini harus juga didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat setempat.	
	f. Dinas pendidikan dan sistem penerimaan dan pengaturan tidak adil banyak peluang yang dimanfaatkan oleh dinas pendidikan yang tidak mengutamakan anak anak pejabat Teluk Bintuni yang menanfaatkan peluang itu mengirim anak anak mereka ke sekolah yang dianggap penting bagi anak anak mereka, seperti SMK cepu, akademi negara cepu, dan sekolah sekolah lain diluar Papua. Sehingga anak anak kami yang mempunyai kemauan sekolah tersebut harus mandiri tidak dibiayai oleh BP. Ini kenyataan beberapa anak Tanah Merah yang bersekolah di Cepu membayar sendiri dan perguruan tinggi diluar Papua. Saran: BP berkewajiban menyekolahkan anak anak kami dari SD sampai PT tanpa pungutan biaya dari orang tua dan merupakan tanggug		Tangguh LNG menyediakan beasiswa dalam jumlah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pada dasarnya, beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi akademis yang baik. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi akademis yang baik serta lulus seleksi penerimaan di sekolah-sekolah tertentu, seperti halnya SMK Migas Cepu.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	jawab BP disesuaikan dengan permintaan anak anak tersebut tanpa persyaratan prestasi yang penting anak anak untuk tetap giat untuk sekolah			
	g. Dengan adanya satuan parameter yang tidak seimbang maka kami sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung yang dipindahkan dari lokasi Tangguh LNG tidak bisa menghasilkan hasil produksi pertanian yang baik di seSubabkan oleh karena lahan yang diberikan oleh BP terbatas.		Tangguh LNG telah berupaya untuk membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kesuburan lahan yang bisa dipakai para petani setempat untuk menanam tanaman sayur mayor. Upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2005-2013 antara lain program pendampingan bagi para petani, termasuk budidaya pertanian dan pelatihan pembuatan pupuk kompos, serta pengelolaan usaha pertanian. Hasil pertanian tersebut kemudian diserap oleh Tangguh LNG. Namun demikian, keberhasilan usaha pertanian ini harus juga didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat setempat.	
Lateng Iriwanas (Perwakilan Kampung Kalitami I)				
	a. Sebelum perusahaan melakukan kegiatan wajib mebayar uang ketuk pintu sesuai tuntutan masyarakat		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat,	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat. Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi ini seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	b. Pembayaran hak hak asasi harus merata tanpa perbedaan antara DAV dan non DAV		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV)	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Pembayaran beasiswa untuk pelajar kawasan teluk bintuni		Tangguh LNG telah memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 Tangguh LNG telah memberikan beasiswa kepada 237 mahasiswa yang berasal Papua dan 142 bantuan pendidikan bagi pelajar asal Papua. Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan, Sub-bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli, sebagai berikut. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	
	d. Pembagian hasil produksi diutamakan kepada daerah penghasil dari tingkat propinsi, kabupaten, distrik dan kampung		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini.	
	e. Pembagian pembagunan lebih diutamakan kepada daerah penghasil		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2012	
	f. BP Tangguh harus dibuat kanal penghubuna antara distrik Kamundan, Weriagar, Tomu Taroy dan Teluk Bintuni		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk membangun kanal penghubung tersebut, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Namun demikian karena keterbatasan yang dimiliki Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.	
	g. Penjelasan pihak BP Tangguh LNG tentang penetapan sebagai DAV?apa dasar hukumnya?		Pertimbangan yang diambil pada saat AMDAL untuk KIlang LNG 1 dan 2 adalah berdasarkan daerah yang langsung terkena dampak dari rencana kegiatan yang menjadi lingkup studi AMDAL pada saat ini. Pendekatan dan daerah yang terkena dampak dalam AMDAL tersebut sudah disetujui oleh Komisi AMDAL pada tahun 2002 di mana wakil masyarakat dan wakil dari pemerintah daerah turut duduk sebagai anggota Komisi AMDAL untuk menilai dokumen AMDAL pada saat itu. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV)	
	h. Menjelaskan mengapa PLTG tidak menjangkau kami di Kamundan		Sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN	
	i. membantu pemerintah untuk menyiapkan satu unit genset 1—KVA untuk masyarakat distrik Kamundan		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan genset dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat Distrik Kamundan. Namun demikian karena keterbatasan yang dimiliki Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.	
Kampung Taroi, Pera-Pera, Tambanewa Dan Sorondauni				
	a. Kami meminta kepada pemerintah propinsi dan anggota MRP segera terbikan anturan dan Perdasus untuk pembagian DBH		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sumber daya alam migas tersebut. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini.	
	b. Pihak BP Tangguh LNG secara terbuka berapa kapal kondensat yang sudah diekspor		Tangguh LNG secara terbuka menyampaikan seluruh laporan kegiatan eksplorasi dan produksinya kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui SKK Migas. Oleh karena itu, Tangguh LNG menyarankan agar aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan migas yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pengaturan kegiatan usaha pertambangan migas.	
	c. Kami meminta kepada pihak BP Tangguh LNG 40% dari hasil penjualan kotor (kondensat) dan dana itu langsung dikucurkan kepada kampung atau distrik penghasil		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan bagian 40% gas dari hasil penjualan. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	d. Dana PBM pertama dari 300 jt pertahun dinaikan menjadi 1 M pertahun perkampung		Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung tidak akan melalui program CAPs (*Community Action Plan*) atau PBM (Perencanaan Bersama Masyarakat). Ke depan, program pengembangan kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.	
	e. Pendidikan BP Indonesia harus memberikan beasiswa dari TK - PT perbulan		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Jumlah besaran beasiswa atau bantuan pendidikan yang selama ini telah diberikan oleh Tangguh LNG ditentukan setelah melalui proses pengkajian.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	f. Perumahan sangat istimewa yang harus dibangun oleh BP		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka	Rincian Program: Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG • Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34) • Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	g. BP harus memberikan honor kepada tokoh adat, pemuka agama dan tokoh lainnya		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama, Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	
A	**Arif Tharob, Kampung Forir**			
1.	Perlu adanya perencanaan bersama masyarakat (PBM) di Kampung Arguni sebagaimana di kampung2 DAV yang lain		Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung tidak akan melalui program CAPs (*Community Action Plan*) atau PBM (Perencanaan Bersama Masyarakat). Ke depan, program pengembangan kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.	
2	Harus ada perhatian khusus dari pihak perusahaan terhadap masyarakat dan norma2 adat istiadat petuanan Arguni dan sekitarnya		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
3	Yang harus ada dan perlu dilihat oleh pihak perusahaan yaitu : 1. Ekonomi 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Infrastruktur Kampung Karena dalam 1 hari masyarakat bisa mendapat		Sehubungan dengan proyek pengembangan, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak dan program sosial bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Program tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dukungan terhadap pembangunan kampung melalui mekanisme musrenbang, dan bidang lain.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	300.000.000 Dan harus ada sosialisasi yang rutin dari pihak perusahaan dengan masyarakat kampung			
A	**Salasa Sasim, Wakil Masyarakat Kampung Wamosan**			
1.	Kampung kami di mekarkan pada Tahun 2009, namun sebelum dimekarkan kampung saya sudah terkena dampak lingkungan. Jadi saran/masukan/tanggapan sangat membuka peluang untuk menitipkan ususlan2 atau aspirasi yang kami usulkan atau bisa masukan dalam kertas ini sehingga sudi kiranya bapa/saudara bisa diperjuangkan atau bisa dilaksanakan di kampung kami agar bisa sejajar dengan Otoweri Tomage. Perencanaan yang kami buat salah satunya yaitu a. Infrastruktur : a) Rumah ibadah b) Perumahan rakyat c) Gedung sekolah d) Gedung puskesmas e) Tambatan perahu f) Sanggar PKK g) Listrik Kampung h) Air Bersih		Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung tidak akan melalui program CAPs (*Community Action Plan*). Ke depan, program pengembangan kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Pendidikan : a) Biaya pendirikan dari SD s/d Sarjana b) Perlengkapan pendidikan dari kelas 1 s/d 6 SD		Masyarakat Asli Papua yang berprestasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan selama ini juga telah diberikan melalui CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang Tangguh LNG akan melanjutkan komitmennya untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam jumlah tertentu sebagaimana tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab Pendidikan Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	c. Kesehatan a) Perlengkapan kesehatan rapat inap, alat2 medis, emergency pasien b) Perusahaan harus membiayai pengobatan masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Perbaikan ekonomi di bidang perikanan a) Mesin diesel b) Perahu c) Jarring d) Perusahaan harus membeli ikan, udang, dari masyarakat e) Perusahaan harus melakukan pelatihan di bidang perikanan		Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk Masyarakat Asli di Kampung Wamosan. Program sosial ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang sama atau lebih baik dari sebelum adanya kegiatan Tangguh LNG. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	e. Perbaikan ekonomi di bidang pertanian a) Perusahaan harus menyiapkan sarana pendukung pertanian b) Harus menyiapkan tenaga2 pertanian yang bisa membantu masyarakat untuk membuka lahan pertanian c) Perusahaan harus membeli hasil pertanian dari hasil pertanian yang dihasilkan di kampung kami		Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			tahap operasi Tangguh LNG.	
	f. Tenaga pekerja a) Humas b) Sekuriti c) Tenaga skill dan non skill d) Tenaga skill dan non skill harus dibekali dengan pembekalan dan pelatihan2 sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal pertanian		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	g. Bapa orang tolong jelaskan persentase negara pengalis investor/pusat dengan provinsi/provinsi dengan Kabupaten/Kabupaten dengan kampung2 yang kena dampak langsung maupun yang tidak langsung		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
	h. cek kembali karena program ini di setiap kampung bermasalah/jadi harapan saya dan ini harus dikawal dan benar2 turun ke masyarakat. Demikian keluhan atau masukan sedikit banyak membantu menyelesaikan semua masalah yang ada di kampung kami dan di teluk Sebyar dan kampung2 yang ada di teluk Sebyar		Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
A	**Saban Nabi (Pendidikan Guru), Taroi Distrik Tomu**			
1.	Sarana dan prasana lebih memadai (maximal) - Bantuan beasiswa semua jenjang (SD – Perguruan Tinggi) - Perumahan guru kesejahteraan guru		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Pembangunan SMA di Kampung Taroy pada tahun 2014/2015		bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat	(Halaman 13-18)
2	Kesehatan - Sarana dan prasarana lebih memadai (maximal) - Kesejahteraan pegawai kesehatan - Pembangunan puskesmas lengkap dengan fasilitas		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di Distrik Tomu.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
3	a. Akses transportasi laut tolong bangun pelabuhan laut kelas III di Kampung Taroy		Tangguh LNG memahami pentingnya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan pelabuhan di Kampung Taroi. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
	b. Jalan penghubung dari kampung ke Distrik dan Kabupaten		Tangguh LNG memahami pentingnya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan pelabuhan di Kampung Taroi. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
4	1. Perubahan nama sumur gas Vurwata (VRA s/d VRF) segera dirubah menjadi Sumur Tardy (TRA s/d TRF)		Nama sumur tidak dapat diubah karena telah menjadi dokumentasi proyek dan telah diajukan dan disetuji oleh Pemerintah. Penting untuk dicatat bahwal penamaan sumur tidak berkaitan dengan DBH.	
5	1. Pembangunan sarana dan perasana lokasi baru pemekaran ibukota Distrik Taroy		Sehubungan dengan aspirasi tentang pemekaran Distrik Taroi, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat tersebut. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten. Di samping itu, kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Sehingga, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Pembahasan atas	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah	
	2. Jalan raya penghubung dari Kampung Taroy ke Ibukota Distrik dan Kampung Sorondauni		Tangguh LNG memahami pentingnya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan raya yang menghubungkan Kampung Taroi dengan wilayah lainnya. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
A	**Hosana Erfymbay, Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni**			
1.	Rona kajian kegiatan lingkungn dalam pelaksanaan Tren III harus dilaksanakan secara baik karena berdampak pada masyarakat		Terima kasih atas masukannya.	
2	Dalam pelaksanaan kegiatan dampak pada laut karena di kabupaten/daerah ini merupakan hidup & mati dilaut		Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	
3	Dampak pelaksanaan harus melihat peta lokasi atau batas administrasi karena distrik Aroba 2 kampung masuk dalam dampak kegiatan (Wimbror & Sidomakmur) Wimbro dan Sidomakmur merupakan masyarakat dengan mata pencaharian di laut,		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Wilayah tersebut termasuk Kampung	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	dampak negatif yang harus bisa ditanggulangi		Wimbro dan Kampung Sidomakmur. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2012. Dalam hal keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	
4	Kami berharap dengan adanya Tren III dan IV dapat membantu infrastruktur dalam proses tranportasi laut maupun darat. Dikarenakan perlu hubungan transportasi untuk menunjang proses pelaksanaan pemerintah. Antar distrik dengan Kabupaten, dengan ini distrik aroba berhubungan langsung dengan Kab Fakfak		Tangguh LNG memahami pentingnya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan yang menghubungkan Distrik Aroba dengan Kabupaten Fakfak. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
5	BP tolong membuat satu dermaga besar dalam pelaksanaan transportasi bagi masyarakat di distrik Aroba.		Tangguh LNG memahami pentingnya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan sebuah dermaga besar untuk masyarakat Distrik Aroba. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
6	BP harus bisa menunjang proses pendidikan di distrik Aroba guna meingkatkan SDA dan SDM Di kabupaten Teluk Bintuni		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut.	
7	BP harus membuat puskesmas di distrik dengan fasilitas medis dan tim kesehatan dikarenakan ada 7 kampung dengan 5 puskesmas		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
8	BP membantu bangun taman baca di distrik ARoba		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh	Referensi Program Pendidikan: Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur lainnya yang menyangkut bidang pendidikan, Tangguh LNG akan memberikan dukungan yang diintegrasikan dengan mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang mana, prioritas serta pelaksanaan program merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
9	Mengingat sector Ekonomi di distrik Aroba dengan 7 kampung yang tidak dalam sebatas pertanian dan perikanan dengan hal lain BP harus mampu melihat sector pasaran yang harus diambil dan tidak membuang hasil dari kami Ada pasar yang mampu menampung hasil Jaringan sarana dan prasarana fisik dalam pelaksanaan masih kurang		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemampuan untuk bersaing di pasar yang luas. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten). Ke depan, program Tangguh LNG tidak akan lagi fokus kepada DAV, tapi lebih berfokus pada Masyarakat Asli, sehingga manfaat Tangguh LNG akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Asli	
	Usulan tolong dimasukkan untuk beberapa kampung ada beberapa yang ada di distrik Aroba yaitu : 1. Kampung aroba 2. Kampung sanggwar 3. Kampung wawe 4. Kampung air totur 5. Kampung yabu Sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanaan oleh pihak BP dalam Tren 3 Ini menjadi perhatian dalam hal dokumen proses Tren 3 sebelum penandatanganan Meningkatkan tranportasi laut dan darat dalam mempermudah proses mobilisasi masyarakat		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa hanya Kampung Wimbro dan Kampung Sidomakmur yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari selain kedua kampung tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3: Peta Batas Wilayah Studi Dokumen ANDAL
A	**Engelbertus Difinubun, Kampung Wimbro**			
1.	Program pendidikan kedepan adalah menyekolahkan putera-puteri Teluk Bintuni khususnya daerah yang terkena dampak langsung di Luar Negeri (Inggris Jepang Korea dan Australia). Selain itu menyediakan asarama bagi putera-	55 Amdal terpadu proyek pengembangan Tangguh LNG	Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	puteri daerah dampak langsung disetiap daerah pendidikan yang dianggap menjadi daerah pendidikan. Menyekolahkan putra-putri teluk Bintuni khususnya daerah dampak langsung untuk fakultas kedokteran di luar negeri dan dalam negeri dengan biaya penuh oleh BP Tangguh LNG		serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Skenario pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut mempertimbangkan prioritas bagi Masyarakat Asli serta Papua dan kemudian juga prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
2	a. Tenaga kerja permanen di BP Tangguh LNG adalah putra putri yang berasal dari daerah DAV dengan cara menerima mereka sebagai tenaga kerja permanen di BP Tangguh LNG sebanyak 2 orang di masing-masing kampung yang terkena dampak langsung		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja, masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	b. Adanya kompensasi terhadap nelayan tradisional yang berada di kampung Wimro dan Kampung Sidomakmur distrik Aroba.		Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut. Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Membudayakan masyarakat melalui koperasi serba usaha agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya		Selama ini Tangguh LNG telah melakukan pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG di bidang pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat. Tangguh LNG juga telah mengembangkan koperasi untuk mendukung kebutuhan usaha masyarakat tersebut. Ke depan, Tangguh LNG akan meneruskan meningkatkan capaian-capaian terhadap aspek-aspek tersebut. Secara detail program tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	d. Pembangunan perumahan rakyat yang layak dikampung Wimro sebanyak 20 0 unit		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk memperbaiki standart hidup mereka. Tangguh LNG menawarkan program keberlanjutan yang dapat mendukung masyarakat dan Pemerintah Lokal dalam memenuhi perbaikan yang diinginkan. Program-program peningkatan pendapatan, seperti program pengembangan kewirausahaan Papua, peningkatan pendapatan, dan Program Penguatan Bisnis Kepala Burung. Dengan berpartisipasi dalam program ini, Tangguh berharap masyarakat, khususnya masyarakat asli, akan mampu memperbaiki standart hidupnya.	
	e. Bantuan dana untuk 3 buah rumah ibadah tiap tahun		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	f. Bantuan modal usaha bagi masyarakat Kampung Wimro		Selama ini Tangguh LNG telah melakukan pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG di bidang pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat. Tangguh LNG juga telah mengembangkan koperasi untuk mendukung kebutuhan usaha masyarakat tersebut. Ke depan, Tangguh LNG akan meneruskan meningkatkan capaian-capaian terhadap aspek-aspek tersebut. Secara detail program tersebut tertuang dalam dokumen RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
A	**Ibu Semolina Puara, Distrik Aroba Kampung Sidomakmur**			
1.	Dibidang ekonomi Kami dikampung Sidomakmur sebagai masyarakat nelayan 1. Udang 2. Kepiting 3. Ikan kakap		Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut. Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
2	Perkebunan/Petani 1. Sayur mayor 2. Buah-buahan dan lain sebagainya		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen	
3	Dibidang Koperasi Bisa ada kerjasama dengan kami yang ada di kampung Sidomakmur dari LNG Tangguh LNG Migas/BP Subabo		Keberadaan Lembaga Ekonomi Berbasis Masyarakat (LEBM) yang tumbuh dengan prinsip ”dari, oleh, dan untuk masyarakat” di kampung-kampung sekitar wilayah operasi Tangguh LNG seperti Koperasi, UBSP, dan KUB telah mulai berkembang dari 4 unit koperasi pada tahun 2008 menjadi 9 unit pada tahun 2012. Pembentukan LEBM didasari karena tidak adanya lembaga ekonomi formal yang dapat diakses untuk mendukung tumbuhnya sektor riil dan usaha mikro bagi masyarakat. Untuk ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, Tangguh LNG berkomitmen untuk membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu usaha masyarakat, sebagai contoh koperasi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
A	**Abu Ismail, Aparat Kampung Sidomakmur Distrik Aroba**			
1.	Sesuai dengan dokumen AMDAL yang kami terima dan didalam dokumen amdal tersebut ada lingkaran peta yang didalamnya terdiri dari berbagai kampung dari kampung Kokas sampai dengan lima kampung di distrik Subabo dan didalam peta tersebut ada dua kampung di distrik Aroba yaitu Kampung Wimro dan Kampung Sidomakmur . Bagaimana tanggapan pemerintah selaku fasilitator dan sekaligus jembatan penghubung antara pihak perusahaan dan masyarakat apabila		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV). Kampung Wimro dan Sidomakmur termasuk dalam wilayah studi/kajian AMDAL Pengembanga Tangguh LNG.	Dokumen ANDAL BAB 1: Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	kampung-kampung yang tertera didalam peta tersebut positif terkena dampak apakah pihak perusahaan bisa memenuhi permintaan masyarakat yang terkena dampak itu.			
	Apakah bisa pihak perusahaan bisa memperdayakan masyarakat dibidang : 1. Bidang ekonomi masyarakat		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	2. Bidang sosial budaya		Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
	3. Bidang pendidikan		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat.	
	4. Bidang kesehatan		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
	5. Bidang tenaga kerja lokal		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	6. Bidang penerangan		Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak Januari 2013, Tangguh LNG telah siap untuk memasok listrik sebesar 4 Megawatt kepada PLN untuk selanjutnya listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	7. Bidang infrastruktur : a) Dermaga		a. Tangguh LNG akan mendukung program Pemerintah Daerah daam pembangunan infrastruktur di beberapa kampung tertentu. Teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 RKL/RPL Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-37); Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
				50-52), Pengembangan Masyarakat
	b) Perumahan rakyat		b. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
	c) Jalan tembus antara distrik Tofoi dan distrik Aroba		c. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
	Dan apabila Train 3 sudah berdiri namun permintaan masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan maka pengaduan ini kami kemanakan apakah kami ke pihak perusahaan atau ke pemerintah. Terima kasih		d. Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan kategori PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
A	**Hayatu Ritarita (Tokoh Masyarakat Kampung Sidomakmur)**			
1.	Tolong BP memperjelaskan kepada kami 3 4 ada pada PSS mana dan didaerah apakah kampung Sidomakmur – Wimro masuk dalam dampak atautidak, kalau masuk seperti apa kalau tidak seperti apa Kalau masuk jarak antara tren tersebut sampai ke bibir sungai dalam radius kilometer atau beberapa meter		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak. Daerah-daerah yang termasuk dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL. Sidomakmur termasuk dalam wilayah batas studi AMDAL. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kampong Sidomakmur sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	ANDAL BAB 1, Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Usulan: Tolong BP memperhatikan masyarakat kampung Sidomakmur-Wimro yang notabenenya nelayan kalau betul itu masuk dalam DAV		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV).	
	a) Kompensasi nelayan harus dibayar karena wilayah akan semakin sempit hasil semakin kurang dari 20 Kg akan menjadi 10 Kg bahkan menjadi 5 kg pasti terjadi		a. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada.	
	b) Pemberdayaan		b. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-37)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
	c) Kesehatan		c. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d) Pendidikan		d. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-37)
	e) Perumahan		e. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development*	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Program) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	37-48)
	f) Perluasan Kerja		f. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	g) Perluasan Usaha seperti memberi modal usaha		g. Tangguh LNG akan berupaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Tangguh LNG juga akan mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung usaha masyarakat. Tangguh LNG juga akan mendukung alat-alat pertanian untuk mendukung pertanian masyarakat. Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memajukan usaha pertanian. Namun demikian, Tangguh LNG berkewajiban untuk memastikan keberanjutan dari	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			setiap program. Pengadaan bibit dan pupuk dapat dilakukan melalui koperasi dan diharapkan masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.	
	h) Mendirikan koperasi		h. Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tangguh LNG berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan serta penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	i) Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan		i. Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	j) Penerangan		j. Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
	k) Airbersih		k. Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Kesehatan, Sub bab Air Bersih dan Lingkungan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)
A	**Rachman Fimbay, Ketua Adat Distrik Aroba**			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
1.	Saya dari tokoh adat kampung Sidomakmur Distrik Aroba, masukan kami mulai dari Tren 1 dan Tren II kami dari masyarakat kami mengalami dampak yang nyata di masyarakat kampung Sidomakmur, termasuk aktifitas Boat2 yang lalu lalang didepan kampung Sidomakmur, tapi bukan kami menuntut untuk menjadi satu tuntutan kepada BP Tangguh LNG tapi itu jadi gambaran kita bersama kedepan nanti untuk Tren 3 nanti tolong BP – Pemerintah lihat kedepan dengan program yang akan datang adalah membangun program sosial		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Rencana pengelolaan terhadap dampak-dampak yang diakibatkan oleh lalu-lalangnya boat telah tercantum di dalam Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Adapun pengelolaan social dilakukan juga melalui program-program social yang tercantum dalam Pengelolaan Sosial Tangguh.	
	a. Kesehatan		a. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Masyarakat di berdayakan		b. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	c. Pendidikan		d. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	
	e. Hak kompensasi masyarakat		c. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	f. Bantuan air bersih		g. Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Kesehatan, Sub bab Air Bersih dan Lingkungan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)
	h. Memperdayakan		d. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	i. Fasilitas umum ada jembatan jalan lintas jalan darat dari kampung Sidomakmur ke Pemerintah Distrik Aroba		j. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
	k. Besok nanti Tren Tiga nanti kami masyarakat lagi terima dampak langsung maka perlu nanti kami ada bantuan perumahan layak.		e. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50) f.
A	**Tokoh Perempuan, Distrik Aroba, Wimbro**			
1.	BP Tangguh LNG tolong memperhatikan distrik Aroba pada 4 kampung yaitu : a. Kampung Wame b. Kampung Aroba c. Kampung Yaru d. Kampung Sanggwar e. Kampung Air Terjun Ke 5 kampung ini juga dimasukkan kedaerah DAV, seSub-bab ditinjau dari dampak lingkungan terutama dampak negative melalui air dan udara		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Wame, Aroba, Yaru, Sangwar, Air Terjun tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013.	
2.	Tolong di tinjau kembali masalah a. Pendidikan		a. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18) Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18) Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34) Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	b Kesehatan		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya,	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50) Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	c. Sosial : a. Ekonomi		a. Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	
	b. Tenaga kerja		b. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	
	c. Budaya		c. Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
	d. Pembangunan dermaga		d. Tangguh LNG akan mendukung program Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di beberapa kampung tertentu. Teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	
	Jika kampung wimro dan kampung sidomakmur terkena DAV tolong perhatikan nelayan yang menggunakan penangkapan dengan cara tradisional Batas-batas mana yang harus mobilisasi BP Tangguh LNG melintas agar masyarakat nelayan tidak merasa dirugikan oleh pihak BP Tangguh LNG.		Tangguh LNG setiap hari mengoperasionalkan kapal-kapal yang melintas tidak jauh dari Wimro, namun demikian Tangguh LNG akan berusaha sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas nelayan lokal. Kapal-kapal tersebut sudah memiliki jalur tersendiri dan bukan di areal tangkapan nelayan.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Jangan kalau ada masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat dengan pihak BP Tangguh LNG masalah hak-hak dasar masyarakat pihak BP Tangguh LNG. Jangan libatkan keamanan dalam hal ini Polisi, Brimob, Angkatan Laut		Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
A	**Tahir Kamakaula, Perwakilan STIH Bintuni, Sedwan Bintuni, Tahiti Timur Bintuni**			
1.	Bp Tangguh LNG harus memperhatikan beasiswa S1 di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan gedung sekolah serta memberi bantuan perpustakaan dan komputer		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa Bagi Masyarakat Asli
2.	Sehingga kami anak-anak adat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni bisa merasakan bantuan tersebut seperti anak-anak adat 7 suku yang kuliah di luar Kabupaten Teluk Bintuni			
3.	Kami masyarakat adat 7 suku sangat khawatir suatu saat terjadi dampak negative. contoh : ketika suatu saat perbuatan manusia atau alam terus gas di train 1 dan dua ini meledak maka yang menghirup gas beracun itu bukan yang kena dampak langsung saja, tapi pasti yang tidak kena dampak langsung juga maka kami harap agar listrik2 dan kampung2 yang tidak kena dampak langsung juga mendapat bantuan atau program BP yang selama ini dilakukan didaerah yang kena dampak langsung		Sumur Tangguh LNG dirancang dengan mempertimbangkan langkah-langkah keamanan maksimum dengan menggunakan standart industry yang berlaku untuk mencegah ledakan gas dan insiden lainnya. Di samping itu, kami memiliki rencanag manajemen tanggap darurat dan krisis yang komprihensif. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV).	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendahuluan (Halaman 1-5)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
A	**Eka Wayuri, Perwakilan Masyarakat Tanah Merah Baru, Kampung Tanah Merah**			
1.	BP Tangguh LNG harus membuat beton pemecah ombak dan penanaman mangrove di sepanjang pesisir bibir pantai dan didalam untuk sungai Saengga di Teluk kembali		Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan beton pemecah ombak. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini. Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi, di beberapa kampung yang lain, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
2.	BP Tangguh LNG harus inventarisasi atau perluasan kampung Tanah Merah baru untuk pengembangan masa depan Kampung Tanah Merah		Sehubungan dengan aspirasi tentang pemekaran Kampung Tanah Merah Baru, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat tersebut. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
3.	BP Tangguh LNG harus menjaga dan melestarikan habitat keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah dampak tanah merah baru agar tetap terjaga dan stabil		Di dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Tangguh LNG mengikuti peraturan lingkungan hidup yang berlaku guna memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di mana Tangguh LNG beroperasi.	
4.	BP Tangguh LNG harus menjaga dan melindungi semua satwa liar baik di darat dan di laut agar tidak berubah dari ekosistemnya yang sudah ada dan berada pada wilayah dampak langsung Tanah Merah Baru		Di dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Tangguh LNG mengikuti peraturan lingkungan hidup yang berlaku guna memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di mana Tangguh LNG beroperasi.	
5.	BP Tangguh LNG harus membuka pagar		BP menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	penghubung LNG dan Kampung Tanah Merah sebagai bentuk pembukaan ruang pertumbuhan ekonomi keluarga (pertumbuhan ekonomi dalam industri rumah tangga)		yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh.	Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
6.	BP Tangguh LNG harus merenovasi kembali akses jalan dari tanah merah ke manggosa (bersifat permanen) sebagai bentuk penghubung pemukiman dan area mata pencaharian (menjaring dan mengolah hasil sagu) untuk kebutuhan masyarakat Tanah Merah		Sebagai bagian dari komitmen dalam proyek resettlement, Tangguh LNG telah membangun dan menyerahkan jalan setapak Manggosa kepada masyarakat Tanah merah Baru. Tanggung jawab pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
7.	BP Tangguh LNG harus memberikan Beasiswa secara merata kepada semua pelajar Tanah merah baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi didalam maupun luar negeri		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
8.	BP Tangguh LNG harus memfasilitasi pengadaan bibit, obat bantuan dan pupuk juga LNG sebagai pasar untuk petani di Area dampak, tanah Merah baru dalam penjualan hasil pertanian		Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memajukan usaha pertanian. Namun demikian, Tangguh LNG berkewajiban untuk memastikan keberanjutan dari setiap program. Pengadaan bibit dan pupuk dapat dilakukan melalui koperasi dan diharapkan masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
9.	BP Tangguh LNG harus memberikan modal usaha kepada masyarakat Tanah Merah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kampung Tanah Merah lewat program BP		Sehubungan dengan aspirasi atas modal usaha, ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, dengan membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu modal usaha masyarakat, melalui koperasi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
10.	BP Tangguh LNG harus memberikan fasilitas elektrikal listrik gratis (bebas biaya selama BP Tangguh LNG Beroperasi)		Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52),

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pembayaran listrik yang didistribusikan oleh PLN.	Pengembangan Masyarakat
11.	BP Tangguh LNG harus membangun pelabuhan atau *jetty* transportasi perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat di kampung tanah merah		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tangguh LNG berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan serta penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
12.	BP Tangguh LNG harus memberikan transportasi darat (drum truck) kepada kampung tanah merah sebagai transportasi untuk kebutuhan primer dan sekunder		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur tertentu di berbagai kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, misalnya pembangunan jetty, *walkway*, puskesmas, gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pengadaan transportasi darat berupa dump truck, namun demikian karena keterbatasan yang	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
13.	BP Tangguh LNG harus membangun sekolah SMA/SMK yang berstandar nasional dan fasilitas pendukung yang tinggi di kampung tanah merah		Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
14.	BP Tangguh LNG harus memberikan penambahan fasilitas air bersih baik sumur bor dan tangki penampung air bersih yang berskala besar dan lebih memadai		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Kesehatan, Sub bab Air Bersih dan Lingkungan. Untuk Kampung Tanah Merah, komitmen Tangguh LNG dalam proyek resettlement telah dilakukan sepenuhnya antara lain, pengadaan sumur bor dan tangki penampung air hujan.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
15.	BP Tangguh LNG harus memberikan beasiswa secara merata kepada semua pelajar tanah merah baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Pendidikan (halaman 13—18)
16.	BP Tangguh LNG harus membuka BLK atau Balai Latihan Kerja Kampung tanah merah untuk meningkatkan SDM bagi masyarkat Tanah merah		Dalam Dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh telah terdapat komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi/lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
17.	BP Tangguh LNG harus merenovasi ulang asrama pendidikan yang saat ini terbengkalai		Sebagai bagian dari komitmen dalam proyek resettlement, Tangguh LNG telah membangun dan menyerahkan asrama kepada pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan fasilitas tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
18.	BP Tangguh LNG harus menambahkan fasilitas rumah guru dan tenaga pengajar di kampung tanah merah		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17)
19.	BP Tangguh LNG harus menyediakan tenaga medis baik perawat maupun dokter yang ditetapkan di tanah merah baru adalah dokter dan perawat yang specialis dan bukan dokter praktek atau kontrak		Tangguh LNG memahami bahwa mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan. Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas penyediaan tenaga medis berupa perawat maupun dokter, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
20.	BP Tangguh LNG harus memberikan 1 speedboat dan 1 mobil ambulance untuk pelayanan kesehatan di kampung tanah merah baru		Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, dan dengan jumlah yang memadai. Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas penyediaan speedboat dan mobil ambulance, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
21.	BP Tangguh LNG harus menyediakan kapal transportasi kepada kampung tanah merah untuk wilayah teluk bintuni		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrstruktur tertentu di berbagai kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, misalnya pembangunan jetty, walkway, puskesmas, gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pengadaan alat transportasi laut berupa kapal, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
22.	BP Tangguh LNG harus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tanah merah untuk melakukan usaha industry kecil seperti pengadaan atau supply ke project BP Tangguh LNG baik dalam skala kecil atau besar		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-37)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	
23.	BP Tangguh LNG harus memperkerjakan masyarakat lokal kampung tanah merah untuk bekerja di dalam proyek LNG baik di BP Kontraktor dan mitra BP Lainnya		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lam Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29) piran 3 RKL/RPL: Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
24.	BP Tangguh LNG harus memperkerjakan kembali masyarakat lokal tanah merah yang telah selesai kontrak dari BP Tangguh LNG		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja, masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Dalam hal masa kerja pekerja sudah berakhir, Tangguh LNG akan mengembalikan pekerja ke tempat yang diakui sebagai tempat penerimaan (*point of hire*).	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
25.	BP Tangguh LNG harus mencapa angka 80 % masyarakat asli tanah merah untuk bekerja dalam proyek Tangguh LNG baik kontrak dan permanen BP		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	
26.	BP Tangguh LNG harus membayar hak ulayat laut kepada masyarakat pemilik adat yang berada di Kampung tanah merah		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sumber daya alam migas tersebut.	
27.	BP Tangguh LNG harus mengembalikan hak kepemilikan tanah ada yang dihargai 15 rupiah kepada 3 marga pemilih tanah adat karena dianggap cacat hukum		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
28.	BP Tangguh LNG harus membangun perumahan untuk kepala keluarga baru (KK) dikampung		Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum di Tanah Merah pada tahun 2002, yaitu membangun 101 rumah di tanah Merah Baru bagi masyarakat yang dipindahkan ke Tanah Merah Baru, dan membangun 26 rumah bagi masyarakat yang meminta untuk dipindahkan ke Onar. Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan di luar jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
29.	BP Tangguh LNG harus melakukan system dan transportasi bagi hasil penjualan dari hasil LNG kepada masyarakat DAVS. BP Tangguh LNG harus memberikan 2 % - 5 % bagi hasil LNG kepada masyarakat DAVS/RAV.		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas masalah hak masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pemerintah Kabupaten.	
30.	BP Tangguh LNG harus membuat rumah adat Sumuri di kampung Tanah Merah Baru		Pembangunan rumah adat sudah masuk ke dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, dalam dokumen AMDAL.“ Adanya “Rumah Adat” bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung sekitar Tangguh LNG sebagai tempat berkumpulnya pemimpin adat dan pusat kegiatan adat bagi Masyarakat Asli”	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
31.	BP Tangguh LNG harus merenovasi semua rumah adat yang berada di sekitar project LNG Tangguh LNG		Pembangunan rumah adat sudah masuk ke dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, dalam dokumen AMDAL. “Adanya Rumah Adat” bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung sekitar Tangguh LNG sebagai tempat berkumpulnya pemimpin adat dan pusat kegiatan adat bagi Masyarakat Asli”. Fasilitas apapun yang dibangun bersama antara Tangguh LNG, Pemda, dan masyarakat sudah diserahkan, selanjutnya akan menjadi tanggung jawab penerima manfaat.	
32.	BP Tangguh LNG harus segera membuat sertifikat buat tanah masyarakat Onar yang hingga saat ini belum dibuat		Sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dan Tangguh LNG pada tahun 2002, Tangguh LNG akan membantu pensertifikatan rumah dan tanah di Onar setelah ada perubahan status atas tanah di Onar. Pengurusan perubahan status tanah dari Hutan industri menjadi pemukiman menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.	
A	Fransiskus Soway, Tokoh Masyarakat Kampung Saengga, Distrik Sumuri			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
1.	Perubahan pertumbuhan bisnis lokal a. BP harus membuka peluang pasar jual untuk masyarkat kampung Saengga	III-270	a. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas sehingga masyarakat diharapkan mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraannya. Melalui kerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten).	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	b. BP harus membuka pintu pagar, LNG mengingat karena harus ada perputaran roda perekonomian untuk masyarkat kampung Saengga dan TMB dan Onar		b. BP menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
2.	Perubahan peluang bisnis	III-278	a. Tangguh LNG melihat bahwa pembangunan jangka panjang dalam bidang kewirausahaan untuk Masyarakat Asli dapat dicapai melalui keterlibatan peran Pemerintah yang lebih besar. Oleh karena itu, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan jangka panjang di bidang kewirausahaan bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	a. Kami masyarakat meminta BP harus membuka peluang bisnis kepada masyarakat kampung Saengga yang memadai			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b.Perlu ada bantuan modal usaha kepada masyarakat guna keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Saengga		b. Tangguh LNG berkomitmen bahwa keberadaan proyek Tangguh LNG harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tangguh LNG akan mengembangkan industri jasa, manufaktur, dan bisnis penunjang lain, agar secara langsung dijalankan oleh Masyarakat Asli setempat. Sebagai contoh, pengembangan usaha jasa laundry bagi para pekerja di proyek Tangguh LNG; pengembangan jasa perbaikan sarana pendukung produksi di proyek Tangguh LNG (seperti AC); dan industri lainnya. Agar usaha masyarakat dapat berkembang dan berjalan dalam jangka panjang, Tangguh LNG akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dari Masyarakat Asli setempat, pada berbagai aspek, seperti pelatihan dan pendampingan operasional; manajemen dan organisasi usaha; administrasi dan pembukuan keuangan; serta penjualan dan pengembangan pasar. Pengadaan bantuan modal usaha dapat melalui mekanisme koperasi atau bank.	
3.	a. Pembangunan gedung, PAUD dan TK Saengga. Pembangunan rumah guru 6 unit	III-300	i. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18) Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	
	b. pembangunan 1 unit PUSTU Saengga termasuk rumah medis. Menyediakan tenaga dokter yang tetap 1 orang		i. Tangguh LNG memahami bahwa mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) dengan jumlah yang memadai.	
4.	a. Harus diberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan berdaya saing tangguh. Harus diprioritaskan putra putri lokal sumuri yang harus mendapat		i. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	pendidikan yang layak bagik didalam maupun di luar negeri.		LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut.	bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	b. Harus disewa pake kepada pemilik hak ulayat masyarakat adat Margasoway		i. Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
	c. Harus ada pertumbuhan ekonomi secara global, baik di sector pertanian, perikanan laut, perikanan darat, sektro peternakan sector UMKM dan UKM dan lembaga-lembaga kecil yang ada di sekitar kampung , Saengga, TMB dan Onar		d. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat asli atau *Indigenous Enterprise Development Program (IEDP)* yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung atau *Bird's Head Businees Empowerment Program (Bird Head Business Empowerment Program)*. Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	36)
	e. Warisan budaya Margaseway, harus dilestarikan dan dilindungi, tidak bisa di pindah-pindahkan lagi oleh project Tangguh LNG		f. Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
5.	Batas wilayah studi	I-195	Batas wilayah studi telah ditetapkan di dalam Dokumen ANDAL Bab 1.	Dokumen ANDAL BAB 1, Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan
6.	Batas Waktu Kajian Dampak	I-212	Komponen lingkungan yang disebutkan disini sudah dipertimbangkan dalam kajian rona lingkungan dan evaluasi dampak dalam penyusunan AMDAL ini (ANDAL Bab 2)	ANDAL Bab 2
7.	Curah Hujan	II-2		
8.	Suhu udara	II-7		
9.	Tekanan Udara	II-9		
10.	Hidrologi dan kualitas air tanah	II-30		
11.	Morfologi dan kemiringan	II-81		
12.	Gempa bumi dan tsunami	II-83		
13.	Kualitas air sungai	II-87		
14.	Gelombang laut	II-158		
15.	Flora terrestrial	II-194		
16.	Fauna terrestrial	II-215		

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
17.	Biota perairan sungai	II-246		
18.	Biota perairan laut	II-256		
19.	Sumber daya perikanan	II-277		
20.	Jarring makanan	II-290		
21.	Mamalia dan reptilian laut	II-298		
22.	Warisan sosial budaya	II-422		
23.	Lanjutan hak ulayat adat : a. Kami masyarakat adat marga soway meminta kepada pihak BP tangguh dan pemerintah kabupaten adkan perda tentang pembayaran Hak Ulayat 2 jetty, yaitu jetty combo dan jetty produksi b. Kami masyarakat adat Marga Soway meminta kepada BP Tangguh LNG dan pemerintah daerah bahwa jetty Train 3 itu harus disewa pakaikan /dikontrakkan kepada pihak BP Tangguh LNG		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
A	Martinus Agofa, Utusan Masyarakat Kampung Onar Baru			
1.	Dilakukan pengawasan dan mengurangi pencemaran udara. Penduduk di tanah merah sangat terganggu dengan pencemaran udara akibat nyala obor	39	Evaluasi dampak parameter opasitas sudah mempertimbangkan pengalaman flaring dari operasi Kilang 1 dan 2 saat ini yang dapat dilihat pada Bab 3.3.1.2 tentang Peningkatan Opasitas, termasuk hasil pemantauan opasitas dari kegiatan operasi saat ini yang selama ini selalu memenuhi baku mutu yang berlaku. Pengelolaan Kualitas Udara terkait suar bakar dapat dilihat pada Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sub Bab 3.1 Suar Bakar antara lain dengan melanjutkan upaya meminimalkan jumlah emisi gas suar bakar yang telah berhasil menurunkan flaring secara signifikan dari tahun ke tahun.	
2.	Diperhatikan putra putri tanah merah – onar	Sub-bab III hal 46	Asrama yang dibangun di Tanah Merah Baru bukan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	yang menjadi korban relokasi. Harus membuat asrama ditanah merah	3.1.3.1	hanya untuk anak murid dari Tanah Merah Baru saja tetapi juga bias berasal dari kampung lain.	
3.	Harus membuka peluang kepada putra putri sumuri yang berijazah sarjana pada posisi-posisi tertentu	III-105 3.2.3.1	Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	
4.	- mencari alternatif lain sebagai kompensasi	III-108 3.2.3.2	Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa Bagi Masyarakat Asli
5.	- memberikan beasiswa - menyiapkan putra putri asal bintuni yang terkena dampak langsung menjadi manusia berdasi	III-300 3.3.3.7		

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
6.	a. pelayanan kesehatan bukan hanya memberi obat tetapi pelayanan bagi ibu, anak, transportasi dan perawatan bagi pasien	III 321 3.3.3.10	Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara, Pesisir Selatan Teluk Bintuni dan Distrik Kokas. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12), Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. transportasi bagi orang meninggal untuk antar/jemput dari suatu tempat ketempat yang lain		Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi air secara terbatas yaitu menyangkut transportasi yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
7.	a. masyarakat takut ketika pada saat nyala obor itu besar	III 122 3.3.1.1	a. Secara mendasar pembakaran sisa buangan gas dari "obor besar" sudah memenuhi standar baku mutu, artinya tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia.	
	b. susah untuk masyakarat mendapatkan ikan		c. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	
	d. banyak yang menderita gangguan penglihatan (mata)		b. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
8.	a. membuat taluk didepan kampung onar baru dan di jetty I dan II di Tanah merah baru b. menanam bakau di depan kampung onar	III-178 3.3.1.7	Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan talud. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini. Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di beberapa kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Sub-bab pengembangan Masyarakat
9.	- jangan orang lokal saja diperlakukan sebagai symbol. Tenaga kerja lepas jangan datang kan	III-115 3.2.3.4	Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	dari luar papua, tipe skill seperti itu banyak didaerah. Tidak ada dampak tenaga kerja karena perekrutan dan peredaran uang tidak dimanfaatkan di daerah DAVS		yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Sub-bab Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian
10.	a. bantuan beasiswa tidak tepat sasaran	III-300 3.3.3.7	a. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Sub-bab Beasiswa Bagi Masyarakat Asli

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
	b. BP Tangguh LNG harus lakukan sosialisasi dari kampung - kekampung		c. Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dika ji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Setelah dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, maka Tangguh LNG akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung di wilayah sekitar operasi, termasuk yang berada di	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			wilayah Teluk Berau.	
11.	a. BP Tangguh LNG harus memberikan bantuan modal kepada pengusaha lokal	III-270 3.3.3.3	a. Sehubungan dengan aspirasi atas modal usaha, ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, dengan membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu modal usaha masyarakat, melalui koperasi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. potensi laut udang di kampung onar harus diterima di LNG tangguh berikan peluang kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang kerja di LNG site		c. Tangguh berkomitmen untuk membuka kesempatan usaha kepada perusahaan lokal untuk terlibat dalam kegiatan Tangguh LNG. Tangguh LNG memberikan dukungan kepada pelaku usaha dari Masyarakat Asli dan Papua untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi daerah, termasuk dalam menciptakan dan membina usaha serta mengembangkan kewirausahaan. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah, anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dukungan Tangguh LNG dalam hal ini akan lebih lanjut ditentukan di dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Papua yang tercantum dalam TSP.	
	d. Bp Tangguh LNG harus menekan /membuka peluang agar investor yang masuk bekerja di LNG Site harus menjadi bapa angkat bagi pengusaha lokal		b. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Tangguh LNG mendorong kontraktor utama dalam pengaan barang dan jasa agar bekerjasama dengan perusahan lokal yang berada di Papua. Hal tersebut telah dituangkan dalam beberapa kontrak pengadaan barang dan ajasa antara Tangguh LNG dengan kontraktornya.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
12.	a. BP Tangguh LNG harus menyelesaikan kompensasi areal jetty LNG Tangguh LNG.BP Tangguh LNG jangan membangun jetty baru seSub-bab yang sudah ada membuat masyarakat menderita	III.355 3.3.3.15	a. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat. Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan	b. Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), pengembangan Masyarakat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	b. BP harus menyiapkan transportasi bagi masyarakat untuk dan dari daerah/kampung yang satu ke kampung yang lain		c. Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tangguh LNG berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan serta penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	
A	Thomas Mayera, Tokoh Masyarakat Kampung Tanah Merah Baru, Tanah Merah baru			
1.	Perubahan partumbuhan bisnis lokal Untuk menunjang pertumbuhan bisnis lokal kami minta :	III-333 III-270		

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. BP harus membuka pintu pagar untuk ketiga kampung yang terkena dampak yaitu kampung tanah merah baru, saengga dan onar		a. BP menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	b. Dibidang pertanian perikanan dan usaha2 kecil masyarakat lokal, kami meminta BP membuka peluang pasar untuk masyarakat lokal di LNG. Modal usaha untuk masyarakat lokalMengadakan alat2 pertanian, perikanan untuk masyarakat lokal Tanah Merah Baru, Saengga dan onar Menyediakan bibit obat2 pupuk dan alat semprot hama		b. Tangguh LNG akan berupaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Tangguh LNG juga akan mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung usaha masyarakat. Tangguh LNG juga akan mendukung alat-alat pertanian untuk mendukung pertanian masyarakat Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memajukan usaha pertanian. Namun demikian, Tangguh LNG berkewajiban untuk memastikan keberanjutan dari setiap program. Pengadaan bibit dan pupuk dapat dilakukan melalui koperasi dan diharapkan masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Bp Harus buka jalan darat (permanen) dari TMB, Tofoi, Saengga dan Onar		c. Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tangguh LNG berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan serta penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
2.	Perubahan peluang bisnis a. Kami meminta kepada BP membuka peluang2 bisnis bagi pengusaha2 lokal yang selama ini dibina oleh BP yang melalui koperasi-koperasi yang ada di 9 DAV dan pengusaha2 lokal seperti CX2 yang dimiliki oleh masyarakat lokal di 9 DAV	III-334 III-278	a. Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Kami mohon BP mengadakan transportasi laut bagi masyarakat di 9 DAVS, yaitu 2 buah kapal laut dan membangun dermaga permanen di 9 DAVS utara dan selatan		b. Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tangguh LNG berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan serta penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi darat dan laut bagi masyarakat.Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
A	Max Inanosa, wakil masyarakat Tofoi distrik Sumuri, Tofoi distrik Sumuri			
1.	Mengusulkan tiga (3) kampung diwilayah distrik Sumuri yaitu Materabujaya forada dan agoda yang letaknya dekat dengan kegiatan proyek LNG Tangguh LNG dalam kampung-kampung terkena dampak langsung kegiatan proyek DAVS		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013.	Dokumen ANDAL BAB 1, Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan
2.	Untuk menghindari bahaya yang akan terjadi bila keadaan laut sepanjang pesisir poryek LNG Tangguh LNG berombak maka sebagai alur transportasi alternatif mohon dibuat jalan darat dari ibukota distrik di Tofoi ke kampung-kampung dipesisir seperti tanah merah Saengga dan onar		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
3.	Pembuatan rumah layak huni di wilayah utara		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	dan selatan teluk bintuni secara bertahap sebagai wilayah yang kena dampak kegiatan proyek (sosial)		untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
4.	Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa secara lebih bertanggung jawab untuk masa yang akan datang untuk khusus wilayah terkena dampak langsung dan teluk bintuni pada umumnya		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
5.	Mengangkat tenaga-tenaga skill putera Puteri lokal Teluk Bintuni yang sudah bekerja lama di proyek menjadi tenaga permanen		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
6.	Menambah dana program pengembangan bersama masyarakat (PBM) menjadi rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap tahun bagi setiap kampung yang terkena dampak langsung		Alokasi dana pembangunan kampung akan tetap ada, namun tidak lagi dalam bentuk program CAPs, namun dalam bentuk program pengembangan kampung. Program CAPs, dan peningkatan kapasitas SDM serta Pemerintah telah berjalan selama 10 tahun, sehingga diasumsikan masyarakat dan Pemerintah telah mampu membuat perencanaan pengembangan kampung secara mandiri. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pemerintah di tingkat Kabupaten.	
7.	Pengadaan kapal ukuran sedang untuk transportasi wilayah teluk berau dan teluk bintuni		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pengadaan transportasi laut, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
8.	Bantuan dana untuk 7 lembaga adat (LMA) suku dan 1 lembaga adat (LMA) kabupaten teluk Bintuni		Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Namun demikian, kami tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
A	Lina Mentantan/Siwana, Perwakilan masyarakat Tanah Merah Baru, Distrik Sumuri Kampung Tanah Merah			
1.	Kami tokoh perempuan dari desa Tanah Merah yang telah mendapat pelatihan2 antara lain : a. Jahit menjahit b. Masak memasak c. Pembuatan kue/kerupuk d. Pertanian dll Dan kami yang telah mendapat pelatihan ini ingin agar pihak BP melakukan pembinaan kelanjutan kepada kami dengan memberikan dana atau modal usaha kepada kami		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35) Penguatan dan Pengembangan Ekonomi untuk Masyarakat Asli dan Ekonomi Skala Rumah Tangga

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
2.	a. Fasilitas sosial dan fasilitas umum BP tangguh harus memberikan fasilitas elektrikal listrik (bebas biaya selama BP Tangguh LNG beroperasi)		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendistribusian listrik kepada masyarakat. Oleh karena itu aspirasi ini sebaiknya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, termasuk masalah pembayaran ganti rugi maupun pembayaran listrik.	
	b. BP Tangguh LNG harus membangun pelabuhan atau jetty dalam skala besar, standar nasional untuk menjadikan salah satu media transportasi perekonomian yang dapat meningatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat di kampung tanah merah		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan pelabuhan/jetty dala skala besar, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut.	
3.	BP Tangguh LNG harus membangun sekolah SMA/SMK yang berstandar dan fasilitas pendukung yang tinggi dikampung tanah merah		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	
4.	BP Tangguh LNG harus memberikan penambahan fasilitas air bersih baik sumur bor air dan tangki penampung air bersih yang berskala besar dan lebih memadai		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Air Bersih dan Lingkungan. Untuk Kampung Tanah Merah, komitmen Tangguh LNG dalam proyek resettlement telah dilakukan sepenuhnya antara lain, pengadaan sumur bor dan tangki penampung	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarkat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			air hujan.	
5.	BP Tangguh LNG harus membuka pagar penghubung LNG dan kampung tanah merah sebagai bentuk pembukaan ruang pertumbuhan ekonomi dalam industry rumah tangga		BP menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh.	
6.	BP Tangguh LNG harus memfasilitasi kembali akses jalan dari tanah emrah ke (bersifat permanen) sebagai bentuk penghubung pemukiman dan area mata pencaharian (menjaring dan mengolah hasil sagu untuk kebutukan masyarakat tanah merah)		Sebagai bagian dari komitmen dalam proyek resettlement, Tangguh LNG telah membangun dan menyerahkan jalan setapak Manggosa kepada masyarakat Tanah merah Baru. Tanggung jawab pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat.	
7.	BP Tangguh LNG harus merenofasi ulang asrama pendidikan yang saat ini terbengkalai		Sebagai bagian dari komitmen dalam proyek resettlement, Tangguh LNG telah membangun dan menyerahkan asrama kepada pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan fasilitas tersebut.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Pendidikan (Halaman 12-17)
8.	BP Tangguh LNG harus menambahkan fasilitas rumah guru dan tenaga pengajar di kampung tanah merah		Tangguh LNG telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pendidikan di Kampung Tanah Merah, yang mekanisme pelaksanaanya dikoordinasikan dengan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan. Sehubungan dengan dukungan Tangguh LNG dalam bidang pendidikan, akan dibahas dalam mekanisme	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang mana prioritas pelaksanaan pembangunan kampung menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	
9.	BP Tangguh LNG harus memberikan beasiswa secara merata kepada semua pelajar tanah merah baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi didalam maupun diluar negeri		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17), Beasiswa Bagi Masyarakat Asli
10.	BP Tangguh LNG harus menyediakan tenaga medis baik perawat maupun dokter yang ditetapkan di tanah merah baru adalah dokter perawat yang spesialis dan bukan dokter praktek		Tangguh LNG memahami bahwa mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan. Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	atau kontrak.		petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas penyediaan tenaga medis berupa perawat maupun dokter, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	(Halaman 6-12)
	BP Tangguh LNG harus memberikan 1 speedboat dan 1 mobil ambulance untuk pelayanan kesehatan di kampung tanah merah BP Tangguh LNG harus menambahkan fasilitas perumahan kesehatan di kampung tanah merah		Tangguh LNG memahami bahwa mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan. Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas penyediaan speedboat dan mobil ambulance, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Abukasim Heremba (Pemerintah Distrik Kokas)				
	a. Masyarakat meminta BP memprosentasikan tenaga kerja yang bekerja di BP tersebut yang berasal dari Kab. Bintuni dan Fakfak, karena masyarakat tahu masyarakat yang ada di Teluk Bintuni mereka yang punya hasil tapi mereka hanya sebagai penonton di daerah sendiri, yang harusnya menjadi tuan di negeri sendiri		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Dampak lingkungan yang terjadi di dalam AMDAL bisa terjadi kemungkinan akan terjadi di masyarakat yang menempati daerah di pesisir pantai mungkin akan terjadi dampak lingkungan bagi masyarakat		Kegiatan pengembangan kapasitas ini dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja baik di proyek Tangguh LNG, maupun di Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Setelah dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, maka Tangguh LNG akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung di wilayah sekitar operasi, termasuk yang berada di wilayah Teluk Berau. proyek Tangguh LNG (di perusahaan lain, atau di lembaga lain). Sedangkan kegiatan pengembangan kapasitas tenaga kerja Papua di proyek Tangguh LNG, disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, dan kebutuhan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Masyarakat berharap kepada BP tentang SDM, ingin sampaikan kepada BP harus memikirkan tentang SDM yang ada di di dua kabupaten ini yaitu Fakfak dan Bintuni untuk meningkatkan SDM yang siap pakai		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Masyarakat mengharapkan kepada pihak perusahaan dapat melihat kepada kesejahteraan warga msayarakat yang ada didaerah train maupun yang jauh dari train tersebut memberikan kesejahteraan berupa tempat tinggal yang layak seperti penerangan lampu dan lain lain . Mohon ditanggapi pihak perusahaan dan pemerintah untuk melihat masyarakat yang ada ini denga keterbatasan dan ketertinggalan ini Pertemuan pertama: Arguni : 22 Mei 12 Tomage : 11 Juli Otoweri : 12 Juli 12 Kokas : 14 Juli 12 Kramomongga : 15 Juli 12		Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
Aziz Rumitom (Distrik Arandai)				
	a. Kami meminta agar distrik Arandai termasuk dalam dampak, karena wilayah Arandai tidak jauh dengan area perusahaan LNG		Distrik Aranday telah dimasukan ke dalam wilayah studi/kajian AMDAL.	Dokumen ANDAL BAB 1, Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Kami meminta kepada pihak perusahaan agar membangun satu dermaga besar di wilayah Sebyar. Meminta penyediaan alat transportasi (kapal)		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan satu dermaga, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
	c. Kami meminta kepada perusahaan supaya memangun perumahan permanen di wilayah Sebyar		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Penyediaan air siap minum		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12), Sub-bab Air Bersih dan Lingkungan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)
	- Membantu membangun sarana rumah ibadah di wilayah Sebyar Membuat jalan untuk penyeberangan ke distrik lain		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan rumah ibadah dan jalan untuk penyebrangan ke distrik lain, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
	- Penerangan lampu untuk tiap kampung di wilayah Sebyar		Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak Januari 2013, Tangguh LNG telah siap untuk memasok listrik sebesar 4 Megawatt kepada PLN untuk selanjutnya listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Membangun gedung sekolah di wilayah Sebyar		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
	- Membangun satu buah RS besar standar nasional di wilayah Sebyar Pelayanan pengobatan rutin perbulan kepada masyarakat Mendatangkan tenaga medis berskill Memberikan pelatihan kepada tenaga medis lokal Penyediaan alat transportasi kesehatan ke setiap distrik di wilayah Sebyar		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	l. Membentuk koperasi di kampung di wilayah Sebyar Memberikan pelatihan pada ibu ibu		Tangguh LNG akan mendukung penyediaan dan peningkatan jumlah, serta kapasitas koperasi atau lembaga keuangan lokal lain, agar dapat dengan mudah diakses masyarakat, sehingga dapat mendukung berjalannya bisnis masyarakat. Tangguh LNG memahami bahwa masyarakat membutuhkan dukungan keuangan sebagai modal untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan bisnis lainnya. Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi/lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	m. Memberikan fasilitas perlengkapan alat nelayan Memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi produktif		Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	n. Memberikan honor bagi aparat kampung, tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG, atau memberikan pembayaran dalam bentuk apapun kepada pihak manapun diluar ketentuan yang berlaku.	
	o. Memberikan kompensasi secara merata di masing masing kampung di wilayah Sebyar		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi di luar ketentuan hukum yang berlaku. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah.	
	p. Mengadakan kajian ulang terhadap buku AMDAL dalam setahun sekali sesuai perkembangan perubahan dan perkembangan adminstrasi pemerintahan		Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan kategori PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	q. Penerimaan tenaga kerja untuk skil di kantor BP Indonesia Penerimaan tenaga kerja di distrik Arandai dan pada umumnya di Sebyar Pelatihan tenaga kerja low skill menjadi skill di lingkungan Tangguh LNG Pemberdayaanputra putri sebyar untuk menjadi manajer di lingkungan LNG Tangguh LNG yang sudah mampu Pelatihan yang bertaraf nasional dan internasional		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial LNG, Sub Tangguh Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Taher Nauri (Kampung Kasira / Marafuar)				
	a. Memprosentasikan tenaga kerja lokal 70% dan pendatang 30% karena ini adalah hal mutlak masyarakat lokal yang mendiami kawasan Teluk Bintuni Untuk hubungan kemitraan yang menjadi mitra kerja, BP harus mengutamakan putra putri lokal dalam ketenaga kerjaan		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	b. Harpsn ke depan stratgi kerja untuk target 85% orang Papua di Tangguh LNG pada tahun 2029, harapannya jangan menunggu untuk sampai 15 tahun lagi, namun harus saat ini dilakukan perubahan		b. Tangguh LNG berkomitmen terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen AMDAL. Sampai dengan Desember 2013, total masyarakat yang berasal dari Papua sudah mencapai 54 persen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	c. BP jangan mempersulit masyarakat lokal dengan transportasi laut, darat dan udara		c. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan sarana transportasi yang memadai, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Pemda Kab. Teluk Bintuni dan staf Kemen LH memberi satu keputusan untuk BP dalam satu tahun harus bertemu kembali		d. Mekanisme pemantauan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mana laporan pelaksanaan disampaikan kepada departemen atau instansi terkait secara rutin setiap 6 (enam) bulanan. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	e. BP Tangguh LNG harus memperhatikan pendidikan mahasiswa yang ada kuliah di luar Papua Pemerintah Kab. Teluk Bintuni tidak membiayai kami mahasiswa yang dari Sub-babo, dan asrama mahasiswa di kota studi yaitu makasar, khususnya mahasiswa yang dari Kab. Teluk Bintuni		e. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Beasiswa atau bantuan pendidikan bagi mahasiswa ini diberikan tidak hanya bagi mereka yang bersekolah di perguruan tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat tetapi juga bagi mereka yang bersekolah di perguruan tinggi di luar Papua Barat dan Papua lainnya.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
	f. Pemda kab. Teluk Bintuni dan BP Tangguh LNG harus memperhatikan penerangan distrik Sub-babo, dan pengaspalan jalan di dalam Sub-babo yang belum diselesaikan		f. Pada bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN. Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Babo, misalnya pembangunan pelabuhan umum Babo, pelabuhan masyarakat serta perluasan dan peningkatan pelabuhan udara di Babo. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah Babo berada di wilayah operasi perusahaan migas lain. Sebaiknya aspirasi ini juga disampaikan kepada perusahaan migas yang bersangkutan.	
Syahrudin Rumangesan (Kepala Kampung Sekar)				
	a. AMDAL ini kami di sekitar Teluk Bintuni sekarang ini kami masyarakat sudah merasa merugikan masyarakat di sekitar Teluk Bintuni dan Fakfak Dengan AMDAL kami sekarang sudah mencari ikan karena BP telah membom laut maka kami merasa dirugikan. Kemudian habitat di sekitar perairan dengan tidak langsung hilang perlahan lahan. Pertanyaan: apakah perusahaan BP bisa memberdayakan masyarakat atau tidak?		a. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di lepas pantai melibatkan kegiatan seismik, namun demikian kegiatan seismik tersebut tidak melibatkan penggunaan bahan peledak. Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan *trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana	a. Dokumen RKL/RPL, Sub Bagian Gangguan Perikanan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pengelolaan dampak sosial.	
	b. Mengapa dari BP menyatakan bahwa Kokas tidak terkena dampak, kalau Kokas tidak kena dmapak maka BP cari pelabuhan yang lain, jangan lewat di sekitar Kokas Pihak perusahaan tolong melengkapi permintaan masyarakat di Teluk Bintuni, karena saudara di Teluk Bintuni ini menangis, jadi tolong dipperhatikan		b. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberai sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Kosmis Idoer (Kepala Kampung Salawin)				
	a. Saya sangat berterimakasih atas perhatian pemerintah daerah Kab. Fakfak dan Bintuni		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV).	ANDAL BAB 1, Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (Halaman 1-5)
	b. Saran: agar dari kegiatan penyusunan AMDAL agar tolong di list kampung kampung yang menjadi DAVS. Jangan dijadikan penonton, namun menjadi pengatur dan memimpin negerinya sendiri. Intinya tolong pemerintah Kab. Fakfak dan Bintuni melihat dan merubah dengan perbaikan SDM			
Yohanes Agofa (Kampung Onar Baru)				
	a. Pengembangan masyarakat telah berlangsung, namun hasil pertanian dan perikanan tidak berhasil karena pasar yang tidak ada begitu juga dengan transportasi dan kami mohon train ke 3 ini perlu ditingkatkan		Keberadaan lembaga koperasi di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG telah mulai berkembang. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan beberapa lembaga ekonomi, termasuk koperasi, untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, Koperasi Enenem Jaya di Kampung Arguni.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Jeti konstruksi dan keti kombo pada saat ini dari pihak BP belum koordinasi dengan marga Sowai untuk membicarakan tentang ganti rugi.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat. Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh: • Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52) • Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	c. Tempat tempat keramat, leluhur dan nenek moyang menghuni, seperti batu, beringin, pohon yang lain. Mohon pihak BP atau kontraktor dapat menghormati dan menjaga dan melindunginya. Secara adat mengakui dan disakralkan oleh leluhur masyarakat.		Tangguh LNG mendukung upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai Masyakarat Adat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Dari masyarakat Teluk Bintuni ketika kehadiran perusahaan manapun masyarakat tidak menjual beli tanah ini, karena ini milik Allah dan manusia hanya menjaganya		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
Paulus Kamisopa (Kampung Tanah Merah)				
	a. Kami masyarakat TMB meminta BP meninjau kembali TMB untuk sosialisasi kembali. Karena sepanjang pantai di Tangguh LNG sudah erosi sampai di TMB seperti pohon kayu bakar juga tanah kelongsoran		Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Tanah Merah, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) di beberapa kampung yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	
	b. Selama ini kami Tanah Merah masih kesulitan air bersih dan pendidikan		Tangguh LNG memahami bahwa air bersih merupakan kebutuhan mendasar sehari-hari bagi masyarakat. Keberadaan sumber air bersih membantu meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen untuk bekerja bersama dengan Pemerintah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Perjanjian BP dalam AMDAL tahun 2002 tidak salah pembagian penghasil adalaj yang kena dampak lansung yaitu Tanah Merah.		Dana Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
	d. Tolong BP lanjuti program masyarakat yang ada di AMDAL itu sebenarbenarnya		Saran kami terima.	
Amirudin Suaeny (Kampung Sisir / Kokas)				
	a. Penerimaan tenaga kerja dari BP maka akan mengurangi pengagguran di masyarakat.		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029,85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari :wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Untuk pemberian bantuan kepada masing masing kampung supaya merata terutama dalam pendidikan dari SD – SMA harus sama supaya jangan sampai timbul kecembuaruan sosial		b. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17)
A	**Usulan Masyarakat Kampung-Kampung Sepatuanan Raja Arguni**			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
1.	1. Perlu ada kejelasan dari pihak perusahaan terkait dengan rencana kegiatan operasional perusahaan, antara lain : .			Dokumen ANDAL BAB I: Deskripsi Kegiatan
	1.1. Jenis kegiatan operasional perusahaan (seismic, drilling dan rig, kilang, pabrik) atau jenis lainnya pada train 3;		Sebagaimana sudah pernah dilakukan sebelumnya, sebagai contoh sebelum kegiatan seismik dilakukan, Tangguh LNG akan selalu melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.	
	1.2. Kegiatan operasional perusahaan tersebut berlokasi dimana 1 apakah ada dalam _wilayah kekuasaan petuanan Raja Arguni.		Daerah operasional Tangguh LNG dapat dilihat sebagaimana yang tertulis dalam dokumen ANDAL Bab1 mengenai deskripsi project.	
2.	2. Masukan-masukan:			
	2.1. Masing-Masing Kampung a. Kampung Salawir Menurut perwakilan masyarakat Salawir, bahwa terlalu banyaknya dokmen yang disusun dan disepakati antara pihak perusahaan dengan masyarakat sehingga perlu diimplementasikan dan dikawal dokumen tersebut secara bersama. Inti dari usu)an perwakHan masyarakat adalahdana bagi hasil atau prosentasidaridana bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat.		a. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Kampung Andamata Usulan masyarakat sudah ada dalam dokumen, termasuk prosentase dari dana bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat sekitar 50% dari dana bagi hasil. .		b. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	c. Kampung Fior Perwakilan nmasyarakat Kampung fior mengusulkan : - "'Dana pendidikan dari tingkat SO sampai dengan Perguruaan Tinggi; "'Pembangunan		a. Kampung Fior Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa ini telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Sarana kesehatan; -		- Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara, Pesisir Selatan Teluk Bintuni dan Distrik Kokas. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Perbaikan ekonomi		- Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	- Perumahan rakyat;		- Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk pembangunan perumahan rakyat, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- "'Rehabilitasi total rumah ibadah.		- Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam upaya tersebut, Tangguh LNG menghormati asas partisipatif dan tidak menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten.Tangguh LNG tidak akan mengambil peran Pemerintah. Karena itu, setiap program sosial yang menjadi komitmen Tangguh LNG akan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemerintah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	a. Kampung Furir *Prosentasidana bagihasil sebesar 500,4, daridana bagi hasil diberikan kepada masyarakat;		b. Kampung Furir - Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. - Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	*Dana pendidikan dari tingkat SO sampai dengan Perguruaan Tinggi;		- Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa ini telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
	*Pembangunan Sarana kesehatan;		- Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara, Pesisir Selatan Teluk Bintuni dan Distrik Kokas. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. -	
	*Perbaikan ekonomi;		- Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	*Perumahan rakyat;		- Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk pembangunan perumahan rakyat, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
	*Rehabilitasi total rumah iabadah.		- Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam upaya tersebut, Tangguh LNG menghormati asas partisipatif dan tidak menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten.Tangguh LNG tidak akan mengambil peran Pemerintah. Karena itu, setiap program sosial yang menjadi komitmen Tangguh LNG akan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemerintah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	c. Kampung Taver *Masatah pendidikan;		b. Kampung Tawer Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa ini telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak;	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
	*Ekonomi;		- Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	*Kesehatan		- Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara, Pesisir Selatan Teluk Bintuni dan Distrik Kokas. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)
	c. Kampung Darembang Masyarakat mengusulkan agar dana bagi hasil agar dibagi perkampung		d. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	e. Kampung Arguni *Prosentasidana bagi hasil yang diberikan ke kampung adalah 50%		b. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	*Rekrut tenaga kerja diutamakan dari petuanan aja Arguni;		Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	*Dana pendidikan dari tingkat SO sampai dengan Perguruaan Tinggi;		Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa ini telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
	*Pembangunan Sarana kesehatan;		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara, Pesisir Selatan Teluk Bintuni dan Distrik Kokas. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
	*Perbaikan ekonomi;		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Perumahan rakyat;		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk pembangunan perumahan rakyat, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Kampung Goras *Kampung Goras mengusulkan agar membuat dokumen tersendiri yang difasilitasi oleh mitra perusahaan; *Dana bagihasil agar diberikan ke Kampung; *Pemberian dana bagi hasil dippertimbangkan perkembangan kedepan khususnya pemekaran kampung-kampung baru		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	b. Kampung Otoweri *Masalah dana bagihasi; *Dokumen andal urusan kampung otoweri terutama dana bagi hasil		c. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	•
	a. Kampung Tomage *Dana bagi hasil sebesar SO% diberikan ke Kampung k. Kampung Wamosa *Dana bagi hasil sebesar 50% diberikan ke Kampung		d. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
	2.2 Rangkuman a. Usulan dan masukan dari masyarakat yang terakomodir dalam dokumen hasil konsultasi publik maupun usulan tambahan yang akan ditetapkan sebagai dokumen amdal,agar terus dikawal sampai dengan implementasi kegiatan dilapangan. Untuk itu ditindaklanjuti dengan berita acara antara pihak perusahaan de-ngan masyarakat yang akan dijadikan sebagai kontrol/cek and recek terhadap dokumen kesepakatan.		a. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan kategori PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	
	b. Pemberdayaan terhadap masyarakat, antara lain pelibatan masyarakat sebagai suplayer kebutuhan perusahaan.		b. Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
A. Rasyid Fimbay, S.AP (Tokoh Masyarakat Sub-babo)				
1.	A. Distrik Sub-babo Yang Membawahi Enam Kampung wajlb Di Masukan Sebagai Salah Satu Distrik Yang Terkena Dampak Langsung, Karenanya Wajib Mendapatkan Dana Pengembangan Kampung Sebesar Rp. 300.000.000,- x 6 Kampung = Rp. 1.800.000.000,- Sebagaimana Yang Di Berikan Kepada Kampung-Kampung Lain Yang Terkena Dampak Langsung.	AMDAL Pertama Tahun 2002 Gagal, Karena Banyak Komitmen Yang Telah Di Sepakati Bersama Tidak Di Laksanakan. Contoh : Distrik Sub-babo Tidak Dimasukan Dalam Dap, Padahal Sub-babo Merupakan Penyanggah Pertama Dan Utama, Sub-babo Merupakan Termlnal Bagi Terlaksananya Proyek Kilang.	Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam upaya tersebut, Tangguh LNG menghormati asas partisipatif dan tidak menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten.Tangguh LNG tidak akan mengambil peran Pemerintah. Karena itu, setiap program sosial yang menjadi komitmen Tangguh LNG akan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemerintah.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)
	B. Disamping Dana Pemberdayaan Kampung, Maka Masyarakat Sub-babo, Masyarakat Aroba, Masyarakat Sumuri, Wajib Mendapatkan Dana Abadi.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan dana abadi, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
2.	BP wajib Membangun Rumah Ibadah Untuk Agama-Agama Yang Diakui Oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi	Bidang Sosial Keagamaan	Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	khusus Bagi Papua.		lainnya. Dalam upaya tersebut, Tangguh LNG menghormati asas partisipatif dan tidak menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten.Tangguh LNG tidak akan mengambil peran Pemerintah. Karena itu, setiap program sosial yang menjadi komitmen Tangguh LNG akan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemerintah.	bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
3.	a. BP Wajib Memberikan Beasiswa Bagi Anak-anak Teluk Bintuni Mulai Dari Tingkat SD Sampai Perguruan Tinggi. Agar Beasiswa Ini Tepat Sasaran, Maka BP Bekerja Sama Dengan Kepala-Kepala Kampung Dalam Mendata Putra-Putrinya.	Bidang, Pendidikan. Pendidikan Merupakan Sumberdaya Yang Tidak Akan Pernah Habis, Pendidikan Merupakan Tanggung Jawab Kita Semua, Baik Pemerintah Sebagai Soko Guru Maupun BP Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			• Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	
	b. Membangun SMA Unggulan Di Tiga Titik Yakni : Distrik Subabo, Distrik Sebyar Dan Distrik Sumuri Yang Dilengkapi Dengan Tenaga Pengajarnya.		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
4.	UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN : A. Masyarakat Nelayan Dilibatkan Dalam Proyek Tran 3-4 Sebagai Pekerja	Bidang Perikanan. Ketika Terjadi Mobilisasi Alat Dalam Membangun Tran 3 Dan 4 Akan Berdampak I.Angsung Kepada Aktifitas Nelayan Disekitar Proyek Tersebut. Akibatnya Menurunnya Hasil Tangkapan Dan Menurunnya Pendapatan.	Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	B. Masyarakat Nelayan Dilibatkan Sebagai Penyuplai Sembilan Bahan Pokok		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen. Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	C. Melatih Nelayan Tentang Budidaya Udang, Kepiting Dan lkan Kemudian Hasilnya Di Suplai Ke BP Tangguh LNG		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dalam Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh, telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau *livelihood* yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen. Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
5.	MENEMPATKAN : A. Kami Masyarakat Adat Ingin Ada Orang Subabo, Orang Aroba, Orang Sumuri Dan Orang Sebyar Dalam Proyek Kilang Tran 3-4 Ini Menduduki, Jabatan-Jabatan Strategis Dalam Proyek BP Tangguh LNG.	Papua Development Dalam Segala Hal. Komitmen BP Tangguh LNG Tahun 2002-2029	MENEMPATKAN : Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	B. Untuk Fice President BP Tangguh LNG Harus Orang Asli Teluk Bintuni.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
6.	A. BP Tangguh LNG Wajib Membangun Perumahan Di Subabo, Aroba, Sumuri, Dan Sebyar.	Bidang Perumahan Dan Penerangan, "Rumahku Adalah Istanaku" Rumah Adalah Sebuah Istana Yang Berfungsi Sebagai Tempat Berteduh Juga Berfungsi Sebagai Tempat Pembinaan Keluarga.	Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kewirausahaan Papua (Halaman 34-37)
	B. Karena Subabo Masuk Dalam Tahab Kedua dalam Hal Penerangan Bertenaga Gas, Maka Untuk Sementara BP Tangguh LNG Wajib Membantu Pemerintah Dalam Hal Penerangan Di Distrik Subabo Yang Gelap Sampai Hari Ini.		Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak Januari 2013, Tangguh LNG telah siap untuk memasok listrik sebesar 4 Megawatt kepada PLN untuk selanjutnya listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Bintuni dan sekitarnya.	
Abdul Rasyid Fimbay, S.AP (Tokoh Masyarakat Subabo)				
1.	Tentang Dana Bagi Hasil yang dasar pembagiannya hanya Menggunakan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, karena memang Perdasusnya belum ada. Menurut Kami Masyarakat Adat Teluk Bintuni porsi pembagian ini SANGAT AMAT TIDAK ADIL, Karena dalam Pembagian Dana Otsus Migas ini Provinsi Papua Barat Mendapatkan Porsi yang lebih besar dari Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Kabupaten Penghasil. Teluk Bintuni Sebagai Kabupaten Penghasil dalam pembagiannya harus diberi porsi lebih besar sehingga dengan porsi yang besar tersebut Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat membangun Bintuni menjadi Bintuni yang lebih bermatabat dan membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, sehingga Motto Menjadi Tuan Di Atas Tanah Leluhurnya dan Menjadi Masyarakat yang Sejahtera Di Atas K.ekayaan bukan sekedar semboyan tanpa makna. Karena itu Kami Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representatif dari kultur budaya untuk MERUBAH Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentang pembagian yang Tidak Adil menjadi Adil yaitu : Porsi yang lebih besar untuk Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Kabupaten Penghasil. DASAR ASPIRASI l. Gas Alam Cair Terbesar No. 2 di Dunia		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	terdapat di Teluk Bintuni. 2. Teluk Bintuni adalah Kabupaten Penghasil 3. Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Kabupaten Terkena Dampak Langsung atau terkena Dampak Fisik dan Sosial Budaya. 4. Yang Punya Rakyat adalah Kabupaten bukan Provinsi. 5. Pemimpin yang Berhasil adalah Pemimpin yang berhasil Mensejahterakan Rakyatnya .			
A	**ESLHAM Papua, Lembaga Studi dan Advokasi Has Azasi Manusia, Institute for Human Rights Study and Avocasy.** **Alamat : Jl. Karapangit Gewab Fakfak – kompleks Misi Dalam** **Natalis Fatubun, Sekretaris Elsham Papua, Pos Kontak Fakfak**			
1.	A. Latar belakang Wilayah Papua sampai saat ini masih dilanda berbagai macam persoalan seperti pertikaian antar suku, kasus penembakan oleh orang tak dikenal, marginalisasi masyarakat adat, pelanggaran hak azasi manusia dan kemiskinan. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut sudah dilakukan seperti membangun Papua Tanah Damai lewat dialog, memberdayakan masyarakat dan aktivis untuk mandiri dan terlibat aktif membangun Papua yang tenteram dan damai. Sampai saat ini Papua tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi dunia intenasional juga memberi perhatian yang cukup besar untuk berbagai isu yang berkaitan dengan Papua. Berbagai upaya di atas seakan jalan di tempat, berbagai bentuk kekerasan masih		• Penyusunan komitmen sosial serta arah program Tangguh LNG dilakukan dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi peraturan dan prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP-HR, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) yang mengacu pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang HAM (UDHR/ Universal Declaration of Human Right), serta prinsip-prinsip kesukarelaan terhadap HAM (VPSR/ Voluntary Principle on Human Right), serta Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.tahun 1998 Dalam mengelola komitmen sosialnya, Tangguh LNG mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang mengutamakan kerjasama dan berbagi tanggung jawab sosial	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	sering terjadi dan masyarakat kecil tidak hanya jenuh dan bosan dengan situasi ini,. tetapi juga bingung karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di tengah situasi yang kurang menentu ini, Elsham Papua masih menjadi salah satu institusi yang dipercaya, didengar dan diharapkan oleh masyarakat. Elsham Papua yang diyakini sebagai lembaga netral dan berbasis pada nilai-nilai moral serta kemanusiaan masih mendapatkan tempat dihati masyarakat. mieskipun begitu, sampai saat ini, Elsham Papua belum mampu menjawab harapan masyarakat tersebut dengan baik. Memang sangat disayangkan karena harapan masyarakat begitu tinggi Elsham Papua kurang terasa gerakannya. Padahal masyarakat sangat mengharapkan agar Elsham Papua tegas dan berpihak kepada mereka yang nota bene selama ini menjadi korban. Elsham Papua memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kedamaian belum sungguh-sungguh menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan kehadiran Elsham Papua yang peduli, solider dan bersikap tegas terhadap berbagai bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sehubungan dengan keprihatinan di atas, Perlu kami sampaikan beberapa hal. sebagai masukan. Masalah Papua tidak akan selesai hanya dengan berwacana, tetapi harus dengan tindakan yang melibatkan semua pihak dan semua orang yang berkehendak		dengan Pemerintah setempat maupun lembaga-lembaga lainnya termasuk didalamnya Masyarakat Adat, Lembaga Masyarakat Adat, LSM, dan lain-lain.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	baik. .			
	B. Tujuan 1. Membangun semangat masyarakat agar peka dan peduli terhadap persoalan sosial-politik yang ada di sekitarnya. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji masalah 3. Membentuk Tim Peduli Lingkungan hidup di Kabupaten Fakfak dan Bintuni 4. Menghadirkan LSM sebagai mitra kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.			
	C. Persoalan yang muncul 1. Masyarakat merasa ditipu dan dirugikan baik o!eh perusahaan maupun pemerintah 2. Masyarakat merasa kehilangan sumber-sumber pendukung untuk kehidupan yang lebih baik 3. Tidak dipenuhinya hak atas tanah adat dan pendidikan yang layak			
	D. Alternatif perubahan Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antar VYarga masyarakat Meningatkan pengetahuan masyarakat lokal tentang hak- hak hidupnya Pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan yang tegas dan pasti Menetapkan prosedur perijinan sesuai ketentuan yang berlaku			
	E. Langkah/cara yang diperlukan 1. Hendaknya diutamakan pendekatan budaya/kultur setempat			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat : hak-hak adat dan politik masyarkat secara terus menerus dan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. 3. Menyampaikan secara terbuka dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bukan hanya segi positifnya, tetapi juga alternatif terburuk yang mungkin terjadi agar masyarakat memahaminya. 4. Pemetaan jelas terhadap hak ulayat tanah adat khususnya di daerah Bomberay : sampai saat ini belum nampak tapak batas antara suku lrarutu dan suku Mbaham. 5. Adanya kerja sama yang baik dan erat dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat baik di Kabupaten Bintuni maupun Kabupaten Fakfak. 6. Membangun kerja sama dengan semua pihak terkait. 7. Rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan pada warga sekitar kegiatan.			
	F. Hal yang perlu dihindari 1. Diusahakan prinsip utama "musyawarah - mufakat" sehingga pemerintah atau perusahaan tidak perlu datang bersama aparat (TNI-POLRI) untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat, apalagi memaksakan kehendak sepihak.. 2. Menyepelekan masyarakat asli, sehingga lahirnya terpinggirkan. Berilah kesempatan agar mereka menjadi tuan di			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	negerinya sendiri. Akhirnya terima kasih atas kesempatan yang telah dipercayakan kepada kami untuk lebih meningkatkan kerja kami di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Fakfak dan Bintuni.			
Dwi Yanto (Tokoh Pemuda Kampung Sidomakmur)				
	Dampak hipotetik tentang ekonomi mengenai distrik Aroba dan khusus sidomakmur dan Wimro yang berdekatan. Jadi masyarakat saran dan masukan kepada dewan komisi penilai AMDAL memohon agar usulan masyarakat diperhatikan diantaranya: a. Program peningkatan kesempatan kerja yang paling penting untuk masyarakat bagaimana pemerintah dan perusahaan BP bisa membantu saudara saudara gerakan putra putri Papua meningkat kualitas SDM yang tangguh, berkualitas dan berdaya saing. Khusus distrik Aroba di kampung Sidomakmur, sekolahkan masyarakat dalam pendidikan di dalam sampai di luar sehingga saudara saudara kami bisa duduk di perusahaan		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	
	b. Gangguan kegiatan perikanan mengingat distrik Aroba dan kampung Sidomakmur dan Wimro mayoritasnya nelayan 95% maka dampak selama ini resahkan masyarakat sangat hipotetik tentang lingkungan. Maka ingin kami sampaikan dan meminta dewan		b. Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG –

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	komisi AMDAL pedulikan nelayan kami ini bina dengan baik melakukan program program peningkatan usaha kecil dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bernilai ekonomis dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan wadah koperasi		masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	c. Gangguan aksesibilitas transportasi laut dari lingkup aspek distrik Aroba khususnya kampung Wimro dan Sidomakmur dimana aktifitas kegiatan kegiatan BP Tangguh LNG setiap kali melintas di depan kampung Sidomakmur maka hal ini kami wakil masyarakat sidomakmur mohon dengan sangat supaya lalulintas perlayaran jangan smapai menggangu nelayan kami		c. Tangguh LNG akan memasang rambu laut untuk menuntun setiap kapal dalam melakukan mobilisasi sehingga tetap aman bagi keselamatan dan diusahakan untuk tidak mengganggu kegiatan nelayan. Tangguh LNG juga menerapkan aturan khusus lalu lintas di laut kepada seluruh karyawannya, yang mengutamakan keselamatan masyarakat di laut	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagi Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	d. Peningkatan pertumbuhan bisnis usaha dan hal ini saya mohon saran dan usulan pada dewan komisi agar membina para perempuan melalui usaha kecil dalam program peningkatan ekonomi kerakyatan dalam sektor pertanian dan perikanan seperti dalam bidang koperasi serta program PKK untuk perempuan		d. Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	
	e. Kami perwakilan tokoh pemuda meminta dengan sangat hormat kepada dewan komisi aspirasi untuk: 1. Pembinaan para pemuda pemudi agar supaya da pembinaan yang positif dalam ketenagakerjaan dan SDM nya. Hal ini sangat penting di kampung Sidomakmur, oleh seSub-bab itu saya meminta agar sarana prasarana lapangan olahraga yaitu lapangan bola serta lapangan basket serta badminton		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (halaman 37-48)
	2. Sektor pendidikan dalam hal ini kami meminta khusus distrik Aroba setiap kampung mengambil 3 orang untuk diberi pendidikan di luar staf BP tersebut sebagai engginer		2. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	3. Sektor kesehatan kita melihat aspek kehidupan masyarakat distrik Aroba dan kampung Sidomakmur ini agar diberi doktor setiap kampung yang terkena dampak		3. Bidang Kesehatan: Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.1 Kesehatan (halaman 6—12)
	f. Infrastruktur di kampung Sidomakmur saya meminta:			
	1. Aspek pelabuhan / dermaga karena sangat penting untuk akses lalu lintas kampung		1. Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh
	2. Penerangan / listrik masuk kampung saya meminta agar bernilai ekonomis		2. Sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pelanggannya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Di samping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 2-3)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Teluk Bintuni. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, termasuk SKK Migas dan ESDM untuk membahas alokasi gas untuk listrik di Papua Barat. Tangguh LNG berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati fasilitas listrik.	
	3. Peningkatan perbaikan perumahan lingkungan dan penyekatan perumahan dan permukiman kampung sidomakmur		3. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
	4. Air bersih dimana selama ini kampung Sidomakmur tergantung dari air hujan		4. Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di beberapa kampung tertentu.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.5 Air Bersih dan Lingkungan (Halaman 12-13)
	5. Sektor ibadah / keagamaan dalam hal ini mengingat di kampung Sidomakmur yang menganut agama islam mayoritas		5. Pembangunan dan renovasi rumah ibadah telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Rencana Pengembangan Masyarakat). Ke	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	90% muslim, maka kami meminta sarana dan prasarana ibadah dibangun dengan baik		depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah dan infrastruktur lainnya melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	Tangguh LNG Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
	6. Sektor tata ruang kampung Sidomakmur saya usulkan agar supaya mendata program pemerintah agar bisa memperluas area pemukiman kampung yang selama ini selalu kumuh		6. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
	7. Berikan dana aspirasi buat kami agar bisa kampung kita bisa makmur dan SDM yang tangguh		7. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	8. Peta kampung Sidomakmur dan Wimro perlu di refisi dikarenakan terbalik. Yang bernar kampung yang diluar peta yaitu kampung Sidomakmur , dan kampung kampung yang didalam yaitu kampung Wimro. Dalam kampung Sidomakmur di peta masyk dalam DAVs, namun data untuk kampung Sidomakmur belum masuk. Tidak ada data. Dalam buku AMDAL tolong diperbaiki dan direvisi kembali dan dengan sangat kepada dewan komisi mendata kembali wilayah serta jumlah penduduk serta mata pencaharian tolong kembali data baru agar bisa masuk daerah DAVSs dengan jelas		8. Peta Batas Wilyah Studi Sosial sudah tepat dan apabila dibutuhkan, pihak Tangguh LNG akan menjelaskan secara verbal.	Dokumen ANDAL Bab I – Pendahuluan Peta I.10. Batas Wilayah Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Abdul Rahman Kastela (Kampung Goras Distrik Kokas Kab. Fakfak)				
I.	Keberadaan Kampung Goras sekarang sudah pemekaran dan menjadi 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Goras sendiri dengan jumlah KK 55 dan 203 jiwa orang serta Kampung Goras Selatan sudah dilaksanakan pengangkatan CARATEKER Kepala Kampungnya dan BAPERKAM tetap oleh Kepala Distik Kokas dan sudah diketahui. SK Kampung Goras Selamn sudah diterbitkan Bupati Fakfak Bulan Juli 2012 dan Belum di definitifkan dikarenakan Anggraran. Untuk Menghindari kecemburuan sosial sehingga berpotensi konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan antara kepala kampung dangan Kepala Kampung maka diharuskan Kampung Goras Selatan sebagai Kampung yang terkena proses AMDAL. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat maka keberadaan Kampung Goras dan Kampung Goras Selatan masing-masing harus dibuat 2 (dua) masukan hasil Konsultasi Publik Sendiri.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
1.	Usulan Bidang Pendidikan : a. Bantuan Tenaga Guru Pengajar 2 {dua) Orang.		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Pembuatan Gedung TK Lengkap Dengan Peralatan Belajar Serta Pengajarnya.		Tangguh LNG memahami bahwa masalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan Tangguh LNG berkomitmen untuk mendirikan sekolah unggulan di Distrik Kokas.	
	g. Pembuatan Gedung Perpustakaan Sekolah, Pengadaan kurang lebih 20 Unit Komputer serta Fasilitas Internet Untuk Sekolah.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat.	
	c. Guru Agama dan Guru Olah Raga.		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	h. Perlu Adanya Perhatian Khusus Untuk Anak-Anak Yang Putus Sekolah sehingga perlu diadakan pengikut sertaan kursus di BLK.		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	
	d. Perusahaan Tiap Tahun Harus Membiayaan 10 siswa Mengikuti Pendidikan Setingkat SMA Dan Perguruan Tinggi Kaitan Dengan MIGAS DICEPU.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan dari Kabupaten Fakfak ke Sekolah Migas di Cepu. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 11 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli	
	i. Asrama Untuk SLTP Dan SMU di Kokas dan Bomberai.		Jawaban untuk g., h., i., Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	j. Pembangunan MCK Untuk sekolah.		Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan satu sekolah unggulan di Distrik Kokas.	
	k. Bantuan 2 Unit Solar Sell/Genset Untuk Sekolah.			
2.	Usulan Bidang Kesehatan : a. Penambahan Tenaga Perawat Mantri dan Bidan.		Bidang Kesehatan: Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.1 Kesehatan (halaman 6—12)
	b. Rehab/Membangun Baru Pustu dan Pengadaan Alat Medis Yang Memadai.		Jawaban untuk poin b., c., d., e., f., g., Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, dan dengan jumlah yang memadai Tangguh LNG juga akan menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat setempat agar dapat lebih memahami dan melaksanakan cara hidup yang bersih dan sehat; serta menghindari perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan munculnya penyakit Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam memberikan program bantuan pendidikan di bidang kesehatan (seperti kedokteran, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya) kepada Masyarakat Asli setempat, dan masyarakat Papua.	
	c. Pembangunan Rumah Perawat.			
	d. Adanya Perhatian Untuk Bayi Balita Penderita Gizi Buruk Dan lbu Hamil Untuk Penambahan Perbaikan Gizi.			
	e. Pangadaan Peralatan Posyandu, seperti : Timbangan, Kursi, Meja, Gelas, Piring, Sendiri, Mangkok, Termos Nasi, Ceret Air, Kompor Panel, Wajan dan Baskom.			
	f. Bantuan 2 (dua) Unit Solar Sell Untuk Pustu.			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	g. Bantuan 1 (satu) Unit Komputer, Printer dan Kamera Digital.			
3.	Usulan Bidang Perikanan : a. Bantuan Dana Untuk Kegiatan Nelayan.		Jawaban untuk poin a., b., c. Bidang Perikanan: Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	b. Pelatihan dan Praktek Budidaya Udang, lkan dan Kepiting.			
	c. Pengadaan Alat Tangkap, Motor Jonson dan Katinting Tiap Kepala Keluarga.			
	d. Pengadaan Bodi Perahu Fiber			
4.	Usulan Bidang Pertanian : a. Pembuatan Green House Untuk Menunjang Kegiatan Pertanian.		Jawaban untuk poin a., b., c., d., e., Bidang Pertanian: Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	b. Santuan Dana Pertanian.			
	c. Tenaga PPL dari Pemerintah.			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	d. Pelatihan Pasca Panen Untuk Hasil Pertanian seperti Singkong, Ubi dan Pisang. e. Bantuan Untuk Memasarkan Hasil Pertanian Keluar Kampung.			
5.	Usulan Bidang Koperasi : a. Bantuan Modal Minimal 50 (lima) Puluh Juta Rupiah Untuk Koperasi (UBSP) Kampung dan Pembinaan Untuk Usaha Produktif seperti Kios, Penjualan lkan, Udang dan daging Rusa (Butuh Frizer dan Kul Box) b. Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Meja, Kursi dan ATK. c. Bantuan Transportasi yaitu 1 (satu) buah Perahu Fiber dan Jonson 40 PK dalam Menunjang Usaha.		Bidang Koperasi: Keberadaan lembaga koperasi di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG telah mulai berkembang. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan beberapa lembaga ekonomi, termasuk koperasi, untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, Koperasi Enenem Jaya di Kampung Arguni.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
6.	Usulan Kaum Perempuan : a. Persetaraan GENDER b. Simpan Pinjam Perempuan Mengenai Bantuan Modal Berupa Uang Simpan Pinjam c. Pelatihan-Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.		Jawaban untuk poin a., b., c., Bidang Pemberdayaan Perempuan: Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
7.	Usulan Kampung : a. Dipercepat Status Kampung Goras Selatan sebagai Kampung Sasaran Dengan Proses AMDAL Yang Harus Ditetapkan Pemerintah Dan Perusahaan sebagai Kampung Dampak Lingkungan.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
	b. Peningkatan Kesempatan-Kesempatan Bisnis bagi CV/Koperasi Dari Kampung untuk ikut serta dalam kegiatan Perusahaan.		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	
	1. Pipanisasi untuk Air Bersih.		Jawaban untuk poin 5., 6., 7., 8., Tangguh LNG memahami pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala	
	2. Tambatan JETTY di Kampung Perlu ditingkatkan dari Kayu ke Beton permanen. Pembuatan MCK Untuk setiap Rumah Warga. Pembuatan Pasar Kampung.			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	3. Perhatian Untuk Petugas Masjid/Tokoh Agama di Kampung. Bantuan Dana Untuk Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Baik Diluar dan Dalam Kampung.		menengah, dan besar Tangguh LNG berkomitmen untuk menyerap produk lokal masyarakat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan secara maksimal sesuai kebutuhan pangan pada masa konstruksi dan operasi Tangguh LNG.	
	4. Pembuatan Sanggar PKK dan Pengadaan Peralatan PKK.			
	5. Hasil Pertanian Dan Perikanan Harus Diambil Oleh Perusshaan. Perusahaan Memperhatikan masyarakat Nelayan, Petani Dengan Melakukan Pelatihan-Pelatihan Di Luar Kabupaten/Kota.		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bagi Masyarakat Asli. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar. Selain itu, Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
	9. Pemberantasan Buta Aksara.		Program pemberantasan buta aksara dan huruf (literasi) adalah bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, Tangguh LNG akan mendukung setiap upaya pengembangan SDM termasuk di dalamnya program literasi. Melalui kerjasama dengan Universitas Cendrawasih, Tangguh LNG telah melaksanakan program pemberantasan buta huruf hingga di kampung Otoweri dan Tomage.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Ke depan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, program tersebut akan diperluas hingga ke kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG lainnya.	
	6. Perlu Adanya Agen BBM Bersubsidi di dalam Kampung, sehingga Masyarakat Tidak Kesulitan/sengsara terus untuk membeli BBM yang mahal seperti Harga lndustri.		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	•
	10. Apabila dikemudian hari ada pemekaran kampung maka, Kampung tersebut harus memiliki Dampak Lingkungan tersendiri tanpa bergabung dengan Kampung lnduk.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
	7. Masyarakat Kampung belum paham dengan kegiatan perusahaan dan perlu diperbanyakkan adanya Sosialisasi.		Sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh termasuk rencana pembangunan Kilang LNG 3 pada tahap awal dan rencana pembangunan Kilang LNG 4 pada tahap pengembangan selanjutnya telah dilakukan sebagai bagian dari proses AMDAL, yaitu pada Konsultasi Publik yang dilakukan di wilayah Bintuni dan Fakfak pada Mei-Juli 2012.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Rencana pengembangan ini juga telah disampaikan pada saat Rapat Komisi AMDAL Tangguh LNG di Bintuni pada tanggal 5 Desember 2013 dan Rapat Lanjutannya pada 18 Februari 2014.	
	11. Permintaan Masyarakat ADAT Kampung Goras dan Goras Selatan Agar Sebelum Konstruksi, Perusahaan Berkewajiban Membayar Dana Pemberdayaan **ADAT BUKA PINTU**.		Tangguh sangat menghargai adat, termasuk hak-hak masyarakat adat, namun, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui tuntutan masyarakat terkait kompensasi bagi masyarakat adat, mengingat posisi Tangguh LNG sebagai kontraktor kontrak kerja kama yang terikat dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas tuntutan tersebut. Hal ini menjadi kewenangan dari dan oleh karena itu, sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1 Pendahuluan (Halaman 2)
	8. Dana PBM Kampung Harus Disamakan Dangan 9 (sembilan) Kampung DAVS di Teluk Bentuni.		12. Alokasi dana pembangunan kampung akan tetap ada, namun tidak lagi dalam bentuk program CAPs, namun dalam bentuk program pengembangan kampung. Program CAPs, dan peningkatan kapasitas SDM serta Pemerintah telah berjalan selama 10 tahun, sehingga diasumsikan masyarakat dan Pemerintah telah mampu membuat perencanaan pengembangan kampung secara mandiri. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui musrenbang, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
Moh. Husen (Petuanan Raja Arguni)				

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	a. Dokumen hasil konsultasi publik tanggal 16 Juli 2012 yang meuat tentang usulan dan masukan masyarakat petuanan raja arguni rentan menambah masalah dari masing masing kampung tanggal 30 november agar dimsaukan kedalam dokumen AMDAL kegiatan pengembangan BP Tangguh LNG train 3		a. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik, masukan dari para ahli di bidang sosial telah masuk dalam dokumen KA ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua aspirasi masyarakat yang disampaikan selama proses penyusunan AMDAL, termasuk salah satunya permintaan untuk dilakukannya pemetaan batas wilayah ulayat adat.	Dokumen ANDAL Bab I – Pendahuluan Dokumen RKL/RPL sub bagian Gangguan Perikanan Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh (halaman 1-51) Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
	b. Perlu penjelasan dari pihak perusahaan kaitannya dengan rencana pengembangn train 3, terutama kejelasan wilayah operasinya		b. Pengembangan Train 3 dan 4 telah terdapat dalam dokumen ANDAL Sub-bab I	
	c. Apakah pengembangan train 3 ada kaitannya dengan train 4		c. Pengembangan Train 3 dan 4 telah terdapat dalam dokumen ANDAL Sub-bab I	
	d. Perusahaan perlu memperhatikan wilayah kerja nelayan berhubungan dengan pengembangan train 3		d. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas dan operasi Tangguh LNG telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	e. Jika pengembangan train 3 disatukan dengan train 4, maka diperkirakan daerah daerah di petuanan raja arguni terkena dampak langsung. Jika terkana dampak langsung maka daerah bukan lagi DAVS, tapi dampak langsung, sehingga perlu diperhatikan usuan tentang prosentase dana bagi hasil diberikan kepada mayoritas setiap kampung		e. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	
	f. Masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana serta perumahan rakyat merupakan permasalahan pokok masyarakat terutama perbaikan ekonomi yang harus mendapat perhatian dari pihak perusahaan dan di jadikan program prioritas		f. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	
Abraham Wekaburi (Tokoh adat Bintuni)				
	a. Pendidikan: - BP harus membangun sekokah Migas di		Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Kab. penghasil - Tingkatkan SMK yang ada di bintuni menjadi setingkat politeknik dengan segala jurusan yang dapat menunjang masyarakat teluk bintui - Bantuan operasional skeolah seperti bus sekolah		SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub Bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)
	b. Kesehatan: - Jadikan RSUD menjadi RS rujukan		Tangguh LNG memahami bahwa kesehatan masyarakat belum sepenuhnya mencapai keadaan dan standar yang baik. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Bentuk dukungan akan dituangkan dalam mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan dan dokter yang berkualitas.Tangguh LNG memahami bahwa cita-cita untuk memberikan membangun kewirausahaan jangka panjang pada Masyarakat Asli setempat tidak akan dapat dicapai tanpa keterlibatan Pemerintah yang signifikan. Untuk itu, dalam menerapkan program ini, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah untuk membuat dan	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Halaman 6)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			melaksanakan kebijakan terkait pengembangan usaha jangka panjang Masyarakat Asli.	
	a. Sosial ekonomi - Peluang untuk pengusaha lokal, jangan ada diskriminasi, bantu mereka kalau ada kekurangan		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
	c. Hak masyarakat adat: - DBH harus dibagi kepada masyarakat adat dalam rumah adat Bintuni, kemudian diputuskan DPR/MRP dalam bentuk regulasi kabupaten/provinsi ke pusat agar segera bayar hak masyarakat adat sesuai: 1) Hak marga, 2) Hak suku, 3) Kabupaten penghasil, 4) Kab. bukan penghasil dan 5) Provinsi		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	b. Korban investasi: - Masyarakat penduduk kampung Tanah Merah sebagian yang berkorban karena berpindah ke lokasi baru dalam jangka waktu 10 tahun.		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	a.

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Rona lingkungan dimana anjungan lepas pantai juga terkena larangan ini harus dibayar dari sejak anjungan dibayar sampai dengan selesai		Ketentuan hukum yang berlaku, mensyaratkan ditetapkannya wilayah terlarang dan terbatas atas fasilitas anjungan lepas pantai. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi keselamatan semua pihak dari potensi bahaya yang berasal dari fasilitas anjungan lepas pantai dibangun yang sehubungan dengan dan untuk kepentingan Tangguh LNG. Penetapan wilayah terlarang terbatas tersebut, tidak mengurangi hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal bottom-net trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada.	
	- Yang akan terkena dampak bukan hanya 9 DAVs, melainkan kawasan teluk bagian atas juga harus ikut mendapatkan bantuan		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013.	
	- 5 tahun tanah bangunan kilang apakah ada status sewa bangunan kilang atau tidak		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban pembayaran sewa atas tanah tersebut.	b.

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Penataan regional asal silsilah turunan dan tapal batas masing masing marga dan suku		Masalah tapal batas antara suku bukan merupakan kewenangan Tangguh LNG. Sebaiknya hal ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah.	
	Beri dana stimulan kepada tokoh adat, agama dan juga membagi fasilitas sarana 7 suku		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG, atau memberikan pembayaran dalam bentuk apapun kepada pihak manapun diluar ketentuan yang berlaku.	
Mawan Wicaksono (Biro Hukum KLH)				
	a. Disebukan bahwa tahap awal salah satunya adalah pembangunan satu kilang baru (kilang 3). Pada paragraf terakhir disebutkan bahwa "laporan vorwata diperkirakan mengandung 75% dari total sumber daya gas yang ada dan saat ini tengah produksi untuk memasok gas ke kilang LNG 1, kilang LNG 2 dan sebagian kilang LNG 3". Pertanyaan: apakah kilang 3 sudah dibangun atau belum? Karena pernyataan dari 2 kalimat pada paragraf diatas sangat bertolak belakang .	ANDAL I – 3 I – 6 ANDAL RKL RPL	Mekanisme pembagian saham juga bukan kewenangan Tangguh LNG untuk mengaturnya. Dalam peraturan (UU no 17 tahun 2012) disebutkan adanya masyarakat yang terdampak ; masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan AMDAL yang mana dampak tersebut biusa berupa dampak teknis atau sosial. Masyarakat di utara dan fakfak juga diprakirakan terkena dampak dari platform.	
	b. Pembangunan kamp untuk sekitar 2000 orang dan fasilitas pengelolaan air limbah. Mohon dijelaskan kembali fasilitas pengelolaan air limbah ini untuk apa? Air limbah domestik atau tidak?		IPAL merupakan instalasi pengolahan air limbah domestik. Air limbah domestik akan diolah dalam IPAL agar air limbah dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan izin pembuangan limbah cair sebelum air limbah domestik yang telah diolah tersebut dapat dibuang ke laut.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	c. Banyak sebutkan singkatan singkatan atau istilah yang dipakai dalam dokumen. Mohon dibuat daftar istilah dalam dokumen agar lebih jelas		Daftar istilah telah dilengkapi di dalam dokumen perbaikan	
	d. Dokumen ANDAL dan RKL RPL ini diajukan oleh BP berau Ltd. Oleh karena itu BP berau Ltd sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengembangan Tangguh LNG. Tetapi dalam dokumen RKL RPL, masih disebutkan bahwa pelaksana adalah Tangguh LNG LHE dan sebagian ada yang menyebutkan kontraktor. Mohon dalam dokumen RKL RPL, pelaksana kegiatan diganti dengan BP berau Ltd		BP Berau Ltd adalah pemrakarsa dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini. Tangguh LNG mengolah gas alam yang berasal dari unitisasi tiga Kontrak Kerja Sama ("KKS"), yaitu KKS Berau, KKS Muturi dan KKS Wiriagar ("KKS Tangguh"). BP Berau Ltd. ("BP") ditunjuk sebagai operator untuk mengoperasikan Tangguh LNG, untuk dan atas nama seluruh pemegang partisipasi interest di KKS Tangguh ("Mitra Usaha Tangguh"). Saat ini Mitra Usaha Tangguh terdiri dari beberapa badan usaha seperti tercantum pada ANDAL Bab I, Tabel I-1. Dalam pelaksanaan proyek ini, Tangguh LNG akan dibantu oleh kontraktor konstruksi sebagai pelaksana kegiatan konstruksi Proyek Pengembangan Tangguh LNG	
	e. Lingkup kegiatan dalam dokumen ini harus jelas dalam dokumen RKL RPL di sebutkan bahwa lingkup kegiatan ini adalah kegiatan eksplorasi gas, kegiatan transmisi gas, kegiatan kilang LNG dan kegiatan terminal khusus. Tetapi dalam dokumen ANDAL (I-16) ada deskripsi mengenai kegiatan eksplorasi lapangan gas		Program Penilaian dan Eksplorasi Lapangan Gas yang tercantum dalam dokumen ANDAL hal I-16 adalah bagian dari kegiatan tahap pra konstruksi untuk kegiatan eksploitasi gas. Program ini terkait dengan rencana pengeboran yang akan dilakukan sebagai bagian dari tahap pengembangan tahap selanjutnya yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini.	
	f. Lokasi pengelolaan & pemantauan harus didetailkan kembali. Contoh: jangan hanya menyebutkan kampung kampung yang dekat dengan lokasi anjungan		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena damKajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.pak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Oleh karena itu, penyebutan nama wilayah administratif secara khusus tidak relevan dalam menentukan wilayah pengelolaan dan pemantuan.	
Tujuh Kampung : Taroi, Pera Pera, Tambanewa, Sorondauni, Rimbitoto, Pera Pera Barat, Kapunggo				

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	System masyarakat pribumi papua khususnya didaerah pesisir pantai yang teguh memegang hukum adat istiadat dengan mempertahankan system budaya leluhur. Dengan adanya pemekaran daerah, dan masuknya perusahan BP Tangguh LNG maka pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab semua pihak. Papua sebagai satu kawasan yang memiliki potensi kekayaan alam terkaya di asia pacific dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Potensi sumber daya alam ini belum sepenuhnya di kelola secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua pada umumnya dan khususnya masyarakat sebyar (masyarakat distrik taroi yaitu daerah penghasilan gas alam). Hal ini di buktikan masih banyaknya masyarakat tujuh kampung yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sungguh sesuatu yang tragis kemiskinan justru terjadi didaerah penghasil uang. Dilihat dari potensi yang sangat besar nilainya inilah harus ada alokasi dana secara khusus untuk meningkatkan pengembangan masyarakat melalui BP Tangguh LNG. Sesuai perkembangan kebutuhan yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Papua selain kaya dengan sumber daya alam, sesungguhnya juga merupakan wilayah yang kaya akan keaneka ragaman budaya adat istiadat. Maka tentunya perlu di jaga dan dilestarikan terutama wilayah kami. Namun akankah itu akan jadi kenyataan mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat selalu terus menerus mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan yang terus berjalan. Upaya pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam uu. Otonomi khusus (OTSUS) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua pada umumnya dan pada khususnya masyarakat tujuh kampung. Pelaksanaan program untuk perusahan bp tangguh, hanya belum mentaati akan perundang-undangan yang berlaku serta aturan adat istiadat		Tangguh LNG ke depan akan melakukan pengembangan masyarakat di segala aspek (kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, keamanan, dll) dengan didasarkan pada karakter lokal masyarakat; berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam, potensi masyarakat, dan nilai sosial budaya masyarakat.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Program Kerja				
I.	**Bidang Sosial Dan Ekonomi** Bersama bp tangguh di bidang ekonomi kesejahteraan masyarakat secara khusus taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, dan kapunggo. Dengan hal ini tersebut maka kami masyarakat tujuh kampung mengusulkan :		Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL	Dokumen ANDAL Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial
1.	Anggaran biaya PBM yang tadinya 300 juta pertahun dinaikan menjadl 1.000.000.000,- (satu milyar) per-tahun perkampung dari ketujuh kampung. Dan apabila di kemudian hari ada pemekaran maka akan berhak menerima dana PBM yang sama.		Alokasi dana pembangunan kampung akan tetap ada, namun tidak lagi dalam bentuk program CAPs, namun dalam bentuk program pengembangan kampong. Program CAPs, dan peningkatan kapasitas SDM serta Pemerintah telah berjalan selama 10 tahun, sehingga diasumsikan masyarakat dan Pemerintah telah mampu membuatperencanaan pengembangan kampung secara mandiri. Oleh karena itu, kontribusi Tangguh LNG dalam pembangunan kampung-kampung sekitar proyek, dilakukan melalui musrenbang, yang kemudian disepakati dan diputuskan bersama Pemerintah di tingkat Kabupaten. Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
2.	Biaya siswa TK, SD, SMP, dan SMA, PERGURUAN TINGGI perbulan di biayai oleh bp tangguh dengan tidak mengurangi dari dana bagi hasil.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli.	
3.	Rumah sangat istimewa (RSl) karena kampung penghasil gas alam.		Pemda Teluk Bintuni dan Tangguh LNG telah mengadakan kesepahaman untuk melakukan kajian atas kelayakan program perbaikan/penataan rumah di Distrik Weriagar dan Distrik Tomu. Bentuk dan pelaksanaan program ini akan sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran baik di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG. Apabila hasil kajian ini menunjukan bahwa program perbaikan/penataan rumah layak untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG, maka pelaksanaan program ini akan dilakukan dan berakhir selama konstruksi Tangguh Train 3. Program perbaikan/penataan rumah ini merupakan bentuk partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni serta sebagai dukungan terhadap Pemda Teluk Bintuni dalam melanjutkan dan mempercepat pelaksanaan penataan rumah bagi Masyarakat Asli di Distrik Weriagar dan Distrik Tomu. Program perbaikan/penataan rumah ini direncanakan untuk Masyarakat Asli di Distrik Weriagar mengingat adanya beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut: 1) bahwa penataan perumahan di Distrik Weriagar telah menjadi rencana prioritas Pemda Teluk Bintuni disebabkan terjadinya abrasi yang parah yang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mengakibatkan pengikisan lahan perumahan; 2) bahwa Distrik Weriagar berada di dalam wilayah kerja Tangguh LNG dimana Tangguh LNG telah melakukan kegiatan eksplorasi; dan 3) di masa yang akan datang kemungkinan Tangguh LNG akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan exploitasi. Program perbaikan/penataan rumah juga direncanakan untuk Masyarakat Asli di Distrik Tomu dengan pertimbangan antara lain bahwa: 1) Distrik Tomu berada di wilayah kerja Tangguh LNG dimana Tangguh LNG telah melakukan kegiatan eksplorasi; dan 2) Lokasi perumahan Masyarakat Asli di Distrik Tomu terletak di wilayah yang bersentuhan dengan wilayah kerja Tangguh LNG sehingga ada kemungkinan Tangguh LNG melakukan kegiatan di Distrik Tomu yang dapat menunjang kegiatan explorasi dan exploitasi.	
4.	Kesehatan masyarakat di biayai oleh bp tangguh		Bidang Kesehatan: Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.1 Kesehatan (halaman 6—12)
5.	Pembagian hasil bagi DAVs penghasil lebih besar dari pada DAVs yang lain		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
6.	Tangguh LNG pantai untuk menjaga erosi,		Jawaban untuk nomer 6 dan 7	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	abrasi, dan pengikisan air laut		Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Taroi, sejak tahun 2010-2012, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musrenbang.	RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
7.	Pembuatan parit khusus untuk distrik taroi			
8.	Listrik 24 jam tidak di kenakan biaya tagihan pembayaran khususnya kampung penghasil/suku besar sebyar dengan selesaI produksi		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendistribusian listrik kepada masyarakat. Oleh karena itu aspirasi ini sebaiknya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, termasuk masalah pembayaran ganti rugi maupun pembayaran listrik.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (hal 49-50)
9.	Air bersih		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan, dan telah dipasang di masing-masing rumah di Kampung Taroi dan Kampung Perapera.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
10.	Reboisasi hutan : a. sagu b. manggrof.		Kegiatan revegetasi akan dilakukan di dalam area tapak proyek pada area-area yang dibuka untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG tapi tidak digunakan untuk fasilitas permanen. Rincian dapat dilihat di RKL/RPL lampiran I halaman 20.	RKL-RPL Lampiran I Halaman 20
11.	Penerimaan tenaga kerja dilingkungan bp tangguh yang berasal dari kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo tanpa melihat dari		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembengan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	tingkat pendidikannya dan penhubung antara parusahan dengan masyarakat (HUMAS).		kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (halaman 18-29)
12.	Pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat ketujuh kampung		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembengan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (halaman 18-29)
13.	Pelabuhan besar atau jetty besar (beton) di distrik taroi		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
14.	Kami masyarakat suku besar sebyar meminta kepada pemerintah kabupaten teluk bintuni		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	segera membayar uang ketuk pintu sebesar 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar)		kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			dituntut oleh sebagian masyarakat.	
15.	Tren 3 dan tren 4 dibangun di sebyar		Atas pertimbangan teknis dan operasional, kilang Tangguh LNG Train 3 dan 4 akan dibangun diatas lahan yang saat ini telah digunakan untuk mendirikan train 1 dan 2.	
16.	Walk way atau jalanan di bangun di masing-masing kampung dari tujuh kampung (dengan kontruksi beton cor)		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG akan mendukung upaya pembangunan bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG yang melibatkan perencanaan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terfokus pada kegiatan yang berkelanjutan.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
17.	Jalan raya penghubung antar Kampung, distrik dan kabupaten		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Sebyar, misalnya pembangunan jetty, walkway, puskesmas, gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan dari Sebyar ke Bintuni, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG.	
18.	Satu unit mesin es batu			
19.	Perahu fiber dengan mesin motor temple 15. PK. Unit setiap KK		Pengadaan motor tempel dan peralatan nelayan telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
20.	BP tangguh harus membangun fasilitas olah raga serta menyediakan pelatih sesuai dengan aspirasi masyarakat		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
21.	Anggaran biaya kegiatan pemuda per tahun 200 juta/per kampung		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh. Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
22.	Anggaran biaya kegiatan lbu-lbu PKK per tahun 100 juta/per kampung		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk. Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh	
23.	Pembangunan sarana prasarana pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi di distrik taroi dengan dilengkapi asrama siswa/mahasiswa yang di bangun oleh bp tangguh		Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL,	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub Bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	
24.	Bangunan gedurg balai kampung untuk kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo dan distrik taroi		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
25.	Bangunan asrama untuk anak-anak sekolah di distrik taroi pembangunan rumah inap di distrik taroi		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan satu sekolah unggulan di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
26.	Anggaran biaya untuk renovasi rumah lbadah pertahun 200 Juta		Pembangunan dan renovasi rumah ibadah telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Rencana Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah dan infrastruktur lainnya melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
27.	Alat transportasi laut untuk tujuh kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo dan distrik taroi		Tangguh LNG telah mengadakan bantuan perahu dan motor tempel untuk mendukung pengembangan usaha melalui kelompok-kelompok usaha. Tangguh LNG tidak akan mengadakan bantuan perahu fiber dan motor tempel untuk kepentingan perseorangan. Ke depan, bantuan pengadaan perahu, motor tempel, dan peralatan nelayan akan diberikan untuk mendukung pengembangan usaha bagi kelompok usaha masyarakat.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewiraushaan Papua (hal 34-36)
28.	Bp tangguh juga ikut melindungi tempat-tempat keramat atau moyang		Tangguh LNG berkomitmen untuk tidak merusak tempat-tempat keramat sebagaimana yang dilaksanakan	Lampiran 3 Dokumen

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			hingga saat ini. Lokasi benda keramat yang ada di dalam areal Tangguh LNG site ini dan areal yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas pengembangan Tangguh sudah diindetifikasi dan dimasukkan dalam peta rencana "Master Plot Plan" Tangguh LNG (lihat Gambar I-30 Master Plot Plan Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada Bab 1 ANDAL). Rencana pengelolaan benda keramat telah dimasukkan dalam RKL, termasuk Tangguh LNG menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi situs dan tempat keramat yang berada di wilayah kilang Tangguh LNG.	RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
29.	Honor atau insetif kepada tokoh adat, tokoh agama, toko perempuan, rk. rt dan ketua pemuda, dari tujuh kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG, atau memberikan pembayaran dalam bentuk apapun kepada pihak manapun diluar ketentuan yang berlaku.	
30.	balai latihan kerja (BLK) di distrik taroi		Sebagai bagian dari program Pengembangan Masyarakat Papua, kami akan mengevaluasi beberapa fasilitas pelatihan vokasional di Papua Barat. BLK Aranday akan menjadi bagian dari evaluasi tersebut	
31.	mendatangkan guru pelajar SD, SMP, SMA, dan dosen distrik taroi dan di biayai oleh bp tangguh		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
32.	juga mendatangkan tenaga medis profesional dan dokter spesialis juga di biayai oleh bp tangguh		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-Bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12)
33.	pembangunan rumah sakit dengan peralatan modern dn canggih di distrik taroi		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
34.	alat pengontrol gempa (MISKOM) Dan tsunami		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat, termasuk penyediaan alat pengontrol gempa (MISKOM) dan tsunami. Namun demikian, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Tangguh LNG, kami tidak bisa memenuhi aspirasi tersebut.	
35.	dana hibah dari hasil gas alam di berikan kepada masyarakat kampung penghasil pembuatan parit untuk masing-masing kampung dari tujuh kampung : taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
36.	pelabuhan dan *Jetty* (kontruksi beton) di masing-masing kampung dari tujuh kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di kampung Taroi dan pemekarannya, misalnya gedung sekolah, jetty, gedung koperasi, rumah ibadah, dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
37.	pembangunan perumahan guru dan tenaga medis		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
38.	tren 1 dan tren 2 diberi nama taroi A dan taroi B karena daerah atau kampung penghasil		Nama sumur tidak dapat diubah karena telah menjadi dokumentasi proyek dan telah diajukan dan disetuji oleh Pemerintah. Penting untuk dicatat bahwal penamaan sumur tidak berkaitan dengan DBH.	
39.	masyarakat kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo dan kampung pemekaran baru di distrik taroi menuntut (10%) dari hasil penjualan ·		Tangguh LNG memahami pentingnya isu mengenai dana bagi hasil. Namun, hal ini diluar kewenangan kami dan merupakan kewenangan dari Pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa Tangguh merupakan perusahaan operator Migas. Oleh karena itu, kami menaati hukum dan peraturan Pemerintah mengenai dana bagi hasil	
40.	bp tangguh juga harus menfasilitas toko masyarakat, toko pemuda, toko perernpuan, untuk bertemu dengan pemilik saham		BP Berau Ltd. sebagai operator kilang Tangguh LNG merupakan perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa saham. Oleh karena itu, pemegang saham BP Berau Ltd. terdiri dari perusahaan atau investor dalam jumlah yang sangat banyak dan susunan pemegang saham tersebut berubah dari waktu ke waktu.	
41.	peningkatan kapasitas pendidik atau guru melalui kursus pelatihan-pelatihan serta program pernyertaan atau di kuliahkan		Tangguh LNG akan membantu Dinas Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dalam menyusun perencanaan dan anggaran pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kapasitas pengajar.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
42.	bp tangguh dan bp migas harus mengakui bahwa tren 1 dan tren 2 dibangun diatas tanah adat khususnya masyarakat 7 kampung taroi, pera pera, tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo dan pada umumnya masyarakat sebyar		Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	
43.	Pembangunan sarana prasarana pelabuhan laut dan bandara di distrik taroi.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di kampung Taroi dan pemekarannya, misalnya gedung sekolah, jetty, gedung koperasi, rumah ibadah, dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan sarana prasarana pelabuhan laut dan bandara tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
44.	Dari poin satu sampai dengan poin 43 harus dimasukkan dalam penyusunan dokumen amdal apabila aspirasi yang kami usulkan tidak di tanggapi oleh bp tangguh dan bp migas maka kami masyarakat tujuh kampung taroi, pera pera,		Tangguh menghargai setiap aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat sejauh aspirasi dan usulan tersebut relevan dan sesuai dengan lingkup AMDAL.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	tambanewa, sorondauni, rimbitoto, pera pera barat, dan kapunggo dan seluruh lapisan masyarakat suku besar sebyar, dangan sangat hormat kami menolak atau di tangguhkan pembangunan tren 3 dan tren 4 di wilayah tanah adat kami masyarakat suku besar sebyar. Beberapa hal yang kami usulkan adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat setempat serta lingkungan hidup di wilayah distrik taroi. Untuk itu kami meminta perusahan bp tangguh memberikan dukungan penuh mewujudkan aspirasi sebagaimana halaman tersebut diatas.			
Masyarakat Kampung Fior				
1.	Usulan Bidang Pendidikan : a. Bantuan Tenaga Guru Pengajar 2 (dua) Orang dan Guru Agama dan Guru Olah Raga serta Pemberian Tunjangan Untuk Guru Honor/lnsentif (Umum). Perusahaan Tiap Tahun Harus Membiayaan 25 siswa MengikutI Pendidikan Setingkat SMA Dan Perguruan Tinggi Kaitan Dengan MIGAS DICEPU.		Tangguh LNG akan mendukung atas penyelenggaraan pendidikan di Distrik Kokas yang pelaksanaanya dikoordinasikan dengan yayasan penyelenggara pendidikan. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	l. Pembuatan Gedung TK Lengkap Dengan		Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Peralatan Belajar Serta Pengajarnya. Pembuatan Gedung Perpustakaan Sekolah, Pengadaan kurang lebih 15 Unit Komputer serta Fasilitas lnternet Untuk Sekolah.		upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Namun demikian mengingat berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat untuk membangun gedung TK.	RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	b. Perlu Adanya Perhatian Khusus Untuk Anak-Anak Yang Putus Sekolah sehingga perlu diadakan pengikut sertaan kursus di BLK		Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi/lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	c. Asrama Untuk SLTP Dan SMU di Kokas dan Bomberai.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen tentang pembangunan infrastruktur termasuk asrama pelajar telah dituangkan dalam dokumen	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Pendidikan (Halaman 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pengelolaan Sosial Tangguh	
	d. Pembangunan perumahan Guru.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Pendidikan (Halaman 13-18)
	m. Bantuan 3 Unit Solar Sell/Genset Untuk Sekolah.		Tangguh LNG mendukung Pemerintah dalam pengembangan pendidikan di kampung-kampung. Namun demikian mengingat berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat untuk menyediakan Solar Sell/Genset untuk Sekolah	
2.	Usulan Bidang Kesehatan : a. Penambahan Tenaga Perawat Mantri dan Bidan.		Tanggapan Bidang Kesehatan: Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu).	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	6. Pembangunan Rumah Perawat, Rehab/Membangun Baru Pustu dan Pengadaan Alat Medis Yang Memadai.		Tangguh LNG memahami bahwa masih diperlukan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, namun demikian karena keterbatasan yang dimiliki Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kesehatan (Halaman 6-12)
	b. Adanya Perhatian Untuk Bayi Balita Penderita Gizi Buruk Dan lbu Hamil Untuk Penambahan Perbaikan Gizi.		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan perilaku dalam bidang kesehatan lingkungan, penanganan persalinan, perbaikan gizi, dan reproduksi (HIV/AIDS dan IMS) di Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kesehatan (Halaman 6-12)
	c. Pengadaan Peralatan Posyandu, seperti : Timbangan, Kursi, Meja, Gelas, Piring, Sendok, Mangkok, Termos Nasi, Ceret Air, Kompor Panel, Wajan dan Baskom.		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kesehatan (Halaman 6-12)
	d. Bantuan 1 (satu) Unit Komputer, Printer dan Kamera Digital.		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Kesehatan (Halaman 6-12)
3.	Usulan Bidang Perikanan : a. Bantuan Dana Untuk Kegiatan Nelayan.		Tanggapan Bidang Perikanan: Kedepan Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b. Pelatihan dan Praktek Budidaya lkan dan Kepiting.		Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah, dan besar.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	a. Pengadaan Alat Tangkap, Motor Jonson dengan kapasitas 15 PK Tiap Kepala Keluarga.		Kedepan Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
4.	Usulan Bidang Pertanian : Pembuatan Green House Untuk Menunjang Kegiatan Pertanian. - Tenaga PPL untuk pertanian		Tanggapan Bidang Pertanian: Kedepan Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah, dan besar.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Bantuan Dana Pertanian.		Kedepan Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Penempatan Tenaga PPL dan Pemerintah di bidang Pertanian.		Tangguh tidak berwenang untuk menempatkan tenaga PPL. Kewenangan tersebut berada dibawah Dinas	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pertanian Pemerintah Daerah.	
	Pelatihan pemanfaatan atau pengelolaan hasil Panen Untuk Partanian seperti Cabe, Singkong dan Pisang.		Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah, dan besar.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	Bantuan Untuk Memasarkan Hasil Pertanian Keluar Kampung.		Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten). Ke depan, program Tangguh LNG tidak akan lagi fokus kepada DAV, tapi lebih berfokus pada Masyarakat Asli, sehingga manfaat Tangguh LNG akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
5.	Usulan Bidang Koperasi : a. Bantuan Modal Minimal 100 (seratus) Juta Rupiah Untuk Usaha Koperasi (UBSP) Kampung dan Pembinaan Untuk Usaha Produktif seperti Kios, Penjualan lkan, serta membutuh Frizer dan coolbox.		Tanggapan Bidang Koperasi: a. Program peningkatan pendapatan antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang sama atau lebih baik dari sebelum adanya kegiatan Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	b. Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Meja, Kursi dan ATK.		8. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat. Namun demikian karena adanya berbagai	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			keterbatasan maka Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut. Aspirasi dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau Perusahaan Migas lain yang melakukan kegiatan usaha di Kampung Fior.	
	b. Bantuan Transportasi yaitu 1 (satu) buah Perahu Fiber dan Jonson 40 PK dalam Menunjang Usaha.		c. Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang. Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
6.	Usulan Kaum Perempuan : a. Persetaraan GENDER.		Tanggapan untuk Kaum Perempuan: Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan gender, diantara pengembangan usaha bersama simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan PERT (Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga) ke depannya, Tangguh akan terus melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Komitmen ini telah tercantum dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh dalam AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	b. Simpan Pinjam Perempuan Mengenai Bantuan Modal Berupa Uang simpan Pinjam.		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam peningkatan kapasitas perempuan Masyarakat Asli dalam pengembangan usaha skala rumah tangga atau usaha lainnya.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	c. Pelatihan-Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah, Provinsi		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam peningkatan kapasitas perempuan	Lampiran 3 RKL/RPL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	maupun Nasional.		Masyarakat Asli dalam pengembangan usaha skala rumah tangga atau usaha lainnya. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
7.	Usulan Kampung: a. Dipercepat Status Kampung Goras Selatan sebagai Kampung Sasaran Dengan Proses AMDAL Yang Harus Ditetapkan Pemerintah Dan Perusahaan sebagai Kampung Dampak Lingkungan.		Tanggapan untuk usulan kampong: Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberai sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	Dokumen ANDAL BAB 1: Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)
	b. Perusahaan Menyediakan Kuota Tenaga Kerja Untuk Kampung.		Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	a. Peningkatan kesempatan – kesempatan Bisnis bagi CV/Koperasi Dari Kampung		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, pengadaan barang dan jasa untuk	Lampiran 3 RKL/RPL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	untuk ikut serta dalam kegiatan Perusahaan.		kepentingan Tangguh LNG harus mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang berlaku di industri hulu migas. Tangguh LNG telah mendorong kontraktor utama dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Tangguh LNG agar bekerjasama dengan perusahaan lokal yang berada di Papua. Hal tersebut telah dituangkan di dalam beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa antara Tangguh LNG dengan kontraktornya.	Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	c. Pipanisasi untuk Air Bersih.		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat ini.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6—12)
	d. Tambatan JETTY di Kampung Perlu ditingkatkan dari Kayu ke Beton permanen. Pembuatan MCK Untuk setiap Rumah Warga. Pembuatan Pasar Kampung.		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh
	e. Perhatian Untuk Petugas Masjid/Tokoh Agama di Kampung. Bantuan Dana Untuk Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Baik Diluar dan Dalam Kampung.		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	
	f. Pembuatan Sanggar PKK dan Pengadaan Peralatan PKK.		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung termasuk juga di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Bomberai akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang. Teknis pelaksanaan akan dikerjakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)
	g. Hasil Pertanian Dan Perikanan Harus Diambil Oleh Perusahaan. Perusahaan Memperhatikan masyarakat Nelayan, Petani Dengan Melakukan Pelatihan-Pelatihan Di Luar Kabupaten/Kota.		Sejak tahun 2008 Tangguh LNG telah memulai program *Stocking Point* yang mana katering Tangguh LNG membangun kontrak dengan koperasi-koperasi yang ada di Bintuni, Babo, Tofoi, Tanah Merah, dan Arguni. Tangguh LNG mewajibkan kontraktor katering untuk memaksimalkan pengadaan produksi pertanian dan perikanan dari masyarakat.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	h. Pemberantasan Buta Aksara.		Program pembantasan buta aksara dan huruf (literasi) adalah bagian dari upaya pengembangan SD. Untuk itu Tangguh LNG akan mendukung setiap upaya pengembangan SDM termasuk di dalamnya program literasi. Melalui kerjasama dengan Universitas Cenderawasih, Tangguh LNG telah melaksanakan program pemberantasan buta huruf hingga di Kampung Otoweri dan Tomage. Ke depan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah program tersebut akan diperluas hingga ke kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG lainnya.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	i. Perlu Adanya Agen BBM Bersubsidi di dalam Kampung, sehingga Masyarakat Tidak Kesulitan/sengsara terus untuk membeli BBM yang mahal seperti Harga lndustri.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk berdirinya agen BBM bersubsidi. Namun demikian Tangguh tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan pemasaran BBM. Sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada pihak yang terkait.	
	j. Apabila dikemudian hari ada pemekaran kampung maka, Kampung tersebut harus memiliki Dampak Lingkungan tersendiri tanpa bergabung dengan Kampung lnduk.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Dokumen ANDAL BAB 1: Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)
	l. Masyarakat Kampung belum paham dengan kegiatan perusahaan dan perlu diperbanyakkan adanya Sosialisasi.		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			diuraikan dalam RKL/RPL Setelah dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, maka Tangguh LNG akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung di wilayah sekitar operasi, termasuk yang berada di wilayah Teluk Berau.	
	k. Permintaan Masyarakat ADAT Kampung Goras dan Goras Selatan Agar Sebelum Konstruksi, Perusahaan Berkewajiban Membayar Dana Pemberdayaan ADAT BUKA PINTU.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (Tangguh Sustainability Program) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
	m. Dana PBM Kampung Harus Disamakan Dangan 9 (sembilan) Kampung DAVS di Teluk Bentuni.		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV)	
Aspirasi (Tuntutan) Masyarakat Adat Sebyar				
l.	Wilayah yang masuk dalam AMDAL adalah 4 Distrik + Masyarakat Sebyar yang bermukim di Tahiti dan Sekitarnya yang berada di Distrik Bintuni Kab Teluk Bintuni Serta Pemekaran Distrik dan Kampung-Kampung Lainnya		Batas wilayah studi AMDAL telah ditetapkan didalam BAB I, dimana mencakup kampung-kampung tertentuk distrik Kamundan, Weriagar, Tomu, Arandai, Babo, Aroba, Sumuri, Bomberai, dan Kokas.	Dokumen ANDAL BAB 1: Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)
2.	Pembayaran Sisa Hak Ulayat (uang ketuk pintu), Sebesar 54 M, dari 60 M		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (Tangguh Sustainability Program) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
3.	Pemanfaatan, condensat, limbah serta sisa dari gas oleh masyarakat		Kondensat merupakan bagian dari hasil minyak dan gas dan dimiliki oleh Pemerintah.	
4.	Pembangunan pemukiman masyarakat Adat Sebyar		Pemda Teluk Bintuni dan Tangguh LNG telah mengadakan kesepahaman untuk melakukan kajian atas kelayakan program perbaikan/penataan rumah di Distrik Weriagar dan Distrik Tomu. Bentuk dan pelaksanaan program ini akan sangat	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub bab Tata Kelola

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			tergantung kepada ketersediaan anggaran baik di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG. Apabila hasil kajian ini menunjukan bahwa program perbaikan/penataan rumah layak untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG, maka pelaksanaan program ini akan dilakukan dan berakhir selama konstruksi Tangguh Train 3. Program perbaikan/penataan rumah ini merupakan bentuk partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni serta sebagai dukungan terhadap Pemda Teluk Bintuni dalam melanjutkan dan mempercepat pelaksanaan penataan rumah bagi Masyarakat Asli di Distrik Weriagar dan Distrik Tomu. Program perbaikan/penataan rumah ini direncanakan untuk Masyarakat Asli di Distrik Weriagar mengingat adanya beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut: 1) bahwa penataan perumahan di Distrik Weriagar telah menjadi rencana prioritas Pemda Teluk Bintuni disebabkan terjadinya abrasi yang parah yang mengakibatkan pengikisan lahan perumahan; 2) bahwa Distrik Weriagar berada di dalam wilayah kerja Tangguh LNG dimana Tangguh LNG telah melakukan kegiatan eksplorasi; dan 3) di masa yang akan datang kemungkinan Tangguh LNG akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan exploitasi. Program perbaikan/penataan rumah juga direncanakan untuk Masyarakat Asli di Distrik Tomu dengan pertimbangan antara lain bahwa: 1) Distrik Tomu berada di wilayah kerja Tangguh LNG dimana Tangguh LNG	Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 38-50)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			telah melakukan kegiatan eksplorasi; dan 2) Lokasi perumahan Masyarakat Asli di Distrik Tomu terletak di wilayah yang bersentuhan dengan wilayah kerja Tangguh LNG sehingga ada kemungkinan Tangguh LNG melakukan kegiatan di Distrik Tomu yang dapat menunjang kegiatan explorasi dan exploitasi.	
5.	Pembangunan dan Pengiriman Anak Sebyar (Khusus orang sebyar), ke Fakultas Kedokteran, Tehnik dan Akuntansi dan semuanya di biaya oleh BP tanpa mengurangi dana bagi hasil untuk masyarakat adat Sebyar		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
6.	Pembayaran hasil/fee Masyarakat Adat Sebyar setiap tahun 10% dari Hasil Penjualan		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil	
7.	Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), sebelum dengan mulainya pembangunan Trend 3&4		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil	
8.	Anak DAV, harus bekerja di LNG sampai selesai		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	produksi		mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
9.	Penerimaan Tenaga Kerja, Skill Maupun Non Skill, Security dan Lain Sebagainya, harus mengutamakan anak-anak DAV, dan selalu melibatkan Pemerintah Distrik, Kepala Kampung setempat dan Disnaker Kab. Teluk Bintuni.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG,	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			- Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) Mekanisme penerimaan tenaga kerja telah diatur dalam pengelolaan social Tangguh sebab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial	
10.	Anak Adat Sebyar harus masuk untuk menjadi (Deputi Vice President BP)		Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) Tangguh LNG memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja untuk bisa mengembangkan karir di perusahaan tanpa melakukan diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, golongan, maupun jenis kelamin. Perkembangan karir pekerja ditentukan oleh kompetensi, keahlian, pengalaman, masa kerja, serta posisi dan tanggung jawab pekerja.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
11.	Anak Adat Sebyar harus Manager Marketing di Tangguh LNG.		Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Pengembangan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) Tangguh LNG memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja untuk bisa mengembangkan karir di perusahaan tanpa melakukan diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, golongan, maupun jenis kelamin. Perkembangan karir pekerja ditentukan oleh kompetensi, keahlian, pengalaman, masa kerja, serta posisi dan tanggung jawab pekerja.	Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
12.	Pembayaran hasil 46% dan 54%		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (Tangguh Sustainability Program) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
13.	Pembangunan pabrik pengelolaan kondensat menjadi pupuk di wilayah adat sebyar, sebagai pemilik hak sumber daya alam (SDA/Gas alam cair) yang di kelola oleh BP Tangguh LNG sekarang ini.		Tangguh LNG tidak mempunyai rencana untuk membangun pabrik pupuk, sehingga Tangguh LNG tidak mempunyai wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan menyangkut pembangunan pabrik Pupuk.	
14.	Yang seharusnya dl kelola dan dl ambil oleh BP Tangguh LNG adalah gas, sedangkan minyak - condesat - limbah hasil produksi serta carff, menjadi milik masyarakat & harus dl kembalikan kepada masyarakat.		Sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil/ Production Sharing Contract dan ketentuan hukum yang berlaku, Tangguh LNG diberikan hak untuk melakukan kegiatan explorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Kondensat merupakan produk yang termasuk dalam pengertian minyak dan gas bumi.	
15.	Pemberian dana pelayanan kesehatan (bantuan pengobatan), kepada semua masyarakat adat sebyar, yang dl controll oleh masyarakat sebyar.		Tangguh LNG memahami bahwa mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga	Lampiran 3 Dokumen RKL/ RPL - Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kesehatan serta dokter yang memadai. • Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, dan dengan jumlah yang memadai.	
16.	Apabila terjadi pemekaran kabupaten sebyar, maka Dana Bagi Hasil (dbh), berubah menjadi milik kabupaten sebyar.		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil.	
17.	Program comdev (dana PBM), yang per tahun @Rp. 300 juta dl naikan menjadi 1 milyar per tahun perkampung.		Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV).	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)
18.	BP harus mengubah nama trend VRA & VRB (Vurwata A & B) menjadi SBR (Sebyar A&B)		Nama sumur tidak dapat diubah karena telah menjadi dokumentasi proyek dan telah diajukan dan disetuji oleh Pemerintah. Penting untuk dicatat bahwal penamaan sumur tidak berkaitan dengan DBH	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
19.	Pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), harus mendahulukan dulu wilayah sebyar (dari Taroy sampai Kamundan), sebelum pembangunan Trend 3 & 4 dl mulai.		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG. sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur Penentuan kebijakan dibidang kelistrikan merupakan wewenang dari Pemerintah. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tersebut.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
20.	Pihak BP harus menyediakan transportasi laut (dari dan ke Sebyar), bagi masyarakat adat suku besar Sebyar sebelum pembangunan Trend 3 & 4		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat, namun demikian mengingat adanya berbagai keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	di mulai.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas tersedianya transportasi laut antar-kabupaten. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini. Komitmen Tangguh LNG dalam mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi laut terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan transportasi air yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
21.	Pihak BP diharuskan atau diwajibkan mempublikasikan dan mengakui bahwa kepemilikan sumber daya alam (SDA) dalam hal ini gas alam cair adalah benar-benar berada dl atas tanah adat suku Sebyar dan benar-benar milik suku besar Sebyar, pengakuan itu harus secara tertulis dan dl tandatangani oleh, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, perwakilan tokoh nusantara, pihak distrik dan pemerintah kab tel bintuni serta pihak bp sendiri.		Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
22.	Penguatan pendidikan dasar didaerah Sebyar, yaitu : pembangunan SD-SMP-SMA, terpadu dl wilayah Sebyar, lengkap dengan fasilitas olah raga dan Lab serta tenaga pengajar.		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada, agar dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan Pemerintah, terutama kepada Dinas Pendidikan. Tangguh LNG akan membantu Dinas Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dalam menyusun perencanaan dan anggaran pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kapasitas pengajar.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (halaman 13—18)
23.	Point 1-22 Harus Dimasukkan Dalam Penyusunan Dokumen Amdal		Tangguh LNG akan memperhatikan hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat yang diajukan dalam rapat Komisi AMDAL di Bintuni. Kami berusaha untuk menanggapi semua saran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Berita acara dari semua pertemuan pembahasan AMDAL beserta tanggapan Tangguh LNG akan dijadikan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang akan diserahkan kepada KLH untuk proses persetujuan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan AMDAL dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Bapedalda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Bintuni dan Fakfak	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
Komitmen Masyarakat Adat Suku Sebyar (Kampung Kalitami I, Kalitami II, Bibiram, Kenara Dan Maroro) Distrik Kamundan				
1.	Sebelum perusahaan beroperasi Perusahaan wajib membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan persoalan Tapal Batas antara Kabupaten di Provinsi Papua Barat (Distrik Kamundan - Sorong Selatan)		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan Tapal Batas antara Kabupaten di Provinsi Papua Barat.	
2.	BP Tangguh LNG harus mengakui Wilayah Tanah Adat Sebyar (Kamundan, Weriagar, Tomu, Aranday dan Taroi) sebagai Daerah Penghasil.		Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	
3.	Wilayah Tanah Adat kami tidak diperjual belikan ke Perusahaan atau kepada siapapun juga karena itu warisan nenek moyang kami dan Tuhan		Tangguh LNG selalu menghormati Adat istiadat yang berlaku di wilayah operasinya.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	berikan untuk Masyarakat Kamundan.			
4.	Kami Daerah Penghasil Mempuyai mendapatkan pembagian 10% dari hasil kotor.		Tangguh LNG memahami pentingnya isu mengenai dana bagi hasil. Namun, hal ini diluar kewenangan kami dan merupakan kewenangan dari Pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa Tangguh merupakan perusahaan operator Migas. Oleh karena itu, kami menaati hukum dan peraturan Pemerintah mengenai dana bagi hasil.	
5.	Kami masyarakat Kamundan Izinkan Tren 3 & 4 diatas Tanah Suku Sebyar tapi bukan di Wilayah Kamundan.		Kilang 3 & 4 dibangun di lokasi Tangguh LNG yang ada pada saat ini, tidak jauh dari lokasi Kilang 1 & 2 yang ada di pesisir Selatan Teluk Bintuni.	
6.	BP Tangguh LNG tidak boleh mengambil Keputusan dengan seseorang yang bukan anak Adat di masing-masing DAVS, apapun keputusan BP Tangguh LNG ketemu langsung masyarakat diatas Tanah Adat.		Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
7.	BP Tangguh LNG Tidak Boleh Melarang Kepada Masyarakat yang mencari Nafkah baik hasil laut maupun hasil darat karena itu Allah dan Tuhan Ciptakan untuk mereka.		Ketentuan hukum yang berlaku mensyaratkan ditetapkannya wilayah terlarang dan terbatas atas fasilitas anjungan lepas pantai. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi keselamatan semua pihak dari potensi bahaya yang berasal dari fasilitas anjungan lepas pantai dibangun sehubungan dengan dan untuk kepentingan Tangguh LNG.	
8.	Pengamanan di Areal BP Tangguh LNG harus berbasis masyarakat dalam arti bahwa ketika ada persoalan di Areal perusahaan maka yang wajib mengamankan adalah securiti karena Polisi bukan mengabdi untuk Perusahaan tapi Polisi adalah Pelindung Masyarakat.		Komitmen tentang pengamanan Tangguh LNG telah disebutkan dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Tatakelola Pemerintahan, Pengaman berbasis Masyarakat, dimana dalam hal ini Tangguh LNG akan bekerja sama dengan aparat keamanan terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah guna mendukung kegiatan operasi Tangguh LNG yang berkelanjutan.	
9.	Kami masyarakat dari 5 Kampung memberi jangka waktu 1 Tahun kepada BP Tangguh LNG apabila Perusahaan tidak menyanggupi Aspirasi kami maka Amdal tidak akan di Tandatangani.		Tangguh LNG akan memperhatikan hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat yang diajukan dalam rapat Komisi AMDAL di Bintuni. Kami berusaha untuk menanggapi semua saran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Berita acara dari semua pertemuan pembahasan AMDAL beserta tanggapan Tangguh LNG akan dijadikan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang akan diserahkan kepada KLH untuk proses persetujuan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan AMDAL dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Bapedalda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Bintuni dan Fakfak	
10.	Sebelum Tren 3 & 4 di bangun Perusahaan harus membayar Uang ketuk Pintu diatas Tanah Adat Sebyar.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (Tangguh Sustainability Program) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
11.	BP Tangguh LNG dan Pemerintah harus memfasilitasi Pemekaran Kabupaten Baru di Teluk Bintuni (Sebyar, Sub-babo dan Maskona).		Tangguh LNG menghargai aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah administrative. Namun, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut	
12.	BP Tangguh LNG harus bayar PBM pertahun untuk masing-masing Kampung Pertahun.		Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV).	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)
13.	Bilamana ada Pemekaran Kampung di Daerah atau Distrik yang di nyatakan sebagai DAVS maka secara otomatis Daerah Pemekaran baru Amdal secara langsung mengikat Kampung tersebut.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program	Dokumen ANDAL BAB 1: Peta Batas Sosial; Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Bab 1 Pendahuluan (halaman 1-5)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	
14.	BP Tangguh LNG dan Pemerintah Pusat wajib menyelesaikan atau membayarkan sisa uang (Hutang) sebesar Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (Tangguh Sustainability Program) dan telah dinikmati	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
15.	Pembagian Hasil Bagi Kabupaten Penghasil harus mendapatkan Prensentase Lebih besar dari pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat.		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten	
16.	Kami dari masyarakat Kamundan meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah provinsi Papua Barat dan BP Tangguh LNG agar pelaksanaan sidang Amdal harus dilakukan/dibicarakan di Kabupaten Teluk Bintuni tidak boleh dibawa ke Daeran lain (di luar Kabupaten Teluk Bintuni).		Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal Februari 2014 di Bintuni, point No 9, setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak.	
A. Bidang Pembangunan				
1.	BP Tangguh LNG harus membangun rumah permananen di 5 kampung yang berada di wilayah Distrik Kamundan seperti yang pernah BP Tangguh LNG membangun karena Kamundan juga merupahkan Daerah DAVs.		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	37)
2.	BP Tangguh LNG harus datangkan alat dan buat jalan di 5 Kampung dan ibu kota Distrik Kamundan sampai ke Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, Distrik Taroi sampai di Ibukota Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Daerah DAVS.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Sebyar, misalnya pembangunan jetty, walkway, puskesmas, gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan dari Sebyar ke Bintuni, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
3.	BP Tangguh LNG wajib membangunan air bersih di 5 kampung yang berada di Distrik Kamundan lengkap dan masyarakat siap dikonsumsi/pakai.		Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Kesehatan, Sub bab Air Bersih dan Lingkungan.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.5 Air Bersih dan Lingkungan (Halaman 12-13)
4.	BP Tangguh LNG harus usahakan Pembangkit		Pada bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Listrik Tenaga Gas (PLTG) ke 5 Kampung di Ibukota Distrik Kamundan sama halnya seperti yang akan digunakan oleh saudara-saudara kami yang berada di Wiliyah DAVS lainnya secara serentak.		menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
5.	BP Tangguh LNG Wajib memberikan Dana Pengembangan kampung dan distrik setiap Tahun melalui Program PBM. Dana PBM di Distrik Kamundan perkampung 1 milyar Pertahun.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
6.	BP Tangguh LNG wajib memberikan bantuan untuk rumah-rumah ibadah perbulan atau bila perlu BP Tangguh LNG Membangun Masjid di 5 Kampung atau Masjid besar Ukuran 50 x 50 M di Kamundan.		Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya, salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan tempat ibadah di kampung-kampung. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51) – Pengembangan Masyarakat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
7.	BP Tangguh LNG harus memberikan motor Tempel 15 atau 40 PK tambah Speed Fiber untuk 5 Kampung.		Pengadaan motor tempel dan peralatan nelayan telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
8.	BP Tangguh LNG Bertanggung jawab membiayai Jama'ah Haji Distrik Kamundan Pertahun.		Tangguh LNG telah menyediakan dan akan terus menyediakan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat asli secara keseluruhan. Tangguh LNG tidak dapat memperluas dukungannya yang dapat memenuhi kewajiban ibadah seseorang.	
9.	BP Tangguh LNG wajib memberikan Honor bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, Tokoh agama di 5 Kampung Distrik Kamundan.		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG, atau memberikan pembayaran dalam bentuk apapun kepada pihak manapun diluar ketentuan yang berlaku.	
10.	BP Tangguh LNG Harus Membangun Dermaga Beton di Distrik Kamundan untuk 5 Kampung ukuran 50 x 20 M.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
11.	BP Tangguh LNG Harus Membangun Kantor Kampung, Kantor Baperkam, Kantor LMA di setiap Kampung.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	(Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
12.	BP Tangguh LNG membangun Sanggar Pelatihan ibu-ibu di 5 Kampung dan Distrik.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
13.	BP Tangguh LNG membangun Jembatan-Jembatan Penyebrangan di 5 Kampung dan lbukota Distrik Kamundan.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
14.	BP Tangguh LNG Harus membangun segala fasilitas Olahraga (Sport Center) Distrik Kamundan.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
15.	BP Tangguh LNG membangun Gedung Sekretariat Pemuda di 5 Kampung.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
16.	BP Tangguh LNG bersama Pemerintah harus mendirikan Tower di lbukota Distrik Kamundan.		Tangguh LNG tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan terhadap pemasangan tower, sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut	
17.	BP Tangguh LNG harus bertanggung jawab bencana Abrasi sungai Kamundan dengan membuat Kanal baru/Kanal Pelindung.		Kegiatan operasi Tangguh LNG tidak menimbulkan potensi abrasi. Sepanjang pengetahuan kami, abrasi yang terjadi di Kamundan merupakan gejala alamiah. Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Taroi, sejak tahun 2010-2012, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (mangrove) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat Distrik Kamundan menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musrenbang.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
18.	BP Tangguh LNG memberikan bantuan kepada 5 Kampung yang di nyatakan DAVS dengan Spit fiber perkampung enjin 40 PK sampai 200 PK.		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV). Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat
19.	BP Tangguh LNG memberikan bantuan alat		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra	Lampiran 3:

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	musik lengkap dengan Intrumen untuk Pemuda Distrik Kamundan.		Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
20.	BP Tangguh LNG harus membangun 1 Unit Gedung Tempat Pengajian Anak (TPA) di Distrik Kamundan.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
21.	BP Tangguh LNG harus mendirikan Pabrik Pupuk di Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni.		Tangguh LNG tidak mempunyai rencana untuk membangun pabrik pupuk, sehingga Tangguh LNG tidak mempunyai wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan menyangkut pembangunan pabrik Pupuk.	
22.	BP Tangguh LNG harus membangun Pos Keamanan di Distrik Kamundan.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
23.	BP Tangguh LNG Bantu Masyarakat di 5 Kampung Kamundan buat Taluk Perkampung.		Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan talud. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini. Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pembangunan.	Yang Baik (hal 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
B. Bidang Ekonomi				
1.	BP Tangguh LNG memberikan bantuan alat nelayan terdiri dari Motor tempel 15 PK dan alat tangkap Per KK di Distrik Kamundan Harus terjawab sebelum perusahaan beroperasi.		Pengadaan motor tempel dan peralatan nelayan telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
2.	BP Tangguh LNG harus memberikan biaya Modal Usaha lewat Koperasi Ibu-ibu 5 Kampung di Kamundan.		Tangguh LNG akan mendukung penyediaan dan peningkatan jumlah, serta kapasitas koperasi atau lembaga keuangan lokal lain, agar dapat dengan mudah diakses masyarakat, sehingga dapat mendukung berjalannya bisnis masyarakat. Tangguh LNG memahami bahwa masyarakat membutuhkan dukungan keuangan sebagai modal untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan bisnis lainnya. Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi/lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
3.	BP Tangguh LNG harus memberikan Modal usaha kepada Kelompok nelayan di 5 Kampung.		Tangguh LNG berkomitmen bahwa keberadaan proyek Tangguh LNG harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tangguh LNG akan	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mengembangkan industri jasa, manufaktur, dan bisnis penunjang lain, agar secara langsung dijalankan oleh Masyarakat Asli setempat. Sebagai contoh, pengembangan usaha jasa laundry bagi para pekerja di proyek Tangguh LNG; pengembangan jasa perbaikan sarana pendukung produksi di proyek Tangguh LNG (seperti AC); dan industri lainnya. Agar usaha masyarakat dapat berkembang dan berjalan dalam jangka panjang, Tangguh LNG akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dari Masyarakat Asli setempat, pada berbagai aspek, seperti pelatihan dan pendampingan operasional; manajemen dan organisasi usaha; administrasi dan pembukuan keuangan; serta penjualan dan pengembangan pasar. Pengadaan bantuan modal usaha dapat melalui mekanisme koperasi atau bank.	Pendapatan (Halaman 29-34)
4.	BP Tangguh LNG harus memberikan bantuan berupa dana untuk di kelola oleh masyarakat (bidang perikanan dan pertaniaan).		Kedepan Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
5.	BP Tangguh LNG mengambil atau membeli hasil tangkapan masyarakat seperti Udang, lkan dan sayur Mayur.		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Pengeloaan Sosial Tangguh sub-bab Peningkatan Pendapatan halaman 31-35
6.	BP Tangguh LNG membangun 1 unit Koperasi lengkap dengan Friser.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
7.	BP Tangguh LNG membangun 1 Unit bengkel untuk Motor Jhonson, ketingting, genset lengkap dengan sperpak.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
8.	BP Tangguh LNG harus memberikan pelatihan Manajemen tentang Ekonomi Kerakyatan di 5 Kampung Distrik Kamundan.		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bagi Masyarakat Asli. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar. Selain itu, Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
9.	BP Tangguh LNG harus membayar uang Ketok Pintu untuk 5 Kampung 10 Millar.		Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
10.	BP Tangguh LNG bertanggung jawab memfasilitasi Peralatan kantor bagi kantor kampung (contoh Laptop, Komputer dll).		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
11.	BP Tangguh LNG kami bantu ke Perusahaan bantu masyarakat di 5 kampung dengan memberikan mesin senso per kampung.			
12.	BP Tangguh LNG bertanggung memperhatikan masyarakat DAVs khusus di Bidang Perekonomian untuk wilayah Sebyar dan sekitarnya.		Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas proyek Tangguh memberikan dampak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Untuk itu Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan pada aspek-aspek tersebut sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-49)
13.	BP Tangguh LNG siapkan alat Transportasi berupa Kapal yang dapat menghubungkan sekitar pesisir sampai ke lbukota Kabupaten Teluk Bintuni.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan satu dermaga, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
C. Bidang Pendidikan				
1.	BP Tangguh LNG bertanggung jawab memberikan Beasiswa bagi anak-anak di 5 Kampung Distrik Kamundan mulai TK sampai dengan Perguruan Tinggi.		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
				2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
2.	BP Tangguh LNG harus mendatangkan Tenaga Guru dan di gaji oleh Perusahaan.		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
3.	BP Tangguh LNG bertanggung jawab melakukan pengembangan Sarana dan Prasarana di Distrik Kamundan.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
4.	BP Tangguh LNG harus memberikan Kesejahteraan bagi Guru-guru PNS Maupun Non PNS.		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
5.	BP Tangguh LNG wajib membangun Perumahan Guru-guru yang memadai di Distrik Kamundan.		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
6.	BP Tangguh LNG wajib memfasilitasi Pelatihan Guru-Guru guna peningkatan kemampuan di bidang pendidikan.		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi guru/ tenaga pengajar.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk guru/ tenaga pengajar.	Pendidikan (Halaman 12-17)
7.	BP Tangguh LNG apabila menyekolahkan anak-anak Kamundan di SMK Migas CEPU harus membiayai segala macam kebutuhan hidup di tempat bersekolah.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan dari Kabupaten Fakfak ke Sekolah Migas di Cepu. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 11 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 13-18)
8.	BP Tangguh LNG wajib membantu Pendidikan dengan mendatangkan Buku-Buku Pelajaran mulai dari SD sampai dengan SMA.		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada, agar dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17)
9.	BP Tangguh LNG melaksanakan Program pemberantasan Buta Aksara di Kamundan.		Program pembantasan buta aksara dan huruf (literasi) adalah bagian dari upaya pengembangan SD. Untuk itu Tangguh LNG akan mendukung setiap upaya pengembangan SDM termasuk di dalamnya program literasi. Melalui kerjasama dengan Universitas Cenderawasih, Tangguh LNG telah melaksanakan program pemberantasan buta huruf hingga di Kampung Otoweri dan Tomage. Ke depan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah program tersebut akan diperluas hingga ke kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG lainnya.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pendidikan (Halaman 12-17)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
10.	BP Tangguh LNG harus membangun 1 unit sekolah permanen di Distrik Kamundan lengkap untuk siap di pakai.		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
D. Bidang Kesehatan				
1.	BP Tangguh LNG Bertanggung Jawab membiayai Warga Masyarakat di 5 Kampung yang sakit dan di rujuk ke RSUD lain.		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
2.	BP Tangguh LNG Wajib mendatangkan Tenaga Kesehatan ke Distrik dan Kampung-Kampung.		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-Bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	
3.	BP Tangguh LNG Wajib membangun Saran Kesehatan dan Posyandu untuk 5 Kampung.		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
4.	BP Tangguh LNG Wajib memberikan Honor bagi lbu-lbu Kader dan Dukun beranak dI 5 Kampung.		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	
5.	BP Tangguh LNG Wajib memberikan Pelatihan bagi lbu-Ibu Kader.		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-Bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	
6.	BP Tangguh LNG perhatikan perbaikan Gizi Anak Sekolah mulai Usia Dini.		Bidang Kesehatan: Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
7.	BP Tangguh LNG harus mendatangkan Obat-Obat ke Kampung danl Distrik.		penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
8.	BP Tangguh LNG harus bangun 1 Unit Puskesmas Permanen Rawat Inap di Distrik Kamundan.		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
A	**Kepala Kampung Abdurarahman Tator, Kampung Fior, Distrik Kokas**			
1.	Pembekalan yang bapak ibu sampaikan itu tentunya bermanfaat untuk kami, namun pada		Terima kasih atas masukannya.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	saat2 yang mendatang harus membutuhkan waktu yang cukup maksimal			
2.	Harapan kami bahwa LNG bisa dapat bekerja sama dengan kami pesisir pantai (kampung-kampung di distrik Kokas) dalam artian menyuplai hasil pertanian berupa cabe (rica) yang saat ini ada warga yang menggeluti sejak 1 tahun yang lalu bahwa ini merupakan kebutuhan sehari2, jadi kami maka memperhatikan itu. Begitu pula menyangkut pendidikan, kesehatan diupayakan tiap2 kampung harus diprioritaskan, mengikuti pendidikan, sehingga nantinya mereka2 itu kedepan dapat membangun kampungnya sendiri2		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG. Komitmen Tangguh tentang pendidikan telah tertuang di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, di dalam dalam dokumen AMDAL.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35) Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 2 Pendidkan (Halaman 12-17)
	Kami sangat berterima kasih kepada bapak, ibu yang memberi pembekalan kepada kami, dari pemerintah kampung yang terkecil dan para perwakilan kampung2 semoga jasa dari bapak ibu dapat diterima oleh yang Maha Kuasa. Dan pada masa yang akan datang lebih mendekat dengan warga2 di kampung. Harapan besar bahwa bapak Bupati dan bapak wakil bupati Bintuni bersama kami		Terima kasih.	
A	**Rafael Sodefa, Tokoh Adat, Distrik Sumuri**			
1.	Proses membangun suatu kelompok masyarakat perlu melalui proses penelitian dan hasil penelitan itu menjadi acuan untuk melakukan program2 yang benar2 sesuai karakteristik masyarakat suku yang bersangkutan sesuai bidang masing2		Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.	
2.	BP Tangguh LNG dan pemerintah harus clear-kan persoalan status tanah LNG dengan petuanan dalam hal ini marga Sowoy untuk membicarakan status tanah HGB sesuai surat dari Agraria Manokwari (status tanah HGB selama 25 tahun)		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	
3.	Hari ini kita bicarakan tentang rancangan Train 3, bagaimana dengan proyek petrokimia? Apakah Amdal tahun ini sudah termasuk proyek itu atau mempunyai Amdal sendiri?		Tangguh LNG tidak mempunyai rencana untuk membangun proyek petrokimia, sehingga Tangguh LNG tidak mempunyai wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan menyangkut pembangunan proyek petrokimia.	
4.	Perlu adanya jembatan penyeberangan antara Tanah merah dari Saengga Perlu adanya jalan Tofoi – Saengga dank e Onar, sebagai akses jalan bagi masyarakat ke Distrik. Karena Zona laut tidak mungkin menjadi jalur utama kalau terjadi ombak		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
5.	Harus ada kompensasi zona laut sudah dipakai oleh BP Tangguh LNG		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial untuk menangani dampak yang ditimbulkan tersebut.	Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
6.	Akses laut untuk para nelayan dan masyarakat Tanah Merah Saengga, Onar dan Tofoi sebagai jalur Transportasi telah dibatasi maka kalau Ombak tidak bisa lewat maka harus akses jalan darat antara Tofoi, Saengga, Tanah Merah dan Onar (akses jalan darat)		Tangguh LNG telah turut serta dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG yang dilaksanakan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
7.	Bicara kompensasi pembagian hasil berdasarkan titik-titik sumur dekat dengan wilayah suku Sumuri. Kalau dilihat dari jarak tentu hasil dekat dengan daratan Sumuri		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
8.	Kompensasi tanah lewat dalam bentuk dana abadi harus diperjelas dan dikembalikan. Thanks		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Pembebasan lahan telah selesai. Tidak adak tindakan atau pembayaran lebih lanjut yang akan dilakukan. Sebagai catatan: kompensasi di masa lalu juga sudah termasuk dana abadi sebesar US $ 2 juta, serta rumah-rumah dan sarana dan prasarana umum sebagai bagian dari program pemukiman kembali.	
A	**Luth Iha, Utusan dari Pemerintah Kampung Baru Kokas**			
1.	Amdal ini sangat penting bagi masyarakat teluk Bintuni Karena terus terang kami kami melihat dari dokumen yang ada itu memang perlu sekali perubahan atau perbaikan yang baik Kalau tidak ada kecemburuan sosial salalu tumbuh di masyarakat yang paling bawah		Terima kasih atas masukanya, Tangguh LNG akan berupaya memperbaikinya, agar dokumen AMDAL ini menjadi lebih baik.	
A	**Serilus Maryawasi bin Madag Hom, di Rowa Desa**			
1.	Proyek BP Tangguh LNG dalam pembahasan amdal benar-benar dapat mengakomodir kepentingan rakyat Teluk Bintuni dan Fakfak		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
2.	Proses rekrutmen Tenaga kerja benar-benar perlu transparan dan memprioritaskan putra putri Teluk Bintuni		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
3.	Pendidikan dan kesejahteraan dapat diaplikasikan secara baik yang menyangkut semua aspek kehidupan		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
4.	Perlu adanya pelatihan dan training terkait kebutuhan investasi yang ada di Teluk Bintuni sehingga rakyat tidak jadi penonton diatas kekayaannya sendiri		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL- Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
5.	Perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak BP Tangguh LNG dan NGO (LSM) yang ada di Bintuni sebab yang turut merasakan betapa pedihnya persoalan yang ada adalah rakyat yang ada di sekitar proyek dan bintuni secara keseluruhan		Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku	
6.	Hak hak rakyat yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh BP Tangguh LNG wajib diselesaikan		Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya.	
7.	Proyek penilaian amdal ini dapat dikaji secara baik sebab pasang surut air laut semua kampung yang ada di pesisir pantai dapat dampak itu secara langsung		Kajian terhadap dampak penting hipotetik untuk area sekitar pesisir pantai yang terdapat dalam batas wilayah studi AMDAL termasuk dalam Kajian studi AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG	
8.	Dapat dipertimbangkan juga jangan sampai hal		Tangguh LNG telah memiliki Prosedur Pengelolaan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	ini terjadi di seperti bocoran pipa gas di teluk mexico, jangan lagi terjadi di Teluk Bintuni		Kondisi Darurat untuk kegiatan saat ini, termasuk apabila terjadi kebocoran. Prosedur ini akan diperbaharui untuk memasukkan kegiatan Pengembangan Tangguh LNG	
9.	Perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
10	BP Tangguh LNG harus dapat mempresentasikan indikasi keberhasilan selama proyek berjalan dalam peningkatan Community Development (bukan sebagai kegiatan seremonial)		Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungann secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
A	**Abdulafad Sirindin, Kepala Kampung Goras, Kampung Goras Distrik Kokas Kabupaten Fakfak**			
1.	Saran kami bahwa dengan keberadaan proyek Train 3 di wilayah Teluk Berau, Bintuni dan Fakfak sangat membuka peluang bagi masyarakat di kedua kabupaten yaitu kabupaten Bintuni dan Fakfak. Kemudian meningkatkan PAD disetiap daerah khususnya keberadaan kampung Goras dan Kampung Goras Selatan		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
2.	Masukan kami BP harus ikut jaga keselamatan masyarakat di Kawasan Teluk Berau karena masyarakat adat diwilayah teluk itu penduduk tidak padat, dan lindungi macam2 habitat yang ada diwilayah operasinya BP Tangguh LNG dan hak-hak masyarakat harus BP menghargai dan hak-hak warga. Serta hak tentang pemekaran kampung Goras Selatan, sebagai kampung yang terkena Amdal.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
3.	Tanggapan persuahaan bahwa perusahaan siap tangani kampung-kampung yang apabila jadi pemekaran dilibatkan dalam DAVS apabila BP Tangguh LNG operasi diwilayah tersebut sehingga akan terjadi hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV). Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang.	
4.	Kami menghimbau kepada pemerintah bersama BP Tangguh LNG untuk segera melibatkan Kampung tetangga yang baru dimekarkan yaitu Kampung Goras Selatan jadi kampung yang termasuk dalam DAVS. Sebab kami telah usul kepada Pemerintah Kab Fakfak tapi belum ada tanggapan, maka kami berharap kepada Pemerintah Pusat bersama BP Tangguh LNG agar dapat merealisasikan dengan segera.		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
A	**Moh Saleh Rumagesan, Kokas Raya, Pik-Pik Sekar, Kokas**			
1.	Tolong bapak berdua dan ibu bisa memberikan kejelasan kepada kami terkait AMDAL Limba. Contohnya daerah Teluk Berau dan Teluk Bintuni		Berdasarkan hasil kajian AMDAL, daerah yang mungkin terkena dampak akibat pembuangan air limbah yang sudah diolah ke laut adalah maksimum radius 500 m dari	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	kiranya jarak berapa Km/Mil sehingga daerah itu bisa kena dampak		lokasi pembuangan, sehingga masih berada di dalam zona terlarang yang ditetapkan untuk kepentingan keselamatan dari fasilitas Dermaga Tangguh LNG	
2.	Kami mengarapkan kepada pihak BP Tangguh LNG dapat melihat ini secara baik dan bijak karena kami tahu Kokas juga masuk dalam daerah dampak		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberay sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada ANDAL Bab 1.	ANDAL Bab 1 (Halaman I-212)
3.	BP Tangguh LNG bisa menjelaskan pada kami kenapa sampai hingga saat ini kami masyarakat adat Kokas tidak pernah mendapatkan Amdal itu		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberay sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada ANDAL Bab 1.	ANDAL Bab 1 (Halaman I-212)
4.	Bapak bisa jelaskan kepada kami kenapa kami Boat / Speed punya BP Tangguh LNG bisa datang pelabuhan Kokas dalam 1 minggu datang 3 kali, menurut prosedur aturan yang disampaikan oleh UNIPA bahwa dampak sosial yang jelas Kokas tidak dapat Lewat catatan kami aturan prosedur mana sehingga Kokas bisa masuk			
5.	Kami minta pada pihak BP Tangguh LNG bahwa apabila terjadi Train 03 dan Train 04 kami minta pada BP Tangguh LNG Kokas dan Bomberai, Teluk Patipi dan RUmbati bisa masuk dalam Amdal			
6.	Bapak jelaskan pada kami yaitu Kokas dan Bomberai terus teluk Patipi dan Rumbati apakah masuk dalam dampak atau tidak			
7.	Apabila kalau distrik Kokas tidak terlibat dalam sosial Amdal yang jelas Kokas dan Bomberai tidak masuk, kira2 ada aturan manakah yang bisa			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	mengatakan Kokas dan Bomberai akan masuk dalam Amdal tersebut antara Train 1 dan Train II, III dan IV			
8.	Apabila kalau tidak ada semuanya dengan secara adat saya wakil raja Pik-Pik Sekar mengambil suatu langkah akan melihat Boat/Speed BP Tangguh LNG yang dalam satu minggu beroperasi di Kokas, hak ini tolong disikapi secepatnya seSub-bab ini sangat penting bagi pihak BP Tangguh LNG			
Salim Dorisara (Tokoh Pemuda Sub-babo)				
	a. Saran saya BP Tangguh LNG harus membuat jalan baru ke arah jeti besar Sub-babo dan jeti khusus tempat speed boat BP berlabuh. Karena ketika para karyawan BP setelah off atau masuk kerja atau harus melintasi jalan atau dermaga.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
	b. BP Tangguh LNG harus memperhatikan program: - Infrastruktur: pembuatan perumahan rakyat, penerangan / listrik, pembangunan jalan dan pembangunan air bersih		BP Tangguh LNG harus memperhatikan program: Perumahan: Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (halaman 37-48)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Sepanjang pengetahuan kami, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki program perumahan, meskipun mungkin pada saat ini masih terbatas dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Diharapkan bahwa di masa yang akan datang apabila Tangguh Train 3 telah memasuki tahap operasi dan produksi sehingga Dana Bagi Hasil migas meningkat maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat memperluas program perumahan ini sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang memerlukannya secara lebih luas.	
			Penerangan/ Listrik: Pada bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Pembangunan Jalan: Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Babo, misalnya pembangunan pelabuhan umum Babo, pelabuhan masyarakat serta perluasan dan peningkatan pelabuhan udara di Babo. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah Babo berada di wilayah operasi perusahaan migas lain, Tangguh LNG akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada perusahaan tersebut melalui SKK Migas.	
			Air Bersih: Tangguh LNG telah membantu membangun fasilitas guna meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di kampung-kampung. Tangguh LNG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Untuk itu, Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Komitmen dalam penyediaan air bersih dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG tertuang dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, bab Kesehatan, Sub bab Air Bersih dan Lingkungan.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6-12)
	Pendidikan: pengadaan transportasi darat untuk bus anak anak sekolah, bantuan dana		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	beasiswa untuk TK, SD, SMP, SMA / sederajat, dan Perguruan Tinggi, BP harus memindahkan pembangunan sekolah SMA ke lokasi baru karena jarak sekolah +- 300 meter dari bandara, sehingga terjadi kebisingan pesawat pada waktu take off dan landing pesawat dan itu sangat mengganggu poses belajar		berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Tangguh, Sub-bab Pendidikan (halaman 13-18)
Kosmas Lober (Kepala Kampung Salawir)				
	a. Perlu diketahui bahwa saya mewakili pemerintah kampung Salawir menyarankan kepada BP Tangguh LNG agar melihat kami di kampung Salawir menjadi salah satu kampung terbaru di wilayah Kab. Fakfak. Saran saya adalah: - Kami sarankan agar kami juga dikategorikan kampung DAVSs - Kami dari kampung Salawir mengharapkan agar dana CAPs disamakan dengan saudara kami di kampung kampung lain - Kami dari kampung Salawir mengharapkan agar BP Tangguh LNG mengakui bahwa kami juga mempunyai kampung yang sudah definitifkan oleh pemerintah kabupaten		Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
	b. Sepatutnya Tangguh LNG melengkapi		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk	Lampiran 3:

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	administrasi kami dengan infrastruktur untuk masyarakat dan bantuan penidikan bagi putra putri yang melanjutkan studi baik SLTA bahkan Perguruan Tingi		perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
	c. Membuka peluang bagi masyarakat agar menentukan ekonomi yang mengaarah pada jangka panjang		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
A	**Yulius Sabandefa, Pemerintah kampung Tanah Merah, Kampung Tanah Merah**			
1.	Pemantauan sosial, program tata kelola kepemerintahan, pembangunan kampung masyarakat asli Masukan : Pembangunan masyarakat asli yang telah disaksikan oleh pihak BP bahwa kepada keluarga yang dipindahkan dari kampung Tanah Merah lama ke Kampung Tanah Merah Baru dijanjikan berhak mendapat material ternyata sampai sekarang tidak dijawab maka sampai saat ini pun ada tambahan 38 Kepala Keluarga maka perlu direalisasikan Saran : Maka dengan dampak sosial kami masyarakat		Tangguh LNG telah memenuhi semua kewajiban yang sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Rumah dan Fasilitas Publik pada tahun 2002. Tangguh LNG sudah tidak memiliki kewajiban atau komitmen yang belum terselesaikan untuk membangun lebih dari apa yang telah disepakati di dalam Perjanjian	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	kampung Tanah Merah menyampaikan kepada BP agar siap membangun rumah sebanyak 50 buah rumah dan 2 buah gedung gereja GKT dan Pantekosta, serta pengaspalan jalan disepanjang pemukiman dan renovasi perumahan masyarakat			
2.	masukan : dalam kesepakatan secara lisan antara masyarakat Tanah Merah dan BP bahwa LNG menyala Tanah Merah menyala maka sebab itu Saran : Agar dengan penyambungan jaringan listrik dari Tangguh LNG kami sangat mengharapkan agar jaringan listrik yang masuk di rumah penduduk bebas biaya		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendistribusian listrik kepada masyarakat. Oleh karena itu aspirasi ini sebaiknya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, termasuk masalah pembayaran ganti rugi maupun pembayaran listrik.	
3.	Pembangunan kampung masyarakat asli Masukan : untuk memikirkan kepadatan penduduk kampung tanah merah yang tidak bisa diperluaskan Saran : maka kami masyarakat sangat mengharapkan agar tanah 50 Ha yang dibeli dari marga sununa dan diserahkan kepada pemerintah kampung Saengga di lokasi kampung Tanah Merah boleh dikembalikan kepada Kampung Tanah Merah untuk pemukiman baru.		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51), Pengembangan Masyarakat

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Mata pencaharian dan pendapatan di bidang perikanan : Masukan : dengan adanya penambahan pelabuhan Cargo disekitar pantai Awjo maka kami masyarakat kampung Tanah merah sudah tidak bisa membuang jaring lagi dan segala mata pencaharian dan jarak penyeberangan ke Tanjung Tagofa sudah lebih sukar.		Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	
4.	Saran : Untuk menjawab kesejahteraan kami sebagai terkena dampak langsung pihak BP memberikan jaminan hidup kepada kami masyarakat Tanah Merah dengan jumlah kepala keluarga sesuai jumlah penduduk		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Namun demikian, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan tunjangan jaminan hidup/tunjangan sosial dalam bentuk apapun.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35)
5.	Masukan : sesuai dengan jarak jembatan yang hamper kurang lebih 500 m3 sudah menghambat penyeberangan kami ke Sub-babo bahkan ke		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Tofoi		cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
6.	Saran : maka dengan itu jarak jembatan yang hampir kurang lebih 500 m3 sudah menghambat penyebrangan kami ke Sub-babo bahkan ke Tofoi			
7.	Saran : maka dengan itu kami masyarakat kampung tanah merah memohon agar pihak BP menyiapkan 1 buah boat Transportasi laut untuk penyebrangan ke Sub-babo dan Bintuni kemundian membuat jalan permanen bekas jalan setapak di pinggir pagar LNG menuju manggosa dan tembus lokasi merah 2 dan di aspal kemudian menyediakan 1 buah kendaraan mobil truck		Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	
8.	Masukan : Pelabuhan tanah merah merupakan pangkalan persinggahan emergency barat Saran : Maka kami sangat memohon agar pihak BP membuat jembatan ke laut untuk persinggahan kapal-kapal perintis untuk memudahkan kami masyarakat Tanah Merah Baru			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
A	**Taufik Biaruma, Pewakilan masyarakat Kokas, Kepala Kampung Ugar**			
1.	a. Pendidikan		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)
	b. Pembangunan/ permukiman		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)
	c. Rumah Masyarakat			
	d. Kesehatan		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (halaman 6-12)
	e. Ekonomi Kerakyatan		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bagi Masyarakat Asli. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar. Selain itu, Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
2.	Kami masyarakat meminta kepada pemerintah pusat Provinsi pemerintah daerah agar mau membantu kami untuk penyambuh lidah untuk bicara kepada pihak perusahaan agar Train 3 ini bisa sehingga tenaga kerja yang ada di distrik Kokas khususnya Kampung Ugar bisa mendapat lapangan kerja, karena ini penting bagi kami sehingga masyarakat ini bisa mendapat kerja		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya,	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			- Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Keahlian
3.	Perusahaan BP juga harus membentuk atau memilih humas dari masyarakat kampung itu sendiri.		Pada saat ini sebagian besar anggota Tim Comrel (Community Relation) berasal dari kampung-kampung yang berlokasi di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
4.	Kami masyarakat distrik Kokas meminta kepada perusahaan agar perusahaan juga memberikan kami semacam retribusi kampung yang terkena dampak, setiap bulan/setiap kali untuk kami kampung-kampung yang ada di Teluk Bintuni ini.		Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh.	
5.	Kami dari masyarakat Kokas yang kena dampak perlu kami sampaikan kepada perusahaan BP Tangguh LNG tolong memperhatikan anak2 kami yang selama ini sudah lulus dari bangku pendidikan tetapi belum mempunyai pekerjaan		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian
6.	Kami dari masyarakat distrik Kokas khususnya kampung Ugar meminta kepada BP Tangguh		Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	LNG agar BP juga mau memberikan kami dana semacam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sehingga kami bisa melihat rumah-rumah masyarakat kami di kampung kami		masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh.	
7.	Kalau bisa setiap tahun kami dari masyarakat distrik Kokas meminta kepada BP Tangguh LNG agar mau membuka lapangan kerja untuk kami dengan adanya Train 3 ini sehingga terkait dengan pengangguran di kampung kami bisa berkurang.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian
8.	Kami atas nama masyarakat Distrik Kokas meminta kepada Perusahaan BP supaya mau membantu kami Transportasi umum untuk setiap kampung yang kena dampak yaitu motor temple 40 PK dan bodynya/Kampung 1 buah		Pengadaan motor tempel dan peralatan nelayan telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
9.	Kami atas nama distrik Kokas khususnya kampung Ugar meminta kepada pihak perusahaan agar perusahaan melihat alur		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	beroperasi ketika kilang saat berjalan karena mengingat masyarakat kami di Kampung Ugar bermata pencaharian pada umumnya nelayan		cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
10	Kami masyarakat distrik Kokas khususnya masyarakat agar perusahaan di waktu menerima tenaga kerja maupun Humas kalau bisa perusahaan turun langsung ke kampung-kampung yang dibutuhkan tenaganya.		Terkait dengan rencana penerimaan tenaga kerja untuk selama tahap konstruksi, Tangguh LNG akan mensyaratkan kontraktornya untuk mempunyai beberapa tempat penerimaan pekerja. Prioritas akan diberikan kepada Masyarakat Asli yang tinggal di Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG, mengingat mereka merupakan Masyarakat Asli yang langsung terkena dampak. Tempat-tempat penerimaan tersebut adalah sebagai berikut: • Untuk Masyarakat Asli: di sekitar Wilayah Operasi Tangguh LNG, Babo, Biak, Sorong, Kabupaten Manokwari, Propinsi Manokwari, Fakfak, Bintuni, dan Jakarta. • Untuk masyarakat Papua : di sekitar Biak, Sorong, Kabupaten Manokwari, Propinsi Manokwari, Fakfak, Bintuni, dan Jakarta;	Lampiran 3 Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
A	**Aspirasi Masyarakat Tujuh kampung : Taroi, Pera-pera, Tambanewa, Sorondauni, Rimbitoto,**			

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Pera-Pera Barat, Kampunggo			
1.	Masyarakat Tujuh Kampung merupakan masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir di Teluk Bintuni yang memiliki hak ulayat yang menjadi wilayah kerja Migas yang memproduksi gas untuk Gas Plant Tangguh LNG. Masyarakat Tujuh· Kampung· Sampai saat ini masih memegang Teguh/manfaati adat istiadat dengan mempertahankan sistem budaya turun temurun dari senantiasa mengikuti dan mendukung pembangunan di segala bidang/sektor termasuk sektor pembangunan di bidang sektor pertambangan mihyak dan gas bumi. Masyarakat Tujuh Kampung tetap akan senantiasa mendukung kegiatan pengembangan dan pembangunan proyek gas BP Tangguh LNG di Teluk ,Bintuni. Serta masyarakat Tujuh Kampung menyadari bahwa pembangunan yang· dilakukan oleh proyek gas BP Tangguh LNG dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa Indonesia pada umumnya, masyarakat dan pemerintah daerah propinsi Papua Barat dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat Adat Teluk Bintuni dan kami masyarkat Tujuh Kampung. Masyarakat Tujuh Kampung merupakan masyarkat yang terkena dampak dari kegiatan pengembangan proyek BP Tangguh LNG dan termasuk dalam wilayah Ring 1 dan Ring 2 sesuai areal dampak kegiatan migas, maka kami berpendapat bahwa sesuai dengan pengamatan atas kegiatan proyek BP sejak tahun 2001 s/d.saat ini banyak memberikan manfaat bagi		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	masyarakat adat Teluk Bintu&,/dan kami masyaraka' Trijuh Kampung:. Namun kegiatan ;yangii tlakukan oleh BP Tangguh LNG masih. t rB.sa kurang dan . belum sesuai dengan Amdal proyek BP Tangguh LNG terdahulu. Berdasarkan pengamatan tersebut perkenankanlah karni masyarakat Tujuh Kampung mengajukan usulan dan rekomendasi untuk dimasukkan dalam revisi Amdal proyek · BP Tangguh LNG di Teluk Bintuni sebagai berikut :			
2.	Bahwa Pihak BP Migas dan proyek. BP Tangguh LNG (Beyond Petroleum) udah saatnya harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat orang Papua Asli, masyarakat Adat Teluk Bintuni. dan kami masyarakat AdaTujuh Kampung sesuai undang-undang otonomi khusus Papua dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hak ulayat meliputi tanah, laut, sungai, gunung, pohon dan kebiasaan. hidup masyarakat setempat		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, termasuk UU Otonomi Khusus	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
3.	Bahwa pihak BP Migas dan proyek BP Tangguh LNG (Beyond Petroleum) dah pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah saatnya harus transparan kepada masyarakat adat - Teluk Binuni, termasuk masyarakat Tujuh Kampung tentang jumlah total penerimaan dana bagi hasil dari minyak dan gas bintuni kepada Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni.		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
4.	Bahwa pihak BP Migas dan . proyek BP. Tangguh LNG sudah saatnya memperbesar porsi/jumlah dana yang · dialokasikan untuk kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR), Community		Program-program sosial yang telah dipersiapkan oleh Tangguh LNG tidak hanya mencakup program sosial yang bersifat pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari adanya proyek pengembangan Tangguh LNG, namun juga meliputi program sosial yang sifatnya berupa	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Develompment (CD) dan kegiatan CSR tersebut harus transparan, terukur, bermanfaat .dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni· dan masyarakat Adat Teluk Bintuni, termasuk. kami masyarakat Tujuh Kampung.		penghargaan kepada Masyarakat Asli. Untuk meningkatkan manfaat program sosial Tangguh LNG bagi Masyarakat Asli, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (DAV). Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).	
5.	Bahwa pihak BP. Migas diproyek BP Tangguh LNG (Beyond Petroleum) sudah saatnya dalam membuat rencana kegiatan/program untuk CSR harus berbasis kebutuhan masyarakat Adat Teluk Bintuni, termasuk kami masyarakat Tujuh Kampung.		Di dalam mempersiapkan pembangunan Tangguh LNG train 1 dan 2 maupun proyek pengembangan Tangguh LNG (train 3 dan 4) Tangguh LNG telah melakukan kajian potensi dampak sosial. Kajian tersebut didasarkan kepada hasil yang diperoleh selama proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik, masukan dari para ahli di bidang sosial telah masuk dalam dokumen KA ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			dapat memenuhi semua aspirasi masyarakat yang disampaikan selama proses penyusunan AMDAL, termasuk salah satunya permintaan untuk dilakukannya pemetaan batas wilayah ulayat adat.	
6.	Bahwa pihak BP. Migas diproyek BP Tangguh LNG (Beyond Petroleum) sudah saatnya dalam menyusun rencana kegiatan/program untuk CSR-Community Development harus melibatkan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, lembaga masyarakat Adat Teluk Bintuni dan kami masyarakat Tujuh Kampung.		Program-program pengelolaan sosial yang telah Tangguh LNG setiap tahunnya di koordinasikan dengan dinas-dinas terkait di Pemda Teluk Bintuni dalam acara rapat koordinasi perencanaan tahunan.	
7.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya harus senantiasa melibatkan/mengikutsertakan wakil-wakil dari pemerintah Teluk Bintuni, Lembaga musyawarah masyarakat Adat Teluk Bintuni dan kami masyarakat Tujuh kampung		Apabila dokumen AMDAL yang didalamnya memuat program pengelolaan sosial telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Tangguh LNG akan menyusun dokumen *Tangguh Sustainability Program* yang mengatur perincian atas pelaksanaan program sosial, dimana di dalam proses penyusunannya Tangguh LNG akan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-51)
8.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya setiap tahun harus melaksanakan rapat untuk evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/program CSR-Community Development bersama-sama dengan pihak pemerintah Teluk Bintuni, lembaga musyawarah masyarakat adat Teluk Bintuni dan kami masyarakat Tujuh Kampung.		Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Namun demikian, masyarakat berhak untuk membentuk tim pengawas independen untuk mengawal komitmen-komitmen sosial Tangguh LNG. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku	
9.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya untuk membentuk dana abadi peruntukan bagi pengembangan SDM dan pengembangan sumber daya alam masyarakat Adat Teluk Bintuni, dan kami masyakarat Tujuh Kampung		Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan dana abadi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
10.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya membantu mendorong dan memfasilitasi pengembangan sumbe rdaya manusia dan sumber daya alam milik masyarakat adat teluk bintuni dan kami masyarakat Tujuh kampung.		Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	
11.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya membantu mendorong dan		Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki	Lampiran 3 RKL/RPL –

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	membangun fasilitas pendidikan berupa gedung baru dan renovasi gedung sekolah dan peralatan laboratorium serta buku-buku pelajaran, mulai tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah menengah umum dan sekolah menengah keguruan atas.		infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub Bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)
12.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya membantu mendorong dan membangun fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, Posyandu untuk masyarakat adat diwilayah Kabupaten Teluk Bintuni, dan kami masyarakat Adat Tujuh Kampung		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Tangguh LNG telah berhasil membantu meningkatkan status fasilitas kesehatan di Bintuni, dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan RSUD Bintuni menjadi rumah sakit rujukan. Tangguh LNG juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Teluk Bintuni. Rincian tentang komitmen	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Kesehatan (Halaman 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	
13.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya membantu mendorong dan menggunakan hasil pertanian dan perikanan masyarakat Adat Teluk Bintuni dan kami masyarakat Adat Tujuh kampung proyek untuk perusahaan catering yang melayani karyawan dan kontraktor proyek BP Tangguh LNG		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Halaman 31-35)
14.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saat ini membantu mendorong dan menggunakan Balai Latihan Kerja milik PEMDA Kabupaten Teluk Bintuni dan mendidik/melatih anak-anak/putra-putri dari masyarakat adat Teluk Bintuni dan masyrakat Tujuh Kampung agar mereka memiliki keterampilan dan keahlian untuk siap masuk dunia kerja baik yang ada di proyek BP Tangguh LNG maupun dunia kerja lainnya.		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
15.	Bahwa pihak BP Migas dan Proyek BP Tangguh LNG sudah saatnya memberikan dan menyiapkan beasiswa bagi anak-anak/putra-putri masyarakat Adat Teluk Bintuni dan masyarakat Asli Papua Barat untuk mengikuti pendidikan tinggi di bidang studi teknik kebumian maupun teknik lainnya, termasuk bidang studi kedokteran. Beberapa hal yang kami usulkan adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat setempat serta		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	lingkungan hidup di wilayah distrik Taroi. Untuk itu kami meminta kepada BP Migas dan proyek BP Tangguh LNG memberikan dukungan penuh mewujudkan aspirasi sebagaimana hal tersebut diatas. Semoga Tuhan YME selalu memberikan kita karunia dan kekuatan serta umur yang panjang demi kemajuan bangsa dan Negara republic Indonesia, khususnya penduduk Asli Papua. Demikian aspirasi dari masyarakat Tujuh Kampung : Taroi, Pera-Pera, Tambanewa, Sorondauni, Rimbitoto, Pera-Pera Barat, Kampunggo. Atas perhatiannya dan dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih.		masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli.	
A	**Aspirasi Kampung Tanah Merah Baru**			
1.	Komponen Fisik-Kimia a) Suhu udara; Menjaga tetap aman suhu udara dan pola yang baik dari pencemaran dan pembuangan gas flare dari tangguh baik dari,dalam plant (kilang Produksi tangguh) maupun dari pembuangan gas Motor Diesel (Ganset) atau dari aktifitas penggunaan kendaraan didalam area Pabrik (Tangguh LNG) 1.		Kegiatan pengelolaan emisi udara dari kegiatan operasi Tangguh LNG saat ini telah dilakukan dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Hasil pemantauan udara ambien untuk parameter suhu selama ini selalu menunjukkan nilai yang memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
	b) Kualitas Udara Kualitas udara baik pada sumber rnaupun daerah sekitar wilayah Dampak langsung Kampung Tanah Merah,Dan Hujan yang tidak pasti akibat pengumpulan Gas lndustri dalam Proyek Tangguh LNG dan MenyeSub-babkan		Kegiatan pengelolaan emisi udara dari kegiatan operasi Tangguh LNG saat ini telah dilakukan dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Hasil pemantauan udara ambien selama ini selalu menunjukkan nilai yang memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	Hujan industry yang menimbulkan berbagai penyakit			
	c) Hidrologi Fluktuasi, potensi dan kualitas air tanah (dangkal dan dalam); Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air bersih untuk air minum mandi, cuci (sangat minim dan susah) di 3 tahun terakhir 2011 – 2013 yang terjadi 1 hari supplai air bersih ke setiap rumah di Kampung Tanah Merah, hanya mendapat 30 menit – 1 jam dengan debit air yang sangat kecil.		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan kolektif, dan telah dipasang di masing-masing RT di Kampung Tofoi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
	d) Hidrooseanografi : Karakteristik fisik sungai dan bibir pantai sepanjang kampung Tanah Merah Baru terjadi erosi sepanjang bibir pantai, tanah Merah baru sampai Onar Baru dan sepanjang sisi kiri dan kanan sungai/kali Saengga, menjadi perhatian abrasi/erosi yang diakibatkan setelah diadakan penelitian dan pengukuran oleh Pemuda Tanah Merah baru mencapai 14 meter dari tahun 2004-2012, sehingga menemukan data pertahunnya erosi mencapai 2 meter/tahun Rekomendasi Doc.AMDAL BP Tangguh LNG harus Membuat Beton Pemecah Obak dan Penanaman Manggrove di sepanjang Pesisir bibir pantai dan didalam untuk Sungai Saengga di taluk kembali		Abrasi yang terjadi di Kampung Tanah Merah Baru merupakan gejala alam dan sama tidak terkait dengan kegiatan Tangguh LNG. Tidak ada kegiatan Tangguh LNG yang mempunyai potensi untuk menimbulkan abrasi.	
2.	Ruang lahan dan tanah : 1. Inventarisasi tata guna lahan dan sumber		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	daya lainnya pada saat rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang; 2. Rekomendasi Doc. AMDAL : BP Tangguh LNG harus inventarisasi atau perluasan Kampung Tanah Merah Baru untuk pengembangan Masa Depan Kampung Tanah Merah		Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	
3.	Komponen Biologi : a) Flora 1. Peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanannya yang berada dalam wilayah Tanah Merah baru 2. Uraikan tentang jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi Undang-Undang yang berada dalam wilayah wilayah Tanah Merah Baru : 3. Rekomendasi doc. Amdal : BP Tangguh LNG harus menjaga dan melestarikan Habitat keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah dampak Tanah merah baru agar tetap terjaga dan tetap stabil		a. Flora : 1. Peta biogeoklimatik tidak diperlukan, karena areal Tangguh LNG terletak pada satu jenis hamparan yaitu dataran rendah. Peta biogeoklimatik diperlukan apabila mencakup daerah yang meliputi berbagai jenis hamparan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. 2. Tabel mengenai vegetasi yang dilindungi sudah ada di ANDAL (Tabel II-75) dan bahwa mangrove adalah ekosistem yang dilindungi juga sudah dijelaskan 3. Tangguh LNG mempunyai rencana pengelolaan dan pemantauan untuk meminimalkan dampak terhadap flora dan fauna termasuk terhadap flora dan fauna yang dilindungi dalam area Tangguh LNG dimana terdapat area pembukaan lahan untuk proyek Pengembangan Tangguh LNG. Pembukaan lahan dalam wilayah Tangguh LNG akan diminimalkan. Lahan yang dibuka untuk tujuan konstruksi tapi tidak digunakan untuk fasilitas permanen akan direvegetasi kembali. Rincian dapat dilihat di RKL/RPL lampiran I halaman 20.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	b) Fauna 1) Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan 2) Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit 3) Perikehidupan hewan penting di atas, termasuk cara perkembangbiakan, siklus dan daur hidupnya,cara pemijahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah teritorinya. Rekomendasi Doc. Amdal : BP Tangguh LNG harus menjaga dan melindungi semua satwa liar baik didarat dan dilaut agar tidak berubah dari ekosistemnya yang sudah ada dan berada pada wilayah dampak Langsung Tanah Merah Baru		Fauna : 1. Rona lingkungan fauna, termasuk yang dilindungi dapat dilihat pada ANDAL sub bab 2.2.1.2 2. Hasil studi AMDAL (sub bab biologi darat) menunjukan tidak terdapat hewan invertebrata darat (capung, kumbang dan hewan tanah) yang dilindungi oleh Pemerintah RI, IUCN, dan CITES. Selain itu hasil studi juga tidak mengemukakan pentingnya peranan hewan invertebrata tersebut pada lingkungan. Sedangkan hewan invertebrata perairan laut telah dikemukakan dalam dokumen ANDAL Sub-BaB 2.2.2 Biologi perairan (sub bab 2.2.2.1 Biota Perairan Sungai, 2.2.2.2 Biota Perairan Laut, 2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan, 2.2.2.4 Jaring Makanan). 3. Dokumen ANDAL hanya mengemukakan hal-hal penting mengenai rona lingkungan yang terkait dengan Dampak Penting Hipotetik yang diidentifikasi pada Kerangka Acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH. Sumber dampak terhadap satwa liar adalah kegiatan pembukaan lahan. Dalam hal ini tidak ada pembukaan lahan di luar area Tangguh LNG. Pembukaan lahan dalam wilayah Tangguh akan diminimalkan. Lahan yang dibuka untuk tujuan konstruksi tapi tidak digunakan untuk fasilitas permanen akan direvegetasi kembali. Rincian dapat dilihat di RKL/RPL lampiran I halaman 20.	
4.	Sosial : Komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya: a) Demografi : 1. Struktur penduruk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata		Seluruh aspek tersebut telah tertuang dalam dokumen ANDAL, pada bagian Rona Sosial di SUB-BAB II	Dokumen ANDAL BAB II: Rona Lingkungan

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	pencaharian, pendidikan dan agama 2. Tingkat Kepadatan Penduduk 3. Pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi dan pola migrasi sirkuler, komuter, permanen 4. Tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran)			
5.	Ekonomi: a. Ekonomi rumah tangga (tingkat pendapatan, pola nafkah ganda)		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan program peningkatan pendapatan masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen	Pengeloaan Sosial Tangguh sub-bab Peningkatan Pendapatan Halaman 31-35
	b. Ekonomi sumber daya alam (pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola pemanfaatan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah dan sumber daya alam lainnya,sumber daya alam milik umum);		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	
	c. Perekonomian lokal dan regional (kesempatankerja dan berusaha, nilai		Dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan program peningkatan pendapatan	Pengeloaan Sosial Tangguh sub-bab

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	tambah karena proses manufaktur, jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial, aksesibilitas wilayah).		masyarakat atau livelihood yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan keluarga Masyarakat Asli dengan cara menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen	Peningkatan Pendapatan Halaman 31-35
	d. Pertumbuhan Perikanan dan Pertanian		Bidang Pertanian: Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	e. lnfrastruktur dan Transportasi Pendukung - Rekomendasi Doc. AMDAL: BP Tangguh LNG Harus membuka pagar penghubung LNG don Kampung Tanah Merah Sebagai bentuk pembukaan ruang pertumbuhan ekonomi keluarga (pertumbuhan ekonomi dalam industri rumah tangga)		Tangguh LNG menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat membuka pagar Kilang LNG. Untuk membantu masyarakat mengatasi masyarakat, Tangguh LNG telah membangun jalan alternatif di sekitar Tangguh LNG yang dapat digunakan oleh masyarakat dari Kampung Tanah Merah ke Manggosa dan Tofoi.	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Rekomendasi Doc.AMDAL: BP Tangguh LNG Harus Merenovasi kembali akses jalan dari Tanah Merah ke Manggosa (bersifat Permanent) sebogai bentuk penghubung pemukiman dan area mata pencaharian (menjaring dan mengolah hasil saggu }untuk kebutuhan masyarakat Tanah merah		Tangguh LNG berkomitmen akan menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan kampung, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 49-50), Pengembangan Masyarakat
	- Rekomendasi Doc. AMDAL BP Tangguh LNG Harus memfasilitasi Alat Tangkap, Perahu nelayan dan Fasilitas pendukung lainnya juga LNG sebagai Pasar Untuk Nelayan diarea Dampak Tanah Merah Baru (dalam penjualan hasil perikanan)		Bidang Perikanan: Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	- Rekomendasi Doc. AMDAL BP Tangguh LNG harus memfasilitasi pengadaan bibit, pbat-obatan dan pupuk, juga LNG sebagai pasar untuk petani di area dampak, Tanah Merah Baru dalam penjualan hasil pertanian		Bidang Pertanian: Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	- Rekomendasi Doc. AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan modal usaha kepada masarakat Tanah Merah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian Masyarakat Kampung Tanah Merah lewat program BP		Tangguh LNG melihat bahwa pembangunan jangka panjang dalam bidang kewirausahaan untuk Masyarakat Asli dapat dicapai melalui keterlibatan peran Pemerintah yang lebih besar. Oleh karena itu, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan jangka panjang di bidang kewirausahaan bagi Masyarakat Asli.	Lampiran 3 RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
6.	Fasilitas sosial dan fasilitas umum (fisik non fisik)		Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan	Lampiran 3

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan fasilitas electrical Listrik Gratis (bebas biaya selama Tangguh LNG beroperasi)		penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya. Bahkan sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pembayaran listrik yang didistribusikan oleh PLN.	Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (Halaman 50-52), Pengembangan Masyarakat
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus membangun pelabuhan atau jetty dalam skala besar Standar Nasional yang menjadikan salah satu media transportasi perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat di Kampung Tanah Merah		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Sebyar, misalnya pembangunan jetty, walkway, puskesmas, gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan dari Sebyar ke Bintuni, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
	- Rekomendasi Doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan transportasi (Dump Truck) kepada kampung Tanah Merah sebagai transportasi untuk kebutuhan primer dan sekunder		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas tersedianya transportasi laut antar-kabupaten. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini. Komitmen Tangguh LNG dalam mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi laut terbatas	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			pada hal-hal yang berhubungan dengan transportasi air yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
	- Rekomendasi doc AMDAL harus membangun sekolah SMA/SMK yang berstandar nasional dan fasilitas pendukung yang tinggi di kampung Tanah Merah		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan satu sekolah unggulan di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan penambahan fasilitas air bersih baik sumur bor air dan tangki penampungan air bersih yang berskala besar dan lebih memadai		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan kolektif, dan telah dipasang di masing-masing RT di Kampung Tofoi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
7.	Pendidikan (Fisik non Fisik) - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan beasiswa secara merata kepada semua pelajar Tanah Merah baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi didalam maupun luar negeri		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Pada tahun 2013, penerima beasiswa yang berasal dari Distrik Sumuri berjumlah 9 orang mahasiswa dan 10 orang pelajar SMK. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Di samping itu, Tangguh LNG juga memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar SD, SMP, dan SMA, termasuk yang berasal dari Distrik Sumuri, melalui mekanisme CAPs	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus membuka BLK atau Balai Latihan Kerja di Kampung Tanah Merah untuk meningkatkan SDM bagi masyarakat Tanah Merah -		Sebagai bagian dari program Pengembangan Masyarakat Papua, kami akan mengevaluasi beberapa fasilitas pelatihan vokasional di Papua Barat. BLK Aranday akan menjadi bagian dari evaluasi tersebut.	
	- Rekomendasi doc AMDAL harus merenovasi ulang asrama pendidikan yang saat ini terbengkalai		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus menambahkan fasilitas rumah guru dan tenaga pengajar di Kampung Tanah Merah		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
8.	Kesehatan (fisik non fisik) - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus menyediakan Tenaga Medis baik perawat maupun dokter yang ditetapkan di Tanah Merah Baru, adalah dokter dan perawat spesialis dan bukan dokter praktek atau kontrak		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas dan pelayanan kesehatan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan (hal 6-12)

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan 1 speed boat dan 1 mobil ambulance untuk pelayanan kesehatan dikampung Tanah Merah baru - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus menambahkan fasilitas perumahan kesehatan di Kampung Tanah Merah		Untuk mendukung peningkatan kesehatan di area kampung, Tangguh LNG akan mendukung penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta petugas kesehatan dan peralatan medis (pustu) sesuai dengan standar ISO yang berlaku, dan dengan jumlah yang memadai. Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah mengupayakan pengembangan RSUD Bintuni agar menjadi rumah sakit rujukan, dengan standar operasional; sarana dan perlengkapan medis; tenaga kesehatan serta dokter yang memadai. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas penyediaan speedboat dan mobil ambulance, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini. - Tangguh LNG juga akan menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat setempat agar dapat lebih memahami dan melaksanakan cara hidup yang bersih dan sehat; serta menghindari perilaku-perilaku yang dapat menyeSub-babkan munculnya penyakit - Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam memberikan program bantuan pendidikan di bidang kesehatan (seperti kedokteran, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya) kepada Masyarakat Asli setempat, dan masyarakat Papua.	
9.	Sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat : - Rekomendasi Doc AMDAL BP Tangguh LNG harus menyediakan kapal transportasi kepada Kampung Tanah Merah untuk wilayah Teluk bintuni		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas tersedianya transportasi laut antar-kabupaten. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini. Komitmen Tangguh LNG dalam mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi laut terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan transportasi air	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
			yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
10.	Sumber mata pencaharian dan ketenaga kerjaan - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Tanah Merah untuk melakukan usaha-usaha industri kecil seperti pengadaan atau supply ke Project BP Tangguh LNG, baik dalam skala kecil atau besar		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (IEDP) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (BHBEP). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3: Pengelolaan Sosial Tangguh, Sub-bab Pengembangan Pekerja asal Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 17-30), Pemberdayaan Masyarakat Asli untuk Dapat Berkompetisi daam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian
	- Rekomendasi Doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memperkerjakan masyarakat Lokal Kampung Tanah Merah untuk bekerja didalam proyek LNG Baik di BP Kontraktor dan Mitra BP lainnya		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: • Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, • Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, • Papua Barat lainnya, • Papua lainnya • Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL- Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus memperkerjakan kembali masyarakat lokal Tanah Merah yang telah		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja,	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	selesai kontrak dari BP Tangguh LNG. Rekomendasi Doc AMDAL BP Tangguh LNG harus mencapai angka 80 % masyarakat asli Tanah Merah untuk bekerja dalam proyek Tangguh LNG baik kontrak maupun permanen		masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG	
11.	Kepemilikan tanah masyarakat setempat (tanah milik tanah adat) - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus membayar hak ulayat laut kepada Masyarakat pemilik adat yang berada di Kampung Tanah Merah		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus mengembalikan hak kepemilikan tanah adat yang di hargai 15 rupiah kepada 3 marga pemilik tanah		Status tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004, sertifikasinya telah selesai diproses berdasarkan Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten	

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	adat karena dianggap cacat hokum		Teluk Bintuni tahun 2013 dengan nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	
	- Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus membangun perumahan untuk Kepala Keluarga (KK) di Kampung Tanah Merah Baru		Tangguh LNG telah memenuhi semua kewajiban yang sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Rumah dan Fasilitas Publik pada tahun 2002. Tangguh LNG sudah tidak memiliki kewajiban atau komitmen yang belum terselesaikan untuk membangun lebih dari apa yang telah disepakati di dalam Perjanjian.	
12.	Bagi Hasil LNG Tangguh LNG kepada masyarakat DAVS/RAV: - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus melakukan system dan transparansi bagi hasil penjualan dari hasil LNG kepada masyarakat DAVS - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG haus memberikan 2% - 5% bagi hasil LNG kepada masyarakat DAVS/DAVS		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
13.	Fasilitas Adat : - Rekomendasi doc AMDAL BP Tangguh LNG harus membangun rumah adat Sumuri di Kampung Tanah Merah Baru - Rekomendasi Doc AMDAL BP Tangguh LNG harus merenovasi semua rumah		Tangguh LNG menghormati norma, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen akan membangun rumah adat bagi masing-masing suku yang terdiri dari Suku Sebyar, Suku Irarutu, Suku Simuri, Petuanan Arguni, Petuanan SekarPikpik, dan Petuanan Wertuwar.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-

No.	MASUKAN	HALAMAN	TANGGAPAN	HALAMAN
	adat yang berada di sekitar proyek LNG Tangguh LNG			48)

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 14 Februari 2014)

PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN AMDAL TERPADU
PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN FAKFAK DAN KABUPATEN TELUK BINTUNI,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

NOTULENSI
PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN AMDAL TERPADU PENGEMBANGAN PROYEK LNG TANGGUH
DI KABUPATEN FAKFAK DAN KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 14 Februari 2014

Tempat: Balai Pertemuan Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
Rapat pertemuan dengan masyarakat kabupaten Fakfak, dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan Terpadu AMDAL Pengembangan Proyek LNG, di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd, hasil rapat sebagai :				
A	Menyepakati untuk meneruskan proses finalisasi penilaian dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh yang sedang dilaksanakan		Terima kasih atas dukungannya	
B	Pemerintah Kabupaten Fakfak serta masyarakat adat Fakfak mengharapkan agar kabupaten Fakfak tidak dipandang sebagai sekedar daerah non-penghasil, karena pada dasarnya kabupaten Fakfak, merupakan satu kesatuan wilayah Proyek Pengembangan Tangguh (Tangguh Expansion Project area).		Penetapan mengenai kabupaten penghasil atau kabupaten non-penghasil, telah diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan atau merubah batas administratif kabupaten penghasil atau kabupaten non-penghasil. Sebagai informasi, sampai dengan saat ini gas yang dialirkan ke Kilang Tangguh LNG seluruhnya bersumber dari lapangan gas yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Lapangan gas yang secara administratif berlokasi di Kabupaten Fakfak adalah lapangan gas Ubadari yang berpotensi untuk dikembangkan dan menghasilkan gas di kemudian hari. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	
C	Terkait dengan itu, memohon kepada Gubernur Papua Barat agar distribusi dana bagi hasil migas dari Proyek Pengembangan Tangguh (Train III dan IV), menggunakan pendekatan wilayah, pelaksanaan Proyek Pengembangan Tangguh sebagai satu kesatuan wilayah, yang tidak terpisahkan, dan dimasukkan ke dalam kategori daerah penghasil			

D	Bahwa dalam dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh, harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh, terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat (ulayat) baik masyarakat di 17 kampung yang ada dalam wilayah study AMDAL, maupun kampung-kampung lain yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, dalam konteks Pengembangan Proyek Tangguh		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal-hal yang tidak diatur berdasarkan kontrak kerja sama atau hukum yang berlaku. Apabila yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak masyarakat adat ini menyangkut aspirasi untuk mendapatkan kompensasi atau pembayaran dalam bentuk apapun, sebaiknya aspirasi tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Namun apabila yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak adat tersebut berupa program-program pengelolaan sosial maupun program-program yang bersifat penghargaan, Tangguh LNG telah memberikan perhatian yang khusus terhadap Masyarakat Asli Papua dengan memberikan prioritas kepada Masyarakat Asli Papua sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Disamping itu Tangguh LNG juga telah mempersiapkan program pengelolaan sosial yang tercantum di dalam Lampiran 3 – Pengelolaan Sosial Tangguh meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 1. Kesehatan Masyarakat; 2. Pendidikan; 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan hubungan industrial ;	Lampiran 3 RKL-RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh

			4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 5. Kewirausahaan Papua (Inkubasi Bisnis); 6. Tata Kelola Kepemerintahaan Yang Baik; dan 7. Hubungan Eksternal.	
E	Pemerintah kabupaten Fakfak serta masyarakat kabupaten Fakfak, mengharapkan agar kajian AMDAL (ANDAL RKL DAN RPL), Train III dan IV, juga menggunakan pendekatan-pendekatan socioculture dengan pertimbangan wilayah adat, serta hubungan kekerabatan (kohesi sosial) antar masyarakat adat		Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.	
F	Manfaat proyek pengembangan Tangguh, terhadap pemerintah dan masyarakat adat, di kabupaten Fakfak, harus secara tegas dan transparan dimuat dalam bagian yang tidak terpisahkan, dalam dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh (Train III dan IV)		Manfaat proyek pengembangan Tangguh LNG telah dijelaskan dalam Bab 1 Dokumen AMDAL, Manfaat tersebut meliputi • Membantu memenuhi kebutuhan gas domestic, mengingat 40% dari produksi LNG dari Kilang LNG 3 akan dialokasikan untuk pasar domestik; • Mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan ini, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek pembangkit listrik tenaga gas yang antara lain meliputi, keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur, peluang pasar gas, kebijakan energi nasional serta kepentingan umum.	Bab 1 ANDAL

			Tangguh LNG memahami bahwa rekomendasi dari SKK Migas dan persetujuan dari Menteri ESDM atas alokasi sejumlah tertentu gas sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG diperlukan sebelum pelaksanaan pemasokan dan penjualan gas; • Mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni dengan menjual melalui PLN kelebihan daya listrik yang dihasilkan dari Tangguh LNG. 4MW telah siap dan mulai disalurkan di bulan Februari 2014, dan 4 MW selanjutnya sedang disiapkan untuk disalurkan ditahun mendatang ; • Menambah pemasukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dari hasil penjualan LNG serta pajak; • Membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal yang akan membantu meningkatkan pendapatan dan keanekaragaman mata pencaharian; • Meningkatkan kemitraan yang sudah ada dan melanjutkan investasi dalam pengembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal serta masyarakat di Teluk Bintuni; • Meningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja Indonesia, khususnya masyarakat lokal Papua di bidang teknologi minyak dan gas, melalui pelatihan dan pendampingan; dan • Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan melalui program investasi masyarakat.	
G	Khusus terhadap pengembangan kegiatan Train IV, kegiatan operasinya hendaknya dapat direncanakan secara bersama-sama, pemerintah kabupaten dan masyarakat Fakfak sebelum kegiatan berlangsung		Tanggapan untuk huruf G dan H Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, perencanaan dan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan migas berada di bawah kewenangan SKK Migas serta Kementrian ESDM. Demikian pula halnya bahwa kegiatan eksplorasi, produksi dan operasi dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, termasuk operasi Kilang Tangguh LNG, berada di bawah kewenangan SKK Migas dan Kementrian ESDM.	Lampiran 3 RKL-RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh
H	Terkait dengan butir G diatas, perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh, terhadap pemenuhan hak-hak pemerintah kabupaten Fakfak dan masyarakat adat atau (semua kampung-kampung yang berada pada wilayah kegiatan Pengembangan Tangguh), sebagaimana yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat adat Teluk Bintuni dalam kegiatan operasi train I dan II			

			Namun demikian, dalam hal kegiatan Tangguh LNG membawa potensi dampak sosial maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Disamping itu Tangguh LNG juga telah mempersiapkan program pengelolaan social yang tercantum di dalam Lampiran 3 – Pengelolaan Sosial Tangguh. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	
I	Diharapkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility lewat program Tangguh Sustainability, agar melibatkan pemerintah kabupaten Fakfak, sejak taraf perencanaan hingga evaluasi, termasuk dalam sosialisasi program kerja tersebut ke kampung-kampung dimaksud, secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten Fakfak		Apabila dokumen AMDAL yang didalamnya memuat program pengelolaan sosial telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Tangguh LNG akan menyusun dokumen *Tangguh Sustainability Program* yang mengatur perincian atas pelaksanaan program sosial, dimana di dalam proses penyusunannya Tangguh LNG akan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait, termasuk Pemda Fakfak.	
J	Khusus menyangkut evaluasi dampak, termasuk progres pelaksanaan program CSR, diharapkan dapat dilaksanakan secara reguler setiap semester bersama pemerintah kabupaten, dan wakil-		Sesuai dengan peraturan tentang Izin Lingkungan, pelaksanaan kegiatan program sosial yang termasuk dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) akan dipantau	

	wakil masyarakat dari setiap kampung dimaksud		sesuai dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan hasilnya akan dilaporkan secara rutin kepada KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Bapedalda Propinsi Papua Barat.	
K	Diharapkan dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG, secara khusus memberikan perhatian terhadap dampak transportasi laut yang melewati wilayah perairan kabupaten Fakfak		Tangguh LNG telah melakukan kajian terhadap dampak transportasi laut didala\m Bab 3 Evaluasi Dampak Penting, terkait dengan hal itu juga telah disusun pengelolaan terhadap dampak-dampak yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL	Bab 3 ANDAL Matrik RKL-RPL
L	Kementerian lingkungan hidup akan melibatkan pemerintah kabupaten Fakfak, dalam rapat akhir evaluasi dokumen AMDAL, (ANDAL RKL DAN RPL) dengan memasukkan hasil perbaikan yang dilakukan oleh BP Berau sebelum dilakukan pengambilan keputusan		Pemrakarsa akan sepenuhnya mendukung proses evaluasi dokumen AMDAL yang ditentukan oleh KLH selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, termasuk dalam hal proses konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait sebelum dilakukan pengambilan keputusan	
	Notulensi rapat ini sekaligus juga dipandang sebagai bagian dari Berita Acara (yang dibuat secara terpisah) yang akan ditandatangani bersama oleh pihak BP, Kementrian Lingkungan Hidup RO dan Pemerintah Kabupaten Fakfak.		Notulensi rapat tanggal 14 Februari 2014 di Kokas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG Di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. tanggal 5 Desember 2013 dan dilanjutkan tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni. Semua notulensi rapat yang disebutkan diatas beserta tanggapan dari Pemrakarsa akan dimasukkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL ini	

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG DI KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT,
OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 14 Februari 2014

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
Marthen Bless (K. UPP Kokas)				
	a. Manfaat eksploitasi bahan bakar cair di Teluk Bintuni: - Positif: Memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial - Negatif: Apakah tepat sasaran dan apakah terlaksana b. Dampak / akibat: - Ekonomi - Sosial - Kesehatan - Sekarang dan akan datang: + Ketika habis bahan bakar baku artinya dia kering + bagaimana penanggulangannya!		Kilang Tangguh LNG mengolah gas alam menjadi gas alam cair (LNG) untuk selanjutnya gas alam cair tersebut dijual kepada pembeli baik di dalam maupun di luar negeri. Hasil penjualan LNG tersebut menjadi pemasukan bagi Negara, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dapat menggunakan dana bagi hasil migas untuk membiayai program-program pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga ketika cadangan gas habis, Pemerintah Daerah dan masyarakat telah memiliki sumber pemasukan pengganti.	
Nafrasis Gwas – Gwas (Perwakilan Kampung Andamata)				
	a. Kami harap supaya pihak BP jangan hanya janji – janji saja, karena kami ikuti pertemuan di Bintuni yang menyangkut dengan AMDAL 1 dan 2 itu sudah menyentuh masyarakat atau belum. Ini menjadi kekhawatiran kami		a. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan kategori PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku.	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Hasil bumi atau gas yang sekarang sudah diproduksi ini bukan satu dua tahun, ini puluhan tahun. Jadi apalagi terdapat dampak ke masyarakat atau tidak. Kalau ada apakah pihak BP sudah siapkan lahan untuk masyarakat atau tidak .		b. Tangguh LNG memahami bahwa setiap aktivitas manusia memiliki potensi dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua potensi dampak dari rencana kegiatan pengembangan proyek LNG Tangguh mulai dari tahap konstruksi sampai dengan tahap operasi dan paska operasi telah dikaji dalam proses AMDAL ini. RKL-RPL telah disusun untuk mengelola dan memantau semua dampak yang ditimbulkan. Pelaksanaan RKL-RPL dilaporakan ke KLH dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan dalam AMDAL dan peraturan yang berlaku guna menghindari terjadinya dampak negatif. Dalam mengoperasikan kegiatannya Tangguh LNG menempatkan aspek keselamatan dan keamanan lingkungan sebagai hal yang utama. Peralatan yang dipergunakan telah memenuhi standard keselamatan yang berlaku di industri migas.	Dokumen ANDAL Bab 3 – Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting
	c. Hasil laut sebelum adanya BP itu masyarakat mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah adanya BP ini nelayan – nelayan punya hasil sudah mulai berkurang		c. Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	d. Hasil yang begitu banyak kenapa BP tidak bisa bangun sekolah atau pendidikan yang berstandar di wilayah kab. Fakfak dan Bintuni, dan rumah sakit atau tenaga perawat yang baik dan fasilitas yang terjangkau. Karena kami punya SDA sudah habis, maka harus memberikan pendidikan yang baik sehingga menjadi aset buat kami		d. Tangguh LNG telah memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung yang berada di wilayah operasi sekitar Tangguh LNG. Di masa yang akan datang, Tangguh LNG akan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu di tingkat SD, SMP dan SMA sebagaimana yang tercantum dalam RKL/RPL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.2 Pendidikan (Halaman 6-12)
Abdul Rahman Castela (Kampung Goras)				
	a. Keberadaan kampung Goras sudah dimekarkan menjadi dua kampung, yaitu kampung Goras dan kampung Goras Selatan. Jadi kami minta untuk kampung Goras Selatan dijadikan daerah kampung yang sama statusnya sebagai kampung yang masuk dalam amdal b. Untuk menjalin hubungan yang harmonis, maka pihak pemrakarsa yaitu BP maka kami minta untuk kampung Goras Selatan dijadikan kampung dav sesuai SK bupati Fakfak 2013 c. Untuk menghindari kecemburuan sosial dari kampung Goras dengan kampung Goras Selatan maka diminta BP, pemerintah, SKKmigas harus mengesahkan keberadaan kampung Goras Selatan		Untuk a, b, dan c Kajian AMDAL dilakukan dengan menitikberatkan kajian terhadap wilayah yang berpotensi terkena dampak, bukan batas wilayah administratif. Daerah-daerah yang termasuk dalam batas administratif dalam studi AMDAL ditentukan berdasarkan wilayah yang ada pada saat studi AMDAL dilakukan. Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan batas wilayah administratif maka pelaksanaan program Pengelolaan Sosial akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
Jafar Muilan (Perwakilan Kampung Sekar)				
	a. Saya sarankan kepada pemerintah dan perusahaan dapat membantu fasilitas alat-alat kesehatan berupa obat obat maupun peralatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat		a. Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Halaman 6)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Permasalahan dalam menerima tenaga kerja saya sarankan memprioritaskan anak-anak daerah kami yang kena AMDAL		b. Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.3.1. Pengembangan Masyarakat Asli untuk dapat Berkompetisi dalam Kesempatan Kerja dan Mengembangkan Keahlian (Halaman 19)
	c. Saya harap perusahaan BP dapat memberikan modal usaha kepada masyarakat nelayan yang kena dampak akibat mondar mandir nya speed boat di wilayah kami untuk mencarikan mata pencaharian baru		c. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	d. Saya harap pihak BP Tangguh dapat mempercepat proses pengembangan listrik dari LNG		d. Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Kami berharap bahwa di masa yang akan datang dengan alokasi gas ini PLN dan Pemerintah Daerah akan dapat mendistribusi kan listrik lebih lanjut sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang menikmati listrik tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 1-2)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
			Mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan ini, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek pembangkit listrik tenaga gas yang antara lain meliputi, keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur, peluang pasar gas, kebijakan energi nasional serta kepentingan umum. Tangguh LNG memahami bahwa rekomendasi dari SKK Migas dan persetujuan dari Menteri ESDM atas alokasi sejumlah tertentu gas sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG diperlukan sebelum pelaksanaan pemasokan dan penjualan gas	
Achmad Biarumant (Kampung Ugar)				
	a. Perusahaan tolong melihat tentang pendidikan		a. Komitmen Tangguh tentang pendidikan telah tertuang di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, di dalam dalam dokumen AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 2 Pendidkan (Halaman 12-17)
	b. Perusahaan tolong memperhatikan tentang tenaga kerja anak-anak asli kampung		b. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.3.1. Pengembangan Masyarakat Asli untuk dapat Berkompetisi dalam Kesempatan Kerja

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
				dan Mengembangkan Keahlian (Halaman 19)
	c. Perusahaan tolong memperhatikan tentang hak-hak adat kami		c. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 7 Hubungan Eksternal (Halaman 49-50)
	d. Perusahaan tolong memperhatikan tentang ekonomi masyarakat kami yang terkena dampak		d. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas dan operasi Tangguh LNG telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnyaTangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	e. Saran kami dari masyarakat kampung Ugar meminta kepada pihak perusahaan bahwa apabila train tiga dan empat dilaksanakan oleh perusahaan tolong melihat aktifitas masyarakat kami, karena masyarakat kami pada umumnya nelayan		e. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas dan operasi Tangguh LNG telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG.	Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	f. Saran kami masyarakat dari kampung Ugar, pelaksanaan train tiga dan empat perusahaan membuat Undang-Undang tentang benteng aktifitas masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak salah melakukan aktifitas sehari-hari		f. Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang apapun termasuk yang mengatur tentang aktifitas masyarakat Adat	
Rudy IHA (Kampung Ubadari, Distrik Kramomongga)				
	a. Kami masyarakat Distrik Kramomongga menghimbau kepada pihak perusahaan menyangkut AMDAL, kalau bisa kami beberapa kampung yang ada di distrik Kramomongga kalau bisa dilibatkan perwakilan dari masing masing tersebut, karena bicara masalah hak kami masyarakat yang tadi di kampung kampung tersebut juga punya hak yang sama dengan saudara saudara kami yang terkena dampak langsung. Supaya kami juga bisa memahami dari kegiatan amdal tersebut.		a. Keterlibatan masyarakat Kramamongga-Fakfak dalam proses AMDAL sudah dilakukan dari tahapan pertama keterlibatan masyarakat, yaitu konsultasi publik dan berlanjut sampai dengan sidang AMDAL, di mana wakil masyarakat Kramamongga ditunjuk untuk menjadi Anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat dan mengikuti sidang AMDAL di Bintuni pada 5 Des 2013 dan 18 Feb 2014.	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Bicara menyangkut hak-hak masyarakat kami yang berada di kawasan Kokas ada lima petuanan yang ada di pesisir pantai sampai pegunungan, kami semua punya hak yang sama berkaitan dengan hak hak adat		b. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan pegunungan di sekitar Distrik Kokas tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan pegunungan Kokas tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-49)
Abdullah IHA (Kokas)				
	a. Sebelum train 3 dan 4 harus diselesaikan kompensasi masyarakat adat di 3 petuanan		a. Tangguh sangat menghargai adat, termasuk hak-hak masyarakat adat, namun, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui tuntutan masyarakat terkait kompensasi bagi masyarakat adat, mengingat posisi Tangguh LNG sebagai kontraktor kontrak kerja kama yang terikat dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas tuntutan tersebut. Hal ini menjadi kewenangan dari dan oleh karena itu, sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1 Pendahuluan (Halaman 2)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Masyarakat yang diutus oleh kampung-kampung harus terlibat dalam penandatanganan AMDAL		b. Tangguh menghargai setiap aspirasi masyarakat, akan tetapi berkaitan dengan proses persetujuan AMDAL akan dilakukan sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku. Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 dan PP 27 tahun 2012, Surat Keputusan AMDAL dan Izin Lingkungan akan ditanda tangani oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni, butirt No 9, Setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum di lakukan penga mbilan keputusan akan dikonsultasi kan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak. Wakil masyarakat terlibat dalam proses AMDAL dengan menghadiri dan memberikan masukan pada rapat Komis AMDAL di Bintuni tanggal 5 December 2013 dan Rapat Lanjutan tanggal 18 Februari 2014.	
	c. Karyawan yang bekerja di LNG tangguh. Kalau setelah of dikirim dengan pesawat kembali ke Kab. Fakfak, mengingat keadaan laut sangat berbahaya.		c. Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG menempatkan keamanan dan keselamatan sebagai faktor utama di samping tentunya juga mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempertimbangkan kondisi alam serta sarana transportasi yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja telah melalui uji kelayakan dan keselamatan yang memenuhi standard yang berlaku di industri migas.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.3.2. Investasi untuk Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kejuruan untuk Mendukung Usaha Minyak dan Gas dan Peluang Industri Lain (Halaman 21-29)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
H. Syahrudin Rumagesan (Pemerintah Sekar)				
	a. LNG Tangguh harus mendukung aspirasi dan usulan masyarakat Kokas yang terdiri dari 7 kampung		a. Tangguh menghargai setiap aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat sejauh aspirasi dan usulan tersebut relevan dan sesuai dengan lingkup AMDAL.	
	b. Perusahaan BP Tangguh benar-benar melihat dampak yang kami masyarakat nelayan merasakan, karena dulu orang tua kami mencari lebih gampang tapi sekarang kami sudah merasa sulit, karena ada dampak		b. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial.	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	c. Kami usul bahwa dampaknya kami sudah rasa, tlong tanggung jawab yang baik.		c. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial.	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	d. Kami merasa dampak sekarang karena waktu sesmik laut di waktu itu kami sudah merasa dampak dan kami sudah merasakan kerugian bagi kami		a. Kegiatan seismik sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan UKL-UPL yang telah disetujui oleh pemerintah terkait. Upaya-upaya untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan UKL/UPL tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Pemda. Kegiatan Seismik bersifat sementara. Hasil pemantauan yang dilakukan tidak menunjukkan adanya dampak negatif penting terhadap lingkungan dari kegiatan tersebut. Jika keberadaan fasilitas proyek Tangguh memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG berkomitmen untuk memberikan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya.	Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	e. Hasil yang nanti masuk karena kami harapkan bahwa bagi hasil yang benar seperti Kabupaten Bintuni		b. Dalam menjalankan aktivitasnya, Tangguh LNG terikat pada ketentuan Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak berwenang untuk mengatur dan menentukan masalah bagi hasil. Hal ini merupakan kewewenangan Pemerintah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan
	f. Janji-janji yang dijanjikan tolong ditanggapi yang jelas		c. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	g. BP tolong perhatian besar pada masyarakat nelayan		d. Masukan akan diperhatikan	
	h. LNG Tangguh tolong perhatian kepada pendidikan / kesehatan di kabupaten Fakfak, terutama Distrik Kokas		e. Tangguh LNG memahami bahwa masalah pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan Tangguh LNG berkomitmen untuk mendirikan sekolah unggulan di Distrik Kokas dan untuk meningkatkan pelayaranan kesehatan. Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan fasilitas kesehatan di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.2.1 Peningkatan Kualitas Sekolah (Halaman 14-17); Sub-Bab 2.1 Kesehatan (Halaman 6—12)
Zulkifli Husin (Perwakilan Kampung Arguni)				
	a. Proyek LNG Tangguh memperhatikan hak masarakat adat di lokasi operasi kilang LNG train 3 dan 4		a. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-49)
	b. Kami masyarakat yang terkena dampak di lokasi operasi train 4 mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang berada di daerah operasi train 3 dan 4		b. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-49)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	c. Tolong perhatikan pendidikan masyarakat di lokasi operasi 3 dan 4		c. Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan pendidikan di kampung-kampung di sekitar wilayah operasinya melalui upaya memperbaiki infrastruktur, pemberian beasiswa dan lain-lain. Komitmen ini telah tertuang di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.2.1 Peningkatan Kualitas Sekolah (Halaman 14-17)
	d. Tolong perhatikan kesehatan masyarakat di lokasi operasi train 3 dan 4		d. Tangguh berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan kesehatan masyarakat di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1 Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	e. Pihak pemerintah dan perusahaan tolong perhatikan kehidupan ekonomi sosial budaya masyarakat di lokasi operasi train 3 dan 4		e. Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas proyek Tangguh memberikan dampak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Untuk itu Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan pada aspek-aspek tersebut sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-49)
	f. Pemerintah dan masyarakat tolong memperhatikan hak ganti rugi / sewa , kompensasi terhadap masyarakat di lokasi penangkapan ikannya sangat terbatas		f. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program	Dokumen hasil survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
			pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG. Tangguh tidak dalam kapasitas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, untuk itu Tangguh akan meneruskan pertanyaan ini kepada pemerintah.	
	g. Pemerintah dan pihak perusahaan untuk memperhatikan kampung kampung lain di distrik Kokas, Bomberay, Patipi dan Kramomongga, selain dari 17 kampung di distrik Kokas dan Bomberay dalam ruang lingkup studi amdal		g. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberay sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada ANDAL Bab 1.	ANDAL Bab 1 (Halaman I-212)
Arif Tharob (Kampung Korir)				
	Tolong di tulis dengan bahasa nasional, karena masyarakat tidak mengerti dengan bahasa inggris. Dan kompensasi dari perusahaan harus langsung ke masyarakat, tidak melalui pihak manapun, dan harus dibayar perbulan bukan pertahun, dan dibayar per jiwa 5 juta di kampung dan tidak dibeda-bedakan dan harus menyediakan transportasi untuk masyarakat kampung berupa 1 buah viber dan jonson 40 pk untuk per jiwa. Dan tolong BP harus menyediakan rambu-rambu untuk nelayan lokal.		Tangguh semaksimal mungkin akan menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia di dalam dokumen AMDAL, kecuali untuk istilah-istilah teknis yang belum ada padanan bahasa Indonesia-nya. Dalam menjalankan aktivitasnya, Tangguh LNG terikat pada ketentuan Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak berwenang untuk mengatur dan menentukan masalah bagi hasil. Hal ini merupakan kewewenangan Pemerintah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
Udin Sasin (Kampung Darembang, Fakfak)				
	a. Saran saya kepada perusahaan setiap kampung itu mendapat berapa persen, setiap bulan atau pertahun. Hanya itu saja saran kami masyarakat kampung Darembang yaitu berupa uang		a. Dalam menjalankan aktivitasnya, Tangguh LNG terikat pada ketentuan Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak berwenang untuk mengatur dan menentukan masalah bagi hasil. Hal ini merupakan kewewenangan Pemerintah.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Masukan kami masyarakat kampung Darembang yaitu pendidikan, kesehatan, perikanan, perumahan, sarana ibadah dll. Kalau bisa kami masyarakat kampung harapkan dari pihak perusahaan tolong diperhatikan		b. Komitmen Tangguh LNG tentang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, kesempatan kerja telah tertuang di dalam dokumen RKL-RPL bagian Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.1 Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12), Sub Bab 2.2 Pendidikan (Halaman 12-18), Sub Bab 2.5 Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36), Sub Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	c. Tanggapan kami masyarakat kampung meminta kepada pihak perusahaan kalau bisa bantuan yang diberikan kepada kami masyarakat secara langsung. Jangan melalui pihak-pihak yang tidak bersangkutan		c. Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
Jumari Bauw (Distrik Fakfak)				
	a. Amanat yang ada di Amdal 1 dilaksanakan dulu kepada masyarakat yang terkena dampak langsung		a. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
			telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	
	b. Tolong perhatikan masyarakat yang mata pencahariannya terganggu		b. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut.	
Moh. Barambay (Kampung Sekar)				
	a. Kami tidak setuju dengan migrasi b. Bapak harus perhatikan hak perempuan dan masyarakat adat c. Bapak harus perhatikan tenaga kerja khususnya putra putri daerah Papua		Untuk a, b, dan c Program pemberdayaan perempuan dan penghargaan terhadap masyarakat adat sudah menjadi bagian dari komitmen AMDAL yang tertuang dalam Pengelolaan Sosial Tangguh LNG. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.4. Peningkatan Pendapatan, (Halaman 29-34), Sub Bab 2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
Abdullah Barambay (Tokoh Pemuda Kampung Sisir, Distrik Kokas)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	Saya mewakili pemuda di 5 petuanan menyampaikan: a. Rapat yang diadakan tanggal 17, 18 dan 19 agar masyarakat pemilik hak ulayat adat		a. Tangguh LNG tidak memahami maksud pertanyaannya.	
	b. Penerimaan tenaga kerja harus diutamakan daerah-daerah yang terkena dampak		b. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	c. Perbaikan taraf ekonomi, pendidikan, dan kesehatan		c. Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut telah tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.4. Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34), Sub Bab 2.2 Pendidikan (Halaman 13-18), Sub Bab 2.1

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
				Kesehatan Masyarakat (Halaman 6-12)
	d. Semua saran ini harus dijawab agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, karena itu kepentingan bersama		d. Tangguh LNG telah memberikan tanggapan atas semua saran.	
	Disampaikan agar di dalam pelaksanaan kegiatan ini kami dari pemohon menyampaikan kebutuhan yang harus dijawab dan dilaksanakan, antara lain: e. PLN yang menjadikan pemasangan sarana kehidupan aktifitas		e. Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Kami berharap bahwa di masa yang akan datang dengan alokasi gas ini PLN dan Pemerintah Daerah akan dapat mendistribusikan listrik lebih lanjut sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang menikmati listrik tersebut	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 2-3)
	f. Segera membangun pipa air bersih		f. Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat ini.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-sub Bab 2.1.5 Air Bersih dan Lingkungan (Halaman 12-13)
	g. Sarana informasi dan komunikasi Telkomsel Catatan: ini harus ditanggapi karena ini yang akan dijadikan permasalahan dan akan jadi kendala apabila tidak diselesaikan		g. Tangguh LNG tidak mempunyai keterkaitan, pengetahuan dan kewenangan untuk memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat. Sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut.	
H. Amuzudi Secary (Kampung Sisir)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	a. Supaya anak dari SD, SMP, SMA ditanggung sampai tamat SMA		a. Tangguh LNG memahami bahwa masalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Distrik Kokas. Program pendidikan telah tercantum dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.2 Pendidikan (Halaman 13-18)
	b. Supaya dibuat rumah yang lengkap dan dengan isinya		b. Program pembuatan rumah dan jalan tidak termasuk dalam program pengelolaan sosial Tangguh untuk daerah Kampung Sisir	
	c. Dibuatkan jalan yang baik untuk masyarakat		c. Program pembuatan rumah dan jalan tidak termasuk dalam program pengelolaan sosial Tangguh untuk daerah Kampung Sisir	
	d. Pemberian dana kepada masyarakat		d. Tangguh LNG tidak memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat, akan tetapi bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk program (*in-kind*) sesuai dengan dokumen pengelolaan sosial Tangguh.	
Moh Ali Heremba (Perwakilan Masyarakat Kampung Sisir)				
	a. Saran dari kami tentang pengembangan tangguh tren 4 masih belum bisa disetujui karena masih ada beberapa kampung yang kena dampak langsung yang belum dihadirkan mengikuti acara ini		a. Pendekatan program pengelolaan sosial Tangguh telah disusun berdasarkan daerah yang terkena dampak langsung berdasarkan proses kajian dampak dalam AMDAL dan program rekognisi terhadap hak adat	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Untuk pembagian hasil harus disamaratakan dengan pembagian hasil yang ada di daerah Bintuni karena itupun bagaimana yang diambil adalah migas		b. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
H Asgar Rimosan (Kampung Arguni)				
	a. Saya berharap kepada pihak BP migas agar hak hak masyarakat adat harus dipenuhi, terutama masyarakat yang berpendapat mencari ikan dan semua habitat laut pasti habis dan kami harap agar perusahaan harus ganti berupa uang tunai untuk hidup masyarakat		a. Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial.	Dokumen hasil survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
	b. Hasil yang diambil oleh BP migas harus masyarakat adat menerima sebagian hasil itu kalau bisa 1% sehingga masyarakat merasakan hasil itu		b. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
Machmud Namudan (Perwakilan BPM Kab. Fakfak)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	Saran: a. Perusahaan atau investor yang terkait sesuai dengan hasil rapat komisi amdal terpadu agar bisa memperhatikan semua hasil keputusan atau musyawarah tentang expansi pada tanggal 14 februari 2014 di distrik kokas		a. Saran diterima	
	b. Sesuai dengan hak ulayat tolong diperhatikan sesuai dengan Undang-Undang Otsus pasal 21		b. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, termasuk UU Otonomi Khusus	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	c. Perusahaan yang terkait agar memahami tentang kinerja untuk masyarakat yang belum bekerja dan harus diperhatikan sebaik mungkin		c. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	Tanggapan: d. Tolong tanggapi kembali yang sudah disampaikan kepada masyarakat kab. Fakfak jangan sampai lupa atau lalai		d. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG,	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
			- Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	
Haru Murry (Kampung Sekar, Distrik Kokas)				
1	Mengenai dampak 17 kampung: di pesisir pantai NA ini kami tidak setuju. Bagaimana dengan saudara kita di kawasan penggunungan. Tidak dampak itu aneh sekali. Sedang hasil ini kami orang Papua umumnya punya putisi (hasil). Oleh karenanya itu kami masyarakat adat tanya kalau hak tanah adat tiap tiap marga harus ditanggapi.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan pegunungan di sekitar Distrik Kokas tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan pegunungan Kokas tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 1.1 Definisi Masyarakat Asli (Halaman 1-2), Sub- Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Halaman 37-48)
Roneeo Lawe (Kelurahan Kokas)				
1	Komunikasi memang sangat dibutuhkan dalam era sekarang, yang ingin saya tanyakan: a. Kenapa tower telkom sudah aktif, namun hanya dibatasi max 100 hp. Lebih dari 100 hp darurat? b. Begitu juga dengan pulsa, mengapa boros sekali? Atau terkesan main main atau dari pihak telkomsel ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan atau bagaimana? Apa bedanya pemancar di kota dengan yang ada di wilayah di dalam terutama di kecamatan?		Tangguh LNG tidak mempunyai keterkaitan, pengetahuan dan kewenangan untuk memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat. Sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut.	
Moh Taher Rumoning (Bappeda Kab. Fakfak)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	a. Perlu adanya sinergis program / kegiatan yang disupport oleh BP dengan program / kegiatan yang ada di kabupaten Fakfak		a. Saran dipertimbangkan	
	b. Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia kepada anak anak / putra putri daerah dari aspek pendidikan		b. Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub Bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	c. Perlu adanya perekrutan tenaga kerja yang lebih di prioritaskan putra putri asli		c. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	d. Perlu adanya peningkatan ekonomi dari segi pendapatan masyarakat yang terkena dampak		d. Program peningkatan pendapatan masyarakat asli di beberapa kampung di Distrik Kokas dan Bomberay telah tercantum dalam Pengelolaan Sosial Tangguh yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL	
	e. Perlu adanya dukungan pembangunan infrastruktur bagi Kab. Fakfak khususnya distrik dan kampung yang terkena dampak		e. Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung termasuk juga di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Teknis pelaksanaan akan dikerjakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
Sulastri Kudha (Distrik Kokas)				
	a. Masyarakat hanya minta permohonan harus dipenuhi		a. Tidak semua permohonan dapat kami penuhi. Hanya permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Masyarakat kabupaten Fakfak harus mengikuti sidang amdal di kabupaten Teluk Bintuni, dalam pembahasannya apabila dibahas tentang train 4, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan masyarakat khususnya yang terkena dampak dari proyek tangguh LNG		b. Sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh termasuk rencana pembangunan Kilang LNG 3 pada tahap awal dan rencana pembangunan Kilang LNG 4 pada tahap pengembangan selanjutnya telah dilakukan sebagai bagian dari proses AMDAL, yaitu pada Konsultasi Publik yang dilakukan di wilayah Bintuni dan Fakfak pada Mei-Juli 2012. Rencana pengembangan ini juga telah disampaikan pada saat Rapat Komisi AMDAL Tangguh LNG di Bintuni pada tanggal 5 Desember 2013 dan Rapat Lanjutannya pada 18 Februari 2014.	
Raul Rimosa (Arguni)				
1	Usulan saran pendapat yang sudah diusulkan oleh perwakilan kampung itu sudah disetujui		Tidak semua permohonan dapat kami penuhi. Hanya permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
Abdul Razak Paus Paus (Kampung Taver)				
1	Tuntutan masyarakat harus dipenuhi		Tidak semua permohonan dapat kami penuhi. Hanya permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
Wati Meram (Distrik Bomberay)				
1	Tolong lebih memperhatikan masyarakat yang terkena dampak dan penuhi semua permintaan masyarakat adat, dan jangan lupa memperhatikan kaum perempuan agar bisa maju dan mandiri. Semoga sukses		Tidak semua permohonan dapat kami penuhi. Hanya permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan Masyarakat Asli.	Lampiran3 RKL/RPL, Sub Bab 2.5 Kewirausahaan Papua (Halaman 34-36)
Asban Aheek (Utusan Masyarakat Kampung Baru, Distrik Kokas Fakfak)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
1	Masalah tenaga kerja harus diperhatikan tenaga kerja orang asli Papua yaitu masalah pendidikan diperhatikan bukan di dalam negeri tapi bila perlu sampai luar negeri supaya bisa tercipta tenaga ahli atau tenaga skill		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat) bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Komitmen tersebut berbunyi sebagai berikut: • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. • Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (halaman 13—18)
Syafar Salaudin (Kepala Distrik Bomberay)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
1	LNG tanggung jawab kepada masyarakat bahwa masyarakat kami saat ini sudah tidak mempunyai lapangan kerja. Sebagai nelayan saat ini mereka mengeluh. BP harus bertanggung jawab		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) b. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (halaman 18-29) Dokumen hasil survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
Teguh Fatima (Wakil Perempuan)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
1	Pada prinsipnya expansi BP tangguh terhadap train 3 dan 4 perlu ada kesepakatan pembahasan dokumen AMDAL bila akan terjadi sesuatu mengingat dokumen AMDAL segera disahkan dan pengembangan train 4 baru dilaksanakan di 2020. Alasannya dapat terjadi sesuatu peristiwa akibat dampak dari pembangunan train 3 yang belum diketahui.		Kajian dampak dari kegiatan konstruksi dan operasi Kilang LNG 3 dan 4 telah dilakukan dalam dokumen ANDAL ini dengan mengambil pembelajaran dari operasi Kilang LNG 1 dan 2 yang kegiatannya dan dampaknya serupa. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak telah diuraikan dalam dokumen RKL-RPL. Sebelum disahkan, dokumen ANDAL dan RKL-RPL juga telah dibahas bersama dengan Komisi Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, di mana di dalamnya termasuk KLH, pakar terkait, instansi terkait pusat dan daerah, serta perwakilan masyarakat.	
Salasa Sasim (Wakil Masyarakat Kampung Wamosan)				
1	a. Apabila permasalahan antara pihak masyarakat dengan perusahaan harus diselesaikan antara wakil masyarakat dengan wakil perusahaan tidak boleh melibatkan keamanan		a. Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lampiran 3 RKL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.6.2 Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat (Halaman 46-48)
	b. Perusahaan harus membuat jalan tembus antara kabupaten Bintuni dengan kabupaten Fakfak		b. Proyek pembuatan jalan yang menghubungkan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni tidak termasuk dalam program pengelolaan sosial Tangguh LNG.	
	c. Air sumur gali di kampung kami tidak bisa dikonsumsi, ini perlu diperhatikan oleh perusahaan.		c. Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah di dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di beberapa kampung tertentu.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.5 Air Bersih dan Lingkungan (Halaman 12-13)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	d. Apabila perusahaan beroperasi di wilayah kami, tolong diperhatikan hak hak adat		d. Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
Kosmas Lober (Perwakilan Pemerintah Kampung Salawir)				
	a. Saran saya agar kampung selain juga mendapatkan bantuan sama kampung-kampung lain yang selama ini termasuk kampung DAV		a. Saran akan diperhatikan	
	b. Yang dimaksud butir pertama tadi adalah: - Dana caps - Perekrutan tenaga kerja - Pendidikan - Kesehatan - Infrastruktur - Pembagian hasil		b. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village)*.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
Hery (Kokas)				
	a. Pembagian hasil harus merata antara dua kabupaten dan kabupaten Fakfak		a. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini.	
	b. Agar merekrut tenaga kerja asli Fakfak atau Kokas supaya tidak ada rasa ditinggalkan di daerahnya sendiri		b. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (halaman 18-29)
Ucu M. (Kampung Sekar)				
1	Saran dari kami apa yang kami di sidang pada kami ditanggapi. Itu saja		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
Abutalib Paus Paus (Disnakertrans Kabupaten Fak fak)				
	a. Saya pribadi menerima ekspansi amdal untuk tahun 2020		a. Terima kasih	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	b. Pembicaraan, saran dan usul dari pihak perwakilan kabupaten Fakfak dan perwakilan masyarakat supaya dimasukan ke dalam AMDAL		b. Aspirasi masyarakat yang tercantum dalam Berita Acara Pertemuan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan Dokumen AMDAL	
	c. Karena berbicara train 4 agar dipertimbangkan untuk melibat beberapa kampung di distrik teluk Patipi		c. Proses pemilihan wakil masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan Permen LH No 17 tahun 2012. Wakil masyarakat telah dipilih berdasarkan hasil kajian dampak dari rencana kegiatan proyek pengembangan Tangguh LNG termasuk rencana pembangunan Kilang LNG 3 dan 4. Wakil dari kampung-kampung di distrik Bomberay dan Kokas yang termasuk dalam wilayah studi AMDAL ini telah dipilih sebagai wakil masyarakat.	
	d. Hasil dokumen AMDAL setelah disusun oleh tim agar bisa dikoreksi kembali oleh pihak pemerintah dan perwakilan masyarakat kampung kampung		d. Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 dan PP 27 tahun 2012, penilaian dokumen untuk Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan LNG Tangguh menjadi kewenangan Komisi AMDAL Pusat yang dipimpin oleh KLH. Surat Keputusan AMDAL dan Izin Lingkungan akan ditanda tangani oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni, butir No 9, Setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dulam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum di lakukan penga mbilan keputusan akan dikonsultasi kan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak. Wakil masyarakat sudah terlibat dalam proses AMDAL dengan menghadiri dan memberikan masukan pada rapat Komis AMDAL di Bintuni tanggal 5 December 2013 dan Rapat Lanjutan tanggal 18 Februari 2014	
	e. Apabila kegiatan exploitasi dan eksplorasi di wilayah kilang oleh perusahaan supaya memperhatikan kebutuhan masyarakat		e. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi di wilayah kilang Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	Dokumen ANDAL Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting; Tabel

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
				RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial
	f. Pihak perusahaan LNG mengutamakan tenaga kerja baik kurang terampil s/d tenaga kerja yang terampil		f. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (halaman 18-29))
Luth IHA (Pemerintah Kabupaten Baru)				
	a. Yang kami lihat sekarang tanggapan dari masyarakat itu semuanya benar karena yang setiap bantuan yang masuk dari BP Tangguh LNG untk masyarakat itu tidak ada tanda bukti yang nyata. Contoh: suatu lembaga kalau ia memberikan bantuan lengkap dengan harus lengkap dengan lambang BP.		a. Terima kasih atas masukannya, akan kami pertimbangkan	
	b. Saya sebagai manusia yang beriman sekali, kami minta tolong kepada BP agar tolong diperhatikan rumah-rumah ibadah untuk masyarakat		b. Pembangunan dan renovasi rumah ibadah telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Rencana Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah dan infrastruktur lainnya melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
N. Djemris Imumplatia (LSM Gemapala, Distrik Fakfak)				

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	a. Saran kami kepada SKK migas dan BP Tangguh: perlu sekali dilakukan dialog yang intens dengan pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) dan masyarakat adat guna merampungkan dan menyelesaikan berbagai persoalan persoalan serta aspirasi masyarakat adat.		a. Selama ini Tangguh LNG telah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat di kampung, distrik, dan Pemerintah Daerah. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi komunikasi antara SKKMigas, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat untuk membahas masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (halaman 37-48), Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
	b. Kepada pemerintah propinsi Papua Barat, pemda kabupaten Fakfak: perlu dibuat perdasus yang mengatur tentang dana bagi hasil, hak hak masyarakat adat, dll, terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dana alokasi sesuai dengan UU 21/2001 tentang Otsus		b. Saran sebaiknya disampaikan kepada Pemda Papua Barat dan Kabupaten Fakfak.	
	c. Terkait dengan rencana ekspansi train 3 dan 4, perlu diperhatikan dampak penting terhadap aspek aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologis dan aspek pemanfaatan ruang kelola masyarakat local		c. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL	Dokumen ANDAL Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	d. Perlu diperhatikan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap wilayah-wilayah dikelola / eksploitasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat adat, LSM lokal, pemda dll.		d. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	
Abdurrahman Tator (Pemerintah Kampung Fior)				
	a. Mohon dipekerjakan oleh LNG para tenaga (politeknik) yang sudah selesai pendidikan nanti , karena politeknik adalah program pemerintah kabupaten Fakfak		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
	b. Pemasangan tower di petuanan Arguni , hal itu hanya tinggal janji		b. Tangguh LNG tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan terhadap pemasangan tower, sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
	c. Akhir akhir ini ikan dilaut kami semakin berkurang		c. Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau aktifitas proyek Tangguh LNG terbukti memberikan gangguan terhadap wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan rencana pengelolaan dampak sosial.	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut
Subandi Fuad, Perwakilan Pemerintah Distrik Kokas,				
1.	Tolong perhatikan hak masyarakat ada terkait : a. ketenagakerjaan nonskill dan skill bila tersedia.		a. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	b. tolong perhatikan untuk pemasangan 1 unit tower telephone di kampung distrik Kokas		b. Tangguh LNG tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan terhadap pemasangan tower, sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut.	
	c. tolong kepastiannya untuk mengaktifkan tower Telkomsel di ibukota distrik Kokas		c. Tangguh LNG tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan terhadap pemasangan tower, sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut.	

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
Saudin Ahmad, Perwakilan masyarakat kampung Salawir				
1.	Mohon bantuan perusahaan memberikan biaya : a. Perumahan masyarakat		a. Wilayah ini berada di bawah perusahaan operator gas lain. Aspirasi ini seharusnya disampaikan kepada perusahaan operator gas yang bersangkutan, bukan kepada Tangguh LNG.	
	b. Peternakan		b. Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi di kampung-kampung di sekitar wilayah operasinya, termasuk di dalamnya mencakup sektor peternakan. Komitmen ini telah tertuang di dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (Halaman 29-34)
	c. Motor 15 HP bantuan masyarkat		c. Pengadaan motor tempel dan peralatan nelayan telah dilakukan melalui program CAP (*Community Action Plan* – Program Pengembangan Masyarakat). Ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
Sifera patiran, Kowamil 1706-02/Kokas				
1.	Mohon sedapatnya semua saran dan tanggapan di masukkan sebagai bahan kajian didalam AMDAL Train 3 dan 4		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
2.	Agar pihak perusahaan tetap beroperasi sesuai ketentuan dan per-Undangan-Undangan yang berlaku demi kepentingan bangsa dan negara RI, namun dampak lingkungan tetap menjadi prioritas utama untuk menjadi perhatian perusahaan		Dalam menjalankan aktivitasnya, Tangguh LNG terikat pada ketentuan Kontrak Kerja Sama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG juga menghormati norma yang berlaku di wilayah di mana Tangguh LNG beroperasi. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
			KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	
3.	Saat ini masyarakat pesisir wilayah Kokas telah merasakan dampak lingkungan yang akibat dari pengoperasian Perusahaan Migas di Teluk Berau Antara lain : 1. Serwalui yang menjadi makanan favorit sudah hilang 2. Penyu yang sering berada sekitar ribuan ekor sudah hilang dan tidak berkembang lagi habitatnya 3. Ikan yang lengkap secara tradisional kini sudah tidak ada lagi Mohon dapat diperhatikan ada solusi untuk menggali sebagai mata pencaharian masyarakat secara tradisional sehingga masyarakat pun bisa hidup.		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan *trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	Dokumen Hasil Survey IPB; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial, Sub Bagian Gangguan Perikanan dan Aksesibilitas Transportasi Laut

Abutalib Patiran (Wakil Masyarakat Kampung Fior , Distrik Kokas)				
1.	Apabila tren 3 dan 4 berjalan, kami masyarakat kampung Fior Paela khususnya dan kampung pesisir pada umumnya meminta supaya perusahaan LNG Tangguh harus membayar kami dengan di gaji perbulan. Satu bulan 5 juta per jiwa.		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
2.	(lamp 1) Masukan Penting hasil Konsultasi Publik Masyarakat Kampung Fior:		Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi di wilayah kilang Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Pembahasan untuk prioritas program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	Dokumen ANDAL Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial
	a. Usulan bidang Pendidikan: - Bantuan tenaga guru pengajar dua orang dan guru agama dan guru olah raga serta pemberian tunjangan guru honor / insentif umum - Pembuatan gedung Tk lengkap dengan peralatan belajar serta pengajarnya - Pembuatan gedung perpustakaan sekolah, pengadaan kurang lebih 15 unit kom,puter serta fasilitas internet untuk sekolah - Perlu adanya perhatian khusus untuk anak-anak yang putus sekolah sehingga perlu diadakan pengikut sertaan kursus di BLK - Perusahaan tiap tahun harus membiayai 25 siswa mengikuti pendidikan setingkat SMA dan perguruan tinggi dengan Migas di Cepu - Asrama untuk SLtP dan SMU di Kokas dan Bomberay		a. Bidang Pendidikan: Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
			b. Bidang Kesehatan: Tangguh LNG memahami bahwa	Lampiran 3

	b. Usulan Bidang Kesehatan: - Penambahan tenaga perawat mantri dan bidan - Pemangunan rumah perawat, rehab / membangun pustu dan pengadaan alat medis yang memadai - Adanya perhatian untuk bayi balita penderita gizi buruk dan ibu hamil untuk penambahan perbaikan gizi - Pengadaan peralatan posyandu, seperti: timbangan kursi, meja, gelas, piring , sendok, mangkok, termos nasi, ceret air, kompor panel, wajan dan baskom - Batuan satu unit komputer, printer dan kamera digital		masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di distrik Kokas.	RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.1 Kesehatan (halaman 6—12)
	c. Usulan Bidang Perikanan: - Bantuan dana untuk kegiatan nelayan - Pelatihan dan praktek budidaya ikan dan kepiting - Pengadaan alat tangkap, motor jonson dengan kapasita 15 pk tiap kepala keluarga		c. Bidang Perikanan: Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	d. Usulan Bidang Pertanian: - Pembuatan green house untuk menunjang kegiatan pertanian - Bantuan dana pertanian - Penempatan tenaga ppl dari pemerintah di bidang pertaian - Pelatihan pemanfaatan atau pengelolaan hasil panen untuk pertanian, seperti cabe, singkong, dan pisang - Bantuan untuk memasarkan hasil pertanian keluar kampung		d. Bidang Pertanian: Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, serta akan dilakukan kajian atas kelayakan agro-ekosistem di wilayah tersebut.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	e. Usulan Bidang Koperasi: - Bantuan modal minimal 100 juta rupiah untuk usaha koperasi (UBSP) kampung dan pembinaan untuk usaha produktif seperti kios, penjualan ikan, serta membutuh frizer dan kul box		e. Bidang Koperasi: Keberadaan lembaga koperasi di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG telah mulai berkembang. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan beberapa lembaga	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.4 Peningkatan

	- Bantuan trnasportasi yaitu satu buah perahu fiber dan jonson 40 pk dalam menunjang usaha		ekonomi, termasuk koperasi, untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, Koperasi Enenem Jaya di Kampung Arguni.	Pendapatan (halaman 29—34)
	f. Usulan kaum Perempuan: - Persetaraan Gender - Simpan pinjam perempuan megenai bantuan modal berupa uang simpan pinjam - Pelatihan pemberdayaan perempuan tingkat daerah, provinsi maupun nasiaonal		f. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.4 Peningkatan Pendapatan (halaman 29—34)
	g. Usulan Kampung: - Dipercepatnya status kampung Fior sebagai kampung sasaran dengan proses Amdal yang harus ditetapkan pemerintah dan perusahaan sebagai kampung dampak lingkungan - Perusahaan menyediakan kuota tenaga tenaga kerja untuk masyarakat kampung - Peningkatan kesempatan - kesempatan bisnis bagi CV / koperasi dari kampung untuk ikut serta dalam kegiatan perusahaan - Pipanisasi untuk air bersih - Tambahan jetty di kampung perlu ditingkatkan dari kayu ke beton permanen - Perhatikan untuk petugas masjid / tokoh agama di akampung - Bantuan dana untuk kegiatan keagamaan baik diluar dan dalam kampung - Pembuatan balai kampung - Rehabilitasi rumah ibadah		g. Tangguh LNG memahami dan menghargai aspirasi yang telah disampaikan. Menurut hemat kami program sosial sehubungan dengan beberapa usulan yang disampaikan telah ada di dalam Pengelolaan Sosial Tangguh, Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL, AMDAL. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	

	- Pembuatan sanggar PKK - Hasil pertanian dan perikanan dan perikanan harus diambil oleh perusahaan - Membiayai kehidupan masyarakat kampung fior per kk - Perusahaan harus berperan aktif dalam membantu pemberantasan buta aksara - Perumahan masyarakat - Pembuatan mck disetiap rumah warga - Pembuatan jalan umum dari kampung fior ke jalan nasional Fakfak – Bomberay			
RAJAB GWAS GWAS (Masyarakat Kampung Andamata) (tidak sesuai dengan hardcopy)				
	a. Fokus terhadap isu pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, lingkungan hidup masyarakat, perikanan dan tenaga kerja b. LNG Tangguh memberikan beasiswa kepada semua anak sekolah yang dimulai dari SD sampai PT c. BP harus memperhatikan atas hak hak masyarakat adat d. BP harus memfasilitasi kepada masyarakat nelayan berupa transportasi berupa mesin tempelsesuai jumlah kepala keluarga di kampung e. Selama ini BP Tangguh turun kekampung memberikan sosialisasi publik kepada masyarakat, bahkan mnjanjikan kepada masyarakat, tapi selama BP berjanji tidak direalisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat f. BP tolong menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat Kokas juga mendapatkan dampak atau tidak. Kalau memang masyarakat juga mendapatkan damapak, tolong dijelaskan secara detail. Kalau memang tidak terkena damapak tolong dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat Kokas juga tau bahwa masyarakat tidak mendapatkan dampak.		Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi di wilayah kilang Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3 Evaluasi Dampak. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Pembahasan untuk prioritas program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fak Fak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	Dokumen ANDAL Bab 3 Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting; Tabel RKL/RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG – Bagian Dampak Sosial

SEBASTIAN NANAFESI (Perwakilan Kampung Tomage)				
	a. Pengaspalan jalan tomage – Bomberay		a. Jawaban untuk butir a dan j: Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Bomberay, misalnya gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, sepengetahuan kami, wilayah tersebut berada di wilayah operasi perusahaan migas lain, Tangguh LNG akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada perusahaan tersebut melalui SKK Migas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
	b. Penerangan listrik di kampung tomage		b. Sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pelanggannya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Di samping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Teluk Bintuni. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, termasuk SKKMIGAS dan ESDM untuk membahas alokasi gas untuk listrik di Papua Barat. Tangguh LNG berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati fasilitas listrik.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 2-3)
	c. Membuat lapangan kerja bagi warga kampung Tomage dengan masyarakat menyuplai daging sapi ke proyek BP		c. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial

			yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Tangguh LNG, Sub Bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	d. Beasiswa pendidikan putra putri kampung Tomage dari SD – PT		d. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
	e. Asrama untuk putra putri Tomage 2 buah yait untuk di Bomebray dan Fak-fak		e. Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan satu sekolah unggulan di Distrik Kokas.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)
	f. Peralatan pendidikan berupa 2 unit komputer dan 2 buah unit solat cel/genset		f. Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pelanggannya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Di samping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Teluk Bintuni. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan diantara Pemerintah	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 2-3)

			Daerah, Pemerintah Pusat, termasuk SKKMIGAS dan ESDM untuk membahas alokasi gas untuk listrik di Papua Barat. Tangguh LNG berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati fasilitas listrik.	
	g. Membangun perumahan masyarakat		g. Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenour Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Environment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab 2.5 Kewirasahan Papua (halaman 34-37)

	h. Peralatan medis berupa 1 buah komputer dan 1 buah kamera digital		h. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-Bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12)
	i. Penambahan tenaga medis		i. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-Bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12)

			berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	
	j. Membuat jalan setapak di kampung		j. Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Fakfak. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana. Tangguh LNG menghargai permintaan ini. Namun demikian, terkait dengan program kesehatan masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik, Tangguh LNG akan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menetapkan prioritas serta pelaksanaan program.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Kesehatan Msyarakat (halaman 6-12)
	k. Dana CAPs disesuaikan dengan kampung lain yang tidak kena dampak langsung		k. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*). Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan sosial di mana pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)
	l. Pemasangan kebel listrik di kampung karena belum terpasang		l. Sejak bulan Februari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial

			pelanggannya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Teluk Bintuni. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, termasuk SKKMIGAS dan ESDM untuk membahas alokasi gas untuk listrik di Papua Barat. Tangguh LNG berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati fasilitas listrik.	Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 2-3)
	m. Pembuatan bak penampungan air bersih dan pemasangan pipa dari rumah ke rumah		m. Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Saat ini Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan, dan telah dipasang di masing-masing rumah di Kampung Tomage.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.1.5 Air Bersih dan Lingkungan (Halaman 12-13)
	n. Memohon kepada BP Tangguh agar memperjelas dampak ini kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang dampak itu		n. Penjelasan atas potensi dampak sehubungan dengan aktivitas pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada saat proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik telah masuk dalam dokumen Ka ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL.	
	NATALIS FATUBUN (Sekretaris Elsham Papua – Pos Kontak Fakfak)			
	A. Sehubungan dengan keprihatinan di atas. Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai masukan. Masalah Papua tidak akan selesai hanya dengan berwacana, tetapi harus dengan tindakan yang melibatkan semua pihak dan semua orang yang berkehendak baik.		A. Terima kasih atas masukkannya. Untuk diketahui, potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3 Evaluasi Dampak. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG Sub-

			Pembahasan penetapan prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Namun demikian, tidak semua masukan dan usulan masyarakat dapat dilaksanakan karena adanya berbagai keterbatasan dari Tangguh LNG.	Bab 2.7 Hubungan Eksternal (halaman 49-50)
	B. Tujuan : 1. Membangun semangat masyarakat agar peka dan peduli terhadap persoalan sosial-politik yang ada di sekitarnya. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji masalah. 3. Membentuk Tim Peduli Lingkungan Hidup di Kabupaten Fakfak dan Bintuni. 4. Menghadirkan LSM sebagai mitra kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.		B. Butir ini bukan merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban maupun tanggapan.	
	C. Persoalan yang muncul : 1. Masyarakat merasa ditipu dan dirugikan baik oleh perusahaan maupun pemerintah. 2. Masyarakat merasa kehilangan sumber-sumber daya pendukung untuk kehidupan yang lebih baik. 3. Tidak dipenuhinya ha katas tanah adat dan pendidikan yang layak.		C. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya Keberadaan Tangguh LNG telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara dari hasil penjualan LNG, di mana Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil migas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat di daerah. Proyek pengembangan Tangguh LNG diharapkan akan dapat	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)

			meningkatkan nilai tambah dari Tangguh LNG bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	
	D. Alternatif perubahan : 1. Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antar warga masyarakat 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal tentang hak-hak hidupnya 3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan yang tegas dan pasti 4. Menetapkan prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku		D. Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mentaati dan mematuhi ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta budaya yang hidup di masyarakat setempat di mana Tangguh LNG beroperasi. Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.6 Tata Kelola Kepemerintahan (Halaman 37-48)
	E. Langkah/cara yang diperlukan : 1. Hendaknya diutamakan pendekatan budaya/kultur setempat 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat : hak-hak adat dan politik masyarakat secara terus menerus dan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. 3. Menyampaikan secara terbuka dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, bukan hanya segi positifnya, tetapi juga alternatif terburuk yang mungkin terjadi agar masyarakat memahaminya. 4. Pemetaan jelas terhadap hak ulayat tanah adat khususnya di daerah Bomberay : sampai saat ini belum Nampak tapal batas antara suku Irarutu dan suku Mbaham. 5. Adanya kerja sama yang baik dan erat dengan Lembaga		E. Di dalam mempersiapkan pembangunan Tangguh LNG train 1 dan 2 maupun proyek pengembangan Tangguh LNG (train 3 dan 4) Tangguh LNG telah melakukan kajian potensi dampak sosial. Kajian tersebut didasarkan kepada hasil yang diperoleh selama proses Konsultasi Publik dan Sidang Komisi AMDAL. Dalam mempersiapkan program-program sosialnya, Tangguh LNG telah melibatkan para pemangku kepentingan serta tenaga-tenaga ahli di bidang masing-masing, termasuk tenaga ahli dari beberapa universitas yang memiliki keahlian di bidang antropologi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa program-program sosial Tangguh LNG berkesesuaian dengan norma, budaya, serta kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai salah satu	

	Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat baik di Kabupaten Bintuni maupun Kabupaten Fakfak. 6. Membangun kerjasama dengan semua pihak terkait. 7. Rekrutment tenaga kerja diprioritaskan kepada warga sekitar kegiatan.		pemangku kepentingan. Masukan dan aspirasi masyarakat selama proses konsultasi publik, masukan dari para ahli di bidang sosial telah masuk dalam dokumen KA ANDAL. Sedangkan masukan selama sidang Komisi AMDAL, apabila diperlukan, akan menjadi bahan perbaikan bagi Dokumen AMDAL, terutama dalam RKL. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua aspirasi masyarakat yang disampaikan selama proses penyusunan AMDAL, termasuk salah satunya permintaan untuk dilakukannya pemetaan batas wilayah ulayat adat. Sehubungan dengan kesempatan kerja, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	
	F. Hal yang perlu dihindari: 1. Diusahakan prinsip utama “musyawarah – mufakat” sehingga pemerintah atau perusahaan tidak perlu datang bersama aparat (TNI-POLRI) untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat, apalagi memaksakan kehendak sepihak. 2. Menyepelekan masyarakat asli, sehingga akhirnya terpinggirkan. Berilah kesempatan agar mereka menjadi tuan di negerinya sendiri.		F. Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan eksplorasi dan produksi, Tangguh LNG tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan namun juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berasal dari beberapa lembaga termasuk beberapa universitas seperti UI, UGM, dan UNCEN. Terbukti bahwa keberadaan Tangguh LNG telah memberikan peningkatan dari berbagai aspek, seperti kesempatan kerja, keahlian tenaga kerja, pendidikan, kesehatan,	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub-Bab 2.6.2 Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat (Halaman 46-48); Lampiran 3 RKL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 1.2 Filosofi Operasi Tangguh LNG (Halaman 3-4)

			kesejahteraan masyarakat, serta peluang kesempatan berusaha lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah keberadaan Tangguh LNG bagi Masyarakat Asli, dalam melanjutkan program sosial di masa yang akan datang, Tangguh LNG akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*).	
	RAJAB GWAS GWAS (Kamp. Andamata)			
1.	Masukan bahwa pihak perusahaan siap menerima tenaga kerja dari kedua kabupaten yaitu kabupaten fakfak dan kabupaten teluk bintuni.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
2.	Tenaga khusus pribumi atau asli Papua.		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
3.	Bilamana perusahaan terima tenaga kerja selama perusahaan beroperasi sampai dengan perusahaan tutup baru tenaga kerja pulang atau kembali ke kampung masing-masing.		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja, masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Dalam hal masa kerja pekerja sudah berakhir, Tangguh LNG akan mengembalikan pekerja ke	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.3

			tempat yang diakui sebagai tempat penerimaan (*point of hire*).	Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
	AHMAD IHA (Kampung Sekar, Distrik Kokas)			
1.	Sidang AMDAL 17 Februari 2014 di Kabupaten Teluk Bintuni telah diundang tua2 adat di tujuh belas kampung yaitu di distrik kokas karena mereka yang ada hidup wilayah ada masyarakat asli adat tidak akan ada lagi. Terima kasih.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa beberapa kampung di Distrik Kokas dan Distrik Bomberay sudah termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini yang telah disetujui dalam KA ANDAL Tangguh LNG. Lihat Peta 1-10 Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada dokumen ANDAL Bab 1.	ANDAL Bab 1 (Halaman I-212)
	STEFANUS NANAFESI (Kampung Tomage)			
1.	Pembuatan jalan setapak		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
2.	Pemasangan listrik		Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pelanggannya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Disamping itu, Tangguh LNG telah berkomitmen untuk mengalokasikan gas pipa sejumlah tertentu dari Proyek Tangguh Train 3 untuk dipergunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang dapat memasok listrik di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Teluk Bintuni. Tangguh LNG juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, termasuk SKKMIGAS dan ESDM untuk membahas alokasi gas untuk listrik di Papua Barat. Tangguh LNG berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat di Papua Barat yang dapat	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Bab 1, Pendahuluan (Halaman 1-2)

			menikmati fasilitas listrik.	
3.	Pembuatan seragam PKK dan perlengkapan PKK		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
4.	Alat pengelola air bersih		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
5.	Pembuatan balai kampung		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
6.	Penerimaan tenaga kerja untuk masyarakat yang belum kerja		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (Halaman 18-29)
7.	Pembuatan jembatan penyebrang		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur	

			(fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	
8.	Pembangunan rumah ibadat		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
9.	Pembuatan perumahan untuk setiap KK		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk meningkatkan standar kehidupannya, termasuk dalam bidang perumahan. Namun demikian, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Tangguh LNG, kami tidak bisa memenuhi aspirasi tersebut.	
10	Pembuatan untuk rumah kepala sekolah		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Kokas dan Distrik Bomberay akan dilakukan melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pembahasan penentuan prioritas dan pelaksanaan program sosial akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musrenbang	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG, Sub Bab 2.7 Hubungan Ekstenal (Halaman 49-50)
11.	Tenaga guru pengajar		Tangguh LNG memahami bahwa ketersediaan guru di kampung-kampung adalah sangat penting untuk menunjang proses belajar-mengajar. Oleh karena itu Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan setempat dalam rangka penyediaan tenaga pengajar di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG.	Lampiran 3 RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab 2.2 Pendidikan (halaman 13—18)

BERITA ACARA MUSYAWARAH SOSIAL EKONOMI PRA AMDAL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Tanggal: 17 Februari 2014 / Tempat: Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Bintuni

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

BERITA ACARA MUSYAWARAH SOSIAL EKONOMI PRA AMDAL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Tanggal: 17 Februari 2014 ; / Tempat: Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Bintuni

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
1	**Rapat ini dihadiri oleh .... (terlampir)**			
2	**Rapat dimulai dengan penjelasan dari Bupati Teluk Bintuni tentang:**			
a.	Tindak lanjut yang telah diupayakan oleh Bupati Teluk Bintuni bersama Gubernur Papua Barat dan Bupati Fakfak, dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, SKK Migas dan pihak-pihak lain di Pemerintah dalam rangka mencari solusi atas *concern* yang disampaikan masyarakat pada Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni. Upaya yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni dan Bupati Fakfak telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang positif		Terima kasih atas dukungannya	
b.	Musyawarah ini adalah sebuah pendekatan yang disepakati oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan dokumen AMDAL yang berkualitas dan aspiratif. Pada musyawarah ini Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni dan Bupati Fakfak akan menjawab *concern,* saran, masukan dan tanggapan yang telah disampaikan pada rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni		Terima kasih atas dukungannya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
c.	Masyarakat peserta Musyawarah setuju dengan usulan Bupati Teluk Bintuni, bahwa musyawarah ini akan fokus dan menitikberatkan pada jawaban dan diskusi atas *concern*, saran, masukan dan tanggapan yang telah disampaikan pada rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni tanpa menghalangi masyakat untuk menyampaikan issue atau *concern* lain yang belum disampaikan pada rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni		Terima kasih atas dukungannya	
d.	Bupati Teluk Bintuni membagi *concern*, saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat yang disampaikan pada rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 5 Desember 2013 di Bintuni dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: i. Tuntutan Utama Masyarakat yang terdiri dari: penyelesaian tuntutan uang ketuk pintu sebesar Rp. 54 Milyar, kejelasan tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), permintaan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan bagian DBH yang lebih dari sekedar pembagian untuk kabupaten Penghasil, Rencana Pemekaran Kabupaten Sebyar (yang sudah diselesaikan oleh Gubernur Papua Barat sebelum musyawarah ini); ii. Usulan-usulan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni antara lain perumahan, peningkatan pendidikan, beasiswa, local		i. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tangguh LNG memahami bahwa Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat. .	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	content, peningkatan tenaga kerja lokal Papua Barat.		ii. Usulan-usulan ini sebagaimana yang disampaikan dalam Rapat Komisi AMDAL tanggal 5 Desember 2013 dan menjadi masukan bagi perbaikan dokumen AMDAL sejauh dimungkinkan	
3	**Rapat dilanjutkan dengan penjelasan dari Gubernur Papua Barat, antara lain:**			
a.	Terhadap tuntutan uang ketuk pintu sebesar Rp. 54 Milyar pihak Pemerintah, Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak dan BP Berau Ltd., telah bersepakat untuk segera menyelesaikan tuntutan ini. Pembayaran tuntutan ini akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat dan BP Berau Ltd.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tangguh LNG memahami bahwa Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat. .	
b.	Penjelasan dari Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bapak John Dimalau dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Papua Barat, tentang Dana Bagi Hasil Migas. Secara singkat, pembagian atas keuntungan pengelolaan Migas yang dilakukan oleh Tangguh LNG, selaku kontraktor Pemerintah adalah berdasarkan kontrak yang disepakati antara Tangguh LNG dengan Pemerintah Republik Indonesia. Sementara bagian untuk pihak Republik Indonesia diatur berdasarkan		Perihal perkiraan perhitungan DBH di beberapa tahun mendatang sedang disiapkan oleh tim SKK Migas, Dirjen MIGAS dan Ditjen Anggaran DepKeu dan akan disampaikan segera kepada Pemerintah Daerah.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	peraturan perundangan. Khusus bagi Provinsi Papua Barat terdapat pengaturan khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Angka-angka rinci akan segera disampaikan			
c.	Bupati Teluk Bintuni mengelaborasi penjelasan yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bapak dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Papua Barat, agar lebih dapat dimengerti oleh masyarakat		Terima kasih atas penjelasan yang berdasarkan penerimaan aktual	
d.	Penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat menjelaskan bahwa pada Rapat DPRD Provinsi Papua Barat telah menyetujui Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) dan saat ini PERDASUS tersebut sedang dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri		Terima kasih atas penjelasannya	
4	**Bupati Teluk Bintuni menjelaskan:**			
a.	Menegaskan kembali penjelasan Gubernur tentang penyelesaian tuntutan masyarakat untuk uang ketuk pintu sebesar 54 Milyard dan pembagian Dana Bagi Hasil		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tangguh LNG memahami bahwa Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
b.	Telah dicapai kesepakatan dengan		Sepanjang pengetahuan Tangguh LNG, wilayah Tomage dan Otoweri berada di dalam wilayah kerja	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Tangguh LNG, dengan MOU yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2013 untuk peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat Pantai Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Program perumahan untuk masyarakat Tomage dan Otoweri akan dipertimbangkan		dan wilayah operasi perusahaan operator migas lain. Oleh karena itu, aspirasi ini seharusnya disampaikan kepada perusahaan operator gas yang bersangkutan.	
c.	Atas usulan-usulan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni akan diperhatikan dan akan diselesaikan melalui Tangguh *Sustainibility* Program oleh Tangguh LNG, dan program-program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat		Pengelolaan sosial terkait dengan dampak sosial Tangguh LNG telah dimuat dalam Tabel RKL, namun demikian masih terdapat beberapa dampak sosial dari kegiatan kumulatif di Kawasan Teluk Bintuni yang akan dikelola dalam bentuk komitmen-komitmen Tangguh LNG. Untuk mengoperasionalkan RKL dan komitmen-komitmen sosial tersebut, Tangguh akan menyusun dokumen Program-program Keberlanjutan Tangguh (TSP/ *Tangguh Sustainability Programs*) yang akan menggantikan dokumen Program-program Sosial Terpadu (ISP/ *Integrated Sosial Program*) yang telah ada. Dokumen TSP akan memuat prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan perlunya kerjasama dan pembagian tanggung jawab sosial antara Tangguh LNG dengan pemerintah setempat maupun pemangku kepentingan lainnya. Tangguh LNG tidak bermaksud untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah ataupun menciptakan ketergantungan masyarakat dalam pembangunan sosial, tetapi lebih berperan sebagai katalisator dalam pembangunan tersebut.	
d.	AMDAL Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG ini akan memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan dari dampak-dampak pengembangan LNG Tangguh yang sudah disepakati di AMDAL Tangguh Train 1 dan 2		Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan operasi Kilang LNG 1 dan 2 sudah dilakukan sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui pada tahun 2002. Laporan hasil pengelolaan dan pemantauan telah kami sampaikan kepada KLH dan instansi terkait termasuk Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Bapedalda provinsi Papua Barat. Pelaksanaan AMDAL dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan dan sosial Tangguh LNG telah diaudit oleh berbagai instansi termasuk KLH, Lenders dan TIAP. Hasil audit menunjukkan pengelolaan Lingkungan dan sosial Tangguh telah dilaksanakan sesuai dengan AMDAL. Tangguh LNG mendapatkan Peringkat Biru untuk Audit PROPER tahun 2012 dan 2013 yang mengkonfirmasi bahwa kegiatan Tangguh telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku. RKL-RPL rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh ini telah disusun berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalaman dari pelaksanaan AMDAL sebelumnya dan merupakan penyempurnaan dari AMDAL Train 1 dan 2	
e.	Dirjen Migas menerangkan bahwa pengelolaan sumur minyak tua di Weriagar dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku atas hak kepemilikan sumber daya alam minyak bumi tetap dikuasai oleh negara.		Kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas berada pada Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan dalam masalah ini namun Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan antara Dirjen Migas dan Bupati Teluk Bintuni.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
5	**Perwakilan masyarakat menyampaikan masukan-masukan antara lain sebagai berikut:**			
a.	**Bapak Jamaludin Iribaram atas nama masyarakat Adat Sebyar** menjelaskan dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat atas penyelesaian yang sudah dilakukan untuk rencana Pemekaran Kabupaten Sebyar dan dapat diselesaikannya PERDASUS		Kewenangan untuk melakukan pengaturan wilayah administratif pemerintahan merupakan kewenangan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Tangguh tidak memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah adminitratif pemerintahan maka Tangguh LNG akan membicarakan pelaksanaan program sosial sehubungan dengan AMDAL Proyek Pengembangan LNG Tangguh dengan Pemerintah Daerah. .	
b.	**Bapak Arnold Hindom dari Kampung Weriagar**, meminta agar listrik segera dapat disambungkan ke Kampung Tanah Merah, Saengga karena sarana dan prasarananya sudah siap. Bupati menjanjikan akan segera membicarakan hal ini dengan pihak-pihak terkait		Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni dan sekitarnya yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	
c.	**Bapak Yan Kamisopa dari Kampung Sumuri** menuntut ada jalan keluar bagi terputusnya aksesibilitas dari Saengga Tanah Merah ke Tofoi		Tangguh LNG menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat membuka pagar Kilang LNG. Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah tersebut, Tangguh LNG telah membangun jalan alternatif di sekitar Tangguh LNG yang dapat digunakan oleh masyarakat dari Kampung Tanah Merah ke Manggosa dan Tofoi.	
d.	**Bapak Nafur Benan dari Distrik Babo** menuntut perhatian untuk Distrik Babo mengingat base camp, bandara dan pelabuhan berada di Babo. Bentuk perhatian yang diminta antara lain listrik untuk Distrik Babo. Bupati menjelaskan alasan penyediaan listrik tahap pertama belum dapat mencapai Distrik Babo. Peningkatan kapasitas listrik Babo akan dilaksanakan dengan memanfaatkan peralatan yang ada di Bintuni		Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
e.	**Bapak Cornelis Mukiri dari masyarakat adat Bintuni** mengusulkan untuk mendirikan Perguruan Tinggi (Universitas) di Kabupaten Teluk Bintuni untuk meningkatkan SDM Kabupaten Teluk Bintuni. Gubernur Papua Barat menjawab untuk pendirian Universitas harus memenuhi semua persyaratan dan perlu dibuatkan studi kelayakan. Jika semua persyaratan terpenuhi, beliau mendukung usulan ini.		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk mendirikan universitas di Teluk Bintuni. Namun demikian, dukungan Tangguh LNG dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan difokuskan pada program pendidikan yang telah diselengarakan di universitas negeri yang telah ada di Papua Barat dan politeknik di Fakfak. Sehingga, karena adanya beberapa keterbatasan Tangguh LNG tidak dapat memberikan dukungan atas aspirasi masyarakat tersebut.	
f.	**Saudara Sepkat Asmorong mewakili pemuda Kabupaten Teluk Bintuni** meminta penjelasan kepada BP Berau Ltd., tentang luasan ladang dan potensi gas di WKP BP Berau LTd., meminta bantuan sekolah kepada anak-anak asli Bintuni. Bapak Dharmawan Samsu *Head of Country* BP Berau Ltd., menjawab pertanyaan Sdr. Sepkat Asmorong bahwa besaran *reservoir* masih di dalam batas perairan Teluk tidak sampai ke daerah Moskona.		Tangguh LNG dengan ini menegaskan keterangan yang sudah diberikan oleh Bapak Dharmawan Samsu sebagai *Head of Country* bahwa lokasi *reservoir* di WKP BP Berau Ltd. masih di dalam batas perairan Teluk tidak sampai ke daerah Moskona. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I-2 Skenario Pengembangan Konseptual (Pengembangan Tahap Awal dan Pengembangan Tahap Selanjutnya)	Dokumen ANDAL Hal I-4
g.	**Ketua MRP** sangat mengaprsesiasi proses musyawarah ini karena sangat mencerminkan proses yang sangat demokratis dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam pengambilan keputusan bagi AMDAL dan dapat menjadi model bagi rencana-rencana pembangunan yang lain. Ketua MRP juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati Teluk Bintuni. Masukan MRP atas Perdasus telah disampaikan kepada DPRD Papua Barat.		Terima kasih atas dukungannya	
6	Seluruh peserta Musyawarah Sosial Ekonomi Pra AMDAL di Kabupaten		Terima kasih atas dukungannya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang antara lain diwakili oleh wakil dari: masyarakat Sebyar, masyarakat Sumuri, masyarakat Weriagar, masyarakat Distrik Babo, Masyarakat Adat Bintuni, masyarakat Aroba, dan wakil pemuda Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan mendukung kelanjutan proses penilaian AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd			
7	**Gubernur Papua Barat** menyimpulkan dan memberikan kata penutup sekaligus arahan perlunya mendukung keberadaan Tangguh LNG di Teluk Bintuni yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Teluk Bintuni		Terima kasih atas dukungannya	
8	Berita Acara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd, pada tanggal 5 Desember 2013 yang dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni serta Rapat Pertemuan Dengan Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Rangka Pembahasan Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. yang		Berita acara musyawarah tanggal 17 Februari 2014 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG Di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. tanggal 5 Desember 2013 dan dilanjutkan tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak			

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 18 Februari 2014)

RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL
RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN FAKFAK DAN KABUPATEN TELUK BINTUNI,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

BERITA ACARA
RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PEMBAHASAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKL-RPL) RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: **18 Februari 2014**

Tempat: Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Bintuni

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
1	**Rapat ini diharidi oleh .... (terlampir)**			
2	**Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 5 Desember 2013 menerima masukan-masukan sebagai berikut :**			
a.	pelibatan, komunikasi, koordinasi dan kerjasama terutama dengan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintahan di daerah dan juga Bupati di mana lokasi sumber daya minyak dan gas berada, dalam proses penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), serta perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan hulu migas dalam rangka didapatkan persepsi yang tepat dan utuh. Selanjutnya para Pimpinan Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat sehingga dapat dihindari munculnya persepsi negatif dan masalah sosial di masyarakat terhadap kegiatan hulu migas dalam hal ini khususnya untuk pengembangan LNG Tangguh		Masukan tersebut telah diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**PP 35/2004**") yang secara singkat mengatur sebagai berikut: - **Wilayah Kerja** Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP 35/2004, dalam penetapan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi Menteri ESDM berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja. Namun demikian, mengingat penetapan Wilayah Kerja gas yang dioperasikan oleh Tangguh LNG telah dilakukan jauh sebelum Peraturan Pemerintah tersebut berlaku, kemungkinan proses konsultasi tersebut tidak dilakukan. - **Rencana Pengembangan Lapangan** Berdasarkan ketentuan Pasal 95 PP 35/2004, rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan dari SKK Migas. Dalam memberikan persetujuan tersebut, Menteri ESDM melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. Konsultasi tersebut	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa penetapan wilayah kerja gas yang dioperasikan oleh Tangguh LNG telah dilakukan jauh sebelum PP 35/2004 berlaku. Demikian pula halnya bahwa rencana pengembangan lapangan untuk Tangguh Train 3 dan 4 ini bukan merupakan rencana pengembangan lapangan yang pertama kalinya.	
b.	penjelasan dari Pemerintah tentang pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH) migas terutama dalam kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat merumuskan dan menuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk pengaturan DBH yang saat ini sedang diproses. Rancangan Perdasus ini sangat penting bagi daerah untuk dapat mengoptimalkan hasil dari pemanfaatan SDA berupa minyak dan gas bumi bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil.	
c.	mengakui hak adat masyarakat sebagai pemilik dari sumber daya migas yang ada di Teluk Bintuni dan Fakfak dengan memperjuangkan bagian langsung yang dapat diberikan kepada masyarakat adat		Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
d.	penyelesaian hak adat berupa pembayaran sisa uang ketuk pintu sebesar Rp. 54 Milyar;		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	
e.	merealisasikan komitmen untuk alokasi gas dan listrik bagi Provinsi Papua Barat		Pada tahap awal, Tangguh LNG akan menyediakan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diambil dari kelebihan pasokan listrik di LNG Site sebagai hasil upaya peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh LNG sebesar 4 Megawatt dan selanjutnya akan ditingkatkan sampai	Lampiran 3 RKL/RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh LNG

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			maksimum 8 Megawatt sesuai dengan kemampuan peningkatan kinerja pembangkit listrik Tangguh. Selanjutnya PLN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk mengatur distribusi listrik ke kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya Tangguh LNG mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Gas tersebut akan dijadikan sebagai bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan tersebut, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek PLTG, termasuk didalamnya kajian tentang keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur. Tangguh LNG memahami diperlukannya rekomendasi dari SKK Migas dan persetujuan dari Kementerian ESDM atas alokasi sejumlah tertentu gas sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sebelum pelaksanaan pemasokan dan penjualan gas.	
f.	memperjelas, memperbaiki, mengembangkan dan menyesuaikan pelaksanaan CSR dari kegiatan eksisting antara lain: pendidikan dengan antara lain mensinergikan program sekolah unggulan serta program beasiswa yang mencakup mekanisme pemberian sampai dengan siapa saja penerimanya, peningkatan kesehatan yang antara lain mencakup pelayanan bagi perempuan dan anak, sosial ekonomi berupa bantuan untuk pengusaha lokal, petani dan nelayan termasuk program ekonomi mikro yang dapat memberdayakan kaum perempuan, rumah ibadah (kegiatan keagamaan), dukungan penyediaan infrastruktur, seperti jalan akses yang menghubungkan antar kampung, dan elekrifikasi dengan mensinergikan program-program CSR yang akan diberikan oleh pemrakarsa dengan program pemerintah;		Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Disamping itu Tangguh LNG juga telah mempersiapkan program pengelolaan social yang tercantum di dalam Lampiran 3 – Pengelolaan Sosial Tangguh meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 1. Kesehatan Masyarakat; 2. Pendidikan; 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan hubungan industrial ; 4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 5. Kewirausahaan Papua (Inkubasi Bisnis); 6. Tata Kelola Kepemerintahaan Yang Baik; dan 7. Hubungan Eksternal.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh
g.	mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang			Lampiran 3

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	memprioritaskan masyarakat Papua Barat asli, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Hingga tahun 2013 tercatat bahwa jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Tangguh LNG berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG merupakan pekerja Papua. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
h.	memperhatikan hak-hak masyarakat di kampung-kampung yang tidak termasuk dalam kampung-kampung yang tidak masuk dalam batas sosial wilayah studi AMDAL yang dilibatkan dalam proses penilaian AMDAL, serta mengkaji ulang pendekatan DAV (*Direct Affected Village*);		Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*).	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
i.	meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal, agar fokus pada komponen dan wilayah terkena dampak serta menggunakan data terbaru terkait data sosial, antara lain: jumlah kampung, data demografi antara lain agama dan struktur masyarakat adat setempat		Data rona Lingkungan dan sosial telah dilengkapi dan focus pada komponen dan wilayah yang berpotensi terkana dampak sesuai batas wilayaj studi AMDAL ini. Data terbaru dari hasil pengumpulan studi rona Lingkungan dan sosial yang dilakukan pada tahun 2012 dan awal tahun 2013 tuntuk studi AMDAL ini telah dimasukkan dalam bagian rona awal dokumen ANDAL ini.	
j.	melakukan evaluasi terhadap kegiatan eksisting (train 1 dan train 2) termasuk efektivitas pengelolaan dan pemantauan, termasuk pula komitmen dan isu-isu yang belum terselesaikan untuk menyempurnakan RKL-RPL pengembangan train 3 dan train 4 yang dibuat dengan mempertimbangan pula tolok ukur keberhasilannya dari sisi masyarakat; serta		Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan operasi Kilang LNG 1 dan 2 sudah dilakukan sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui pada tahun 2002. Laporan hasil pengelolaan dan pemantauan telah kami sampaikan kepada KLH dan instansi terkait termasuk Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Bapedalda provinsi Papua Barat. Pelaksanaan AMDAL dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan dan sosial Tangguh LNG telah diaudit oleh berbagai instansi termasuk KLH, Lenders dan TIAP. Hasil audit menunjukkan pengelolaan Lingkungan dan sosial Tangguh telah dilaksanakan sesuai dengan AMDAL. Tangguh LNG mendapatkan Peringkat Biru untuk Audit PROPER tahun 2012 dan 2013 yang mengkonfirmasi bahwa kegiatan Tangguh telah memenuhi AMDAL dan peraturan yang berlaku. RKL-RPL rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh ini telah disusun berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalaman dari pelaksanaan AMDAL sebelumnya dan merupakan penyempurnaan dari AMDAL Train 1 dan 2	
k.	memperdalam kajian dampak antara lain terhadap: penurunan kualitas air dan biota air beserta turunannya seperti dampak terhadap budidaya rumput laut dan tangkapan ikan nelayan, penurunan kualitas udara, kualitas tanah yang berpengaruh terhadap produksi sagu, nipah dan tanaman lainnya, aspek sosial yang memperhatikan hak ulayat antara lain harapan masyarakat, kegiatan nelayan seperti berkurangnya area tangkapan nelayan.		Evaluasi dampak penting telah dilakukan sesuai dengan lingkup dalam Kerangka Acuan ANDAL yang telah disetujui, termasuk untuk kualitas air laut, biota perairan laut, kegiatan perikanan, dan lain-lain Lebih lengkapnya dapat dilihat pada ANDAL Bab III Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting	
3	Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan pada tanggal l8 Februan 2014 menerima untuk melanjutkan proses penilaian ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan		Terima kasih atas dukungannya. Pemrakarsa akan memperhatikan dan memberikan tanggapan kepada semua saran, masukan dan tanggapan	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. dengan catatan BP Berau Ltd. selaku pihak pemrakarsa memperhatikan, memasukkan dalam lingkup dokumen ANDAL, RKL-RPL, serta melaksanakan hal-hal yang menjadi perhatian, saran, masukan dan tanggapan yang disampaikan masyarakat, pada Rapat Pertemuan dengan Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Rangka Pembahasan Rencana Kegiatan Terpadu AMDAL Pengembangan Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. pada tanggal 14 Februari 2014, serta Musyawarah Sosial Ekonomi Pra AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat pada tanggal 17 Februari 2014		yang diterima selama pertemuan tanggal 14 Februari di Kokas dan 17 Februari 2014 di Bintuni. Masukkan dan tanggapan dari Tangguh LNG akan dikelompokkan menjadi: 1. Masukan yang terkait dengan AMDAL – tanggapannya akan dimasukkan kedalam bagian yang relevan dari ANDAL dan RKL-RPL 2. Masukan yang tidak terkait dengan AMDAL, termasuk hal hal non teknis yang bukan merupakan bagian dari studi AMDAL : akan ditanggapi dan dimasukkan sebagai lampiran dari dokumen AMDAL ini	
4.	Menerima dan memperhatikan Berita Acara Rapat Pertemuan dengan Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Rangka Pembahasan Rencana Kegiatan Terpadu AMDAL Pengembangan Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. yang diselenggarakan oleh Bupati Fakfak pada tanggal 14 Februari 2014 (sebagaimana terlampir).		Terima kasih atas dukungannya	
5.	Menerima dan memperhatikan Berita Acara Musyawarah Sosial Ekonomi Pra AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Bupati Teluk Bintuni pada tanggal I 7 Februari 2014 {sebagai mana terlampir).		Terima kasih atas dukungannya	
6.	Berita Acara Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 28 November 2013, Berita Acara Rapat Pertemuan dengan Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Rangka Pembahasan Rencana Kegiatan Terpadu AMDAL Pengembangan Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd. di Kokas tanggal 14 Februari 2014, Berita Acara Musyawarah Sosial Ekonomi Pra AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat di Teluk Bintuni tanggal 17 Februari 2014, serta saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat, secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 5 Desember 2013 dan rapat Komisi Penilai Amdal Pusat yang dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2014		Berita Acara yang disebutkan dalam poin 6 ini akan ditanggapi secara tertulis dan akan dimasukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG Masukkan dan tanggapan dari Tangguh LNG akan dikelompokkan menjadi: 1. Masukan yang terkait dengan AMDAL – tanggapannya akan dimasukkan kedalam bagian yang relevan dari ANDAL dan RKL-RPL 2. Masukan yang tidak terkait dengan AMDAL, termasuk hal hal non teknis yang bukan merupakan bagian dari studi AMDAL : akan ditanggapi dan dimasukkan sebagai lampiran dari dokumen AMDAL ini	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
7.	Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan menerima dan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat dan menjadikannya sebagai pedoman bagi perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan pelaksanaan kegiatan pengembangan LNG Tangguh.		Pemrakarsa akan memperhatikan dan memberikan tanggapan kepada semua saran, masukan dan tanggapan yang diterima selama pertemuan tanggal 28 November 2013 di Jakarta, 5 Desember 2013 di Bintuni, 14 Februari di Kokas, 17 Februari 2014 di Bintuni serta 18 Februari 2014 di Bintuni Masukkan dan tanggapan dari Tangguh LNG akan dikelompokkan menjadi: 1. Masukan yang terkait dengan AMDAL – tanggapannya akan dimasukkan kedalam bagian yang relevan dari ANDAL dan RKL-RPL 2. Masukan yang tidak terkait dengan AMDAL, termasuk hal hal non teknis yang bukan merupakan bagian dari studi AMDAL : akan ditanggapi dan dimasukkan sebagai lampiran dari dokumen AMDAL ini.	
8.	Dokumen ANDAL, RKL dan RPL hasil perbaikan, akan disampaikan oleh Pemrakarsa pada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah notulensi diterima.		Pemrakarsa akan memperbaiki dokumen ANDAL dan RKL-RPL untuk dapat disampaikan kepada KLH selaku ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam waktu 30 hari kerja	
9.	Setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak.		Pemrakarsa akan sepenuhnya mendukung proses evaluasi dokumen AMDAL yang ditentukan oleh KLH selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, termasuk dalam hal proses konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait	

KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
PEMBAHASAN DOKUMEN ANDAL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT,
OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 18 Februari 2014

No.	Masukan	Halaman	Tanggapan	Halaman
A	**Drs. Hengki Tetiman, M.Si, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Fak-Fak, Jl. Diponegoro FakFak.**			
1.	Sehubungan dengan pengembangan train 4 Tahun 2019-2020 maka Andalnya yang akan disahkan sekarang ini sewaktu-waktu perlu direvisi mengingat Train 3 yang akan dibangun ini belum diketahui dampak yang akan diperoleh khususnya bagi kami di Kabupaten FakFak		Lingkup studi dan kajian dampak dalam dokumen AMDAL ini telah memasukkan rencana kegiatan konstruksi dan operasi Kilang LNG 3 dan 4 beserta fasilitas pendukungya dengan mengambil pembelajaran dari operasi Kilang LNG 1 dan 2 yang kegiatannya dan dampaknya serupa. Uraian rinci lingkup kegiatan yang termasuk dalam AMDAL ini dapat dilihat pada Bab 1 ANDAL sementara uraian rinci evaluasi dampak dari semua kegiatan tersebut dapat dilihat pada Bab 3 ANDAL. Rencana pengelolaan Lingkungan dan sosial untuk menghindarkan atau meminimalkan dampak diuraikan dalam dokumen RKL- RPL. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni, point No 9, setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak.	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan

B	**Mahmudi Al Ma'arif, Pemerintah Kampung Materabu Jaya, Kampung Materabu Jaya RT 02, RW 01 Jalur 09.**			
1.	Mengingat selama proyek LNG Tangguh (Train 1 dan 2) selama ± 8 tahun, kami kampung terdekat, ± 10 Km tidak kena dampak dari proyek tersebut, yaitu masuk sebagai wilayah DAVs (*Directly Affected Village)* (masuk dalam dokumen AMDAL)		Pendekatan yang dilakukan untuk program sosial dalam studi AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG ini tidak lagi berdasarkan konsep kewilayahan atau daerah yang terkena dampak langsung DAVs (*Directly Affected Village*), namun akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat. Program sosial akan direncanakan berdasarkan persetujuan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Bab Pendahuluan
2.	Tahun 2000 Kampung Materabu Jaya telah diadakan sosialisasi AMDAL dari pihak LNG Tangguh dan BP Migas, tetapi dengan pertimbangan apa kampung kami tidak masuk dalam wilayah DAVs (*Directly Affected Village*).		Pertimbangan yang diambil pada saat AMDAL untuk Kilang LNG 1 dan 2 adalah berdasarkan daerah yang langsung terkena dampak dari rencana kegiatan yang menjadi lingkup studi AMDAL pada saat itu. Pendekatan dan daerah yang terkena dampak dalam AMDAL tersebut sudah disetujui oleh Komisi AMDAL pada tahun 2002 di mana wakil masyarakat dan wakil dari pemerintah daerah turut duduk sebagai anggota Komisi AMDAL untuk menilai dokumen AMDAL pada saat itu. Pendekatan yang digunakan untuk studi AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG saat ini, pendekatannya berbeda, tidak lagi berdasarkan konsep kewilayahan atau daerah yang terkena dampak langsung DAVs (*Directly Affected Village*), namun akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat. Program sosial akan direncanakan berdasarkan persetujuan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Bab Pendahuluan
3.	Sebagai perwakilan masyarakat kami mohon dengan akan dibangunnya proyek Train 3 dan 4 LNG Tangguh, Kampung Materabu Jaya diikut sertakan dan dimasukkan sebagai wilayah DAVs (*Directly Affected Village)*		Pendekatan yang dilakukan untuk program sosial dalam studi AMDAL rencana kegiatan terpadu proyek pengembangan LNG Tangguh ini tidak lagi berdasarkan konsep kewilayahan atau daerah yang terkena dampak langsung (*Directly Affected Village*), namun akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat. Program sosial akan direncanakan berdasarkan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Bab Pendahuluan
4.	Mengingat masih banyak yang perlu diperhatikan dan			

	pembinaan, baik dari segi dan bidang:		persetujuan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan	
	a. Pemerintahan kampung		a. Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penguatan kapasitas profesional aparat-aparat di tingkat kampung dan distrik terpilih di Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG yang berada di kawasan Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	b. Pendidikan		b. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG memahami masih diperlukannya peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat, namun karena adanya keterbatasan, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi semua harapan dan aspirasi masyarakat.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pendidikan (hal 13-18)
	c. Kesehatan		c. Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas dan pelayanan kesehatan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
	d. Penerangan		d. Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab

			Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	Hubungan Eksternal (hal 49-50)
	e. Air bersih		Jawaban untuk butir e, f, g, i: Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
	f. Infrastruktur		Lihat jawaban butir e.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	g. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan		Lihat jawaban butir e.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Tata Kelola Kepemerintahan

				Yang Baik (hal 37-48)
	h. Tenaga kerja		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	i. Dan sebagai keseimbangan bantuan untuk tempat ibadah (masjid dan gereja)		Lihat jawaban butir e. Tangguh LNG telah menyediakan dan akan terus menyediakan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat asli secara keseluruhan. Tangguh LNG tidak dapat memperluas dukungannya yang dapat memenuhi kewajiban ibadah seseorang.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-Bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
C	**Simon Inamosa, Materabu Jaya**			
1.	Kami masyarakat Materabu Jaya mendukung program Train 3 dan 4, untuk masa depan anak cucu kami, kampung kami dan generasi penerus.		Terima kasih atas dukungannya.	
2.	Bila mana program ini sudah berjalan, masyarakat Materabu Jaya minta kepada perusahaan BP Tangguh supaya memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk masyarakat; ada di kampung-kampung yang belum pernah ikut program ini, yaitu Agoda, Forada, Materabu Jaya.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-

			dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	48)
D	**Pius Felix Inanosa, Masyarakat Adat Kampung Materabu jaya RT 03/II**			
1.	Kami sebagai masyarakat adat Suku Sumuri yang berada di Kampung Materabu Jaya SP I. Kokasi yang begitu dekat dengan kilang LNG Tangguh, sinar obor pembakaran sampai di Kampung kami, tetapi kampung kami tetap gelap, karena tidak masuk wilayah DAVs (*Directly Affected Village)* yang tertuang di dalam dokumen AMDAL.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan. Sejak bulan Febuari 2014, Tangguh LNG telah menyediakan 4 MW listrik kepada perusahaan listrik Negara, yaitu PT PLN untuk didistribusikan kepada para pengguna jasanya di Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Teluk Bintuni untuk menikmati fasilitas penerangan dalam jangka panjang dari Tangguh LNG. Proses pendistribusian ini dimulai dari Kota Bintuni. Namun, kami berharap ke depannya akan lebih banyak masyarakat Teluk Bintuni yang mendapat fasilitas yang sama. Proses pendistribusian selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan PLN.	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212) Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (hal 49-50)
2.	Sebagai bahan pertimbangan hal di atas, maka kami sebagai putra adat asli Sumuri, mohon mengetuk hati, Bapak dan ibu pengambil Keputusan Kampung Materabu Jaya dimasukkan dalam dokumen AMDAL dan syah masuk sebagai wilayah DAVs (*Directly Affected Village)*. Sehingga hak kami sebagai putra adat, sama dengan Kampung-Kampung lain disekitar proyek LNG Tangguh, seperti mendapat dana pengembangan kampung, penerangan, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebagai mana program yang dibuat oleh LNG Tangguh.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)

			mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	
3.	Demikian atas segala kasih dan terealisasinya kami sekali lagi sebagai putra adat mengucapkan terima kasih. Tuhan Memberkati.		Terima kasih atas dukungannya	
E	**Hamjah Karoror, DKP Fakfak**			
1.	Yang disampaikan oleh Bupati Bintuni dan wakil Bupati Fakfak sudah cukup jelas atau aspirasi masyarakat dari 2 Kabupaten untuk kepentingan bersama di masyarakat sekarang dan mendatang.		Terima kasih atas dukungannya	
2.	Laut dikelola secara lestari dan berkelanjutan untuk kepentingan bangsa dan negara tetapi perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang sesuai dengan ber-Undang-Undang No. 27 tahun 2007		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Pengelolaan dan pemantauan kualitas air laut telah dimasukan ke dalam RKL-RPL yang akan menjadi komitmen untuk dilakukan selama proyek berlangsung. Beberapa contoh pengelolaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan air limbah sampai memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke laut	Tabel RKL/RPL Dokumen AMDAL
3.	Untuk itu mengatasi dan menghadapi hal-hal yang tidak timbul kecemburuan di kalangan masyarakat, untuk itu saya perlu sampaikan : 1) Kelautan dan perikanan dikelola dengan secara berkelanjutan dan dilestarikan 2) Membangun kelautan dan perikanan dalam peningkatan produksi melalui pengadaaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya serta pengelolaan hasil laut disesuaikan dengan kebutuhan. 3) Untuk mengawasi perlu dibentuk pola masyarakat di tingkat		Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan biota laut telah dimasukan ke dalam RKL-RPL yang akan menjadi komitmen untuk dilakukan selama proyek berlangsung. Studi perikanan juga dilakukan secara rutin, seperti yang sudah berjalan saat ini, untuk mendapatkan informasi sumber daya perikanan di Teluk Berau dan Bintuni dari waktu ke waktu.	Tabel RKL/RPL Dokumen AMDAL

	kampung untuk mengawasi laut dll. 4) Pembuatan rumpon laut sebagai pengganti tempat yang dianggap rusak.			
F	**Rudi Kokop, Distrik Aranday, Kampung Baru, Irira**			
1.	a. Perumahan masyarakat rumah sehat		Jawaban butir a, b, c, d, e, g, h, i: Berdasarkan hasil KA ANDAL yang telah disetujui pada tanggal 24 Juli 2013, wilayah studi program sosial Tangguh LNG untuk Distrik Aranday mencakup 4 kampung, yaitu Kampung Aranday, Kampung Kecap, Kampung Manunggal Karya, dan Kampung Baru. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari beberapa kampung di Distrik Aranday yang tidak termasuk wilayah studi, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	b. Perumahan guru dan kekurangan tenaga guru-pengajar			
	c. Boat dan ijin/motor tempel			
	d. Pertanian/ternak			
	e. Perikanan			
	f. Kesehatan		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas dan pelayanan kesehatan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan (hal 6-12)
	g. Sarana air bersih		Berdasarkan hasil KA ANDAL yang telah disetujui pada tanggal 24 Juli 2013, wilayah studi program sosial Tangguh LNG untuk Distrik Aranday mencakup 4 kampung, yaitu Kampung Aranday, Kampung Kecap, Kampung Manunggal Karya, dan Kampung Baru. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari beberapa kampung di Distrik Aranday yang tidak termasuk wilayah studi, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program	
	h. Alat perabot rumah tangga			
	i. Rumah ibadah/masjid			

			yang bersifat penghargaan.	
G	**Hanafi PausPaus, Raja Arguni, Kampung Arguni FakFak**			
1.	Agar dalam AMDAL harus perjelas Rona Awal tentang a) Kondisi tangkapan ikan masyarakat b) Pendapatan masyarakat nelayan setiap hari, bulan dan tahun.		Dalam dokumen AMDAL, telah disusun penjelasan rona awal mengenai kondisi kegiatan perikanan masyarakat, termasuk hasil produksi dan pendapatan masyarakat pada sektor perikanan. Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat.	Dokumen ANDAL Sub-Bab 2.2.2.3 Sumber Daya Perikanan (Hal. II-276)
2.	Apabila terjadi penurunan pendapatan masyarakat nelatan maka BP Tangguh harus “memberikan kompensasi” terhadap pendapatan masyarakat untuk biaya hidup sehari-hari.		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada. Jika keberadaan fasilitas proyek Tangguh memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG berkomitmen untuk memberikan program pemulihan pendapatan kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya.	Tabel RKL/RPL dokumen AMDAL
H	**Achmad, IHA, Masyarakat Pesisir Kawasan Teluk Berau, Kabupaten FakFak, Kawasan Kokas**			
1.	Kami masyarakat pesisir teluk Berau Kabupaten FakFak, kawasan Kokas minta kepada pihak perusahaan BP. LNG Tangguh mulai dari survey sampai produksi hasilnya migas, limbahnya dikemanakan, mohon jelaskan!		Seluruh limbah yang dihasilkan dari kegiatan Tangguh LNG akan dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai contoh pengelolaan air limbah, seluruh air limbah yang dihasilkan dari kegiatan Tangguh LNG, antara lain air limbah domestik, air limbah dari kegiatan proses akan diolah di unit pengolahan sebelum dibuang ke laut. Penjelasan ini secara lebih detail dan lengkap dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL (Lampiran 1 RKL-RPL Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Lampiran 1 RKL-RPL
2.	Terus terang kami masyarakat Pesisir Teluk Berau kawasan Kokas imbasnya limbah sudah mengalir ke masyarakat pesisir kawasan kokas.		Pemantauan rutin terhadap kualitas air laut juga dilakukan di sekitar area Tangguh LNG untuk memastikan tidak ada dampak penting yang terjadi dari pembuangan limbah yang	

			dilakukan Tangguh LNG. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tidak ada pencemaran yang terjadi di sekitar wilayah Teluk Bintuni yang disebabkan oleh pembuangan limbah Tangguh LNG. Hasil pemantauan tersebut secara rutin dilaporkan kepada Instansi Lingkungan terkait. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	
3.	Biota-biota laut ikan Bio Teripang sudah mulai hilang kurang tempat2 semula atau sebenarnya.		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada.	
4.	Teluk Berau adalah salah satu pintu utama atau pintu gerbang dari teluk bintuni. Jika pintu utama atau pintu gerbang tutup. Bagaimana cara mengekspor hasil migas ini, apakah lewat darat atau lewat udara? jadi kami harap masuk kegiatan train 3-4, mohon penjelasan baik2 kepada masyarakatnya.		Ekspor hasil LNG dilakukan dengan menggunakan kapal tanker LNG melalui jalur pelayaran sepanjang Teluk Berau dan Teluk Bintuni. Jalur pelayaran ini telah dimasukkan dalam peta navigasi pelayaran yang telah ditentukan dan disetujui oleh Pemerintah. Setelah dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, maka Tangguh LNG akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung di wilayah sekitar operasi, termasuk yang berada di wilayah Teluk Berau.	
I	**Harun Murry, Kecamatan Kokas, Desa Sekar**			
1.	Dengan kesepakatan ini mohon supaya kepada pihak perusahaan Tangguh, mengapa Cuma 17 kampung dapat dampak di pesisir pantai. Lalu yang dikawasan pegunungan bagaimana dengan mereka. Sedang hasil ini kami punya. Maka kami mohon kepada perusahaan tolong perusahaan libatkan mereka dalam dampak, oleh karena itu dan karena mereka hasil kami semua punya. Dalam teluk berau harus setuju, dengan		Dalam melakukan aktifitasnya, Tangguh LNG menghormati hukum serta norma yang berlaku di wilayah dimana Tangguh LNG beroperasi. Tangguh LNG juga menghormati hukum adat yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)

	permintaan masyarakat seluruh masyarakat teluk berau. Oleh karena teluk berau sebagai Pintu gerbang perusahaan LNG Tangguh.		ini disimpulkan bahwa kawasan pegunungan di sekitar Distrik Kokas tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan pegunungan Kokas tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	
2.	Karena dalam perairan dan perikanan semua punah tidak hidup lagi.		Berdasarkan survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada.	
J	**Chesty Sahetapy, BLH Kabupaten FakFak**			
1.	Perlu ada konsistensi dokumen sejak mulai dari konsultasi publik s/d ANDAL, RKL-RPL		Dokumen ANDAL dan RKL-RPL disusun sesuai dengan Kerangka Acuan yang telah disepakati berdasarkan Keputusan Deputi Menteri LH Bidang Tata Lingkungan no 30 tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, yang mana di dalamnya juga mencakup hasil-hasil konsultasi publik yang telah dilakukan. Dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL telah disusun secara konsisten.	
2.	Terkait hal diatas sesuai konsultasi publik 34 kampung di Kabupaten Fakfak bukan 17 Kampung		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa hanya beberapa kawasan di Kabupaten Fakfak yang termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan yang tidak terkena dampak, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)

3.	Jadwal untuk Train 3 harus diperinci secara jelas		Kegiatan konstruksi Kilang LNG 3 direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2014 selama kurang lebih 5 tahun dan kegiatan operasinya akan dimulai pada pertengahan tahun 2019. Jadwal selengkapnya kegiatan pembangunan Kilang LNG 3 dapat dilihat pada Gambar I-3 Jadwal Kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	ANDAL hal. I-8
K	**Abutalib Pauspaus, Dinasketrans Kabupaten FakFak**			
1.	Setuju dan tetap menerima expansi penyusunan AMDAL proyek pengembangan Tangguh LNG untuk Tren 3 dan Tren 4		Terima kasih atas dukungannya	
2.	Hasil penyusunan AMDAL ter-cover di dokumennya yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat masing-masing kampung baik ekonomi sosial dan budaya agar hukumnya wajib agar tidak dilalaikan.		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
3.	Keberadaan kapal sesuai jadwal perusahaan dalam rangka permintaan dan pengisian gas diwilayah pemerintah Teluk Bintuni dan wilayah pemerintah Kabupaten Fak-Fak supaya dilakukan kordinasi dan komunikasi antara kedua Bupati, perlu bapak Gubernur menginstruksikan kepada Bupati-bupati di provinsi Papua Barat untuk meyelesaikan Batas atau tapak, Batas darat maupun laut. Dari awal beroperasi hingga saat ini oleh Tangguh LNG diwilayah Teluk Berau masalah perekrutan tenaga kerja kami dari Kabupaten FakFak merasakan sangat kurang sama sekali, harap ke depan masalah perekrutan menjadi unsur utama yang perlu diperhatikan.		Kegiatan transportasi laut / kapal telah dikoordinasikan dengan instasi terkait sesuai dengan aturan yang berlaku Masalah tapal batas antara kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni bukan merupakan kewenangan Tangguh LNG. Sebaiknya hal ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua (hal 18-29)
L	**Ahmad R, BLH Fakfak**			
1.	Agar rencana kegiatan Train IV dijelaskan jadwalnya dan rencana kegiatannya dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL Train III & IV		Rencana pengembangan Kilang LNG 4, termasuk kajian dampak dan rencana pengelolaan dan pemantauannya sudah dimasukkan ke dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG.	

			Jadual pengembangan kilang 4 masih menunggu pembuktian kandungan gas melalui kegiatan eksplorasi. Waktunya belum dapat ditentukan saat ini	
M	**Wamaer Frits,Dinas Kesehatan, Fakfak**			
1.	Perlu ada kajian dampak ekonomi dan ekologis sebelum dan setelah tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap prakonstruksi/operasional kegiatan terpadu proyek BP LNG Tangguh dengan harapan ada keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam hal/bidang ekonomi dan ekologis.		Kajian dampak ekonomi dan ekologis untuk setiap tahapan kegiatan proyek mulai dari pra konstruksi, konstruksi dan operasi sudah dibahas dalam dokumen AMDAL ini, (lihat Bab 3 ANDAL) . Pembelajaran dari pelaksaan AMDAL saat ini juga sudah dipertimbangkan dalam proses kajian dampak tersebut	
2.	Sebelum dilakukan sidang Amdal terpadu perlu ada dokumen AMDAL yang disampaikan kepada instansi teknis.		Dokumen ANDAL, RKL-RPL Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan kepada Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat sebelum rapat pembahasan dokumen AMDAL dilakukan. Pertemuan dengan Tim Teknis telah dilakukan pada tanggal 28 November 2013. Masukan dari tim teknis sudah kami tanggapi dan dijadikan acuan dalam perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini.	
	Perlu diperhatikan pembangunan kesehatan masyarakat yang berhubung dengan status kesehatan masyarakat.		Tangguh berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan kesehatan masyarakat kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan (hal 6-12)
	Perlu ada dukungan bagi instansi teknis kesehatan dalam meningkatkan program pelayanan kesehatan dasar dan majukan serta infrastruktur kesehatan di daerah kegiatan proyek pengembangan Tangguh LNG.		Tangguh berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan kesehatan masyarakat di kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan (hal 6-12)
N	**Marthen Bless, K. UPP, Kokas-Fakfak**			
1.	Hubungan kemasyarakatan		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas	Lampiran 3

	• Antar kabupaten (Fakfak-Bintuni), masyarakat adat, sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan Teluk Berau. Untuk itu diperlukan dukungan sarana transportasi laut sebagai akses dalam peningkatan ekonomi masyarakat kawasan Teluk Berau (Fakfak-Bintuni)		tersedianya transportasi laut antar-kabupaten. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini. Komitmen Tangguh LNG dalam mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi laut terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan transportasi air yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewirausahaan Papua (hal 34-36)
2.	Alur transportasi kapal LNG Tangguh yang melewati perairan Fakfak harus di kenakan jasa retribusi dan upah di wilayah Kabupaten Fakfak.		Kegiatan transportasi kapal Tangguh LNG termasuk proses perizinan yang diperlukan dan retribusi yang harus dibayarkan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
O	**Abdurrahman Tator, aparat Kampung Fior, Distrik Kokas, Kabupaten FakFak, Provinsi Papua Barat**			
1.	Dimohon dengan hormat agar para pemerintah pusat serta semua elemennya terlibat langsung untuk mengawal aspirasi AMDAL tersebut, begitu pula pemerintah Kabupaten dan pemerintah distrik, mengingat pertemuan ini sangat penting.		a. Setelah dokumen ANDAL dan RKL-RPL diperbaiki dan diserahkan kembali ke KLH, KLH selaku ketua Komisi AMDAL Pusat akan mengkaji semua tanggapan yang diberikan oleh Tangguh LNG terhadap masukan dari Masayrakat dan Pemda yang diberikan pada Rapat Komisi AMDAL Tangguh LNG di Bintuni tanggal 5 December 2013 dan dilanjutkan pada 18 Februari 2014 serta dari pertemuan di Kokas pada 14 Feb 2014 dan di Bintuni pada 17 Feb 2014. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL tanggal 18 Februari 2014 di Bintuni, point No 9, Setelah hasil perbaikan dokumen diterima, Komisi Penilai AMDAL Pusat akan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak dalam evaluasi dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Fakfak.	

2.	Apabila dalam Train 4 itu mulai beroperasi maka dimohon agar memperhatikan akses jalan dari kampung kami ke jalan nasional yaitu, Bomberai ke Fakfak, tujuan kami agar antara dari kampung yang berdekatan dapat juga dibuat akses jalan tersebut. Mohon dari pihak pemerintah/LNG memperhatikan potensi laut, potensi darat, berupa hasil pertanian yang saat ini ada		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Bomberai, misalnya gedung sekolah dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
3.	Diusahakan di kampung Fior dan Forir antara lain : 1) Rica (cabe) 2) Ikan Asin Sebagai contoh; rica yang selalu dijual di pasar Tamboruni Fakfak dan begitu pula ikan asin Pula menyangkut gaji para perwakilan kampung-kampung yang telah mendapatkan SK Bupati, sehingga fungsi control dari yang paling rendah dapat berjalan dengan baik.		Tangguh LNG telah memiliki rencana pengelolaan dampak melalui program peningkatan pendapatan bagi masyarakat nelayan dan petani setempat. Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan perikanan, serta pelatihan dan bimbingan tentang pengelolaan pasca tangkap / pasca panen dan pelatihan serta bimbingan keterampilan tambahan sehingga masyarakat memiliki sumber pendapatan alternatif yang dapat meningkatkan penghasilannya. Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
P	**Nafraris Gwasgwas, Kabupaten FakFak, Provinsi Papua Barat**			
1.	Kami masyarakat yang melayani pesisir Teluk Berau ingin kejelasan dari BP Tangguh dan Pemerintah dengan ANDAL yang sudah dan akan datang itu dimana dan bagaimana.		Jawaban untuk angka 1 dan 2: Ruang lingkup AMDAL Tangguh LNG tahun 2002 mencakup pembangunan Kilang LNG 1 dan 2, termasuk 4 anjungan lepas pantai dan fasilitas pendukung lainnya . Sedangkan ruang lingkup AMDAL Proyek Pengembangan Tangguh LNG saat ini mencakup :	Dokumen ANDAL Sub Bagian 1.2 Deskripsi Rencana Kegiatan Proyek.

			• **Pengembangan tahap awal:** Meliputi Pembangunan satu Kilang LNG baru (“Kilang LNG 3”), dua anjungan lepas pantai dan jaringan perpipaan bawah laut, pemboran 13 sumur produksi gas, tiga sumur reinjeksi dan empat sumur sisipan (infill wells), dan pembangunan fasilitas pendukung termasuk satu tangki LNG tambahan, satu tangki kondensat tambahan, dermaga fasilitas bulk off loading (BOF), serta dermaga gabungan LNG dan kondensat. • **Pengembangan tahap selanjutnya (kelanjutan pasokan gas untuk Kilang LNG 3 dan pembangunan Kilang LNG 4):** Pengembangan tahap selanjutnya meliputi pembangunan sampai dengan sembilan anjungan lepas pantai, dengan pengeboran sembilan hingga enam belas slot sumur untuk tiap anjungannya (termasuk satu sumur DCRI pada tiap anjungan jika opsi ini dianggap layak), pembangunan sampai dengan sembilan jaringan perpipaan bawah laut, fasilitas pendukung termasuk satu tangki LNG tambahan dan satu tangki kondensat tambahan serta pembangunan Kilang LNG 4 apabila berdasarkan pertimbangan BP, Mitra Usaha Tangguh dan pemerintah Republik Indonesia dimungkinkan. Lebih detailnya dapat dilihat pada dokumen ANDAL Sub Bagian 1.2 Deskripsi Rencana Kegiatan Proyek.	
2.	Karena secara logika bahwa di Teluk Berau itu di dalamnya adalah Teluk Bintuni, maka kami mohon kejujurannya Karena kami yang mendiami Pesisir Teluk Berau ini belum mengetahui secara jelas. Kami dimasyarakat itu ada dimana		Lihat jawaban pada angka 1.	
3.	Karena pada saat sebelum ada BP Tangguh semua Biota laut berupa siput, udang dan ikan serta Biota laut yang lainnya itu mudah didapatkan. Setelah adanya BP Tangguh ini maka semua		Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau	

	Biota dan hasil tangkapan bagi masyarakat semakin berkurang. Maka solusi apa yang diambil selama ini. Mohon kejelasannya.		cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net* trawl. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada.	
Q	**MT Brawery, Tokoh Adat Weriagar,Kab. Bintuni**			
1.	Semua pembicaraan hanya masalah sosial, budaya dan ekonomi namun dari keberhasilan semua lupa dengan keamanan.		Pada dasarnya, Tangguh LNG menerapkan sistem keamanan berbasis masyarakat. Sampai dengan saat ini kegiatan Tangguh LNG tidak menghadapi hambatan keamanan yang berarti. Namun apabila terjadi pelanggran hukum yang melibatkan masyarakat dengan Tangguh LNG, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
2.	Untuk itu lewat sidang yang mulai ini tolong dipikirkan masalah, Sarana dan prasarana bagi keamanan di Teluk Bintuni yang serba kekurangan.		Jawaban untuk angka 2, 4, dan 5: Tangguh LNG memahami bahwa sarana dan prasarana bagi keamanan di Teluk Bintuni merupakan hal yang penting, namun mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi masyarakat ini. Sebaiknya asipirasi ini disalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
3.	Dengan lewat sidang yang mulia ini tolong diperhatikan anggota keamanan yang ada diKabupaten Teluk Bintuni yaitu Polri dan TNI yang ada di Kabupaten Bintuni.		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG, atau memberikan pembayaran dalam bentuk apapun kepada pegawai pemerintah diluar ketentuan hukum yang berlaku.	
4.	Bicara soal Sarana prasarana khusus Polri dan TNI yang ada di Papua dan Papua Barat umumnya khusus Kabupaten Bintuni sangat terbatas.		Lihat jawaban pada angka 2.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola

				Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
5.	Untuk itu LNG dan SKK Migas tolong diperhatikan		Lihat jawaban pada angka 2.	
mR	**Saban Nabi, Utusan dari Taroi, kampung Taroi Distrik Tomu**			
1.	Pembuatan Taluk Beton di pantai Taroi sepanjang 5 km dari Timur ke Barat guna menjaga Abrasi dan kelestarian pembentangan kabel aliran listrik yang jaraknya tidak jauh dari pantai.		Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan talud. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini. Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Taroi, sejak tahun 2010-2012, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
S	**Sopaheluwakian, Sekda Fakfak, Jln. Weyan FakFak**			
1.	Perwakilan masyarakat harus sesuai dengan hasil konsultasi public yaitu 34 kampung ditambah kampung2 pemekaran sesuai Peraturan Daerah Tahun 2012.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa tidak semua kawasan di Kabupaten Fakfak yang termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari kawasan yang tidak terkena dampak, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)
2.	Aspirasi & masukan masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.		Tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang	

			sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG.	
3.	Jadwal kegiatan BP Berau harus disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Fakfak.		Jadwal kegiatan Tangguh LNG telah disampaikan secara berkala ke Pemda Kabupaten Fakfak dan di masa mendatang akan terus disampaikan secara rutin	Tabel RKL/RPL dokumen AMDAL
T) Yakonias Wayuri, Perwakilan Tokoh Adat, kampung Onar Baru				
1.	Masukan: Bapak Ibu tolong kami untuk menanam jenis pohon sagu ada dua jenis, ada sagu yang berduri dan yang tidak berduri.		Tangguh LNG dapat mempertimbangkan aspirasi ini. Namun demikian, sebelum penanaman sagu yang tidak berduri ini dilaksanakan, perlu dilakukan studi kelayakan yang hasilnya menunjukkan bahwa penanaman sagu yang tidak berduri layak untuk dikembangkan, dan, program ini mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah serta masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
U) D. Simuna, Kepala Kampung, kampung Forada				
1.	Tanggapan infrastruktur pembuatan I. Dermaga Tofoi Distrik Sumuri II. Pembuatan Darat Tofoi – Materabu Jaya – Forada, Tanah Merah, Saengga – Onar Lama dan Onar Baru. III. Mohon dirikan 1 (satu) unit SMK di SP 2 Forada.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Kampung Tofoi, misalnya pembangunan jetty, rumah koperasi, sarana air bersih, balai kampung, dan infrastruktur lainnya. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan, jetty, dan sekolah (SMK) namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, seperti diketahui, di wilayah Kampung Tofoi terdapat perusahaan migas lain. Sebaiknya aspirasi ini juga disampaikan kepada perusahaan tersebut.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

V) Rachmad H. Kokop, Perwakilan Masyarakat Distrik Aranday, Kampung Kandarin				
1.	Kejelasan wilayah distrik Aranday dalam aturan AMDAL di DAVs (*Directly Affected Village)*		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*).	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendahuluan
2.	Refisi AMDAL baru sekali dari sekali dalam system kepemimpinan di Kabupaten dalam Administrasi Kabupaten teluk Bintuni dalam sekali kepemimpinan.		Dokumen AMDAL Tangguh bukan direvisi. Sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku di Indonesia, rencana kegiatan terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG ini perlu dilengkapi dengan studi AMDAL baru. Dokumen AMDAL ini telah disusun sesuai dengan ketentuan tersebut	
3.	Dalam penerimaan tenaga kerja harus dapat memperhatikan aspek masyarakat di wilayah lokal (setempat)		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
4.	Mengembangkan potensi daerah dalam hasil2.		Tangguh LNG berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyerap produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sepanjang memenuhi kualitas yang ditentukan serta sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan baik selama masa konstruksi proyek pengembangan Tangguh LNG maupun setelah memasuki tahap operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

5.	Memperhatikan dampak dari hasil pengoperasian dalam lingkungan di wilayah DAVs (*Directly Affected Village)*		Semua dampak sudah dikaji dalam dokumen AMDAL ini (lihat Bab 3 ANDAL). RKL-RPL sudah disusun untuk menghindarkan atau meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang tidak berdasarkan konsep kewilayahan - *Directly Affected Village* namun akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat. Beberapa program sosial akan direncanakan berdasarkan persetujuan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan.	Bab 3 ANDAL Matrik Pengelolaan dan Pemantauan pada dokumen RKL-RPL Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendahuluan
W) Eka Wayuri, Masyarakat Tanah Merah, Tanah Merah				
1.	Kami meminta kepada pihak perusahaan menghargai masyarakat DAVs (*Directly Affected Village)* yang bekerja di LNG Tangguh yaitu Masyarakat Sumuri.		Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, baik yang bekerja untuk kepentingan Tangguh LNG maupun masyarakat di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG, merupakan salah satu yang menjadi prinsip Tangguh LNG dalam melakukan kegiatannya.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendahuluan
2.	Kami masyarakat tanah Merah meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan gaji tiap bulan kepada KK, Janda, duda, yatim piatu dan orang2 tua yang tidak mampu.		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	
3.	Kami meminta kepada pihak perusahaan agar mau menerima tenaga kerja masyarakat DAVs (*Directly Affected Village)* buat perempuan 50 % di LNG Tangguh		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)

4.	Kami masyarakat Tanah Merah meminta agar pintu pagar dibuka sampai pembuatan jalan selesai		Tangguh LNG menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat membuka pagar Kilang LNG.	
X) Titus Inanosa, Distrik Sumuri, Kampung Onar Lama				
1.	Kami masyarakat kampung Onar Lama ANDAL I-II tidak termasuk dalam DAVs (*Directly Affected Village)*, untuk itu kami meminta kepada pemerintah dan BP Tangguh ANDAL Train 3-4 Onar termasuk didalam DAVs (*Directly Affected Village)*.		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*). Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial bagi Masyarakat Asli yang tinggal di Kampung Onar Lama, sesuai dengan dokumen RKL / RPL AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendahuluan

2.	Train 3-4 BP Tangguh tolong memperhatikan penyerapan dan pemasaran produk lokal yang dikampung: antara lain Sayur-sayuran, buah-buahan, hasil laut dan ikan, udang dll		Tangguh LNG berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemampuan untuk bersaing di pasar yang luas. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten). Ke depan, program Tangguh LNG tidak akan lagi fokus kepada DAVs (*Directly Affected Village)*, tapi lebih berfokus pada Masyarakat Asli, sehingga manfaat Tangguh LNG akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Asli.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
3.	Kampung Onar Lama, BP Tangguh menyediakan akses-akses keuangan untuk usaha2 kelompok Tani, kelompok Koperasi, Kelompok Usaha Perempuan.		Keberadaan Lembaga Ekonomi Berbasis Masyarakat (LEBM) yang tumbuh dengan prinsip ”dari, oleh, dan untuk masyarakat” di kampung-kampung sekitar wilayah operasi Tangguh LNG seperti Koperasi, UBSP, dan KUB telah mulai berkembang dari 4 unit koperasi pada tahun 2008 menjadi 9 unit pada tahun 2012. Pembentukan LEBM didasari karena tidak adanya lembaga ekonomi formal yang dapat diakses untuk mendukung tumbuhnya sektor riil dan usaha mikro bagi masyarakat. Untuk ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, Tangguh LNG berkomitmen untuk membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu usaha masyarakat, sebagai contoh koperasi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
4.	BP Tangguh tolong memberi pelatihan kepada koperasi tentang bisnis dan kewirausahaan dan pelatihan peternakan.		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bagi Masyarakat Asli. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-

			skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar. Selain itu, Tangguh LNG mendukung penyediaan berbagai sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.	34)
5.	BP Tangguh memberikan Pengembangan bisnis mengenal masyarakat asli.		Tangguh LNG memahami pentingnya upaya untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Asli, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap skala bisnisnya diharapkan bisa ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah dan besar.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
6.	Menyediakan dana usaha kepada koperasi yang mempunyai dasar hukum untuk membeli produk-produk masyarakat dan jual kepada perusahaan.		Tangguh LNG akan berupaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal serta mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung usaha masyarakat. Di samping itu, Tangguh LNG juga akan mendukung ketersediaan alat-alat pertanian untuk mendukung pertanian masyarakat	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
7.	BP Tangguh tolong bermitra dengan Koperasi untuk membeli hasil usaha masyarakat berupa sayur2an, buah2an, ikan, udang dan produk-produk lain.		Tangguh LNG berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemampuan untuk bersaing di pasar yang luas. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten). Ke depan, program Tangguh LNG tidak akan lagi fokus kepada DAVs (*Directly Affected Village)*, tapi lebih berfokus pada	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

			Masyarakat Asli, sehingga manfaat Tangguh LNG akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Asli.	
8.	BP memberi dana pendidikan kepada anak-anak sekolah yang ada di sekolah : SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi.		Tangguh LNG akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara dan Pantai Selatan Teluk Bintuni. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)
9.	Memberikan dana untuk anak sekolah yang mengikuti wisuda.		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan dalam jumlah tertentu melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Masyarakat Asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)
10.	Hasil laut berupa ikan udang maka lama makin jauh dari pantai iu, akibat pengaruh kehadiran perusahaan, hasil kami sudah makin berkurang. Untuk itu BP Tangguh menyediakan kendaraan berupa kapal John 15 pk dan longboat viber satu buah untuk masyarakat nelayan yang ada di Omar Lama.		Berdasarkan hasil survei perikanan yang dilakukan oleh IPB pada tahun 2004, 2007, dan 2013, potensi sumber daya perikanan di wilayah Teluk Bintuni dan Teluk Berau cenderung meningkat karena berhentinya kegiatan perikanan komersial dengan menggunakan kapal *bottom-net trawl*. Pemanfaatan sumber daya ikan, udang dan kepiting masih lebih kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang ada. Jika keberadaan fasilitas atau kegiatan proyek Tangguh LNG terbukti mempengaruhi pendapatan masyarakat maka Tangguh LNG telah mempersiapkan program pengelolaan dampak yang ditimbulkan tersebut	
Y) Tera Ramar, Kepala Distrik Kamundan				

1.	Sangat diharapkan agar dapat diperhatikan hasil musyawarah pembahasan AMDAL dengan baik, agar semua permintaan dapat dijawab secara bertahap. Demi kesejahteraaan masyrakat di Kabupaten Teluk Bintuni dan FakfFak.		Tangguh LNG akan memperhatikan hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat yang diajukan dalam rapat Komisi AMDAL di Bintuni. Kami berusaha untuk menanggapi semua saran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Berita acara dari semua pertemuan pembahasan AMDAL beserta tanggapan Tangguh LNG akan dijadikan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang akan diserahkan kepada KLH untuk proses persetujuan sesuai peraturan yang berlaku Pelaksanaan AMDAL dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Bapedalda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Bintuni dan Fakfak.	
2.	Jangan-jangan pembahasan AMDAL kemudian hari tidak diperhatikan, akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Kami seluruh masyarakat Kamundan sangat tidak mengharapkan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Freeport.		Tangguh LNG akan memperhatikan hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat yang diajukan dalam rapat Komisi AMDAL di Bintuni. Kami berusaha untuk menanggapi semua saran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua saran, aspirasi, maupun permohonan dapat kami penuhi. Hanya saran, aspirasi dan permohonan yang sesuai dengan hasil kajian dampak yang akan dikelola oleh Tangguh LNG. Berita acara dari semua pertemuan pembahasan AMDAL beserta tanggapan Tangguh LNG akan dijadikan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang akan diserahkan kepada KLH untuk proses persetujuan sesuai peraturan yang berlaku Pelaksanaan AMDAL dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke KLH dan instansi pemerintah terkait termasuk Bapedalda Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Bintuni dan Fakfak.	

Z) Klemens Ateta, Kampung Agoda				
1.	Kami dari perwakilan Kampung Agoda mengikuti Sosialisasi AMDAL, kami bawa hasil sosialisasi ini untuk masyarakat di Kampung.		Terima kasih atas bantuannya, dan kami sangat menghargai rencana untuk menyampaikan hasil sosialisasi kepada masyarakat di Kampung Agoda	
2.	Kami menyetujui Train 3 dan 4 di lokasi LNG Tangguh.		Terima kasih atas dukungannya	
3.	Program :			
	- pembangunan		- Tangguh LNG telah turut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG yang dilakukan melalui program CAPs dan program intervensi lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan gedung sekolah, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni (YPTB). Di masa yang akan datang, partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan, yang kemudian di tetapkan bersama Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG akan mendukung upaya pembangunan bagi Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG yang melibatkan perencanaan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terfokus pada kegiatan yang berkelanjutan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	Kesejahteraan masyarakat		Tangguh LNG memahami pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah, dan besar. Tangguh LNG memahami pentingnya peningkatan kapasitas	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 28-34)

			masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan secara bertahap, ditingkatkan dari bisnis berskala rumah tangga hingga bisnis berskala menengah, dan besar. Tangguh LNG berkomitmen untuk menyerap produk lokal masyarakat dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan secara maksimal sesuai kebutuhan pangan pada masa konstruksi dan operasi Tangguh LNG. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten).	
	Pelatihan -pelatihan		- Dokumen AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah mencantumkan komitmen tentang pelatihan keterampilan bagi Masyarakat Asli serta dukungan terhadap sekolah kejuruan teknik. Tangguh LNG akan bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pelatihan untuk memberi pelatihan keterampilan terutama kepada Masyarakat Asli terpilih yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di wilayah Papua Barat.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	Semuanya ini kami masyarakat Kampung Agoda telah mendukung persetujuan AMDAL Tangguh ini.		Terima kasih atas dukungannya	
4.	Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan perusahaan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sumuri baik Kampung-Kampung yang ada didistrik Sumuri.		Terima kasih atas dukungannya	

3.	Telah meminta keinginan masyarakat menikmati kesejateraan dan ekonomi di setiap Kampung.		Terima kasih atas dukungannya	
4.	Masukan tanggapan kami ini dipergunakan atau manfaatkan kepada masyarakat yang terdapat di sekitarnya, demikian dan terima kasih.		Masukan akan kami perhatikan	
AA) Silas Masumbauw, Tokoh Pemuda Tofo (Sumuri), Tofoi.				
1.	Pintu pagar LNG Tangguh harus dibuka sementara, masyarakat Kampung Tofoi sehingga dapat dipakai untuk jalan penghubung yang pasti sudah ada, baru pagar LNG ditutup. Jadi kami tegaskan untuk pagar dibuka dulu sampai jalan permanen yang gantinya selesai dibuat.		Tangguh LNG menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat membuka pagar Kilang LNG.	
2.	Sampai sekarang masyarakat kesulitan transportasi laut bila ada masyarakat yang mendadak atau Emergency (rujukan Posyandu). BP Tangguh harus perhatikan hal ini. Selama ini masyarakat kesulitan sekali dengan transport (rujukan emergensi)		Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Daerah di bidang transportasi air secara terbatas yaitu menyangkut transportasi air yang mendukung kegiatan usaha di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewirausahaan Papua (hal 34-36)
3.	Masalah pendidikan, banyak mahasiswa asal Sumuri tidak diperhatikan dengan baik. Banyak yang pulang kampung karena biaya orangtua terbatas, jadi saran saya BP Tangguh melaksanakan pendataan mahasiswa asal Sumuri untuk diberikan biaya siswa setiap bulan karena dana yang BP Tangguh berikan lewat program Comdev itu kurang jelas bagi masyarakat kampung khusus anak-anak mereka yang kuliah begitu juga pelajar SMP-SMA dll.		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Pada tahun 2013, penerima beasiswa yang berasal dari Distrik Sumuri berjumlah 9 orang mahasiswa dan 10 orang pelajar SMK. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Di samping itu, Tangguh LNG juga memberikan bantuan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)

			pendidikan kepada pelajar SD, SMP, dan SMA, termasuk yang berasal dari Distrik Sumuri, melalui mekanisme CAPs	
4.	Harus ada mobilisasi jalan yang baru atau jalan penghubung antara Tofoi dan Tanah Merah, Saengga, Onar dan Kampung Tomage.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Sumuri, misalnya gedung sekolah, jetty, gedung koperasi, rumah ibadah, dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
5.	Bila perlu, jalan2 ini diaspal oleh BP Tangguh kerja sama pemerintah propinsi dan kabupaten Bintuni dan Fakfak.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Sumuri, misalnya gedung sekolah, jetty, gedung koperasi, rumah ibadah, dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
6.	Kepada pemerintah Kab. Teluk Bintuni, kami dari masyarakat distrik Sumuri meminta kalau bisa Perusahaan Genting Oil dan Eni Oil yang beroperasi di wilayah Sumuri harus buat kegiatan AMDAL atau sidang AMDAL supaya jangan ada dampak dari perusahaan ini terjadi diwaktu2 yang akan datang. Kami sangat berharap.		Sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah, serta perusahaan-perusahaan tersebut.	
7.	BP Tangguh harus mengadakan pembinaan bagi pemuda-pemudi Sumuri untuk mencari bakat-bakat calon olahragawan yaitu Bola Kaki dan Volley Ball. Supaya ada anak2 Sumuri juga punya tim sepak bolla yang keluar bersaing di liga2 Indonesia.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab

			kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
BB) Abubakar Solowat, Ketua LMA Kampung Taroi dari 7 Kampung, Distrik Tomu				
1.	Kami minta kepada pihak BP Tangguh segera membuat teluk dibeton di Pantai taroi sepanjang 5 km, mengingat lokasi pembentangan kabel listrik tidak jauh dengan pantai, jarak dari pantai ke lokasi kabel 600 M.		Tangguh LNG memahami asprirasi masyarakat atas pembuatan talud. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan ini. Sehubungan dengan upaya menahan terjadinya abrasi di pesisir Kampung Taroi, sejak tahun 2010-2012, Tangguh LNG telah memfasilitasi program penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) yang menurut hemat kami sudah mulai menunjukkan keberhasilannya. Dalam hal masyarakat menginginkan perluasan atas program penanaman ini, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daearah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
2.	Tolong dalam waktu dekat atau selesai AMDAL ini segera ada program masalah perumahan di Taroi dari 7 Kampung.		Pemda Teluk Bintuni dan Tangguh LNG telah mengadakan kesepahaman untuk melakukan kajian atas kelayakan program perbaikan/penataan rumah di Distrik Weriagar dan Distrik Tomu. Bentuk dan pelaksanaan program ini akan sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran baik di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG. Apabila hasil kajian ini menunjukan bahwa program perbaikan/penataan rumah layak untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Pemda Teluk Bintuni maupun di Tangguh LNG, maka pelaksanaan program ini akan dilakukan dan berakhir selama konstruksi Tangguh Train 3. Program perbaikan/penataan rumah juga direncanakan untuk Masyarakat Asli di Distrik Tomu dengan pertimbangan antara lain bahwa: 1) Distrik Tomu berada di wilayah kerja Tangguh LNG di mana Tangguh LNG telah melakukan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

			kegiatan eksplorasi; dan 2) Lokasi perumahan Masyarakat Asli di Distrik Tomu terletak di wilayah yang bersentuhan dengan wilayah kerja Tangguh LNG sehingga ada kemungkinan Tangguh LNG melakukan kegiatan di Distrik Tomu yang dapat menunjang kegiatan ekplorasi dan ekploitasi.	
3.	Tolong ditinjau kembali peta AMDAL karena mulai dari tahun 1997 mulai BP Tangguh beroperasi sampai dengan sekarang ini tahun 2014. Nama Anjungan belum juga dirubah yaitu Vorwata diganti dengan Taroi.		Nama sumur gas tidak dapat diganti karena semua dokumen proyek telah diserahkan dan disetujui oleh Pemerintah dengan mencantumkan nama-nama yang ada pada saat ini. Perlu diketahui bahwa penamaan sumur gas ini tidak berkaitan dengan penentuan Dana Bagi Hasil Migas.	
4.	Itu berarti sampai saat ini pihak BP Tangguh masih menganggap kami Kampung Taroi dari 7 Kampung masih dianggap bukan kampung2 penghasil gas dan minyak.		Tidak berubahnya nama anjungan dan sumur tidak menunjukkan bahwa Tangguh LNG tidak menghargai keberadaan masyarakat yang berasal dari Kampung Taroi yang letaknya berdekatan dengan daerah operasi Tangguh LNG. Sesuai dengan peraturan yang berlaku penentuan daerah penghasil migas dilakukan berdasarkan letak geografis sumur migas, dan tidak didasarkan pada nama sumur migas tersebut.	
ASPIRASI TAMBAHAN DARI MASYARAKAT 7 KAMPUNG (TAROI, PERA PERA, TAMBANEWA, SORONDAUNI, RIMBITO, PERA PERA BARAT, DAN KAPUNGGO) DI DISTRIK TOMU KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT				
	1. Pendidikan: a. Pemberian beasiswa kepada anak anak kami ke masing masing jenjang per orang sebagai berikut: TK : Rp. 3.000.000,- SD : Rp. 6.000.000,- SMP : Rp. 9.000.000,- SMA/SMK : Rp. 12.000.000,- Perguruan Tinggi : Rp. 15.000.000,-		1.a. Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)

			dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Jumlah besaran beasiswa atau bantuan pendidikan yang selama ini telah diberikan oleh Tangguh LNG ditentukan setelah melalui proses pengkajian.	
	b. Pendirian pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMA Unggulan di taroi, lengkap dengan perumahan guru, serta didukung dengan fasilitas penunjang lainnya c. Pendirian sarana dan prasarana gedung taman baca d. Fasilitas untuk Tk Pertiwi Negeri Taroi (pembuatan pagar sekolah, pengadaan permainan anak anak/ ayunan dan lain lain) penyediaan dana untuk perawatan gedung tk serta pengadaan pembangunan perumahan guru		Jawaban untuk butir 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f.: Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan	

	e. Penambahan 1 gedung SMP Negeri Taroi yang terdiri dari 3 ruang kelas f. Pembangunan perumahan guru SD dan SMP 20 unit		fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.	
	2. Pembagian dana bagi hasil dari 7 kampung di Taroi kami minta 10%		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	
	3. Dana abadi diperuntukan untuk kampung penghasil / 7 kampung di Taroi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) per pengapalan		Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai	

			pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	4. Uang ketuk pintu sebesar Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat miliyar rupiah) dibayarkan secara tunai karena karena karena kami punya dua buah sumur yang sudah diproduksi		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat sebesar Rp. 54 milyar. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut. Untuk menangani aspirasi ini, sesuai dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Tangguh LNG/SKK Migas, akan mempersiapkan program-program (bukan dalam bentuk tunai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, sebenarnya dana yang telah dikeluarkan oleh Tangguh LNG untuk membiayai program-program sosial di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, peningkatan pendapatan, tata kelola kepemerintahan, infrastruktur, hubungan eksternal, pengembangan kampung, dan lain-lain yang telah dilakukan melalui Program Sosial Tangguh LNG (*Tangguh Sustainability Program*) dan telah dinikmati oleh masyarakat melalui keberadaan Kilang Tangguh LNG telah melebihi jumlah Rp. 54 miliar sebagaimana yang dituntut oleh sebagian masyarakat.	

	4. Apabila ada train lagi diatas tanah adat di 7 kampung (taroi, pera pera, tambanwea, sorondauni, rimbitoto, kapunggo da pera pera barat), maka uang ketuk pintu dibayarkan nilainya sama dengan trend 1 dan 2 (10 miliyar per tahun)		Tangguh LNG sebagai kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan kontrak kerja sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	5. Perubahan nama Sumur Vorwata (VRA s/d VRF) menjadi Sumur Taroi (TRA s/d TRF).		Nama sumur gas tidak dapat diganti karena semua dokumen proyek telah diserahkan dan disetujui oleh Pemerintah dengan mencantumkan nama-nama yang ada pada saat ini. Perlu diketahui bahwa penamaan sumur gas ini tidak berkaitan dengan penentuan Dana Bagi Hasil Migas.	
	6. Penerangan listrik dari LNG 24 jam tidak dikenakan pembayaran kepada suku sebyar selama produksi berjalan,		Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendistribusian listrik kepada	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-

	karena masyarakat meminta pembayaran / ganti rugi atas penebangan di sepanjang lokasi pembentangan kabel listrik		masyarakat. Oleh karena itu aspirasi ini sebaiknya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, termasuk masalah pembayaran ganti rugi maupun pembayaran listrik.	Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (hal 49-50)
	7. Pengadaan air bersih yang bukan air hujan oleh BP		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan, dan telah dipasang di masing-masing rumah di Kampung Taroi dan Kampung Perapera.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
	8. Pembangunan pemancar telepon seluler dengan teknologi minimal 3G		Tangguh LNG tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan terhadap pemasangan tower, sebaiknya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada operator telekomunikasi tersebut.	
	9. Pembayaran pembakaran dusun sagu di Taroi segera direalisasikan paling lambat 3 bulan setelah selesai sidang amdal ini sebesar 926.836.000.000 (sembilan ratus dua puluh enam miliyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Apabila tidak ada realisasi dari waktu yang telah ditentukan pada poin pertama, maka kami akan menduduki jetty combo dock sampai selesai pembayaran baru kami akan meninggalkan combo dock		Sesuai dengan data dan informasi yang kami miliki, kegiatan eksplorasi dan produksi sehubungan dengan proyek kilang LNG, yang dilakukan oleh Tangguh LNG tidak pernah menimbulkan kebakaran hutan sagu di wilayah manapun. Dengan demikian, sebaiknya tuntutan ini disampaikan kepada pihak yang telah terbukti menyebabkan terjadinya kebakaran hutan sagu sebagaimana yang disangkakan dalam aspirasi masyarakat tersebut. Sebagai informasi, sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, kepemilikan atas jetty combo dock berada pada Pemerintah Indonesia.	
	10. Penambahan tenaga humas sebanyak 4 orang untuk 7 kampung di Taroi		Tangguh LNG akan mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan

				Sumber Daya Manusia Papua (hal 18-29)
	11. Kami 7 kampung di Taroi minta kepada BP untuk mengadakan perahu fiber dan motor tempel 15 pk (merek yamaha turbo) dan dilengkapi dengan alat alat nelayan lainnya untuk setiap kepala keluarga		Tangguh LNG telah mengadakan bantuan perahu dan motor tempel untuk mendukung pengembangan usaha melalui kelompok-kelompok usaha. Tangguh LNG tidak akan mengadakan bantuan perahu fiber dan motor tempel untuk kepentingan perseorangan. Ke depan, bantuan pengadaan perahu, motor tempel, dan peralatan nelayan akan diberikan untuk mendukung pengembangan usaha bagi kelompok usaha masyarakat.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewirausahaan Papua (hal 34-36)
PERJANJIAN ADAT IKATAN ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT PETUANAN ARGUNI, PETUANAN PIKPIK SEKAR DAN PETUANAN WERTUAR DENGAN BP TANGGUH TELUK BINTUNI TENTANG EKSPANSI, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS OLEH BP TANGGUH DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT PETUANAN ARGUNI, PIKPIK SEKAR DAN WERTUAR KABUPATEN FAKFAK				
1.	Bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai adat dan untuk mendukung pelaksanaan ekspansi proyek BP Tangguh wajib memenuhi segala ketentuan adat dan atau prosesi adat sebagaimana yang berlaku di wilayah masyarakat adat 3 (tiga) petuanan tersebut, maupun diwilayah adat lainnya.		Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
2.	Bahwa BP Tangguh sebagai pihak pelaksana proyek ekspansi, wajib berkoordinasi dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat (hak petuanan, hak Suku/Marga dan hak perseorangan) yang merupakan bagian kesatuan wilayah adat yang tidak terpisahkan sepanjang proyek ekspansi oleh BP Tangguh yang berlangsung di wilayah masyarakat adat tersebut.		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal-hal yang tidak diatur berdasarkan kontrak kerja sama atau hukum yang berlaku. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

			kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
3.	Bahwa sebagai konsekwensi dari pelaksanaan ekspansi dan eksploitasi hasil sumberdaya alam migas di wilayah adat, maka ditetapkan dan untuk dipenuhi oleh pihak BP Tangguh terhadap pengelolaan sumur produksi tersebut yang wajib ditunaikan senilai 15 miliar per sumur sebelum dan untuk dilakukan proyek eksploitasi hasil, yang dibayarkan langsung kepada masyarakat adat yang memiliki kekuasaan wilayah adat dan sebagai pemilik hak ulayat adat.		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal-hal yang tidak diatur berdasarkan kontrak kerja sama atau hukum yang berlaku. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
4.	Bahwa untuk menjaga kebersamaan dan sebagai bentuk komitmen kerjasama antara masyarakat dan BP Tangguh dalam mengelola dan memanfaat sumberdaya alam, baik dalam proses ekspansi maupun proyek eksploitasi migas oleh BP Tangguh, adalah wajib dibuat dalam suatu kontrak kerjasama dengan masyarakat adat.		Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kewenangan untuk melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya alam migas berada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas. Dengan demikian, aspirasi ini sebaiknya disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.	
5.	Bahwa sepanjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada diwilayah masyarakat adat, diwajibkan untuk diprioritaskan pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adat 3 (tiga) petuanan tersebut.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil migas bagian pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian, Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG, yang bertujuan untuk	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh

			meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, tata kelola kepemerintahan, kesempatan kerja, pengembangan usaha masyarakat, dan lain-lain.	
6.	Bahwa selama beroperasinya BP Tangguh, dalam proses ekspansi dan eksploitasi wajib memperhatikan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja lingkungan sosial budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dan mendukung penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat adat di 3 (tiga) petuanan tersebut, serta tidak menggunakan kekerasan.		- Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen RKL-RPL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja di Tangguh LNG. - Tangguh LNG tetap berkomitmen bahwa pada tahun 2029, 85% tenaga kerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. Penerimaan tenaga kerja akan mengutamakan tenaga	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18) Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

			kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua) - Keberadaan Lembaga Ekonomi Berbasis Masyarakat (LEBM) yang tumbuh dengan prinsip ”dari, oleh, dan untuk masyarakat” di kampung-kampung sekitar wilayah operasi Tangguh LNG seperti Koperasi, UBSP, dan KUB telah mulai berkembang dari 4 unit koperasi pada tahun 2008 menjadi 9 unit pada tahun 2012. Pembentukan LEBM didasari karena tidak adanya lembaga ekonomi formal yang dapat diakses untuk mendukung tumbuhnya sektor riil dan usaha mikro bagi masyarakat. Untuk ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, Tangguh LNG berkomitmen untuk membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu usaha masyarakat, sebagai contoh koperasi.	
7.	BP Tangguh wajib mengalokasian dana khusus untuk masyarakat adat, petuanan dan lembaga adat di wilayah penghasil yang diberikan oleh pihak BP Tangguh selama beroperasi, dengan nilai sebesar 15 % setiap tahunnya dari hasil produksi, guna penunjang aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat.		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal-hal yang tidak diatur berdasarkan kontrak kerja sama atau hukum yang berlaku. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya	

			alam migas tersebut.	
8.	Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis energi migas diprioritaskan untuk dinikmati oleh segenap masyarakat adat dan kebutuhan publik guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum.		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil migas bagian Pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian, Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, tata kelola kepemerintahan, kesempatan kerja, pengembangan usaha masyarakat, dan lain-lain.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh
9.	Bahwa adapun segala hal menyangkut hak dan kewenangan Adat Wajib dikoordinasikan dan mendapat izin dan/atau sepengetahuan Masyarakat Adat. Apabila tidak ada perhatian sebagaimana dimaksud, maka masyarakat adat dapat mengambil langkah tegas sebagaimana Adat yang berlaku.		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi hal-hal yang tidak diatur berdasarkan kontrak kerja sama atau hukum yang berlaku. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
10.	Bahwa apabila terdapat kelalaian dan/atau dengan sengaja Pihak BP Tangguh melakukan pelanggaran Perjanjian Adat/Ikatan adat ini maka dapat dikenakan sanksi Denda Adat.		Dalam melakukan kegiatannya, Tangguh LNG akan menghormati norma, kebiasaan, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan	

			dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi, beserta dengan segala akibatnya tunduk pada ketentuan kontrak kerja sama serta ketentuan hukum yang berlaku.	
Tanah Merah Baru				
	Pagar LNG: Kami masyarakat TMB minta kepada pihak BP tangguh, harus membuka pintu pagar LNG. Alasan: agar membuka peluang bisnis bagi masyarakat lokal yang ada disekitar areal BP Tangguh		Tangguh LNG menghargai keberadaan Masyarakat Asli dan lokal yang bermukim di sekitar lokasi kilang Tangguh LNG, keberadaan pagar di sekeliling lokasi kilang Tangguh LNG tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kilang Tangguh LNG tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau akibat dari kegiatan di Kilang LNG Tangguh. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak dapat membuka pagar Kilang LNG.	
	Pendidikan: Kami masyarakat TMB (Sumuri) minta kepadapihak BP Tangguh harus menyediakan dana pendidikan bagi anak anak sumuri dari Tk dampai ke perguruan tinggi. Anak anak suku sumuri yang pola asrama yaitu terdiri dari TK, SD, SMP, SMU, SMK dan Sekolah Kejuruan		Tangguh LNG telah menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari Papua, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Teluk Bintuni. Hingga tahun 2013 telah disalurkan 237 beasiswa bagi mahasiswa dan 142 beasiswa pendidikan bagi pelajar. Beasiswa dan bantuan pendidikan ini diberikan dengan memberikan prioritas bagi masyarakat asli Papua serta prestasi pelajar dan mahasiswa tersebut. Bantuan pendidikan selama ini juga diberikan sebagai bagian dari CAPs bagi para pelajar di kampung-kampung. Di masa yang akan datang komitmen sehubungan dengan bantuan pendidikan dan beasiswa in telah tercantum di dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Beasiswa bagi Masyarakat Asli. Jumlah besaran beasiswa atau bantuan pendidikan yang selama ini telah diberikan oleh Tangguh LNG ditentukan setelah melalui proses pengkajian.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)

	Transportasi Laut dan Darat: Kami masyarakat TMB minta kepada pihak BP. Tangguh dan Pemerintah Daerah untuk membangun 1 buah jembatan permanen dan jalan darat yang menghubungkan kampung kampung TMB, Tofoi, Saengga dan Onar. Alasan: 1) karena jalur transportasi laut measyarakat akan lebih sulit setelah proyek tren 3 dan tren 4 di bangun. 2) untuk memudahkan hubungan bisnis ekonomi masyarakat keedepan lebih baik dan lancar.		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam berbagai pembangunan infrastruktur dasar tertentu di beberapa kampung di Distrik Sumuri, misalnya gedung sekolah, jetty, gedung koperasi, rumah ibadah, dan lain-lain. Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan tersebut, namun demikian karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh - AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	Ekonomi: Kami masyarakat TMB minta kepada pihak BP Tangguh berilah peluang bisnis yang sebesar-besarnya kepada kami pengusaha lokal Papua untuk mengambil bagian di dalam proyek tren 3 dan tren 4. Jangan jadikan kami sebagai penonton setia di negeri kami sendiri, tapi BP datangkan pengusaha luar untuk mencari keuntungan di tempat kami. Jangan kami miskin diatas tanah dan hasil kekayaan kami.		Tangguh LNG memahami adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup di segala bidang. Tangguh mempersiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah. Program-program ini antara lain program penguatan ekonomi seperti program pemberdayaan wirausaha masyarakat asli (*Indigenous Enterprise Development Program*) yang baru, program mata pencaharian dan program pemberdayaan pengusaha lokal di kawasan Kepala Burung (*Bird Head Business Empowerment Program*). Dengan ikut serta dalam program-program tersebut kami berharap masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli, mampu berdaya untuk memperbaiki standard hidup mereka. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan paska panen.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

	Status Tanah 50 HA: Kami masyarakat TMB dan Onar Baru minta kepada pihak BP Tangguh agar meninjau kembali status tanah adat yang diberikan kepada 9 marga yang selama 40 tahun tinggal di tanah merah lama oleh marga Sowai. Kami mohon kepada pihak BP Tangguh dapat ditunjau kembali karena sammpai saat ini status tanah tersebut kurang jelas bagi kami 9 marga		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	
	Aspirasi Pemberdayaan Perempuan: a) Untuk menambah ekonmi masyarakat khususnya kaum perempuan. Kami dari kampung TMB merasa berterimakasih kepada perusahaan BP tangguh yang mana telah memberi pelatihan pelatihan antara lain: 1. Membuat kerupuk udang 2. Membuat abon 3. Masak memasak 4. Membuat kue 5. Jahit menjahit 6. Pertanian Dengan adanya pelatihan ini dapat membuka wawasan kami dan juga ada banyak sekali perubahan di banding dengan tahun tahun yang lalu. Untuk itu kami minta perlu adanya kelanjutan dan perhatian dai perusahaan Bp Tangguh harus beri kami modal usaha.		Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan. Ke depan, Tangguh LNG tetap mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui usaha peningkatan proses produksi dan pengembangan produk, yang melibatkan peran perempuan. Sehubungan dengan aspirasi atas modal usaha, ke depannya, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengembangan lembaga ekonomi masyarakat, dengan membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu modal usaha masyarakat, melalui koperasi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
	b) Perusahaan BP Tangguh harus memeri peluang kerja bagi kaum perempuan		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial

				(hal 6-12)
	c) Perusahaan BP Tangguh harus mengutamakan pekerja pekerja DAVs (*Directly Affected Village)*		Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*). Sehubungan dengan aspirasi mengenai kesempatan kerja, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Pendahuluan
	d) Perusahaan BP Tangguh harus memperhatikan karyawan BP LNG Tangguh berau dikasi permanen sesuai dengan lamanya mereka pengabdian mereka kepada perusahaan		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja, jenis hubungan kerja antara Tangguh LNG dengan pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Sehingga status ketenagakerjaan sebagai pekerja permanen atau bukan permanen tidak ditentukan berdasarkan atas lamanya masa kerja pekerja.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (18-29)
The Terare Sumuri Foundation				
	Latar Belakang: Bahwa kehadiran perusahaan British Petroleum atau BP. Tangguh LNG di daerah kami elah menyengsarakan kehidupan social cultur kami terutama atas tanah adat kami, hutan dan laut tempat kami mencari makan dan berlindung dari bencana bencana alam. Kami kehilangan hak kami atas tanah, hutan dan laut. Semulanya kami mengira perusahaan BP. Tangguh LNG member berkatkesahteraan bagi kehidupan kami, ternyata menerima kesengsaraan yang menyebabkan kami matipun tidak dan hidupun segan.		Status tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004, sertifikasinya telah selesai diproses berdasarkan Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013 dengan nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	

	Tanah adat kami seluas 3.466 m3 di beli dengan harga yang tidak layak dan tidak manusiawi. Dan khusus marga Soway, marga Wayuri dan Simuna benar benar kehilangan rumah adat. Kami menilai harga pembelian tanah yang diberikan sebesar Rp. 15.00; (lima belas rupiah) permeter sangatlah tidak manusiawi. Jaman sekarang harga barang tidak ada yan Rp 15.00; gula gula saja tidak ada harga seperti itu atau rokok yang mengancam kematian harga perbatang Rp 1000.00;. dan sangat riskan tanah yang memberi jaminan hidup dan sebagian warisan leluhur dan mempunyai nilai sosio cultur serta merupakan ibu yang menggambarkan jati diri martabat kami sebagai anak anak disepelehkan dengan nilai yang tidak layak. Kami masyarakat adat dari tiga marga yang kami di beli perusahaan menilai bahwa perbedaan persepsi antara pandangan pembuat kebijkan dan peraturan daerah tentang pertanian dan agraria tidak mengakomodir dan tidak memahami komunitas kehidupan masyarakat adat. Menurut pembuat kebijakan bahwa tanah tanah di luar daerah perkotaan dianggap lahan tidur yang tidak produktif dan tidak memberi incam maka dipatok harga serendah itu. Sementara kami masyarakat adat memandang tanah, hutan dan laut itu produktif bagi kami sebagai tempat kehidupna kami. Ganti rugi tanah dan hutan tidak sesuai dengan pihak perusahaan menjanjika kami dengan memberi sebuah tabungan dana sebagai dana abadi marga yang konon diberikan untuk dibiayai kehidupan tiga marga smapai ke anak cucu. Ternyata kami tidak pernah rasakan dana tersebut secara baik. Pegawai BP. Tangguh LNG secara diam diam tanpa meminta pendapat kami dan melibatkan kami untuk dirikan yayasan pengembangan masyarakat Sumuri yang kemudian diganti nama menjadi yayasan dimaga untuk mengelola dana abadi tersebut. Kami berpendapat bahwa yayasan dimaga tidak jujur dan tidak transparan dalam mengelola daa abadi tersebut. Oleh karena itu kami telah mendirikan lembaga kami yang namanya lembaga terare yang artinya (terang) untuk mengelola dana abadi tersebut. Berdasarkan lata belakang emikiran dan masalah tersebut, maka kami masyarakat adat dari tiga marga suku Simuri yakni marga			

	Wayuri, Soway dan Simuna menyatakan sikap sebagai berikut:			
1	Penyusunana perda tentang pertanahan dan agraria harus mempertimbangkan secara layak ketentuan dan cara pandang masyarakat adat terhadap tanah dan hutan adat, sehingga tidak merugikan masyarakat adat.		Tangguh LNG tidak berada dalam kapasitas untuk membuat Perda, termasuk Perda tentang pertanahan dan agrarian. Sebaiknya aspirasi ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang	
2	Mendesak dengan segera kepada pemerintah daerah dan perusahaan BP. Tangguh LNG untuk meninjau kembali akta pembelian tanah adat kami. Membatalkan akta pembelian tersebut dan melakukan pembicaraan ulang dengan menetapkan harga yang layak. dan segera menyelesaikan pembayaranahak ulayat atas kayu kayu yang sekarang menjadi limbah akibat penggusuran lahan.		Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Tangguh LNG telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999 tersebut. Pada saat ini, tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah dengan sertifikat hak pakai.	
3	Kami menolak dengan tegas Yayasan Dimaga untuk tidak mengelola dana abadi marga. Dan pihak perusahaan BP LNG Tangguh untuk segera mecabut dan membatalkan kesepakatan pengelolaan dana abadi tiga marga dan atau dana rekognisi serta dana lainnya yang diberikan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan tiga marga dari yayasan dimaga dan mengatur kesepakatan dengan yayasan Terare untuk mengelola dana dana tersebut. Sebab kami tiga marga telah bersama sama mendirikan Terare.		Salah satu tujuan didirikannya Yayasan Dimaga adalah untuk mengelola dana abadi untuk kepentingan 3 marga (Wayuri, Soway, Simuna). Dana abadi tersebut diberikan dengan tujuan agar ketiga marga mendapatkan sumber dana untuk membantu menunjang kesejahteraannya. Agar manfaat dana abadi tersebut dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama maka pembiayaan atas program sosial untuk tiga marga tersebut diambil dari hasil pengembangan dana abadi tersebut.	
4	Kami mendesak dalam bulan Pebruari ini juga pihak perusahaan BP Tangguh LNG dan Yayasan Dimaga untuk segera melakukan pertemuan dengan lembaga Terare untuk membicarakan penyerahan manajemen dan administrasi dana abadi tersebut. Sebab kami sudah muak dengan Yayasan Dimaga karena selalu mempraktekan kebohongan dan pembodohan.		Tangguh LNG berpendapat pengelolaan Yayasan Dimaga dan pemanfaatan dana abadi telah memenuhi tujuan dari pendirian Yayasan Dimaga tersebut, sehingga Tangguh LNG sebagai pendiri Yayasan Dimaga, dan sebagai pihak yang mengadakan/menciptakan dana abadi, tidak melihat perlunya dilakukan perubahan pengelolaan dana abadi.	
5	Kami mendesak kepada pihak perusahaan British Petroleum danTangguh LNG agar tidak merusak tempat tempat keramat yang kami hargai dan memiliki nilai kultur dan filosofi kehidupan		Tangguh LNG berkomitmen untuk tidak merusak tempat-tempat keramat sebagaimana yang dilaksanakan hingga saat ini. Lokasi benda keramat yang ada di dalam areal	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial

	kami dan segera memberikan dana rehabilitasi tempat tempat keramat tersebut. Demikian pernyataan sikap kami, dan mendesak agar segera ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa bila pernyataan ini tidak ditanggapi maka kami akan melakukan aksi yang berskala besar.		Tangguh LNG site ini dan areal yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas pengembangan Tangguh sudah diindetifikasi dan dimasukkan dalam peta rencana “Master Plot Plan” Tangguh LNG (lihat Gambar I-30 Master Plot Plan Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada Bab 1 ANDAL). Rencana pengelolaan benda keramat telah dimasukkan dalam RKL, termasuk Tangguh LNG menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi situs dan tempat keramat yang berada di wilayah kilang Tangguh LNG.	Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

Surat Pernyataan sikap Marga Besar Simuna, Marga Besar Soway dan Marga Besar Wayuri di Saengga, tanah Merah, Tofoi, Onar, Bintuni, Sorong, manokwari, jayapura, Timika,Kokonao, Tanah papua. **Masyarakat Adat Suku Sumuri petuanan tanah Adat lokasi Tangguh LNG Tanah Papua di wilayah Distrik Sumuri – Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.**				
I.	Dengan menindaklanjuti Keputusan Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang:		Jawaban untuk butir I. sampai butir V.: Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Pemerintah telah menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah atas lahan yang dipergunakan untuk Kilang Tangguh LNG Fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini termasuk Kilang LNG 3 dan 4 akan dibangun pada area hutan yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004 serta Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013. Tidak ada rencana penambahan lokasi/pembukaan lahan di luar area pagar Tangguh LNG saat ini.	
1.	Pengembalian hak hutan adat serta membatasi kewenangan negara dalam hutan adat.			
2.	Dalam putusan MK tersebut hutan adat dikeluarkan dari hutan negara baik yang berstatus taman nasional, cagar alam,hutan lindung, taman buru, taman wisataalam, hutan produksi dan hutan produksi terbatas			
3.	Dalam putusan MK tersebut membatalkan sejumlah kata, fasa dan ayat dalam UU Kehutanan misalnya menghapus kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga pasal 1 angka 6 UU Kehutanan Menjadi” hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayaj masyarakat hukum adat.			
4.	Sesuai Putusan MK tanggal 16 mei 2013 menyetujui sebagian uji materi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam keputusannya MK menetapkan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dalam keputusannya MK menetapkan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UU 1945 secara bersyarat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali di maknai bahwa Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2, tidak termasuk hutan adat.			
5.	Keputusan MK tersebut telah memutuskan bahwa hutan Adat bukan lagi hutan Negara. Sehingga Pemerintah harus segera melakukan penyelesasian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam diwilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat.			
II.	Menindaklanjuti MOU (Minutes of Agreement) Saengga tanggal 8 Maret 2005 point 4 tentang: a) Pengembaliam tanah adat yang mengacu pada Surat Bupati Manokwari No.591/1183 tanggal 2 Juli 2002 yang ditujukan kepada suku Sumuri yang menyatakan tentang status tanah yang digunakan untuk Proyek LNG Tangguh (Surat Bupati),			

<table>
<tr><td></td><td>surt tersebut menegaskan bahwa Pemerintah akan mengembalikan kepemilikan atas tanah kepada masyarakat adat marga, Soway, Marga Simuna dan Marga Wayuri.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>III.</td><td>Menimbang dan menindaklanjuti keterkaitan Point I dan Point II diatas maka kami selaku Pemilik Lokasi Tangguh LNG, akan melakukan peninjauan kembali kasus pembayaran Tanah Adat yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1999 sebagai berikut:
a) Meninjau kembali aturan Perda Kabupaten manokwari tahun 1995
b) Mengklarifikasi nilai pembayaran tanah adat senilai Rp 15/m2
c) Keterangan luas lokasi tanah adat masing-masing tiga marga (Simuna, Soway, Wayuri) serta nilai pembayaran tanah adat pada tahun 1999 .
C1. Daftar Luas Tanah Adat dan Harga Pembayaran pada tahun 1999
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Marga</th><th>Luas Tanah Adat</th><th>Nilai Pembayaran</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Marga Wayuri</td><td>1866 Hektar</td><td>Rp. 15/m2 (rp 150.000 x 1866 ha total pembayaran Rp. 279.900.000)</td><td>Untuk pembangunan Project Tangguh</td></tr>
<tr><td>2. 1.</td><td>Marga Soway</td><td>850 Hektar</td><td>Rp. 15/m2 (rp 150.000 x 850 ha total pembayaran Rp. 127.000.000)</td><td>Untuk pembangunan Project Tangguh</td></tr>
<tr><td>2. 2.</td><td>Marga Soway</td><td>50 Hektar</td><td>Diambil secara HIBA/tanpa bayar oleh pihak Pemerintah</td><td>Untuk pembangunan project Tangguh tanpa ada</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>Jawaban untuk butir I. sampai butir V.:
Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Pemerintah telah menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah atas lahan yang dipergunakan untuk Kilang Tangguh LNG

Fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini termasuk Kilang LNG 3 dan 4 akan dibangun pada area hutan yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004 serta Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013. Tidak ada rencana penambahan lokasi/pembukaan lahan di luar area pagar Tangguh LNG saat ini.</td><td></td></tr>
</table>

				(Pertamina) dan pihak PT. ARCO untuk pembangunan project Tangguh LNG	alasan yang jelas kepada marga besar Soway		
		3.	Marga Simuna	500 Hektar	Rp. 15/m2 (rp 150.000 x 500 ha total pembayaran Rp. 75.000.000)	Untuk pembangunan Project Tangguh	
		Total : Tanah adat Tiga marga yang digunakan untuk kepentingan Project Tangguh : 3266 Hektar					
	C2. Keterangan Pembayaran Tanah Adat milik Marga Simuna untuk pemukiman masyarakat Kampung Tanah Merah Baru dan Kampung Saengga oleh Pertamina – PT. Arco pada tahun 1999					Jawaban untuk butir I. sampai butir V.: Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Pemerintah telah menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah atas lahan yang dipergunakan untuk Kilang Tangguh LNG Fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini termasuk Kilang LNG 3 dan 4 akan dibangun pada area hutan yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004 serta Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013. Tidak ada rencana penambahan lokasi/pembukaan lahan di luar area pagar Tangguh LNG saat ini.	
		No	**Nama Marga**	**Luas Tanah Adat**	**Nilai Pembayaran**	**Keterangan**	
		1.	Marga Simuna	200 Hektar	Rp. 15/m2 (rp 150.000 x 200 ha total pembayaran Rp. 30.000.000)	Untuk pemukiman Kampung Tanah Merah dan Kampung Saengga	
		Total Tanah adat diluar Project Tangguh 200 Hektar					
	C3. Total Tanah ADat Keseluruhan yang dibayar oleh Pertamina dan PT. Arco pada tahun 1999.					Jawaban untuk butir I. sampai butir V.: Kesepakatan tentang seluruh ketentuan dan syarat pelepasan tanah yang saat ini dipergunakan sebagai area	

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Marga</th><th>Luas Tanah Adat</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Marga Wayuri</td><td>1866 Hektar</td></tr>
<tr><td></td><td>Marga Soway</td><td>850 Hektar</td></tr>
<tr><td></td><td>Marga Soway</td><td>50 Hektar (bermasalah)</td></tr>
<tr><td></td><td>Marga Simuna</td><td>700 Hektar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Total Keseluruhan</td><td>3466 Hektar</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>Kilang LNG Tangguh telah terjadi antara Tangguh LNG dan masyarakat yang disaksikan oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Tanah tahun 1999. Pemerintah telah menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah atas lahan yang dipergunakan untuk Kilang Tangguh LNG

Fasilitas yang akan dibangun sebagai bagian dari rencana pengembangan Proyek LNG Tangguh yang termasuk dalam lingkup studi AMDAL ini termasuk Kilang LNG 3 dan 4 akan dibangun pada area hutan yang telah dibebaskan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan no 287/II MENHUT/2004 serta Sertipikat Hak Pakai no 00041 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013. Tidak ada rencana penambahan lokasi/pembukaan lahan di luar area pagar Tangguh LNG saat ini.</td><td></td></tr>
<tr><td>V.</td><td>Sesuai dengan keputusan MK dan penjelasan kejadian2 tersebut diatas, maka kami selaku pemilik Hak Adat menyatakan sikap, agar pihak BP Indonesia dan Pemerintah seharusnya sepenuhnya bertanggung jawab. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa lokasi Tangguh LNG Papua , TIDAK DIADAKAN PERLUASAN LOKASI DAN PENEBANGAN HUTAN ADAT DIATAS WILAYAH ADAT KAMI SELAMA PROSES BERJALAN.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Aspirasi Kampung Tofoi, Onar Lama, Agoda, Materabu Jaya, Onar Baru, dan Saengga</td></tr>
<tr><td></td><td>Masyarakat Kampung Tofoi, Distrik Sumuri:
1. Pembangunan sekolah bertaraf nasional lengkap dengan fasilitas pendukung <smp-sma/smk>
2. Penambahan ruang kelas SD YPPK Tofoi
3. Pendataan kembali dan memberikan beasiswa melalui pihak sekolah
4. Beasiswa diberikan kepada kepada anak dari PAUD – Perguruan Tinggi
5. Insentif guru dan komite dari PAUD – SMA</td><td></td><td>Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut.
Dukungan Tangguh LNG terhadap infrastruktur pendidikan telah tertuang dalam dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Pendidikan, Sub bab Peningkatan Kualitas Sekolah.</td><td>Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Pembangunan gedung balai latihan kerja lengkap dengan fasilitas pendukung</td><td></td><td>Tangguh LNG juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas untuk Pusat Penilaian dan Pengembangan Keahlian Teknikal Dasar, serta membantu peningkatan fasilitas</td><td>Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial</td></tr>
</table>

			Sekolah Politeknik di Fakfak, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat atau pihak-pihak lainnya. Diharapkan keberadaan sekolah politeknik di Fakfak tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG, termasuk Tofoi.	Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	7. Insentif untuk aparat kampung		Jawaban untuk angka 7, 13: Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	
	8. Penambahan rumah medis 9. Pengadaan peralatan medis 10. Pengadaan perlengkapan lab RS 11. Penambahan Posyandu 12. Pengembangan SDM tenaga medis		Tangguh LNG telah membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Tangguh LNG juga telah membantu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Ke depan, Tangguh LNG akan tetap mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk di Kampung Tofoi, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah sekitar Tangguh LNG. Rincian tentang komitmen Tangguh LNG dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat telah dituangkan dalam Dokumen AMDAL, Pengelolaan Sosial Tangguh, Bab Kesehatan, Sub-bab Pengembangan Sarana dan Prasarana.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)
	12. Pengadaan air bersih		Tangguh LNG mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di wilayah sekitar operatasi Tangguh LNG. Tangguh LNG, bekerjasama dengan masyarakat, telah melakukan pabrikasi tangki-tangki penampungan air hujan kolektif, dan telah dipasang di masing-masing RT di Kampung Tofoi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kesehatan Masyarakat (hal 6-

				12)
	13. Insentif para medis/ kader kader		Lihat jawaban pada angka 7.	
	14. Penambahan kapasitas guru dengan study banding 15. Pembangunan rumah guru		Tangguh LNG telah membantu penataan infrastruktur pendidikan, termasuk perumahan guru di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk menata infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA, termasuk perumahan guru, yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)
	16. Pembangunan pelabuhan tofoi permanen 17. Pengaspalan jalan secara menyeluruh 18. Jalan penghubung antar kamp di distrik sumuri		Jawaban angka 16, 17, 18, dan 30: Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Kampung Tofoi, termasuk pembangunan jetty, rumah radio, dan infrastruktur lainnya. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jalan (serta pengaspalannya), rumah radio, dan jetty, namun demikian, karena keterbatasan yang kami miliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Akan tetapi Tangguh LNG telah mempersiapkan beberapa program pengelolaan sosial sesuai dengan RKL/RPL Pengelolaan Sosial Tangguh AMDAL Pengembangan Tangguh LNG. Mengingat, seperti diketahui, di wilayah Kampung Tofoi terdapat perusahaan migas lain. Sebaiknya aspirasi ini juga disampaikan kepada perusahaan tersebut.	
	19. Pengembangan SDM tenaga pertanian (petani) dan perikanan		Sejak tahun 2006 Tangguh LNG telah memberikan program peningkatan pendapatan masyarakat yang difokuskan pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan, seperti pengadaan tenaga pendamping pertanian dan perikanan, pelatihan dan magang di bidang pertanian dan perikanan, serta program pengembangan pertanian dan perikanan lainnya. Di masa yang akan datang, pelaksanaan program	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

			tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
	20. Penambahan dana keagamaan 21. Insentif untuk rohaniwan		Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan terhadap penambahan dana kegiatan keagamaan dan insentif untuk rohaniawan. Namun demikian, ke depan, Tangguh LNG akan berkontribusi sehubungan dengan aspirasi ini, untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	
	22. Pembangunan rumah adat lengkap dengan faslitas pendukung 23. Insentif untuk pengurus rumah adat		Tangguh LNG menghormati norma, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen akan membangun rumah adat bagi masing-masing suku yang terdiri dari Suku Sebyar, Suku Irarutu, Suku Simuri, Petuanan Arguni, Petuanan SekarPikpik, dan Petuanan Wertuwar.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	24. Pembangunan rumah rakyat layak huni contoh di TMB		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk meningkatkan standar kehidupannya, termasuk dalam bidang perumahan. Namun demikian, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Tangguh LNG, kami tidak bisa memenuhi aspirasi tersebut.	
	25. BP harus memprioritaskan anak lokal dalam perekrutan tenaga kerja 26. Memberikan training kepada anak anak lokal yang bekerja di LNG		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG, dengan urutan prioritas: - Kampung-kampung sekitar Tangguh LNG, - Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, - Papua Barat lainnya, - Papua lainnya - Nasional (Luar Papua)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)

			Tangguh LNG dan kontraktornya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pekerja yang bekerja di Tangguh LNG melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya.	
	27. Pembangunan laundry lengkap dan dengan fasilitas pendukung		Ke depan, Tangguh LNG akan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Jenis usaha akan ditentukan berdasarkan pada hasil kajian kelayakan usaha yang dilakukan sebelumnya, termasuk usaha laundry bila hasil kajian usaha menyatakan bahwa usaha laundry layak untuk dilakukan. Komitmen tentang pengembangan usaha bagi Masyarakat Asli tertuang dalam dokumen RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewirausahaan Papua (hal 34-36)
	28. Pembangunan sanggar ibu ibu dengan fasilitas pendukung 29. Memberikan modal untuk pengusaha lokal dan usaha kecil		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, termasuk di bidang pengembangan usaha masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), dan pengembangan lembaga keuangan yang mampu mendukung ketersediaan modal usaha. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
	30. Pembangunan terminal pelabuhan		Lihat jawaban pada angka 16.	
	31. Samakan gaji karyawan lokal dengan tenaga kerja dari luar kamp DAVs (*Directly Affected Villages)*		Sebagai perusahaan pemberi kerja yang beroperasi di Indonesia, Tangguh LNG dan kontraktornya harus mentaati ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sistem pengupahan tidak boleh bersifat diskriminatif (ras, agama, suku, jenis kelamin, dan golongan).	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Papua dan

			Terjadinya perbedaan kompensasi dan benefit terjadi semata-mata disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kompetensi, keahlian, pengalaman, masa kerja, serta posisi dan tanggung jawab pekerja.	Hubungan Industrial (hal 18-29)
	32. Pembangunan 1 unit rumah radio komunitas sumuri dengan fasilitas pendukung lengkap		Lihat jawaban pada angka 16.	
	33. Pemberian insentif untuk badan pengurus rakom		Tangguh LNG tunduk kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan gaji kepada orang yang bukan pegawai Tangguh LNG.	
	Masyarakat Kampung Onar Lama, Distrik Sumuri: I. Akses Masyarakt terhadap Alam: 1. BP Tangguh harus menjaga kelestarian sumberdaya yang meliputi: a. Laut dan sumber dayanya b. Sungai dan sumber dayanya c. Hasil hutan (sagu, kayu, tanaman dan obat obatan d. Kesuburan tanah e. Sumber daya air dan udara 2. BP Tangguh harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh kehidupan dari laut, sungai, dan darat. Seperti kondisi yang sekarang kami miliki 3. BP Tangguh mengakui dan membayar dan membayar hak ulayat sepanjang 40 mil dari pasang surut terendah		I.1. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku. I.2. Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL.	

			Tangguh LNG memahami bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai sehubungan dengan proyek Tangguh LNG dapat memberikan gangguan kepada wilayah perikanan masyarakat. Dalam hal terbukti bahwa keberadaan fasilitas lepas pantai telah menimbulkan berkurangnya pendapatan masyarakat dari sektor penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, Tangguh LNG telah mempersiapkan program sosial kepada para nelayan setempat yang terganggu pendapatannya akibat keberadaan proyek Tangguh LNG. I.3. Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi Adat. Aspirasi tersebut seharusnya disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas sumber daya alam migas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam migas tersebut.	
	II. Pengembangan Masyarakat: 1. Ekonomi: a. BP Tangguh menyediakan modal usaha untuk usaha usaha masyarakat asli b. Bp Tangguh menyediakan pelatihan wirausaha kepada masyarakat lokal c. Menyediakan akses pasar terhadap hasil produk masyarakat asli d. Memberikan dana (modal kepada koperasi e. Memberikan pembinaan kepada ketua koperasi dan tata kelola koperasi f. Pelatihan peternakan, perikanan dan		Tangguh LNG akan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat, lewat program mpeningkatan pendapatan dan kewirausahaan bagi masyarakat asli. Di bidang perikanan, Tangguh LNG akan berkontribusi pada pengadaan peralatan nelayan dalam program peningkatan pendapatan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan. Program peningkatan pendapatan ini antara lain akan diwujudkan dengan menyediakan sarana tangkapan ikan yang lebih baik (seperti jaring, coolbox, dll); serta pelatihan dan bimbingan dalam mekanisme pengelolaan pasca panen. Untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, Tangguh LNG akan mengembangkan lembaga koperasi di	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh

	pertanian g. Penyediaan akses keuangan untuk usaha masyarakat h. Penyerapan dan pemasaran produk lokal i. Pengembangan bisnis menengah masyarakat asli j. Memberikan jaminan hidup kepada masyarakat asli k. Memberikan honor kepada tokoh tokoh agama l. Pelatihan mesin tempel m. Dana caps disesuaikan dengan kampung yang lain n. BP Tangguh membayar ganti rugi rumah masyarakat dan tanaman masyarakat kalau di pindahkan o. BP Tangguh membangun perumahan permanen untuk kepala keluarga yang kena dmapak p. Memberikan kesempatan kerja kepada anak anak sekolah yang kejuruan: SMA, SMK, SMPN yang pernah dibiayai oleh BP Tangguh q. Memberikan prioritas pekerjaan kepada masyarakat asli r. BP Tangguh harus memberikan 2% - 5% bagi hasil LNG kepada masyarakat DAVs (*Directly Affected Village)* s. Memberikan alat tangkap, jinjing udang, jaring ikan t. Memberikan mesin parut sagu kepada masyarkat		kampung-kampung di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan beberapa lembaga ekonomi, termasuk koperasi, untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, KSP. UBSP Amoki Sairara di Kampung Onar Lama. Tangguh LNG juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu secara konsisten dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemampuan untuk bersaing di pasar yang luas. Bekerjasama dengan Pemerintah, Tangguh LNG akan menyediakan pasar bagi produk lokal hasil produksi masyarakat yang akan dibuka secara bertahap, mulai dari pembelian produk lokal untuk memenuhi kebutuhan kilang Tangguh LNG, hingga mendukung pembukaan jaringan pasar yang lebih luas (antar kampung hingga antar Kabupaten). Ke depan, program Tangguh LNG tidak akan lagi fokus kepada *Directly Affected Village*, tapi lebih berfokus pada Masyarakat Asli, sehingga manfaat Tangguh LNG akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Asli. Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.	

	III. Pendidikan: a. BP Tangguh memberikan beasiswa kepada anak anak sekolah SD, SMP, SMK, SMA dan perguruan tinggi b. Membangun fasilitas pendidikan dan menyediakan biaya perawatan c. Membangun satu gedung taman kanak kanak d. Menyediakan alat alat peragaan taman kanak kanak e. Membangun rumah rumah guru f. Insentif guru guru honor		Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni dan Fakfak; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas. Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)
	IV. Tokoh Adat: a. BP Tangguh membuat satu rumah adat, sanggar seni budaya b. Perlindungan tempat tempat keramat c. Kelestarian hutan diatas tanah adat d. Ganti rugi tempat kramat, kalau dipindahkan e. Pengadaan pakaian adat f. Menyedian alat alat budaya, gong, tifa, pakaian adat g. Pendampingan seni budaya h. Menghrmati dan melestarikan tempat kramat		Tangguh LNG menghormati norma, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen akan membangun rumah adat bagi masing-masing suku yang terdiri dari Suku Sebyar, Suku Irarutu, Suku Simuri, Petuanan Arguni, Petuanan SekarPikpik, dan Petuanan Wertuwar. Secara detail, dukungan Tangguh LNG terhadap adat telah dituangkan dalam RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)

	i. Melestarikan upacara adat, rumah adat, benda benda keramat j. Membuat jalur khusus, agar tidak mengganggu rumah rumah keramat			
	V. Tokoh Pemuda: a. BP Tangguh menyediakan lapangan bola kaki, lapangan volly, basket, bulu tangkis, dan lapangan putsal dan takro b. Mengadakan sarana, bola kaku, volly dan basket c. Pengadaan mesin babat rumput d. Pengadaan kostum olahraga e. Temaga pelatihan f. Alat alat musik, gitar, tipa, gong, pakaian adat g. Satu buah fasilitas kendaraan laut mesin tempel 40 pk h. Meningkatkan kwalitas jaringan internet komunikasi		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	VI. Tokoh perempuan a. Pelatihan jahit menjahit b. Pelatihan membuat kue c. Menyediakan biaya (dana) untuk buka usaha d. Memberikan modal kepada kelompok usaha e. Pengadaan pendampingan kelanjutan dari SKK Miigas selama masa operasi di wilayah kabupaten Teluk Bintuni kehusus di Sumuri f. Bp Tangguh menyediakan dana sport kepada ibu ibu / kelompok pertanian onal lama g. Pelatihan peternakan , perikanan		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
	VII. Kesehatan a. Menyeduakan gedung posyandu, satu gedung pustu b. Menyediakan tanaga medis, baik perawat, maupun dokter c. Meyediakan dana untuk jaminan / asuransi kesehatan d. Menyediakan rumah rumah dinas kesehatan e. Memberikan makanan tambahan kepada bayi f. Pelatihan ibu ibu kader		Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di kampung-kampung sekitar wilayah operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (hal 6-12)

	g. Insenstif kader posyandu h. Menyediakan obat obat			
	VIII. Failitas Umum a. BP Tangguh membuat satu gedung kanto kampung dan balai kampung, sanggar PKK b. Satu buah jembatan, Jetty kampung c. Pengaspalan jalan raya depan parit d. Membangun satu gedung gereja katolik dan masjid e. Menyediakan rumah pastor dan imam f. Menyediakan air bersih (sumur bor) g. Menyediakan MCK di setiap rumah h. Menyediakan listrik gratis, selama BP beroperasi		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung termasuk juga di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Sumuri, termasuk Kampung Onar Baru dan Onar Lama akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48) Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Hubungan Eksternal (hal 49-50)
	IX. Transportasi a. BP tangguh memberikan johnson 15 PK tiap KK Satu buah perahu fiber (long boat fiber) setiap kepala keluarga		Tangguh LNG telah mengadakan bantuan perahu dan motor tempel untuk mendukung pengembangan usaha melalui kelompok-kelompok usaha. Tangguh LNG tidak akan mengadakan bantuan perahu fiber dan motor tempel untuk kepentingan perseorangan. Ke depan, bantuan pengadaan perahu, motor tempel, dan peralatan nelayan akan diberikan untuk mendukung pengembangan usaha bagi kelompok usaha masyarakat.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewiraushaan Papua (hal 34-36)
	Masyarakat Kampung Agoda, Distrik Sumuri: 1. Bapak bapak yang mulia, inilah keluham dari kami rakyat, kapan bapak bantu kami 2. Tiga kampung ini kapan masuk kedalam program atau masuk dalam SKA Amdal. Ialah: kampung Agoda, kampung M.Jaya, kampung Forwata 3. Kami ucapkan kepada bapak bupati yang belum dapat SKA dari BP Tangguh ada tiga kampung, ialah: kampung Agoda, kampung M. Jaya, kampung Forwata		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Agoda tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh - Pendahuluan Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas

	4. Jalur penghubung antar kampung ke kampung 5. Alokasi dana penidikan harus bagus buat kami rakyat kecil, sebab selama amdal pertama sering tidak jelas 6. Tren 3- 4 kalau jadi lupa nasibnya kami masyarakat suku sumuri dengan suku sebyar 7. Kami belum merasakan amdal pertama dari Bp Tangguh. Selama BP Tangguh beraktifitas disini, kami warga masyarakat kampung Agoda sebagai penonton		2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Agoda tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)
	Masyarakat Kampung Materabu Jaya, Distrik Sumuri: 1. Masukan kampung materabu jaya ke dokumen Amdal 2. Bantuan pendidikan 3. Bantuan tempat ibadah (masjid gereja) 4. Pembuaatan kantor kampung 5. Mendapat dana pengembangan kampung 6. Pembangunan infrastruktur 7. Pengembangan ekonomi kerakyatan 8. Air bersih (sumur bor) 9. Pembinaan dan pelatihan keterampilan perempuan		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Materabu Jaya tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Materabu Jaya tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh - Pendahuluan Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial
	Masyarakat Kampung Onar Baru, Distrik Sumuri: I. Masalah Pembangunan / Infrastruktur 1. Jetty tambahan perahu masyarakat nelayan 2. Dermaga umum 3. Pasar kampung 4. Pembangunan talut pantai, depan kampung 5. Jembatan penghubung kampung lama / baru, permanen 6. Bantuan rumah KK baru / keluarga dampak 7. Bantuan gedung kesenian masyarakat 8. Pengerasan jalan kampung 9. Irigasi got / parit 10. Tower jaringan komunikasi		Partisipasi Tangguh LNG dalam pembangunan infrastruktur kampung termasuk juga di beberapa kampung tertentu yang berada di pesisir Distrik Sumuri, termasuk Kampung Onar Baru dan Onar Lama akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan. Pembahasan atas prioritas serta pelaksanaan program akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	II. Tokoh Masyarakat Adat 1. Dana bagi hasil 2. Tenaga kerja lokal, jaminan BP Tangguh samapai		Masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial

	selesai 3. Pendidikan lokal, jaminan BP Tangguh samapai selesai 4. Kesehatan lokal, jaminan BP Tangguh samapai selesai 5. Bangunan rumah adat 6. Pemagaran tempat keramat 7. Jaringan penerang / listrik gratis (lokal) 8. Sertifikasi rumah yang sudah direlokasi / perencanaan baru		memberikan tanggapan atas masalah Dana Bagi Hasil ini. Namun demikian, Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Dana Bagi Hasil. Demikian pula halnya bahwa Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat sehubungan dengan Dana Bagi Hasil ini. Sepanjang pengetahuan kami, hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Khusus untuk kesempatan kerja, Tangguh LNG berkomitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Secara detail, komitmen Tangguh LNG dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pengelolaan tempat keramat tertuang dalam dokumen RKL/RPL-Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL. Tangguh LNG menghormati norma, adat budaya, dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG. Oleh karena itu, Tangguh LNG berkomitmen akan membangun rumah adat bagi masing-masing suku yang terdiri dari Suku Sebyar, Suku Irarutu, Suku Simuri, Petuanan Arguni, Petuanan SekarPikpik, dan Petuanan Wertuwar. Secara detail, dukungan Tangguh LNG terhadap adat telah dituangkan dalam RKL/RPL – Pengelolaan Sosial Tangguh. Tangguh LNG mendukung upaya untuk meningkatkan penyediaan listrik di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya.	Tangguh

			Bahkan sejak February 2014, Tangguh LNG telah memasok listrik sebesar 4 Megawatt kepada PLN untuk selanjutnya listrik tersebut akan didistribusikan oleh PLN kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Saat ini status tanah di Kampung Onar Baru adalah sebagai hutan produksi. Apabila Pemerintah memutuskan untuk mengalihfungsikan dari hutan produksi ke status hutan untuk peruntukkan lain, atau untuk pemukiman, maka Tangguh LNG akan membantu melakukan sertifikasi terhadap bidang tanah yang saat ini dimiliki oleh masyarakat di Onar Baru.	
	III. Tokoh kepemudaan 1. Tenaga kerja 2. Pembekalan pendidikan skill / kelembagaan 3. Bangunan sanggar, kesenian pemuda 4. Keolahragaan pemuda 5. Lapangan bola volle permanen 6. Lapangan badminton permanen 7. Lapangan basket ball 8. Pendidikan 9. Kesehatan		Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG. Dalam hal dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga, antara lain meliputi bantuan peralatan olah raga, sarana, dan prasarana olah raga. Ke depan, Tangguh LNG berkomitmen untuk tetap mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RKL / RPL, Lampiran 3 - Pengelolaan Sosial Tangguh. Dalam hal kesehatan masyarakat, Tangguh LNG memahami bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu masalah penting di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayaranan kesehatan Tangguh LNG berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan fasillitas pelayanan kesehatan di kampung-kampung yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh

			Dalam hal dukungan terhadap pendidikan masyarakat, Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi yang terpilih yang berasal dari Masyarakat Asli di tingkat SMA yang berada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG akan menyediakan bantuan dana pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari masyarakat asli terpilih yang berasal dari wilayah sekitar operasi Tangguh LNG; wilayah Teluk Bintuni; serta daerah Papua lainnya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, termasuk satu sekolah unggulan terpadu di Distrik Kokas. Secara detail, komitmen Tangguh LNG dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pengelolaan tempat keramat tertuang dalam dokumen RKL/RPL-Lampiran 3, Pengelolaan Sosial Tangguh, AMDAL.	
	IV. Pemberdayaan perempuan 1. Tenaga kerja perempuan 2. Pembinaan bidang perempuan drop out sekolah 3. Memberikan jaminan bagi perempuan diatas usia 55 tahun 4. Pembinaan bidang keterampilan tangan bagi usia senja 5. Memberikan pendidikan khusus bagi perempuan yang sdm rendah 6. Pembekalan peran perempuan 7. Pembangunan sanggar pkk		Tangguh LNG telah berkontribusi dalam program penguatan perempuan (gender) melalui pengembangan usaha simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pelatihan menjahit, memasak, dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). Ke depan, Tangguh LNG akan mendukung Pemerintah Daerah untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Tangguh LNG mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian rumah tangga melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk. Sehubungan dengan kesempatan kerja bagi perempuan, Tangguh LNG mempunyai komitmen untuk mengutamakan Masyarakat Asli, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Tangguh LNG serta berkelakuan baik untuk mendapatkan kesempatan kerja	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)

			yang ada sehubungan dengan pengembangan proyek Tangguh LNG.	
	Masyarakat Kampung Saengga: 1. Jaminana kehidupan masyarakat kampung saengga		Tangguh LNG dapat memahami aspirasi masyarakat ini. Oleh karena itu, Tangguh LNG telah mempersiapkan program peningkatan pendapatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga Masyarakat Asli untuk menciptakan sumber penghasilan yang beragam, berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung terjadinya peningkatan nilai tambah atas mata pencaharian industri rumah tangga yang sudah ada melalui peningkatan proses produksi dan pengembangan produk, serta terjadinya diversifikasi mata pencaharian bagi Masyarakat Asli yang tinggal di kampung-kampung Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Peningkatan Pendapatan (hal 29-34)
	2. Perlindungan tempat tempat keramat		Tangguh LNG berkomitmen untuk tidak merusak tempat-tempat keramat sebagaimana yang dilaksanakan hingga saat ini. Lokasi benda keramat yang ada di dalam areal Tangguh LNG site ini dan areal yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas pengembangan Tangguh sudah diindetifikasi dan dimasukkan dalam peta rencana “Master Plot Plan” Tangguh LNG (lihat Gambar I-30 Master Plot Plan Proyek Pengembangan Tangguh LNG pada Bab 1 ANDAL). Rencana pengelolaan benda keramat telah dimasukkan dalam RKL, termasuk Tangguh LNG menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi situs dan tempat keramat yang berada di wilayah kilang Tangguh LNG.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemrintahan Yang Baik (hal 37-48)
	3. Perlindungan hak hak komunitas laut darat dan hutan adat		Potensi dampak dari kegiatan eksplotasi dan eksplorasi sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG sudah dikaji dalam dokumen ANDAL Bab 3. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sudah diuraikan dalam RKL/RPL. Pelaksanaan komitmen AMDAL diawasi oleh KLH dan Pemerintah Daerah serta pihak lain serta dilaporkan kepada	Bab 3 ANDAL Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting Matrik Pengelolaan dan Pemantaun Linkungan pada

			KLH dan instansi terkait lainnya termasuk, Bapedalda Provinsi Papua Barat, BLH Teluk Bintuni dan KLH Fakfak. Semua laporan pelaksanaan komitmen AMDAL Tangguh LNG saat ini diterima dengan baik yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi semua komitmennya. Sebagai informasi, pada tahun 2012 dan 2013 Tangguh LNG mendapatkan peringkat PROPER Biru yang menunjukan bahwa Tangguh LNG telah memenuhi AMDAL dan peraturan lingkungan yang berlaku.	dokumen RKL-RPL
	4. Pembagian HGB kepada komunitas masyarakat adat		Tangguh LNG memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Namun demikian, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki, Tangguh LNG tidak dapat memenuhi aspirasi ini.	
	5. Setiap KK mendapat kesempatan kerja sebagai permanen dalam LNG Tangguh. Kontruksi sampai produksi sesuai dengan skill masing masing		Kesempatan kerja yang ada sehubungan dengan Tangguh LNG tidak semuanya bersifat permanen. Dengan demikian, maka dalam proses penerimaan tenaga kerja, masa kerja pekerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Tangguh LNG. Dalam hal masa kerja pekerja sudah berakhir, Tangguh LNG akan mengembalikan pekerja ke tempat yang diakui sebagai tempat penerimaan (*point of hire*).	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	6. Fasilitas penunjang pendidikan antara lain: asrama, dengan fasilitas pendukung		Tangguh LNG telah membantu pembangunan gedung kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan perumahan guru di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Untuk selanjutnya, Tangguh LNG akan meneruskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah ada di wilayah sekitar operasi Tangguh LNG. Tangguh LNG juga akan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah-sekolah unggulan terpadu, dari SD, SMP, dan SMA di 5 distrik yang berada di wilayah di Pantai Utara, Pantai Selatan Teluk Bintuni, dan Kokas. Di tingkat	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pendidikan (hal 13-18)

			Perguruan Tinggi, Tangguh LNG akan menyediakan dukungan terhadap beberapa perguruan tinggi di Papua seperti UNIPA, UNCEN, dan USTJ, agar dapat meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut.	
	7. Keterlibatan pengusaha lokal di dalam proyek kecil 3 – 4 (BUMK)		Tangguh LNG akan mengupayakan bahwa Masyarakat Asli yang tinggal di Wilayah Sekitar Operasi Tangguh LNG dapat menerima manfaat ekonomi dari keberadaan Tangguh LNG dan mengembangkan industri jasa dan pelayanan dengan skala besar. Salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut, Tangguh LNG berencana mengembangkan program Kewirausahaan Papua (Inkubasi Bisnis). Program ini juga dimaksudkan sebagai inisiatif peningkatan angka kandungan lokal (*local content*) dari keseluruhan aktivitas Tangguh LNG dari masa konstruksi sampai dengan masa operasi.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Kewirausahaan Papua (hal 34-36)
	8. Jembatan penghubung Saengga dan tanah Merah		Tangguh LNG telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tertentu di wilayah Kampung Saengga, dan Tanah Merah misalnya pembangunan jetty, rumah koperasi, sarana air bersih, balai kampung, dan infrastruktur lainnya. Kami memahami aspirasi masyarakat atas pembangunan jembatan penghubung antara Kampung Saengga dan Kampung Tanah Merah. Akan tetapi Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembangunan jembatan penghubung tersebut melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	9. Biaya perawatan aset kampung yang di bangun oleh BP Tangguh		Tangguh LNG memahami bahwa kebutuhan perawatan aset kampung merupakan hal yang penting. Namun mengingat aset tersebut telah diserah-terimakan dan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial

			menjadi aset milik Pemerintah Daerah maka perawatan aset kampung menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, Tangguh LNG akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan	Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48)
	10. Pekerja lokal tidak boleh di PHK tetapi di beri pembinaan khusus di BP dan pemerntah kampung		Sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan PHK merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran. Dalam hal pelanggaran pekerja termasuk ke dalam kategori pelanggaran ringan, terhadap pekerja terlebih dahulu akan diberikan surat peringatan serta dilakukan pembinaan. Namun demikian, apabila setelah diberikan kesempatan dan pembinaan pekeja tidak berhasil memperbaiki diri, atau kembali melakukan pelanggaran yang serupa atau lebih berat, maka perusahaan punya hak untuk melakukan PHK. Apabila dalam hal perusahaan melakukan PHK terhadap pekerjanya, maka hal tersebut dilakukan setelah perusahaan melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja tersebut, namun pekerja tidak berhasil memperbaiki kesalahannya atau kembali melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan PHK tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan atau pembinaan apabila pekerja melakukan pelanggaran berat, termasuk melakukan tindak pidana.	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Pengembangan Sumber Daya Papua dan Hubungan Industrial (hal 18-29)
	11. Retribusi kampung		Sebagai kontraktor kontrak kerja sama dengan Pemerintah Indonesia Tangguh LNG harus mentaati ketentuan kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Tangguh LNG tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan atas setiap hal yang tidak diatur di dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tangguh LNG tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran retribusi kampung.	

	DAVs (Directly Affected Villages) **Simuna, Kepala Kampung, Kampung Forada**			
1.	Mohon agar kampung Forada masuk dalam daerah DAVs (*Directly Affected Village)* mengingat jarak antara LNG Tangguh dan kampung Forada ±7 km.		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Forada tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Forada tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan. Selain itu, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam pelaksanaan program sosial sebelumnya, agar program sosial di masa depan dapat memberikan manfaat yang lebih baik, maka pelaksanaan program sosial di masa yang akan datang akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat dan tidak lagi melalui pendekatan konsep kewilayahan (*Directly Affected Village*)	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh - Pendahuluan Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212)
2.	Mohon penjelasan dan penentuan kriteria DAVs *(*Direct Affected Village) guna dikaji daerah DAVs (*Directly Affected Village)*.		Pendekatan yang dilakukan untuk program sosial dalam studi AMDAL Rencana Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG ini tidak lagi berdasarkan konsep kewilayahan atau daerah yang terkena dampak langsung (*Directly Affected Village*), namun akan lebih difokuskan kepada Masyarakat Asli sebagai penerima manfaat. Program sosial akan direncanakan berdasarkan persetujuan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan	Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh Sub-bab Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (hal 37-48) Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan

				Tangguh LNG (Halaman I-212)
3.	Mohon kepada BP Berau Ltd untuk dapat membantu masyarakat kampung Forada dalam hal : a. Air bersih b. Biaya pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi bagi putra putri asli Papua di Kampung Forada c. Kesehatan gratis d. Pertanian e. Bantuan rumah-rumah ibadah f. Membuka lapangan kerja g. Membuka peluang pasar, sayur-mayur h. Infrastruktur dasar i. Penerangan		Berdasarkan hasil evaluasi dampak di dalam studi AMDAL ini disimpulkan bahwa kawasan Kampung Forada tidak termasuk daerah yang terkena dampak atas kegiatan dan keberadaan Proyek Pengembangan LNG Tangguh (Train 3 dan 4). Batas wilayah studi AMDAL untuk kegiatan ini sudah dibahas dalam KA-ANDAL yang telah disetujui pada 24 Juli 2013. Namun demikian, terhadap anggota Masyarakat Asli yang memenuhi syarat tertentu dan berasal dari Kampung Forada tersebut, Tangguh LNG dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program yang bersifat penghargaan.	Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan – Peta I-10. Batas Sosial Proyek Pengembangan Tangguh LNG (Halaman I-212) Lampiran 3 Dokumen RKL/RPL-Pengelolaan Sosial Tangguh

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 14 Maret 2014)

RAPAT EVALUASI PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN FAKFAK DAN KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT EVALUASI PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 14 Maret 2014

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
PAKAR				
A	**Ir. Andojo Wurjanto, M.Sc., Ph.D (Pakar Pelabuhan)**			
1.	**Komentar 28 November 2014:** Terkait topik bahasan untuk informasi lokasi dan penyajian peta untuk bagian Terminal Khusus memadai. Penjelasan mengenai informasi lokasi dan penyajian peta untuk bagian Terminal Khusus disajikan di halaman I-133 s.d. I-177. **Komentar 14 Maret 2014:** Tidak ada masalah sejak 28 November 2013. Tidak ada permintaan perbaikan.		Terimakasih atas masukan yang diberikan.	
2.	**Komentar 28 November 2014:** Pada Rencana Kegiatan untuk Bagian Terminal Khusus, prosedur pengerukan banyak disebut dalam RKL sebagai bentuk pengelolaan untuk menjamin pengendalian dampak, tapi mekanisme pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan kurang diuraikan dalam rencana kegiatan. **Komentar 14 Maret 2014:** Rencana kegiatan Pengerukan kini sudah dijelaskan secara memadai di halaman I-145 s.d. I-146 dan Gambar I-49 di halaman I-147. Permintaan sudah dipenuhi. Tidak ada permintaan lain.	I-145 sd I-146, Gambar I-49 hal I-147	Terimakasih atas masukan yang diberikan.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
3.	**Komentar 28 November 2014:** Untuk Rona Lingkungan Hidup terkait dengan aspek kepelabuhanan dan kelautan, data iklim dan kualitas air memadai, namun penyajian kurang cermat. Misalnya, kualitas air nearshore tidak menyebut nomor tabel dan gambar secara tepat. Narasi untuk offshore malah diawali dengan kata nearshore dengan penyeburan nomor tabel dan gambar yang tidak tepat pula. Penempatan gambar tidak cermat dimana keterangan (caption) gambar terpisah dari bagian gambar yang diterangkannya. **Komentar 14 Maret 2014:** Penyajian data sudah baik, penyebutan nomor gambar dan tabel dalam narasi akurat. Meskipun demikian, masih ada posisi gambar dan keterangan yang perlu diperbaiki. Misalnya, Tabel II-33 (di halaman II-108 s.d. II-109) dan Gambar II-46 s.d. II-47 (di halaman II-109 s.d. II-111): tabel dan gambar ini perlu diatur ulang peletakannya. Kaidah penulisan melarang judul tabel terpisah dari tabelnya, dan keterangan gambar terpisah dari gambarnya. <u>Permintaan Perbaikan:</u> 1. Masih perlu perbaikan peletakan tabel dan gambar. 2. Masih ada komentar di bawah terkait substansi data, bukan pada format penyajian.	Tabel II-33, Gambar II-46 sd II-47	Penempatan tabel. gambar dan keterangan (*caption*) gambar telah diperbaiki.	**ANDAL Tabel II-33 Hal. II-105** **Gambar II-46 dan II-47 Hal. II-133**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
4.	**Komentar 28 November 2014:** Untuk Bab Rona Lingkungan Hidup, ada data yang tidak memadai, yaitu ▪ Data gelombang sangat terbatas padahal komponen gelombang penting untuk kepelabuhanan dan kelautan. Hanya disebutkan data gelombang umum dan terbatas untuk seluruh Teluk Bintuni. Diketahui ada kala gelombang besar yang menimbulkan masalah di Combo Dock; hal ini tidak tercermin dalam data yang disajikan di butir 2.1.10.2 di halaman II-158. ▪ Lokasi Ocean Tower yang disebut sebagai lokasi acuan data pang surut dan arus, harus dicari dimana? ▪ Data pasang surut (di butir 2.1.10.3 di halaman II-158 s.d. II-159) kurang komprehensif mengingat bahwa Teluk Bintuni sangat luas dan karakter pasutnya bisa berbeda di tempat yang berbeda. Dari pemodelan mestinya bisa diberikan karakter yang lebih komprehensif. Lihat contohnya, karakter salinitas bisa ditunjukkan bervariasi dalam ruang.	Hal II-158 sd II-159	• Data dan informasi mengenai gelombang sudah ditambahkan pada Sub-bab 2.1.10.2. • Lokasi Ocean Tower sudah ditunjukkan pada Peta II-15 halaman II-182 Data pasang surut hanya dilakukan di satu titik (*Ocean Tower*) sehingga variasi dalam ruang tidak dapat ditunjukkan seperti salinitas yang diukur di beberapa tempat saat pengumpulan data CTD	**ANDAL Sub Bab 2.1.10.2 Hal. II-178** **Peta II-15 Hal. II-182**
	Komentar 14 Maret 2014: 1. Lokasi Ocean Tower sudah ditunjukkan dengan jelas pada Gambar II-15 di halaman II-163. 2. Data gelombang mengacu kepada Dokumen Amdal 2002 (Tabel II-44 di halaman II-161) dengan penjelasan minimalis. Ada dua isu di sini. Pertama, jika pun kondisi gelombang tidak berubah dari satu dekade yang lalu, perlu dalam dokumen ANDAL ini dijelaskan kembali bagaimana data gelombang diperoleh untuk Amdal 2002. Kedua, iklim laut mungkin telah berubah, dalam hal ini Rona Lingkungan Awal Gelombang untuk Amdal 2014 menjadi tidak akurat. 3. Pasang Surut (vertikal - elevasi muka air) mengambil karakter dari dokumen Amdal 2002 juga (Tabel II-45 di halaman II-161), meski ada pengukuran tahun 2013 (Gambar II-73 di halaman II-162). Tidak ada upaya untuk memadukan dua data pasang surut	Gambar II-15 hal II-163 Tabel II-44 Tabel II-45, Gambar II-73	1. Terima kasih. 2. Data dan informasi gelombang sudah ditambahkan pada Sub-bab 2.1.10.2. Data gelombang diperoleh dari hasil pengukuran gelombang pada *Ocean Tower* yang dilakukan oleh Calmarine (1999-2001) menggunakan peralatan *S4ADW current and wave meter*. Di samping itu telah dicantumkan pengaruh perubahan iklim terhadap peningkatan permukaan air laut pada Sub-bab 2.1.1.8. 3. Pengukuran pasang-surut oleh Calmarine (1999-2001) dan Fugro (2013) dilakukan pada titik pengamatan diskrit (2 titik) dan berdekatan satu sama lainnya. Oleh karena itu tidak dapat ditunjukkan variasi spasial seperti salinitas yang diukur di beberapa titik (sekitar 23 titik) saat pengumpulan data CTD mencakup seluruh daerah Teluk Bintuni dalam studi AMDAL ini. Untuk	**ANDAL Sub Bab 2.1.10.2 Hal. II-178** **Peta II-15 Hal. II-182**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	yang dimuat dalam dokumen ini. Permintaan sebelumnya untuk menyajikan variasi spatial karakter pasang surut tidak diakomodir, padahal dengan pemodelan hidrodinamika yang ekstensif dilakukan dalam studi Amdal ini, sangat mudah mendapatkan variasi spatial karakter pasang surut. Dokumen ini bisa menyajikan data variasi spatial salinitas yang ekstensif, maka mestinya bisa juga disajikan variasi katrakter pasang surut (vertikal) di lokasi-lokasi representatif di Teluk Bintuni. 4. Arus. Mohon maaf, sebelumnya tidak ada tanggapan tentang arus, namun karena ada pemodelan hidrodinamika yang ekstensif, sayang jika data arus tidak disajikan secara baik. Pertama, penyajian scatter plot arus dalam Gambar II-74 di halaman II-164, tidak sempurna. Ada obyek gambar oval yang misplaced. Kedua, penyajian snapshot arus di dua musim dihargai, namun snaphot hanya menggambarkan kondisi yang benar-benar sesaat. Perlu dilengkapi dengan plot berikut (karena datanya tersedia): a. Perbandingan scatter plot arus hasil simulasi vs. pengukuran. b. Scatter plot arus per musim. c. Sebagaimana karakter pasang surut vertikal, simulasi hidrodinamika yang tampak ekstensif mestinya bisa menyajikan scatter plot arus di beberapa titik representative diTeluk Bintuni. Tidak hanya satu titik yang dibahas <u>Permintaan Perbaikan:</u> 1. Permintaan mengenai kejelasan mengenai lokasi Ocean Tower sudah dipenuhi. 2. Untuk aspek Gelombang, ada permintaan sebagaimana dijelaskan di tanggapan No. 2 di atas 3. Untuk aspek Pasang Surut, ada permintaan sebagaimana	Gambar II-74	memperoleh variasi spasial pasang surut untuk Teluk Bintuni, diperlukan penempatan alat pengukur pasang surut pada beberapa lokasi dalam jangka waktu tertentu. 4. a. Perbandingan *scatter plot* arus hasil simulasi vs pengukuran telah dicantumkan pada Sub-bab 2.1.10.4 b. Scatter plot arus per musim telah ditambahkan pada Sub-bab 2.1.10.4 c. Pengukuran arus hanya dilakukan di satu titik (*Ocean Tower*) sehingga tidak memungkinkan dibuatnya scatter plot untuk beberapa titik di Teluk Bintuni	**ANDAL Sub Bab 2.1.10.4 Hal. II-183**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	dijelaskan di tanggapan No. 3 di atas. 4. Untuk aspek Arus, ada permintaan sebegaimana dijelaskan di tanggapan No. 4 di atas.			
5.	**Komentar 28 November 2014:** Pada bab Evaluasi Dampak Penting terkait aspek kepelabuhanan dan kelautan, diases item sebagai berikut dalam draf ANDAL: ▪ Dampak terhadap pola arus: Dinyatakan diabaikan (halaman III-361). Narasi kurang mendukung padahal dengan hasil simulasi before-after dampak terhadap pola arus dengan mudah ditunjukkan secara kuantitatif. **Komentar 14 Maret 2014:** Argumentasi dampak tentang pola arus di butir 3.4.1.1.a (mulai halaman III-360) masih belum dilengkapi dengan hasil analisis kuantitatif untuk mengarah kepada kesimpulan dampak "diabaikan" (Tabel III-158 di halaman III-362 s.d. III-363). Minta klarifikasi saat rapat 14 Maret 2014.	Hal III-361 Butir 3.4.1.1.a, Tabel III-158	• Tidak dilakukan pemodelan/simulasi terhadap perubahan pola arus akibat pembangunan fasiltas kepelabuhanan oleh karena dalam kerangka acuan yang telah disepakati oleh KLH pada bulan Juli 2013 tidak diidentifikasi adanya dampak terhadap pola arus yang diakibatkan oleh kegiatan Tangguh LNG oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemodelan/ simulasi pola arus *before-after*. • Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan pola arus dikemukakan berdasarkan data yang tersedia serta dengan analogi dari Dermaga LNG 1 dan *Combo Dock* yang saat ini telah ada dan beroperasi. Di samping itu, prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan pola arus dilakukan melalui penilaian ahli (*professional judgement*). • Prakiraan dan evaluasi dampak secara analogi dan *professional jugement* umum dilakukan dalam AMDAL.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
6.	**Komentar 28 November 2014:** ▪ Dampak terhadap perubahan garis pantai: Dinyatatakan minor (halaman III-364) dengan metoda studi pengamatan visual. Hal ini kurang mendukung karena hasil pengamatan visualnya tidak dinyatakan dalam rona. Informasi lain menunjukkan bahwa bahkan pantai berbakau pun tergerus di kawasan ini. Ini kesempatan bagi Pemrakarsa untuk menunjukkan proses alami dan menyatakan disclaimer. Perlu dokumentasi yang kuat untuk sampai ke pernyataan dampak minor dengan metoda pengataman visual.	Hal III-364	• Hasil pengamatan visual serta analisis citra satelit telah dicantumkan pada Rona lingkungan Hidup aspek Abrasi Garis Pantai. • Abrasi dan pertumbuhan garis pantai di teluk Bintuni umumnya terjadi pada delta-delta yang terutama disebabkan oleh besarnya amplitudo pasang-surut. Sesuai dengan kaidah kesimbangan massa, maka terdapat daerah yang terabrasi dan daerah yang garis pantainya bertambah (akresi). Perubahan garis pantai dapat dilihat dalam ANDAL Bab III Sub Bab 3.4.1.1. • Tangguh LNG akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan jika didapati abrasi yang tidak sesuai perkiraan dalam dokumen ANDAL yang diakibatkan oleh kegiatan Tangguh LNG dan perlu ditanggulangi. Pengelolaan terhadap perubahan garis pantai ini telah ditambahkan dalam dokumen RKL-RPL.	**ANDAL Sub Bab 2.1.10.5 Hal. II-194** **ANDAL Sub Bab 3.4.1.1 Gambar III-1** **Dokumen RKL-RPL Sub Bab 2.4 Hal II-60**
7.	**Komentar 14 Maret 2014:** Argumentasi dampak tentang perubahan garis pantai di butir 3.4.1.1.b mulai halaman III-363 masih belum dilengkapi dengan hasil analisis kuantitatif ntuk mengarah kepada kesimpulan dampak "sangat kecil" (Tabel III-159 di halaman III-365 s.d. III-366). <u>Permintaan Perbaikan:</u> Minta klarifikasi saat rapat 14 Maret 2014.	Butir 3.4.1.1b, Tabel III-159	• Tidak dilakukan pemodelan/simulasi terhadap perubahan garis pantai akibat pembangunan fasiltas kepelabuhanan oleh karena dalam kerangka acuan yang telah disepakati oleh KLH pada bulan Juli 2013 tidak diidentifikasi adanya potensi dampak terhadap perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh kegiatan Tangguh LNG oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemodelan/simulasi • Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan garis pantai dikemukakan berdasarkan data yang tersedia termasuk peta satelit dari tahun 1998 sampai 2013 dan studi sebelumnya oleh LAPI	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			ITB (add year) serta dengan analogi dari Dermaga LNG 1 dan *Combo Dock* yang saat ini telah ada dan beroperasi. Disamping itu, prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan garis pantai dilakukan melalui penilaian ahli (*professional judgement*). • Prakiraan dan evaluasi dampak secara analogi dan *professional jugement* umum dilakukan dalam AMDAL.	
8.	**Komentar 28 November 2014:** Pada topik bahasan Evaluasi Dampak Penting: ▪ Dampak terhadap TSS Dinyatakan minor (halaman III-370) dengan hasil simulasi yang notasinya tidak terbaca. Penyajian data pendukung kurang komprehensif. Diminta untuk menyajikan hasil simulasi TSS akibat kegiatan pengerukan dan hasil pengerukan sebagai berkut: i. Sebaran terjauh disajikan lebih legible (dapat dibaca). ii. Seri waktu kenaikan dan penurunan kembali TSS di transek iii. yang representatif dalam skala waktu kegiatan (berulang dalam skala waktu hari). **Komentar 14 Maret 2014:** Argumentasi untuk dampak TSS (butir 3.4.1.2 di halaman III-366 s.d. III-375) sudah memadai, tapi seri waktu yang diminta, tidak ditampilkan. <u>Permintaan Perbaikan:</u> Minta seri waktu yang sudah diminta dalam tanggapan 28 Nov 2013.	Hal III-370 Hal III-366 sd III-375	• Hasil pemodelan selengkapnya tercantum pada Lampiran IV.2. • Tidak jelas apa yang dimaksud dengan notasi tidak terbaca, penyebaran maksimum peningkatan konsentrasi TSS telah dicantumkan pada gambar sebagai insert. • Sebaran terjauh peningkatan konsentrasi TSS sesuai dengan kondisi pasang-surut dalam bentuk grafik telah dicantumkan pada Sub-bab 3.4.1.2 • Untuk pemodelan pengerukan, diasumsikan pelepasan material dari alat keruk berlangsung selama 8 jam/hari, peyebaran dampak melalui pemodelan didasarkan atas periode waktu ini. Setelah tidak ada pengerukan dalam periode satu hari maka tidak terjadi peningkatan TSS dan pengendapan partikel ke dasar perairan. Hasil pemodelan menunjukkan untuk skenario musim kemarau maksimum ketebalan sedimen adalah 136 mm, dengan kenaikan konsentrasi TSS maksimum 4,8 mg/L. Sedangkan untuk musim hujan ketebalan sedimen adalah sebesar 59 mm, dengan kenaikan konsentrasi TSS maksimum 11,8 mg/L.	**Dokumen ANDAL Lampiran IV.2** **ANDAL Sub Bab 3.4.1.2 Gambar III-60 sd Gambar III-63**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Untuk pemodelan pembuangan hasil kerukan, pembuangan dilakukan 2 kali sehari dengan selang waktu 4 jam dan periode plepasan hasil pengerukan selama 10 menit. Hasil pemodelan menunjukkan untuk skenario musim kemarau maksimum ketebalan sedimen adalah 36 mm dengan kenaikan konsentrasi TSS maksimum 3,9 mg/L. Sedangkan untuk musim hujan ketebatan sedimen adalah sebesar 28 mm, dengan kenaikan konsentrasi TSS maksimum 5,5 mg/L.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Komentar 28 November 2014: Pada topik bahasan Evaluasi Dampak Penting, penurunan kualitas air laut akibat kemungkinan limbah kegiatan kepelabuhanan dibahas di bagian lain, terpadu sebagai penanganan limbah kawasan, diacu ke butir 2.1.3.3 - Kegiatan Kilang yang tidak ada dalam dokumen.		Penulisan butir 2.1.3.3 - Kegiatan Kilang telah diperbaiki menjadi butir 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG.	
	Komentar 14 Maret 2014: ▪ Penurunan kualitas air laut akibat kegiatan kepelabuhanan tetap tidak dibahas. Dipercayai bahwa Pemrakarsa memiliki semua fasilitas penanganan limbah kawasan, yang dapat digunakan untuk menampung dan mengolah limbah dari kegiatan kepelabuhanan. ▪ Diusulkan untuk membuat diagram penanganan limbah kepelabuhanan yang: a. mengidentifikasi kegiatan sumber limbah, dan b. jalur penanganan limbah memanfaatkan fasilitas olah limbah keseluruhan fasilitas. ▪ Dengan rencana kegiatan penanganan limbah kepelabuhanan yang jelas (malah sudah berkomitmen untuk mengikuti MARPOL), maka kemungkinan penurunan kualitas air laut akibat kegiatan kepelabuhanan dapat diabaikan. <u>Permintaan Perbaikan:</u> Minta klarifikasi saat rapat 14 Maret 2014.		Potensi perubahan kualitas air laut akibat kegiatan kepelabuhanan telah dibahas pada dokumen ANDAL Bab III sub bab 3.4.1.2. Diagram rencana penanganan limbah dari kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan Tangguh LNG lainnya yang berlokasi di laut telah ditambahkan dalam dokumen RKL-RPL sub bab 1.3.4. Acuan yang relevant dari MARPOL 2012 juga sudah ditambahkan pada RKL-RPL.	**ANDAL Sub Bab 3.4.1.2** **RKL-RPL Sub Bab 1.3.4 Gambar I-14** **RKL-RPL Sub Bab 1.3.4 Tabel I-1 Hal. I-16**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
9.	**Komentar 28 November 2014:** Topik Bahasan: RKL-RPL Untuk bagian Terminal Khusus, akibat asesmen dampak yang menyatakan "diabaikan" dan "minor", maka nyaris tidak ada item terkait di RKL dan RPL. Hal ini menimbulkan masalah: ada potensi dampak yang diklaim dalam dokumen ANDAL sebagai "diabaikan" dan "minor" berbasis hasil simulasi komputer, lalu tidak dilakukan pemantauan dan pengelolaan. Hasil simulasi komputer belum dapat ditempakan sedemikian menentukan, namun kegiatan pemantauan dan pengelolaan nya juga tidak seberat jika asesmen dampaknya mayor atau kritis. Perlu keseimbangan. Diusulkan untuk tetap ada item di dokumen RPL dan RKL terkait asesmen "diabaikan" dan "minor". Dampak terhadap pola arus: Oke pola arus tidak usah dipantau. Model yang baik dapat dipercaya akurat mensimulasi karakter hidrodinamika kawasan. <u>Permintaan Perbaikan:</u> Tidak diusulkan item RPL RKL untuk pola arus.		Mengacu para Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dampak yang masuk dalam kategori "minor" dan "diabaikan" merupakan Dampak Tidak Penting namum tetap dikelola dan dipantau. Terkait dengan sifat penting dampak dengan kategori "Diabaikan" dan "Minor" untuk kegiatan Fasilitas Terminal Khusus telah dilakukan kajian dan rencana pengelolaan dan pemantauannya masuk dalam dokumen RKL-RPL.	
	Komentar 14 Maret 2014: Jika argumentasi mengenai perubahan pola arus sudah disampaikan sesuai usulan dalam tanggapan ini (penyajian dalam angka dan grafik kuantitatif), dan hasilnya memang mendukung kesimpulan bahwa dampak terhadap perubahan pola arus "diabaikan", maka tidak perlu pemantauan arus. <u>Permintaan Perbaikan:</u>		• Tidak dilakukan pemodelan/simulasi terhadap perubahan pola arus akibat pembangunan fasiltas kepelabuhanan oleh karena dalam kerangka acuan yang telah disepakati oleh KLH pada bulan Juli 2013 tidak diidentifikasi adanya dampak terhadap pola arus yang diakibatkan oleh kegiatan Tangguh LNG oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemodelan/ simulasi pola arus *before-after.*	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
10.	Tidak ada permintaan lain jika argumentasi dalam evaluasi dampak sudah disempurnakan (menggunakan argumen kuantitatif dengan angka dan grafik).		• Prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan pola arus dikemukakan berdasarkan data yang tersedia serta dengan analogi dari Dermaga LNG 1 dan Combo Dock yang saat ini telah ada dan beroperasi. Di samping itu, prakiraan dan evaluasi dampak terhadap perubahan pola arus dilakukan melalui penilaian ahli (professional judgement). • Prakiraan dan evaluasi dampak secara analogi dan professional jugement umum dilakukan dalam AMDAL	
	Komentar 28 November 2013: Dampak terhadap perubahan garis pantai: ▪ Diusulkan dalam RPL: dua (2) kali dalam lima tahun saja saja dilakukan pengukuran garis pantai. ▪ Diusulkan dalam RKL: akan diambil tindakan korektif jika didapati abrasi yang tidak sesuai perkiraan dalam dokumen ANDAL (asesmen minor).		Telah diperbaiki dalam dokumen RKL-RPL	**Dokumen RKL-RPL Sub Bab 2.4 Hal II-60**
11.	**Komentar 14 Maret 2014:** a. Usulan pemantauan "perubahan garis pantai" dengan frekuensi sesuai usulan (dua kali dalam lima tahun) sudah diakomodir dalam RPL di halaman III-54. b. Usulan pencantuman item "perubahan garis pantai" dalam dokumen RKL sudah diakomodir di halaman II-61. <u>Permintaan Perbaikan:</u> Terimakasih. Tidak ada permintaan lain.	RPL Hal III-54 RKL Hal II-61	Terimakasih atas masukan yang diberikan	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Komentar 28 November 2013: Dampak terhadap TSS dari kegiatan pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan: ▪ Pemantauan TSS dilakukan hanya pada masa pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan. Pada masa yang lain tidak perlu dilakukan pemantauan TSS (yang terkait pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan). ▪ Tapi Pemantauan TSS dalam masa pengerukan tidak bisa dilakukan hanya sekali (seperti sekarang draf RPL) karena peristiwa fisik kenaikan TSS akibat pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan berskala waktu pendek. ▪ Diusulkan pemantauan TSS dalam masa pengerukan tiga kali ▪ dalam skala waktu yang diindikasikan dalam simulasi ▪ penyebaran TSS (jam, hari?) di lokasi pengerukan dan pembuangan dengan frekuensi 7 hari sekali selama masa pengerukan. ▪ Tidak dipahami apa artinya pemeriksaan catatan 1 kali 3 bulan (dalam draf RPL, halaman III-49 butir 2). ▪ Diusulkan untuk dokumen RKL: i. Memastikan bahwa prosedur keruk dan buang dilaksanakan sesuai dengan skenario yang ditelaah dalam dokumen ANDAL. ii. Melakukan tindakan korektif jika didapati dari hasil pemantauan bahwa sebaran TSS tidak sesuai dengan simulasi "aman" yang didimpulkan dalam dokumen ANDAL.	RPL Hal III-49	Komentar yang diberikan pada 28 November 2013 ini ini telah ditanggapi dan dibahas pada tanggal 14 Maret 2014. Komentar dan klarifikasi tambahan yang diberikan pada tanggal 14 Maret, ditanggapi pada bagian di bawah ini	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Komentar 14 Maret 2014: Sudah diakomodir dalam RPL di hal. III-53 namun frekuensinya masih belum cukup (internal mingguan, eksternal 1x). Untuk frekuensi, diacu kepada Narasumber Bapak Arie Herlambang. Modifikasi pada frekuensi pemantauan. <u>Permintaan Perbaikan:</u> Modifikasi pada frekuensi pemantauan.	RPL Hal III-53	Pemantauan internal akan dilakukan mingguan dimana pengambilan sampel akan dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan pengerukan pada hari yang sama.	
B	**Dr. Ir. Arie Herlambang, MS (Pakar Hidrologi)**			
1.	Dokumen bagus, data lengkap dan sangat rapih;		Terimakasih atas masukan yang diberikan.	
2.	Perlu peningkatan perhatian dalam proses editing laporan agar lebih konsisten dalam penulisan;		Terimakasih atas masukannya. Konsistensi dalam penulisan dan QA/QC terhadap keseluruhan dokumen akan lebih diperhatikan dalam proses penyelesaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL.	
3.	Analisis hidrologi terhadap perubahan pola run off sudah dilakukan, lanjutkan analisisnya sampai bisa menjawab apakah terjadi banjir/genangan atau tidak, jika terjadi banjir/genangan rencana penanganannya dimuat dalam RKL RPL-nya;		Banjir akan terjadi jika penampang aliran tidak dapat menampung debit. Hal ini sudah dianalisis pada Tabel **Error! No text of specified style in document.**-61 (Perubahan Kedalaman Aliran Sungai di daerah studi) dengan membandingkan kedalaman aliran sebelum dan sesudah perubahan lahan. Untuk menjawab apakah banjir atau tidak, diperlukan data geometri saluran (penampang melintang saluran) untuk melihat apakah tinggi aliran sudah melampaui elevasi tanggul. Berdasarkan pengalaman Tangguh LNG pada saat konstruksi kilang LNG 1 dan 2, tidak ada kejadian banjir pada saat kegiatan pembukaan dan penyiapan lahan. Pemantauan akan dilakukan terhadap ada atau tidaknya banjir. Apabila terjadi banjir maka akan dilakukan pengelolaan untuk mencegah terjadinya banjir.	**ANDAL Sub Bab 3.3.1.5 Tabel III-61 Hal. III-161**
4.	**Salinitas**: korelasi antar sumur dibuat dulu baru dibuat penampangnya, contoh bagusnya di penampang air tanah dangkal (dibuat korelasi antar sumur2 dan dibuat		Data salinitas di Formasi Steenkool bagian atas sampai dengan kedalaman 150 m ditunjukkan pada penampang hidrogeologi. Hasil uji laboratorium terhadap salinitas di Saengga adalah 293 mg/L (556uS/cm); di TMB 282 mg/L	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-43**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	peta) Pada posisi kedalaman 300 m, TDS di bawah lokasi LNG sekitar 250 mg/L, tapi di peta salinitas sekitar 3000 mg/L, perlu dibuat korelasinya Pemetaan bawah permukaan dasarnya adalah korelasi antar titik sumur ataupun pengukuran, sebaiknya disampaikan datanya, jika memungkinkan.		(EC 515 uS/cm); dan di TW-2 356 mg/L (EC 630 uS/cm). Resisitivity log di SHD-1 sampai kedalaman 300 m juga mengindikasikan salinitas air tanah yang sebanding dengan kedalaman. Ini merupakan data salinitas yang kami gunakan untuk Formasi Steenkool bagian atas di lokasi Tangguh LNG. Tidak ada data salinitas air tanah dangkal di Formasi Steenkool sampai dengan kedalaman 30 m selain yang telah ditunjukkan di penampang hidrogeologi plus interpretasi salinitas air tanah sampai kedalaman 300 m berdasarkan logging geofisika di slim hole drilling. Kajian awal yang kami lakukan menunjukkan bahwa salinitas air tanah sampai dengan kedalaman 600 m, yang merupakan bagian paling bawah dari pemodelan numerik, adalah kurang dari 1.000 mg/L dan interpretasi ini di plot di penampang hidrogeologi konseptual sebelum melakukan pemodelan numerik. Kontur salinitas pada gambar II-27 Conceptual Hydrogeology telah dihilangkan dari dokumen ANDAL, Bab 2. Selanjutnya, pemodelan numerik menghasilkan salinitas yang berdasarkan aliran air tanah dan neraca air, dan hal ini ditunjukkan di penampang dan peta. Pemodelan numerik ini menggunakan asumsi bahwa titik temu air tawar-air asin di Formasi Steenkool bagian bawah adalah terletak sekitar 2 km ke arah lepas pantai perairan teluk Bintui. Kontur pemodelan di Gambar III-45 dibuat hanya untuk kontur 30.000 dan 1.000 mg/L saja. Gambaran salinitas yang dihasilkan dari pemodelan numerik ditampilkan sebagai Gambar III-46. Terdapat juga data tambahan yang berasal dari sumur pantau dangkal di sekitar landfill yang baru (sampai	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			kedalaman 20 m) sebesar 300 sampai 680 mg/L yang diukur di tahun 2013. Selain itu juga dari sumur yang yang dibuat oleh Calmarine di tahun 2002 sedalam 26 m sebesar 460 uS/cm atau sama dengan 300 mg/L.	
5.	Nilai infiltrasi air hujan kedalam tanah ada dua asumsi, gunakan satu saja yang paling memungkinkan dan wajar, agar konsisten;		Hal ini sudah dikoreksi dan nilai imbuhan akuifer tertekan Formasi Steenkool yang digunakan adalah nilai yang diperoleh dari pemodelan numerik yaitu kurang dari 3% dari curah hujan di daerah ini. Penjelasan ini telah ditambahkan pada Sub Bab 2.1.5 Hidrogeologi dan Kualitas Air Tanah.	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-43**
6.	Skenario rencana penggunaan air dan limbah yang dihasilkan disarankan dibuat skemanya agar pembaca mudah memahaminya;		Opsi rencana penggunaan air selama tahap konstruksi dan operasi kegiatan Tangguh LNG telah dijelaskan pada Bab 1 Sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG. Dalam studi AMDAL ini ada 3 opsi yang dipertimbangkan yaitu : • Desalinasi air laut sebagaimana digunakanuntuk operasi kilang LNG 1 dan 2 saat ini • Pemanfaatan air tanah • Kombinasi desalinasi dan air tanah Detail rencana penggunaan air untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG akan ditentukan pada tahap FEED. Perkiraan penggunaan air untuk Kilang LNG 3 dan 4 dapat dilihat pada Gambar I-34 dalam dokumen ANDAL Bab I tentang Neraca Massa Air Operasi Tangguh LNG saat ini. Sedangkan Skenario prembuangan air limbah untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL sub bab 1.3.1.	**ANDAL Gambar I-34 Hal. I-126** **RKL-RPL Sub Bab 1.3.1 Gambar I-1**
7.	Kapasitas unit pengolah air laut belum ada, baru ada kapasitas air rejecknya, kalau bisa sampaikan spesifikasi ringkasnya		Kapasitas unit pengola air laut (unit desalinasi) yang akan digunakan untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG akan ditentukan pada proses FEED. Namun demikian, kapasitas unit tersebut akan ditentukan berdasarkan kebutuhan air yang harus dipenuhi dengan menggunakan	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			unit desalinasi tersebut (pada puncak tahap Konstruksi termasuk kebutuhan air untuk hydrotest = 512 m3/jam, dan pada Tahap Operasi = 79 m3/jam). Bila opsi desalinasi yang digunakan, kapasitas produksinya akan dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman operasi saat ini yaitu sekitar 70-30 (brine – air bersih).	
8.	Pada pembahasan ORF lengkapi dengan gambar proses dan angka^2 kuantitatifnya, letakkan gambarnya dekat dengan pembahasan.	I-88	Gambar I-28 telah diperbaiki dan dipindah dekat pembahasan	**ANDAL Gambar I-28 Hal. I-91**
9.	Gambar 1-28 : Estimasi produksi mercury ditulis dalam kolom, volume per satuan waktu, demikian juga produksi sludge, dan produce water dibuangnya kemana mohon diperjelas dan kapasitasnya berapa ?	I-93	Kandungan Mercury sebagai senyawa ikutan dalam pasokan gas yang masuk dalam unit ORF diperkirakan sekitar 100 µg/Nm3 dan akan diproses melalui katalis pada drum penghilang mercury. Tidak ada mercury yang dilepaskan ke udara. Perkiraan komposisi Mercury tersebut akan ditambahkan dalam Gambar I-28. Merkuri yang diserap oleh katalis Merkuri, berdasarkan pengalaman saat ini konsentrasinya adalah kurang dari 260 mg/kg. Katalis bekas yang mengandung mercury ini akan diperlukan sebagai limbah B3 dan dikirim ke fasilitas pengolahan limbah B3 yang mempunyai izin. Seperti telah disajikan dalam Gambar I-28, effluent dari PWT akan dibuang ke titik pembuangan pada -6m LAT. Sedangkan lumpur dari PWT akan dikirim ke fasilitas pengelola limbah yang memiliki izin. Perkiraan volume effluent dan lumpur dari PWT masing-masing sebesar 1.200 m3/hari dan 80 ton/bulan akan ditambahkan dalam Gambar I-28.	**ANDAL Gambar I-28 Hal. I-91**
10.	Kebutuhan air bersih sampaikan sumbernya, berapa yang menggunakan Teknologi Reverse Osmosis (RO) dan berapa yang menggunakan sumber lain (air tanah ?), dalam rencana pengembangan terlihat komitmennya akan menggunakan RO, namun dalam pembahasan air tanah terlihat akan juga menggunakan air tanah, mohon diperjelas.	I-96	Untuk tujuan dan sebagai lingkup studi AMDAL ini ini ada 3 opsi sumber pasokan air bersih yang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan air pada tahap konstruksi dan operasi Tangguh LNG, yaitu : • Desalinasi air laut sebagaimana digunakanuntuk operasi kilang LNG 1 dan 2 saat ini	**ANDAL Sub Bab 1.2.3 Hal. I-123**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			• Pemanfaatan air tanah • Kombinasi desalinasi dan air tanah Opsi sumber pasokan air bersih tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil studi air tanah yang merupakan bagian dari studi AMDAL ini. Kapasitas unit pengolahan air yang akan digunakan untuk Proyek Pengembangan Tangguh LNG akan ditentukan pada proses FEED. Namun demikian, kapasitas fasilitas pengelolaan air bersih akan ditentukan berdasarkan kebutuhan air yang harus dipenuhi, yaitu pada saat puncak tahap konstruksi termasuk untuk kebutuhan air hydrotest = 512 m3/jam dan pada tahap Operasi = 79 m3/jam. Bila opsi desalinasi yang digunakan, kapasitas unit akan mempertimbangkan efisiensi proses desalinasi yang berdasarkan pengalaman operasi saat ini adalah sekitar 70-30 (brine – air bersih).	
11.	Gambar I-29 : informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan peningkatan run off akibat perubahan penggunaan lahan. Sebaiknya digunakan tabel untuk menunjukkan luasan penggunaan lahannya nanti dibandingkan dengan run off pada lahan yang belum terbangun.	I-100	Evaluasi dampak peningkatan air limpasan dari kegiatan pembukaan lahan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I-29 dapat dilihat pada Bab III Evaluasi Dampak Sub Bab 3.3.1.8 Evaluasi Dampak Kualitas Air Permukaan.	**ANDAL Sub Bab 3.3.1.8 Tabel III-87**
12.	Sumber material untuk pengurugan yang berjumlah 6,5 juta m^3 dari mana ? modeling dampak penyebaran TSS pada area pengurugan sebaiknya disampaikan dalam tulisan, terkait dengan penentuan lokasi titik monitoring kualitas air lautnya.	I-101	Volume material yang akan digali dan diurug pada saat kegiatan penyiapan tapak untuk konstruksi fasilitas proyek Pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada dokumen ANDAL halaman I-101. Jika pada saat penggalian (pembukaan lahan) terdapat	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			material batuan (quarry) yang sesuai untuk digunakan pada kegiatan konstruksi fasilitas Tangguh LNG, maka material tersebut akan digunakan sebagai material urug Sebagian besar material quarry (material urug) rencananya akan didatangkan dari luar area Tangguh yang lokasi pastinya saat ini belum ditentukan. Prakiraan dan evaluasi dampak kenaikan kandungan TSS pada pada perairan anak-anak sungai yang terdapat di area Tangguh LNG termasuk akibat dari kegiatan gali-urug dan penyiapan tapak telah dibahas dalam dokumen ANDAL Sub Bab 3.3.1.8 tentang Kualitas Air Permukaan. Terkait dengan penentuan lokasi titik monitoring kualitas air anak sungai dan saluran drainase di area Tangguh LNG dapat dilihat pada Peta III-1 dalam sub bab 3.3.1.8.	**ANDAL Sub Bab 3.3.18 Hal III-224**
13.	Penyediaan air : Sampaikan rencana lokasi titik-titik pengeboran air tanah dan rencana kapasitas pengambilannya, serta lokasi alat pengolah air RO, dimana lokasi pembuangan brine waternya ?	I-114	Lokasi titik-titik pengeboran untuk sumur produksi dan sumur pantau air tanah, rancangan sumur dan rencana kapasitas pengambilannya akan ditentukan berdasarkan hasil uji pemompaan dan pemodelan numerik air tanah yang diperbaharuhi berdasarkan hasil uji pemompaan tersebut. . Hasil uji pemompaan dan pemodelan ini beserta usulan rencana lokasi sumur produksi dan sumur pemantauan air tanah akan dimasukkan dalam aplikasi izin pemanfaatan air tanah sesesuai dengan peraturan yang berlaku Lokasi unit Desalinasi dan Reverse Osmosis yang digunakan akan ditentukan pada tahap FEED. Pembuangan brine water dilakukan pada kedalaman -6 m LAT.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
14.	Gambar 1 – 35 : Diagram alir air terproduksi. Sampaikan kapasitas dalam diagram, lay out lokasi fasilitas, lokasi titik pemantauan, dan nyatakan baku mutu yang akan digunakan sebagai acuan.	I-121	Informasi mengenai kapasitas unit pengolahan air terproduksi telah ditambahkan pada diagram. Lokasi fasilitas pengolahan air terproduksi dapat dilihat pada Gambar I-30 Master Plot Plan Proyek Pengembangan Tangguh LNG. Baku mutu yang digunakan sebagai acuan pengolahan air terproduksi dan lokasi pemantauannya dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II RK-RPL.	**ANDAL Gambar I-30 Hal. I-102, Gambar I-35 Hal. I-121** **RKL-RPL Lampiran I (Baku Mutu) dan Lampiran II (Peta Pemantauan)**
15.	Tabel 1-23 : Dasar estimasi perhitungan mohon disampaikan, kaitkan dengan kecepatan produksi atau aktifitas terkait. Limbah terkontaminasi merkuri cukup besar diperkirakan 20 m^3/bulan, apakah bisa diperjelas rencana penanganannya ?	I-128	Dasar estimasi perhitungan adalah berdasarkan pengalaman operasi Tangguh LNG saat ini. Khusus limbah terkontaminasi merkuri, hanya dihasilkan dari kegiatan tidak rutin, yaitu penggantian katalis merkuri sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan (TAR). Namun demikian, kegiatan penggantian katalis merkuri tersebut tidak setiap tahun dilakukan, melainkan jika diperlukan saja. Limbah merkuri yang dihasilkan tersebut akan dikirimkan ke pengelola limbah yang memiliki izin untuk dikelola.	**ANDAL Sub Bab 1.2.3 Hal. I-128**
16.	Gambar 1-42 : Bandingkan limbah yang terbentuk saat ini dengan tambahan limbah setelah rencana pengembangan dilaksanakan; apakah fasilitas yang ada sudah cukup memadai atau harus membangun fasilitas baru untuk menangani penambahan limbahnya ?	I-130	Fasilitas Pengelolaan Sampah Terpadu rencananya akan dibangun sebagai bagian dari Proyek Pengembangan Tangguh LNG, yang mana di dalamnya termasuk fasilitas pengelola limbah padat dan limbah B3 untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi dan operasi kilang LNG. Penjelasan mengenai fasilitas tersebut dapat dilihat pada Sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG Sub Bagian B8. Pengelolaan Limbah Padat Non B3 dan Limbah B3.	**ANDAL Sub Bab 1.2.3 Hal. I-128**
17.	Data curah gunakan dari lokasi yang terdekat dan terpercaya Jika ada pengukuran langsung di lokasi, sampaikan datanya Asumsi perhitungan dalam penghitungan run off pada DAS yang ada menggunakan 20 mm/jam dan 10 mm/jam, data dari mana ?	II-2	Pada rumus rasional, intensitas hujan yg digunakan bergantung pada *time of concentration*. Karena itu untuk tiap-tiap DAS, intensitas hujannya akan berbeda-beda karena perbedaan *time of concentration*. Data curah hujan sudah menggunakan data hujan dari Tanah Merah.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	untuk perhitungan resiko gunakan data yang terbesar.			
18.	Dalam perhitungan cadangan air tanah pda Q_1 11,267 liter/detik dan Q_2 558 liter/detik, jelaskan asumsinya, pada lapisan mana dan posisinya kedalaman berapa ? Kaitkan dengan kajian hidroheologi yang menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut dapat diambil sebanyak 4 x 12 liter/detik.	II-30	Nilai Q1 (11.267 M m3/year) dan Q2 (558 M m3/year) yang ditunjukkan dalam Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Lembar No. 11 merupakan estimasi dari imbuhan total dari akuifer tidak tertekan dan akuifer tertekan. Kedua nilai ini diukur dalam Mm3/year bukan L/det sebagimana ditunjukkan dalam ANDAL, parapgraph terkahir hal II-30. Hal ini telah diperbaiki dalam dokumen ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hidrogeologi dan Kualitas Air Tanah. Rencana pengambilan air tanah sebesar 12L/det dari masing-masing 4 sumur di Tangguh LNG bukan berdasarkan perhitungan imbuhan CAT, akan tetapi berasal dari pemodelan numerik dengan mempertimbangkan batasan untuk meminimalkan potensi penurunan muka air tanah, amblesan dan instrusi air laut yang diuji terhadap *trigger values* yang dinominasi di RKL.	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-32**
19.	Peta II-4 : Formasi legend perjelas; dalam tulisan ditulis sesar echelon (bertingkat) hal II-36, bukan sesar geser seperti dipetanya, mana yang benar ?	II-33	Telah diperbaiki dalam dokumen	**ANDAL Peta II-4 Hal. II-43**
20.	Jelaskan penggunaan asumsi 20% infiltraasi; penulisan angka potensi imbuhan 550 106 m3/tahun seharusnya 550 106 m3/tahun atau sekitar 17,44 liter/detik. Coba check kembali dengan rekomendasi pengambilan air tanah yang mampu mengambil 4 x 12 liter/detik, dengan asumsi infiltrasi yang jauh lebih kecil.	II-36	Angka ini digunakan oleh ITB ketika melakukan pemodelan di tahun 2004. Angka-angka ini telah diperbaharui selama dilakukan pemodelan air tanah untuk studi AMDAL ini dan uraian dalam dokumen ANDAL Bab 2 telah dikoreksi sesuai dengan hal ini Nilai imbuhan akuifer tertekan Formasi Steenkool yang diperoleh dari pemodelan numerik adalah kurang dari 3% dari curah hujan di daerah ini.	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-43**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
21.	Gambaran kondisi salinitas, harusnya didasarkan pada formasi batuan yang sama, berdasarkan hasil korelasi sumur. Untuk mempermudah pemahaman sebaiknya disampaikan hasil korelasinya batuan antar sumurnya.	II-36	Data salinitas yang kami miliki telah diuraikan dalam ANDAL, Bab 2 Gambaran terbaik diberikan dalam penampang hidrogeologi Gambar II-24, yang merupakan akuifer di Formasi Steenkool bagian atas. Estimasi salinitas lainnya diperoleh dari pemodelan numerik.	**ANDAL Gambar II-27 Hal. II-47**
22.	Gambar II-24 dan Gambar II-27 arah kemiringan lapisan batuan relatif berlawanan, apa tidak ada kesalahan ?	II-48	Gambar II-24 merupakan penampang hidrogeologi-geofisika yang berarah timur-barat (dari kanan ke kiri) melalui sudut baratlaut dari properti Tangguh LNG. Akibatnya, urutan stratigrafi menunjukkan dengan benar kemiringan lapisan (paling dangkal 0,8°) dari akuifer-akuifer disebelah timur dimana sedimen Formasi Steenkool menebal dan mendekat ke sumber nya. Gambar II-27 adalah penampang hidrogeologi konseptual yang berarah utara-selatan (dari kiri ke kanan) melalui bagian tengah properti Tangguh LNG. Penampang ini memanjang dari batas hidrolik di sebelah selatan – dimana Formasi Steenkool diperkirakan setebal 4.000 m – sampai batas hidrolik di sebelah utara dimana ketebalan Formasi Steenkool hanya beberapa ratus meter saja. Penampang ini juga menunjukkan bahwa sedimen-sedimen ini umumnya datar sampai dengan kedalaman 500 m. Akan tetapi kemiringan lapisannya meningkat menjadi sekitar 20 atau 30 kearah tenggara dengan semakin meningkatnya kedalaman. Arah struktur dari sedimen Formasi Steenkool juga ditunjukkan pada penampang seismic yang dibuat untuk sedimen yang berada dibawah dan didaerah sekitar lokasi Tangguh LNG	**Gambar II-27 Hal. II-47**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
23.	Ulasan hidrologi sudah bagus, hanya perlu penekanan pada wilayah yang banyak terbangun dan aktifitas, agar lebih ditonjolkan dalam pennulisannya, asumsi penggunaan curah hujan ada yang 20 mm/jam dan ada yang 10 mm/jam, kenapa dibedakan pada wilayah yang dekat, padahal data sangat terbatas, kalau ada alasan lain jelaskan.	III-141	Pada rumus rasional, intensitas hujan yg digunakan bergantung pada *time of concentration*. Karena itu untuk tiap-tiap das, intensitas hujannya akan berbeda-beda karena perbedaan *time of concentration*. Data curah hujan sudah menggunakan data hujan dari Tanah Merah.	
B.	**Prof. Dr. Dody Prayogo MPSt. (Pakar Sosial)**			
1.	**TEKNIS:** Umum: a) Perbaikan secara teknis dampak sosial atas masukan sebelumnya sudah dilakukan. Hanya ada beberapa point yang tidak direspons memadai. b) Kekurangannya, ringkasan (pokok-pokok) hasil pertemuan di lokasi (Manokwari dan Bintuni) jika dilampirkan akan sangat membantu perbaikan akhir dokumen ini. Misalnya masalah apa yang menjadi *concern*, apakah sama dengan hasil konsultasi publik dalam KA lalu, serta bagaimana jalannya pertemuan dan oleh sebab apa terjadi *deadlock* dalam meeting.		a. Terima kasih atas masukannya yang baik b. Berita acara hasil pertemuan Rapat Komisi AMDAL dan pertemuan terkait AMDAL lainnya di Kokas (Fakfak) dan Bintuni) termasuk semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta pertemuan pada saat itu dan tanggapan Tangguh LNG telah dimasukkan sebagai di lampiran dalam dokumen ANDAL.	
2.	Catatan Notulensi: Point 5, h. 29, maksud komentar ini adalah, dalam **rona awal** sebaiknya dijelaskan juga bahwa sejalan dengan operasi dan perkembangan BP berdampak juga perkembangan harapan di kalangan masyarakat. "Perkembangan harapan" menjadi beban RKL pengembangan ini. Jawaban pada bagian ini belum mengadress komentar tersebut.		Identifikasi harapan-harapan masyarakat telah tertuang dalam dokumen ANDAL, yaitu pada Bab 3 Evaluasi Dampak, tabel RKL/RPL, serta pada Sub Bab 1.4 RKL-RPL"Pengelolaan Sosial Tangguh".	**RKL-RPL Sub Bab 1.4**
3.	Point 6, jawaban copy-paste dari jawaban sebelumnya, belum menjawab komentar dimaksud; semestinya menjelaskan bagaimana progres yang sedang diupayakan dan sudah ada, misalnya proporsi pekerja lokal di tingkat semi manajerial, jumlah, program CSR/social program dll.		Hingga tahun 2013, tercatat presentase jumlah pekerja di berbagai tingkatan yang bekerja di Tangguh LNG yang berasal dari Papua telah mencapai 54%. Berdasarkan data tenaga kerja pada Desember 2013, sebanyak 346 orang mencapai posisi skilled dan 72 orang mencapai posisi managerial. Pelaksanaan program sosial terpadu ditambahkan di dalam Bab 2, ANDAL Rona Lingkungan Hidup.	**ANDAL Sub Bab 2.3**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
4.	Point 7.a, juga hanya copy-paste jawaban sejenis sebelumnya. Kenyataannya memang banyak, baik staf Pemda apalagi masyarakat umum tidak mengetahui masalah DBH. Jika mungkin, agar tidak menjadi pertanyaan terus-menerus ada media/chaneling dan mekanisme serta publikasi (terbatas dan jika tidak sensitif) informasi DBH dapat sampai kepada Pemda dan masyarakat yang ingin mengetahui.		Tangguh LNG telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai DBH ini baik kepada aparat Pemerintah Daerah, LSM, maupun masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di Teluk Bintuni tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Migas. Disamping itu, bahkan Tangguh LNG telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Keuangan RI di Jakarta. Upaya untuk memfasilitasi pertemuan serupa telah menjadi bagian dari komitmen Tangguh LNG, yang tercantum dalam Dokumen RKL-RPL, Sub Bab 1.4, "Pengelolaan Sosial Tangguh", Tata Kelola Kepemerintahan.	**RKL-RPL Sub Bab 1.4**
5.	Khusus pengelolaan (RKL) (lihat dokumen RKL), untuk persepsi akan sangat baik jika bisa dibangun sebuah forum yang representatif untuk semua kelompok/golongan/distrik/suku. Salah satu kesulitan adalah ketersediaan forum (broker institution) yang representatif untuk semua. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan RKL sebelumnya adalah pengelolaan persepsi ini. Persepsi sebaiknya dipisahkan antara "kekuatiran" dan "harapan" karena metode dan substansi pengelolaannya berbeda. Juga tentang "sikap" (mendukung-menolak) harus dikelola secara khusus.		Pembentukan forum pemangku kepentingan (stakeholder) telah tercantum dalam Dokumen RKL-RPL, Sub Bab 1.4, "Pengelolaan Sosial Tangguh". Sebagai informasi, sebelumnya, forum stakeholder di tingkat Papua telah beberapa kali diadakan secara rutin, yaitu 2 tahun sekali.	**RKL-RPL Sub Bab 1.4**
6.	Substansi pengelolaan: RKL perlu *connected* dengan "SSDP", bahwa ada sebagian agenda RKL yang dikerjakan secara lebih luas dan komprehensif dalam "SSDP" (ISP). Maka dalam RKL perlu disebutkan aspek terkait yang dikelola dalam "SSDP".		Dalam Bab 3 Evaluasi Dampak, telah ditambahkan evaluasi mengenai harapan-harapan masyarakat di dalam bagian Persepsi Masyarakat. Identifikasi dan pengelolaan harapan-harapan masyarakat juga merupakan bagian dari persepsi masyarakat yang pengelolaan dan operasionalisasinya telah dituangkan dalam RKL/RPL, Sub Bab 1.4 "Pengelolaan Sosial Tangguh".	**RKL-RPL Sub Bab 1.4**
7.	Batas sosial: Tanggapan atas point 7.d., sangat baik, batas sosial tidak lagi memadai menggunakan kriteria DAV dan non-DAV		Batas wilayah studi telah dikaji ulang terkait dengan harapan-harapan masyarakat. Batas wilayah studi tersebut,	**ANDAL Sub Bab 1.4.1 Hal. I-**

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	merujuk kepada dampak negatif, melainkan sedapatnya mencakup luasan dampak positif berbentuk "harapan" yang realistik dapat diakomodasi. Untuk itu, program "pembangunan sosial" sebagai kegiatan yang terkait dengan RKL sosial, perlu disinggung pokok-pokoknya cakupan wilayah dan cakupan substansi kegiatannya (pointers). Karena banyak "tuntutan" masyarakat pada besaran dan sebaran "dampak positif", bukan negatif, sehingga cakupan luas wilayah program ini sangat penting disebutkan dalam RKL. Untuk itu jika dimungkinkan ada dua batas sosial: teknis (dampak negatif) dan non-teknis (untuk mengelola "harapan" dampak positif), sama halnya ada Ring 1, 2 dan 3.		serta pendekatan kajian dampak dan pengelolalan, secara teknis telah dimuat dalam dokumen ANDAL Bab 1. Terkait dengan pendekatan pengelolaan harapan masyarakat, ke depan akan menggunakan pendekatan Masyarakat Asli, yang khususnya berasal dari suku-suku Sebyar, Simuri, Irarutu, serta Petuanan Arguni, SekarPikpik, dan Wertuwar.	**209**
8.	**NON-TEKNIS:** Hal penting lain yang berkaitan dengan rencana pengembangan ini adalah "permintaan akan pembangunan lebih besar dan luas" dalam penyediaan prasarana dan sarana, seperti dari listrik, jalan, air bersih dll. Akan sangat baik jika bisa disepakati bahwa bersamaan dengan pengembangan ini pemrakarsa (dan SKK Migas) bersedia membangun infrastruktur dasar yang memang sangat diperlukan. Kesediaan untuk membangun fasilitas ini akan menunjukan kesungguhan pemrakarsa dalam turut pengembangan wilayah dan masyarakat setempat, sekaligus sebagai "*bargain*" terhadap tuntutan yang lebih luas.		Harapan-harapan masyarakat akan pembangunan yang lebih luas telah dicatat dan dikaji, dan selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama berada dalam kewenangan Tangguh LNG, kedua, berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah dan perusahaan lain, ketiga, berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Tangguh LNG berkewenangan untuk memberikan pemulihan pendapatan bagi nelayan yang terkena dampak sebagai akibat dari kegiatan. Sedangkan harapan masyarakat yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan KKKS lain adalah pembangunan/ perbaikan rumah di kampung-kampung di wilayah Teluk Bintuni, dan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat, adalah pembangunan jalan penghubung antar kabupaten.	
9.	Kesepakatan, permasalahan dan agenda sebelumnya yang belum terealisasi, sebagaimana tercermin dalam konsultasi publik dalam KA, kiranya perlu diselesaikan guna memperoleh dukungan sosial *(social legitimacy)*. Akan sangat baik permasalahan-permasalahan ini bisa selesai sebelum kegiatan konstruksi berjalan. Sidang Amdal tidak cukup membahas keseluruhan masalah ini.		Dalam konsultasi publik terdapat harapan-harapan masyarakat mengenai kesempatan kerja, beasiswa, kesehatan, listrik, perumahan, DBH, alokasi gas dan kompensasi adat. Identifikasi serta pengelolaan harapan-harapan tersebut telah dituangkan dalam komitmen-komiten yang telah menjadi bagian dari Pengelolaan Sosial Tangguh, dimana sebagian akan merupakan kontribusi	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
			Tangguh LNG, dan sebagian lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.	
10.	Kebijakan "*close fence*" dalam jangka panjang kiranya sulit dipertahankan. Untuk kegiatan/fasilitas yang Bandingkan terminal ini denan terminal sejenis di Matak (Kepri), Tg. Santan (Kaltim) atau lainnya. Hilangkan segregasi sosial-ekonomi-politik korporasi dengan masyarakat lokal. Kehadiran industri tidak menimbulkan enclave, justru perbanyak dan perkuat program dan kegiatan yang bisa mendorong integrasi dan kebersamaan antara korporasi dengan masyarakat lokal.		Strategi pengelolaan sosial Tangguh LNG ke depan akan menitikberatkan kepada penguatan kapasitas dan pemberian kesempatan ekonomi yang lebih luas kepada Masyarakat Asli, dan Papua pada umumnya. Dengan demikian, diharapkan Tangguh LNG akan memberikan kontribusi lebih banyak terhadap perekonomian daerah serta peningkatan kapasitas Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah sekitar Tangguh LNG.	

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 21 Maret 2014)

RAPAT EVALUASI PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN FAKFAK DAN KABUPATEN TELUK BINTUNI,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS RAPAT EVALUASI PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 21 Maret 2014

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
PAKAR				
A	**Dr. Ir. Andang Bachtiar MSc (Pakar Geologi)**			
1.	Model Konseptual Hidrogeologi Regional (Gambar II-27) menggambarkan struktur sinklin di permukaan sampai 2 lapisan ke bawah permukaan, sementara uraian di halaman II-32 menyebutkan bahwa proyek Tangguh terletak di daerah antiklin. Mohon diklarifikasi.		Antiklin yang disebut dalam paragraph 1 di halaman II-32 adalah merujuk kepada struktur antiklin yang terdapat disebelah baratdaya dari lokasi Tangguh LNG seperti yang tertera dalam peta geologi skala 1:250.000 dari Robinson dkk. Ini adalah struktur yang terletak diujung selatan dari penampang hidrogeologi regional dari Gambar II-27 dimana imbuhan terhadap batupasir Formasi Steenkool terindikasi. Referensi mengenai antiklin pada kalimat terkahir dari paragraf pertama tersebut berasal dari interpretasi LAPI ITB di tahun 2004, dimana telah diperbaharui berdasarkan data tambahan dan data yang lebih mutakhir yang ada. Kalimat ini akan dihapus. Perlu dicatat bahwa dari penampang seismik di lokasi dan di sekitar Tangguh LNG tidak terdapat petunjuk yang dapat menunjukkan adanya lipatan regional ataupun lipatan lokal di Formasi Steenkool.	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-34**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			Penampang seismik menunjukkan bahwa lapisan sedimen sampai kedalaman sekitar 500 m pada umumnya datar. Arah orientasi dari satuan ini dan juga ketebalan dari Formasi Steenkool didalam cekungan Bintuni menunjukkan pengendapan sedimen delta yang bersumber dari arah selatan, tenggara dan timur yang menipis kerah utara, baratlaut dan barat. Hal ini tampaknya merupakan pengaruh yang dominan terhadap struktur dan orientasi dari Formasi Steenkool.	
2.	Model Konseptual Hidrogeologi Regional (Gambar II-27) juga menggambarkan adanya "unconformity" antara lapisan paling atas dengan lapisan2 pasir lainnya di bagian bawah dar Steenkool Formation. Mohon diklarifikasi.		Gambar II-27 adalah sebuah penampang melintang hidrogeologi reginal konseptual yang dibuat untuk menunjukkan daerah imbuhan dan lepasan airtanah, arah aliran air tanah dan pengendapan tipe delta dari lapisan batulumpur dan batulempung yang saling menjemari. Tidak terdapat adanya "unconformity" di Formasi Steenkool. Hidrogeologi konseptual ini digunakan untuk menghasilkan batasan kondisi hidrogeologi (*hydrogeological boundary conditions)* untuk pemodelan numerik dan untuk memperoleh 19 lapisan (layer) dengan parameter-parameter akuifer dan akuiklud hasil interpolasi yang berdasarkan uji pemompaan pada Formasi Steenkool bagian atas di Saengga dan Tanah Merah Baru dan juga berdasarkan sifat-sifat geoteknik dari batulempung. Satu-satunya "unconformity" yang ditunjukkan di Gambar II-27 adalah yang terdapat dibagian paling bawah dari Formasi Steenkool dan memisahkan akuifer-akuifer dan akuitar-akuitar yang ada di fomasi ini dengan Formasi Kais dibawahnya. Tidak terdapat *unconformity* antara lapisan	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Gambar II-29 Hal. II-54**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			pasir dibagian atas dan bagian bawah di Gambar II-27. Gambar tersebut menunjukkan penipisan dan terputusnya satuan pasir dan lempung tertentu dari sedimen delta tersebut. Hal ini berdasarkan penjelaskan yang ditunjukkan di Lampiran 2 dari Buku Penjelasan dari Peta Geologi Lembar Fak Fak, Irian Jaya (Robinson dkk, 1990).	
3.	Model Konseptual Hidrogeologi Regional (Gambar II-27) menggambarkan adanya patahan di bawah permukaan sekitar area fasilitas Tangguh. Mohon dibahas khusus tentang adanya patahan (fault) ini. Bukti keberadaannya dari seismic juga mohon ditampilkan. Dan kalau memang benar fault itu hadir: maka perlu dilakukan "rerun" model hidrogeologi dengan kondisi batas adanya fault yang bisa jadi "conduit" bagi akuifer Lower Steenkool ke akuifer Upper Steenkool.		Tangguh LNG merujuk kepada Baynes Geologic Report tahun 2006 yang mendiskusikan isu patahan di lokasi Tangguh LNG. Sedimen-sedimen dari Cekungan Bintuni, seperti Formasi Steenkool yang berumur Miosen Akhir – Plistosen yang terdapat di lokasi Tangguh LNG, merupakan hasil erosi dari lipatan Lengguru di timur dan pegunungan Tamru di utara. Formasi Steenkool paling tebal didekat lipatan Lengguru. Struktur dari bagian atas Formasi Kais yang berumur Miosen didekat lapangan gas Wiriagar didalam Cekungan Bintuni menunjukkan bahwa kompresi yang berarah timurlaut-baratdaya yang berumur Pliosen menghasilkan patahan-patahan *en-echelon, small displacement left-lateral strike-slip* dengan arah orientasi yang sama, dan lipatan-lipatan yang berarah baratlaut-tenggara. Kompresi ini juga mengaktifkan kembali patahan-patahan *left-lateral strike*-slip berumur Oligosen yang berarah timur-barat. Patahan-patahan ini menunjukkan pergeseran maksimum 200 m setelah Miocene Displacement Pergeseran di patahan yang berarah timurlaut-baratdaya	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal. II-52**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			lebih kecil daripada pergeseran yang terjadi di patahan yang berarah timur-barat. Sedimen berumur Pliosen yang terlipat tertutup oleh sedimen berumur Plistosen yang datar yang menunjukkan bahwa deformasi tektonik sepanjang lipatan yang berarah baratlaut-tenggara di daerah Wiriagar didalam Cekungan Bintuni berhenti pada masa Plistosen. Dari interprestasi ini, dapat disimpulkan bahwa setiap patahan kontemporer di Cekungan Bintuni dan di daerah yang lebih luas lagi di Kepala Burung, merupakan patahan-patahan dengan ciri-ciri *small-displacement, left-lateral motion on east-west trending vertical strike-slip.* Proses pembentukan teluk di dalam Cekungan Bintuni membentuk Teluk Berau di sebelah barat dan Teluk Bintuni di sebelah timur (Gambar 2 – Geologi Lembar Fak Fa, skala 1:250.000). Pemetaan geologi regional telah mendalilkan suatu patahan dengan panjang 10 km berarah timur-barat 5 km sebelah selatan dari lokasi Tangguh LNG yang mendampingkan sedimen Tersier dan Kuarter (Gambar 2). Sedimen "batuan dasar" di lokasi Tangguh LNG membentuk sebagian dari Formasi Steenkool yang diperkirakan berumur Miosen sampai Plistosen. Sedimen ini diendapkan dalam lingkungan delta. Sedimen ini terdiri dari lempung, lumpur, *shell banks*, lensa pasir dan termasuk juga *channel sediments* yang terisi oleh pasir berlumpur dan kerikil halus. Sedimen Formasi Steenkool serupa dengan sedimen yang saat ini sedang terendapkan di Teluk Bintuni. Data-data seismik tersebut adalah jalur seismik 104, 105 dan 108 yang melintasi wilayah dekat rencana sumur uji. BP Subsurface Team telah melakukan kajian di tahun 2006 sebagai bagian dari studi potensi injeksi kembali air	**ANDAL Gambar II-21 s/d II-24 Hal. II-38 s/d II-41**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			produksi. Kajian lebih lanjut tentang kemiringan lapisan dari sedimen Formasi Steenkool di kedalaman 300 m dan 600 m telah juga dilakukan sebagai bagian dari studi AMDAL ini dengan menyadari bahwa tujuan dari survei seismik tersebut adalah untuk mengetahui adanya potensi reservoir gas dan kualitas data pada kedalaman di atas 500 m dari profil seismik sangat terbatas. Meskipun demikian, data seismik tersebut menunjukkan: • Terdapat potensi gas tepat dibawah lokasi Tangguh LNG di kedalaman, yang berasosiasi dengan patahan *strike-slip* berarah timur-barat • Terdapat beberapa patahan yang dapat diamati di kedalaman lebih dari 500 m, dimana oleh karena sistem structural yang dominan di daerah ini, kemungkinan merupakan pengaktifan kembali patahan *left-lateral strike slip* • Patahan-patahan yang terpetakan di kedalaman tersebut kemungkinan muncul dan kemungkinan juga tidak muncul ke permukaan. • Lapisan-lapisan di dan sekitar lokasi dengan kedalaman kurang dari 500 m adalah datar • Kemiringan lapisan meningkat di kedalaman yang kemungkinan disebabkan oleh *differential compaction* Informasi dari Tangguh Subsurface Exploration Team yang terlibat dalam interpretasi struktur dari daerah ini mengindikasikan tidak terdapat patahan yang muncul hingga ke permukaan di sekitar lokasi Tangguh LNG, tetapi	**ANDAL Sub Bab 2.1.5 Hal II-36**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			terdapat patahan yang menembus lapisan stratigrafi yang lebih muda di daerah Tofoi (sekitar 10 sampai 15 km sebelah selatan dari lokasi Tangguh LNG). Beberapa patahan yang menembus lapisan stratigrafi yang lebih muda juga dapat diamati di sebelah utara teluk dekat Wiriagar. Kesimpulan umum dari Tangguh Subsurface Exploration Team adalah bahwa patahan tidak muncul ke permukaan di daerah lokasi Tangguh LNG. Survey resistivitas dan penampang hidrogeologi dari *downhole electric* dan *gamma logs*, menunjukkan tidak terdapat pergeseran vertikal yang signifikan di Formasi Steenkool hingga kedalaman 300 m. Indikasi kemiringan lapisan di Formasi Steenkool di kedalaman kira-kira 100 m adalah $0{,}8^0$ dengan catatan bahwa jalur penampang seismik yang digunakan untuk menghitung kemiringan lapisan tidak tegak lurus terhadap kemiringan sebenarnya (*true dip*) dari sedimen. Gambar II-25 adalah interpretasi ulang data resistivitas dari survei yang dilakukan ITB setelah *slim hole drilling* dilakukan. Gambar II-26 menunjukkan interpretasi awal sebelum dilakukan slim hole drilling dan akan dihapus dari dokumen ANDAL Bab II Jalur seisimik di darat yang didiskusikan diatas ditunjukkan dalam Gambar II-20. Penampang seismik untuk jalur 104, 105 dan 108 yang merupakan jalur yang paling dekat dengan lokasi rencana sumur uji telah di produksi ulang. Ini merupakan tiga gambar yang akan dimasukkan kedalam	

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			bab 2.1.5. Patahan yang terinterpretasi di penampang ini ditunjukkan dalam Gambar II-27 oleh karena hal ini terkait dengan lokasi Tangguh LNG. Patahan ini tidak muncul ke permukaan seperti diuraikan diatas. Setiap patahan yang melalui batulempung dari Formasi Steenkool, akan lebih bertindak sebagai penghalang daripada bertindak sebagai *conduit*. Jika patahan bertindak sebagai *conduit*, hal ini akan menyebabkan mengalirnya air tanah asin dari Formasi Steenkool bagian bawah ke Formasi Steenkool bagian atas. Tidak teramati adanya bukti pengaliran vertikal keatas dari air tanah asin hingga kedalaman 300 m selama *slim hole drilling* atau survei resistivitas ITB. Namun demikian rencana sumur uji yang ditujukan untuk menyelidiki salinitas hingga ke kedalaman 400 m dan salinitas air tanah akan dipantau melalui uji pemompaan selama 10 hari. Jika terdapat batas patahan , hal itu akan teramati melalui penurunan muka air tanah selama berlangsungnya uji pemompaan 10 hari tersebut, dimana jarak ke batas patahan dari sumur uji dapat dihitung. Pada saat ini, dengan tiadanya bukti pasti akan adanya patahan yang bertindak sebagai *conduit* antara Formasi Steenkool bagian atas dan bagian bawah, kami beranggapan belum perlu melakukan revisi terhadap pemodelan konseptual dan pemodelan numerik. Tangguh LNG akan menambahkan penjelasan mengenai modeling pada Bab III ANDAL untuk mempertegas bahwa pemodelan air tanah telah dikembangkan berdasarkan asumsi yang konservatif tetapi belum memperhitungan	

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			potensi pengaruh dari patahan; Tangguh LNG akan menambahkan komitmen dalam dokumen RKL-RPL, Apabila hasil analisa dalam AMDAL menyimpulkan opsi penggunaan air tanah layak, sebagai bagian dari izin pemanfaatan air tanah sebelum air tanah digunakan dalam kegiatan di Tangguh LNG, Tangguh LNG akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengulang kembali pemodelan numerik berdasarkan data baru dari sumur test produksi dengan kedalaman 400m dan sumur pemantauan di dekatnya pada kedalaman 150m (Test pemompaan selama 10 hari) untuk memverifikasi laju alir pemompaan, parameter aquifer lainnya, pengaruh potensi dari adanya patahan dan salinitas dari aquifer sampai kedalaman 400m; b. Lokasi dari sumur-sumur produksi yang diusulkan, sumur-sumur pemantauan dan rancangan sumur akan ditentukan berdasarkan hasil pemodelan ini	
4.	Profil Hidrologi dan Korelasi Akuifer untuk Saengga – Tanah Merah BAru – Tangguh LNG (Gambar II-24) harus dilengkapi dengan data penguat berupa kemiringan batuan regional yg berasal dari data permukaan, sehingga korelasinya terjustifikasi.		Laporan akhir mengenai instalasi sumur masyarakat di Tanah Merah Baru dan Saengga, isntalasi sumur TW2 dan *slim hole drilling* SHD-1 dilampirkan untuk mendukung interpretasi terhadap penampang hidrogeologi. Data *gamma ray* dan *electric log (SP, resistivity)* dari akuifer di penampang ini juga memberikan hasil korelasi yang bagus. Data-data salinitas, kualitas air tanah dan muka air potensiometrik (m diatas permukaan laut) dari sumur-sumur di Saengga dan Tanah merah baru juga sebanding. Elevasi muka air di TW-2 pada waktu konstruksi adalah +2.54 m *msl* dan di Saengga adalah +2.48 m *msl*.	
5.	Peta salinitas Formasi Steenkoll (Gambar II-22) tidak sesuai dengan karakter Steenkol Fm yang merupakan endapan fluvial-delta yang menghadap ke barat. Sesuaikan dengan teksnya. Mohon		**Peta ini sudah dikeluarkan dari ANDAL bab 2**	

<table>
<tr><th>NO.</th><th>MASUKAN</th><th>HAL PERBAIKAN 10 MARET</th><th>TANGGAPAN</th><th>HAL</th></tr>
<tr><td></td><td>diklarifikasi.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Lampirkan data dan interpretasi seismic penguat konseptual model hidrogeologi</td><td></td><td>Setuju, kami akan menambahkan Peta Seismik Section 104, 105 dan 108 ke bagian rona awal ANDAL, Bab 2, sub Bab 2.1.5 dan merevisi Peta II-20 yang menunjukkan lokasi tersebut

Interpretasi tambahan mengenai kemiringan lapisan di Formasi Steenkool pada kedalaman 300 m dan 600 m diberikan oleh Tangguh LNG Subsurface Team dan diindikasikan pada penampang seismik jalur 104, 105 dan 108 (Gambar II-21, II-22 dan II-23). Ringkasnya, ini merupakan kemiringan lapisan yang diukur sepanjang jalur penampang (perlu dicatat bahwa ini bukan merupakan kemiringan lapisan sebenarnya oleh karena jurus dari sedimen tidak diketahui pasti) tetapi dipercaya merupakan representasi dari kemiringan lapisan-lapisan sedimen yang terdapat dibawah lokasi Tangguh LNG.

<table><tr><td>Jalur Seismik</td><td>Kemiringan Lapisan, kedalaman 300 m</td><td>Kemiringan Lapisan, kedalaman 600 m</td></tr><tr><td>104</td><td>0.5^0</td><td>0.4^0</td></tr><tr><td>105</td><td>0.7^0</td><td>1.2^0</td></tr><tr><td>108</td><td>1.4^0</td><td>1.2^0</td></tr></table></td><td>ANDAL
Sub Bab 2.1.5 Gambar II-21 s/d II-24 Hal. II-38 s/d II-41</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Lampirkan data2 yang menunjang asumsi penggunaan angka2 dalam table modeling input hidrogeologi (drawdown) dan geoteknik (subsidence).</td><td></td><td>Data yang menunjang pemodelan hidrogeologi dan geoteknik (amblesan) telah dimasukkan dalam Bab III (Desain Model Numerik).</td><td>ANDAL Sub Bab 3.3.1.6 Hal. III-172 sd III-177</td></tr>
</table>

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
B.	**Dr. Linawati Hardjito, MSc (Pakar Kualitas Air)**			
1.	<u>Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum):</u> Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan limbah cair dan limbah padat telah dikirimkan secara rutin kepada institusi terkait. <u>Komentar/Permintaan Perbaikan:</u> Mohon parameter kuci yang terkait dengan parameter yang melbihi baku mutu di badan air dan sedimen disajikan secara ringkas <u>Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum):</u> Air permukaan, air laut, dan air tanah tidak tercemar oleh aktifitas antropogenik, disebabkan oleh faktor alami <u>Komentar/Permintaan Perbaikan:</u> Mohon dijustifikasi dengan data karakter efluen, untuk memastikan bahwa tidak menambah beban lingkungan <u>Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum):</u> dalam evaluasi dampak hanya TSS, minyak dan lemak yang dibahas karena diasumsikan hanya parameter itu yang terkait dengan LNG <u>Komentar/Permintaan Perbaikan:</u> Kalau produce water, lumpur dan serbok bor isinya apa ? mohon disajikan		Penjelasan mengenai parameter kunci yang melebihi baku mutu telah ditambahkan di ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) sampai dengan 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut) Karakteristik efluen limbah cair dapat dilihat dalam ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini Berdasarkan hasil pemantauan yang telah secara rutin dilakukan sejak beberapa tahun termasuk pengambilan	**ANDAL Sub Bab 2.1.8.2 Hal. II-104, Sub Bab 2.1.8.3 Hal. II-114 dan Sub Bab 2.1.8.4 Hal. 140**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
	Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum): Tingginya nitrit pada DWG tidak terkait dengan kegiatan TNG karena jarak 4 km. Komentar/Permintaan Perbaikan: Mohon dikalrifikasi dengan data kualitas sumur pantau		sampel untuk AMDAL 2002 sebelum Tangguh mulai beroperasi, di beberapa lokasi di perarian teluk Bintuni termasuk lokasi yang jauh dari wilayah kegiatan Tangguh LNG, parameter yang melebihi baku mutu di badan air (Perairan Teluk Bintuni) adalah nitrat dan fosfat. Berdasarkan diskusi dengan pakar, walaupun semua aliran air limbah dari kegiatan Tangguh LNG tidak mengandung nitrat dan fosfat, untuk melihat korelasi dan memastikan bahwa keberadaan nitrat dan fosfat di perairan Teluk Bintuni tidak disebabkan oleh kegiatan Tangguh LNG, kami setuju untuk menambahkan parameter nitrat dan fosfat dalam pemantauan air limbah pada pipa keluaran ke laut seperti tercantum dalam RPL Bab 3.3. Lumpur bor terdiri dari KCl, barit dan bentonite. Pengambilan sampel dan analisa total logam akan dilakukan pada Serbuk Bor sesuai dengan ketentuan Izin Dumping lumpur dan serbuk bor ke Laut untuk kegiatan pengeboran yang akan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengembangan Tangguh LNG. Data kualitas sumur pantau dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 Kualitas Air Tanah	**RKL-RPL** **Sub Bab 3.3 Hal. III-28** **ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.2 Hal. II-104**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
2.	<u>Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum):</u> Rona lingkungan sejak tahun 1996 menunjukkan beberapa parameter logam pada sedimendasar teluk bintuni melebihi baku mutu. <u>Komentar/Permintaan Perbaikan:</u> Mohon dijustifikasi dengan karaketr serbok bor dan lumpur bor apakah mengandung bahan logam yang ada di sedimen.		Lumpur bor terdiri dari KCl, barit dan bentonite. Pengambilan sampel dan analisa total logam akan dilakukan pada Serbuk Bor sesuai dengan ketentuan Izin Dumping lumpur dan serbuk bor ke Laut untuk kegiatan pengeboran yang akan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengembangan Tangguh LNG.	
3.	<u>Tanggapan BP terhadap Masukan pada 28 Nov 2014 (Masukan No. 1-Umum):</u> Air limbah terkontaminasi hidrokarbon akan dialirkan ke CPI sebelum dibuang. <u>Komentar/Permintaan Perbaikan:</u> Ingat data rona kualitas air permukaan, air laut, air tanah telah tercemar Mohon karakter effluent CPI disajikan, bukan hanya minyak dan lemak tapi juga parameter lain yang telah melebihi baku mutu di linggkungan		Penjelasan mengenai karakter efluen CPI disajikan pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini. Parameter Nitrat dan Fosfat bukan merupakan karakteristik dari efluen CPI karena sumber air limbah CPI berasal dari kegiatan yang berpotensi terkontaminasi hidrokarbon.	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4** **Hal. II-140**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			Berdasarkan hasil pemantauan yang telah secara rutin dilakukan sejak beberapa tahun termasuk pengambilan sampel untuk AMDAL 2002 sebelum Tangguh mulai beroperasi, di beberapa lokasi di perarian teluk Bintuni termasuk lokasi yang jauh dari wilayah kegiatan Tangguh LNG, parameter yang melebihi baku mutu di badan air (Perairan Teluk Bintuni) adalah nitrat dan fosfat. Berdasarkan diskusi dengan pakar, walaupun semua aliran air limbah dari kegiatan Tangguh LNG tidak mengandung nitrat dan fosfat, untuk melihat korelasi dan memastikan bahwa keberadaan nitrat dan fosfat di perairan Teluk Bintuni tidak disebabkan oleh kegiatan Tangguh LNG, kami setuju untuk menambahkan parameter nitrat dan fosfat dalam pemantauan air limbah pada pipa keluaran ke laut seperti tercantum dalam RPL Bab 3.3.	
4.	Ingat data rona kualitas air laut sudah tercemar. Logam berat di sedimen melebihi referensi		Analisa konsentrasi total logam berat dilakukan pada air buangan terkontaminasi bahan kimia dan selama ini hasil analisa menunjukkan bahwa konsentrasi total logam berat jauh di bawah baku mutu yang berlaku (<5 mg/L) dan beberapa parameter logam berat nilainya di bawah *detection limit* seperti tercantum pada Sub Bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG Saat Ini	
5.	Yang dimodelkan hanya TSS dan minyak/lemak, justru parameter yang melebihi baku mutu tidak dimodelkan. Mohon klarifikasi, effluent yang masuk ke laut karakternya seperti apa ?		Berdasarkan kerangka acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH pada 24 Juli 2013 telah dilakukan evaluasi dampak untuk menetukan parameter yang merupakan	**ANDAL Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
	Ini penting, karena air laut, air tanah, air permukaan sudah tercemar dan juga sedimen.		dampak penting yang dikaji lebih lanjut di ANDAL adalah TSS dan Minyak Lemak untuk kualitas air. Hal tersebut berdasarkan karakteristik air limbah yang dikeluarkan dapat dilihat pada Sub Bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG Saat Ini	
7.	Selama ini tidak ada indikasi dampak abrasi oleh kegiatan Tangguh, abrasi disebabkan oleh kejadian alami Mohon dibantu dengan peneglolaan agar abrasi tidak berlanjut.		Deskripsi mengenai abrasi telah ditambahkan pada Bab 3 ANDAL. Berdasarkan data peta satelit tahun 1978 – 2013 terindikasi adanya abrasi yang terjadi alami sejak sebelum kegiatan Tangguh LNG dimulai. Peta satelit dan penjelasannya sudah ditambahkan dalam evaluasi dampak abrasi pada Bab 3 ANDAL	**ANDAL** **Sub Bab 3.4.1.1**
8.	Mohon dicermati, air laut sudah tercemar tapi yang dibahas hanya TSS dan minyak/lemak, bagaimana polutan lainnya? Ingat air tanah dan air permukaan, air laut sudah tercemar		Berdasarkan kerangka acuan ANDAL yang telah disepakati oleh KLH pada 24 Juli 2013 telah dilakukan evaluasi dampak untuk menetukan parameter yang merupakan dampak penting yang dikaji lebih lanjut di ANDAL adalah TSS dan Minyak Lemak untuk kualitas air. Hal tersebut berdasarkan karakteristik air limbah yang dikeluarkan dapat dilihat pada Sub Bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG Saat Ini	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
10.	Nitrit tidak dipersyaratkan olh aturan. Ingat air laut sudah tercemar, indikasi dari nitrit yang melebihi baku mutu • Nitrit penting dianalisa karena nitrit menrupakan produk intermediate nitrifikasi dan denitrifikasi dan bila terdeteksi mengindikasikan ada bahan barecun diperairan. • Air laut dan air tanah sudah tercemar. APakah ada kitannya dengan kegiatan ? Mohon disajaikan data untuk justifikasi.		• Nitrit tidak dianalisis oleh karena tidak dipersyaratkan oleh baku mutu air laut menurut Kepmen LH No 51 Tahun 2004. Dari hasil analisis kualitas air seperti tercantum pada Tabel II-35 Halaman II-119 dan Tabel II-36 Halaman II-123 yang melebihi baku mutu adalah NO3-N (nitrat) bukan nitrit (NO2-N). • Dalam air laut maupun ekosistem perairan secara umum senyawa nitrogen terdapat dalam bentuk nitrat, nitrit, amonia (NH3) serta gas nitrogen. Senyawa-senyawa ini berada dalam keseimbangan yang ditentukan oleh keberadaan bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi serta kandungan oksigen terlarut. Dalam perairan dengan kandungan oksigen terlarut yang tinggi (kondisi *oxic* atau aerob) maka proses nitrifikasi yang akan memegang peranan penting. Dalam kondisi ini bakteri nitrifikasi akan mengoksidasi amonia menjadi nitit dan selanjutnya nitrit menjadi nitrat. Sebaliknya pada perairan yang memiliki kandungan oksigen sangat rendah (kondisi *anoxic* atau anaerob), maka bakteri denitrifikasi yang akan memegang peranan penting. Dalam kondisi ini maka senyawa nitrat (NO3) akan direduksi oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrit (NO2) selanjutnya nitrit menjadi amonia (NH3) dan gas nitrogen (N2). • Kandungan oksigen terlarut di perairan Teluk Bintuni (Tabel II-35 Halaman II-117 dan Tabel II-36 Halaman II-126) berkisar antara 5 – 7 mg/L (syarat >5 mg/L) berarti kondisi perairan Teluk Bintuni tergolong bersifat	**Tabel II-36 Hal. II-123**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			oxic (aerob) oleh karena itu bakteri nitrifikasi lebih berperan dibandingkan bakteri denitfikikasi, sehingga yang proses yang berlangsung adalah amonia atau nitit dioksidasi oleh bakteri nitrifikasi menjadi senyawa nitrat (NO3), bukan sebaliknya. Kenyataan inilah yang berlangsung di perairan Teluk Bintuni. • Senyawa nitrogen dalam bentuk tereduksi (nitrit dan amonia) lebih toxic (beracun) terhadap biota akuatik debandingkan dalam bentuk teroksidasi penuh (nitrat). Hasil analisis kualitas air di Teluk Bintuni menunjukkan konsentrasi amonia (NH3-N) tidak terdeteksi (<0,02 mg/L), ini memberi indikasi bahwa di parairan Teluk Bintuni proses nitrifikasi lebih berperan dibandingkan proses denitrifikasi. • Berdasarkan literatur rata-rata konsentrasi Nitrogen (inorganik) dalam air laut adalah 0.8 mg/L (Korte, 1977), 0.5 mg/L (Lenntech B.V, 2014). Hasil analisis kandungan nirogen (terutama NO3-N) di Teluk Bintuni berkisar antara 0,045 – 0,228 mg/L (untuk perairan dekat pantai) dan 0,019 – 0,231 mg/L (perairan lepas pantai). Angka kisaran ini jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata kandungan N dalam air laut. Berdasarkan kandungan total N ini perairan Teluk Bintuni tergolong bersifat Oligotropik (N= 0,2 – 0,4 mg/L, Vollenweider, 1968). • Hasil analisis posfat (sebagai total P) di teluk Bintuni, menunjukkan konsentrasi terdeteksi berkisar antara <0,005- 0,128 mg/L. Berdasarkan kandungan total P ini,	

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			sifat perairan Teluk Bintuni berkisar antara Oligotropik (P = 0,005 – 0,010 mg/L) sampai Eutropik (P = 0,030 – 0,100 mg/L) (Vollenweider, 1968). • Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan: o Perairan Teluk Bintuni tergolong miskin hara air, dengan faktor pembatas kandungan nitrogen yang rendah. o Kandungan nitrogen (nitrat, nitrit dan amonia) tidak digunakan untuk menilai suatu perairan tercemar atau tidak, namun kandungan nitrogen demikian juga fosfor digunakan untuk menilai tingkat kesuburan suatu perairan (tingkat tropik atau eutrofikasi). o Proses nitrifikasi di Teluk Bintuni lebih berperan dibandingkan dengan denitrifikasi, terbukti dari kandungan nitrat jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan amonia dengan ciri kandungan oksigen yang tinggi (aerob). o Dari hasil analisis kualitas air (Tabel II-35 Halaman II-117 dan Tabel II-36 Halaman II-126) serta fakta dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan perairan Teluk Bintuni tidak tercemar.	
11.	Ada landfill. Mohon dibuatkan sumur pantau. Data sumur pantau belum ada. Apakah air tanah yang tercemar ada kaitannya dengan kegiatan. Mohon justifikasi.		Penjelasan mengenai beberapa parameter kualitas air tanah yang melebihi baku mutu telah ditambahkan pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 Kualitas Air Tanah	**ANDAL Sub Bab 2.1.8.2**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
	Tabel mana?			**Hal. II-104**
12.	TPS akan dirancang sesuai estimasi timbunan. Parameter air tanah yang tidak memeuhi baku mutu tidak terkait dengan kegiatan Tangguh. Ingat air tanah sudah tercemar Mohon data mana yang dipake?		TPS Limbah B3 dilengkapi dengan lantai kedap (beton), dinding, atap, dan sistem drainase tertutup sehingga tidak berpotensi mencemari air tanah. Sumur pantau terdapat di sekitar landfill limbah non-B3 dan hasil pemantauan sumur pantau tersedia pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 Kualitas Air Tanah.	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.2** **Hal. II-104**
13.	Limbah bacting plant. Sangat kecil dan dibuang ke lingkungan. Dimana? apakah air tanah yang tercemar dan air laut yang tercemar ada kaitannya dengan buangan ini ? mohon justifikasi. Beberapa parameter air tanah yang melebihi baku mutu tidak terakit dengan Tangguh. Mohon dijustifikasi dengan data. Skematik sumber limbah, badan penerima, karakter limbah, karakter badan air penerima denga parameter yang terdeteksi melebihi baku mutu		Volume air limbah dari batching plant sangat kecil (Tidak lebih dari 10m^3/hari dan sifatnya intermiten). Tidak ada keterkaitan antara limbah buangan batching plant dengan kualitas air tanah dan air laut. Penjelasan mengenai kualitas air tanah dan air laut yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) dan 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut). Penjelasan mengenai kualitas air tanah dan air laut yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) dan 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut). Skematik sumber air limbah dapat dilihat pada ANDAL Bab I sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG C7. Pengelolaan Limbah Cair (untuk Tahap Operasi)	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.2** **Hal. II-104** **ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.3** **Hal. II-114**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
14.	Kinerja pengoahan limbah berjalan dengan baik. Mohon dijustifikasi dengan data dengan parameter yang melebihi baku mutu di air permukaan, air tanah, sedimen		Penjelasan mengenai kualitas air tanah, air laut dan sedimen yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) dan 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut).	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.3** **Hal. II-114**
15.	Gambar 1.35. mohon disajikan kualitas effluent yang masuk ke laut. Hasil monitoring ? Ada PWT , dll. Ini penting karena air laut sudah tercemar. Hasil monitoring telah dilaporkan. Mohon parameter kunci yang melebihi baku mutu di rona disajaikan di dokumen ANDAL		Kualitas efluen yang masuk ke laut dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini. Penjelasan mengenai parameter kunci yang melebihi baku mutu di rona dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) sampai 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut).	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4** **Hal. II-140**
16.	Apakah air laut yang tercemar ada kaitannya dengan kegiatan eksisiting. Mohon justifikasi. Hasil pemantauan dilaporakan ke lembaga terkait. Mohon parameter kunci terkait dengan parameter kualitas air yang melebihi baku mutu disajikan		Penjelasan mengenai kualitas air laut yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut).	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.3** **Hal. II-114**
17.	Air terproduksi setelah diolah di PWT dibunag ke laut. Mohon data karakter deffluent PWT khususnya terkait dengan parameter yang melebihi baku mutu di sajikan untuk justifikasi bahwa parameter tidak terkait dengan discharge PWT		Karakter efluen PWT dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4** **Hal. II-140**
18.	Hasil pemantauan dilaporkan ke lembaga terkait. Hasil pemantauan parameter kunci terkait parameter kualitas ir yang melebihi baku mutu di sajikan		Penjelasan mengenai kualitas air tanah dan air laut yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.2**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			bab 2.1.8.2 (Kualitas Air Tanah) dan 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut). Karakter air limbah dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini	**Hal. II-104,** **Sub Bab 2.1.8.3 Hal. II-114, dan** **Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**
19.	Biocide direkomendasikan Ditjen MIGAS. Ada kemungkinan ini menyebabkan racun bagi bakeri nitrifier dan denitrifier . Air laut sudah tercemar. Jangan sampai menambah beban ke lingkungan		Material biocide yang digunakan telah disetujui oleh Ditjen MIGAS dan ramah lingkungan. Penjelasan mengenai parameter nitrat di kualitas air laut yang melebihi baku mutu dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.3 (Kualitas Air Laut)	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.3 Hal. II-114**
20.	Maksud saya di ratinaha ka nada (di air tanah akan ada) Fe, Pb, Mn yang melebihi baku mutu. Maka ditanaha perlu dianalisa parameter yang sama untuk menelusuri apakah berasal dari tanah yang masuk ke air.		• Hasil analisis air tanah (Tabel II-32, Halaman II-100) menunjukkan konsentrasi Fe, Pb dan Mn cukup rendah dan memenuhi baku mutu kualitas air Kelas I (PP No 82 tahun 2001). • Fe, Pb dan Mn pada tanah telah dianalisis yang hasilnya tercantum pada Tabel II-18, Halaman II-74. • Fe dan Mn bukan termasuk logam berat dan merupakan elemen utama pada mineral tanah, sehingga keberadaannya secara alami sangat *abundance* dalam tanah. • Persyaratan Fe dan Mn dalam baku mutu air Kelas I bukan karena faktor toksisitas (Fe dan Mn tidak toksik terhadap manusia) namun dari sisi estitika yaitu apabila	**ANDAL** **Tabel II-12 Hal. II-63**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			Fe dan Mn cukup tinggi dalam air maka air akan berbau amis serta dapat menimbulkan *stain* pada pakaian serta peralatan.	
21.	BOD dan COD karena sifat alami. Mohon dijustifikasi dengan effluent yang masuk ke badan air		Semua air limbah terolah dari kegiatan Tangguh LNG dibuang ke laut seperti yang dibahas dalam ANDAL Bab I sub Bab 1.2.3 Kegiatan Kilang LNG C7. Pengelolaan Limbah Cair (untuk Tahap Operasi) dan juga tercantum dalam diagram alir di RKL-RPL Bab 1.3 Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	**RKL-RPL Sub Sub Bab 1.3.1**
22.	Mohon data kemungkinan source polutan dibahas, skematik diagram, karakter effluent yang masuk ke badan air		Penjelasan dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.2 sampai dengan 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini.	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.2 Hal. II-104 dan** **Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**
23.	Effluent dari IPAL parameter kunci mohon disajikan		Karakter parameter kunci dari IPAL dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**
24.	COD dan nitrit tidak dipersyaratkan oleh peraturan. Yang lebih tepat untuk melihat peran mikroba adalah BOD betul. Tapi ternyata Nitrat, Pospat terakumulasi di badan air, artinya mikroba tidak bekerja optimal yang mungkin disebabkan oleh bahan non biodegradable yang bisa dikur melalui COD, nitri adalah produk antara yang tidak diinginkan. Jadi COD dan nitrit perlu diukur untuk menjawab masalah ini.		• Oleh karena COD dan Nitrit tidak dipersyaratkan pada baku mutu kualitas air laut menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan pengukurun terhadap kedua parameter ini. • Analisis COD dapat terganggu oleh adanya klorida dalam dalam jumlah >15 mg/L, kita ketahui bahwa air laut mengandung klorida 19.000 mg/L. Dengan demikian sangat sulit menghilangkan pengaruh gangguan klorida untuk analisis COD dalam air laut.	

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			Pakar pencemaran telah sepakat COD tidak digunakan lagi sebagai indikator jumlah kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi bahan organik dalam air laut, oleh karena alasan inilah maka COD tidak tercantum dalam Kepmen LH No 51 Tahun 2004. • TOC (total organik carbon) telah dikaji (namun belum terdapat kesepakatan untuk dimasukan dalam peraturan) sebagai pengganti COD. Analisis TOC dilakukan tidak melibatkan reaksi kimia namun secara pirogenik sehingga semua gangguan yang mungkin timbul dari tingginya konstituen (antara lain Cl, Na, Ca, Mg, SO4 dan lainya) dalam air laut dapat ditiadakan. • BOD digunakan sebagai indikator untuk melihat berapa besar keberadaan bahan organik (*biodegradable*) dalam air yang dapat dioksidasi oleh mikroba, sehingga dapat diperhitungkan jumlah oksigen yang akan terdeplesi dalam air. Peran mikroba dalam air ditentukan oleh banyak faktor. • Penjelasan mengenai nitrit dan fosfat selengkapnya dapat dilihat pada jawaban No 10.	
25	Mohon buangan PWT effluent, lumpur bor, serbok bor dianalisa As, Ni untuk melihat keterkitan.		Karakter efluen dari PWT dapat dilihat pada ANDAL Bab II sub bab 2.1.8.4 Kualitas Air Limbah Kegiatan Operasi Tangguh LNG saat ini. Lumpur bor terdiri dari KCl, barit dan bentonite. Pengambilan sampel dan analisa total logam akan dilakukan	**ANDAL** **Sub Bab 2.1.8.4 Hal. II-140**

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
			pada Serbuk Bor sesuai dengan ketentuan Izin Dumping lumpur dan Serbuk bor ke Laut untuk kegiatan pengeboran yang akan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengembangan Tangguh LNG.	
	Yusuf Riski (Staf Asdep Kehati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, KLH)			
1	Apakah terdapat data series yang lengkap untuk flora yang dilindungi?		Terdapat data series lengkap untuk daftar flora dilindungi. Data akan dimasukan ke dalam lampiran.	**ANDAL Lampiran II.7**
2	Pada Tabel II-74, halaman II-216 disebutkan mengenai anggrek kuning tetapi tidak disebutkan mengenai anggrek kuning pada penjelasan sebelumnya.		Anggrek kuning ditemukan pada wilayah studi dengan status dilindungi pemerintah Indonesia, tidak terdaftar menurut IUCN, masuk dalam Apendix II CITES. Anggrek kuning memiliki INP yang kecil sehingga keberadaannya hanya dikemukakan pada Tabel II-74 dan tidak dikemukakan pada teks maupun tabel kerapatan jenis tumbuhan dan tabel INP. Untuk melengkapi temuan anggrek kuning dari hasil survai, data keseluruhan analisis vegetasi akan dicantumkan pada lampiran.	**ANDAL Lampiran II.7**
3	Sub-bab 2.2.1.1: Indeks kelimpahan dan INP disebutkan idem, tetapi seharusnya berbeda		Dalam sub-bab 2.2.2.1: tidak terdapat penggunaan istilah kelimpahan atau indeks kelimpahan. Semua data analisis vegetasi menggunakan INP.	
4	Rentang angka index penting (bukan hanya centang, minus, positif)		Semua INP telah ditulis dalam angka. Centang (√), minus (-) dan positif (+) hanya digunakan untuk menyatakan ditemukannya fauna (mamalia, burung dan herpetofauna) berdasarkan lokasi dan tahun survai.	
5	NDVI: data bisa ditampilkan, terutama citra apakah ada *stripping*		Citra landsat 7 yang digunakan pada bagian wilayah studi	

NO.	MASUKAN	HAL PERBAIKAN 10 MARET	TANGGAPAN	HAL
	atau tidak		tidak terdapat *stripping*.	
6	Analisis vegetasi menggunakan sampling dengan plot permanen Pak Ary: titik pengamatan harus tetap, jika berubah maka perlu ada penjelasan		Survei flora dan faunayang dilakukan pada tahun 2002, 2007 dan 2009 dilakukan bukan pada plot permanen. Tangguh LNG akan menetapkanplot permanen untuk pemantauan flora dan fauna pada area Tangguh LNG.	

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS

(Tanggal : 4 Juli 2014)

BAPEDALDA PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL
RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG

DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

SKKMIGAS
Wisma Mulia Lantai 35
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710

BP Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520

KOMPILASI MASUKAN TERTULIS DARI BAPEDALDA PROVINSI PAPUA BARAT
DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL RENCANA KEGIATAN TERPADU PROYEK PENGEMBANGAN TANGGUH LNG
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

Tanggal: 4 Juli 2014

NO.	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
1.	Detailkan Kualifikasi Tenaga kerja yang diperlukan sehingga akan diketahui dapat di isi oleh tenaga kerja lokal atau harus dari luar	1-19	Hal 1-18 merujuk ke dokumen RKL-RPL Hal 1-51	Sudah dijelaskan dalam dokumen RKL-RPL dalam Tabel I-6 dan Tabel I-7 pada sub bab 1.4.2.3 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial.	Dokumen RKL-RPL Hal. I – 51 dan Hal I - 52
2.	Mengapa tidak digunakan Water Based Mud (WBM) untuk semua tahap Pengeboran? Uraikan kondisi yang mengakibatkan Syinthetic Based Mud (SBM) atau Synthetic Oil Based Mud (SOBM)	1-28	1-30 belum menjelaskan apa itu SBM dan SOBM	Secara umum, penggunaan SBM/OBM akan diperlukan untuk membantu melancarkan proses pengeboran terkait dengan kendala-kendala khusus pada formasi tertentu. Penggunaan SBM/OBM ini dirasa akan menguntungkan baik dari sisi teknis maupun lingkungan, karena selain dapat mempercepat proses pengeboran, juga dapat meminimalkan jumlah lumpur bor yang dibuang ke laut, karena *base-oil* lumpur SBM/OBM dapat digunakan kembali. Penjelasan teknis mengenai alasan penggunaan SBM/OBM telah ditambahkan pada ANDAL sub bab 1.2.1 Kegiatan Eksploitasi Gas bagian B4 Pengeboran Sumur Gas.	Dokumen ANDAL Hal I - 25

NO.	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
3.	Materi hasill galian parit untuk pipa dekat pantai akan dibuang kelepas pantai, dimana? Akan lebih baik digunakan metode Horizontal Directional Drilling (HDD) seperti tercantum pada hal l-62.	1-68	Sudah dibahas dalam Hal l-66	Sudah dibahas dalam dokumen ANDAL sub bab 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas bagian B5 Pemasangan Pipa Dekat Pantai	Dokumen ANDAL Hal I - 65
4.	Perjelas air untuk Hidrotest di ambil dari air tanah di darat adalah air tanah dangkal atau air tanah dala, jika di ambil dari luar Tangguh LNG artinya dari mana?	1-74	1-72. Belum menjelaskan sumber air untuk hidrotest.	Pipa penyalur yang akan dipasang memakai *Corrossion Resistance Alloy* (CRA) material, sehingga air yang dipakai untuk keperluan *pre-commissioning* dan *hydrotest* pipa perlu dipastikan memenuhi spesifikasi yang sesuai untuk menjaga integritas pipa. Untuk itu perlu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas dari air yang akan dipakai. Pada saat ini kemungkinan dapat dipakai air yang didatangkan dari luar Tangguh (seperti Sorong, Fak Fak) ataupun memakai air tanah jika memenuhi spesifikasi air yang disyaratkan. Namun demikian, keputusan final mengenai sumber air hidrotest akan diambil setelah melalui kajian yang lebih seksama dan mengikuti perkembangan proyek.	Dokumen ANDAL Hal I - 75
5.	Jika air Hidrotest dibuang ke lepas pantai harus dikaji pengaruh bahan kimia terhadap biota air terutama BIOLIDE sehingga lebih baik diolah terlebih dahulu di darat baru dibuang ke laut seperti yang tertulis pada point 2 atau buangan hidrotest disimpan untuk dipakai kembali pada uji jaringan pipa lain.	1-78	Telah dijelaskan pada hal l-76	Sudah dibahas pada sub bab 1.2.2 Kegiatan Transmisi Gas bagian B8 Pembuangan Air *Hydrotest*	Dokumen ANDAL Hal I - 71

NO.	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
6.	Matriks Dampak Penting Hipotetik : Dampak terhadap mamalia laut pisahkan dengan nekton.	1-180	Belum memisahkan mamalia laut dengan nekton. Hal l-197	Untuk prakiraan dampak dari seluruh jenis nekton difokuskan pada mamalia laut, karena biota laut jenis ini peka terhadap gangguan oleh kegiatan manusia. Matriks Dampak Penting Hipotetik dalam dokumen ANDAL ini sesuai yang tercantum dalam dokumen KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH (Surat Keputusan Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan No. 30 Tahun 2013)	
7	Matrik Dampak Penting Hipotetik kegiatan Transmisi Gas : Mengapa tidak ada dampak penting Hipotetik untuk kegiatan pemasangan pipa mendekati pantai? Padahal jika digunakan metode pembuatan parit menyebabkan KEKERUHAN padahal dalam dasar ekologi kualitas air laut pemasangan pipa termasuk sumber utama dampak penurunan kualitas air laut (Hal I-202)	1-184	Belum merupakan dampak penting hipotetik (matrik DPH) Hal I-204	Penentuan sifat dampak (penting atau tidak penting) dari setiap parameter dalam komponen lingkungan telah dibahas dalam dokumen KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH sesuai Surat Keputusan Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan No. 30 Tahun 2013	
8	Kenaikan Konsentrasi minyak dan lemak karena pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut harus dikelola/tidak boleh diabaikan jika digunakan Syntetic Oil Base Mud.	IV-2	Dibahas pada table IV.2 Hal IV-2	Hal ini telah dibahas pada dokumen ANDAL Bab IV Evaluasi Secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan	Dokumen ANDAL Tabel IV-2, Hal IV-2
9	Kenaikan TSS pada saat pemasangan pipa tidak dapat diabaikan.	IV-3	Dibahas pada table IV.2 Hal IV-3	Hal ini telah dibahas pada dokumen ANDAL Bab IV Evaluasi Secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan	Dokumen ANDAL Tabel IV-2, Hal IV-3

NO.	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
10	1. Penurunan kualitas air laut -Sumber dampak Pengelolaan limbah cair, parameter terkena dampak ikuti Permen No. 4 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi untuk kilang. 2. Kenaikan nilai COD tidak dapat diabaikan karena selama operasi. 3. Tambahkan parameter minyak dan lemak.	IV-4	1. Belum semuanya dibahas dalam hal IV-4 2. Masih diabaikan pada hal IV-4 3. Belum ditambahkan	Penentuan parameter dan sifat dampak (penting atau tidak penting) dari setiap parameter dalam komponen lingkungan telah dibahas dalam dokumen KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH sesuai Surat Keputusan Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan No. 30 Tahun 2013	
11	1. Kegiatan Transmisi Migas : Penurunan kualitas air laut karena pemasangan pipa harus menjadi Dampak Penting dan dikelola. 2. Kegiatan Kilang Minyak: Penurunan kualitas air laut karena pengelolaan limbah cair kilang harus menjadi Dampak Penting dan dikelola.	IV-10	Belum dibahas	Penentuan sifat dampak (penting atau tidak penting) dari setiap parameter dalam komponen lingkungan telah dibahas dalam dokumen KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH sesuai Surat Keputusan Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan No. 30 Tahun 2013	
12	Biota Perairan air laut : Pisahkan antara Nekton dan Mamalia laut	IV-11	Belum dipisahkan	Untuk prakiraan dampak dari seluruh jenis nekton difokuskan pada mamalia laut, karena biota laut jenis ini peka terhadap gangguan oleh kegiatan manusia. Matriks Dampak Penting Hipotetik dalam dokumen ANDAL ini sesuai yang tercantum dalam dokumen KA ANDAL yang telah disepakati oleh KLH (Surat Keputusan Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan No. 30 Tahun 2013)	

NO.	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
13	Tidak mengikuti sistematika Permen 16 Tahun 2012 Arahan pengelolaan masuk ke bagian bab IV evaluasi dampak	V-1	Sudah (Hal V-1)	Dokumen ANDAL ini telah mengikuti sistematika Permen LH No. 16 Tahun 2012. Arahan Pengelolaan Lingkungan telah diuraikan dalam dokumen ANDAL Bab V	Dokumen ANDAL Hal V-1
14	Tidak mengikuti sistematika Permen 16 Tahun 2012. Pernyataan kelayakan lingkungan hidup masuk ke Bab IV evaluasi dampak.	Vl-1	Hanya membahas 9 kriteria kelayakan dari 10 kriteria	Dokumen ANDAL ini telah mengikuti sistematika Permen LH No. 16 Tahun 2012. Pernyataan Kelayakan Lingkungan telah diperbaiki dan dibahas dalam dokumen ANDAL Bab VI yang mencakup 10 kriteria sesuai Permen LH No. 16 Tahun 2012.	Dokumen ANDAL Hal VI - 1
15	1. Kriteria kelayakan lingkungan menurut Permen 16 Tahun 2012 ada 10 butir pada tulisan ini hanya 9, lengkapi. 2. Kriteria No. 6 : uraikan manfaat positif apa yang dapat diterima masyarakat sekitar. 3. Kriteria No. 7 : Uraikan lebih detail mengenai species kunci, ecological importance, economic importance, dan scientific importance yang ada pada batas wilayah studi dan buatlah pernyataan apakah kegiatan ini akan mengganggu atau tidak.	Vl-3	1. Sudah 10 kriteria	1. Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup sudah diperbaiki berdasarkan pertimbangan terhadap 10 kriteria kelayakan. 2. Manfaat positif rencana kegiatan Proyek sudah ditambahkan 3. Penjelasan untuk kriteria ini telah ditambahkan	Dokumen ANDAL Bab VI

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
Selfiana Isir, SHut, MSi					
TAHAP PRA KONSTRUKSI					
1.	**Tertulis di RKL** Tahap Pra Konstruksi dituliskan TIDAK ADA DAMPAK PENTING, sehingga tidak ada pengelolaan apapun **Tertulis di RPL** Tahap Pra Konstruksi dituliskan ADA PEMANTAUAN TERHADAP DAMPAK PENTING: 1. Penurunan Kualitas Udara 2. Penurunan kualitas air laut 3. Penurunan kualitas sedimen 4. Penurunan kelimpahan keanekaragaman biota perairan laut 5. Tumpahan material dan limbah B3 menyebabkim kontaminasi air laut 6. Limbah B3 menyebabkan kontaminasi tanah 7. Timbulan limbah padat dan non B3 DAMPAK SOSIAL : 1. Persepsi masyarakat 2. Aksessibilitas transportasi dan gangguan wilayah perikanan masyarakat	II-1 III-1 III-8	Pada Tahap Pra Konstruksi Hal II-1 dan III-1 memang tidak ada dampak penting hipotetik (sudah diperbaiki)	Pada Tahap Pra Konstruksi tidak ada dampak penting hipotetik. DAMPAK SOSIAL Pengelolaan dan Pemantauan untuk jenis dampak; 1. Persepsi Masyarakat 2. Aksesibilitas Transportasi dan Gangguan Wilayah Perikanan Masyarakat 3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan Usaha telah dituliskan di dalam matriks dokumen RKL dan RPL	Dokumen RKL-RPL Hal. II-1, II-11, II-20 dan II-47 1. Persepsi Masyarakat : Halaman II-5 (Rencana Pengelolaan Lingkungan); Halaman III-9 (Rencana Pemantauan Lingkungan) 2. Aksesibilitas Transportasi dan Gangguan Wilayah Perikanan Masyarakat: Halaman II-5 (Rencana Pengelolaan Lingkungan); Halaman III-9 (Rencana Pemantauan Lingkungan) 3. Ketenagakerjaan : Halaman II-4 (Rencana Pengelolaan Lingkungan); Halaman III-8 (Rencana Pemantauan Lingkungan)

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	3. Ketenaga kerjaan dan kesempatan usaha Seharusnya antara RKL dan RPL HARUS SINKRON. Kalau ada Pemantauan SEHARUSNYA ada pengelolaan. MOHON DISEMPURNAKAN !				
TAHAP KONSTRUKSI					
2	**Tertulis di RKL** Dampak Sosial (Tahap Konstruksi): Dampak yg harus dikelola: Ketenaga kerjaan. Bentuk pengelolaan: Kontraktor akan mempekerjakan …….. dalam jumlah terbatas Kontraktor melakukan penerimaan tenaga kerja dengan prioritas masyarakat asli setempat Setelah berakhirnya kontrak kontraktor memulangkan para pekerja **Tertulis di RPL** Dampak Sosial (Tahap Konstruksi): Bentuk pemantauan → Metode pengumpulan data: Observasi langsung, Analisa statistik korelasional dan deskriptif	II-4 III-15			

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Seharusnya: 1. Pemrakarsa (BP) memberikan Pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal terkait jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat sekitar. 2. Rekruitmen dilakukan sebelum tahap konstruksi dimulai 3. Penanggung jawab memberikan kesempatan kerja harus pemrakarsa (BP) bukan Kontraktor 4. Pemantauan bukan dengan observasi tetapi harus ada bukti tertulis 5. Lokasi Pemantauan bukan di kampung-kampung tetapi di tempat bekerja		1. Pengelolahan masih tetap dilakukan oleh kontraktor dan bukan pemrakarsa (II-4) 2. Perekrutan tenaga kerja masih dilaksanakan pada masa kontruksi (III-17) (tidak di rubah) 3. Pemantauan dengan observasi langsung dilanjutkan analisis statistic korelasi (sudah diperbaiki) dan deskripsti (III-17) 4. Lokasi pemantauan sudah ditambahkan (III-17) (sudah diperbaiki)	1. Telah diperbaiki di dalam dokumen RKL-RPL. 2. Perekrutan tenaga kerja akan dilakukan sebelum dan pada masa konstruksi dimulai. Strategi penerimaan tenaga kerja akan selesai sebelum masa konstruksi dimulai. 3. Sudah dijelaskan dalam dokumen RKL-RPL Bab III Rencana Pemantauan Lingkungan. 4. Sudah dijelaskan dalam dokumen RKL-RPL Bab III Rencana Pemantauan Lingkungan.	Dokumen RKL-RPL Bab II Rencana Pengelolaan Lingkungan Tabel II-1 Halaman II-4 dan III-1 Dokumen RKL-RPL Bab III Rencana Pemantauan Lingkungan Tabel II-1 Halaman III-17
3	**Tertulis di RKL** Dampak yg dikelola: Pertumbuhan bisnis lokal, Bentuk Pengelolaan: "Mengoptimalkan penyerapan produk-produk lokal dari sektor pertanian dan perikanan" **Tertulis di RPL** Bentuk pemantauan → Metode pengumpulan data: Observasi langsung, Analisa statistik korelasional dan deskriptif	II-5 III-16			

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Seharusnya pemrakarsa menuliskan dg jelas: 1. Bisnis lokal apa saja yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar ketika tahap konstruksi (untuk sumber dampak Pembangunan anjungan) 2. Menyebutkan produk lokal apa saja yang dapat dimanfaatkan ketika kegiatan ini (pembangunan anjungan dan transportasi laut) 3. Pemantauan jangan hanya dengan metode Observasi, tapi ada bukti tertulis 4. Pemantauan bukan di kampung kampung tetapi di tempat Proyek pembangunan anjungan (fasilitas darat dan laut)		1. Belum menjelaskan jenis bisnis lokal apa saja yang perlu dikembangkan pada tahap konstruksi dan masa pembangunan anjungan dant ransportasi laut (III-17) 2. Pemantauan dengan observasi langsung dilanjutkan analisis statistik korelasi dan deskripsti (III-17) (sudah diperbaiki) 3. Lokasi pemantauan sudah ditambahkan (III-17)	1. Pada masa konstruksi Kilang LNG, pembangunan anjungan dan transportasi laut maka sebagian kebutuhan pangan akan dipasok dari kampung-kampung sekitar Tangguh LNG. Para kontraktor juga akan di dorong untuk melibatkan koperasi dari kampung-kampung sekitar Tangguh LNG untuk memasok barang-barang kebutuhan sehari-hari para pekerja.	Dokumen RKL dan RPL Sub Bab 1.4 Pengelolaan Sosial Tangguh Sub Bab 1.4.2.5 Kewirausahaan Papua Halaman I-58.
4.	**Tertulis di RKL** Dampak yg dikelola: Gangguan jalur transportasi laut dan wilayah tangkapan ikan Bentuk pengelolaan: • Memberikan informasi kegiatan pembangunan anjungan kepada nelayan • Memasang rambu laut di sekitar kegiatan • Koordinasi dengan syahbandar Bintuni dan Babo Periode pengelolaan: Selama tahap konstruksi	II-5			

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Tertulis di RPL Bentuk pemantauan → Metode pengumpulan data: Observasi langsung, Analisa statistik korelasional dan deskriptif Seharusnya pemrakarsamenuliskan: Yang bertanggung jawab bukan kontraktor tetapi Pemrakarsa. Kontraktor yang melaksanakan sesuai kewajiban dari pemrakarsa. Sebab yang tanda tangan dokumen adalah pemrakarsa bukan kontraktor.	III-16	Yang bertanggungjawab sudah diganti dengan Tangguh LNG bagian kosntruksi (III-18)	Hal ini sudah diperbaiki di dalam dokumen RKL-RPL	Dokumen RKL-RPL Bab II (RKL) dan Bab III (RPL)
5.	**Tertulis di RKL** Dampak yg dikelola Persepsi masyarakat akibat dari berbagai kegiatan Bentuk Pengelolaan: • Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan proyek • Melakukan kunjungan konsultasi • Melibatkan tebga kerja dari kampung-kampung sekitar • Mengoptimalkan hasil produksi lokal • Menjalankan prosedur keluhan bagi masyarakat	II-5			

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Tertulis di RPL Bentuk pemantauan → Metode pengumpulan data: Observasi langsung, Analisa statistik korelasional dan deskriptif Pengelolaan yang akan dilakukan belum jelas. lni masih bahasa normatif. Seharusnya dituliskan LANGKAH NYATA APA SAJA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK TERSEBUT Langkah konkret hendaklah sesuai dengan Hasil Konsultasi Publik. Pemantauan yang akan dilakukan belum dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan. Pemantauan sifatnya masih normatif, hanya dapat untuk ditulis menjadi laporan, tapi tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pengelolaan	II-16	1. Pengelolahan masih belum menjelaskan langkah konkrit seperti hasil konsultasi publik (II-5) (tidak ada uraian mengenai konsultasi publik) 2. Pemantauan masih normative yaitu observasi dan analisis korelatif dandeskriptif (III-18)	1. Uraian mengenai konsultasi publik telah dicantumkan di dalam dokumen KA-ANDAL yang telah disetujui oleh KLH pada tahun 2013. 2. Metode pemantauan yang tertulis di dalam matriks RPL dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG merupakan metode pemantauan yang dilakukan selama ini pada masa operasi Tangguh LNG. Misalnya saja untuk melihat dampak persepsi masyarakat akan dampak tenaga kerja, Tangguh LNG menyediakan prosedur keluhan, sebagai pengelolaan terhadap dampaknya, untuk kemudian keluhan-keluhan yang disampaikan, baik itu oleh masyarakat dan tenaga kerja lokal, untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Selain itu, dokumentasi dari data-data keluhan pun akan sangat berguna.	
TAHAP OPERASI KEGIATAN KILANG LNG					
6.	**Tertulis di RKL** Halaman II-27 dst: Ada dampak yang perlu dikelola: 1. Kebisingan 2. Kenaikan laju air sungai 3. Penurunan kualitas air permukaan 4. Gangguan terhadap sumur air	II-27 dst	Semua bentuk pengelolahan dampak pada tahap operasi (II-28 - 33) tidak ada bentuk pemantauannya (III-19) RKL :tahap operasi ada pemantauan dan pengelolaan dan di RPL tahap operasi kosong.	Semua bentuk pengelolaan dampak pada tahap operasi (Halaman II-28 sampai dengan II-33) telah tercantum bentuk pemantauannya (Halaman III-30) di dalam matriks RKL-RPL dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	Dokumen RKL –RPL Halaman II-32 (RKL) dan III-30 (RPL)

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	penduduk 5. Gangguan terhadap flora fauna terestrial Pengelolaan tidak dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat **Tertulis di RPL** Pemantauan tidak dikaitkan keluhan masyarakat terhadap dampak tersebut. Dampak yang tertulis di kolom kiri tsb., pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat langsung maupun tidak langsung. Kebisingan akan mengganggu kenyamanan Kenaikan laju air sungai menganggu transportasi masyarakat Penurunan kualitas air permukaan akan menyebabkan keresahan masyarakat Gangguan terhadap air sumur penduduk, tidak jelas penduduk yang mana Gangguan flora fauna, akan mempengaruhi pola berburu binatang yang telah dilakukan masyarakat selama ini PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK TSB., HARUS JUGA MELIPUTI			Bentuk pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak keluhan masyarakat terkait kebisingan, kenaikan laju air sungai, penurunan kualitas air permukaan, gangguan terhadap flora fauna penduduk, dan gangguan terhadapa flora fauna terestrial telah dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL. Namun dalam dokumen, dampak sosial atau dampak langsung terhadap masyarakat disusun dengan menggunakan parameter sosial, seperti demografi, gangguan transportasi dan kegiatan perikanan, ketenagakerjaan, perubahan bisnis lokal, perubahan tingkat pendapatan, persepsi masyarakat, asmilasi dan akulturasi, pendidikan, marginalisasi, dan kesehatan masyarakat. Dampak sosial yang dikelola merupakan dampak holistik atau keseluruhan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan pada setiap tahapan, misalnya pada masa operasi, dampak sosial yang dikaji merupakan hasil dari seluruh kegiatan pada tahap operasi, tidak dijabarkan pada masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, keluhan masyarakat akan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kegiatan Tangguh LNG dikaji dalam jenis dampak Persepsi Masyarakat dan Ketegangan	

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	KEPENTINGAN MASYARAKAT			Sosial terkait dampak dari kegiatan Tangguh LNG . bentuk pengelolaan dan pemantauan untuk dampak ini telah tercantum di dalam matriks RKL-RPL dokumen AMDAL Pengembangan Tangguh LNG.	
7.	**Tertulis di RKL** Dampak Demografi yang disebabkan oleh kesempatan kerja yang menimbulkan sindrom cawan madu, Pengelolaan yang akan dilakukan: Kajian tentang migrasi Bekerjasama dengan LSM Bekerja sama dengan Lembaga Pembangunan **Tertulis di RPL** Pemantauan yang akan dilakukan dengan metode Survei, sensus dan observasi. Analisis akan dilakukan dengan metode statistik korelasi dan deskriptif. Waktu pemantauan akan dilakukan pada TAHAP KONSTRUKSI KILANG ???? Pengelolaan yang dilakukan sifatnya kalimat normatif. Belum menunjukkan langkah nyata. Seharusnya tertulis langkah nyata apa saja yang akan dilakukan Kegiatan ini adalah tahap Operasi. Mengapa Pemantauan akan dilakukan pada Tahap Konstruksi	II-32 III-33	1. Bentuk pengelolahan telah diubah (II-31) 2. Waktu pemantauan telah diubah menjadi tahap operasi kilang (III-37) 3. Metode pemantauan masih tetap (III-37)	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup, waktu pemantauan dan metode pemantauan telah diperbaiki	Dokumen RKL-RPL halaman II-31 dan halaman II-37

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Kilang LNG ? Metode pemantauan yang akan digunakan hanya untuk keperluan laporan. SEHARUSNYA PEMANTAUAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGEVALUASI HASIL KINERJA PENGELOLAAN. Jadi pemantauan harus diubah				
8.	**Tertulis di RKL** Dampak Ketenaga Kerjaan, Sumber dampak kesempatan kerja masyarakat asli Pengelolaan: 1. Kontraktor akan membangun strategi 2. Kontraktor melakukan penerimaan tenaga kerja dengan memberikan prioritas kepada masyarakat asli 3. Kontraktor mengembangkan karyawan asli 4. Setelah berakhirnya kontrak kontraktor memulangkannya **Tertulis di RPL** Dampak ketenaga kerjaan Pemantauan akan dilakukan dengan: Bentuk pemantauan → Metode pengumpulan data: Observasi langsung, Analisa statistik korelasional dan deskriptif	II-32 III-33	1. Bentuk pengelolahan dampak ketenaga kerjaan telah diubah (II-30) 2. Tahapan rekruitmen tenaga kerja masih pada masa operasi (II-30) 3. Metode pemantauan masih tetap observasi dan survey serta analisis korelasi dan deskriptif (III-38)	1. Penerimaan tenaga kerja juga akan terus dilakukan pada tahap operasi, namun demikian dengan tingkat dan jenis keterampilan untuk mpengoperasian Kilang LNG. 2. Penerimaan tenaga kerja juga akan terus dilakukan pada tahap operasi, namun demikian dengan tingkat dan jenis keterampilan untuk mpengoperasian Kilang LNG. 3. Pemantauan dilakukan dengan melakukan metode observasi, survei, dan analisis data yang didapat dari data-data rencana pengelolaan. Misalnya, bentuk pemantauan dari pengelolaan dimana Tangguh akan meminta kontraktornya untuk mempekerjakan pekerja di tingkat *unskilled / low skilled* dalam jumlah terbatas, untuk bekerja sebagai tim *Community Relation* yang diprioritaskan kepada masyarakat asli di Teluk Bintuni dan Fakfak , maka bentuk pemantauan dari pengelolaan ini adalah dengan	Dokumen RKL-RPL Sub Bab 1.4. Pengelolaan Sosial Tangguh; Sub Bab 1.4.2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua dan Hubungan Industrial halaman I-44

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	SEHARUSNYA: Sebelum dilakukan rekruitmen karyawan untuk keperluan Tahap Operasi, dilakukan Pelatihan kepada masyarakat sekitar agar supaya masyarakat sekitar dapat bersaing dalam seleksi. Pelatihan hendaklah dilakukan jauh sebelum rekruitmen dilakukan (awal tahap konstruksi). Dalam dokumen ANDAL seharusnya sudah ada data, bagaimana kondisi masyarakat untuk menyongsong kesempatan kerja tsb. Pemantauan yang dilakukan HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN Seharusnya: Pemantauan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pengelolaan.			observasi langsung kelapangan untuk melihat keberadaan tenaga kerja yang diwajibkan, serta analisis data tenaga kerja tersebut. Metode pemantauan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yang selama ini telah dilakukan, masa operasi, seperti dengan dilakukan survei dan sensus penduduk, observasi tenaga kerja Tangguh LNG, serta adanya kartu keluhan.	
9.	**Tertulis di RKL** Pengelolaan terhadap dampak SOSIAL EKONOMI BUDAYA terhadap Dampak yang ditimbulkan, semuanya hanya normatif. Belum ada dan belum nampak LANGKAH NYATA APA YANG AKAN DILAKUKAN	II-33 dst	1. Bentuk pengelolahan terhadap sosial budaya masih normative dan belum ada langkah konkrit 2. Metode pemantauan masih tetap dengan survey, observasi langsung dan analisis. 3. Seharusnya metode pemantauan setiap dampak berbeda sesuai dengan sumber dan jenis dampak yang di timbulkan.	1. Pengelolaan terhadap aspek Sosial Budaya secara spesifik terdapat dalam Dokumen RKL Sub Bab 1.4. Pengelolaan Sosial Tangguh, antara lain • Adanya kegiatan-kegiatan penguatan seni budaya masyarakat asli sebagai upaya penguatan idenditas • Adanya kegiatan promosi seni budaya masyarakat asli • Adanya revitalisasi nilai adat	Dokumen RKL –RPL AMDAL Pengembangan Tangguh LNG Halaman II-1 dan III-1

No	MASUKAN (DOKUMEN APRIL 2014)	HAL	MASUKAN (DOKUMEN JULI 2014)	TANGGAPAN	HALAMAN (FINAL)
	Tertulis di RPL Pemantauan terhadap dampak SOSIAL EKONOMI BUDAYA terhadap Pengelolaan yang dilakukan (MOHON DIINGAT, FUNGSI PEMANTAUAN ADALAH UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PENGELOLAAN). Pemantauan hanya untuk keperluan Laporan pandangan mata terhadap situasi yang terjadi. SEHARUSNYA: Semua pengelolaan terhadap dampak sosial ekonomi budaya, menunjukkan langkah nyata , langkah kongkrit, agar dapat diopearisonalkan. Untuk kesempatan kerja harus ada Pelatihan sebelum Rekruitmen. Untuk Terbukanya Bisnis baru, Pemrakarsa (BP) HARUS memberikan Pelatihan, BUKAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR, tapi tanggung jawab Pemrakarsa Pemantauan: Harus operasional dan hasil pemantauan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja pengelolaan	III-34		yang dapat memberikan fungsi sosial dan ekonomi • Terbangunnya pusat kesenian dan kebudayaan Suku Sebyar, Simuri, Irarutu, dan Petuanan Arguni 2. Metode pemantauan sosial dituliskan menggunakan pendekatan umum karena secara operasional akan mengikuti metode analysis soaial yang terus berkembang secara terus menerus, sehingga pendekatan secara umum tersebut dapat mengakomodasi pemantauan kinerja dalam jangka panjang (>30 tahun).	